



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2025



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2024



DAFTAR ISI

DAF	TAR IS	SI	DI-i
DAFTAR TABEL		DT-i	
DAF	TAR G	AMBAR	DG-i
			110
BAB		DAHULUAN	
1.1	Latai	r Belakang	I-1
1.2	Dasa	ar Hukum Penyusunan	I-3
1.3	Hubu	ungan Antar Dokumen	I-6
1.4	Maks	sud dan Tujuan	I-7
1.5	Siste	matika Penyusunan RKPD Tahun 2025	I-7
BAB	II GAI	MBARAN UMUM KONDISI DAERAH	
2.1	Kondi	si Umum kondisi Daerah	II-1
	2.1.1	Aspek Geografi dan Demografi	II-1
	2.1.2	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-38
	2.1.3	Aspek Pelayanan Umum	II-64
	2.1.4	Aspek Daya Saing Daerah	II-83
2.2	Evalu	asi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun	
	Berjal	an dan Realisasi RPJMD	II-110
	2.2.1	Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023	II-110
	2.2.2	Evaluasi Pelaksanaan Program, Tujuan RKPD sampai Tahun	
		2023	II-115
	2.2.3	Evaluasi Pelaksaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun	
		2023	II-114
	2.2.4	Evaluasi Penerapan Standar SPM	II-219
2.3	Perma	asalahan Pembangunan Daerah	II-294
	2.3.1	Permasalahan Daerah yang dihubungkan dengan Prioritas dan	
		Sasaran Pembangunan Daerah	II-295
	2.3.2	Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah	
		Daerah	II-299

BAB	III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	
3.1	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-1
	3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2023 dan Perkiraan Tahun 2024	III-6
	3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2024 dan	
	Perkiraan Tahun 2025	III-10
	3.1.3 Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi	III-20
3.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-34
	3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan	III-36
	3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Keuangan	III-36
	3.3.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah	III-44
	3.3.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	III-48
BAB	IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025	5
BAB 4.1	IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025 Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV-1
4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV-1
4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Prioritas Pembangunan Daerah	IV-1 IV-10
4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Prioritas Pembangunan Daerah 4.2.1 Prioritas Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2025	IV-1 IV-10 IV-10
4.1 4.2	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Prioritas Pembangunan Daerah 4.2.1 Prioritas Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2025	IV-1 IV-10 IV-10
4.1 4.2	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Prioritas Pembangunan Daerah 4.2.1 Prioritas Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2025 4.2.2 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 Sinkronisasi dan Keterkaitan Antara Prioritas Pembangunan Provinsi	IV-1 IV-10 IV-10 IV-13
4.1 4.2 4.3	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Prioritas Pembangunan Daerah 4.2.1 Prioritas Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2025 4.2.2 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 Sinkronisasi dan Keterkaitan Antara Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2025	IV-1 IV-10 IV-10 IV-13

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BAB VIII PENUTUP



DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Luas Wilayah dan Persentase Luas Wilayah Provinsi	14
	Sulawesi Tengah menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023	II-2
Tabel 2.2	Jumlah Kecamatan. Desa/Kelurahan di Provinsi Sulawesi	
	Tengah menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023	II-3
Tabel 2.3	Luas Kecamatan pada dalam Wilayah Sungai (WS) Lintas	
	Provinsi di Sulawesi Tengah	II-8
Tabel 2.4	Pembagian DAS di WS Palu Lariang	
	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Tengah	II-9
Tabel 2.5	Wilayah Sungai Strategis Nasional di Provinsi Sulawesi	
	Tengah (WS Parigi-Poso)	II-10
Tabel 2.6	Pembagian DAS di WS Parigi Poso	II-12
Tabel 2.7	Wilayah Danau Kawasan Lindung di Provinsi Sulawesi	
	Tengah	II-13
Tabel 2.8	Distribusi Kelas Jasa Ekosistem Penyediaan Air di Provinsi	
	Sulawesi Tengah	II-15
Tabel 2.9	Distribusi Kelas Jasa Ekosistem Pengaturan Air di Provinsi	
	Sulawesi Tengah	II-17
Tabel 2.10	Ketersediaan dan Kebutuhan Air Provinsi Sulawesi Tengah	
	Tahun 2022	II-17
Tabel 2.11	Status Daya Dukungan dan Daya Tampung Air Tahun 2021	II-18
Tabel 2.12	Pola Ruang Provinsi Sulawesi Tengah	II-21
Tabel 2.13	Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Padi Menurut	
	Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 dan	
	2023	II-23
Tabel 2.14	Produksi Padi dan Beras Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi	
	Sulawesi Tengah Tahun 2022 dan 2023	II-24
Tabel 2.15	Daerah Irigasi, Luas Areal Sawah Potensial dan Fungsional	
	Menurut Kabupaten/Kota Kewenangan dan tanggungjawab	
	Provinsi Sulawesi Tengah (Ha) Tahun 2023	II-25
Tabel 2.16	Luas Panen Tanaman Sayuran Menurut Kabupaten/Kota dan	
	Jenis Tanaman di Provinsi Sulawesi Tengah (ha) Tahun 2023.	II-26

		Halamai
Tabel 2.17	Luas Areal Tanaman Perkebunan Menurut Jenis Tanaman di	
	Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023	II-27
Tabel 2.18	Potensi dan Sebaran Pertambangan di Sulawesi Tengah	II-31
Tabel 2.19	Jumlah, Laju Pertumbuhan, Tingkat Kepadatan dan Rasio	
	Jenis Kelamin Penduduk Provinsi Sulawesi Tengah Tahun	
	2023	II-37
Tabel 2.20	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis	
	Kelamin Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 (Jiwa)	II-37
Tabel 2.21	Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Sulawesi Tengah Menurut	
	Pengeluaran Triwulan III Tahun 2023 (persen)	II-41
Tabel 2.22	Nilai PDRB Perkapita Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023	II-43
Tabel 2.23	IHK dan Inflasi gabungan Dua Kota di Provinsi Sulawesi	
	Tengah Menurut Kelompok Pengeluaran (2018=100)	11-44
Tabel 2.24	Andil Inflasi Komoditas Gabungan Dua Kota di Provinsi	
	Sulawesi Tengah bulan Desember 2023	II-45
Tabel 2.25	Perbandingan IHK dan Inflasi Kota Palu, Kota Luwuk, serta	
	Gabungan Dua Kota Menurut Kelompok Pengeluaran	
	(2018=100) Desember 2023	II-46
Tabel 2.26	Distribusi Pengeluaran Penduduk Indonesia, Maret 2022,	
	September 2022, dan Maret 2023 (Persentase)	II-49
Tabel 2.27	Gini Ratio Menurut Provinsi Maret 2022, September 2022,	
	dan Maret 2023	II-49
Tabel 2.28	Kemiskinan Maret 2023 Menurut Provinsi Di Sulawesi	II-52
Tabel 2.29	Tingkat Kemiskinan Ekstrem Kabupaten/Kota di Provinsi	
	Sulawesi Tengah Tahun 2021 – 2023	II-54
Tabel 2.30	Jumlah Fasilitas Sekolah Menurut Kabupaten/Kota dan	
	Tingkat Pendidikan di Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023	II-61
Tabel 2.31	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka	
	Partisipasi Murni (APM)Menurut Jenjang Pendidikan serta	
	Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023	II-62
Tabel 2.32	Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Kesehatan di	
	Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023	II-64

		Halaman
Tabel 2.33	Capaian Kesejahteraan Keluarga di Provinsi Sulawesi	
	Tengah Tahun 2023	II-64
Tabel 2.34	Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Kesehatan Provinsi	
	Sulawesi Tengah, Tahun 2022	II-67
Tabel 2.35	Capaian Indikator Sasaran Keluarga Berencana dan	
	Keluarga Sasaran di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023	II-68
Tabel 2.36	Banyaknya Koperasi menurut Status Keaktifan Koperasi dan	
	Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah, 2022	II-69
Tabel 2.37	Perkembangan Jumlah Koperasi UKM non BPR/LKM UKM	
	(Unit) dan BPR/LKM (Unit) di Provinsi Sulawesi Tengah	
	Tahun 2020-2022	II-70
Tabel 2.38	Capaian Sasaran Indikator Kinerja PD Bidang Koperasi, UKM	
	Tahun 2022	II-70
Tabel 2.39	Capaian Sasaran Indikator Kinerja PD Bidang Pemberdayaan	
	Masyarakat dan Desa Tahun 2022	II-71
Tabel 2.40	Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Bidang Seni	
	Budaya, Pemuda dan Olahraga di Provinsi Sulawesi Tengah	
	Tahun 2023	II-72
Tabel 2.41	Perkembangan Indikator Sasaran Renstra PD di Provinsi	
	Sulawesi Tengah Tahun 2022	II-72
Tabel 2.42	Perkembangan Indikator Perangkat Daerah Provinsi	
	Sulawesi Tengah, Tahun 2023	II-78
Tabel 2.43	Perkembangan Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan, Risiko	
	Penduduk Terkena Kejahatan per 100.000 Penduduk dan	
	Persentase Penyelesaian Kejahatan, Tahun 2022-2023	II-79
Tabel 2.44	Perkembangan Jumlah Perkara Tindak Pidana Umum yang	
	Masuk dan diselesaikan pada Kejaksaan Sulawesi Tengah,	
	Tahun 2023	II-80
Tabel 2.45	Perkembangan Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi yang	
	Masuk dan diselesaikan pada Kejaksaan Sulawesi Tengah	
	Tahun 2023	II-80
Tabel 2.46	Perkembangan Kunjungan Wisatawan Di Provinsi Sulawesi	

		Halamar
	Tengah, Tahun 2019 – 2023	II-81
Tabel 2.47	Capaian Sasaran Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan	
	Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022	II-82
Tabel 2.48	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Perkapita Menurut	
	Kelompok Komoditas Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-	
	2023 (Rupiah)	II-85
Tabel 2.49	Rata-rata Konsumsi kalori per Kapita Sehari di Daerah	
	Perkotaan (kalori) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019-	
	2023	II-86
Tabel 2.50	Rata-rata Konsumsi Kalori per Kapita Sehari di Daerah	
	Perdesaan menurut Kelompok Komoditas Makanan di	
	Provinsi Sulawesi Tengah (kalori), 2019 –2023	II-86
Tabel 2.51	Indeks Harga yang Dibayar Petani Menurut Kelompok	
	Pengeluaran, November 2023 - Desember 2023	II-91
Tabel 2.52	Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) Menurut	
	Subsektor dan Perkembangannya Nov 2023- Des 2023	II-92
Tabel 2.53	Progres RTRW Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah Tahun	
	2023	II-93
Tabel 2.54	Matriks Realisasi Program Lima Tahunan RTRW Provinsi	
	Sulawesi Tengah Tahun 2023-2042 (Perwujudan Rencana	
	Struktur Ruang)	II-94
Tabel 2.55	Matriks Realisasi Program Lima Tahunan RTRW Provinsi	
	Sulawesi Tengah Tahun 2023-2042 (Perwujudan Rencana	
	Pola Ruang)	II-95
Tabel 2.56	Matriks Realisasi Program Lima Tahunan RTRW Provinsi	
	Sulawesi Tengah Tahun 2023-2042 (Perwujudan Rencana	
	Strategis)	II-98
Tabel 2.57	Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Tengah	II-100
Tabel 2.58	Panjang Jalan Menurut Kabupaten/Kota dan Kondisi Jalan di	
	Provinsi Sulawesi Tengah (Km) Tahun 2023	II-101
Tabel 2.59	Daerah Irigasi, Luas Areal Sawah Potensial dan Fungsional	
	yang Menjadi Kewenangan dan tanggung Jawab Pusat (ha),	

		Halamaı
	Tahun 2023	II-102
Tabel 2.60	Daerah Irigasi, Luas Areal Sawah Potensial dan Fungsional	
	yang Menjadi Kewenangan dan tanggung Jawab Provinsi	
	(ha), Tahun 2023	II-103
Tabel 2.61	Jaringan Jalan Strategis Nasional Di Sulawesi Tengah	II-103
Tabel 2.62	Jaringan Prasarana Transportasi (Terminal Penumpang) di	
	Provinsi Sulawesi Tengah	II-104
Tabel 2.63	Jaringan Prasarana Jembatan Timbang Di Sulawesi Tengah	II-104
Tabel 2.64	Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Di Sulawesi	
	Tengah	II-105
Tabel 2.65	Jaringan Penyeberangan Lintas Provinsi Di Sulawesi Tengah.	II-105
Tabel 2.66	Sarana Pelabuhan Laut Utama/Nasional di Sulawesi Tengah	II-106
Tabel 2.67	Sarana Bandar Udara Menurut Jenisnya Di Sulawesi Tengah.	II-107
Tabel 2.68	Perkembangan Indikator Perangkat Daerah Provinsi	
	Sulawesi Tengah, Tahun 2022	II-108
Tabel 2.69	Realisasi APBD Per Urusan/OPD Provinsi Sulawesi Tengah	
	TA. 2023	II-110
Tabel 2.71	Capaian Bidang SPM Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah	
	Tahun 2023	II-218
Tabel 2.72	Capaian SPM Bidang Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah	
	Tahun 2023	II-221
Tabel 2.73	Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi	
	Tengah Tahun 2023	II-224
Tabel 2.74	Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Provinsi Sulawesi	
	Tengah Tahun 2023	II-226
Tabel 2.75	Capaian SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	
	serta Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) Provinsi	II-228
	Sulawesi Tengah Tahun 2023	
Tabel 2.76	Capaian SPM Bidang Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun	
	2023	II-230
Tabel 2.77	Jumlah dan Persentase Keterlibatan Perempuan Pada DPRD	
	Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2019-2024	II-257

		Halaman
Tabel 2.78	Persentase Keterlibatan Perempuan Sulawesi Tengah Dalam	
	Parlemen Tingkat Pusat, Parlemen Daerah Maupun	II-257
	Pemerintah Daerah	
Tabel 2.79	Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Sulawesi Tengah Tahun 2022	II-277
Tabel 2.80	Timbulan Sampah Sulawesi Tengah Tahun 2022	II-279
Tabel 2.81	Status Kemajuan Desa Provinsi Sulawesi Tengah Tahun	II-306
	2021-2023	
Tabel 3.1	Laju dan Sumber Perumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi	
	Tengah Tahun 2023	III-2
Tabel 3.2	Tingkat Kemiskinan Ekstrem Kabupaten/Kota di Provinsi	
	Sulawesi Tengah Tahun 2021-2023	III-9
Tabel 3.3	Kesesuaian Arahan Kebijakan Ekonomi Nasional dan Arahan	
	Kebijakan Ekonomi Sulawesi Tengah Tahun 2025	III-27
Tabel 3.4	Target Indikator Makro Ekonomi Sulawesi Tengah Tahun	
	2025	III-34
Tabel 3.5	Realisasi Target/Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi	
	Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2023-2025	III-40
Tabel 3.6	Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Sulawesi	
	Tengah Tahun Anggaran 2023-2025	III-45
Tabel 3.7	Proyeksi/Target Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan	
	Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	III-49
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi	
	Sulawesi Tengah Tahun 2025	IV-2
Tabel 4.2	Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah dalam RKPD	
	Tahun 2025 dengan Prioritas Nasional RKP Tahun 2025	IV-20
Tabel 4.3	Keterkaitan Isu Strategis pada RKPD Provinsi Provinsi	
	Sulawesi Tengah Tahun 2025	IV-22
Tabel 4.4	Keterkaitan Permasalahan Pembangunan Daerah dengan	
	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025	IV-25
Tabel 4.5	Persandingan antara Sasaran Pembangunan Daerah RKPD	
	Tahun 2025 dengan Sasaran Prioritas Nasional RKP Tahun	
	2025	IV-43

		Halaman
Tabel 4.6	Penyelarasan Indikator Sasaran Prioritas Nasional dan	
	Indikator Sasaran Prioritas Daerah	IV-55
Tabel 4.7	Dukungan Program Prioritas Daerah terhadap Kegiatan	
	Prioritas Nasional pada PN1	IV-60
Tabel 4.8	Dukungan Program Prioitas Daerah terhadap dukungan	
	Program Nasional Prioritas pada PN2	IV-61
Tabel 4.9	Dukungan Program Prioitas Daerah terhadap Dukungan	
	Program Nasional Prioritas pada PN3	IV-62
Tabel 4.10	Dukungan Program Prioritas Daerah terhadap Kegiatan	
	Prioritas Nasional pada PN4	IV-64
Tabel 4.11	Dukungan Program Prioritas Daerah terhadap Kegiatan	
	Prioritas Nasional pada PN5	IV-66
Tabel 4.12	Dukungan Program Prioritas Daerah terhadap Kegiatan	
	Prioritas Nasional pada PN6	IV-67
Tabel 4.13	Dukungan Program Prioritas Daerah terhadap Kegiatan	
	Prioritas Nasional pada PN7	IV-68
Tabel 4.14	Dukungan Program Prioritas Daerah terhadap Kegiatan	
	Prioritas Nasional pada PN8	IV-69
Tabel 4.15	Persandingan Indikator Sasaran Pembangunan Nasional	
	Tahun 2025 dan Indikator Sasaran Pembangunan Daerah	
	Tahun 2025	IV-71
Tabel 5.1	Target Indikator Makro Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi	
	Tengah	IV-19
Tabel 6.1	Pagu Indikatif Rencana Program Prioritas yang disertai	
	Kebutuhan Pendanaan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun	
	2025	VI-2
Tabel 7.1	Penetapan Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah	
	Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025	VII-1
Tabel 7.2	Penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) Terhadap Capaian	
	Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Pemerintah	
	Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025	\/II-2



DAFTAR GAMBAR

		Halama
Gambar 1.1	Hubungan antar Dokumen Perencanaan	I-6
Gambar 2.1	Peta Pola Ruang Provinsi Sulawesi Tengah	II-2
Gambar 2.2	Peta Struktur Ruang Provinsi Sulawesi Tengah	II-3
Gambar 2.3	Perkembangan Indeks Resiko Bencana (IRB) Provinsi Sulawesi	
	Tengah Periode 2018 - 2022	II-5
Gambar 2.4	Peta Multi Bahaya di Provinsi Sulawesi Tengah	II-6
Gambar 2.5	Peta Multi Kerentanan Di Provinsi Sulawesi	
	Tengah	II-7
Gambar 2.6	Kondisi Curah Hujan di Kota Palu Menurut Bulan Tahun	
	2023	II-19
Gambar 2.7	Kelembaban Udara Minimum, Maksimum dan Rata-Rata Kota Palu	
	Menurut Bulan Tahun 2023	II-19
Gambar 2.8	Kecepatan Angin Kota Palu Menurut Bulan Tahun	
	2023	II-20
Gambar 2.9	Kecepatan Angin Maksimum dan Rata-Rata Kota Palu Menurut Bulan	
	Tahun 2023	II-21
Gambar 2.10	Sebaran Cadangan (Ton Bijih Basah) dan Izin Aktif Komoditas Nikel di	
	Indonesia Tahun 2021	II-30
Gambar 2.11	Peta Rawan Bencana Gempa Bumi Provinsi Sulawesi	
	Tengah	II-34
Gambar 2.12	Peta Rawan Bencana Longsor Provinsi Sulawesi	
	Tengah	II-36
Gambar 2.13	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017-	
	2023	II-39
Gambar 2.14	Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi	
	Tengah Tahun 2023	II-40
Gambar 2.15	Kontribusi 5 Sektor Terbesar Dalam PDRB Provinsi Sulawesi Tengah	
	Tahun 2023	II-41
Gambar 2.16	Laju Inflasi Gabungan Dua Kota di Provinsi Sulawesi	
	Tengah	II-45
Gambar 2.17	Perkembangan Gini Ratio, September 2018–Maret 2023	II-48

		Halama
Gambar 2.18	Capaian Indeks Gini Sulteng dan Nasional 2018 – 2023	II-50
Gambar 2.19	Perkembangan Nilai Indeks Williamson Sulawesi Tengah Tahun 2017 – 2021	II-51
Gambar 2.20	Perkembangan Jumlah dam Persentase Penduduk Miskin Provinsi Sulawesi Tengah, Maret 2019 – Maret	
Gambar 2.21	2023	II-52
	Wilayah, pada Maret 2019 – Maret 2023	II-53
Gambar 2.22	Perkembangan IPM Provinsi Sulawesi Tengah Long Form (LF) Tahun 2020-2023	II-56
Gambar 2.23	Perkembangan Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 – 2023 (tahun)	II-57
Gambar 2.24		01
0 1 005	(tahun)	II-58
Gambar 2.25	Pengeluaran Ril Per Kapita (yang disesuaikan) Sulawesi Tengah, Tahun 2020 – 2023 (Rp000)	II-59
Gambar 2.26	, ,	11.60
Gambar 2.27	Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2022-2023 Angka Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun	II-60
Gambar 2.28	2019-2023 Angka Harapan Lama Sekolah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun	II-65
Gailibai 2.20	2019-2023	II-66
Gambar 2.29	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Jenis Kelamin Agustus 2020-Agustus 2023 (%)	II-73
Gambar 2.30		11-7-3
Gambar 2.31	2023Status Pekerjaan Utama dan Proporsi Pekerja Formal dan	II-74
24.11241 2.01	Informal	II-75
Gambar 2.32	Penyerapan Tenaga Kerja yang bekerja Menurut Lapangan	

		Halama
	Pekerjaan Agustus 2023	II-76
Gambar 2.33	Perkembangan Rasio Lulusan SO/S1/S2/S3 Per 10.000 Penduduk	
Gambar 2.34	di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017 – 2022 (data 2023)	II-76
	Usia Produktif di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018 –	
0	2022	II-77
Gambar 2.35	Perkembangan Produksi Total Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017– 2022	II-84
Gambar 2.36	Perkembangan NTP dan Indeks Harga Diterima/Dibayar Petani	
	November 2022- November 2023	II-88
Gambar 2.37	Anggaran dan Realisasi Keuangan Perangkat Daerah Provinsi	
	Sulawesi Tengah Tahun 2023	II-114
Gambar 2.38		
	Bidang Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun	11 447
Cambar 2 30	2023Perbandingan Target RKPD terhadap Indikator Kinerja Program	II-117
Gairibai 2.59	(Outcome) Bidang Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun	
	2023	II-118
Gambar 2.40	Perbandingan Target terhadap Capaian Indikator Kinerja Utama Urusan Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun	
	2023	II-119
Gambar 2.41	Perbandingan Target RKPD terhadap Indikator Kinerja Program	
	(Outcome) Urusan Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun	
	2023	II-120
Gambar 2.42	Perbandingan Target terhadap Capaian Indikator Kinerja Utama	
	Urusan Kesehatan Pada Rumah Sakit Undata Provinsi Sulawesi	
	Tengah Tahun 2023	II-121
Gambar 2.43	Perbandingan Target RKPD terhadap Indikator Kinerja Program	
	(Outcome) Pada Rumah Sakit Undata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023	II-122
Gambar 2.44	Perbandingan Target terhadap Capaian Indikator Kinerja Utama	11 122

		Halama
	Urusan Kesehatan Pada Rumah Sakit Madani Provinsi Sulawesi	
	Tengah Tahun 2023	II-123
Gambar 2.45	Perbandingan Target RKPD terhadap Indikator Kinerja Program	
	(Outcome) Pada Rumah Sakit Madani Provinsi Sulawesi Tengah	
	Tahun 2023	II-123
Gambar 2.46	Perbandingan Target terhadap Capaian Indikator Kinerja Utama	
	Urusan Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah	
	Tahun 2023	II-124
Gambar 2.47	Perbandingan Target RKPD terhadap Indikator Kinerja Program	
	(Outcome) Urusan Urusan Bina Marga dan Penataan Ruang	
	Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023	II-125
Gambar 2.48	Perbandingan Target terhadap Capaian Indikator Kinerja Utama	
	Urusan Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah	
	Tahun 2023	II-126
Gambar 2.49	Perbandingan Target RKPD terhadap Indikator Kinerja Program	
	(Outcome) Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi	
	Sulawesi Tengah Tahun 2023	II-127
Gambar 2.50	Perbandingan Target terhadap Capaian Indikator Kinerja Utama	
	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi	
	Sulawesi Tengah Tahun 2023	II-129
Gambar 2.51	Perbandingan Target RKPD terhadap Indikator Kinerja Program	
	(Outcome) Urusan Perumahan, Kawasan Pemukiman dan	
	Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023	II-130
Gambar 2.52	Perbandingan Target terhadap Capaian Indikator Kinerja Utama	
	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun	
	2023	II-131
Gambar 2.53	Perbandingan Target RKPD terhadap Indikator Kinerja Program	
	(Outcome) Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi	
	Tengah Tahun 2023	II-132
Gambar 2.54	Perbandingan Target terhadap Capaian Indikator Kinerja Utama	
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	
	Tahun 2023	II_133

		Halama
Gambar 2.55	Perbandingan Target RKPD terhadap Indikator Kinerja Program	
	(Outcome) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi	
	Sulawesi Tengah Tahun 2023	II-134
Gambar 2.56	Perbandingan Target terhadap Capaian Indikator Kinerja Utama	
	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun	
	2023	II-135
Gambar 2.57	Perbandingan Target RKPD terhadap Indikator Kinerja Program	
	(Outcome) Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun	
	2023	II-136
Gambar 2.58	Perbandingan Target terhadap Capaian Indikator Kinerja Utama	
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah	
	Tahun 2023	II-138
Gambar 2.59	Perbandingan Target RKPD terhadap Indikator Kinerja Program	
	(Outcome) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi	
	Tengah Tahun 2023	II-139
Gambar 2.60	Perbandingan Target terhadap Capaian Indikator Kinerja Utama	
	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi	
	Sulawesi Tengah Tahun 2023	II-140
Gambar 2.61	Perbandingan Target RKPD terhadap Indikator Kinerja Program	
	(Outcome)cDinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan	
	Anak Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023	II-142
Gambar 2.62	Perbandingan Target terhadap Capaian Indikator Kinerja Utama	
	Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun	
	2023	II-143
Gambar 2.63	Perbandingan Target RKPD terhadap Indikator Kinerja Program	
	(Outcome) Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun	
	2023	II-144
Gambar 2.64	Perbandingan Target terhadap Capaian Indikator Kinerja Utama	
	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah Tahun	
	2023	II-145
Gambar 2.65	Perbandingan Target RKPD terhadap Indikator Kinerja Program	
	(Outcome) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah Tahun	

		Halama
	2023	II-146
Gambar 2.66	Perbandingan Target terhadap Capaian Indikator Kinerja Utama	
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi	
	Tengah Tahun 2023	II-147
Gambar 2.67	Perbandingan Target RKPD terhadap Indikator Kinerja Program	
	(Outcome) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi	
	Sulawesi Tengah Tahun 2023	II-148
Gambar 2.68	Perbandingan Target terhadap Capaian Indikator Kinerja Utama	
	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi	
	Tengah Tahun 2023	II-150
Gambar 2.69	Perbandingan Target RKPD terhadap Indikator Kinerja Program	
	(Outcome) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi	
	Sulawesi Tengah Tahun 2023	II-151
Gambar 2.70	Perbandingan Target terhadap Capaian Indikator Kinerja Utama	
	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi	
	Sulawesi Tengah Tahun 2023	II-152
Gambar 2.71	Perbandingan Target RKPD terhadap Indikator Kinerja Program	
	(Outcome) Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga	
	Berencana Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023	II-153
Gambar 2.72	Perbandingan Target terhadap Capaian Indikator Kinerja Utama	
	Urusan Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun	
	2023	II-153
Gambar 2.73	Perbandingan Target RKPD terhadap Indikator Kinerja Program	
	(Outcome) Urusan Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun	
	2023	II-154
Gambar 2.74	Perbandingan Target terhadap Capaian Indikator Kinerja Utama	
	Urusan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tengah Tahun	
	2023	II-155
Gambar 2.75	Perbandingan Target RKPD terhadap Indikator Kinerja Program	
	(Outcome) Urusan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi	
	Tengah Tahun 2023	II-156
Gambar 2.76	Perbandingan Target terhadap Capaian Indikator Kinerja Utama	

		Halama
	Urusan Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah Provinsi Sulawesi	
	Tengah Tahun 2023	II-157
Gambar 2.77	Perbandingan Target RKPD terhadap Indikator Kinerja Program	
	(Outcome) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah Provinsi	
	Sulawesi Tengah Tahun 2023	II-158
Gambar 2.78	Perbandingan Target terhadap Capaian Indikator Kinerja Utama	
	Urusan Penanaman Modal Sulawesi Tengah Tahun	
	2023	II-159
Gambar 2.79	Perbandingan Target RKPD terhadap Indikator Kinerja Program	
	(Outcome) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu	
	Pintu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023	II-160
Gambar 2.80	Perbandingan Target terhadap Capaian Indikator Kinerja Utama	
	Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sulawesi Tengah Tahun	
	2023	II-161
Gambar 2.81	Perbandingan Target RKPD terhadap Indikator Kinerja Program	
	(Outcome) Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sulawesi Tengah	
	Tahun 2023	II-162
Gambar 2.82	Perbandingan Target terhadap Capaian Indikator Kinerja Utama	
	Urusan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun	
	2023	II-163
Gambar 2.83	Perbandingan Target RKPD terhadap Indikator Kinerja Program	
	(Outcome) Dinas Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun	
	2023	II-164
Gambar 2.84	Perbandingan Target terhadap Capaian Indikator Kinerja Utama	
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun	
	2023	II-165
Gambar 2.85	Perbandingan Target RKPD terhadap Indikator Kinerja Program	
	(Outcome) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi	
	Tengah Tahun 2023	II-166
Gambar 2.86		
	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun	
	2023	II-167

		Halama
Gambar 2.87	Perbandingan Target RKPD terhadap Indikator Kinerja Program	
	(Outcome) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah	
	Tahun 2023	II-168
Gambar 2.88	Perbandingan Target terhadap Capaian Indikator Kinerja Utama	
	Urusan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun	
	2023	II-169
Gambar 2.89	Perbandingan Target RKPD terhadap Indikator Kinerja Program	
	(Outcome) Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun	
	2023	II-170
Gambar 2.90	Perbandingan Target terhadap Capaian Indikator Kinerja Utama	
	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah	
	Tahun 2023	II-172
Gambar 2.91	Perbandingan Target RKPD terhadap Indikator Kinerja Program	
	(Outcome) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi	
	Sulawesi Tengah Tahun 2023	II-173
Gambar 2.92	Perbandingan Target terhadap Capaian Indikator Kontribusi	
	Terhadap PDRB (ADHB) (Persen)	II-174
Gambar 2.93	Perbandingan Target terhadap Capaian Indikator Nilai Tukar Petani	
	(NTP)	II-174
Gambar 2.94	Perbandingan Target terhadap Capaian Indikator Produktivitas	
	Komoditas Unggulan Perkebunan (Kg/Ha)	II-175
Gambar 2.95	Perbandingan Target terhadap Capaian Indikator Populasi Ternak	
	Sapi	II-175
Gambar 2.96	Perbandingan Target terhadap Capaian Indikator Cakupan Bina	
	Kelompok Tani (Persen)	II-176
Gambar 2.97	Perbandingan Target RKPD terhadap Indikator Produksi Komoditas	
	Unggulan Perkebunan (Ton)	II-177
Gambar 2.98	Perbandingan Target RKPD terhadap Indikator Investasi Perusahaan	
	Perkebunan (Unit Usaha)	II-177
Gambar 2.99	Perbandingan Target RKPD terhadap Indikator Presentase Tingkat	
	Serangan OPT Perkebunan	II-178
Gambar 2.100	Perbandingan Target RKPD terhadap Indikator Kinerja	

		Halama
	Program	II-178
Gambar 2.101	Perbandingan Target RKPD terhadap Indikator Kelompok Tani yang	
	Menerapkan Teknologi (Kelompok)	II-178
Gambar 2.102	Perbandingan Target RKPD terhadap Indikator Benih Bermutu dan	
	Bersertiikat (Pohon)	II-179
Gambar 2.103	Perbandingan Target RKPD terhadap Indikator Kelahiran Ternak	
	Sapi (Ekor)	II-179
Gambar 2.104	Perbandingan Target RKPD terhadap Indikator Kinerja	
	Program	II-180
Gambar 2.105	Perbandingan Target terhadap Capaian Indikator Kinerja Utama	
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah	
	Tahun 2023	II-182
Gambar 2.106	Perbandingan Target RKPD terhadap Indikator Kinerja Program	
	(Outcome) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi	
	Tengah Tahun 2023	II-183
Gambar 2.107	Perbandingan Target terhadap Capaian Indikator Kinerja Utama	
	Urusan Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun	
	2023	II-185
Gambar 2.108	Perbandingan Target RKPD terhadap Indikator Kinerja Program	
	(Outcome) Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun	
	2023	II-185
Gambar 2.109	Perbandingan Target terhadap Capaian Indikator Kinerja Utama	
	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah	
	Tahun 2023	II-187
Gambar 2.110	Perbandingan Target RKPD terhadap Indikator Kinerja Program	
	(Outcome) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi	
	Sulawesi Tengah Tahun 2023	II-188
Gambar 2.111	Perbandingan Target terhadap Capaian Indikator Kinerja Utama Biro	
	Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun	
	2023	II-189
Gambar 2.112	Perbandingan Target RKPD terhadap Indikator Kinerja Program	
	(Outcome) Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi	

		Halama
	Tengah Tahun 2023	II-190
Gambar 2.113	Perbandingan Target terhadap Capaian Indikator Kinerja Utama Biro	
	Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun	
	2023	II-192
Gambar 2.114	Perbandingan Target RKPD terhadap Indikator Kinerja Program	
	(Outcome) Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	
	Tahun 2023	II-192
Gambar 2.115	Perbandingan Target terhadap Capaian Indikator Kinerja Utama Biro	
	Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun	
	2023	II-193
Gambar 2.116	Perbandingan Target RKPD terhadap Indikator Kinerja Program	
	(Outcome) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	
	Tahun 2023	II-194
Gambar 2.117	Perbandingan Target terhadap Capaian Indikator Kinerja Utama Biro	
	Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	
	Tahun 2023	II-195
Gambar 2.118	Perbandingan Target RKPD terhadap Indikator Kinerja Program	
	(Outcome) Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi	
	Sulawesi Tengah Tahun 2023	II-196
Gambar 2.119	Perbandingan Target terhadap Capaian Indikator Kinerja Utama Biro	
	Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi	
	Tengah Tahun 2023	II-196
Gambar 2.120	Perbandingan Target RKPD terhadap Indikator Kinerja Program	
	(Outcome) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	
	Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023	II-197
Gambar 2.121	Perbandingan Target terhadap Capaian Indikator Kinerja Utama Biro	
	Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun	
	2023	II-198
Gambar 2.122	Perbandingan Target RKPD terhadap Indikator Kinerja Program	
	(Outcome) Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi	11.400
0 1 0 100	Tengah Tahun 2023	II-198
Gambar 2.123	Perbandingan Target terhadap Capaian Indikator Kinerja Utama Biro	

		Halama
	Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi	
	Tengah Tahun 2023	II-199
Gambar 2.124	Perbandingan Target RKPD terhadap Indikator Kinerja Program	
	(Outcome) Biro Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah	
	Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023	II-200
Gambar 2.125	Perbandingan Target terhadap Capaian Indikator Kinerja Utama Biro	
	Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi	
	Tengah Tahun 2023	II-201
Gambar 2.126	Perbandingan Target RKPD terhadap Indikator Kinerja Program	
	(Outcome) Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah	
	Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023	II-201
Gambar 2.127	Perbandingan Target terhadap Capaian Indikator Kinerja Utama Biro	
	Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi	
	Sulawesi Tengah Tahun 2023	II-202
Gambar 2.128	Perbandingan Target RKPD terhadap Indikator Kinerja Program	
	(Outcome) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat	
	Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023	II-203
Gambar 2.129	Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Sekertariat	
	Dewan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023	II-204
Gambar 2.130	Capaian Indikator Kinerja Program Sekertariat Dewan Provinsi	
	Sulawesi Tengah Tahun 2023	II-205
Gambar 2.131	Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan	
	Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun	
	2023	II-206
Gambar 2.132	Capaian Indikator Kinerja Program Badan Perencanaan	
	Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun	
	2023	II-206
Gambar 2.133	Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Riset dan Inovasi Daerah	
	Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023	II-207
Gambar 2.134	Capaian Indikator Kinerja Program Badan Riset dan inovasi Daerah	
	Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023	11-208

		Halama
Gambar 2.135	Capaian Indikator Kinerja Utama dan Program Badan Pendapatan	
	Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023	II-209
Gambar 2.136	Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Keuangan dan	
	Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023	II-209
Gambar 2.137	Capaian Indikator Kinerja Program Badan Pengelola Keuangan dan	
	Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023	II-210
Gambar 2.138	Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Daerah	
	Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023	II-211
Gambar 2.139	Capaian Indikator Kinerja Program Kepegawaian Daerah Provinsi	
	Sulawesi Tengah Tahun 2023	II-212
Gambar 2.140	Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Pengembangan Sumber	
	Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun	
	2023	II-213
Gambar 2.141	Capaian Indikator Kinerja Program Badan Pengembangan Sumber	
	Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun	
	2023	II-213
Gambar 2.142	Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Penghubung Provinsi	
	Sulawesi Tengah Tahun 2023	II-214
Gambar 2.143	Capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Provinsi Sulawesi	
	Tengah Tahun 2023.	II-215
Gambar 2.144	Capaian Indikator Kinerja Program Inspektorat Provinsi Sulawesi	
	Tengah Tahun 2023	II-216
Gambar 2.145	Capaian Indikator Kinerja Utama Badan kesatuan Bangsa & Politik	
	Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023	II-217
Gambar 2.146	Capaian Indikator Kinerja Program Badan kesatuan Bangsa & Politik	
	Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023	II-218
Gambar 2.147	Capaian indikator SDGs/TPB di Sulawesi Tengah Tahun 2023	
	(Persen)	II-236
Gambar 2.148	Tren Kemiskinan Penduduk Yang Hidup Di Bawah Garis Kemiskinan	
	Nasional Menurut Jenis Kelamin Dan Kelompok	
	Umur	II-237
Cambar 2 1/10	Persentase Laki-Laki Perempuan Dan Anak-Anak Dari Semua Usia	

		Halama
	Yang Hidup Dalam Kemiskinan Dalam Berbagai Dimensi, Sesuai	
	Dengan Definisi Nasional	II-238
Gambar 2.150	Proporsi peserta Program Jaminan Kesehatan Melalui SJSN Bidang	
	Kesehatan	II-239
Gambar 2.151	Akses Pada Layanan Sanitasi Dasar	II-240
Gambar 2.152	Akses Pada Layanan Air Minum	II-241
Gambar 2.153	Akses Pada Layanan Fasilitas Kebersihan Dasar	II-241
Gambar 2.154	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Sulawesi	
	Tengah	II-243
Gambar 2.155	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat,	
	berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan	
	Pangan	II-244
Gambar 2.156	Prevalensi Stunting (Pendek Dan Sangat Pendek) Pada Anak Di	
	Bawah Lima Tahun/Balita	II-245
Gambar 2.157	Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia	
	kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe di Sulawesi	
	Tengah	II-245
Gambar 2.158	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan	
	Harapan AKE 2100 kkal/kap/hari	II-246
Gambar 2.159	Proporsi Perempuan Pernah Kawin Umur 15-49 Tahun Yang Proses	
	Melahirkan Terakhirnya Ditolong Oleh Tenaga Kesehatan	
	Terlatih	II-248
Gambar 2.160	Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 15- 49 Tahun Yang	
	Proses Melahirkan Terakhirnya Di Fasilitas Kesehatan	II-249
Gambar 2.161	Angka Kelahiran Pada Remaja (Umur 10-14 Tahun; Umur 15-19	
	Tahun) Per 1000 Perempuan Di Kelompok Umur Yang	
	Sama	II-249
Gambar 2.162	Unmet Need Pelayanan Kesehatan	II-250
Gambar 2.163	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	II-251
Gambar 2.164	Persentase Merokok Pada Penduduk Umur ≥ 15 Tahun	II-251
Gambar 2.165	Angka Partisipasi Kasar PT	II-253
	Angka Partisinasi Murni (APM) Perempuan/Laki- Laki	

		Halama
	SD/Sederajat	II-254
Gambar 2.167	Proporsi Remaja Usia 15-24 Tahun Dengan Keterampilan Teknologi	
	Informasi	II-254
Gambar 2.168	Persentase Angka Melek Aksara Penduduk Umur ≥ 15	
	Tahun	II-255
Gambar 2.169	Proporsi Perempuan Yang Berada Di Posisi	
	Managerial	II-258
Gambar 2.170	Proporsi Individu Yang Menguasai/Memiliki Telepon	
	Genggam	II-259
Gambar 2.171	Persentase Rumah Tangga Yang Layanan Air Minum Yang Dikelola	
	Secara Aman	II-260
Gambar 2.172	Persentase Rumah Tangga Yang Mengggunakan Layanan Sanitasi	
	Yang Dikelola Secara Aman, Termasuk Fasilitas Cuci Tangan	
	Dengan Air Sabun	II-261
Gambar 2.173	Rasio elektrifikasi	II-262
Gambar 2.174	Rasio Penggunaan gas Rumah Tangga	II-263
Gambar 2.175	Baruan Energi Terbarukan	II-264
Gambar 2.176	Laju Pertumbuhan PDB Perkapita	II-266
Gambar 2.177	Proporsi Lapangan Kerja Informal Berdasarkan Sektor Dan Jenis	
	Kelamin	II-267
Gambar 2.178	Upah Rata-Rata Per Jam Pekerja	II-267
Gambar 2.179	Tingkat Setengah Pengangguran	II-268
Gambar 2.180	Tingkat Pengangguran Terbuka berdasarkan jenis kelamin dan	
	kelompok umur	II-269
Gambar 2.181	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja	
	atau mengikuti pelatihan (NEET)	II-270
Gambar 2.182	Proporsi Nilai Tambah Sektor Industri Manufaktur Terhadap PDRB	
	Dan Per Kapita	II-271
Gambar 2.183	Laju Pertumbuhan PDB Industri Manufaktur	II-272
Gambar 2.184	Proporsi Penduduk Yang Terlayani Mobile Broadband	II-273
Gambar 2.185	Rasio Gini	II-274
Gambar 2 186	Persentase Penduduk Yang Hidup Di Bawah Garis Kemiskinan	

		Halama
	Nasional Menurut Jenis Kelamin Dan Kelompok Umur	II-275
Gambar 2.187	Indeks Kebebasan	II-276
Gambar 2.188	Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Hunian	
	Yang Layak Dan Terjangkau	II-277
Gambar 2.189	Jumlah Perusahaan Bersertifikasi ISO 14001	II-281
Gambar 2.190	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha	II-283
Gambar 2.191	Jumlah Nelayan Yang Terlindungi	II-284
Gambar 2.192	Proporsi Kawasan Hutan Terhadap Total Luas Lahan	II-286
Gambar 2.193	Proporsi Lahan Yang Terdegradasi Terhadap Luas Lahan	
	Keseluruhan	II-286
Gambar 2.194	Jumlah Kasus Kejahatan Pembunuhan Pada Satu Tahun	
	Terakhir	II-287
Gambar 2.195	Kematian Disebabkan Konflik Per 100.000 Penduduk	II-288
Gambar 2.196	Proporsi Penduduk Yang Menjadi Korban Kejahatan Kekerasan	
	Dalam 12 Bulan Terakhir	II-288
Gambar 2.197	Proporsi Penduduk Yang Merasa Aman Berjalan Sendirian Di Area	
	Tempat Tinggalnya	II-289
Gambar 2.198	Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Anak Umur 1-17 Tahun Yang	
	Mengalami Hukuman Fisik Dan/Atau Agresi Psikologis Dari	
	Pengasuh Dalam Setahun Terakhir	II-289
Gambar 2.199	Persentase Instansi Pemerintah Yang Mendapat Opini Wajar Tanpa	
	Pengecualian (WTP)	II-290
Gambar 2.200	Persentase Instansi Pemerintah Dengan Skor Sistem Akuntabilias	
	Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ≥ B	II-291
Gambar 2.201	Total Pendapatan Pemerintah Sebagai Proporsi Terhadap PDB	
	Menurut Sumbernya	II-293
Gambar 2.202	Rasio Penerimaan Pajak Terhadap PDB	II-293
Gambar 2.203	Proporsi Anggaran Domestik Yang Didanai Oleh Pajak	
	Domestik	II-294
Gambar 2.204	Persentase Konsumen BPS Yang Merasa Puas Dengan Kualitas	
	Data Statistik	II-294
Gambar 3 1	Perkembangan Tingkat Inflasi Tahunan Gabungan (Kota Palu dan	

		Halama
	Kota Luwuk) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 - 2023	III-6
Gambar 3.2	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sulawesi	
	Tengah Tahun 2017-2023	III-7
Gambar 3.3	Perkembangan Indeks Gini Provinsi Sulawesi Tengah Periode Maret	
	2017-Maret 2023	III-7
Gambar 3.4	Perkembangan Tingkat Kemiskinan Sulawesi Tengah Tahun 2017-	
	2023	III-8
Gambar 5.1	Kota Palu di Klaster Perkotaan Pasigala	V-2
Gambar 5.2	Arah Kebijakan Kota Palu di Klaster Perkotaan Pasigala	V-3
Gambar 5.3	Arah Kebijakan Kabupaten Donggala di Klaster Perkotaan	
	Pasigala	V-3
Gambar 5.4	Arah Kebijakan Kabupaten Donggala di Klaster Kawasan Pangan	
	Nusantara	V-4
Gambar 5.5	Masterplan Kota Baru Donggala	V-4
Gambar 5.6	Arah Kebijakan Kabupaten Sigi di Klaster Perkotaan Pasigala	V-5
Gambar 5.7	Arah Kebijakan Kabupaten Sigi di Klaster Argopolitan Kawasan	
	Pangan Nusantara	V-5
Gambar 5.8	Kabupaten Buol di Klaster Argopolitan Bolipamuso	V-6
Gambar 5.9	Arah Kebijakan Kabupaten Buol di Klaster Argopolitan Bolipamuso	V-7
Gambar 5.10	Kabupaten Tolitoli di Klaster Argopolitan Bolipamuso dan Agropolitan	
	KPN	V-7
Gambar 5.11	Arah Kebijakan Kabupaten Tolitoli di Klaster Agropolitan Bolipamuso	
	dan Agropolitan KPN	V-8
Gambar 5.12	Kabupaten Parigi Moutong di Klaster Agropolitan Bolipamuso dan	
	Agropolitan KPN	V-8
Gambar 5.13	Arah Kebijakan Kabupaten Parigi Moutong di Klaster Agropolitan	
	Bolipamuso dan Agropolitan KPN	V-9
Gambar 5.14	Kabupaten Poso di Klaster Agropolitan Bolipamuso	V-9
Gambar 5.15	Arah Kebijakan Kabupaten Poso di Klaster Agropolitan Bolipamuso	V-10
Gambar 5.16	Arah Kebijakan Kabupaten Morowali di Klaster Industri Morubang	V-11
Gambar 5.17	Kabupaten Morowali Utara di Klaster Industri Morubang	V-11
Gambar 5 18	Arah Kebijakan Kabupaten Morowali Utara di Klaster Industri	



		Halama
	Morubang	V-12
Gambar 5.19	Kabupaten Banggai di Klaster Industri Morubang dan Klaster Balatoju.	V-12
Gambar 5.20	Arah Kebijakan Kabupaten Banggai di Klaster Industri	
	Morubang	V-13
Gambar 5.21	Kabupaten Banggai di Klaster Industri Morubang dan Klaster Balatoju.	V-14
Gambar 5.22	Arah Kebijakan Kabupaten Banggai di Klaster Industri	
	Morubang	V-14
Gambar 5.23	Arah Kebijakan Kabupaten Banggai di Klaster Balatoju	V-15
Gambar 5.24	Kabupaten Banggai Kepulauan di Klaster Wisata Bahari dan	
	Perikanan Balatoju	V-15
Gambar 5.25	Arah Kebijakan Kabupaten Banggai Kepulauan di Klaster Wisata	
	Bahari dan Perikanan Balatoju	V-16
Gambar 5.26	Kabupaten Banggai Laut di Klaster Wisata Bahari dan Perikanan	
	Balatoju	V-16
Gambar 5.27	Arah Kebijakan Kabupaten Banggai Laut di Klaster Wisata Bahari dan	
	Perikanan Balatoju	V-17
Gambar 5.28	Kabupaten Tojo Una-Una di Klaster Wisata Bahari dan Perikanan	
	Balatoju	V-17
Gambar 5.29	Arah Kebijakan Kabupaten Tojo Una-Una di Klaster Wisata Bahari dan	
	Perikanan Balatoju	V-18



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). RKPD Tahun 2025 selanjutnya dijadikan sebagai pedoman kepala daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang menjadi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025.

Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025 juga mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 dan merupakan rencana pelaksanaan program dan kegiatan yang masih mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 yang di selaraskan dengan indikator RPJPD Tahun 2025-2045, hal ini dimungkinkan karena RPJMD Tahun 2021-2026 adalah tahapan transisi tahun berikutnya. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan pembangunan tahunan akan tetap mengarah pada pencapaian tujuan pembangunan lima tahunan sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Daerah.

Dokumen RKPD Tahun 2025 mempunyai kedudukan strategis dalam penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai berikut:

- RKPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan arah kebijakan ekonomi, dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan perangkat daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun;
- RKPD secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang di usulkan oleh Kepala Daerah sebagai landasan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).



- 3. RKPD secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan pemberdayaan masyarakat serta pemerintah daerah yang menjadi tanggungjawab kepala perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah; dan
- 4. RKPD secara faktual, merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

RKPD Tahun 2025 akan difokuskan pada upaya memantapkan kualitas dan pemerataan pelayanan dasar guna meningkatkan kualitas SDM, kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah melalui akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Rumusan dan sasaran prioritas pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 mengacu dan memperhatikan: (1) Tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026; (2) Hasil Evaluasi kinerja RKPD Tahun 2023 dan RKPD Tahun 2024 Triwulan I; (3) RTRW Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023-2042; (4) Prioritas Nasional dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025; (5) Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB); serta (6) Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah beserta kerangka pendanaan pembangunan tahun 2024.

Penyusunan RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 dilakukan dengan pendekatan teknokratis adalah pendekatan yang dimulai dari penyusunan pengumpulan data dan informasi pembangunan daerah dengan menggunakan metode kerangka berpikir ilmiah. Penyusunan RKPD Tahun 2025 juga melakukan proses penyusunan dengan proses *bottom up* melaksanakan konsultasi publik, forum perangkat daerah dan musrenbang yang melibatkan unsur akademisi, komunitas masyarakat, *proses politik* mengakomodasi pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi Sulawesi Tengah yang bersumber dari hasil reses, dan proses *top-down* yaitu penyelarasan dokumen RKPD terhadap dokumen RKP dan RPJMN dalam rangka sinergi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah, yang melibatkan pemerintah pusat yaitu Kementerian/Lembaga (K/L).



perencanaan berbasis *Tematik-Holistik*, yaitu mempertimbangkan keseluruhan unsur atau bagian atau kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan berikutnya *Integratif*, yang menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah, serta selanjutnya pendekatan *Spasial*, yaitu mempertimbangkan dimensi keuangan dalam perencanaan, yang dilaksanakan melalui 8 tahapan sebagai berikut:

- 1. Persiapan Penyusunan RKPD;
- 2. Penyusunan Rancangan Awal RKPD;
- 3. Pelaksanaan Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD;
- 4. Penyusunan Rancangan RKPD;
- 5. Pelaksanaan Musrenbang RKPD;
- 6. Penyusunan Rancangan Akhir RKPD;
- 7. Fasilitasi Rancangan Akhir RKPD oleh Kementerian Dalam Negeri; dan
- 8. Penetapan RKPD.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 33 2024 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Undang-Undang



- Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);



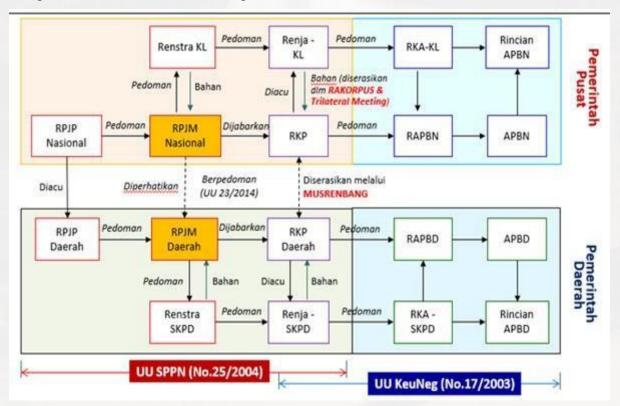
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172).
- Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta tatacara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 115);
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025;
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026;
- 21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023-2042.



1.3 Hubungan Antar Dokumen

Penyusunan RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 diperlukan untuk menjamin keselarasan, keterkaitan, dan konsistensi dalam sistem pembangunan daerah antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Dokumen RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 merupakan acuan pelaksanaan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu dan sebagai bagian yang tidak bisa terpisahkan secara umum.

Keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan negara telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana dapat dilihat pada gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen, dimana posisi dokumen RKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang merupakan penjabaran RPJMD yang berpedoman pada RPJP Daerah. RKPD tersebut menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dimana RENJA perangkat daerah akan menjadi bahan masukan dalam finalisasi RKPD. Dalam hubungannya dengan RKP, RKPD diselaraskan dengan RKP melalui Musrenbang Nasional.



Gambar. 1.1 Hubungan antar Dokumen Perencanaan



1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 adalah memberikan arah sekaligus acuan bagi pemangku kepentingan pembangunan daerah dalam menjabarkan perencanaan pembangunan tahun 2025.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan dokumen RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025, yaitu:

- 1. Menyelaraskan dan mensinergikan program pembangunan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2025;
- Menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran APBD (KUA),
 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Penyusunan Anggaran
 Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

1.5 Sistematika Penyusunan RKPD Tahun 2025

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab I ini memuat uraian penjelasan tentang tentang latar belakang penyusunan RKPD, dasar hukum penyusunan RKPD, hubungan keterkaitan RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya, sistematika penulisan, maksud dan tujuan penyusunan RKPD.

BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Menguraikan penjelasan tentang gambaran umum kondisi daerah dan hasil evaluasi RKPD tahun lalu serta permasalahan pembangunan daerah. Penjelasan gambaran umum daerah meliputi aspek geografis, demografis, kesejahteraan masyarakat, palayanan umum dan daya saing daerah.



- BAB III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah

 Menguraikan penjelasan tentang sasaran dan prioritas

 pembangunan daerah Tahun 2025 berdasarkan evaluasi terhadap

 pelaksanaan RKPD Tahun 2024
- BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
 Menguraikan penjelasan tentang sasaran dan prioritas
 pembangunan daerah Tahun 2025 berdasarkan evaluasi terhadap
 pelaksanaan RKPD Tahun 2024 dan target yang direncanakan
 dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yang tertuang dalam program
 dan kegiatan
- BAB V Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota

 Mengemukakan tentang arahan kebijakan pembangunan
 Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Provinsi, yang nantinya
 akan menjadi pedoman bagi daerah Kabupaten/Kota dalam
 penyusunan RKPD.
- BAB VI Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

 Menyajikan secara menyeluruh rencana program dan kegiatan
 pemerintah daerah dalam Tahun 2025 baik yang dikelompokkan
 dalam pendapatan dan belanja maupun penerimaan dan
 pengeluaran pembiayaan yang tertuang dalam matriks yang
 disajikan
- BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
 Menyajikan penetapan indikator kinerja penyelenggaraan
 pemerintah daerah bertujuan untuk memberikan pencapaian
 kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama
 (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun
 perencanaan



BAB VIII Penutup

Memuat kaidah pelaksanaan dalam pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintahs Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025.



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah

Secara stronomis, Sulawesi Tengah terletak antara 2°22' Lintang Utara dan 3°48' Lintang Selatan dan antara 119°22' – 124°22' Bujur Timur dan dilalui oleh garis ekuator atau garis khatulistiwa yang terletak pada garis lintang 00.

Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah pada umumnya terletak pada ketinggian 0-1000 meter dari permukaan laut, dan hanya sekitar 1.693.226 hektar atau 26,59 persen terletak pada ketinggian di atas 1.000 meter dari permukaan laut. Kondisi fisik wilayah sebagian besar merupakan non budidaya karena faktor kemiringan lereng di atas 40 persen, dengan karateristik fisik wilayah berupa bentangan pegunungan tinggi membentuk formasi berbaris dan melintang hingga menyentuh bibir pantai. Kondisi ini sangat rawan menimbulkan bencana erosi, sehingga di samping sebagai tantangan sekaligus ancaman dari sisi pelestarian lingkungan jika kita tidak arif dalam mengelolahnya.

Provinsi Sulawesi Tengah memiliki iklim tropis dengan kelembaban tinggi. Temperaturnya cenderung pada titik yang hampir sama setiap tahun, suhu udara disiang hari berkisar antara $22,6^{\circ} - 24,3^{\circ}$ celcius untuk dataran tinggi, sedang di dataran rendah berkisar $31,1^{\circ} - 35,9^{\circ}$ celcius. Curah hujan berkisar antara 500 milimeter -2.500 milimeter.

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Analisis pada aspek geografi di Provinsi Sulawesi Tengah dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik wilayah, potensi pengembangan wilayah dan kerentanan wilayah terhadap bencana. Adapun, gambaran kondisi demografi memberikan gambaran terkait struktur, komposisi dan persebaran penduduk di Provinsi Sulawesi Tengah dalam periode tahun tertentu.

2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Provinsi Sulawesi Tengah memiliki luas wilayah mencapai 61.605,718 Km² atau 6.160.571,8 Ha, dengan panjang garis pantai 6.653,31 Km², luas perairan 77.295,9 Km² dan jumlah pulau sebanyak 1.572 pulau. Provinsi Sulawesi Tengah memiliki batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Sulawesi dan Provinsi Gorontalo;



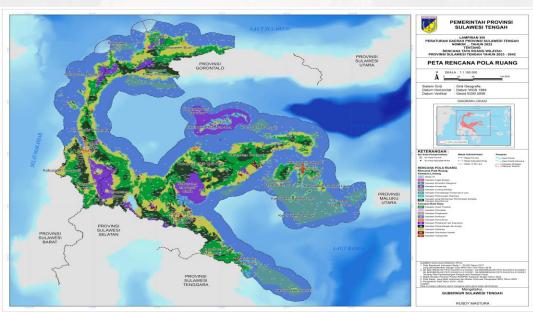
- Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar dan Provinsi Sulawesi Barat.

Tabel 2.1
Luas Wilayah dan Persentase Luas Wilayah
Provinsi Sulawesi Tengah Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023

FI	ovinsi Sulawesi 16	engan Menurut	Kabupaten/Ko	ia Tanun 2023					
No.	Kabupaten/Kota	Ibu Kota Kabupaten	Luas Total Area (Km²)	Persentase terhadap Luas Provinsi					
1.	Banggai Kepulauan	Salakan	2 385,073	3,87					
2.	Banggai	Luwuk	8 252,882	13,4					
3.	Morowali	Bungku	4 486,891	7,28					
4.	Poso	Poso Kota	7 545,930	12,25					
5.	Donggala	Banawa	5 126,586	8,32					
6.	Tolitoli	Baolan	3 700,369	6,01					
7.	Buol	Biau	3 723,578	6,04					
8.	Parigi Moutong	Parigi	5 805,610	9,42					
9.	Tojo Una-Una	Ampana	5 572,856	9,05					
10.	Sigi	Bora	5 225,435	8,48					
11.	Banggai Laut	Banggai	688,151	1,12					
12. Morowali Utara		Kolonodale	8 736,006	14,18					
13.	Palu	Palu	356,351	0,58					
	Sulawesi Tengah 61.605,718 100,00								

Sumber: BPS, Provinsi Sulteng Dalam Angka 2024 (Kepmendagri No. 100.1.1-6117 Tahun 2022)

Pola ruang Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

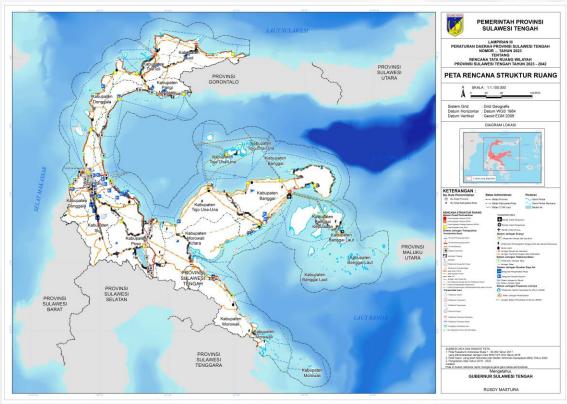


Sumber: Perda Provinsi Sulawesi Tengah No. 1 Tahun 2023 tentang RTRW Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023-2042.

Gambar 2.1
Peta Pola Ruang Provinsi Sulawesi Tengah



Selanjutnya, struktur ruang Provinsi Sulawesi Tengah disajikan pada gambar berikut.



Sumber: Perda Provinsi Sulawesi Tengah No. 1 Tahun 2023 tentang RTRW Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023-2042.

Gambar 2.2 Peta Struktur Ruang Provinsi Sulawesi Tengah

Secara administrasi, hingga saat ini Provinsi Sulawesi Tengah telah memiliki 12 Kabupaten dan 1 Kota, yaitu Kabupaten Donggala, Kabupaten Poso, Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Banggai, Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Tojo Una-una, Kabupaten Sigi, Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Banggai Laut dan Kota Palu, yang terdiri dari 176 Kecamatan, dan 2.020 Desa/Kelurahan.

Tabel 2.2
Jumlah Kecamatan, Desa/Kelurahan Di Provinsi Sulawesi Tengah
Menurut kabupaten/Kota Tahun 2023

NO.	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH				
NO.	NADOLATEN/NOTA	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN			
1.	PALU	8	46			
2.	SIGI	16	177			
3.	DONGGALA	16	167			
4.	PARIGI MOUTONG	23	283			
5.	5. POSO 19		170			
6.	TOJO UNA-UNA	12	146			

NO.	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH				
NO.	KABUPATEN/KUTA	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN			
7.	BANGGAI	23	337			
8.	BANGGAI KEPULAUAN	12	144			
9.	BANGGAI LAUT	7	66			
10.	MOROWALI	9	133			
11.	MOROWALI UTARA	10	126			
12.	BUOL	11	115			
13.	TOLITOLI	10	110			
	SULTENG	176	2.020			

Sumber: BPS, Provinsi Sulteng Dalam Angka Tahun 2024.

b. Letak dan Kondisi Geografis

Posisi astronomi Sulawesi Tengah terletak antara 2°22' Lintang Utara dan 3°48' Lintang Selatan serta 119°22' dan 124°22' Bujur Timur. Posisi geostrategis Sulawesi Tengah berada di tengah Wilayah Nusantara dan di Tengah Pulau Sulawesi, berada di lintasan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II dan ALKI III.

c. Topografi

Berdasarkan Kemiringan lahan, dataran Sulawesi Tengah dirinci sebagai berikut:

- Kemiringan 0 3 derajat sekitar 11,8 persen;
- Kemiringan 3 15 derajat sekitar 8,9 persen;
- Kemiringan 15 40 derajat sekitar 19,9 persen;
- Kemiringan di atas 40 derajat sekitar 59,9 persen.

Berdasarkan elevasi (ketinggian dari permukaan laut), dataran wilayah Sulawesi Tengah terbagi atas:

- Ketinggian 0 m 100 m = 20,2 persen;
- Ketinggian 101 m 500 m = 27.2 persen;
- Ketinggian 501 m 1.000 m = 26,7 persen; dan
- Ketinggian 1.001 m ke atas = 25,9 persen.

d. Geologi

Struktur dan karakteristik geologi wilayah Sulawesi Tengah didominasi oleh bentangan pegunungan dan dataran tinggi, yakni mulai dari wilayah Kabupaten Buol dan Tolitoli, terdapat deretan pegunungan yang berangkai ke jajaran pegunungan di Provinsi Sulawesi Utara. Di tengah wilayah Sulawesi Tengah yaitu Kabupaten Donggala dan Parigi Moutong terdapat tanah genting yang diapit oleh Selat Makassar dan Teluk Tomini, selain itu sebagian besar merupakan daerah pegunungan dan perbukitan. Di selatan dan timur yang



mencakup wilayah Kabupaten Poso, Kabupaten Tojo Una-Una, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai, berjejer deretan pegunungan yang sangat rapat seperti Pegunungan Tokolekayu, Verbeek, Tineba, Pampangeo, Fennema, Balingara, dan Batui. Sebagian besar dari daerah pegunungan itu mempunyai lereng yang terjal dengan kemiringan di atas 45 derajat.

Indeks Resiko Bencana

Sementara Indeks Resiko Bencana Provinsi Sulawesi Tengah sejak periode 2018 sampai dengan Tahun 2022 cenderung fluktuatif yakni dari 146,394 pada Tahun 2018 menurun menjadi 144,961 pada Tahun 2019, selanjutnya pada Tahun 2020 meningkat menjadi 144,967 dan meningkat menjadi 146,074 pada Tahun 2021, sedangkan pada Tahun 2022 Indeks Resiko Bencana menurun hingga menjadi 143,444 dengan nilai indeks kategori sedang, sebagaimana terlihat pada gambar berikut:

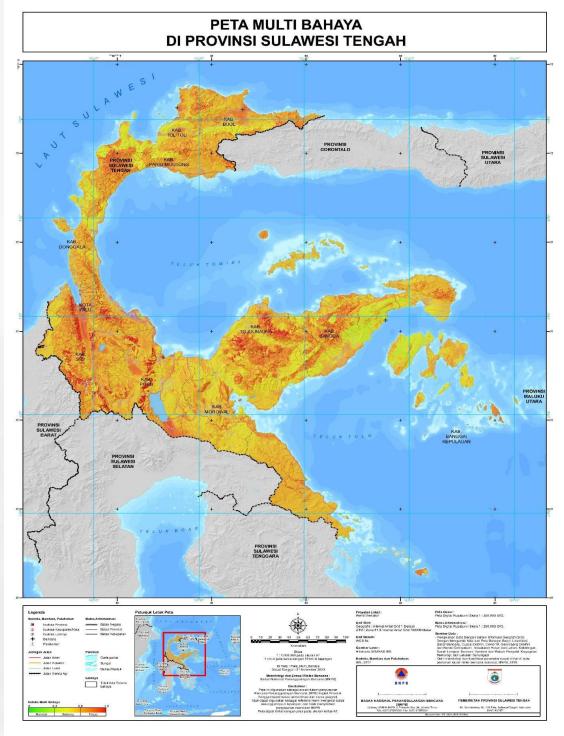


Sumber: BPBD Provinsi Sulteng, 2023 (data diolah kembali)

Gambar 2.3
Perkembangan Indeks Resiko Bencana (IRB) Provinsi Sulawesi Tengah
Periode 2018 - 2022

Selanjutnya Kawasan Multi Bahaya dan peta Multi Kerentanan Provinsi Sulawesi Tengah secara spasial disajikan dalam gambar di bawah ini:



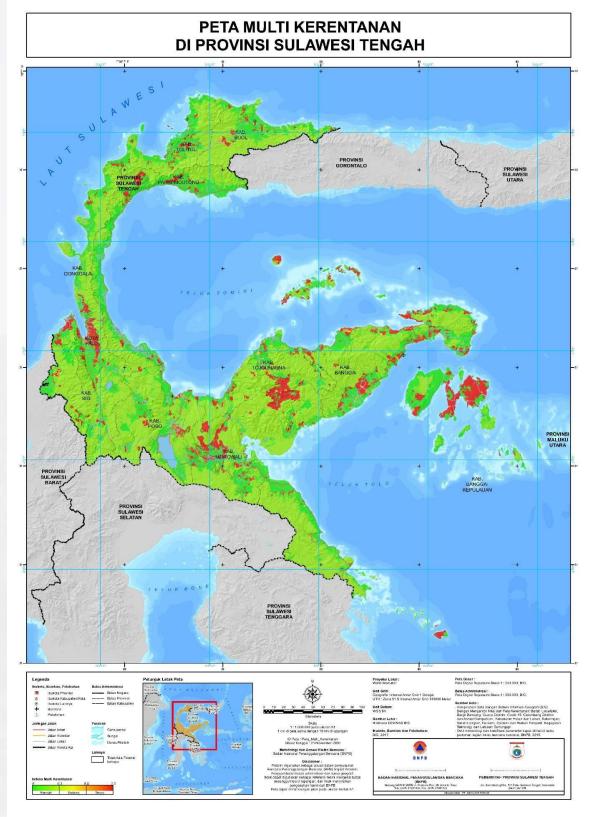


Sumber : Dokumen KLHS RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2045

Gambar 2.4

Peta Multi Bahaya di Provinsi Sulawesi Tengah





Sumber : Dokumen KLHS RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2045

Gambar 2.5

Peta Multi Kerentanan Di Provinsi Sulawesi Tengah

e. Hidrologi

Di sepanjang wilayah Sulawesi Tengah terdapat beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS) yang mengalir di sejumlah wilayah kabupaten/kota (Tabel 2.5). Selain daerah aliran sungai juga terdapat beberapa danau yang hampir seluruhnya berada di kawasan lindung. Danau dan sumber daya sungai



tersebut dimanfaatkan untuk pertanian, energi listrik dan kebutuhan rumah tangga. Luas kecamatan dan rencana pengembangan sistem jaringan pengolahan sumber daya air wilayah sungai lintas provinsi di Provinsi Sulawesi Tengah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.3
Luas Kecamatan pada dalam Wilayah Sungai (WS) Lintas
Provinsi di Sulawesi Tengah

No	Provinsi / Kabupaten	Kecamatan	Luas Kecamatan dalam WS	Persentase Kecamatan dalam WS
			(Km2)	(%)
A.	Provinsi Sula	wesi Tengah		
1	Kabupaten Donggala	Balaesang	169,18	1,16
		Balaesang Tanjung	189,49	1,3
9 43 1		Banawa	100,32	0,69
		Banawa Selatan	313,93	2,15
		Banawa Tengah	79,95	0,55
		Labuan	169,18	1,16
		Pinembani	447,77	3,07
	1000	Rio Pakawa	881,47	6,05
		Sindue	138,67	0,95
	1. 11/1-11	Sindue Tobata	260,59	1,79
	68 /	Sirenja	183,2	1,26
S. (12-3) D. (4)		Tanantovea	245,02	1,68
		Sindue Tombusabora	201,97	1,39
		Total Luas	3.380,73	23,21
		Mantikulore	201,43	1,38
	111-2	Palu Barat	22,99	0,16
		Palu Utara	37,01	0,25
		Tawaeli	53,02	0,36
2	Kota Palu	Ulujadi	53,22	0,37
	4 6 5	Palu Selatan	29,06	0,2
		Palu Timur	10,76	0,07
		Tatanga	14,18	0,1
		Total Luas	421,68	2,89



No	Provinsi / Kabupaten	Kecamatan	Luas Kecamatan dalam WS	Persentase Kecamatan dalam WS
			(Km2)	(%)
		Dolo	40,84	0,28
		Dolo Barat	128,29	0,88
		Dolo Selatan	397,31	2,73
		Kinovaro	34,19	0,23
		Kulawi	1.139,97	7,82
		Kulawi Selatan	406,9	2,79
		Lindu	576,9	3,96
	Kabupaten	Marawola	40,9	0,28
3	Sigi	Marawola Barat	157,31	1,08
		Nokilalaki	80,37	0,55
		Palolo	592,18	4,06
		Pipikoro	991,72	6,81
		Sigi Biromaru	324,29	2,23
		Sumbasa	162,43	1,11
		Tanam Bulava	57,73	0,4
		Total Luas	5.131,34	35,22
		Lore Barat	322,08	2,21
		Lore Peore	577,26	3,96
	Kabupaten	Lore Selatan	483,08	3,32
4	Poso	Lore Tengah	696,04	4,78
	1 030	Lore Timur	149,75	1,03
	re 3 - 4 - 4 - 4 -	Lore Utara	333,3	2,29
		Total Luas	2.561,50	17,58

Sumber: Rancangan Perda Provinsi Sulawesi Tengah tentang RTRW Provinsi Sulteng Tahun 2023-2042.

Secara rinci pembagian DAS di WS Palu Lariang tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.4
Pembagian DAS di WS Palu Lariang

	r embagian DAS at WS r ata Lariang									
Kode DAS	Nama DAS	Luas (Km2)	Persentase DAS Dalam WS (%)	Kode DAS	Nama DAS	Luas (Km2)	Persentase DAS Dalam WS (%)			
1	Lariang	7.264,97	49,87	27	Watutela	30,18	0,21			
2	Minti	326,28	2,24	28	Watutailo	15,28	0,1			
3	Sulung	970,3	6,66	29	Biuluniongga	30,05	0,21			
4	Pangian	140,39	0,96	30	Taipa	88,29	0,61			
5	Sawi	52,97	0,36	31	Tabeo	16,07	0,11			
6	Randomayang	94,52	0,65	32	Taweli	104,27	0,72			
7	Kasuloang	138,76	0,95	33	Lambagu	92,54	0,64			
8	Bambaira	6,49	0,04	34	Labuan	158,67	1,09			
9	Tampaore	16,45	0,11	35	Toaya	77,41	0,53			
10	Kumboki	26,6	0,18	36	Masaengi	93,66	0,64			
11	Surumana	304,08	2,09	37	Tibo	143,97	0,99			
12	Bambalalombi	35,39	0,24	38	Batusuya	93,49	0,64			

Kode DAS	Nama DAS	Luas (Km2)	Persentase DAS Dalam	Kode DAS	Nama DAS	Luas (Km2)	Persentase DAS Dalam
			WS (%)			, ,	WS (%)
13	Mamara	119,86	0,82	39	Aliandu	110,49	0,76
14	Tolongano	12,86	0,09	40	Loro	29,48	0,2
15	Kangando	17,68	0,12	41	Sinapa	4,79	0,03
16	Towale	37,93	0,26	42	Sikara	6,23	0,04
17	Tomaku	10,74	0,07	43	Omba	20,77	0,14
18	Donggala	56,3	0,39	44	Tondo	26,18	0,18
19	Uwemole	6,03	0,04	45	Lente	105,83	0,73
20	Lottu	3,8	0,03	46	Tompo	95,86	0,66
21	Nggoji	19,19	0,13	47	Lende	30,01	0,21
22	Watusampu	20,64	0,14	48	Airmakuni	96,52	0,66
23	Buluri	37,17	0,26	49	Kusu	46,96	0,32
24	Owenumpu	22,86	0,16	50	Kamonji	46,32	0,32
25	Palu	3.063,96	21,03	51	Tompe	50,08	0,34
26	Lepata	77,5	0,53	52	Maruri	71,65	0,49

Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor4/PRT/M/2015

Pada Tabel diatas, menunjukkan bahwa DAS Palu Lariang memiliki beberapa sub DAS yang cukup besar dan memiliki potensi besar dalam pemanfaatan sumber daya untuk kegiatan pertanian, industri dan rumah tangga.

Selanjutnya, ditinjau dari wilayah sungai strategis nasional yang terdapat di Provinsi Sulawesi Tengah, terdapat beberapa wilayah sungai strategis sebagaimana yang terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5
Wilayah Sungai Strategis Nasional Di Provinsi Sulawesi Tengah
(WS Parigi – Poso)

No	Provinsi / Kabupaten	Kecamatan	Luas Total Kecamatan (Km2)	Luas Kecamatan dalam WS (Km2)	Persentase Kecamatan dalam WS (%)
A.	Provinsi Sulav	vesi Tengah	14 17 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
	Kabupaten 1. Morowali Utara	Mori Atas	768,89	13,02	1,7
1.		Mori Utara	699,82	140,94	20,1
		Soyo Jaya	1.221,09	39,51	3,2
	Sub Total Ka	bupaten Morow	ali Utara	193,47	2,25
		Ampibabo	279,61	279,61	100
Til and		Balinggi	119,64	119,64	100
	THE WALL OF A	Kasimbar	271,56	194,76	71,7



	N 2025		Luas Total	Luas	Persentase
No	Provinsi /	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan
	Kabupaten		(Km2)	dalam WS (Km2)	dalam WS (%)
		Parigi	104,65	104,65	100
		Parigi Barat	78,72	78,72	100
		Parigi Selatan	439,97	356,92	81,1
		Parigi Tengah	64,41	64,41	100
2.	Kabupaten Parigi Moutong	Parigi Utara	29,65	29,65	100
		Sausu	291,61	291,61	100
		Sinju	111,94	111,94	100
		Toribulu	97,57	97,51	99,9
		Torue	575,29	399,35	69,4
	Sub Total Ka	bupaten Parigi I	Moutong	2.128,77	24,72
		Danau Poso	366,95	366,95	100
		Lage	411,13	411,13	100
		Lore Piore	506,89	42,7	8,4
		Lore Selatan	510,77	80,8	15,8
		Lore Tengah	594,25	29,26	4,9
		Lore Utara	484,69	31,96	6,6
		Pamona Barat	227,55	227,55	100
		Pamona Pusalemba	486,81	486,81	100
		Pamona Selatan	381,89	312,06	81,7
	Jares 7	Pamona Tenggara	312,08	184,64	59,2
		Pamona Timur	713,97	166,78	23,4
		Pamona Utara	685,47	598,76	87,3
3.	Kabupaten Poso	Poso Kota	35,95	35,95	100
		Poso Kota Selatan	41,42	41,42	100
		Poso Kota Utara	37,68	37,68	100
		Poso Pesisir	334,64	252,97	75,6
		Poso Pesisir Selatan	430,92	418	97
	Poso Pesisir Utara		555,24	470,02	84,7
	Sub Tota	al Kabupaten P	oso	4.195,44	48,72
	Kahumatan	Tojo	422,81	422,81	100
4.	Kabupaten Tojo Una-Una	Tojo Timur	1.318,41	1.255,53	95,2
	- 10,0 Ona Ona	Ulu Bongka	1.538,42	17,82	1,2
Sub	Total Kabupate	en Tojo Una-Un	a	1.696,16	19,7



	No	Provinsi / Kabupaten	Kecamatan	Luas Total Kecamatan (Km2)	Luas Kecamatan dalam WS (Km2)	Persentase Kecamatan dalam WS (%)
ſ	Tota	l Luas WS Pari	gi Poso		8.610,57	

Sumber: Rancangan Perda Provinsi Sulawesi Tengah tentang RTRW Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023-2042.

Secara rinci pembagian DAS di WS Parigi Poso disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.6
Pembagian DAS di WS Parigi Poso

No.	Nama DAS	Luas DAS (Km ²)	Persent ase DAS Dalam WS (%)	No.	Nama DAS	Luas DAS (Km ²)	Perse ntase DAS Dalam WS (%)
1	Tompis	118,04	1,37	26	Tiwa'a	31,13	0,36
2	Kasimbar	104,87	1,22	27	Masani	38,61	0,45
3	Toribulu	154,46	1,79	28	Lape	26,95	0,31
4	Тароуа	223,74	2,60	29	Puna	778,30	9,04
5	Silangga	68,40	0,79	30	Mapane	59,42	0,69
6	Marantale	41,50	0,48	31	Poso	2.674,85	31,07
7	Salumbia	31,80	0,37	32	Tongko	297,21	3,45
8	Toboli	29,55	0,34	33	Malei	203,31	2,36
9	Pelawa	50,43	0,59	34	Bambalo	45,24	0,53
10	Baliara	87,93	1,02	35	Toliba	200,26	2,33
11	Olaya	53,09	0,62	36	Tambiano	51,86	0,60
12	Korontua	35,32	0,41	37	Mawomba	64,66	0,75
13	Dolago	175,11	2,03	38	Kabalo	134,46	1,56
14	Tindaki	146,50	1,70	39	Tayawa	81,62	0,95
15	Sampaloe	60,05	0,70	40	Ue Kuli	44,66	0,52
16	Torue	62,60	0,73	41	Betaue	218,53	2,54
17	Tolai	61,26	0,71	42	Ue Dele	17,02	0,20
18	Topeau	54,00	0,63	43	Sandada	43,20	0,50
19	Suli	150,82	1,75	44	Tojo	216,48	2,51
20	Sausu	568,64	6,60	45	Masalongi	245,65	2,85
21	Tambarana	246,52	2,86	46	Pancuma	80,71	0,94
22	Kalora	8,47	0,10	47	Tongku	122,17	1,42
23	Samalera	17,65	0,20	48	Ue Podi	142,77	1,66
24	Kilo	129,64	1,51	49	Padapu	27,83	0,32



No.	Nama DAS	Luas DAS (Km ²)	Persent ase DAS Dalam WS (%)	No.	Nama DAS	Luas DAS (Km ²)	Perse ntase DAS Dalam WS (%)
25	Kameasi	45,48	0,53	50	Kayunyole	37,76	0,44

Sumber: Rancangan Perda tentang RTRW Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023-2042.

Selanjutnya Wilayah Danau Kawasan Lindung di Sulawesi Tengahdapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.7
Wilayah Danau Kawasan Lindung Di Provinsi Sulawesi Tengah

No	Nama Danau	Kabupaten/Kota	Luas
			(Km ²)
1	Tatawu	Donggala	0,625
2	Padang	Donggala	0,02875
3	Kalimpaa	Donggala	0,055
4	Wanga	Poso	0,245
5	Dampelas	Donggala	4,9375
6	Rano	Donggala	2,50
7	Lindu	Sigi	33,925
8	Bolano Toga	Parigi Moutong	0,2575
9	Batu Dako	Parigi Moutong	0,1775
10	Bolanosau	Parigi Moutong	0,9375
11	Dedei	Parigi Moutong	0,2125
12	Laut Kecil	Parigi Moutong	2,4375
13	Bolano Molosifat	Parigi Moutong	0,1250
14	Poso	Poso	369,385
15	Tanah Morambo	Poso	0,0625
16	Limbo Kasimpo	Poso	0,825
17	Telaga Toju	Poso	0,295
18	Tiu	Morowali	1,3125
19	Bae	Morowali	4,125
20	Kodi	Morowali	2,5625
21	Laindungan	Banggai	0,14
22	Petinding	Banggai	0,0325
23	Bakalan	Banggai	0,0625
24	Kobit	Banggai	0,03
25	Lamotong	Banggai	0,02
26	Tendetung	Banggai	1,4375
27	Alan	Banggai	0,09
28	Makapa B	Banggai	0,23



Sumber: Rancangan Perda Provinsi Sulawesi Tengah tentang RTRW Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2023-2042.

Salah satu jasa lingkungan hidup berdasarkan fungsi yaitu sebagai penyedia air. Daya dukung dan daya tampung tentang air ditetapkan secara nasional melalui Keputusan Menteri LHK Nomor 207/MenLHK/Setjen/PLA.3/4/2019 tentang Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional, dan dipilih jasa lingkungan sebagai penyedia air tersebut karena air merupakan sumber daya alam yang menopang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya yang perlu dipelihara keberlanjutannya. Kebutuhan akan ketersediaan air merupakan satu-satunya jasa lingkungan hidup yang dapat dirasakan merata oleh manusia hampir di seluruh wilayah Indonesia. Seperti dijelaskan sebelumnya jasa lingkungan hidup yang disediakan oleh ekosistem dan langsung dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup sangat terkait dengan penyediaan air dan pangan, akan tetapi penyediaan pangan sangat dipengaruhi jasa lingkungan hidup sebagai pengatur iklim dan penyediaan air. Sama artinya, mengetahui daya dukung dan daya tampung air menjadi titik awal dalam mensintesa keterkaitan antara ketersediaan air dengan daya dukung dan daya tampung fungsi lainnya seperti pangan.

Untuk Pulau Sulawesi, berdasarkan keputusan menteri di atas yang dituangkan dalam Buku Infografis Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional Tahun 2019, secara agregat, daya dukung dan daya tampung air belum melampaui terlampaui. Seluruh ketersediaan air di Pulau Sulawesi sebanyak 138.071.873.264 m³/tahun diperkirakan mampu mendukung populasi paling banyak 172.589.841 jiwa. Untuk kebutuhan air, Pulau Sulawesi membutuhkan air sebanyak 54.005.630.866 m³ dimana 3,02 persen untuk kegiatan rumah tangga dan 96,98 persen untuk kegiatan ekonomi berbasis lahan. Sedangkan untuk Provinsi Sulawesi Tengah dalam Laporan KLHS RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2045 ketersediaan air sebanyak 44.989.281.568 m³/tahun, sedangkan untuk kebutuhan airnya sebanyak 11.221.877.198 m³/tahun.

Jasa Ekosistem Penyedia Air

Ekosistem dalam fungsinya berdasarkan jasa sebagai penyedia air memberikan manfaat penyediaan air bersih yaitu ketersediaan air bersih baik yang berasal dari air permukaan maupun air tanah (termasuk kapasitas penyimpanannya). Air bersih merupakan salah satu kebutuhan primer masyarakat sehingga mempunyai peran penting dalam kehidupan. Secara alami, air bersih dapat berasal dari air permukaan, seperti: sungai dan danau maupun berasal dari air tanah. Bahkan air hujan yang dapat dipergunakan



untuk kepentingan domestik, pertanian, industri maupun jasa. Penyediaan jasa air bersih sangat dipengaruhi oleh kondisi curah hujan dan lapisan tanah atau batuan yang dapat menyimpan air (*akuifer*).

Tabel 2.8
Distribusi Kelas Jasa Ekosistem Penyedia Air di Provinsi Sulawesi
Tengah

Tongan										
KABUPATEN/	RENDA	Н	SEDAN	G	TINGG	I	ı	N/A	TOTAL	
КОТА	На	%	На	%	На	%	На	%	На	%
Banggai	361.347,13	5,90	441.614,15	7,21	16.818,63	0,27			819.779,91	13,38
Banggai Kepulauan	102.113,09	1,67	132.228,97	2,16	3.973,43	0,06			238.315,49	3,89
Banggai Laut	40.155,52	0,66	28.522,75	0,47	95,02	0,00			68.773,29	1,13
Buol	87.285,67	1,42	276.585,99	4,51	6.685,56	0,11		111	370.557,22	6,04
Donggala	108.557,23	1,77	401.859,66	6,56	3.295,48	0,05	28,36	0,0005	513.740,73	8,38
Morowali	141.685,08	2,31	294.830,87	4,81	3.417,11	0,06			439.933,06	7,18
Morowali Utara	306.173,48	5,00	538.546,61	8,79	15.223,54	0,25			859.943,63	14,04
Parigi Moutong	95.186,19	1,55	477.358,04	7,79	8.737,56	0,14			581.281,79	9,48
Poso	209.101,72	3,41	491.195,16	8,02	44.361,44	0,72			744.658,32	12,15
Sigi	21.862,12	0,36	490.124,85	8,00	9.996,23	0,16	11		521.983,20	8,52
Tojo Una-Una	222.170,47	3,63	334.305,89	5,46	5.663,54	0,09			562.139,90	9,18
Toli-Toli	61.046,91	1,00	304.234,46	4,97	5.168,73	0,08			370.450,10	6,05
Kota Palu	13.660,31	0,22	21.786,37	0,36	149,00	0,00	5,56	0,00009	35.601,24	0,58
Total	1.770.344,92	28,89	4.233.193,78	69,09	123.585,28	2,02	33,92	0,0006	6.127.157,90	100,00

Sumber: Laporan KLHS RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2045, 2023

Optimalisasi pemanfaatan sumber daya air menjadi keharusan untuk menjaga keberlanjutan ketersediaan air bagi penataan ruang dan penyelenggaraan kehidupan di dalamnya. Hal ini harus ditunjang dengan kemampuan memelihara daerah tangkapan air (DTA) dan daerah aliran sungai (DAS) sebagai tindakan konservasi yang wajib dilaksanakan. Stabilitas DTA dan DS tentu saja kembali lagi terkait dengan ekosistem hulu dan sekelilingnya. Merosotnya tutupan alami akan menjadi peluang potensi berkurangnya ketersediaan air yang disediakan oleh alam.

Berdasarkan tabel di atas, 70 persen wilayah kabupaten/kota di Sulawesi Tengah berkategori sedang dalam daya dukung penyedia air berbasis jasa ekosistem. Proposi daya dukung indikatif ini dapat dilihat juga sebarannya pada Sebagian wilayah, terutama Kabupaten Tojo Una-Una, Kabupaten Poso, Kabupaten Morowali Utara, dan Kabupaten Banggai memiliki daya dukung penyedia air yang rendah.

- Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Air

Siklus hidrologi (*hydrology cycle*) adalah pergerakan air dalam hidrosfer yang meliputi proses penguapan (*evaporasi*), pendinginan massa udara (kondensasi), hujan (presipitasi), dan pengaliran (*flow*). Siklus hidrologi yang



terjadi di atmosfer meliputi terbentuknya awan hujan, terbentuknya hujan, evaporasi, transpirasi dan evapotranspirasi. Sedangkan siklus hidrologi yang terjadi di biosfer dan litosfer yaitu ekosistem air yang meliputi aliran permukaan, ekosistem air tawar dan ekosistem air laut. Siklus hidrologi yang normal akan berdampak pada pengaturan tata air yang baik untuk berbagai macam kepentingan seperti penyimpanan air, pengendalian banjir, dan pemeliharaan ketersediaan air. Pengaturan tata air dengan siklus hidrologi sangat dipengaruhi oleh keberadaan tutupan lahan dan fisiografi suatu kawasan.

Secara umum kinerja jasa lingkungan dalam memberikan layanan ekosistem pengatur air di Provinsi Sulawesi Tengah dipengaruhi oleh penutupan lahan serta bentanglahan. Pengaturan air dengan siklus hidrologi sangat dipengaruhi oleh keberadaan tutupan lahan dan fisiografi suatu kawasan. Tingginya layanan secara alami jasa pengaturan air ini disumbangkan oleh tutupan lahan yang sebagain besar adalah jenis tutupan lahan berhutan dan bentanglahan dengan ciri karateristik pegunungan dan perbukitan yang memang sangat dominan di wilayah ini.

Faktor-faktor geomorfologi berperan besar dalam jasa layanan ekosistem ini, dengan struktur penutupan lahan yang mempunyai relief perbukitan dan memiliki lereng yang bervariasi mulai dari terjal hingga agak miring serta perbukitan struktural lipatan yang memiliki pola-pola struktur lipatan yang diantaranya dicirikan oleh adanya punggungan-punggungan homoklinal memanjang (hogback) dan lembah-lembah dantaranya (subsequent valley), jenis bentanglahan ini besar mempengaruhi tata aliran air di bagian hulu dalam mengatur tata aliran air. Sedianya penutupan lahan dengan struktur perbukitan vulkanik yang diatasnya terdapat hutan lahan kering pun sangat baik dalam mengatur tata aliran air karena serapan air yang cukup baik di struktur geomorfologi ini, namun jenis penutupan lahan vulkanik di Provinsi Sulawesi Tengah yang berada di perbukitan yang tadinya ditutupi oleh jenis hutan mulai terbuka dan dijadikan perkebunan dan pertanian lahan kering. Sedangkan jasa lingkungan pengatur air berdasarkan bentanglahan yang memiliki potensi dalam memberikan layanan pengatur air antara lain jenis perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan metamorfik, jenis perbukitan solusional karst bermaterial batuan sedimen karbonat, jenis perbukitan vulkanik bermaterial batuan beku luar serta jenis dataran lakustrin bermaterial alluvium.



Tabel 2.9
Distribusi Kelas Jasa Ekosistem Pengatur Air di Provinsi Sulawesi
Tengah

NO	KABUPATEN/KOTA	SANGAT R	ENDAH	RENDA	.H	SEDAN	IG	TINGO	SI	SANGAT	TINGGI	TOTAL	L
INU	KADUPATEN/KUTA	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)
1	Banggai	13.285,80	0,22%	248.840,61	4,06%	178.487,78	2,91%	352.769,47	5,76%	29.639,02	0,48%	823.022,68	13,43%
2	Banggai Kepulauan	602,07	0,01%	166.820,54	2,72%	32.578,61	0,53%	38.310,35	0,63%	3,91	0,0001%	238.315,49	3,89%
3	Banggai Laut	552,81	0,01%	15.780,91	0,26%	2.435,55	0,04%	48.613,43	0,79%	1.390,59	0,02%	68.773,29	1,12%
4	Buol	1.779,41	0,03%	99.554,21	1,62%	23.277,43	0,38%	218.101,59	3,56%	38.338,16	0,63%	381.050,80	6,22%
5	Donggala	2.933,85	0,05%	155.468,89	2,54%	25.055,35	0,41%	295.345,20	4,82%	34.014,65	0,56%	512.817,94	8,37%
6	Kota Palu	2.797,59	0,05%	20.482,67	0,33%	5.494,11	0,09%	8.948,66	0,15%	246,92	0,00%	37.969,97	0,62%
7	Morowali	15.214,32	0,25%	90.450,77	1,48%	42.424,98	0,69%	293.577,47	4,79%	259,77	0,00%	441.927,31	7,21%
8	Morowali Utara	19.012,67	0,31%	233.902,34	3,82%	93.343,19	1,52%	514.842,59	8,40%	17.629,74	0,29%	878.730,54	14,34%
9	Parigi Moutong	3.617,18	0,06%	261.377,43	4,27%	10.161,24	0,17%	251.363,44	4,10%	61.462,62	1,00%	587.981,92	9,59%
10	Poso	9.281,16	0,15%	164.588,28	2,69%	42.223,98	0,69%	399.175,48	6,51%	106.775,17	1,74%	722.044,07	11,78%
11	Sigi	1.162,45	0,02%	124.964,37	2,04%	21.277,52	0,35%	187.486,67	3,06%	184.740,17	3,01%	519.631,18	8,48%
12	Tojo Una-Una	9.462,58	0,15%	169.475,93	2,77%	77.339,61	1,26%	295.655,37	4,82%	4.252,81	0,07%	556.186,29	9,08%
13	Toli Toli	1.175,67	0,02%	117.411,58	1,92%	38.914,30	0,63%	146.866,55	2,40%	55.588,42	0,91%	359.956,52	5,87%
	TOTAL	80.877,58	1,32%	1.869.118,55	30,50%	593.013,66	9,68%	3.051.056,27	49,79%	534.341,94	8,72%	6.128.408,01	100%

Sumber: Buku Daya Dukung dan Daya Tampung PRovinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019

- Status Daya Dukung dan Daya Tampung Air

Data kebutuhan air diperoleh dari data jumlah populasi dan kegiatan ekonomi berbasis lahan (pertanian, industri, perkebunan, kehutanan dan lahan terbangun). Potensi ketersediaan air permukaan berdasarkan wilayah sungai dan sebaran ketersediaan air permukaan di Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut:

Tabel 2.10
Ketersediaan dan Kebutuhan Air Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

Ketersediaan dan Kebutunan Air Provinsi Sulawesi Tengan Tanun 2022						
Ka bupaten/ Kota	Total Ketersediaan Air (m³/tahun)	Total Kebutuhan Air (m³/tahun)	Surplus/defisit (m³/tahun)			
Banggai	4.489.158.716	1.843.026.827	2.646.131.889			
Banggai Kepulauan	808.625.634	597.986.570	210.639.064			
Banggai Laut	285.389.590	150.816.425	134.573.165			
Buol	1.783.074.142	654.417.852	1.128.656.290			
Donggala	2.837.331.939	1.030.009.757	1.807.322.182			
Morowali	5.828.432.233	601.704.635	5.226.727.598			
Morowali Utara	10.329.292.391	1.118.654.155	9.210.638.236			
Parigi Moutong	3.399.114.279	1.975.079.895	1.424.034.384			
Poso	6.160.341.651	962.936.608	5.197.405.043			
Sigi	2.869.261.244	765.568.252	2.103.692.992			
Tojo Una-Una	4.593.357.120	538.022.926	4.055.334.194			
Toli-Toli	1.435.604.054	912.406.713	523.197.341			
Kota Palu	170.298.575	71.246.583	99.051.992			
Sulawesi Tengah	44.989.281.568	11.221.877.198	33.767.404.370			

Sumber: Laporan KLHS RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2045, 2023

Dari tabel di atas, wilayah tertinggi sebagai penyedia air terdapat pada Kabupaten Morowali Utara, Morowali, Tojo Una Una, Poso dan Banggai. Sementera Kebutuhan Tertinggi terdapat pada Kabupaten Parigi Moutong, Banggai, Morowali Utara, Poso, dan Toli Toli.



Tabel 2.11
Status Daya Dukung dan Daya Tampung Air Tahun 2021

Kabupaten/ Kota	Persentase Status Daya Dukung dan Daya Tampung Air Tahun 2021 (persen) Belum Terlampaui Terlampui					
Banggai	78,57	21,43				
Banggai Kepulauan	57,01	42,99				
Banggai Laut	61,92	38,08				
Buol	80,21	19,79				
Donggala	81,33	18,67				
Morowali	98,76	1,24				
Morowali Utara	98,93	1,07				
Parigi Moutong	69,25	30,75				
Poso	96,98	3,02				
Sigi	89,09	10,91				
Tojo Una-Una	98,90	1,10				
Toli-Toli	66,84	33,16				
Kota Palu	86,19	13,81				

Sumber: Laporan KLHS RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2045, 2023

Hasil analisis ketersediaan air menunjukkan daya dukung air yang sebagian besar belum terlampaui di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Namun terdapat juga kondisi daya dukung air yang telah terlampaui bermakna bahwa area tersebut tidak mampu menyediakan air secara mandiri. Oleh karenanya, perlu disusun strategi peningkatan tangkapan dan distribusi air untuk memenuhi kurangnya daya dukung penyedia air.

f. Klimatologi

Kota Palu memiliki dua musim, yaitu musim panas dan musim hujan. Berbeda dengan tahun sebelumnya. Sepanjang Tahun 2023 terjadi musim hujan di Kota Palu dengan intensitas tinggi pada bulan Juli yaitu 120,80, pada bulan sebelumnya yaitu bulan Mei 65,80, sedangkan curah hujan terendah terjadi pada Bulan oktober yaitu 9,80 mm.

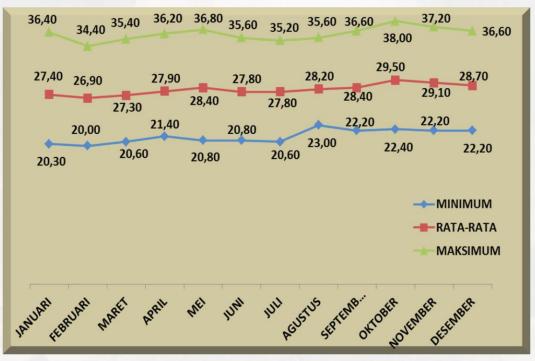




Sumber: BPS, Sulteng Dalam Angka 2024.

Gambar 2.6 Kondisi Curah Hujan di Kota Palu Menurut Bulan Tahun 2023

Pada Tahun 2023, suhu udara rata-rata terendah terjadi di bulan Februari yaitu 26,90°C, dan tertinggi yaitu 29,50°C terjadi pada bulan Oktober, sedangkan suhu udara maksimum tertinggi terjadi pada bulan Oktober yaitu 38,00°C, dan yang terendah pada bulan Februari yaitu 34,40°C. Sementara suhu udara minimum yang tertinggi terjadi pada bulan Agustus yaitu 23,00°C, dan yang terendah pada bulan Februari yaitu 20,00°C.



Sumber: BPS, Sulteng Dalam Angka 2024

Gambar 2.7
Kelembaban Udara Minimum, Maksimum dan Rata-Rata Kota Palu
Menurut Bulan Tahun 2023

Kelembaban udara rata-rata di Kota Palu selama Tahun 2023 yang tertinggi terjadi pada bulan Februari dengan kelembaban udara tertinggi yaitu 79,40 persen dan terendah terjadi pada bulan Oktober yaitu 70,30 persen, sedangkan kelembaban udara minimum yang tertinggi terjadi pada bulan Desember yaitu 47,00 persen, sementara yang paling rendah kelembaban udara terdapat pada bulan Oktober sebesar 30,00 persen.

Kelembaban udara maksimum yang tertinggi terjadi pada bulan April, Mei dan Juni yaitu 100,00 persen, dan Kelembaban udara yang paling rendah terdapat pada bulan Februari, Agustus dan September yaitu 97,00 persen.



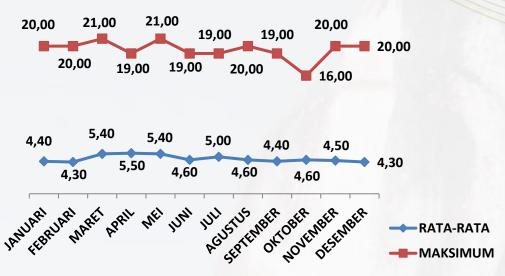
Sumber: BPS, Sulteng Dalam Angka 2024.

Gambar 2.8 Kecepatan Angin Kota Palu Menurut Bulan Tahun 2023

Sementara Kecepatan Angin pada Tahun 2023 di Kota Palu. Rata-rata Kecepatannya tertinggi terjadi pada bulan April yaitu mencapai 5,50 knot, sedangkan terendah terjadi pada bulan Februari dan Desember yaitu 3,30 knot.

Sedangkan Kecepatan Angin Maksimun tertinggi pada bulan Maret dan bulan September yaitu 23,00 knot, dan yang terendah terjadi pada bulan Mei yaitu 15,00 knot.





Sumber: BPS, Sulteng Dalam Angka 2024

Gambar 2.9 Kecepatan Angin Maksimum dan Rata-Rata Kota Palu Menurut Bulan Tahun 2023

g. Penggunaan Lahan

Hutan mempunyai peran penting dalam menunjang kelangsungan hidup dan kehidupan mahluk hidup, khususnya umat manusia. Hutan tidak hanya memberikan manfaat langsung (*tangible use*) sebagai sumber penghasil hasil hutan berupa kayu dan non kayu, tetapi hutan juga memberikan manfaat tidak langsung (*intangible use*) sebagai pengatur tata air, kesuburan tanah, iklim mikro, pencegah erosi dan longsor, sehingga eksistensinya harus tetap dipertahankan melalui pengaturan fungsi hutan.

Sulawesi Tengah merupakan salah satu provinsi yang dikaruniai potensi sumberdaya hutan yang melimpah, baik ditinjau dari gatra luas kawasan hutan maupun gatra keanekaan hayati.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023-2042, Luas Kawasan Lindung yaitu 2.329.745 Ha, Kawasan Budidaya Hutan seluas 2.078.858 Ha, Areal Pengguna Lain (APL) seluas 2.083.765 Ha, dapat terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.12
Pola Ruang Provinsi Sulawesi Tengah

No.	Fungsi Kawasan	Luas		Votorongon
140.	Fullysi Kawasali	(Ha)	%	Keterangan
I.	Kawasan Lindung	2.329.745	35,55	
	Kawasan Konservasi Suaka Alamdan Pelestarian Alam	656.270*	10	* Termasuk DPCLS seluas 5.510 Ha. Dalam Proses Persetujuan DPR RI

Na	Funge: Kawasan	Luas		Mataran san
No.	Fungsi Kawasan	(Ha)	%	Keterangan
	Kawasan Konservasi Suaka Alamdan Pelestarian Alam Air	340.120	5,19	
	Hutan Lindung	1.333.355*	21	*Termasuk DPCLS seluas 9.802Ha. DalamProses Persetujuan DPR RI
II.	Kawasan Budidaya Hutan	2.078.858	31,73	
	Hutan Produksi Tetap(HPT)	1.442.649	22,02	
	Hutan Produksi (HP)	412.746	6,3	
	Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK)	223.463	3,41	
III.	Areal Penggunaan Lain (APL)	2.083.765	32	1/4
	ÀPL	2.083.765	32	
IV.	Perairan(Danau dan Sungai)	60.304	0,92	
	Jumlah III& IV	2.144.069	32,72	
	Luas Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah (I+II+III+IV)	6.552.672	100	

Sumber: Perda Provinsi Sulawesi Tengah No. 1 Tahun 2023 tentang RTRW Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023-2042.

2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

a. Pertanian

Berdasarkan data RTRW Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023-2042 luas potensi lahan Pertanian seluas 672.795 Ha, lahan ini masih dapat diperluas dengan memanfaatkan kawasan hutan konversi seluas 297.859,78 Ha, sehingga potensi keseluruhan pertanian adalah 942.206 Ha. Pengembangan Potensi Pertanian dibagi atas dua bagian, yaitu: (1) Pertanian Tanaman Pangan Lahan Basah (TPLB); (2) Pertanian Tanaman Pangan Lahan Kering (TPLK).

Untuk lahan basah; pengembangan kawasan pertanian diarahkan pada kawasan yang sesuai untuk penanaman tanaman pangan. Lahan basah yang mempunyai sistem atau potensi pengembangan prasarana pengairan, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti; ketinggian kawasan di bawah 1000 m, kelerengan kawasan di bawah 40% dan kedalaman efektif lapisan tanah di atas 30 cm.

Untuk Lahan Kering; lebih diarahkan pada areal yang tidak mempunyai sistem dan atau potensi pengembangan pengairan/irigasi dengan mempertimbangkan faktor-faktor; ketinggian kawasan di bawah 1000 m,



kelerengan kawasan di bawah 40% dan kedalaman efektif lapisan tanah di atas 30 cm. Saat ini Provinsi Sulawesi Tengah telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) dengan rincian sebagai berikut:

- Untuk Lahan Sawah Irigasi dan Tadah Hujan seluas 168.250 Ha yang pengelolaannya lebih diarahkan pada pola tanam satu kali seluas 12.630 Ha, tanam dua kali seluas 124.713 Ha, tanam tiga kali seluas 6.132 Ha, tidak tanam padi seluas 3.689 Ha, tidak diusahakan atau bero seluas 21.086 Ha.
- Untuk lahan kering yang terdiri dari tegalan atau kebun seluas 577.490 Ha dan ladang atau huma seluas 241.220 Ha. Selanjutnya total luas lahan pertanian di Provinsi Sulawesi Tengah yang diarahkan untuk Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) seluas 266.552 Ha yang terdiri masing-masing Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) seluas 119.702 Ha dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) seluas 146.850 Ha. Ketersediaan lahan ini diharapkan dapat mempertahankan ketahanan pangan di Provinsi Sulawesi Tengah melalui Program Sawah Lestari.

Jenis pertanian tanaman pangan di Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2023 memiliki luas panen 177.266,17* ha, meningkat jika dibandingkan pada tahun 2022 memiliki luas panen 168 993,18 ha, sedangkan jumlah produktivitas pada tahun 2022 seluas 44,05 ku/ha, tahun 2023 meningkat menjadi 45,86* ku/ha, sementara pada tahun 2022 produksi 744 408,70 ton, mengalami peningkatan produksi sebesar 812.948,49* ton, pada tahun 2023, ditunjukkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.13
Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Padi Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 dan 2023

No.	Kabupaten/Kota	Luas Panen (ha)		Produktiv	itas (ku/ha)	Produksi1 (ton)	
140.	o. Rabapaton/Rota	2022	2023	2022	2023	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Banggai Kepulauan	291,58	569,48 *	34,06	39,31 *	992,99	2.238,44 *
2.	Banggai	36 173,12	39.073,80 *	38,98	44,64 *	141 013,22	174.431,76 *
3.	Morowali	8 308,11	6.276,84 *	42,71	41,61 *	35 483,73	26.115,52 *
4.	Poso	18 342,81	20.561,74 *	42,46	46,60 *	77 879,42	95.815,06 *
5.	Donggala	12 357,90	12.222,98 *	46,34	49,85 *	57 266,29	60.933,39 *



	TAITON 2020						
No.	Kabupaten/Kota	Luas P	anen (ha)	Produktiv	itas (ku/ha)	Produksi1 (ton)	
140.	rabapaton/Nota	2022	2023	2022	2023	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Tolitoli	13 102,71	13.751,23 *	44,22	40,23 *	57 937,49	55.315,19 *
7.	Buol	4 521,98	5.332,06 *	37,15	34,48 *	16 798,44	18.384,26 *
8.	Parigi Moutong	51 599,36	52.141,72 *	47,49	47,81 *	245 039,66	249.300,33 *
9.	Tojo Una-Una	1 353,12	1.622,22 *	41,96	45,35 *	5 677,34	7.356,78 *
10.	Sigi	16 511,28	18.058,79 *	48,49	51,36 *	80 066,14	92.758,17 *
11.	Banggai Laut	ı	1				ı
12.	Morowali Utara	6 236,30	7.485,13 *	40,67	39,52 *	25 365,23	29.579,76 *
13.	Palu	194,91	170,18 *	45,6	42,30 *	888,75	719,83 *
	Sulawesi Tengah	168 993,18	177.266,17 *	44,05	45,86 *	744 408,70	812.948,49 *

Sumber: BPS, Provinsi Sulteng Dalam Angka 2024.

Selanjutnya pada tahun 2023 produksi padi mengalami peningkatan yaitu 812.948,49* ton, jika dibandingkan dengan produksi padi pada tahun 2022 yaitu 744.408,70 ton. Sedangkan untuk produksi beras pada tahun 2022 berjumlah 439.408,72 ton, meningkat menjadi 479.866,30 ton pada tahun 2023 dan penyumbang terbesar Kabupaten Parigi Moutong baik dari sisi produksi padi maupun produksi beras sebesar 30,67 persen, dapat ditunjukkan pada tebel berikut.

Tabel 2.14
Produksi Padi dan Beras Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 dan 2023

N	16.1	Produksi F	Padi (ton)	Produksi Beras (ton)		
No.	Kabupaten/Kota	2022	2023	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	
1.	Banggai Kepulauan	992,99	2.238,44 *	586,15	1.321,30 *	
2.	Banggai	141 013,22	174.431,76 *	83 237,12	102.963,38 *	
3.	Morowali	35 483,73	26.115,52 *	20 945,28	15.415,44 *	
4.	Poso	77 879,42	95.815,06 *	45 970,57	56.557,59 *	
5.	Donggala	57 266,29	60.933,39 *	33 803,08	35.967,69 *	
6.	Tolitoli	57 937,49	55.315,19 *	34 199,29	32.651,39 *	
7.	Buol	16 798,44	18.384,26 *	9 915,76	10.851,84 *	
8.	Parigi Moutong	245 039,66	249.300,33 *	144 641,73	147.156,72 *	

N	Vahunatan/Vata	Produksi l	Padi (ton)	Produksi Beras (ton)		
No.	Kabupaten/Kota	2022	2023	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	
9.	Tojo Una-Una	5 677,34	7.356,78 *	3 351,22	4.342,53 *	
10.	Sigi	80 066,14	92.758,17 *	47 261,35	54.753,19 *	
11.	Banggai Laut	_	_	_	_	
12.	Morowali Utara	25 365,23	29.579,76 *	14 972,56	17.460,34 *	
13.	Palu	888,75	719,83 *	524,61	424,89 *	
	Sulawesi Tengah	744 408,70	812.948,49 *	439 408,72	479.866,30 *	

Sumber: BPS, Provinsi Sulteng Dalam Angka 2024

Selajutnya dilihat dari daerah irigasi, pada tahun 2023 luas areal potensial 47.640 Ha, sedangkan luas areal fungsional seluas 33.022 Ha, dan sangat menentukan keberhasilan produksi beras. Pada tahun 2023 di Provinsi Sulawesi Tengah jumlah daerah irigasi sebanyak 30 daerah, seperti pada tabel berikut.

Tabel 2.15
Daerah Irigasi, Luas Areal Sawah Potensial dan Fungsional Menurut
Kabupaten/Kota Kewenangan dan tanggungjawab Provinsi Sulawesi
Tengah (Ha) Tahun 2023

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Daerah Irigasi	Luas Potensial (ha)	Luas Fungsional (ha)
1	2	3	4	5
1.	Banggai Kepulauan	-	-	-
2.	Banggai	8	13.316	8.230
3.	Morowali	2	3.893	3.986
4.	Poso	4	5.628	3.669
5.	Donggala	1	1.625	923
6.	Tolitoli	3	4.348	2.948
7.	Buol	1	1.028	534
8.	Parigi Moutong	8	14.923	11.616
9.	Tojo Una–Una	-	-	-
10.	Sigi	2	1.669	494
11.	Banggai Laut	-	-	-
12.	Morowali Utara	1	1.210	622
13.	Palu	-	-	-
	Sulawesi Tengah	30	47.640	33.022



Sumber: BPS, Provinsi Sulteng Dalam Angka Tahun 2024.

b. Hortikultura

Pencapaian produksi pertanian hortikultura bagi penduduk Sulawesi Tengah utamanya bawang merah, bawang putih, cabai besar, cabe rawit, Kubis, Kangkung, Petsai dan tomat masih dipenuhi dari produksi sendiri, dan hanya beberapa komoditi dari daerah lain sebagai tambahan, dapat dilihat pade tabel berikut.

Tabel 2.16
Luas Panen Tanaman Sayuran Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis
Tanaman di Provinsi Sulawesi Tengah (ha) Tahun 2023

Kabupaten/Kota	Bawang Merah (Ha)	Cabai Besar (Ha)	Cabai Rawit (Ha)	Kubis (Ha)	Tomat (Ha)	Bawang Putih (Ha)	Kangkung (Ha)	Petsai/Sawi (Ha)
Banggai Kepulauan	14	15	108	1	81	_	61	11
Banggai	16	1	379	3	149	-	48	34
Morowali	14	49	80	-	57	-	100	110
Poso	88	97	274	1433	292	-	76	482
Donggala	23	82	184	38	59	-	39	7
Tolitoli	3	26	121	_	37	-	62	13
Buol	5	13	298	-	14	-	10	9
Parigi Moutong	116	61	605	_	119	14	84	30
Tojo Una-Una	4	2	373	_	51	_	41	16
Sigi	258	12	624	1	447	20	80	81
Banggai Laut	-	_	16	_	3	-	17	3
Morowali Utara	_	7	239	1	16	_	33	17
Palu	44	-	51	_	68	8	32	33
Sulawesi Tengah	585	364	3.350	1.476	1.391	42	682	844

Sumber: BPS, Provinsi Sulteng Dalam Angka 2024.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa areal yang tersedia untuk penanaman kedelapan jenis komoditi tersebut yakni pada tahun 2023 memiliki areal seluas 8.734 Ha, dan yang terluas yaitu 3.350 ha untuk areal penanaman cabe rawit meningkat jika dibandingkan pada tahun 2022 yaitu 3.452 Ha, sedangkan areal yang jenis komoditi paling sedikit adalah Bawang Putih yaitu seluas 42 Ha, namun meningkat dibandingkan tahun 2022 hanya seluas 18 Ha.

c. Perkebunan

Kawasan atau areal Perkebunan Tanaman Tahunan/Perkebunan diarahkan pada areal tanaman tahunan/perkebunan pada tahun 2023 dengan



Potensi perkebunan Provinsi Sulawesi Tengah seluas 707.598,11 Ha, dengan 15 potensi komoditi sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 2.17
Luas Areal Tanaman Perkebunan Menurut Jenis Tanaman di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

No.	Jenis Tanaman	Luas Areal (Ha)	
1.	Kelapa Sawit	60.913,77	
2.	Kelapa	213.349,72	
3.	Karet	5.984,00	
4.	Kopi	12.687,45	
5.	Kakao	290.201,89	
6.	Tebu	- //	
7.	Cengkeh	73.959,80	
8.	Kapuk	776	
9.	Lada	3.311,70	
10	Pala	22.845,25	
11.	Vanili	411,73	
12.	Jambu Mete	12.950,85	
13.	Sagu	3.203,70	
14.	Kemiri	5.366,90	
15.	Nilam	1.635,35	
	Total Luas (Ha)	707.598,11	

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Angka 2024

d. Peternakan

Pengembangan kawasan peternakan umumnya berada pada kondisi lingkungan dengan ketinggian di bawah 1.000 meter, kelerengan di bawah 1.000 meter dan jenis tanah dan iklim yang sesuai untuk padang rumput alamiah. Pemanfaatan kawasan secara optimal seluas 130.955,5 Ha, sedangkan potensi areal peternakan yang sudah dimanfaatkan seluas 120.955,5 Ha.

Adapun jenis ternak yang diusahakan diklasifikasikan sebagai berikut: (a) Ternak Besar meliputi: sapi, kerbau dan kuda; (b) Ternak kecil meliputi: kambing, domba dan babi; (c) Ternak unggas meliputi: ayam ras, ayam kampung dan itik.

e. Perikanan

Potensi perairan Provinsi Sulawesi Tengah seluas 77.295,9 Km², memiliki berbagai jenis ikan dan biota laut lainnya, terbagi dalam 3 (tiga) zona yaitu (1) Selat Makasar dan Laut Sulawesi (sebesar 929.700 ton), (2) Teluk Tomini (sebesar 595.620 ton), (3) Teluk Tolo (sebesar 68.456 ton). Potensi sumberdaya ikan di perairan tersebut kurang lebih sebanyak 330.000 ton per

tahun. Sedangkan ikan yang bisa dikelola secara lestari sekitar 214.000 ton per tahun. Di Teluk Tolo terdapat 68.000 ton per tahun, Teluk Tomini 78.000 ton per tahun, Selat Makasar dan Laut Sulawesi 68.000 ton per tahun. Dari potensi ikan lestari tersebut jumlah ikan yang dapat ditangkap sebesar 217.280 ton per tahun.

f. Industri

Pengembangan kawasan industri mempunyai persyaratan lokasi industri sesuai dengan hasil studi kelayakan. Rencana pemanfataan kawasan industri diarahkan pada lokasi yang teridentifikasi memiliki potensi sumber daya alam. Pengembangan kawasan diarahkan pula pada lokasi yang mempunyai daya dukung sarana dan prasarana.

Untuk pengembangan industri Provinsi Sulawesi Tengah ke depan diarahkan pada pengolahan barang manufaktur dan agroindustri yang mengandalkan kegiatan produksi yang dilakukan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kota Palu dan industri pengolahan tambang pada Kawasan Industri Morowali (KI-Morowali), dan Kawasan Industri Morowali Utara (KI-Morowali Utara) serta Industri Gas Bumi di Kabupaten Banggai.

g. Pariwisata

Provinsi Sulawesi Tengah memiliki potensi wisata yang cukup untuk dikembangkan menjadi obyek dan atraksi wisata bahari, wisata alam dan wisata budaya. Potensi pariwisata dapat dikembangkan atas dasar nilai budaya yang sudah ada dalam masyarakat, nilai adat istiadat dan agama yang dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi masyarakat.

Adapun Potensi dan obyek pariwisata yang dapat dikembangkan di Sulawesi Tengah adalah:

- Kabupaten Banggai Kepulauan dengan obyek dan daya tarik wisata yaitu Pulau Makaliu (pulau Tikus), Pulau Lambangan Pouno, Pulau Tolobundu, Pulau Bandang Besar dan Kecil, Pulau Lesampuang, Pulau Delopo, Pantai Pasir Putih, Pulau Kembongan, dan Pulau Kokungan;
- Kabupaten Buol dengan obyek dan daya tarik wisata yaitu Taman Wisata Alam Kumaligon, Goa Kolera, Pantai Kamaligon, Air Terjun Talokan, Sumber Air Panas, Air Terjun Pinamula, Rumah Adat Buol, Pantai Pelepas Rindu Hulubalang, Pantai Batu Susun, Pemandian Alam Tirtaria, Rumah Raja Buol, Pulau Ringgit/Pulau Lamari, Pulau Lesman, Pulau Boki, Pulau Busak, Pulau Raja, Gunung Pogogul, Pulau Panjang;

- Kabupaten Donggala dengan obyek dan daya tarik wisata yaitu Pantai Batusuya, Taman Rekreasi Umum Loly Indah, Teluk Telenggano, Pusentasi, Pantai Boneoge, Toravega Cottage, Pantai Enu, Tanjung Karang, Harmony Cottage, Golden park Cottage, Lokasi Berkemah/Camping Ground, Pulau Pasoso.
- Kabupaten Morowali Morowali Utara dengan obyek dan daya tarik wisata yaitu Cagar Alam Morowali, Pemancingan Putri Malu, Air Terjun Mempueno, Sumber Air Panas One Pute, Teluk Tomori, Pulau Rumbia, Batu Payung, Tebing Toppohulu, Batu Putih, Pulau Ulu, Pengia, Taman Laut Kaleroang, Menui Kepulauan, Benteng Fafontofure, Mesjid Tua Bungku, Budaya Masyarakat Wana, Istana Bungku, Rumah Controleur/Pengawas, Kubur Raja Marunduh, Situs Istana Raja Mori, Kepulauan Sombori, dan Bangunan Bersejarah;
- Kabupaten Parigi Moutong dengan obyek dan daya tarik wisata yaitu Pulau Kelelawar, Tanjung Makakata, Situs Rumah Raja Moutong, Rumah Klerek, Air terjun dan Tebing Likunggavali, Pantai Bambalemo, Pantai Indah Bomba Kaili, Habitat Burung Maleo, Perkebunan Ebony, Pantai Junayasa, Pantai Prajurit Posona, Benda Cagar Budaya, Situs Tanalanto, Makam Raja Torikota, Makam Raja Maruf(Magau Janggo), Makam Magau Langi Maili, Makam Magau Nguni Pasolemba, Makam Magau Tagunu, Pantai Tumpapa;
- Kabupaten Poso dengan obyek dan daya tarik wisata yaitu Pantai Seribu Bintang, Pantai wisata Tamongajo, Lembah Napu, Besoa dan Bada, Situs Rumah Adat Tambi, Megalith, Situs Suso, Situs Sepe, Situs Tadulako, Situs Megalit Pokekea, Situs Lempe, Deas Wuasa, Situs Padang Padali, Situs Megalith Tamadue, Situs Watulumu, Situs Watutau, Situs Megalith Betue, Situs Mungku Padampaa, Situs Watunongko, Danau Poso, Watubaula, Goa Tangkaboba, Pantai Tandolala, Siuri Cottage, Taman Anggrek Bancea, Padamariri, Goa Pamona;
- Kabupaten Tolitoli dengan obyek dan daya tarik wisata yaitu Gua Pompaile, Air Terjun Kolasi, Air Panas Tanigi, Bendungan Kolondom, Tanjung Matop, Air Terjun Sigelang, Pulau Lutungan, Pantai Tende Sabang, Tanjung Simuntu, Pantai Lalos, Pantai Bajugan, Rumah Adat Etnis Tolitoli.
- Kabupaten Tojo Una-una dengan obyek dan daya tarik wisata yaitu Kepulauan Togean, Air Terjun Tolibaz, Pantai Tipae, Pantai Pasir Putih Matako, Pemandian Malatong, Air Panas Marowo, Pulau Pangempa,

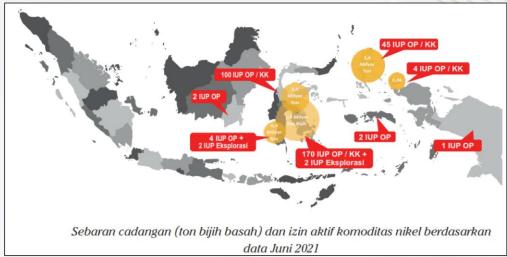
Tanjung Api, Sungai Bongka, Pantai Capatana, Pulau Kabalutan, Pulau Malenge, Jembatan Bakau, Pulau Bolilanga, Pulau Taipi, Pulau Unauna, Tanjung Keramat, Pulau Kadidiri;

- Kabupaten Banggai dengan obyek dan daya tarik wisata yaitu: Air Panas Uwedaka, Permandian Salodik, Danau Makapa, Air Terjun Hanga-Hanga, Permandian Sandakan, Permandian Dondo, Air Terjun Nambo, Permandian Ampata, Gua Wira, Permadian Kilo Lima, Teluk Lalong, Pantai Pandaan Wangi, Pulau Dua, Pulau Poat, Boli Cotage Cafe, Gereja Tua Simpangan, Situs Totonga Bola Matindok;
- Kota Palu dengan obyek dan daya tarik wisata yaitu: Niki Beach, Museum Negeri Sulawesi Tengah, Souraja atau Banua Oge, Kolam Renang Milenium, Lokasi MTQ Jabal Nur, Taman Ria, Dayo mpoluku, Teluk Palu, Makam Dato Karama, Kerajinan Tangan dan Makanan Khas Daerah, Makam Pue Njidi, Kolam Renang Graha Tirta, Pantai Taipa, Jazz Hotel dan Recreation Zone, Pantai Talise, Bumi Roviga, dan Cagar Alam Poboya.
- Kabupaten Sigi dengan obyek dan daya tarik wisata yaitu Situs Bangga,
 Camping Ground Paneki, Matantimali, Pemandaian Uwelera Porame,
 Porame Paradise, Mantikole, Taman Wisata Kapopo, Air Terjun Wera,
 Desa Dombu, Desa Toro, Lobo, Air Terjun Pawelua, Air Panas Bora,
 Gampiri, Kulit Kayu, Habitat Burung Maleo, Desa Pakuli, Danau Lindu,
 Sungai Lariang, Lembah Pipikoro, Air TerjunTamunggu Indah.

h. Pertambangan

Provinsi Sulawesi Tengah memiliki potensi sumberdaya alam yang melimpah, antara lain terdapat potensi bahan galian dan mineral, serta potensi gas dan minyak bumi. Berdasarkan data dan informasi Peluang Investasi Nikel Indonesia yang dipublikasi oleh Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM, Provinsi Sulawesi Tengah memiliki Potensi Cadangan Nikel sebanyak 0,9 miliar ton dengan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) sebanyak 100 dengan luas wilayah tambang nikel seluas 212.838 Ha yang berada di wilayah Kawasan Industri Kabupaten Morowali dan Kabupaten Morowali Utara. Sektor Pertambangan ini memberi kontribusi yang sangat signifikan bagi perekonomian daerah Provinsi Sulawesi Tengah yakni sebesar 3,40 persen dari Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 15,17 persen pada tahun 2022, dan Sektor Industri pengolahan (yang didominasi pengolahan nikel) memberi kontribusi sebesar 8,64 persen dari Laju pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 15,17 persen pada tahun 2022.





Sumber: Direktorat Jenderal Minerba, Kementerian ESDM (Data Juni 2021)

Gambar 2.10 Sebaran Cadangan (Ton Bijih Basah) dan Izin Aktif Komoditas Nikel di Indonesia Tahun 2021

Potensi minyak bumi yang terdapat di Kecamatan Bungku Utara Kabupaten Morowali terdapat di lapangan Minyak Tiaka Blok Trili yang terletak 17 mil dari garis pantai. Cadangan minyak di lapangan Tiaka sebesar 106,56 Million Barrel Oil/juta Barrel minyak (MMBO). Sedangkan potensi minyak bumi yang terdapat di Kecamatan Toili Barat Kabupaten Banggai memiliki kapasitas 16,5-23 juta barrel per tahun dengan total kapasitas produksi 6.500 Barrel (BOPD) yang diperoleh dari enam sumur, dan produksi rata-rata setiap sumur yaitu 1.100 BOPD. Disamping itu, Kabupaten Banggai juga memiliki potensi gas alam cair yang terdapat di Donggi-Senoro dengan perkiraan cadangan sebesar 20-28 trilyun kaki kubik (tcf), jumlah kandungan gas di ladang-ladang Donggi-Senoro besarnya dua kali lipat dibandingkan sisa kandungan yang terdapat di ladang gas alam Arun di Aceh yang jumlahnya mencapai 14 tcf.

Selain potensi minyak bumi dan gas alam tersebut, Sulawesi Tengah juga memiliki potensi pertambangan. Potensi emas di Sulawesi Tengah terdapat di Kota Palu (Kecamatan Mantikulore dan Palu Utara), dengan luas wilayah tambang 561.050 Ha, Kabupaten Parigi Moutong (Kecamatan Parigi dan Moutong) dengan luas wilayah tambang 46.400 Ha, Kabupaten Buol (Kecamatan Paleleh, Bunobogu, Dondo) dengan luas wilayah tambang 746.400 Ha, Kabupaten Poso (Kecamatan Lore Utara) dengan luas wilayah tambang 19.180 Ha, dan Kabupaten Sigi (Kecamatan Sigi Biromaru) dengan luas wilayah tambang 228.700 Ha.

Secara umum potensi pertambangan yang terdapat di Sulawesi Tengah dapat dilihat pada tebel berikut:



Tabel 2.18
Potensi dan Sebaran Pertambangan di Sulawesi Tengah

No. Bahan Galian		Ciri Khas - Lokasi	Keterangan		
I.	Batuan Ornamen/poles				
1.	Granit, Granodiorit, Gabro, Basal, Dasit dan Andesit	Granit warna Merah Daging terdapat di Kab. Banggai Kepulauan Granit Warna abu- abu, Abu-abu gelap terdapat di Kab. Donggala, Parigi Moutong dan Tolitoli	Gabro di Kab. Donggala pernah ditambang yang dipasar disebut Granit HI TAM		
2 Marmer/pualam dan Sarpentin		Marmer Hijau terdapat di Kab. Tojo Una una, Parigi Moutong dan Poso Marmer Coklat, Putih, Krem dan Abu-abu terdapat di Kab. Morowali dan Kab. Banggai	Marmer Hijau-Muda pernah dieksploitasi di Poso dan Morowali.		
		Marmer Coklat Kemerahan terdapat di Kab. Parigi Moutong Marmer Coklat terdapat di kab. Morowali			
II.	Batuan Bahan Konstruksi				
3	Sirtukil	Terdapat Kota Palu dan disemuaKabupaten se Sulawesi Tengah.	Material berasal dari rombakanbatuan yang terdiri daribatuanGranit, Granodiorit, Basal, Gabro,Andesit, Dasit, Serpentinit, Dunit,juga dari Breksi dan KonglomeratDi Kab. Donggala dan Kota Paludiantar-pulaukan keKalimantan Timur.		
III.	Mineral Non Logam lainnya				
4	Batugamping	Kab. Donggala, Buol, Poso, BanggaiKepulauan dan Morowali	Kab. Donggala, BanggaiKepulauan mempunyai potensiBahan Baku Semen yang sudahmelalui studi Kelayakan dan AMDAL.		
5	Lempung	Disemua Kabupaten se Sulawesi Tengah	Sebagian baru dimanfaatkan dalam pembuatan batu bata,Genteng dan batako.		
6. Pasir Kwarsa		Kab. Donggala, Parigi Moutong,	Umumnya mempunyai kadar		
	0	Tolitoli dan Banggai Kepulauan	SiO3 kurang dari 75 %		
7.	Gypsum	Kab. Banggai Kepulauan dan Kota Palu	Dipersiapkan untuk Pabrik Semendi Banggai Kepulauan		
8.	Talk	Kab. Banggai, dan Tojo Unauna	Berupa Sisipan pada batuan batuan UltrabasaPertanian (Kaptan), Kadar Mg 03		
9.	Dolomit	Kab. Banggai	Sebagai bahan baku Kapur(Magnesium) sampai 35 %		

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Sulteng, 2022.

Selain hal tersebut di atas, Sulawesi Tengah juga memiliki potensi sumberdaya energi yang terbarukan dan tidak terbarukan, yaitu antara lain:

Gas Bumi : 9,6 triliun kaki kubik

Panas Bumi: 378 mWe

Sumber Energi Terbarukan:

☐ Air : 1.001,980 MW☐ Matahari : 5.512 kWh/m²

☐ Angin : 2 – 5 m/s☐ Biogas : 19.026 kW

 Luas Lahan Kritis Untuk Budi Daya Tanaman Jarak Pagar (Biofuel) : 260.070 ha.

Potensi energi air di Sulawesi Tengah cukup banyak baik skala besar (PLTA), menengah (PLTM) maupun skala kecil (PLTMH). Salah satu potensi tenaga air skala besar yang ada di Sulawesi Tengah adalah potensi tenaga air sungai Sulewana yang memiliki 3 titik potensi yaitu PLTA Poso-1, PLTA Poso-2 dan PLTA Poso-3. PLTA Poso 2 telah beroperasi sejak Tahun 2012 dengan Kapasitas 3x65 MW, sementara PLTA Poso-1 dengan kapasitas 4x30 MW dan PLTA Poso-3 dengan kapasitas 4x50 MW. Ketiga pembangkit tersebut direncanakan sebagai pembangkit Peaker dengan total kapasitas 515 MW.

Potensi energi air skala besar yang sedang dalam proses perizinan adalah PLTA Gumbasa dengan kapasitas 45 MW yang akan dikerjakan oleh PT. Gumbasa Energy. Potensi tenaga air skala (mini) yang sedang dibangun adalah PLTM Tomini - 2 dengan kapasitas 2 x1 MW oleh Pikitring Sulmapa dengan kemajuan pembangunan sudah mencapai 78,48 %. Potensi tenaga air di Provinsi Sulawesi Tengah masih banyak yang belum dimanfaatka terutama potensi skala menengah (PLTM) dan kecil (PLTMH).

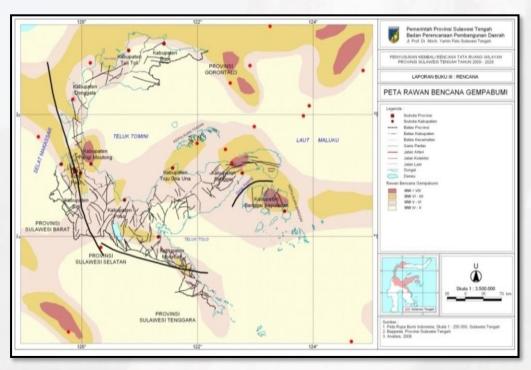
Sementara untuk potensi Panas Bumi terdapat dibeberapa titik yang tersebar di Kabupaten Poso dan Donggala dengan potensi berkisar antara 20-40 Mwe. Sulawesi Tengah mempunyai intensitas sinar matahari cukup tinggi karena dilalui garis khatulistiwa. Penyinaran sinar matahari rata-rata 64 – 78 %, yang dapat dikembangkan sebagai sumber energi alternative dengan memanfaatkan *Solar Home System* (SHS) khususnya di daerah pedesaan dan pulau-pulau kecil yang sulit dijangkau oleh jaringan listrik PLN.

Secara geografis kedudukan Sulawesi Tengah mempunyai garis pantai yang panjang kurang lebih 4.013 km, hal ini merupakan potensi energi yang dapat dimanfaatkan baik untuk pembangkit listrik maupun untuk tenaga penggerak bagi mesin-mesin tertentu. Kecepatan rata-rata angin di Sulawesi Tengah setiap bulannya berkisar antara 2–5 m/s.



i. Wilayah Potensi Rawan Bencana

Sebagian besar wilayah Provinsi Sulawesi Tengah termasuk kategori Kawasan/Zona Rawan Bencana, antara lain kawasan rawan letusan gunung berapi yaitu Gunung Colo yang terletak di Pulau Una-una Kabupaten Tojo Unauna, kawasan rawan gempa yang berskala tinggi di Kota Palu, Kabupaten Banggai, Bangkep, Parigi Moutong, berskala menengah di Kabupaten Sigi, Tolitoli, Morowali, Poso, sementara berskala rendah di Kabupaten Buol dan Morowali.



Sumber: Badan Informasi Geospasial (BIG) RI

Gambar 2.11
Peta Rawan Bencana Gempa Bumi Provinsi Sulawesi Tengah

(1) Tatanan Tektonik dan Sejarah Kegempaan Palu Sulawesi Tengah

Menurut Daryono (2011) Daerah Palu merupakan salah satu kawasan seismik aktif di Indonesia. Tingginya tingkat aktivitas kegempaan di kawasan ini tidak lepas dari lokasinya yang berada pada zona benturan tiga lempeng tektonik utama dunia, yaitu Indo-Australia, Eurasia dan Pasifik. Pertemuan ketiga lempeng ini bersifat konvergen dan ketiganya bertumbukan secara relatif mengakibatkan Daerah Sulawesi Tengah dan sekitarnya menjadi salah satu daerah yang memiliki tingkat kegempaan yang cukup tinggi di Indonesia berkaitan dengan aktivitas sesar aktif. Menurut Hamilton (1979), ada beberapa segmentasi sesar yang sangat berpotensi membangkitkan gempa bumi kuat di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan. Sesar-sesar tersebut adalah: (a) Sesar Palu-Koro yang memanjang dari Palu ke arah Selatan dan Tenggara melalui Sulawesi Selatan bagian Utara menuju ke selatan Bone sampai di laut Banda, dengan panjang patahan sekitar 500 Kilometer (b) Sesar Saddang yang



memanjang dari pesisir Pantai Mamuju memotong diagonal melintasi daerah Sulawesi Selatan bagian tengah, Sulawesi Selatan bagian selatan, Bulukumba menuju ke Pulau Selayar bagian Timur, dan (c) Sesar Parit-Parit di Laut Makassar Selatan dan Laut Bone, dan beberapa anak patahan baik yang berada di darat maupun di laut.

Untuk mengetahui tingkat aktivitas kegempaan di Palu, perlu dilakukan kajian sejarah gempabumi dan seismisitas. Berdasarkan distribusi seismisitas, tampak klaster aktivitas gempabumi yang cukup tinggi di sepanjang sesar aktif Palu-Koro hingga memotong Kota Palu. Ditinjau dari kedalaman gempabuminya, aktivitas gempabumi di zona ini tampak didominasi oleh gempabumi kedalaman dangkal antara 0 hingga 60 kilometer, yang merupakan cerminan pelepasan tegangan kerak bumi yang dipicu oleh aktivitas sesar aktif.

Klaster seismisitas gempabumi dangkal ini terkonsentrasi hampir merata baik di lepas pantai maupun di daratan. Klaster seismisitas ini merupakan gambaran dari sangat aktifnya kondisi tektonik di kawasan ini. Kondisi seismisitas ini menunjukkan bahwa daerah Palu dan sekitarnya merupakan daerah yang rawan terhadap gempabumi dan tsunami. Apalagi kondisi seismisitas dan tektonik yang ada mendukung untuk terjadinya gempabumi kuat dengan kedalaman dangkal yang dapat membangkitkan tsunami.

Kota Palu, ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah misalnya, tercatat sebagai daerah rawan gempa karena salah satu wilayah yang memiliki aktivitas tektonik tertinggi di Indonesia. Penyebab utamanya tidak lain adalah karena di kota Palu terdapat patahan kerak bumi (sesar) berdimensi cukup besar, dikenal dengan sesar Palu-Koro. Sesar itu memanjang mulai dari Selat Makassar sampai pantai utara Teluk Bone dengan panjang patahan sekitar 500 km. Di Kota Palu, patahan itu melintas dari Teluk Palu masuk ke wilayah daratan, memotong jantung kota, terus sampai ke Sungai Lariang di Lembah Pipikoro, Donggala (arah selatan Palu). Sesar yang merupakan pertemuan lempeng-lempeng tektonik di bawah perut bumi itu jenis sesar aktif. Sesar itu terus bergerak satu sama lain dan memiliki sifat pergeseran sinistral (pergeseran ke arah kanan) dengan kecepatan geser sekitar 14-17 mm/tahun. Pergeseran pada lempeng-lempeng tektonik yang cukup aktif di sesar Palu Koro membuat tingkat kegempaan di wilayah ini juga dikategorikan cukup tinggi. Catatan seismograf pada Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) Palu menyebutkan, hampir setiap menit Palu dan Donggala diguncang gempa. Hanya saja getarannya kecil-kecil, dan hanya bisa dicatat seismograf. Mengutip ungkapan Kepala BMKG Palu, Mudjianto, dalam sebuah situs internet sekitar September 2010, bahwa kota Palu diguncang gempa 600



kali dalam sebulan dengan kekuatan 3 sampai 6 SR memperlihatkan betapa tingginya aktifitas tektonik di kawasan ini.

Potensi gempa juga bertambah dengan fakta bahwa pulau Sulawesi dilewati oleh apa yang dikenal dengan formasi Pasific ring of fire yang membentang dari Jepang, Filipina, Maluku dan Sulawesi. Formasi ini berupa sederetan gunung api yang menjadi tempat kurang lebih 450 gunung api aktif maupun tidak aktif atau sekitar 75% dari jumlah gunung api di seluruh dunia. Sekitar 90% gempa dan 80% gempa terbesar terjadi di sepanjang formasi ini.

(2) Kawasan Tanah Longsor dan Likufaksi

Kawasan tanah longsor berpotensi terjadi di Kabupaten Parigi Moutong, Sigi, Donggala, Poso dan Morowali, sedangkan kawasan rawan banjir di Kabupaten Sigi, Morowali, Banggai dan Kota Palu.



Sumber: Badan Informasi Geospasial (BIG) RI.

Gambar 2.12
Peta Rawan Bencana Longsor Provinsi Sulawesi Tengah

2.1.1.3 Demografi

Penduduk merupakan faktor penting dalam proses pembangunan karena bukan hanya berperan sebagai pelaksana pembangunan, namun juga menjadi sasaran pembangunan. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan penduduk, pembangunan harus diarahkan pada pengendalian jumlah penduduk, peningkatan kualitas, serta pengerahan mobilitas sehingga mempunyai ciri dan karakteristik yang bersinergi dengan tujuan pembangunan.

Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Tengah sejak periode 2021-2022 cenderung meningkat, yakni dari 30.218,79 jiwa pada Tahun 2021 menjadi 3.066.143 jiwa, Sementara tingkat laju pertumbuhan penduduk pada Tahun 2022 sebesar 1,53 persen dengan tingkat kepadatan penduduk pada Tahun 2022 sebesar 50 jiwa/km², sedangkan rasio jenis kelamin penduduk sebesar 105,22 persen, sedangkan pada tahun 2023 jumlah



penduduk mencapai 3.086,75 jiwa, meningkat jika dibandingka pada tahun 2022, tingkat laju pertumbuhan penduduk pada Tahun 2020-2023 sebesar 1,22 persen dengan tingkat kepadatan penduduk pada Tahun 2023 sebesar 50 jiwa/km², sedangkan rasio jenis kelamin penduduk sebesar 105,36 persen,

Tabel 2.19
Jumlah, Laju Pertumbuhan, Tingkat Kepadatan dan Rasio Jenis
Kelamin Penduduk Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

NO.	INDIKATOR	2023
1.	Jumlah Penduduk (Ribu)	3.086.75
	- Laki-Laki (Ribu)	1.583.65
	- Perempuan (Ribu)	1.503.10
2.	Laju Pertumbuhan Penduduk (2020-2023 %)	1,22
3.	Tingkat Kepadatan Penduduk (jiwa/km2)	50
4.	Rasio Jenis Kelamin Penduduk (%)	105,36

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Angka 2024.

Dilihat dari struktur kelompok umur, penduduk Sulawesi Tengah di dominasi oleh kelompok usia produktif (15-64 Thn) sebesar 68,13 persen, sedangkan usia non produktif (0-14 Thn dan 65-75 Thn keatas) sebesar 31,87 persen, Selanjutnya, perkembangan jumlah penduduk menurut kelompok umur di Provinsi Sulawesi Tengah secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.20
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 (Jiwa)

Tievins	i Sulawesi Teligali		ivvaj
Kelompok Umur	Jenis Kel	lamin	Jumlah
Refemper emai	Laki-Laki	Perempuan	Guillian
0 – 4	138,88	133,00	271,88
5 – 9	138,62	133,46	272,07
10 – 14	136,27	129,57	265,84
15 – 19	134,84	125,37	260,21
20 – 24	135,07	125,65	260,72
25 – 29	135,14	125,97	261,11
30 – 34	128,19	120,47	248,66
35 – 39	119,54	113,32	232,85
40 – 44	111,4	106,07	217,46
45 – 49	101,9	97,22	199,12
50 – 54	87,9	83,71	171,61
55 – 59	72,56	69,04	141,60
60 – 64	56,12	53,66	109,78
65 – 69	39,93	38,44	78,37
70 – 74	25,51	25,20	50,70
75 +	21,81	22,97	44,78
Jumlah	1.583,65	1.503,10	3.086,75

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Angka 2024



2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

a. Pertumbuhan PDRB

Aspek kesejahteraan masyarakat merupakan instrumen penting untuk mengukur kemajuan pembangunan daerah. Hal ini dikarenakan, indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat dapat digunakan untuk mengamati sejauh mana keberhasilan program pembangunan daerah yang dilaksanakan selama periode waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat yang dapat memberikan gambaran atas dampak kebijakan pembangunan yang dilaksanakan, khususnya dalam bidang ekonomi.

Tujuan pembangunan ekonomi secara substansial adalah untuk menjawab berbagai permasalahan dan tantangan pembangunan yang ada dengan tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat memerlukan terciptanya kondisi dasar, yakni: (1) Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; (2) Penciptaan sektor ekonomi yang kokoh; serta (3) Pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Perkembangan Kinerja Ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah pasca pandemi covid-19 menujukan kinerja yang positif hingga pada tahun 2022 yakni mampu tumbuh sebesar 15,17 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan capaian laju pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya sebesar 5,31 persen, dan dalam perspektif se-Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah merupakan pertumbuhan tertinggi kedua setelah Provinsi Maluku Utara (22,94 persen).

Sedangkan pada tahun 2023 triwulan IV tumbuh sebesar 9,73 persen (*y-on-y*), namun secara kumulatif (c-to-c), ekonomi Sulawesi Tengah tumbuh sebesar 11,91 persen jika dibandingkan dengan Triwulan IV tahun 2022, seperti pada gambar berikut :



Sumber: BRS BPS 2024

Gambar 2.13
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017-2023

Sementara dilihat dari andil pertubuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 sebesar 11,91 persen, sektor yang paling tinggi memberikan andil pertumbuhan yaitu Sektor Industri Pengolahan sebesar 25,53 persen (c-to-c), disusul terbesar kedua, ketiga masing-masing adalah Sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 11,46 persen dan Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 9,59 persen. Selanjutnya secara detail andil pertumbuhan masing-masing sektor dapat di lihat pada gambar berikut.



ì								
				Laju pertumb	uhan (persen)			
		Lapangan Usaha	Terhadap	Triw IV-2023 Terhadap Triw III-2023 (q-to-q)	Terhadap	Terhadap	Laju Pertumbuhan 2023 (persen)	Sumber Pertumbuhan 2023 (persen)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Α	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-3,85	6,04	0,98	1,58	1,73	0,32
	В	Pertambangan dan Peng- galian	12,73	-0,48	13,56	8,67	11,46	1,98
	C	Industri Pengolahan	14,31	-4,23	27,13	21,26	25,53	8,38
	D	Pengadaan Listrik dan Gas	-1,53	8,28	2,98	8,64	6,65	0,00
	Е	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,12	-0,67	0,95	-0,40	2,84	0,00
	F	Konstruksi	-0,64	13,79	-0,02	0,60	1,02	0,09
	G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-1,76	7,17	5,23	0,43	5,76	0,36
	Н	Transportasi dan Pergu- dangan	0,61	1,48	5,65	5,64	6,12	0,13
	ı	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,66	5,20	10,04	10,12	9,59	0,03
	J	Informasi dan Komunikasi	2,37	0,09	9,79	7,08	6,83	0,22
	K	Jasa Keuangan dan Asur- ansi	9,64	-6,10	3,26	4,91	1,16	0,02
	L	Real Estat	1,84	3,15	8,23	6,12	7,53	0,10
	MN	Jasa Perusahaan	-0,52	7,90	4,88	5,98	5,63	0,01
	0	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-18,51	28,39	-2,38	4,08	2,08	0,08
	Р	Jasa Pendidikan	0,54	3,16	5,36	0,80	4,48	0,10
	Q,	Jasa Kesehatan dan Kegia- tan Sosial	1,49	1,97	6,05	1,15	5,80	0,06
	RSTU	Jasa Lainnya	0,47	0,56	4,72	2,19	5,99	0,03
		PDRB	6,03	1,59	13,07	9,73	11,91	11,91

Sumber: BRS BPS 2024

Gambar 2.14 Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

Dari sisi penawaran, terdapat 5 (lima) sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap Perekonomian (PDRB ADHB) Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun, secara hirarki yakni Sektor Industri Pengolahan sebesar 8,38 persen, Sektor Pertambangan dan penggalian sebesar 1,98 persen,sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 0,36 persen, Sektor Pertanian, Kehutanan dan Peternakan sebesar 0,32 persen , dan sektor informasi dan komunikasi sebesar 0,22



Sumber: BRS BPS 2024

Gambar 2.15 Kontribusi 5 Sektor Terbesar Dalam PDRB Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

Selanjutnya di lihat dari sisi permintaan/pengeluaran, Ekonomi Sulawesi Tengah tahun 2023 Secara kumulatif dibandingkan dengan Triwulan III-2022 tumbuh sebesar 11,91 persen (c-to-c). Pertumbuhan terjadi pada semua komponen kecuali Pengeluaran komponen Pembentukan Modal Tetap bruto paling rendah sebesar 1,14 persen, Komponen pendorong yang mengalami pertumbuhan terbesar sebesar 18,92 persen yaitu komponen Ekspor barang dan jasa, diikuti komponen impor sebesar 11,64 persen, komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT sebesar 6,22 persen, komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 5,42 persen, komponen Konsumsi Pemerintah (PK-P) yang sebesar 3,02 persen.

Tabel 2.21
Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Sulawesi Tengah
Menurut Pengeluaran Triwulan III Tahun 2023 (persen)

	Komponen		ju Pertumbuh ar Harga Kons		Atas	Distribusi Atas Dasar Harga Berlaku		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1,	Pengeluaran Konsumsi Ru- mah Tangga	2,60	5,25	5,42	32,99	27,81	28,49	
2,	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,20	7,60	6,22	1,41	1,24	1,31	
3,	Pengeluaran Konsumsi Pe- merintah	4,93	-0,29	3,02	8,67	6,78	6,70	
4,	Pembentukan Modal Tetap Bruto	48,30	23,22	1,14	43,91	43,17	42,10	
5,	Perubahan Inventori	-	-	-	0,49	0,54	0,42	
6,	Ekspor Barang dan Jasa	10,56	22,64	18,92	89,84	104,03	103,28	
7,	Dikurangi Impor Barang dan Jasa	20,16	22,58	11,64	77,31	83,57	82,30	
Pro	oduk Domestik Bruto (PDB)	11,68	15,22	11,91	100,00	100,00	100,00	

Sumber: BRS BPS 2024



Struktur PDRB Sulawesi Tengah menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku tahun 2023 Triwulan IV, Perekonomian Sulawesi Tengah masih didominasi oleh komponen ekspor barang dan jasa yang mencakup lebih dari PDRB Provinsi Sulawesi Tengah yaitu sebesar 103,28 persen, selanjutnya adalah komponen impor sebesar 82,30 persen, Komponen lainnya yang memiliki peranan besar terhadap PDRB secara berturut-turut adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 42,10 persen dan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 28,49 persen, dan sektor lainnya hanya sebesar 8,43 persen.

Sedangkan pada perspektif kawasan Sulampua, bahwa pertumbuhan PDRB Sulawesi Tengah Triwulan IV tahun 2023, jika dibandingkan dengan Triwulan IV tahun 2022 (y-on-y) menempati urutan kedua tertinggi yaitu sebesar 11,91 persen setelah Provinsi Maluku Utara sebesar 20,49 persen, dan paling terendah adalah Provinsi Papua Barat Daya sebesar 1,82 persen.

b. PDRB Perkapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita merupakan salah satu indikator makro untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah/daerah. PDRB perkapita adalah jumlah produksi barang dan jasa di suatu wilayah/daerah dalam selang waktu satu tahun dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Semakin tinggi PDRB Perkapita suatu negara/daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat semakin baik.

Nilai PDRB Perkapita berdasarkan harga berlaku Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2023 mecapai Rp.62.584,06 ribu, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp.106,068 ribu pada tahun 2022. Sementara nilai PDRB Perkapita berdasarkan harga konstan 2010 pada tahun 2023 sebesar Rp.62,584,06 ribu.

Gambaran mengenai perkembangan PDRB Perkapita Provinsi Sulawesi Tengah menurut Kabupaten/Kota secara detail dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2.22
Nilai PDRB Perkapita Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

	Timar i Bit B i Grita					
	Kabupaten/Kota			TAHUN		
	Nabupaten/Nota	2019	2019 2020 2021		2022 x	2023 xx
1	2	3	4	5	6	7
1.	Banggai Kepulauan	32.782,00	32.002	34.117	37.376	39.909
2.	Banggai	78.581,00	75.697	84.300	110.263	101.816
3.	Morowali	375.097,00	388.801	601.783	876.421	927.230
4.	Poso	37.109,00	37.757	40.246	43.700	46.538
5.	Donggala	39.761,00	39.124	41.481	45.101	48.834
6.	Tolitoli	35.999,00	36.995	39.195	42.263	44.749
7.	Buol	35.400,00	38.881	41.783	45.153	47.724
8.	Parigi Moutong	36.480,00	39.124	41.504	44.628	47.619
9.	Tojo Una-Una	37.089,00	34.229	35.928	38.143	40.310
10.	Sigi	37.707,00	35.192	37.417	40.254	42.649
11.	Banggai Laut	31.966,00	33.707	35.470	38.854	41.278
12.	Morowali Utara	86.716,00	92.644	107.122	169.774	209.710
13.	Palu	63.994,53	64.883	69.334	74.372	79.452
		<u> </u>				
	Jumlah Kabupaten/Kota	60.962,60	66.415	82.022	105.717	111.903
	Sulawesi Tengah	61.056,03	66.306	82.017	106.068	112.461

Sumber: BPS Sulteng dalam angka 2024

c. Laju Inflasi

Inflasi yang diukur berdasarkan perubahan indeks harga di tingkat konsumen (IHK) yaitu indeks yang mengukur rata-rata perubahan harga antar waktu dari satu paket jenis barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat yang tinggal di perkotaan, sebagai proksi pengeluaran dalam suatu periode tertentu.

1. Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Inflasi Gabungan Dua Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Desember tahun 2023

Pada bulan Desember 2023, indeks Harga Konsumen (IHK) gabungan dua kota di Provinsi Sulawesi Tengah mengalami Penurunan dari tahun 2022 5,96 persen menjadi 2,35 persen 2023.



Tabel 2.23
IHK dan Inflasi gabungan Dua Kota di Provinsi Sulawesi Tengah
Menurut Kelompok Pengeluaran (2018=100)

Wendrat Reformpor 1 engeldaran (2010-100)									
Kelompok Pengeluaran	IHK Des 2022	IHK Des 2022	IHK Nov 2023	IHK Des 2023	Inflasi Des 2023 1) (%)	Inflasi Tahun Kalender 2023 2) (%)	Inflasi Tahun ke Tahun 3) (%)	Andil Inflasi mtm Desember 2023 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Umum (Headline)	116,10	116,10	118,57	118,83	0,22	2,35	2,35	0,22	
Makanan, Minuman, dan Tembakau	119,26	119,26	125,74	126,39	0,52	5,98	5,98	0,14	
Pakaian dan Alas Kaki	109,13	109,13	109,05	108,98	-0,06	-0,14	-0,14	-	
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	114,36	114,36	115,15	115,08	-0,06	0,63	0,63	-0,01	
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	110,45	110,45	112,45	112,88	0,38	2,2	2,2	0,02	
Kesehatan	110,86	110,86	110,94	111,01	0,06	0,14	0,14	-	
Transportasi	123,17	123,17	124,03	124,2	0,14	0,84	0,84	0,02	
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	100,19	100,19	100,29	100,33	0,04	0,14	0,14	-	
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	111,46	111,46	115,44	115,96	0,45	4,04	4,04	0,01	
Pendidikan	113,31	113,31	113,61	113,64	0,03	0,29	0,29	-	
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	119,91	119,91	121,75	122,09	0,28	1,82	1,82	0,02	
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	122,41	122,41	124,95	125,29	0,27	2,35	2,35	0,02	

Sumber: BRS BPS Januari 2024

Pada periode yang sama, inflasi tahun kalender dan inflasi tahun ke tahun gabungan dua kota di Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 2,35 persen. Indeks tertinggi terjadi pada kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 5,98 persen, sedangkan indeks terendah terjadi pada kelompok pakaian dan alas kaki sebesar -0,14 persen.

Inflasi sebesar 0,22 persen terbentuk oleh sumbangan andil kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,14 persen, diikuti oleh kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran dan kelompok transportasi (0,02 persen), serta kelompok rekreasi, olahraga dan budaya (0,01 persen), sedangkan kelompok pendidikan; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan dan kelompok kesehatan memberikanandil di bawah 0,01 persen. Sementara andil negatif pada periode ini disumbangkan oleh kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,01 persen dan kelompok pakaian dan alas kaki di bawah 0,01 persen.

Beberapa komoditas yang memiliki andil terhadap inflasi antara lain cabai rawit (0,30 persen), ikan selar (0,07 persen), bawang merah (0,04 persen), cabai merah dan angkutan udara (0,03 persen), emas perhiasan, ikan katamba dan wortel (0,02 persen), serta tomat dan jagung manis (0,01 persen). Sedangkan beberapa komoditas yang memiliki andil negatif terhadap inflasi



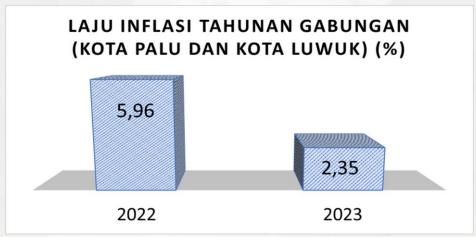
antara lain ikan cakalang (0,14 persen), beras, pepaya, ikan ekor kuning, ikan teri, ikan lolosi dan sayur bayam (0,03 persen), serta ikan bubara, ikan bandeng dan sayur kangkung (0,02 persen).

Tabel 2.24
Andil Inflasi Komoditas Gabungan Dua Kota di Provinsi Sulawesi
Tengah bulan Desember 2023

	Tongan Balan Docombol 2020										
No.	Komoditas	Andil (%)	No.	Komoditas	Andil (%)						
1	2	3	4	5	6						
1	Cabai Rawit	0,3	1	lkan Cakalang/ lkan Sisik	-0,14						
2	lkan Selar/ lkan Tude	0,07	2	Beras	-0,03						
3	Bawang Merah	0,04	3	Pepaya	-0,03						
4	Cabai Merah	0,03	4	Ikan Ekor Kuning	-0,03						
5	Angkutan Udara	0,03	5	lkan Teri	-0,03						
6	Emas Perhiasan	0,02	6	Sayur Bayam	-0,03						
7	Wortel	0,02	7	lkan Lolosi	-0,03						
8	lkan Katamba	0,02	8	lkan Bandeng/lkan Bolu	-0,02						
9	Tomat	0,01	9	lkan Bubara	-0,02						
10	Jagung Manis	0,01	10	Sayur Kangkung	-0,02						

Sumber: BRS BPS Januari 2024

2. Perkembangan Inflasi Gabungan Dua Kota di Provinsi Sulawesi Tengah



Gambar 2.16 Laju Inflasi Gabungan Dua Kora di Provinsi Sulawesi Tengah

Inflasi gabungan dua kota di Provinsi Sulawesi Tengah mulai dihitung dan disajikan pada bulan Januari 2020. Inflasi gabungan dua kota pada inflasi bulanan periode Desember 2023 sebesar 0,22 persen, inflasi tahun kalender dan inflasi tahun ke tahun dari Desember 2022 hingga Desember 2023 sebesar 2,35 persen.

3. Perbandingan Inflasi Kota Palu dan Kota Luwuk

Pada bulan Desember 2023 Kota Palu mengalami inflasi sebesar 0,13 persen. Indeks harga konsumen (IHK) di Kota Palu mengalami kenaikan dari 117,79 pada November 2023 menjadi 117,94 pada Desember 2023. Inflasi tahun



kalender dan inflasi tahun ke tahun dari Desember 2022 hingga Desember 2023 sebesar 1,87 persen.

Inflasi di Kota Palu disebabkan oleh naiknya indeks harga pada kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,49 persen, diikuti oleh kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya (0,21 persen), kelompok kelompok transportasi (0.15)persen), penyediaan makanan dan minuman/restoran (0,10 persen), kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan (0,04 persen), kelompok rekreasi, olahraga dan budaya (0,03 persen) dan kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga (0,02 persen). Sementara itu, penurunan indeks harga terjadi pada kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,19 persen dan kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga (0,17 persen), sedangkan kelompok pendidikan dan kelompok kesehatan terpantau relatif stabil.

Pada bulan yang sama Kota Luwuk mengalami inflasi sebesar 0,59 persen. Indeks harga konsumen (IHK) di Kota Luwuk mengalami penurunan dari 121,86 pada November 2023 menjadi 122,58 pada Desember 2023. Inflasi tahun kalender dan inflasi tahun ke tahun dari Desember 2022 hingga Desember 2023 sebesar 4,35 persen.

Tabel 2.25
Perbandingan IHK dan Inflasi Kota Palu, Kota Luwuk, serta Gabungan Dua
Kota Menurut Kelompok Pengeluaran (2018=100) Desember 2023

Kelompok Pengeluaran	Kota F	Palu	Kota	Luwuk	Gabunga	n Dua Kota
Refollipok i eligeluarali	IHK	Inflasi	IHK	Inflasi	IHK	Inflasi
1	2	3	4	5	6	7
Umum (Headline)	117,94	0,13	122,58	0,59	118,83	0,22
Makanan, Minuman, dan Tembakau	124,53	0,49	132,5	0,58	126,39	0,52
Pakaian dan Alas Kaki	109,88	-0,19	105,49	0,44	108,98	-0,06
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	116,23	-0,17	108,94	0,62	115,08	-0,06
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	112,37	0,02	114,54	1,55	112,88	0,38
Kesehatan	111,55	-	107,17	0,5	111,01	0,06
Transportasi	123,7	0,15	126,45	0,06	124,2	0,14
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	100,5	0,04	99,61	0,06	100,33	0,04
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	115,73	0,03	117,06	2,5	115,96	0,45
Pendidikan	114,68	-	107,21	0,21	113,64	0,03
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	115,61	0,1	160,02	1,04	122,09	0,28
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	125,85	0,21	123,32	0,51	125,29	0,27

Sumber: BRS BPS Januari 2024

Inflasi di Kota Luwuk disebabkan oleh kenaikan indeks harga pada kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 2,50 persen, diikuti oleh kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga (1,55 persen), kelompok penyediaan makanan dan minuman/ restoran (1,04 persen),

kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga (0,62 persen), kelompok makanan, minuman dan tembakau (0,58 persen), kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya (0,51 persen), kelompok kesehatan (0,50 persen), kelompok pakaian dan alas kaki (0,44 persen), kelompok pendidikan (0,21 persen), serta kelompok transportasi dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan (0,06 persen).

d. Kesenjangan Distribusi Pendapatan (Indeks Gini)

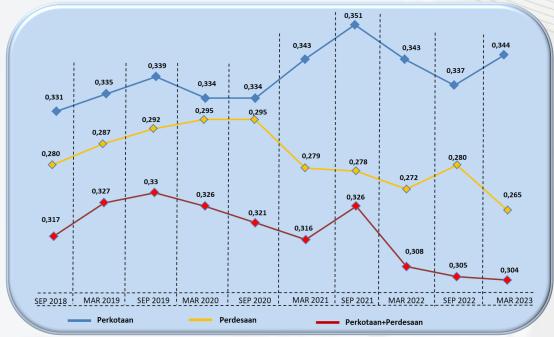
Indeks Gini atau Rasio Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan (disparitas) pengeluaran masyarakat secara menyeluruh. Ketimpangan pendapatan merupakan suatu kondisi dimana distribusi pendapatan yang diterima masyarakat tidak merata. Indeks Gini dinyatakan dalam angka yang bernilai 0 sampai 1. Jika Indeks Gini bernilai 0 berarti kemerataan sempurna, sedangkan jika bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna. Semakin rendah nilai Indeks Gini menunjukkan capaian pembangunan yang semakin baik.

1. Perkembangan Gini Ratio September 2018 - Maret 2023

Nilai Gini Ratio Sulawesi Tengah selama periode September 2018 – Maret 2023 terus mengalami fluktuasi. Pada September 2018 hingga September 2019 nilainya cenderung naik. Kondisi ini menunjukkan bahwa selama periode September 2018 hingga September 2019 terjadi peningkatan kesenjangan pengeluaran di Sulawesi Tengah. Namun demikian pada periode September 2019 hingga Maret 2023 nilainya menunjukkan tren penurunan.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 adalah sebesar 0,344 naik sebesar 0,007 poin dibanding September 2022 yang sebesar 0,337, dan naik sebesar 0,001 poin dibanding Maret 2022 yang sebesar 0,343. Untuk daerah perdesaan, pada Maret 2023 Gini Ratio adalah sebesar 0,265 turun masing-masing sebesar 0,015 poin dibanding September 2022 yang sebesar 0,280, dan 0,007 poin dibanding Maret 2022 yang sebesar 0,272.





Gambar 2.17
Perkembangan Gini Ratio, September 2018–Maret 2023

2. Perkembangan Distribusi Pengeluaran Maret 2022-Maret 2023

Selain Gini Ratio ukuran ketimpangan lain yang sering digunakan adalah persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah atau yang dikenal dengan ukuran Bank Dunia. Berdasarkan ukuran ini tingkat ketimpangan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu tingkat ketimpangan tinggi jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah angkanya dibawah 12 persen, ketimpangan sedang jika angkanya berkisar antara 12-17 persen, serta ketimpangan rendah jika angkanya berada diatas 17 persen.

Pada Maret 2023, persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 22,11 persen yang berarti ada pada kategori ketimpangan rendah. Persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah pada Maret 2023 ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan kondisi September 2022 yang sebesar 21,96 persen dan kondisi Maret 2022 yang sebesar 21,73 persen.

Jika dilihat menurut klasifikasi daerah, persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah di perdesaan lebih tinggi dibandingkan dengan di perkotan, meskipun masih pada kategori rendah. Persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah di daerah perkotaan pada Maret 2023 adalah sebesar 19,85 persen, sementara itu persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah di daerah perdesaan pada Maret 2023 adalah sebesar 23,89 persen.



Tabel 2.26
Distribusi Pengeluaran Penduduk Indonesia, Maret 2022,
September 2022, dan Maret 2023 (Persentase)

Daerah/Tahun	Penduduk 40 persen Terbawah	Penduduk 40 persen Menengah	Penduduk 20 persen Teratas	Gini Ratio			
1	2	3	4	5			
Perkotaan							
Maret 2022	19,8	37,27	42,93	0,343			
Sep-22	20,18	37,61	42,2	0,337			
Maret 2023	19,85	37,07	43,08	0,344			
Perdesaan							
Maret 2022	23,36	39,64	37	0,727			
Sep-22	23,14	38,91	37,95	0,28			
Maret 2023	23,89	39,53	36,58	0,265			
Perkotaan+Perdesaan							
Maret 2022	21,73	38,23	40,04	0,308			
Sep-22	21,96	38,16	39,89	0,305			
Maret 2023	22,11	37,92	39,97	0,304			

3. Gini Ratio Menurut Provinsi di Sulawesi pada Maret 2022-Maret 2023

Selama periode Maret 2022 – Maret 2023, nilai Gini Ratio Sulawesi Tengah adalah yang terendah dibanding provinsi lain di Sulawesi. Pada Maret 2023, dengan nilai Gini Ratio sebesar 0,304 menempatkan Sulawesi Tengah pada urutan ke-7 terendah se-Indonesia. Demikian juga jika dilihat menurut wilayah perkotaan dan perdesaan, nilai Gini Ratio perkotaan dan pedesaan di Sulawesi Tengah selama periode tersebut selalu yang terendah se-Sulawesi, dibanding dengan Gini Ratio nasional pada Maret 2023 yang sebesar 0,388, Provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat memiliki nilai Gini Ratio lebih rendah, sedangkan Provinsi Gorontalo memiliki nilai Gini Ratio yang lebih tinggi. Kondisi ini masih sama jika dibandingkan dengan kondisi September 2022.

Tabel 2.27
Gini Ratio Menurut Provinsi Maret 2022, September 2022, dan
Maret 2023

	11101-01-2020									
No.	Provinsi	Maret 2022			September 2022			Maret 2023		
		Kota	Desa	K+D	Kota	Desa	K+D	Kota	Desa	K+D
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Sulawesi Utara	0,362	0,354	0,365	0,355	0,352	0,359	0,377	0,345	0,37
2.	Sulawesi Tengah	0,343	0,272	0,308	0,337	0,28	0,305	0,344	0,265	0,304
3.	Sulawesi Selatan	0,388	0,336	0,377	0,378	0,324	0,365	0,386	0,339	0,377
4.	Sulawesi Tenggara	0,404	0,352	0,387	0,382	0,341	0,366	0,393	0,338	0,371
5.	Gorontalo	0,409	0,395	0,418	0,406	0,395	0,423	0,403	0,403	0,417
6.	Sulawesi Barat	0,448	0,322	0,362	0,472	0,315	0,371	0,452	0,308	0,351
	INDONESIA	0,403	0,314	0,384	0,402	0,313	0,381	0,409	0,313	0,388

Namun kalau dibandingkan capaian Nilai Indeks Gini Provinsi Sulawesi Tengah dalam perspektif nasional Capaian Indeks Gini Provinsi Sulawesi Tengah masih lebih baik, selanjutnya, gambaran mengenai Capaian Indikator



Indeks Gini Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional selama Tahun 2018-Maret 2023 dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BRS BPS Provinsi Sulawesi Tengah, 2023.

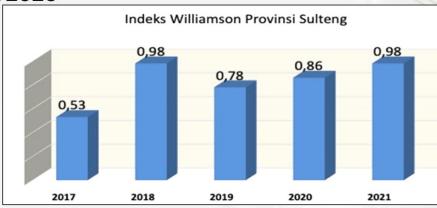
Gambar 2.18 Capaian Indeks Gini Sulteng dan Nasional 2018 – 2023

e. Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antar Wilayah

Adanya perbedaan kandungan sumberdaya alam dan perbedaan kondisi demografi dimasing-masing wilayah/daerah merupakan salah satu pemicu terjadinya ketimpangan pembangunan antar wilayah. Namun demikian, adanya perbaikan perekonomian daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan strategi kebijakan pembangunan daerah yang diejawantahkan melalui program dan kegiatan di masing-masing wilayah kabupaten/kota diharapkan mampu meminimalisir adaya ketimpangan pembangunan antar wilayah tersebut. Salah satu indikator makro yang lazim digunakan untuk melihat ketimpangan pembangunan antar wilayah dalam suatu kawasan adalah analisis Indeks Williamson (IW).

Disparitas pembangunan antar wilayah di Provinsi Sulawesi Tengah selama periode Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 cenderung meningkat yang direfleksikan dengan meningkatnya nilai Indeks Williamson, yakni dari 0,53 poin pada Tahun 2017 menjadi 0,98 poin pada Tahun 2021. Untuk itu langkah yang penting ke depan dilakukan adalah memanage pengeluaran fiskal dengan baik, menata dan mempertajam kembali program pembangunan kewilayahan, dengan demikian maka kesenjangan pembangunan antar-daerah dapat dipersempit.





Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah, 2023.

Gambar 2.19
Perkembangan Nilai Indeks Williamson Sulawesi Tengah
Tahun 2017 – 2021

f. Perkembangan Penduduk Miskin

Capaian pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi tidak sepenuhnya dapat memperbaiki kehidupan masyarakat, mengingat masih terdapat sebagian penduduk yang hidup dalam himpitan kondisi kemiskinan. Untuk menangani kemiskinan, pemerintah bersama instansi terkait mengambil langkah yang strategis melalui berbagai intervensi baik melalui program multi sasaran maupun melalui operasi pasar dan pengendalian harga. Upaya tersebut terus dilakukan seperti Raskin, Jamkesmas, dan berbagai program sektoral. Diharapkan kebijakan dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka penurunan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah dapat berjalan dengan baik yang pada akhirnya dapat menurunkan angka kemiskinan.

Perkembangan persentase penduduk miskin Provinsi Sulawesi Tengah selama lima tahun terkahir masih lebih tinggi dibandingkan dengan nasional.

Jumlah Penduduk Miskin pada Maret 2023 sebesar 395,66 ribu orang, bertambah 5,95 ribu orang dibanding September 2022, dan bertambah 7.31 ribu orang terhadap Maret 2022. Persentase Penduduk Miskin pada Maret 2023 sebesar 12,41 persen, naik 0,11 persen poin dibanding September 2022, dan naik 0,08 persen poin terhadap Maret 2022.

Pada perspektif Provinsi se-Sulawesi, bahwa Sulawesi Tengah pada Maret 2023 persentase kemiskinan masih tergolong meningkat kecuali Provinsi Sulawesi Barat dan Gorontalo yang menunjukkan penurunan, dengan demikian bahwa Penduduk Miskin Masih Terkonsentrasi di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.



Tabel 2.28
Kemiskinan Maret 2023 Menurut Provinsi Di Sulawesi

No.	PROVINSI	Jumlah Penduduk Miskin	Distribusi Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin		Perubahan Persentase Penduduk Miskin
		(Ribu Orang)	(%)	Sep 2022	Mar 2023	(Persen Poin)
				X 24		
1.	Sulawesi Barat	165,72	8,11	11,92	11,49	0,43
2.	Gorontalo	183,71	8,99	15,51	15,15	0,38
3.	Sulawesi Tengah	395,66	19,35	12,30	12,41	0,11
5.	Sulawesi Utara	189,00	9,24	7,34	7,38	0,04
6.	Sulawesi Tenggara	321,53	15,73	11,27	11,43	0,16
7.	Sulawesi Selatan	788,85	38,58	8,66	8,70	0,04

Sumber: BRS BPS Provinsi Sulawesi Tengah, 2023.

Perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Tengah pada periode Maret 2019 sampai dengan Maret 2023 dapat di lihat pada gambar berikut.

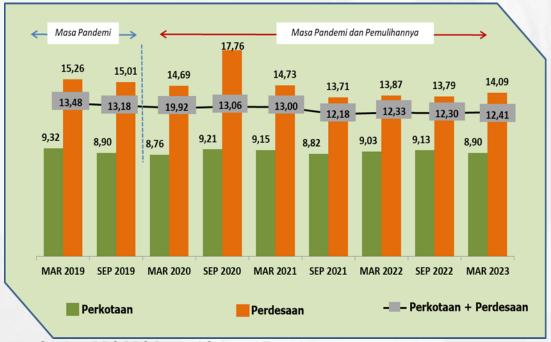


Sumber: BRS BPS Provinsi Sulawesi Tengah, 2023.

Gambar 2.20 Perkembangan Jumlah dam Persentase Penduduk Miskin Provinsi Sulawesi Tengah, Maret 2019 – Maret 2023



Selanjutnya, berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode Maret 2023, Persentase kemiskinan di perkotaan turun dari 9,13 persen pada September 2022 menjadi 8,90 persen Maret 2023, sedangkan di perdesaan naik dari 13,79 persen pada September 2022 menjadi 14,09 persen pada Maret 2023.



Sumber: BRS BPS Provinsi Sulawesi Tengah, 2023.

Gambar 2.21
Persentase Penduduk Miskin Provinsi Sulawesi Tengah Menurut Wilayah,
pada Maret 2019 – Maret 2023

Berdasarkan Garis Kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan non makanan yang dipergunakan sebagai suatu batas untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata- rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Beberapa gambar diatas menyajikan perkembangan garis kemiskinan pada September 2021 sampai dengan Maret 2023. Selama periode Maret-September 2022, Garis Kemiskinan naik sebesar 5,08 persen, yaitu dari Rp 530.251,- per kapita per bulan pada Maret 2022 menjadi Rp 557.183,- per kapita per bulan pada September 2022. Sementara pada periode September 2021 – September 2022, Garis Kemiskinan naik sebesar 10,20 persen, yaitu dari Rp 505.608,- per kapita per bulan pada September 2021 menjadi Rp 557.183,- per kapita per bulan pada September 2022, sementara pada Maret 2023 mengalami kenaikan sebesar 1,99 persen menjadi Rp.568,248,- per kapita per bulan, dilihat dari kewilayahan bahwa garis kemiskinan wilayah perkotaan lebih tinggi kenaikannya yakni sebesar 2,31, persen dibandingkan dengan wilayah perdesaan sebesar 1,90 persen.

Upaya perbaikan tingkat kesejahteraan masyaralat dan pengurangan kemiskinan daerah terus dilakukan. Diperlukan sebuah strategi dalam

penanggulangan kemiskinan yang dilakukan secara komprehensif dan berkesinambungan yang melibatkan semua pihak baik, pemerintah, dunia usaha, perguruan tingggi, lembaga swadaya masyarakat setempat, maupun masyarakat miskin sendiri. Tiga pilar penanggulangan kemiskinan yang harus dibangun terus menerus kedepan di Provinsi Sulawesi Tengah yaitu:

- 1) Memperluas kesempatan kerja (*Promoting Opportunities for the Poor*)
- 2) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat (Facilitating Empowerment)
- 3) Memperkuat ketahanan sosial (Enhancing Social Security).

g. Kemiskinan Ekstrem

Dalam perspektif kemiskinan ekstrem, Tingkat kemiskinan ekstrem Provinsi Sulawesi Tengah sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 cenderung mengalami penurunan yakni dari 3,15 persen (97,91 Ribu Jiwa) pada tahun 2021 menurun menjadi 1,44 persen (45,76 ribu jiwa) pada tahun 2023. Dilihat dari tingkat kemiskinan kabupaten/kota tahun 2023, tingkat kemiskinan ekstrem tertinggi berada di wilayah Kabupaten Morowali Utara sebesar 3,38 persen, menyusul terbesar kedua dan ketiga masing-masing adalah Kabupaten Parigi Moutong sebesar 2,41 persen, dan Kabupaten Sigi sebesar 2,07 persen.

Tabel 2.29
Tingkat Kemiskinan Ekstrem Kabupaten/Kota di
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 – 2023

No	Nama Daerah		Jumlah Ke trem (ribu j		Estimasi Jumlah Kemiskinan Ekstrem (%)			
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	
1	Provinsi Sulawesi Tengah	97,91	95,02	45,76	3,15	3,02	1,44	
2	Banggai Kepulauan	1,79	1,60	2,25	1,50	1,34	1,87	
3	Banggai	6,96	5,61	0,00	1,81	1,44	0,00	
4	Morowali	3,55	4,08	0,93	2,86	3,24	0,73	
5	Poso	11,01	9,03	4,93	4,17	3,36	1,80	
6	Donggala	11,05	11,07	6,02	3,61	3,59	1,94	
7	Toli-Toli	3,00	3,64	2,77	1,26	1,51	1,14	
8	Buol	4,49	2,11	0,89	2,69	1,24	0,52	
9	Parigi Moutong	29,94	32,57	12,47	5,69	6,39	2,41	
10	Tojo Una-Una	8,22	5,37	2,08	5,27	3,42	1,31	
11	Sigi	4,40	6,19	5,08	1,82	2,54	2,07	
12	Banggai Laut	4,16	3,08	1,33	5,40	3,93	1,67	
13	Morowali Utara	5,74	4,10	4,64	4,34	3,04	3,38	
14	Kota Palu	3,61	6,57	2,38	0,90	1,63	0,58	

Sumber: BPS, 2024 (data diolah kembali)

Berbagai kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam rangka penurunan angka kemsikinan melalui program-program prioritas pengentasan kemiskinan terus dilakukan. Upaya program multi sasaran dalam rangka



percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem juga terus dilakukan melalui strategi kebijakan yang meliputi:

- 1. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat;
- 2. Peningkatan pendapatan masyarakat; dan
- 3. Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

Selain hal tersebut, sinergitas Pemerintah bersama instansi terkait yang termasuk dalam Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) telah mengambil langkah yang strategis melalui berbagai intervensi baik melalui program multi sasaran maupun melakukan optimalisasi dan langkah antisipasi untuk pengendalian inflasi daerah antara lain melalui strategi 4K yaitu menjaga **Keterjangkauan Harga**, **Ketersediaan Pasokan**, **Kelancaran Distribusi**, dan **Komunikasi Efektif**.

- Strategi Keterjangkauan Harga dilakukan dengan pemanfaatan anggaran belanja pemerintah dalam rangka stabilisasi harga;
- 2. Strategi menjaga Ketersediaan Pasokan dan keterjangkauan harga komoditas bahan makanan (bahan kebutuhan pokok) dengan mendorong program yang fokus pada pemenuhan pasokan pangan yang mudah diakses oleh masyarakat. Implementasi strategi ini dapat dilakukan melalui Gerakan Masyarakat (Germas) menanam komoditas penyumbang inflasi misalnya hortikultura di pekarangan rumah atau di dalam pot;
- Kelancaran Distribusi dilakukan dengan mendorong dilakukannya kerjasama antar daerah (KAD) untuk pemenuhan pasokan komoditas pangan daerah dan digitalisasi pasar tradisional menjadi strategis untuk memperluas akses pasar para petani sekaligus mendorong efisiensi rantai distribusi;
- 4. Strategi komunikasi efektif untuk mengelola ekspektasi inflasi masyarakat. Beberapa program komunikasi antara lain melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk mengantisipasi terjadinya informasi asimetris terhadap perkembangan harga di pasar.

h. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

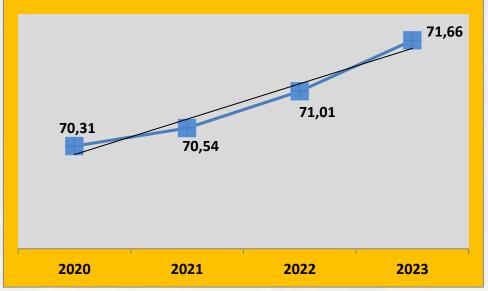
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks komposit yang mengukur pembangunan manusia dari tiga aspek dasar yaitu (1) umur panjang dan hidup sehat, (2) pengetahuan, dan (3) standar hidup layak. Nilai IPM berkisar antara 0 sampai dengan 100. Perhitungan yang digunakan adalah perhitungan IPM metode baru. Angka IPM memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai



dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara/daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu negara/daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik. Selanjutnya, capaian IPM di suatu wilayah/daerah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori, yaitu: (1) Kategori Rendah: IPM < 60; (2) Kategori Sedang: 60 ≤ IPM < 70; (3) Kategori Tinggi: 70 ≤ IPM < 80; dan (4) Kategori Sangat tinggi: IPM ≥ 80.

Terkait dengan hal itu bahwa mulai tahun 2023, BPS melakukan *updaGing* sumber data Umur Harapan Hidup (UHH) hasil Sensus Penduduk (SP) 2010 dengan hasil *Long Form* (LF) Sensus Penduduk (SP) 2020 yang lebih terkini dan berdasarkan jumlah sampel yang lebih besar.

IPM Sulawesi Tengah tumbuh secara konsisten dan semakin membaik. IPM tahun 2023 mencapai 71,66 atau tumbuh 0,92 persen dibandingkan tahun 2022. Pertumbuhan IPM 2023 lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 dan ratarata tahun 2020-2022, Gambaran mengenai Capaian IPM Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BRS BPS Provinsi Sulawesi Tengah, 2023
Gambar 2.22
Perkembangan IPM Provinsi Sulawesi Tengah Long Form (LF)
Tahun 2020-2023

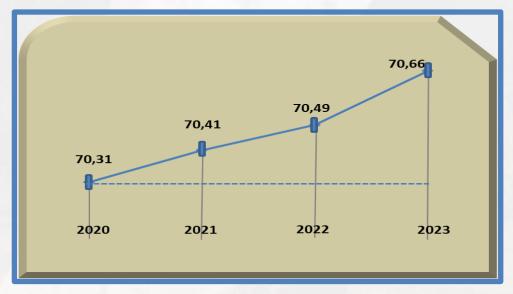
Berdasarkan gambar diatas memperlihatkan bahwa Capaian IPM Provinsi Sulawesi Tengah masih dibawah capaian IPM Nasional. Namun demikian, perkembangan capaian IPM Provinsi Sulawesi Tengah selama periode 2020-2023 IPM Sulawesi tengah mencatat rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 0,64 persen.

Pada tahun 2020 capaian IPM Sulawesi Tengah berdasarkan data *Long Form* SP 2020 sebesar 70,31 menjadi 70,54 pada tahun 2021, selanjutnya mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga menjadi 71,01 tahun 2022.

Capaian IPM tahun 2023 pada perspektif Sulampua menempati urutan yang kelima setelah Maluku, dari aspek pertumbuhannya IPM Sulawesi Tengah di Kawasan Sulampua sebesar 0,92 persen. Capaian Indikator IPM ini mengindikasikan bahwa pembangunan kualitas sumber daya manusia semakin membaik, masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah semakin sehat, kesempatan dan kualitas pendidikan semakin meningkat, dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.

(1) Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat

Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) Provinsi Sulawesi Tengah yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022 UHH Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 70,49 tahun meningkat sebesar 0,1 tahun atau tumbuh sebesar 0,15 persen dari tahun 2021 (68,83 tahun). Tahun 2023 meningkat 0,17 tahun atau 0,24 persen yaitu menjadi 70,66 tahun, dan lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020-2022 (0,13 persen). Secara detail perkembangan UHH Provinsi Sulawesi Tengah selama periode 2020-2023 dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BRS BPS Provinsi Sulawesi Tengah, 2024.

Gambar 2.23
Perkembangan Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 – 2023 (tahun)

(2) Dimensi Pengetahuan

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Kedua indikator ini cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2023, HLS di Sulawesi Tengah meningkat dari tahun 2022 yaitu 13,32 tahun menjadi 13,33 tahunpada tahun 2023 atau meningkat 0,01 tahun (0,08



persen) dibandingkan tahun 2022, melambat dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020- 2022 (0,57 pesren), sedangkan RLS meningkat dari 8,89 tahun menjadi 8,96 tahun, atau Meningkat 0,07 tahun (0,79 persen) dibandingkan tahun 2022, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020-2022 (0,34 persen).



Sumber: BRS BPS Provinsi Sulawesi Tengah, 2024.

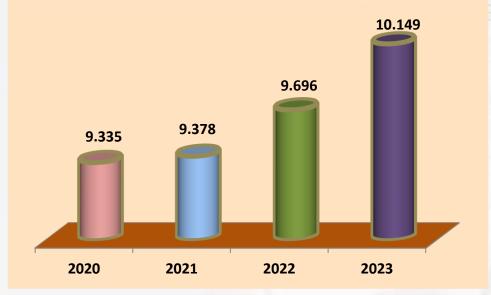
Gambar 2.24
Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 – 2023 (tahun)

(3) Dimensi Standar Hidup Layak

Dimensi terakhir yang mewakili pembangunan manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan dengan pengeluaran ril per kapita (atas dasar harga konstan 2012) yang disesuaikan. Pada tahun 2022, pengeluaran per kapita (yang disesuaikan) masyarakat Sulawesi Tengah mencapai Rp9,7 juta per tahun. Angka ini meningkat 3,39 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa setelah kurang lebih 2 tahun pandemi COVID-19 berlalu, pengeluaran riil per kapita mulai meningkat kembali setelah pada tahun 2020 mengalami penurunan.

Pada tahun 2023 Pengeluaran Riil per Kapita per tahun yang Disesuaikan meningkat 453 Ribu Rupiah (4,67 persen) dibandingkan tahun 2022, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020-2022 (1,93 persen), seperti pada gambar berikut ini.



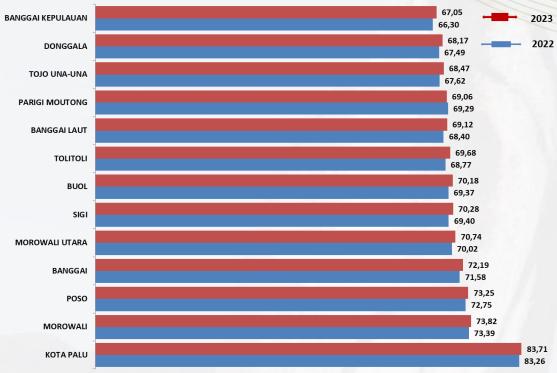


Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah, 2024.

Gambar 2.25
Pengeluaran Ril Per Kapita (yang disesuaikan) Sulawesi Tengah,
Tahun 2020 – 2023 (Rp000)

Dilihat dari spasial kabupaten/kota, Peningkatan IPM tahun 2023 terjadi di seluruh Kabupaten/Kota. Urutan IPM terendah masih ditempati oleh Kabupaten Banggai Kepulauan (67,05), sedangkan urutan teratas masih ditempati oleh Kota Palu (83,71). Satu-satunya Kabupaten/Kota dengan status capaian pembangunan manusia "sangat tinggi" (IPM ≥ 80) yaitu Kota Palu. Jumlah Kabupaten/Kota dengan status capaian "tinggi" (70 ≤ IPM < 80) sebanyak 6 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Morowali, Poso, Banggai. Dan Morowali Utara, Sigi dan Kabupaten Buol, Sementara itu, 6 Kabupaten lainnya masih berstatus "sedang" (capaian 60 ≤ IPM < 70), yaitu Kabupaten Tolitoli, Parigi Moutong, Banggai Laut, Tojo Una-Una, Donggala dan Kabupaten Banggai Kepulaun, seperti pada gambar berikut:





Sumber: BRS BPS Provinsi Sulawesi Tengah, 2024.

Gambar 2.26
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sulawesi Tengah
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2022-2023

2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

i. Pendidikan

Pembangunan di sektor pendidikan, diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pendidikan dengan memanfaatkan secara optimal fasilitas pendidikan yang ada. Salah satu sasaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mencapai misinya untuk meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing yaitu meningkatkan akses dan mutu pendidikan untuk menuntaskan pendidikan dasar dan pengembangan pendidikan menengah. Adapun beberapa arah kebijakan di antaranya yaitu penyediaan sarana dan prasarana sekolah/ruang kelas yang semakin baik, pada setiap jenjang Pendidikan baik jenjang Pendidikan yang dinaungi Kementerian Pendidikan maupun Kementerian Agama, penyediaan guru berdasarkan bidang ilmu sesuai kebutuhan, dan peningkatan kapasitas dan kualitas perpustakaan sekolah. Perbaikan kualitas pendidikan melalui penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana, serta akses pendidikan yang dapat dijangkau oleh masyarakat merupakan salah satu poin penting dalam pembangunan pendidikan. Oleh karena itu, akses pendidikan berkualitas yang merata menjadi prioritas utama dalam pengembangan pendidikan, dapat ditunjukkan pada tabel berikut.



Tabel 2.30

Jumlah Fasilitas Sekolah Menurut Kabupaten/Kota dan Tingkat
Pendidikan di Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023

NO.	KABUPATEN		SEKOL	AH	PERGURUAN	
NO.	KABUPATEN	SD/MI	SMP/MTs	SMA/SMK/MA	TINGGI	
1.	Banggai Kepulauan	169	74	39	-	
2.	Banggai	394	154	89	3	
3.	Morowali	167	51	26	-	
4.	Poso	248	84	41	3	
5.	Donggala	377	122	50	-	
6.	Tolitoli	249	97	46	5	
7.	Buol	172	79	27	1	
8.	Parigi Moutong	463	159	76	-	
9.	Tojo Una-Una	196	67	28	-	
10.	Sigi	281	98	49	-	
11.	Banggai Laut	86	47	23	-	
12.	Morowali Utara	158	54	28	-	
13.	Palu	199	74	66	25	
	Sulteng	3.159	1.160	588	37	

Sumber: BPS, Sulteng Dalam Angka Tahun 2024

Sampai dengan Tahun 2023 fasilitas pendidikan di Provinsi Sulawesi Tengah dari jenjang pendidikan Sekolah Dasar sampai dengan Pendidikan Sekolah Menengah Atas, namun untuk pendidikan Perguruan Tinggi masih terdapat 5 Kabupaten/Kota yang memilikinya, yaitu Kota Palu selaku Ibu Kota Provinsi memiliki Perguruan Tinggi yang terbanyak sejumlah 25 Perguruan Tinggi, dan Kabupaten Tolitoli memiliki Perguruan Tinggi yang terbanyak dari 3 Kabupaten yaitu sejumlah 5 Perguruan Tinggi, sedangkan Kabupaten Banggai dan Kabupaten Poso masing-masing 3 Perguruan Tunggi serta Kabupaten Buol memiliki 1 Perguruan Tinggi, dan Kota Palu sebanyak 66 Perguruan Tinggi.

a. Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM)

Salah satu indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan, yakni melalui Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkatpendidikantertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitandengan jenjang pendidikan tertentu Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik karena APM ini melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut, atau dengan perkataan lain APM adalah



perbandingan penduduk usia antara 7 hingga 18 tahun yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun. Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama.

APK adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkatpendidikantertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitandengan jenjang pendidikan tertentu. APK ini menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan.

Perspektif kabupaten/kota, pada Tahun 2023 capaian APK SD tertinggi terdapat di Kabupaten Parigi Moutong sebesar 105,07 persen dan terendah terdapat di Kabupaten Banggai Kepulauan sebesar 95,6 persen, namun terdapat 2 (dua) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.31
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM)Menurut Jenjang Pendidikan serta Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

	Flovinsi Sulawesi Tengan Tanun 2023						
No.	Wilayah	SD/	MI	SMP/I	MTS	SMA/SN	IK/MA
NO.	Wilayali	APK	APM	APK	APM	APK	APM
1	Kab. Banggai Kepulauan	95.6	85.62	104.43	74.61	103.4	63.73
2	Kab. Donggala	97.21	86.07	106.84	78.02	100.26	68.17
3	Kab. Poso	95.52	86.86	106.56	81.56	105.44	78.13
4	Kab. Banggai	99.4	89.92	108.15	80.66	108.34	73.59
5	Kab. Buol	99.06	87.77	104.63	74.21	109.36	73.28
6	Kab. Tolitoli	97.65	87.67	104.9	74.8	101.51	67.51
7	Kab. Morowali	98.6	88.27	109.23	81.65	105.18	69.25
8	Kab. Parigi Moutong	105.07	92.82	108.19	78.02	108.77	73.34
9	Kab. Tojo Una-Una	101.9	87.94	109	69.1	109.27	70.26
10	Kab. Sigi	101.95	90.63	109.3	76.73	106.85	69.38
11	Kab. Banggai Laut	97.17	88.29	98.39	72.06	107.04	68.44
12	Kab. Morowali Utara	99.97	90.99	105.11	79.77	101.5	68.55
13	Kota Palu	106.22	95.88	109.95	82.81	109.55	79.8
	Sulawesi Tengah	100.44	89.76	107.4	78.11	106.41	72.44

Sumber: BPS dan Dikjar Provinsi Sulteng 2023

Capaian APK SMP pada Tahun 2023 tertinggi terdapat di Kota Palu sebesar 109,95 persen dan terendah di Kabupaten Banggai Laut sebesar 98,39 persen.

Pada jenjang SMA Tahun 2023, capaian APK tertinggi terdapat Kota Palu sebesar 109,55 persen dan terendah di Kabupaten Donggala sebesar 100,26 persen.

Sementara capaian SD/MI menurut Kabupaten/Kota tahun 2023 tertinggi terdapat di Kota Palu sebesar 95,88 persen sedangkan yang terendah terdapat pada Kabupaten Banggai Kepulauan sebesar 85,62 persen, sementara capaian APM SMP/MTs pada yang tertinggi terdapat di Kota Palu sebesar 82,81 persen sedangkan yang terendah terdapat pada Kabupaten Tojo una-una sebesar 69,1 persen, sedangkan capaian APM SMA/MA/SMK yang tertinggi terdapat di Kota Palu sebesar 79,8 persen sedangkan yang terendah terdapat pada Kabupaten Banggai Kepulauan sebesar 63,73 persen,

j. Kesehatan

Pembangunan di bidang kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional Indonesia yang diatur di dalam Sistem Kesehatan Nasional (SKN). Dijelaskan bahwa tujuan pembangunan kesehatan adalah terselenggaranya pembangunan kesehatan oleh semua potensi bangsa, baik masyarakat, swasta, maupun pemerintah secara sinergis, berhasil guna dan berdaya guna, sehingga terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggitingginya, sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum dari tujuan nasional.

Secara substansi, pemerintah maupun pemerintah daerah telah berupaya secara optimal dalam membangun derajat kesehatan masyarakat melalui sinergitas kebijakan pembangunan kesehatan yang diejawantahkan dalam bentuk pelaksanaan program dan kegiatan.

Capaian kinerja pembangunan kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 dapat dilihat dari beberapa perkembangan indikator kesehatan, antara lain: Angka Harapan Hidup, Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Balita, dan Persentase Balita Gizi Buruk.

Pada tahun 2023, perkembangan Angka Harapan Hidup di Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 70,66 persen. Sementara perkembangan Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan pada tahun 2023 sebesar 108 per 100.000 Kelahiran Hidup, sementara Angka Kematian Bayi (AKB) pada tahun 2023 yakni sebesar 16 per 1000 kelahiran hidup, sedangkan Angka Kematian Balita (AKABA) per 1.000 Kelahiran Hidup yakni 7,5 per 10000 Kelahiran Hidup.

Persentase Cakupan Balita Gizi Buruk pada tahun 2023 sebesar 0,7 persen dan jumlah prevalensi balita gizi kurang sebanyak 7,1 dan cakupan desa siaga pada tahun 2023 sebesar 95,09, dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2.32
Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Kesehatan di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

No	Sasaran Perangkat Daerah Capaian			
(1)	(2)	(3)		
1	Usia Harapan Hidup	70,66		
2	Angka Kematian Ibu per 108 100.000 Kelahiran Hidup			
3	Angka Kematian Bayi per 1.000 16 Kelahiran Hidup			
4	Angka Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup	7,5		
5	Persentasi Balita Gizi Buruk 0,7			
6	Prevalensi Balita Gizi Kurang	7,1		
7	Cakupan Desa Siaga Aktif	95,09		

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, 2023.

Kualitas keluarga kondisi keluarga mencakup aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, kemandirian keluarga, nilai spiritual dan nilai-nilai agama merupakan dasar mencapai keluarga sejahtera. Indikator keluarga sejahtera:

- 1. keluarga prasejahtera
- 2. keluarga sejahtera tahap 1
- 3. keluarga sejahtera tahap 2
- 4. Keluarga sejahtera tahap 3
- 5. Keluarga sejahtera tahap 3 Plus

Capaian kesejahteraan keluarga di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 berdasarkan pendataan keluarga Tahun 2022 Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut.

Tabel 2.33 Capaian Kesejahteraan Keluarga di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

No	Indikator	Capaian
1	keluarga prasejahtera	169.934 KK
2	Keluarga Sejahtera 1	129.055 KK
3	Keluarga Sejahtera 2	60.856 KK
4	Keluarga Sejahtera 3	35.466 KK
5	Keluarga Sejahtera 3 plus	32.041 KK

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

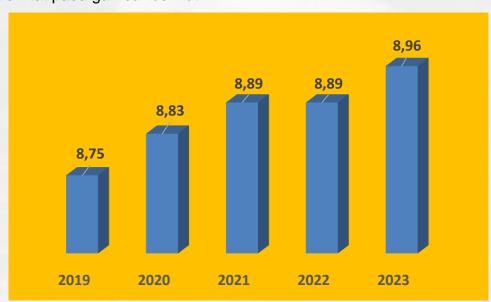
Salah satu faktor utama keberhasilan pembangunan suatu daerah adalah tersedianya Sumberdaya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya

saing. Untuk itu pembangunan atau investasi dibidang pendidikan dan kesehatan menempati posisi urgen dalam skala prioritas pembangunan daerah harus terus ditingkatkan.

Di bidang pendidikan, peningkatan sumber daya manusia lebih diutamakan dengan memberi kesempatan kepada penduduk usia sekolah, dimana luasnya wilayah yang harus dijangkau merupakan faktor yang cukup berpengaruh disamping faktor-faktor lainnya dalam menjalankan programprogram pendidikan yang berimplikasi terciptanya SDM yang handal dan siap bersaing di era globalisasi.

2.3.1.1.1 Pendidikan

Kinerja pembangunan dalam bidang pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah secara berkesinambungan mengalami perbaikan yang cukup nyata, hal ini terlihat dari capaian angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Provinsi Sulawesi Tengah. Pada tahun 2017 angka RLS sebesar 8,29 tahun meningkat menjadi 8,52 tahun pada tahun 2018, selanjutnya setiap tahun mengalami peningkatan hingga menjadi 8,89 tahun pada tahun 2021, dan pada tahun 2022 angka RLS tidak meningkat yakni sebesar 8,89 tahun, selanjutnya pada tahun 2023 meningkat menjadi 8,96 tahun, Lebih lanjut, secara detail perkembangan HLS Provinsi Sulawesi Tengah selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada gambar berikut.



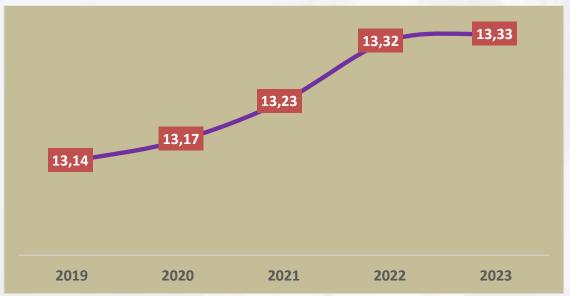
Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah, 2024.

Gambar 2.27
Angka Rata-Rata Lama Sekolah
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019-2023

Indikator selanjutnya yaitu Angka Harapan Lama Sekolah (HLS). Perkembangan HLS Provinsi Sulawesi Tengah selama periode 2017-2022 cenderung mengalami peningkatan, yakni dari 13,04 tahun pada tahun 2017



meningkat menjadi 13,13 tahun pada tahun 2018, selanjutnya mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga mencapai 13,32 tahun pada tahun 2022, dan pada tahun 2023 kembali mengalami peningkatan yaitu 13,33 tahun, Secara detail perkembangan HLS Provinsi Sulawesi Tengah selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah, 2024.

Gambar 2.28
Angka Harapan Lama Sekolah
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019-2023

Indikator penting lainnya yaitu Angka Partisipasi Sekolah (APS) yang menunjukkan pencapaian masih di bawah target RKPD Tahun 2022 yaitu 8,89 persen dari 19,35 persen yang ditargetkan, dimana untuk target Angka Partisipasi Sekolah SD/MI Tahun 2021 yaitu sebesar 99,25 persen dengan capaian sebesar 98,50 persen, APS SMP/MTs dari target 94,00 persen realisasi mencapai sebesar 93,32 persen dan untuk APS SMA/MA/SMK.

2.3.1.1.2 Kesehatan

Capaian kinerja pembangunan bidang kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 atau indikator kinerja sasaran Perangkat Daerah dapat dilihat dari perkembangan indikator kesehatan pada tabel berikut.



Tabel 2.34 Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2022

NO	SASARAN PERANGKAT DAERAH	TARGET	CAPAIAN	KET
1	2	3	4	5
1	Angka Kelangsungan Hidup Bayi	993.71	992,3	
2	Angka Kematian Bayi	6,29	5,87	
3	Angka Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup	7,28	8,00	
4	Angka Kematian Neonatal per 1.000 Kelahiran Hidup	5,3	7,68	
5	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	109,68	122	
6	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani	78,09	97	3-1471
7	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	83,92	76,4	
8	Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani	53,95	65,31	
9	Rasio Dokter per Satuan Penduduk	0,46	0,31	
10	Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk	4.17	5,41	
11	Cakupan Kunjungan Bayi	85.14	110	
12	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	83.52	84,66	
13	Cakupan Pelayanan Nifas	82.2	78,05	
14	Cakupan Pelayanan Anak Balita	72.51	91,67	
15	Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat	68.43	120	
16	Cakupan Balita Gizi Buruk yang Mendapatkan Perawatan	100	82	
17	Rasio Posyandu per Satuan Balita	14.04	1,26	
18	Cakupan Puskesmas	125.71	124,57	
19	Cakupan pelayanan Kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	30	100	
20	Cakupan Puskesmas Pembantu	20.47	35,25	
21	Presentase Puskesmas yang Terakreditasi	98	91,28	
22	Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis yang Terdeteksi dalam Program DOTS	60	46%	
23	Proporsi Kasus Tuberkulosis yang Diobati dan Sembuh dalam Program DOTS	90	87	
24	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	100	99,25	
25	Penderita Diare yang Ditangani	100	32,15	
26	Angka Kejadian Malaria	442,45 / 1000	218/1000	
27	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari Total Populasi	0.04	0,18%	
28	Non Polio AFP Rate per 100.000 Penduduk	0.008	3,99	
29	Cakupan Desa/Kelurahan <i>Universal Child</i> Immunization (UCI)	84.68	71,5	
30	Presentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak	91.26	87,4	
31	Prevalensi Schitosomiasis (lokal spesifik)	< 1	1,7	
32	Penanganan Krisis Kesehatan akibat bencana (SPM)	100	100	
33	Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk	0,013	0,013	
34	Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS)	100	100	
35	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per Satuan Penduduk	0.34	0,88	
36	Cakupan Penemuan Pneumonia Balita	70	100	
	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita	70	47%	
37	Penyakit TBC BTA			

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sulteng, 2023.



2.3.1.1.3 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu instrumen untuk mengendalikan tingkat kelahiran penduduk melalui memaksimalkan akses dan kualitas pelayanan KB terutama bagi keluarga miskin dan rentan serta daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan, meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi remaja dalam rangka menyiapkan kehidupan berkeluarga yang lebih baik, serta pendewasaan usia perkawinan melalui upaya peningkatan kesehatan reproduksi keluarga. Disamping itu melalui program KB juga diharapkan dapat meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga dalam kemampuan pengasuhan dan penumbuhkembangan anak, peningkatan pendapatan keluarga khususnya bagi keluarga (kelompok masyarakat miskin), peningkatan kualitas lingkungan keluarga dan masyarakat.

Perkembangan pelaksanaan program KB di Sulawesi Tengah tahun 2022 dapat dilihat dari beberapa indikator capaian sasaran Perangkat Daerah Dinas Pengendalian penduduk dan KB Provinsi Sulteng pada tabel.

Tabel 2.35
Capaian Indikator Sasaran Keluarga Berencana dan Keluarga Sasaran di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

NO	SASARAN RENSTRA	TARGET	CAPAIAN
1.	Menurunya Angka Prevalensi Contrasepsi Modern	53,83	59,91
2.	Menurunya Angka Kelahiran Total	2,43	2,32
3.	Menurunya Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi	11,96	6,57
5.	Meningkatnya Pemakaian Metode Contrasespsi Jangka Panjang	13,35	13,42
6.	Menurunya Angka Kelahiran Remaja	50/1000	36/1000

Sumber: Dinas Pengendalian penduduk dan KB Provinsi Sulteng, 2023.

Terlihat bahwa menurunnya angka prevalensi Contrasepsi Modern sebesar 59,91 persen, melampaui dari target sasaran Renstra sebesar 53,83 persen, menurunnya angka kelahiran total sebesar 2,43 persen, dari target 2,43 persen, sedangkan Menurunya Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi jauh dari pencapaian target yaitu hanya sebesar 6,57 persen, sementara target yang telah direncanakan pada tahun 2022 sebesar 11,96 persen.



2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan

a. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Perkembangan dan pertumbuhan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah di Sulawesi Tengah dari tahun ke tahun menunjukan peningkatan yang sangat berarti. Bahkan saat ini UKM menjadi ujung tombak stabilisator dan penopang pertumbuhan perekonomian baik nasional maupun daerah. Perkembangan koperasi yang aktif, Usaha Mikro Kecil dan Jumlah UKM non BPR/LKM UKM di Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.36
Banyaknya Koperasi menurut Status Keaktifan
Koperasi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah, 2022

Kabupaten/Kota	Aktif	Tidak Aktif	Jumlah
Kabupaten/Kota	AKIII	Tiuak Aktii	Juillali
Lingkup Provinsi	75	32	107
Banggai Kepulauan	26	74	100
Banggai	150	39	189
Morowali	61	95	156
Poso	247	122	369
Donggala	58	75	133
Tolitoli	114	104	218
Buol	34	192	226
Parigi Moutong	222	9	231
Tojo Una-Una	28	25	53
Sigi	82	15	97
Banggai Laut	25	37	62
Morowali Utara	54	82	136
Kota Palu	91	129	220
Jumlah	1.267	1.030	2.297

Sumber: BPS, Sulteng Dalam Angka 2023

Jumlah koperasi menurut status keaktifan di Sulawesi Tengah pada tahun 2022 sebanyak 2.297, yang aktif sebanyak 1.267 dan yang tidak aktif sebanyak 1.030 unit, melihat data tersebut bahwa secara persentase pada tahun 2022 sebanyak 44,84 persen koperasi di Sulawesi Tengah berstatus tidak aktif.

Selanjutnya terlihat bahwa jumlah persentase koperasi yang aktif di Sulawesi Tengah pada tahun 2022 sebesar 55,16 persen. Sementara perkembangan usaha mikro kecil dan kecil pada Tahun 2021 sebesar 97,50 persen menurun sedikit jika dibandingkan pada tahun 2020 szebesar 99,42 persen, sedangkan jumlah Jumlah UKM non BPR/LKM UKM (Unit) mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 725.143 unit usaha jika dibandingkan pada tahun 2020 sebanyak 721.643 unit, sementara Jumlah BPR/LKM dari tahun 2021 sebanyak 72 unit, hanya mengalami kenaikan 1 unit jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebanyak 71 unit, seperti pada tabel berikut.



Tabel 2.37
Perkembangan Jumlah Koperasi UKM non BPR/LKM UKM (Unit) dan BPR/LKM (Unit) di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2022

No	Uraian	Capaian		
NO	Oralan	2020	2021	2022
1	Persentase Koperasi Aktif	55,45	55,20	60,00
2	Jumlah UKM non BPR / LKM aktif	343.244	343.286	343.310
3	Jumlah UKM BPR/LKM aktif	71	72	73
4	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	99,42	97,50	98,00

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Daerah Provinsi Sulteng, 2023.

Untuk melihat gambaran capaian kinerja Dinas Koperasi dan UMKM dapat dilihat antara lain pada rasio capaian tahun 2021 dimana rasio capaian dari jumlah UKM non BPR/LKM aktif sebanyak 47,34 persen, sedangkan jumlah UKM BPR/LKM aktif dengan rasio capaian sebanyak 100,00 persen dan Usaha Mikro dan Kecil melampaui dari target yang ditetapkan yaitu sebanyak 100,41 persen.

Sementara terkait dengan gambaran capaian kinerja sasaran Perangkat Daerah Bidang Koperasi, UKM Tahun 2022 dapat dilihat antara lain pada capaian indikator Jumlah Koperasi berkualitas dari target 5,77 persen dapat terealisasi sebesar 5,80 persen, indikator Proporsi Tenaga Kerja Sektor Koperasi dan UKM terhadap jumlah penduduk yang bekerja ditargetkan 1,35 dapat terealisasi sebesar 1,47 persen, indikator selanjutnya yaitu Persentase Usaha Kecil Yang Menjadi Wirausaha dari target 5,57 persen dapat terealiasi sebesar 6,24 persen, dan Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dari target 62,00 persen, dapat terealisasi sebesar 81,87 persen, melampaui target yang telah direncanakan, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.38
Capaian Sasaran Indikator Kinerja PD Bidang Koperasi, UKM
Tahun 2022

NO	SASARAN RENSTRA	TARGET	CAPAIAN
1	Proporsi Tenaga Kerja Sektor Koperasi dan UKM terhadap jumlah penduduk yang bekerja	1,35	1,47
2	Persentase Koperasi yang berkualitas	5,77	5,8
3	Persentase Usaha Kecil Yang Menjadi Wirausaha	5,57	6,24
4	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	62	81,87

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulteng, 2023



b. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dalam rangka mensukseskan program/kegiatam pemberdayaan masyarakat baik program nasional maupun program yang dibangun melalui pemerintah daerah sangat dibutuhkan kesiapan institusi/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di daerah.

Sejalan dengan hal itu bahwa pada tahun 2022 dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah adalah Indeks Desa Membangun, sedangkan indikator sasaran Perangkat Daerah yang terdapat pada Rencana Strategis Perangkat Daerah DPPMD Provinsi Sulawesi Tengah, seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.39
Capaian Sasaran Indikator Kinerja PD Bidang
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022

NO	SASARAN RENSTRA	TARGET	CAPAIAN
1.	Persentase Desa Mandiri	1,57	2,28
2.	Persentase Desa Maju	22,58	28,34
3.	Persentase Desa Berkembang	58,42	54,02
4.	Persentase Desa Tertinggal	16,29	14,44
5.	Persentase Desa Sangat Tertinggal	1,14	0,92

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulteng, 2023

c. Seni Budaya dan Olahraga

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan Sulawesi Tengah dan sekaligus sebagai pendorong perekonomian daerah. Untuk itu potensi pariwisata, seni dan budaya perlu terus untuk dikembangkan dan dipasarkan melalui kegiatan promosi, baik dalam negeri maupun manca negara.

Penyelenggaraan festival seni dan budaya di Sulawesi Tengah pada Tahun 2019 sebanyak 17 kali, dengan jumlah sarana fasilitas penyelenggaraan seni dan budaya yaitu 20 buah. Selanjutnya jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan di Sulawesi Tengah sejak Tahun 2014-2022 mengalami peningkatan yakni dari 16 situs/BCB pada Tahun 2014 menjadi 18 situs/BCB pada Tahun 2022. Selanjutnya masa pandemi covid-19 Selama tahun 2020 sampai dengan awal tahun 2022 tidak melaksanakan peneyelenggaraan seni idan budaya.

Pada tahun 2023 perkembangan pembangunan pemuda di Provinsi Sulawesi Tengah yang menjadi salah satu Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olah Raga yaitu : Persentase Wirausaha Muda



dengan capaian 5,28 persen, Pertumbuhan organisasi pemuda yang aktif sebesar 2 persen, sedangkan Cakupan Pelatih Yang bersertifikat mencapai 15 persen, Rasio Jumlah Gedung Olahraga sebesar 0,0571 persen per 10.000 Penduduk,sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.40
Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Bidang Seni Budaya,
Pemuda dan Olahraga di Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2023

NO	SASARAN PERANGKAT DAERAH	CAPAIAN
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya (event/kegiatan)	4
2	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan (Benda/Situs)	25
3	Persentase Wirausaha Muda (persen)	5,28
4	Cakupan Pembinaan Olahraga (persen)	0.52
5	Pertumbuhan organisasi pemuda yang aktif (persen)	2
6	Cakupan Pelatih Yang bersertifikat	15
7	Rasio Jumlah Gedung Olahraga per 10.000 Penduduk (persen)	0,0571

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulteng, 2023.

d. Perpustakaan

Perpustakaan merupakan salah satu pilar dalam mewujudkan kualitas sumberdaya manusia di Sulawesi Tengah. Sejak empat tahun terakhir, jumlah perpustakaan dan pengunjung perpustakaan semakin meningkat seiring meningkatnya jumlah koleksi buku yang tersedia, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.41
Perkembangan Indikator Sasaran Renstra PD
di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

NO	SASARAN RENSTRA	TARGET	CAPAIAN
1	Jumlah Pengunjung Perpustakaan per tahun (Orang)	12.089	26.065
2	Koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan daerah (buku)	59.113	373.096
3	Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk (angka)	0,19	0,15%
4	Jumlah Rata-rata Pengunjung Perpustakaan/tahun (orang)	1.007	2.172
5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	2.808	68.174

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulteng, 2023

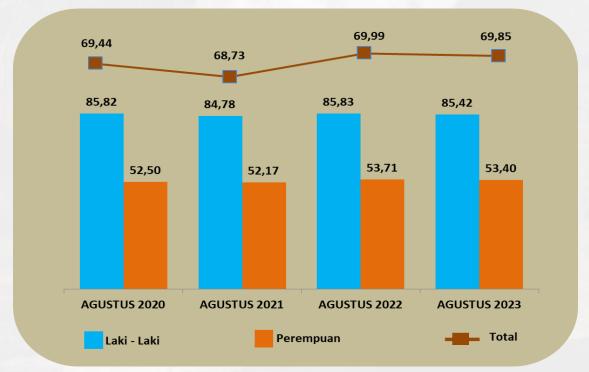


Jumlah pengunjung perpustakaan di Sulawesi Tengah tahun 2022 sejumlah 26.065 orang, koleksi buku yang tersdia sebesar 373.096 buah buku, melihat perkembangannya sangat jauh melampaui target dari sasaran Renstra Perangkat daerah yaitu sebesar 59.113 buku.

e. Ketenagakerjaan

Penciptaan kesempatan kerja merupakan masalah yang amat mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu pembangunan di bidang ekonomi harus diarahkan pada upaya penciptaan dan perluasan lapangan kerja.

Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2023 sebanyak 1.594,25 ribu orang, menurun 41,21 ribu orang dibanding Agustus 2022. Sementara persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurun sebesar 0,14 persen. sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2023 sebesar 3,49 persen dari 69,99 persen Agustus tahun 2022 menjadi 69,85 persen Agustus tahun 2023, Penduduk yang bekerja sebanyak 1.586,32 ribu orang pada Agustus tahun 2022, menurun jika dibandingkan pada Agustus tahun 2023 sebanyak 39,15 ribu orang yaitu 1.547,17 ribu orang.



Sumber: BRS BPS Provinsi Sulawesi Tengah, 2023

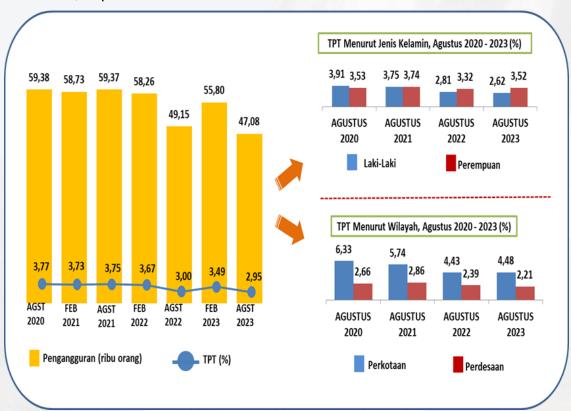
Gambar 2.29
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Jenis Kelamin
Agustus 2020-Agustus 2023 (%)

Pertumbuhan ekonomi mendorong penciptaan lapangan kerja yang berdampak pada penurunan tingkat pengangguran, jumlah pengangguran di Provinsi Sulawesi Tengah pada Agustus 2023 sebesar 47,08 ribu orang atau



3,00 persen, menurun jika dibandingkan pada Agustus tahun 2022 yaitu sebesar 49,15 ribu orang atau 2,95 persen.

Sementara Tingkat Pengangguran Terbuka menurut wilayah, bahwa pada Agustus tahun 2022 di Perkotaan sebesar 4,34 persen, meningkat pada Agustus 2023 sebesar 4,48 persen, berbanding terbalik dengan di Pedesaan pada Agustus 2023 berjumlah 2,21 persen, menurun dari Agustus 2022 yaitu sebesar 2,39 persen.



Sumber: BRS BPS Provinsi Sulawesi Tengah, 2023

Gambar 2.30
Jumlah dan Tingkat Pengangguran Terbuka Agustus 2020-Agustus 2023

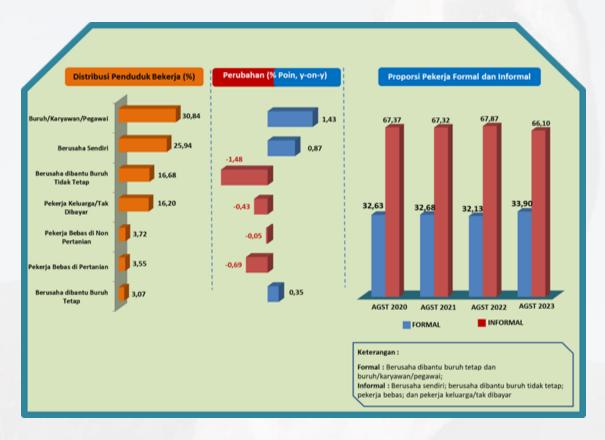
(1) Status Pekerjaan Utama menurut Lapangan Pekerjaan

Jumlah Penduduk yang bekerja pada Agustus 2023 berjumlah 1.547,17 Ribu Orang, yang tersebar pada tujuh status pekerjaan, distribusi penduduk bekerja pada status pekerjaan sebagai Buruh/Karyawan/Pegawai menempati urutan yang terbanyak sebesar 30,84 persen, disusul dengan Berusaha Sendiri sebanyak 25,94 persen, dan yang paling rendah adalah Berusaha dibantu Buruh Tetap hanya sebesar 3,07 persen.

Untuk Proporsi penduduk yang bekerja pada kegiatan formal terus meningkat, utamanya didorong oleh meningkatnya pekerja dengan status buruh/karyawan/pegawai, pada kegiatan formal tahun 2023 bulan Agustus sebesar 33,90 persen, menurun dari Agustus tahun 2022 sejumlah 32,13



persen, namun pada kegiatan informal mengalami penurunan yaitu 66,10 persen pada Agustus 2023 dari 67,87 persen Agustus 2022.

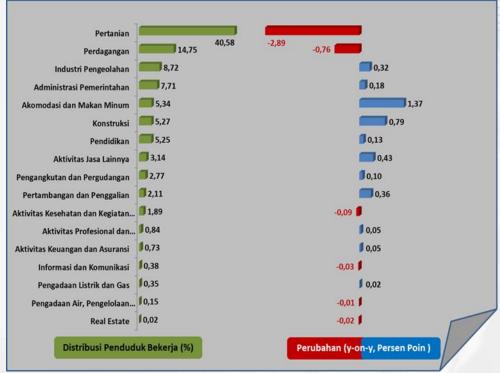


Sumber: BRS BPS Provinsi Sulawesi Tengah, 2023

Gambar 2.31 Status Pekerjaan Utama dan Proporsi Pekerja Formal dan Informal

(2) Penyerapan Tenaga Kerja Menurut Lapangan Pekerjaan

Lapangan usaha Akomodasi & Makan Minum paling banyak menyerap tenaga kerja, Selama Agustus 2022–Agustus 2023, lapangan usaha Akomodasi & Makan Minum, Konstruksi, dan Aktivitas Jasa Lainnya menjadi sektor tertinggi penyerap tenaga kerja, yaitu masing-masing sekitar 1,37 persen poin, 0,79 persen poin, dan 0,43 persen poin , seperti pada gambar berikut.



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah, 2023

Gambar 2.32 Penyerapan Tenaga Kerja yang bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Agustus 2023

3) Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Lulusan S1/S2/S3)

Perkembangan rasio kelulusan untuk pendidikan (SO/S1/S2/S3) per jumlah penduduk di Provinsi Sulawesi Tengah selama periode Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 cenderung meningkat, dimana pada Tahun 2017 rasionya sebesar 497 per 10.000 penduduk meningkat menjadi 735 per 10.000 penduduk pada Tahun 2018, selanjutnya setiap tahun rasionya mengalami peningkatan hingga mencapai 902 per 10.000 penduduk pada tahun 2022.



Sumber: BPS, Provinsi Sulteng Dalam Angka, 2023 (Data Diolah Kembali)

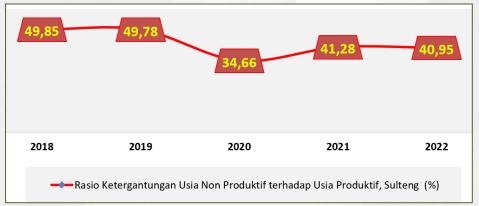
Gambar 2.33
Perkembangan Rasio Lulusan SO/S1/S2/S3 Per 10.000 Penduduk di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017 – 2022 (data 2023)



4) Rasio Ketergantungan

Untuk melihat seberapa besar ketergantungan penduduk usia non produktif terhadap usia produktif salah satunya dapat dilihat dari indikator dependency ratio atau rasio ketergantungan. Persentase dependency ratio yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Perkembangan rasio ketergantungan penduduk usia non produktif terhadap penduduk usia produktif di Sulawesi Tengah selama periode Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 cenderung mengalami fluktuatif, yakni pada tahun 2018 rasio ketergantungan mencapai 49,95 persen menurun menjadi 49,78 persen pada tahun 2019 dan menurun menjadi 34,66 persen pada tahun 2020, selanjutmya pada tahun 2021 rasio ketergantungan mencapai 41,28 persen menurun menjadi 40,95 persen pada tahun 2022, sebagaimana tertera pada gambar berikut.



Sumber: BPS, Provinsi Sulteng Dalam Angka, 2018-2023 (Data Diolah Kembali) **Gambar 2.34**

Trend Rasio Ketergantungan Penduduk Usia non produktif Terhadap Usia Produktif di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018 – 2022

f. Lingkungan Hidup

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan lingkungan hidup dapat dilihat dari indikator antara lain;

(1) Tersedianya dokumen RPPLH Provinsi; serta 2) Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Provinsi.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. RPPLH disusun oleh pemerintah di tingkat nasional, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Provinsi Sulawesi Tengah pada 2019 dokumen RPPLH proses penyusunan, yang antara lain memuat daya dukung dan daya 77amping lingkungan hidup.



(2) Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat Daerah

Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Provinsi Sulawesi Tengah telah menyelenggarakan KLHS untuk Kebijakan Rencana dan Program Daerah RPJMD.

Sejalan dengan hal tersebut bahwa sesuai dengan capaian indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2023, seperti pada tabel berikut.

Tabel 2.42
Perkembangan Indikator Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN
Indeks Kualitas Air	Indeks	63,63
Indeks Kualitas Udara	Indeks	91,88
Indeks Kualitas air laut	Indeks	71,21
Emisi Gas Rumah Kaca	Ton CO₂eq	1.330.900

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulteng, 2023.

g. Angka Kriminalitas Yang Tertangani

Percepatan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah ke depan memerlukan dukungan investasi khususnya dari kalangan sektor swasta dengan mengisyaratkan stabilitas politik, keamanan dan iklim investasi yang kondusif dan menjanjikan.

Oleh karena itu pemerintah daerah terus berupaya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban, serta memiliki komitmen yang kuat dalam mewujudkan iklim yang kondusif dalam rangka meningkatkan minat investor untuk menanamkan investasinya di Sulawesi Tengah. Oleh karenanya pemerintah memfokuskan perhatian pada penanganan keamanan dan ketertiban terutama masalah yang semakin marak terjadi dikalangan masyarakat yakni tawuran antar kampung.

Jumlah kejahatan yang dilaporkan dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 mengalami peningkatan, yakni dengan jumlah 5.858 kasus pada tahun 2022 menjadi 8.546 kasus pada tahun 2023, sementara persentase penyelesaiannya dari tahun 2022 sebesar 50,65 persen meningkat menjadi 57,45 persen pada tahun 2023, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2.43
Perkembangan Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan, Risiko Penduduk
Terkena Kejahatan per 100.000 Penduduk dan Persentase Penyelesaian
Kejahatan, Tahun 2022-2023

Kepolisian Resor	Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan		Risiko Penduduk Terkena Kejahatan per 100.000 Penduduk		Persentase Penyelesaian Kejahatan (%)	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Banggai Kepulauan	294	246	149	122	62,93	59,76
Banggai	643	1.134	174	306	61,59	69,4
Morowali	434	489	267	273	42,17	65,44
Poso	Poso 239		96	135	36,4	78,11
Donggala	440	572	143	184	47,5	76,75
Tolitoli	327	513	146	217	47,4	70,76
Buol	452	549	299	351	64,16	70,13
Parigi Moutong	376	558	83	123	48,4	56,63
Tojo Una-Una	234	478	140	282	51,71	60,04
Sigi	364	555	140	210	63,46	72,25
Morowali Utara	338	376	266	258	43,2	55,59
Palu	1.717	2.738	459	717	45,54	36,05
Sulawesi Tengah	5.858	8.546	193	286	50,65	57,45

Sumber: BPS, Sulteng Dalam Angka 2024.

Sementara jumlah perkara tindak pidana umum yang diselesaikan di Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan Tahun 2023 sebanyak 2.122 kasus yang masih tersisa sejumlah 240 kasus seperti ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2.44
Perkembangan Jumlah Perkara Tindak Pidana Umum yang Masuk dan diselesaikan pada Kejaksaan Sulawesi Tengah, Tahun 2023

	Kejaksaan		Masuk Tahun Laporan	Diselesaik an	Sisa Akhir Tahun
	1	2	3	4	5
1.	Kejaksaan Tinggi	96	236	245	27
2.	Kejaksaan Negeri Palu	3	248	237	14
3.	Kejaksaan Negeri Banggai	4	209	191	24
4.	Kejaksaan Negeri Tolitoli	7	165	146	27
5.	Kejaksaan Negeri Poso	23	98	101	22
6.	Kejaksaan Negeri Donggala	5	572	507	70
7.	Kejaksaan Negeri Banggai Laut	38	93	108	20
8.	Kejaksaan Negeri Parigi Moutong	24	230	245	14
9.	Kejaksaan Negeri Buol	2	110	112	2
10.	Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una	19	106	115	10
12.	Kejaksaan Negeri Morowali	67	212	115	10
	-				
	Jumlah	288	2.279	2.122	240

Sumber: BPS, Sulteng Dalam Angka 2024



Sedangkan jumlah perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan Tahun 2023 sebanyak 52 kasus yang masih tersisa sejumlah 46 kasus dari jumlah kasus yang masuk di Kejaksaan Sulawesi Tengah sejumlah 48 kasus, ditunjukkan pada gambar berikut.

Tabel 2.45
Perkembangan Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Masuk dan diselesaikan pada Kejaksaan Sulawesi Tengah Tahun 2023

Kejaksaan		Sisa Laporan Tahun Lalu	Masuk Tahun Laporan	Jumlah	Penyelesai an	Sisa Tahun Laporan
	1	2	3	4	5	6
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.	Kejaksaan Tinggi Kejaksaan Negeri Palu Kejaksaan Negeri Banggai Kejaksaan Negeri Tolitoli Kejaksaan Negeri Poso Kejaksaan Negeri Donggala Kejaksaan Negeri Banggai Laut Kejaksaan Negeri Parigi Moutong Kejaksaan Negeri Buol Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una	7 3 7 6 3 3 5 4 4 2	5 1 5 4 2 15 2 - 11	12 4 12 10 5 18 7 4 4	7 2 5 4 3 11 3 2 2	5 2 7 6 2 7 4 2 2 4
12.	Kejaksaan Negeri Morowali	6	3	9	4	5
	Jumlah	50	48	98	52	46

Sumber: BPS, Sulteng Dalam Angka 2024.

h. Pariwisata

Perkembangan sektor pariwisata di Sulawesi Tengah turut memberi andil dalam proses pembangunan daerah.Sektor pariwisata diharapkan dapat menjadi magnet bagi wisatawan asing/mancanegara untuk berkunjung di daerah Sulawesi Tengah.

Selama periode Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022 jumlah kunjungan wisatawan dalam negeri di Sulawesi Tengah mengalami fluktuasi, yakni dari 3.322.845 orang Tahun 2019, Tahun 2020 menurun menjadi 1.824.916 orang, pada Tahun 2021 kembali menurun menjadi 714.703 orang, pada tahun 2022 meningkat menjadi 1.321.238 orang, dan tahun 2023 terjadi peningkatan yang sangat signifikan yakni berjumlah 5.148.361 orang, seperti pada tabel berikut:



Tabel 2.46
Perkembangan Kunjungan Wisatawan
Di Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2019 – 2023

Di i Tovilisi Guiawesi Teligali, Taliali 2015 – 2025						
Tahun	Wisata	Jumlah				
ranun	Mancanegara	Domestik	Jumian			
2019	26.491	3.296.354	3.322.845			
2020	11.921	1.812.995	1.824.916			
2021	1.085	713.618	714.703			
2022	3.280	1.317.958	1.321.238			
2023	8.382	5.139.979	5.148.361			

Sumber: BPS Sulteng Dalam Angka, 2024.

i. Kelautan dan Perikanan

Produksi perikanan budidaya di Sulawesi Tengah pada Tahun 2022 mencapai 700.825,35 ton, Sementara produksi perikanan tangkap pada Tahun 2022 sebanyak 205.198.207 ton.

Pada Tahun 2022 jumlah produksi perikanan budidaya mencapai 700.825,35 ton, sementara produksi Perikanan Tangkap pada Tahun 2022 mencapai 205.198.207 ton, sedangkan perkembangan konsumsi ikan di Sulawesi Tengah pada tahun 2022, sesuai capaian sasaran Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar 67.04 (kg/perkapita/tahun), dari target yang telah direncanakan sebesar 64,18 (kg/perkapita/tahun), untuk capaian sasaran Perangkat Daerah lainnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.47
Capaian Sasaran Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

Perikanan Provinsi Sulawesi Tengan Tanun 2022					
SASARAN RENSTRA	CAPAIAN				
NILAI TUKAR PERIKANAN	104.36				
RASIO KAWASAN LINDUNG PERAIRAN					
TERHADAP TOTAL LUAS PERAIRAN	19.4				
TERITORIAL PRODUKSI PERIKANAN (TON)					
PRODUKSI PERIKANAN (TON)	1.491.033,02				
ANGKA KONSUMSI IKAN	64.18				
(KG/PERKAPITA/TAHUN)	04.10				
JUMLAH HARI OPERASI PENGAWASAN SDKP (HARI OPERASI)	2,00				
	SASARAN RENSTRA NILAI TUKAR PERIKANAN RASIO KAWASAN LINDUNG PERAIRAN TERHADAP TOTAL LUAS PERAIRAN TERITORIAL PRODUKSI PERIKANAN (TON) PRODUKSI PERIKANAN (TON) ANGKA KONSUMSI IKAN (KG/PERKAPITA/TAHUN) JUMLAH HARI OPERASI PENGAWASAN SDKP				

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulteng, 2023.

Selanjutnya Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mencadangkan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Tengah dengan luas 1.379.159,41 ha melalui Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 523/635A/Dis.KANLUT-GST/2017. Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Tengah tersebut meliputi:

- Kawasan Konservasi Perairan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Doboto di Kabupaten Donggala, Kabupaten Tolitoli dan Kabupaten Buol (60.042,75 ha);
- Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Teluk Tomini di Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Poso, dan Kabupaten Tojo Una-Una (137.766,95 ha);
- 3. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Banggai Dalaka di Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kabupaten Banggai Laut (869.059,94 ha); dan
- 4. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Morowali di Kabupaten Morowali Utara dan Kabupaten Morowali (312.289,77 ha).

b. Perindustrian dan Perdagangan

Perkembangan sektor industri dan perdagangan di Sulawesi Tengah cenderung stagnan. Untuk sektor industri skala kecil dan menengah cukup berkembang tetapi untuk industri skala besar (industri manufaktur) tidak begitu berkembang. Industri skala kecil dan menengah yang dikembangkan oleh masyarakat dan swasta, seperti industri kerajinan tangan (rotan dan bambu), meubel, food (kuliner), dan penginapan (homestay). Adapun sektor perdagangan lebih bergerak pada perdagangan antar pulau dan antar provinsi untuk komoditas hasil-hasil pertanian, perkebunan dan perikanan laut.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018-2038, Industri unggulan Provinsi Sulawesi Tengah terdiri atas :

- a. Industri Pangan terdiri dari :
 - (1) Industri pengolahan Berbahan Baku Hasil Pertanian dan Peternakan
 - (2) Industri Pengolahan Minyak Nabati
 - (3) Industri berbahan baku ikan dan hasil kelautan
 - (4) Industri olahan coklat
 - (5) Industri bawang
 - (6) Industri olahan kopi
- b. Industri Hulu Agro
 - (1) Indusri pengolahan kelapa terpadu
 - (2) Industri pengolahan minyak atsiri (cengkeh, pala dan nilam)
 - (3) Industri pengolahan kelapa sawit
 - (4) Industri karet
 - (5) Industri Pakan

- c. Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka (Kayu dan Rotan)
 - (1) Industri Tekstil
 - (2) Industri Furniture
 - (3) Industri Pengolahan Kayu dan Rotan
 - (4) Industri Kerajinan Kayu dan Anyaman Rotan
- d. Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara
 - (1) Industri Minyak dan Gas
- e. Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam
 - (1) Industri Besi
 - (2) Industri Nikel
 - (3) Industri Bahan Galian Bukan Logam

2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

Dalam konteks otonomi daerah, peran pemerintah daerah lebih dituntut sebagai pemrakarsa dalam menciptakan dan meningkatkan kemandirian daerah guna mencapai kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan daya saing daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah.

Suatu daya saing (competitiveness) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Daya saing daerah memiliki beberapa aspek yang terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah dan infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

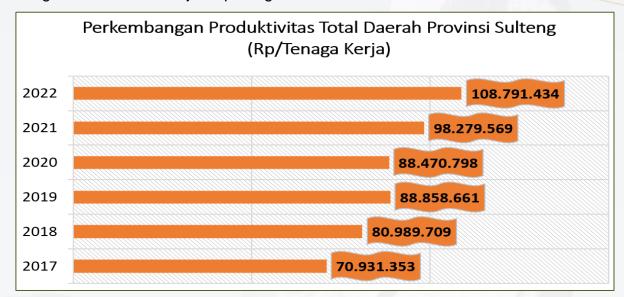
a. Produktivitas Total Daerah

Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah yang telah dicapai tidak lepas dari peran semua sektor lapangan usaha. Produktivitas Total daerah menunjukkan seberapa besar bilah tambah bruto yang diciptakan oleh suatu daerah. Nilai produktivitas sektor ekonomi daerah yang tangguh diharapkan dapat mendukung daya saing daerah di era otonomi.

Produktivitas Total Daerah Provinsi Sulawesi Tengah selama periode Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 menunjukkan *trend* yang meningkat, yakni dari Rp.70,93 juta per tenaga kerja pada tahun 2017 meningkat menjadi Rp.80,99 juta per tenaga kerja pada tahun 2018, selanjutnya mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga mencapai Rp.108,79 juta per tenaga kerja. Selanjutnya secara detail mengenai perkembangan Produktivitas Total



Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sepanjang periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 disajikan pada gambar berikut.



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah, 2023 (Diolah Kembali)

Gambar 2.35
Perkembangan Produksi Total Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2017– 2022

b. Pengeluaran Konsumsi Perkapita

Pada tahun 2022 di Provinsi Sulawesi Tengah pengeluaran rata-rata per kapita sebulan baik makanan maupun bukan makanan kelompok komoditas yang trend peningkatannya cukup baik, dari jenis komoditas yang tertinggi dari Makanan dan minuman jadi sebesar Rp. 132.122,- meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp. 125.564,- dan pada tahun 2023 meningkat sebesar Rp. 183.866,- yang paling terendah adalah Umbi-umbian sebesar Rp. 7.158,-. Sedangkan komoditas yang bukan makanan, tertinggi adalah Perumahan dan fasilitas rumah tangga sebesar Rp. 325.344,- dan meningkat jika dibandingkan pada tahun 2022 sebesar 296.707,- secara rinci pegeluaran konsumsi perkapita di Provinsi Sulawesi Tengah ditunjukkan pada tabel berikut.



Tabel 2.48
Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Perkapita Menurut Kelompok
Komoditas Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021–2023 (Rupiah)

Kelompok Komoditas	2021	2022	2023
Makanan			
Padi-padian	79 305	81 579	100.693
Umbi-umbian	6 605	6 675	7.158
Ikan/udang/cumi/kerang	55 277	62 480	64.420
Daging	13 083	16 124	15.132
Telur dan susu	25 443	25 313	26.383
Sayur-sayuran	41 936	47 121	47.473
Kacang-kacangan	8 444	9 335	9.992
Buah-buahan	19 593	26 695	30.129
Minyak dan kelapa	14 463	21 780	18.129
Bahan minuman	18 631	19 539	19.688
Bumbu-bumbuan	11 251	13 851	13.762
Konsumsi lainnya	9 442	10 190	10.306
Makanan dan minuman jadi	125 564	132 122	143.886
Rokok	83 273	88 935	95.316
Jumlah makanan	512 309	561 739	602.468
Bukan makanan			
Perumahan dan fasilitas rumah tangga	294 020	296 707	325.344
Aneka komoditas dan jasa	102 343	97 284	107.783
Pakaian alas kaki dan tutup kepala	27 861	29 644	30.810
Komoditas tahan lama	53 086	38 418	34.482
Pajak pungutan dan asuransi	45 704	44 983	50.397
Keperluan pesta dan upacara/kenduri	16 382	14 905	22.395
Jumlah bukan makanan	539 396	521 940	571.212
Jumlah	1 051 706	1 083 679	1.173.679

Sumber: BPS, Sulteng dalam Angka 2024.

Sedangkan Konsumsi Kalori per Kapita Sehari di Daerah Perkotaan menurut Kelompok Komoditas Makanan di Provinsi Sulawesi Tengah, dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, mengalami peningkatan, pada tahun 2022 kelompok makanan yang tertinggi adalah padi-padian sebesar 872,49 kalori, sedangkan pada pada tahun mengalami peningkatan sebesar 978,18 ka;ori dan yang paling rendah adalah bumbu-bumbuan 11,85 kalori, dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2.49
Rata-rata Konsumsi kalori per Kapita Sehari di Daerah Perkotaan (kalori)
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019–2023

Kalampak Makanan		Tahun				
Kelompok Makanan	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	
Padi-padian	822,54	841,24	885,7	872,49	978,18	
Umbi-umbian	35,28	33,11	36,36	35,47	34,22	
Ikan/udang/cumi/kerang	71,48	68,91	63,85	72,03	69,25	
Daging	36,3	32,09	35,03	39,48	39,12	
Telur dan susu	54,13	55,05	51,64	49,13	50,08	
Sayur-sayuran	31,75	29,38	32,88	37,83	37,94	
Kacang-kacangan	41,88	45,64	45,52	47,97	43,01	
Buah-buahan	71,02	69,22	45,89	45,34	49,3	
Minyak dan kelapa	225,66	230,84	250,25	255,82	270,14	
Bahan minuman	90,38	91,71	91,14	88,01	85,39	
Bumbu-bumbuan	10,25	7,01	7,49	9,38	11,85	
Konsumsi lainnya	45,26	44,71	47,11	47,87	42,35	
Makanan dan minuman jadi	524,36	498,19	379,2	322,81	378,08	
Jumlah	2.060,29	2.047,10	1.972,06	1.923,62	2.088,92	

Sumber: BPS, Provinsi Sulteng dalam Angka 2024.

Selanjutnya perkembangan rata-rata konsumsi kalori per kapita sehari di Daerah Perdesaan menurut kelompok Komoditas makanan di Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.50
Rata-rata Konsumsi Kalori per Kapita Sehari di Daerah Perdesaan menurut Kelompok Komoditas Makanan di Provinsi Sulawesi Tengah (kalori), 2019 –2023

Kalampak Makanan			Tahun		
Kelompok Makanan	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
Padi-padian	969,45	1.004,46	1.023,32	1.027,83	1.035,64
Umbi-umbian	64,07	67,98	74,85	63,63	56,27
Ikan/udang/cumi/kerang	66,72	65,72	69,32	73,56	71,63
Daging	21,45	26,51	30,67	32,85	28,74
Telur dan susu	32,20	34,09	35,26	33,55	30,86
Sayur-sayuran	35,66	35,38	37,34	37,67	40,04
Kacang-kacangan	28,88	30,42	33,52	31,81	29,54
Buah-buahan	78,98	73,93	52,00	53,79	54,44
Minyak dan kelapa	243,11	250,71	260,57	273,79	251,75
Bahan minuman	107,93	112,26	115,30	107,86	105,04
Bumbu-bumbuan	7,22	7,42	7,75	9,03	8,60
Konsumsi lainnya	36,01	35,64	39,04	39,07	35,77
Makanan dan minuman jadi	307,65	292,22	246,03	252,73	280,40
Jumlah	1.999,33	2.036,74	2.024,97	2.037,17	2.039,32

Sumber: BPS, Provinsi Sulteng dalam Angka 2024.

c. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan petani dari waktu ke waktu, dan diharapkan bahwa petani mengalami surplus (pendapatan melebihi



pengeluaran=NTP>100). NTP juga menunjukkan daya tukar (term of trade) dari produksi pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. NTP diperoleh dari hasil perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib) dan nilai NTP dinyatakan dalam bentuk persentase.

1. Nilai Tukar Petani (NTP) Menurut Subsektor

Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Sulawesi Tengah selama Desember 2023 sebesar 114,63 naik 2,22 persen dibandingkan NTP bulan November 2023, dan meningkat jika dibandingkan pada tahun 2022 Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Sulawesi Tengah mencapai 101,58 persen, meningkat dibanding tahun 2021 yang hanya sebesar 99,70 persen, dan sepanjang 6 tahun terakhir capaian NTP tahun 2022 yang mencapai nilai diatas 100.

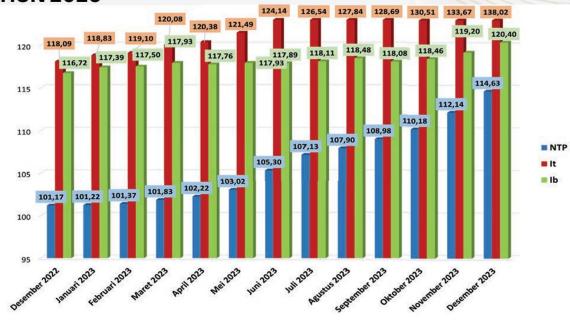
Dari hasil pemantauan harga penjualan komoditas hasil pertanian di tingkat produsen, biaya produksi, dan konsumsi rumahtangga terhadap barang dan jasa di wilayah perdesaan selama Desember 2023 menunjukkan bahwa NTP Provinsi Sulawesi Tengah naik sebesar 2,22 persen, yakni dari 112,14 pada November 2023 menjadi 114,63 pada Desember 2023. Hal ini disebabkan kenaikan indeks harga yang diterima petani (It) sebesar 3,25 persen, lebih tinggi dari kenaikan indeks harga yang dibayar petani (Ib) sebesar 1,01 persen.

2. Indeks Harga yang diterima oleh Petani (It)

Selama Desember 2023, indeks harga yang diterima petani (It) tercatat 138,02 naik sebesar 3,25 persen dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 133,67. Kenaikan ini dipengaruhi oleh naikya (It) subsektor tanaman pangan sebesar 0,03 persen, subsektor Hortikultura sebesar 21,28, subsektor perkebunan rakyat sebesar 3,34 persen dan subsektor peternakan sebesar 0,01 persen.

3. Indeks Harga yang dibayar oleh Petani (lb)

Indeks harga yang dibayar petani (Ib) dipengaruhi oleh komponen pengeluaran baik untuk konsumsi rumahtangga maupun fluktuasi harga barang dan jasa yang diperlukan untuk memproduksi hasil pertanian. Indeks harga yang dibayar petani (Ib) selama bulan Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar 1,01 persen dibanding bulan sebelumnya. Kenaikan ini disebabkan oleh naiknya (Ib) seluruh subsektor.



Sumber: BPS Sulteng Dalam Angka, 2024

Gambar 2.36
Perkembangan NTP dan Indeks Harga Diterima/Dibayar Petani November 2022- November 2023

NTP Menurut Subsektor

a. NTP Tanaman Pangan

NTP subsektor tanaman pangan selama bulan Desember 2023 mengalami penurunan indeks sebesar 1,06 persen yakni dari 97,21 pada November 2023 turun menjadi 96,18 pada Desember 2023. Penurunan NTPP disebabkan oleh indeks harga yang diterima petani (It) naik sebesar 0,03 persen lebih rendah dari kenaikan indeks yang dibayar petani (Ib) sebesar 1,10 persen .

b. NTP Tanaman Hortikultura (NTPH)

Selama bulan Desember 2023 subsektor Hortikultura mengalami kenaikan NTP yang cukup tinggi sebesar 20,16 persen atau berubah dari 132,60 pada November 2023 menjadi 159,33 pada Desember 2023. Kenaikan NTPH disebabkan oleh indeks harga yang diterima petani (It) mengalami kenaikan yang cukup tinggi sebesar 21,28 persen.

Indeks harga yang dibayar petani (Ib) subsektor Hortikultura pada Desember 2023 sebesar 118,79 atau naik sebesar 0,93 persen dibandingkan bulan November 2023 sebesar 117,69.

c. NTP Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR)

Nilai tukar subsektor tanaman perkebunan rakyat selama Desember 2023 mengalami ke- naikan indeks sebesar 2,37 persen. Nilai NTPR yang sebelumnya sebesar 121,28 pada bulan November 2023 naik menjadi 124,16 pada Desember 2023. Kenaikan ini disebabkan oleh



indeks harga yang diterima petani (It) mengalami kenaikan indeks sebesar 3,34 persen, lebih tinggi dari kenaikan indeks harga yang dibayar petani (Ib) sebesar 0,94 persen.

d. NTP Peternakan (NTPT)

Subsektor peternakan pada bulan Desember 2023 mengalami penurunan NTP sebesar 1,06 persen. Nilai NTPT yang semula 103,60 pada November 2023 turun menjadi 102,50 pada Desember 2023. Penurunan NTP subsektor peternakan dipengaruhi oleh indeks harga yang diterima petani (It) mengalami kenaikan sebesar 0,01 persen lebih kecil dari kenaikan indeks harga yang dibayar petani (Ib) yang naik sebesar 1,08 persen. Kenaikan indeks harga yang diterima petani (It) dipengaruhi oleh naiknya indeks harga pada subsektor ternak kecil, unggas dan hasil ternak/unggas. Indeks harga yang dibayar petani (Ib) mengalami kenaikan indeks sebesar 1,08 persen dipengaruhi oleh naiknya indeks konsumsi rumah tangga dan indeks BPPBM masingmasing sebesar 1,63 persen dan 0,37 persen.

e. NTP Perikanan (NTNP)

Selama bulan Desember 2023 subsektor perikanan mengalami penurunan indeks sebesar 2,85 persen. Penurunan ini disebabkan oleh turunnya (It) sebesar 1,75 persen, sebaliknya indeks yang dibayar petani (Ib) mengalami kenaikan sebesar 1,12 persen. Penurunan (It) dipengaruhi oleh turunnya indeks pada subkelompok perikanan tangkap dan budidaya masing-masing sebesar 1,84 persen dan 0,61 persen.

Pada kelompok perikanan tangkap (NTN), terjadi penurunan nilai tukar nelayan sebesar 2,96 persen yakni dari 97,71 pada November 2023 turun menjadi 94,82 pada Desember 2023. Penurunan nilai tukar pada subkelompok perikanan tangkap disebabkan oleh turunnya indeks harga yang diterima petani (It) sebesar 1,84 persen. Penurunan (It) perikanan tangkap dipicu oleh turunnya indeks harga pada subkelompok penangkapan ikan di laut sebesar 1,87 persen. Sebaliknya indeks harga yang dibayar petani (Ib) yang mengalami kenaikan sebesar 1,15 persen. Kenaikan (Ib) kelompok perikanan tangkap dipengaruhi oleh indeks konsumsi rumahtangga yang naik sebesar 1,75 persen.

Kelompok perikanan budidaya (NTPi) mengalami penurunan indeks nilai tukar petani sebesar 1,43 persen yakni dari 94,61 pada November 2023 menjadi 93,25 pada Desember 2023. Hal ini dipicu oleh turunnya (It) yang sebesar 0,61 persen, dimana indeks pada bulan November 2023



sebesar 106,50 turun menjadi 105,85 pada bulan Desember 2023. Penurunan (It) dipengaruhi oleh turunnya indeks subkelompok budidaya air laut sebesar 1,79 persen. Sebaliknya indeks harga yang dibayar petani (Ib) perikanan budidaya mengalami kenaikan indeks sebesar 0,83 persen, kenaikan ini dipengaruhi oleh indeks konsumsi rumahtangga dan Indeks BPPBM masing-masing naik sebesar 1,22 persen dan 0,15 persen.

5. Indeks Harga yang Dibyar Petani Menurut Kelompok Pengeluaran

Berdasarkan hasil pemantauan terhadap pengeluaran petani selama Desember 2023 dapat dirinci menurut indeks harga yang dibayar petani (Ib) baik untuk keperluan rumahtangga maupun keperluan proses produksi di sektor pertanian.

Berdasarkan 11 subkelompok konsumsi rumah tangga pada tahun dasar 2018, diketahui bahwa indeks harga yang dibayar petani (lb) mengalami kenaikan indeks sebesar 1,01 persen. Indeks konsumsi rumahtangga mengalami kenaikan sebesar 1,31 persen. Dimana pada bulan November 2023 indeks konsumsi rumahtangga sebesar 119,50 dan pada bulan Desember 2023 sebesar 121,07. Adapun subkelompok mengalami kenaikan perubahan indeks adalah subkelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 2,15 persen; subkelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar lainnya naik sebesar 0,09 persen; subkelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rumahtangga sebesar 0,03 persen; subkelompok kesehatan sebesar 0,04 persen; transportasi sebesar 0,01 persen; subkelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,06 persen; serta subkelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,21 persen. Sementara subkelompok rekreasi, olahraga dan budaya; subkelompok pendidikan; dan subkelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran tidak mengalami perumahan indeks (konstan). Lain halnya subkelompok pakaian dan alas kaki mengalami penurunan perubahan indeks sebesar 0,01 persen Indeks biaya produksi dan penambahan barang modal (BPPBM) mengalami kenaikan indeks sebesar 0,06 persen pada bulan Desember 2023. Hal ini disebabkan oleh naiknya subkelompok bibit sebesar 0,17 persen; transportasi dan komunikasi sebesar 0,26 persen; subkelompok barang modal sebesar 0,01 persen dan subkelompok upah buruh sebesar 0,13 persen. Adapun untuk subkelompok pupuk, pestisida, obat dan pakan; serta sewa dan



pengeluarannya mengalami penurunan indeks masing-masing sebesar 0,03 persen; 0,01 persen dan 0,06 persen.

Tabel 2.51
Indeks Harga yang Dibayar Petani Menurut Kelompok Pengeluaran,
November 2023 - Desember 2023

	Subsektor NOV 2023 DES 2023 Perubahan (%)						
		1	2	3	4		
1.	Kons	umsi Rumah Tangga	119,5	121,07	1,31		
	1.	Makanan, Minuman dan Tembakau	123,39	126,05	2,15		
	2.	Pakaian dan Alas Kaki	111,52	111,51	-0,01		
	3.	Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Lainnya	113,98	114,09	0,09		
	4.	Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	116,25	116,28	0,03		
	5.	Kesehatan	114,7	114,74	0,04		
	6.	Transportasi	115,48	115,49	0,01		
	7.	Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	97,03	97,1	0,06		
	8.	Rekreasi, Olahraga dan Budaya	109,46	109,45	0		
	9.	Pendidikan	100,65	100,65	0		
	10.	Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	117,93	117,93	0		
	11.	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	119,15	119,4	0,21		
2.	Biaya	Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM)	119,09	119,17	0,06		
	1.	Bibit	110,66	110,85	0,17		
	2.	Pupuk, Pestisida, Obat dan Pakan	121,97	121,93	-0,03		
	3.	Sewa dan Pengeluaran Lainnya	108,22	108,21	-0,01		
	4.	Transportasi dan Komunikasi	122,82	123,13	0,26		
	5.	Barang Modal	115,22	115,24	0,01		
	6.	Upah Buruh	119,6	119,75	0,13		
3.	Indel	ks yang Dibayar Petani (Ib)	119,2	120,4	1,01		

Sumber: BPS Sulawesi Tengah Dalam Angka 2024

6. Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP)

Nilai Tukar Usaha Rumahtangga Pertanian (NTUP) menunjukkan perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib), tanpa memperhitungkan pengeluaran untuk konsumsi rumahtangga. NTUP diharapkan lebih mencerminkan kemampuan daya tukar hasil produksi rumahtangga petani terhadap pengeluaran biaya selama proses produksi.

Nilai Tukar Usaha Rumahtangga Pertanian (NTUP) pada bulan Desember 2023 mengalami kenaikan indeks sebesar 3,19 persen yaitu dari 112,24 pada bulan November 2023 menjadi 115,82 pada bulan Desember 2023. Namun demikian, relatif lebih tingginya indeks NTUP dibandingkan indeks Nilai Tukar Petani (NTP) yang sebesar 114,63 mengindikasikan bahwa tingkat pengeluaran untuk biaya produksi dan penambahan barang modal, berperan cukup signifikan dalam menentukan besaran nilai tukar.



Kenaikan NTUP dipengaruhi oleh naiknya NTUP pada subsektor tanaman pangan sebesar 0,04 persen; subsektor hortikultura naik cukup signifikan sebesar 20,95 persen; dan subsektor tanaman perkebunan rakyat sebesar 3,29 persen. Pada bulan yang sama, NTUP tanpa perikanan sebesar 116,99 atau lebih tinggi dari NTUP secara gabungan. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor perikanan tidak memiliki daya ungkit terhadap capaian nilai tukar usaha rumahtangga pertanian.

Tabel 2.52
Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) Menurut Subsektor
dan Perkembangannya Nov 2023- Des 2023

	dan i erkembangannya NOV 2023- Des 2023						
Subsektor		NOV 2023	DES 2023	Perubahan (%)			
	1	2	3	4			
1.	Tanaman Pangan	96,99	97,04	0,04			
2.	Hortikultura	138,43	167,43	20,95			
3.	Tanaman Perkebunan Rakyat	119,91	123,85	3,29			
4.	Peternakan	106,8	106,41	-0,36			
5.	Perikanan	100,82	99,07	-1,74			
	a. Tangkap	100,63	98,8	-1,82			
	b. Budidaya	103,27	102,48	-0,76			
NTUP		112,24	115,82	3,19			
NTUP	Tanpa Perikanan	113,04	116,99	3,5			

Sumber: BPS Sulawesi Tengah Dalam Angka 2024

2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Pada Tahun 2023 telah ditetapkan Perda Provinsi Sulawesi Tengah No. 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023-2042. Selain itu beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah saat ini sedang melakukan peninjauan kembali terhadap Perda RTRW Kabupaten/Kota untuk dilakukan kesesuaian terhadap Perda RTRW Sulawesi Tengah No. 1 Tahun 2023 sebagaimana tabel dibawah ini.



Tabel 2.53 Progres RTRW Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	Status	Tahun Penyusunan	Target Penetapan	Keterangan
1	Kabupaen Sigi	Perda No. 1 Tahun 2021	2018		
2	Kota Palu	Perda No. 2 Tahun 2021	2018		
3	Kabupaten Banggai Laut	Penyusunan Revisi		2024	
4	Kabupaten Parigi Moutong	Perda No. 5 Tahun 2020	2018		
5	Kabupaten Morowali Utara	Pembahasan Gubernur		2024	
6	Kabupaten Tojo Una-Una	Melengkapi Persyaratan Linsek	2020	2024	
7	Kabupaten Banggai	Penyusunan Revisi		2024	
8	Kabupaten Buol	Melengkapi Persyaratan Linsek	2018	2024	
9	Kabupaten Poso	Pelaksanaan Rapat Linsek		2024	
10	Kabupaten Donggala	Perda No. 2 Tahun 2022	2018		
11	Kabupaten Banggai Kepulauan	Perda No. 6 Tahun 2023			

a. Struktur Ruang dan Pola Ruang dalam RTRW Provinsi Sulawesi Tengah 2023-2042

Pada tahun 2017 Pemerintah provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Bina Marga dan penataan ruang telah melakukan peninjauan kembali terhadap RTRW Provinsi Sulawesi Tengah, tahapannya salah satunya yaitu tahap Evaluasi yang dilakukan terhadap indikasi program dalam rencana tata ruang terhadap data pelaksanaan pemanfaatan ruang di lapangan dengan melihat kesesuaian antara pelaksanaan pemanfaatan ruang dengan target capaian dalam indikasi program. Evaluasi terhadap pelaksanaan pemanfaatan ruang ditujukan untuk menilai tingkat kesesuaian pelaksanaan pemanfaatan ruang terhadap RTRW Provinsi Sulawesi Tengah Dalam pemanfaatan ruang, simpangan- simpangan dapat terjadi apabila terdapat ketidaksesuaian antara pemanfaatan ruang atau program-program pembangunan yang dilakukan di lapangan dengan arahan dan muatan dalam RTRW Provinsi Sulawesi Tengah.



Tabel. 2.54 Matriks Realisasi Program Lima Tahunan RTRW Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023-2042 (Perwujudan Rencana Struktur Ruang)

				Jenis dan Be	esaran			
No.	Indikasi Program Lima Tahunan	Unit Realisasi Rencana (Luas/ Panjang/Jumla		Pemar	suaian nfaatan ang	Besaran Pelaksanaan Pemanfaatan (Tinggi/	Dampak Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang (Tinggi/	
		h/Volume/dll)	Realisasi	Realisasi	Sesuai	Tidak	(Tinggi/ Rendah)	Rendah)
			>50%	<50%		Sesuai		
		PERWUJ	UDAN RENC	ANA STRUKT	UR RUANG			
Α	Percepatan Pengembangan Kota- Kota Utama Kawasan Perbatasan							
	Pengembangan/ Peningkatan fungsi	50%		V	1		Rendah	Tinggi
	Pengembangan baru	33%		√	√		Rendah	Tinggi
	Revitalisasi kota-kota yang telah berfungsi	0,5		V	V		Rendah	Tinggi
В	Mendorong Pengembangan Kota- Kota Sentra Produksi yang Berbasis Otonomi Daerah	0,33		٨		V	Rendah	Tinggi
С	Revitalisasi dan Percepatan Pengembangan Kota- Kota Pusat Pertumbuhan					1		
	Pengembangan/ Peningkatan fungsi	33%		V	V		Rendah	Tinggi
	Pengembangan baru	33%		V	1		Rendah	Tinggi
	Revitalisasi kota-kota yang telah berfungsi	33%		V	V		Rendah	Tinggi
D	Pengendalian Kota-kota Berbasis Mitigasi Bencana							
	Rehabilitasi kota akibat bencana alam	0,5		V		V	Rendah	Tinggi
	Pengendalian perkembangan kota- kota berbasis Mitigasi Bencana	0,25	1		1	A	Tinggi	Tinggi
E	Perwujudan Sistem Transportasi							
	Pemantapan jaringan jalan Arteri Primer, Jaringan Lintas Trans Sulawesi Tengah, Jaringan lintas Barat	50%	V		V		Tinggi	Tinggi
	Pemantapan Pelabuhan Penyeberangan	50%	V		V		Tinggi	Tinggi
	Pembangunan Terusan Khatulistiwa	33%		V		1	Rendah	Rendah

				Jenis dan Be	esaran			
No.	Indikasi Program Lima Tahunan	Unit Realisasi Rencana (Luas/ Panjang/Jumla		Kesesuaian Pemanfaatan Ruang		Besaran Pelaksanaan Pemanfaatan (Tinggi/	Dampak Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang (Tinggi/	
		h/Volume/dll)	Realisasi	Realisasi	Sesuai	Tidak	(Tinggi/ Rendah)	Rendah)
			>50%	<50%		Sesuai		
	Pemantapan Pelabuhan Propinsi	100%	V	1	√		Tinggi	Tinggi
	Pemantapan Bandara Udara Pusat Penyebaran Skala Pelayanan Primer	100%	V		V		Tinggi	Tinggi
	Pemantapan Bandara Udara Pusat Penyebaran Skala Pelayanan Sekunder	100%	V		√		Tinggi	Tinggi
	Pemantapan Bandara Udara Pusat Penyebaran Skala Pelayanan Tersier	100%	V		1		Tinggi	Tinggi
F	Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya							
	Konservasi SDA, Pendayagunaan SDA, dan PengendalianDayaRusak Air (SDA)	33%	1		V	À	Tinggi	Rendah
	Perwujudan Jaringan Pipa Transmisi dan Distribusi Gas (Energi)Bumi	100%		V		V	Rendah	Tinggi
	Rehabilitasi Jaringan Terestrial (Komunikasi)	100%		√		√	Rendah	Rendah
	Pengembangan JaringanTerestrial (Komunikasi)	100%		V		V	Rendah	Rendah

Sumber : Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah, 2023.

Selanjutnya, matriks Realisasi Program Lima Tahunan Perda Provinsi Sulawesi Tengah tentang RTRW Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023-2042 (Perwujudan Rencana Pola Ruang), dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 2.55

Matriks Realisasi Program Lima Tahunan RTRW Provinsi Sulawesi
Tengah Tahun 2023-2042 (Perwujudan Rencana Pola Ruang)

		gair raman 202	(.	J J. J. J. G.				
	Indikasi Program Lima Tahunan		Dammak					
No.		Unit	Realisasi Rencana		Kesesuaian Pemanfaatan Ruang		Besaran Pelaksana	Dampak Pelaksanaa n Pemanfaata
		(Luas/ Panjang/Jumla h/Volume/dll)	Realisa si	Realisa si	Sesua i	Tidak	an (Tinggi/	n Ruang (Tinggi/ Rendah)
			>50%	<50%		Sesua i		
		PERWUJ	UDAN REN	ICANA PO	LA RUAN	G		
A	Percepatan Pengembangan Kota-Kota Utama Kawasan							



	I AHUN 202		Je	nis dan Be	saran			
No.	Indikasi Program	Unit		i Rencana	Keses Pemar	suaian nfaatan ang	Besaran Pelaksana	Dampak Pelaksanaa n Pemanfaata
NO.	Lima Tahunan	(Luas/ Panjang/Jumla h/Volume/dll)	Realisa si	Realisa si	Sesua i	Tidak	an Pemanfaat an (Tinggi/	n Ruang (Tinggi/
		ii/voidilie/dii/	>50%	<50%		Sesua i	Rendah)	Rendah)
	Pengembangan/ Peningkatan fungsi	50%		V	V		Rendah	Tinggi
Α	Perwujudan Kawasan Lindung							
	Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan Lindung Propinsi Suaka Alam Laut	33%		V		V	Rendah	Rendah
	Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan Lindung Propinsi Suaka Margasatwa	33%	V		V		Tinggi	Rendah
	Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan Lindung Propinsi	33%	V		V		Tinggi	Rendah
	Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan Lindung Propinsi Taman Nasional	33%	V		V		Tinggi	Rendah
	Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan Lindung Propinsi Taman Hutan Raya	33%	V		1		Tinggi	Rendah
	Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan Lindung Propinsi Taman Wisata Alam	33%	V		V		Tinggi	Rendah
	Pengembangan Pengelolaan Kawasan Lindung Propinsi Suaka Alam Laut	33%	V		V		Tinggi	Rendah
	Pengembangan Pengelolaan Kawasan Lindung Propinsi Suaka Margasatwa	33%	V		1		Tinggi	Rendah
	Pengembangan Pengelolaan Kawasan Lindung Propinsi Cagar	33%	V		V		Tinggi	Rendah
	Pengembangan Pengelolaan Kawasan Lindung Propinsi Taman Nasional	33%	V		V		Tinggi	Rendah



			Je	nis dan Be	saran			Dommols
No.	Indikasi Program	Unit	Realisasi	Rencana	Pemar	suaian nfaatan ang	Besaran Pelaksana	Dampak Pelaksanaa n Pemanfaata
NO.	Lima Tahunan	(Luas/ Panjang/Jumla	Realisa si	Realisa si	Sesua i	Tidak	an Pemanfaat	n Ruang (Tinggi/
		h/Volume/dll)	>50%	<50%		Sesua i	an (Tinggi/ Rendah)	Rendah)
	. Pengembangan Pengelolaan Kawasan Lindung Propinsi Taman Hutan Raya	33%	V		V		Tinggi	Rendah
	. Pengembangan Pengelolaan Kawasan Lindung Propinsi Taman WisataAlam	33%	V		V		Tinggi	Rendah
	. Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan Lindung (KawasanResapan	50%	V		V		Tinggi	Rendah
	Pengembangan Pengelolaan Kawasan Lindung	50%	V		√		Tinggi	Rendah
	. Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan	50%	1		1	1/2	Tinggi	Rendah
	. Pengembangan Pengelolaan Kawasan Taman	50%	V		1		Tinggi	Rendah
В	Perwujudan Pengembangan Kawasan Budi							
	Pengendalian Kawasan Andalan untuk Pertanian Pangan Abadi	50%		V		V	Rendah	Rendah
	. Pengembangan Kawasan Andalan untuk Pertanian	25%	V		1		Tinggi	Rendah
	. Rehabilitasi Kawasan Andalan untuk Perkebunan	50%	V		1		Tinggi	Rendah
	. Pengembangan Kawasan Andalan untuk Perkebunan	25%	V		√		Tinggi	Rendah
	. Rehabilitasi Kawasan Andalan untuk Pertambangan	50%		V		V	Rendah	Rendah
	. Pengembangan Kawasan Andalan untuk Pertambangan	25%	V		V		Tinggi	Rendah
	. Rehabilitasi Kawasan Andalan untuk industry pengolahan	50%		V		V	Rendah	Rendah

			Je	nis dan Be	saran			Damma'
No.	Indikasi Program Lima Tahunan	Unit (Luas/	Realisasi	Rencana	Pemar	suaian nfaatan ang	Besaran Pelaksana	Dampak Pelaksanaa n Pemanfaata
110.		Panjang/Jumla h/Volume/dll)	Realisa si	Realisa si	Sesua i	Tidak	an Pemanfaat	n Ruang (Tinggi/
			>50%	<50%		Sesua i	an (Tinggi/ Rendah)	Rendah)
	. Pengembangan Kawasan Andalan untuk industry pengolahan	25%		V		V	Rendah	Rendah
	Rehabilitasi Kawasan Andalan untuk Pariwisata	50%	1		V		Tinggi	Rendah
	Pengembangan Kawasan Andalan untuk Pariwisata	25%	V		V		Tinggi	Rendah
	Rehabilitasi Kawasan Andalan untuk Perikanan	50%	V		V		Tinggi	Rendah
	Pengembangan Kawasan Andalan untuk Perikanan	25%	V		V		Tinggi	Rendah
	Rehabilitasi Kawasan Andalan untuk Kelautan	50%	٧		1		Tinggi	Rendah
	Pengembangan Kawasan Andalan untuk Kelautan	25%	V		V		Tinggi	Rendah
	Rehabilitasi Kawasan Andalan untuk Kehutanan	50%	V		V		Tinggi	Rendah
	Pengembangan Kawasan Andalan Kehutanan	25%	V		1		Tinggi	Rendah

Sumber: Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulteng, 2023.

Tabel. 2.56

Matriks Realisasi Program Lima Tahunan RTRW Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2023-2042 (Perwujudan Rencana Strategis)

		Tallall Edeb 2		majada	- tolloai	ia otiati	9.0,	
			J	lenis dan E	Besaran			Domnak
No. I	Indikasi Program Lima	Unit (Luas/	Realisasi Rencana		Kesesuaian Pemanfaatan Ruang		Besaran Pelaksanaan	Dampak Pelaksanaa n Pemanfaata
140.	Tahunan	Panjang/Juml ah/Volume/dll	Realisa si	Realisa si	Sesua i	Tidak	Pemanfaata n (Tinggi/	n Ruang (Tinggi/ Rendah)
)	>50%	<50%		Sesua i	Rendah)	
		PERW	UJUDAN F	RENCANA	POLA RU	ANG		
A	Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan	50%		V	V		Rendah	Tinggi



	TAHUN ZUZ	J						
			J	lenis dan E	Besaran			_
No.	Indikasi Program Lima	Unit (Luas/	Realisasi	Rencana	Pemar	suaian nfaatan ang	Besaran Pelaksanaan	Dampak Pelaksanaa n Pemanfaata
140.	Tahunan	Panjang/Juml ah/Volume/dll	Realisa si	Realisa si	Sesua i	Tidak	Pemanfaata n (Tinggi/	n Ruang (Tinggi/
)	>50%	<50%		Sesua i	Rendah)	Rendah)
	Ekonomi							11.33
В	Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup	50%		V	٨		Rendah	Tinggi
С	Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya	50%		V	V		Rendah	Tinggi
D	Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pendayagunaan Sumberdaya alam dan Teknologi Tinggi	50%		V	٧		Rendah	Tinggi
Е	Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertahanan dan Keamanan	50%		٧	٧		Rendah	Tinggi
F	Pengembangan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pendayagunaan	50%		1	V		Rendah	Tinggi
	Penawaran Wilayah	33%	V	V			Tinggi	Tinggi
	Penawaran Wilayah	33%	V	V			Tinggi	Tinggi
	3. Pengembang	33%	1	V	1 - L		Tinggi	Tinggi
G	Pengembangan Kawasan Andalan Bahan Bakar Nabati Sumber: Dinas B	33%		V	i O It	V	Rendah	Rendah

Sumber: Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulteng, 2023.



b. Luas Wilayah/Kawasan Ekonomi Produktif

Dalam rangka meningkatkan ekonomi daerah Sulawesi Tengah, maka kawasan pertumbuhan ekonomi produktif terbagi atas lima Kawasan Strategis Nasional yang diakomodir dalam Rancangan RTRWP Sulawesi Tengah Tahun 2023-2042 yakni: (1) Kawasan Strategis Ekonomi (KSE); (2) Kawasan Kota Terpadu Mandiri; (3) Kawasan Cepat Tumbuh; (4) Kawasan Agrotourism; dan (5) Kawasan Perbatasan.

Tabel 2.57
Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Tengah

	Rawasan i ertumbunan Ekonon	
No.	Nama KSN	Nama Kabupaten/Kota
1.	Kawasan Strategis Ekonomi (KSE)	Kota Palu
	Palu Utara	
2.	Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM)	Buol, Morowali, Tojo Unauna,
	Air Terang, KTM Bungku, KTM	Parigi Moutong dan Poso
	Padauloyo, KTM Bahari Bolano	
	Lambunu dan KTM Talabosa	
3.	Kawasan Cepat Tumbuh	Kab. Parigi Moutong Kab. Poso
	Kaw. Parigi – Ampibabo dsk.,	Kab. Tojo Una - Una Kab. Parigi
	Kaw. Danau Poso dsk.,	MoutongKab. Donggala
	Kaw. Ampana dsk.,	Kab. Donggala
	Kaw. Moutong – Tomini dsk.,	
	Kaw. Damsol – Damsel dsk.,	
	Kaw. Lalundu dsk.	
4.	Kawasan Agrotourism	Kab. Parigi Moutong, Kabupaten
	Sausu – Manggalapi - Palolo dsk.	Poso dan Kabupaten Sigi
5.	Kawasan Perbatasan;	
		perbatasan kabupaten Poso
	Kawasan Tindantana	dengan kabupaten Luwu Utara
		Provinsi Sulawesi Selatan;
		perbatasan kabupaten Morowali
	Kawasan Teluk Matarape	dengan Provinsi Sulawesi
		Tenggara;
		perbatasan kabupaten
	Kawasan Surumana	Donggala dengan Provinsi
		Sulawesi Barat;
	Kawasan Umu	perbatasan kabupaten Buol
		dengan Provinsi Gorontalo;
	Kawasan Kepulauan Togian	perbatasan kabupaten Tojo Unauna dengan Provinsi
	Nawasan Kepulauan Togian	Gorontalo;
A S		perbatasan kabupaten Parigi-
	Kawasan Molosipat	Moutong dengan Provinsi
	Nawasan Molosipat	Gorontalo;
		perbatasan kabupaten Banggai
	Kawasan Pulau Sonit	Kepulauan dengan Provinsi
	Namadan i dida donit	Maluku Utara.
Sumbe	ı ⊧r: Rancangan Perda Provinsi Sulawesi Tengah te	

Sumber: Rancangan Perda Provinsi Sulawesi Tengah tentang RTRW Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023-2042



c. Perkembangan Infrastruktur Jalan

Peningkatan infrastruktur jalan menjadi sangat penting dalam menjaga urat nadi perekonomian. Hal ini tidak lepas dari perannya dalam mendukung pergerakan manusia dan berpengaruh pada kegiatan distribusi dan logistik yang bersentuhan langsung terhadap pergerakan inflasi.

Pembangunan dibidang infrastruktur jalan kewenangan Provinsi di Provinsi Sulawesi Tengah selama periode Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 berdasarkan kondisi jalan mengalami peningkatan. Panjang jalan Provinsi mencapai 1.643,74 km, sedangkan Panjang jalan kewenangan pusat sepanjang 2.373,40 km, serta kewenangan Kabupaten dan Kota sepanjang 12.890,60 km.

Hingga tahun 2023 kondisi jalan baik sepanjang 687,49 Km, sedang sepanjang 381,58 Km, sedangkan kondisi jalan rusak sepanjang 179,38 Km dan rusak berat sepanjang 395,29 Km.

Tabel 2.58
Panjang Jalan Menurut Kabupaten/Kota dan Kondisi Jalan di Provinsi Sulawesi Tengah (Km) Tahun 2023

di i Tovilisi Si	Kondisi Jalan							
		Kondisi	Jaian					
Kabupaten/Kota	Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat				
1	2	3	4	5				
Banggai Kepulauan	17,40	58,30	34,80	1,00				
Banggai	153,86	93,45	47,80	72,24				
Morowali	_	_	_	46,10				
Poso	111,38	91,67	52,00	44,10				
Donggala	5,00	7,30	1,50	0,30				
Tolitoli	75,05	14,25	2,10	34,40				
Buol	22,00	4,20	2,95	57,65				
Parigi Moutong	31,87	9,70	4,57	0,50				
Tojo Una-Una	18,45	13,26	14,2	58,80				
Sigi	125,51	59,51	12,06	44,80				
Banggai Laut	9,60	7,53	0,50	0,70				
Morowali Utara	88,49	16,35	6,40	34,70				
Palu	28,88	6,06	0,50	_				
Sulawesi Tengah	687,49	381,58	179,38	395,29				

Sumber: BPS Sulteng Dalam Angka 2024

d. Infrastruktur Daerah Irigasi

Kondisi dan perkembangan daerah irigasi di Provinsi Sulawesi Tengah hingga tahun 2023 sebagai berikut.

 Daerah irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah pusat sebanyak 6 (enam) daerah irigasi dengan luas potensial 30.564,88 Ha dan luas fungsional 20.260,15 Ha,



(2) Daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi pada Tahun 2023 sebanyak 30 (tiga puluh) daerah irigasi dengan luas potensial 47.640 Ha dan luas fungsional 33.022,81 Ha.

Tabel 2.59
Daerah Irigasi, Luas Areal Sawah Potensial dan Fungsional yang Menjadi
Kewenangan dan tanggung Jawab Pusat (ha), Tahun 2023

Kabupaten/Kota	Jumlah Daerah Irigasi	Luas Potensial (ha)	Luas Fungsional (ha)
Banggai Kepulauan		_	_
Banggai	3	9.550,47	7.164,99
Morowali	ı	_	_
Poso	_	_	_
Donggala	_	_	_
Tolitoli	_	_	_
Buol	_	_	_
Parigi Moutong	2	12.833,76	7.820,16
Tojo Una-Una	_	_	_
Sigi	1	8.180,65	5.275
Banggai Laut	_	_	_
Morowali Utara	_	_	_
Palu		_	_
Sulawesi Tengah	6	30.564,88	20.260,15

Sumber: BPS, Sulteng Dalam Angka 2024.

Selanjutnya, Daerah Irigasi, Luas Areal Potensial dan Fungsional yang Menjadi Kewenangan dan tanggung Jawab Provinsi (ha) Tahun 2023, dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2.60
Daerah Irigasi, Luas Areal Sawah Potensial dan Fungsional yang Menjadi Kewenangan dan tanggung Jawab Provinsi (ha), Tahun 2023

Kabupaten/Kota	Jumlah Daerah Irigasi	Luas Potensial (ha)	Luas Fungsion al (ha)
l l	2	3	4
Banggai Kepulauan Banggai	– 8	– 13.316	- 8.230
Morowali	2	3.893	3.986
Poso	4	5.628	3.669
Donggala	1	1.625	923
Tolitoli	3	4.348	2.948
Buol	1	1.028	534
Parigi Moutong	8	14.923	11.616
Tojo Una–Una	_	_	_
Sigi	2	1.669	494
Banggai Laut	_	_	_
Morowali Utara	1	1.210	622
Palu	_	_	_
Sulawesi Tengah	30	47.640	33.022

Sumber: BPS, Sulteng Dalam Angka 2024.

e. Infrastruktur Kelistrikan

Kota Palu adalah titik simpul Pembangunan Sistim Kelistrikan Sulawesi dan merupakan Simpul Jaringan Kelistrikan dari Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat hingga Sulawesi Selatan.

Pada tahun 2023 Kondisi ketenagalistrikan Sulawesi Tengah yakni daya terpasang sebesar 1.031.574.761 KW, dengan jumlah produksi sebesar 263.022.855 KWh, dan terjual sebesar 1.559.097.145 KWh.

f. Infrastruktur Perhubungan

Sebagai sarana jasa transportasi, kondisi ruas jalan memiliki pengaruh secara signifikan terhadap tingkat kelancaran aktivitas perekonomian antarwilayah. Jumlah perusahaan jasa angkutan dan armada memberikan gambaran umum pangsa pasar layanan jasa transportasi selama setahun terakhir.

Jumlah pelayanan angkutan darat yang beroperasi di Sulawesi Tengah pada Tahun 2022, dengan jumlah Perusahaan Angkutan Bus sebanyak 33 perusahaan, sedangkan Bus Umum sebanyak 210 unit dengan kapasitas penunpang sebanyak 5.012 penumpang terdiri dari armada Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) sebanyak 440 unit, Armada Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) sebanyak 110 unit, Armada Antar Jemput Dalam Provinsi sebanyak 82 Unit,



Armada Antar Jemput Antar Provinsi sebanyak 8 unit, Angkutan Kota sebanyak 454 unit, dan taksi (argo meter) sebanyak 81 unit.

Berikut disajikan kondisi jaringan jalan strategis nasional di Provinsi Sulawesi Tengah.

Tabel 2.61
Jaringan Jalan Strategis Nasional Di Sulawesi Tengah

NO	NOMOR RUAS	NAMA RUAS JALAN STRATEGIS NASIONAL (TERSAMBUNG)	PANJANG (KM)	KEPUTUSAN PENETAPAN
1.	018 19 K	Jl. Hasanuddin II (Palu)	0,850	Keputusan
2.	019 16 K	Jl. Malonda II (Buluri-Watusampu) Palu.	5,640	Menteri Pekerjaan
3.	019 17 K	Jl. Sungai Gumbasa (Palu)	0,230	Umum RI
4.	019 18 K	Jl. Danau Poso (Palu)	0,400	No.567/KPTS/
5.	019 19 K	Jl. Sungai Dolago (Palu)	0,200	M/2001,
6.	019 1A K	Jl. Sis Aljufri I (Palu)	0,350	Tanggal 10
7.	019 14 K	Jl. Yos Sudarso (Poso)	0,650	November
8.	043	Ruas Luwuk-Batui (Banggai)	42,114	2010 Perihal
9.	043 11 K	Jl. Samratulangi (Luwuk/Banggai)	0,321	Penetapan
10.	043 12 K	Jl. A. Yani (Luwuk/Banggai)	1,492	Ruas-Jalan Strategis
11.	043 13 K	Jl. Urif Sumoharjo (Luwuk/Banggai)	0,886	Nasional.
12.	043 14 K	Jl. Sidirman (Luwuk/Banggai)	0,976	
13.	043 15 K	Jl. M. Hatta (Luwuk/Banggai)	10,553	
14.	044	Ruas Batui-Toili (Banggai)	40,955	
15.	045	Ruas Toili-Rata (Banggai)	53,346	
16.	046	Ruas Rata-Baturube (Morowali)	57	
17.	063	Ruas Mepanga-Pasir Putih (Parigi Moutong)	23	
18.	064	Ruas Pasir Putih-Basi (Tolitoli)	32,50	
19.	065	Ruas Tomata-Pape (Morwali)	64	
20.	066	Ruas Salakan-Sambiut (Banggai Kepulauan)	24	

Sumber: RTRWP Sulawesi Tengah Tahun 2013-2033

Selanjutnya, Jaringan Prasarana Transportasi (Terminal Penumpang) di Sulawesi Tengah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.62
Jaringan Prasarana Transportasi (Terminal Penumpang)
di Provinsi Sulawesi Tengah

No.	Nama Terminal Penumpang	Nama Kabupaten/Kota	Luas (m²)
6.7	Terminal Penumpang Tipe A		
1.	Mamboro (Eksisting)	Palu	19.174
2.	Sintuwu (Eksisting)	Poso	3.115
3.	Toboli (Eksisting)	Parigi Moutong	33.800
	Terminal Penumpang Tipe B		
1.	Tentena (Eksisting)	Poso	
2.	Pasar Sentral (Eksisting)	Poso	
3.	Biak (Eksisting)	Banggai	
4.	Lelean Nono (Baru)	Tolitoli	
5.	Mensung	Parigi Moutong	

Sumber: Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.



Selanjutnya untuk Jaringan Prasarana Jembatan Timbang Di Sulawesi Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.63
Jaringan Prasarana Jembatan Timbang Di Sulawesi Tengah

No.	Nama Jembatan Timbang	Nama Kabupaten/Kota	Luas(m)
1.	Toboli	Parigi Moutong	60 m x 40 m
2.	Kayu Malue	Palu	64 m x 56 m
3.	Mayoa	Poso	60 m x 60 m
4.	Moutong	Parigi Moutong	

Sumber: Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Selanjutnya untuk Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Di Sulawesi Tengah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.64
Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Di Sulawesi Tengah

No.	Lokasi Pengujian	Nama Kabupaten/ Kota	Merk / Tahun Operasi	Kapasitas	Kondisi
1.	Lolu	Kota Palu	Kubota/1979	10 Ton	Rusak
2.	Poso	Poso	Kubota/2008	10 Ton	Baik

Sumber: Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Untuk mengantisipasi pergerakan barang dan manusia dikembangkan jaringan moda transportasi angkutan penyeberangan melalui program angkutan sungai, danau, dan perairan (ASDP) seperti tabel berikut.

Tabel 2.65
Jaringan Penyeberangan Lintas Provinsi Di Sulawesi Tengah

No.	Nama Pelabuhan	Nama Kabupaten/ Kota	Nama Lintas Penyeberangan
1.	Pagimana	Banggai	Pagimana-Gorontalo (Prov. Sulteng-Gorontalo)
2.	Luwuk	Banggai	Luwuk-Salakan
3.	Таіра	Palu	Taipa-Balikpapan
4.	Ampana	Tojo Unauna	(Prov. Sulteng - Kaltim) Ampana-Wakai-Gorontalo
5.	Tolitoli	Tolitoli	(Prov. Sulteng-Gorontalo) Tolitoli-Tarakan (Prov. Sulteng - Kaltim)
6.	Banggai	Banggai Kepulauan	Banggai-Luwuk-Banggai- Boniton-Banggai-Bobong



No.	Nama Pelabuhan	Nama Kabupaten/ Kota	Nama Lintas Penyeberangan
7.	Toboli	Parigi Moutong	Dolong-Uwebone-Marissa- Parigi-Marissa-Dolong (Prov. Sulteng-Gorontalo)

Sumber: Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sulteng, 2022.

Bidang perhubungan laut, perkembangan pelayanan transportasi laut yang mencakup penyediaan fasilitas pelabuhan, keselamatan pelayaran dan pengembangan armada pelayaran nasional baik pelayaran nusantara, pelayaran rakyat, pelayaran perintis, pelayaran khusus dan pelayaran samudra, secara kontinu ditingkatkan. Dalam rangka meningkatkan dan menunjang kelancaran pelayaran angkutan laut di Provinsi Sulawesi Tengah telah tersedia 1 (satu) pelabuhan utama (internasional) yakni Pelabuhan Pantoloan, 14 (empat belas) pelabuhan pengumpul (nasional), yakni Luwuk, Pagimana, Bunta, Tangkiang, Banggai, Kolonodale, Leok, Tolitoli, Donggala, Wani, Ogoamas, Parigi, Poso, Ampana; dan 12 (dua belas) pelabuhan pengumpan (regional), yakni Sabang, Ogotua, Kumaligon, Paleleh, Wakai, Salakan, Menui, Sambalagi, Malala, Bungku, Dolong/Popolii, Moutong; serta 14 (empat belas) pelabuhan terminal khusus (tarsus).

Tabel 2.66
Sarana Pelabuhan Laut Utama/Nasional di Sulawesi Tengah

No.	Nama Pelabuhan	Nama Kabupaten/ Kota	Kapasitas Dermaga	Luas Dermaga
	Pelabuhan Utama			
1.	(international) Pantoloan	Palu	4.000 DWT	250 m x 13 m
	Pelabuhan		70 W	
1	Pengumpul	Banggai	1.000 DWT	150mx12m
2	(nasional)	Banggai	1.000 DWT	70 mx8 m
3	Luwuk	Banggai	1.000 DWT	70 m x8 m
4	Pagimana	Banggai	1.000 DWT	88mx12m
5	Bunta	Banggai	10.000 DWT	150mx8m
6	Tangkiang	Kepulauan		
7	Banggai	Morowali	1.000 DWT	50mx8m
8	Kolonodale	Buol	1.000 DWT	81 mx8 m
9	Leok	Tolitoli	1.000 DWT	70 mx8 m
10	Tolitoli	Donggala	500 DWT	46mx8m
11	Donggala	Donggala	1.000 DWT	70mx8m
12	Wani	Donggala	400 DWT	35 m x 8 m
13	Ogoamas	Parigi Moutong	1.000 DWT	100mx 9m
14	Parigi	Poso	1.000 DWT	70mx 8m
	Poso	Tojo Una-Una		
	Ampana	Daerah Provinsi Sultana da		

Sumber: Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sulteng dan RTRWP Sulteng Tahun 2013-2033



Selanjutnya, Bandar Udara Mutiara Sis Aljufri Palu dengan status Bandar Udara pengumpul sekunder sebagai pintu gerbang utama melalui udara semakin dituntut dalam peningkatan aktifitas pelayanan penerbangan guna mengantisipasi kesiapan daerah dalam mendukung konektivitas wilayah dan IKN Nusantara. Pemerintah daerah saat ini telah menyiapkan pengembangan Bandara Mutiara Sis Aljufri Palu agar dapat didarati pesawat yang berbadan besar, tidak terbatas hanya mampu melayani pesawat jenis Boeing 737-900 ER dan Boeing 737-800 NG. Selain itu, di beberapa kabupaten terdapat pula Bandar Udarapengumpul tersieryakni Bandar Udara Bubung Syukuran Aminudin Amir di Kabupaten Banggai yang dapat melayani jenis pesawat Boeing 737/200, Cassa 212, ATR 500/600, Dornier 32, Bandar Udara Lalos Sultan Bantilan di Kabupaten Tolitoli. Untuk melayani penerbangan pengumpan Bandar Udara Pogogul di Kabupaten Buol yang baru mampu didarati jenis pesawat Cassa 212 dan Dornier 32 serta Bandar Udara Kasiguncu di Kabupaten Poso yang sudah mampu didarati oleh jenis pesawat N 219 dan ATR 500/600. Selain itu di Sulawesi Tengah sedang dilakukan pembangunan 2 (dua) Bandar Udara yaitu Bandar Udara Ampana di Kabupaten Tojo Una-Una, Sedangkan Bandar Udara Bungku di Kabupaten Morowali saat ini terkendala dengan penyelesaian lahan untuk pembangunannya. Sehingga fasilitas transportasi udara yang ada di Sulawesi Tengah hingga Tahun 2013 berjumlah 7 (tujuh) bandar udara, selain itu juga diupayakan studi kelayakan untuk perencanaan pembangunan Bandar Udara di Kabupaten Banggai Laut.

Tabel 2.67
Sarana Bandar Udara Menurut Jenisnya Di Sulawesi Tengah

Nama Bandara	Nama Kabupaten/ Kota	Dimensi Landasan Pacu	Maksimal Pesawat
Pengumpul Sekunder		F-14 /F12 -	
Mutiara Sis Aljufri	Palu	2.250 m x 45	B – 737
		m	
Pengumpul Tersier		//	
Bubung Syukuran	Banggai	1.850 m x 30	B - 737.200
Aminuddin Amir	Tolitoli	m	C - 212
Lalos Sultan Bantilan		1.400 m x 30	
		m	
<u>Pengumpan</u>			
Pogogul	Buol	1.373 m x 30	C - 212
Kasiguncu	Poso	m	D - 900
Sedang dibangun		1.620 m x 30	
Ampana	Tojo Unauna	m	
Umbele	Morowali		
<u>Missioner</u>			
Gintu (operasional)	Poso		Cesna
	Pengumpul Sekunder Mutiara Sis Aljufri Pengumpul Tersier Bubung Syukuran Aminuddin Amir Lalos Sultan Bantilan Pengumpan Pogogul Kasiguncu Sedang dibangun Ampana Umbele Missioner	Nama Bandara Pengumpul Sekunder Mutiara Sis Aljufri Pengumpul Tersier Bubung Syukuran Aminuddin Amir Lalos Sultan Bantilan Pengumpan Pogogul Kasiguncu Sedang dibangun Ampana Umbele Missioner Kabupaten/ Kalaupaten/ Banggai Tolitoli Buol Poso Tojo Unauna Morowali	Nama BandaraKabupaten/ KotaLandasan PacuPengumpul Sekunder Mutiara Sis AljufriPalu2.250 m x 45 mPengumpul Tersier Bubung Syukuran Aminuddin Amir Lalos Sultan BantilanBanggai Tolitoli1.850 m x 30 mPengumpan Pogogul Kasiguncu Sedang dibangun Ampana Umbele MissionerBuol Poso Morowali1.373 m x 30 mTojo Unauna MorowaliTojo Unauna Morowali



No.	Nama Bandara	Nama Kabupaten/ Kota	Dimensi Landasan Pacu	Maksimal Pesawat
2.	Tentena (operasional)	Poso		Cesna
	Bandara yang			
1.	<u>direncanakan</u>	Banggai Laut		
	Banggai			

Sumber: Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sulteng, 2022

2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

a. Jumlah Investor dan Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Selain berperan sebagai penyedia sumber pembiayaan pembangunan daerah, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) juga berperan sebagai aktor/pelaku penting pembangunan daerah.

Perkembangan Nilai Investasi di Sulawesi Tengah pada tahun 2022 tercapai sejumlah Rp.111.182.495.630.000,-. Pada Tahun 2022 Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) mencapai 2.910 investor yang ditargetkan hanya sejumlah 403 investor, seperti pada tabel berikut.

Tabel 2.68
Perkembangan Indikator Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2022

guit, remain = t = =		
Indikator	capaian	
Jumlah Investor berskala nasional (PMDN/PMA	2.910	
Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	111.182.495.630.000	
Indeks Kepuasan Masyarakat	98%	

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulteng, 2023.



2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

2.2.1 Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 11.282.357.443.710,00,- dengan komposisi belanja yang terdiri dari Pendapatan Daerah sebesar Rp.4.872.033.718.531.00,-, Belanja Daerah sebesar Rp.5.641.178.721.855.00 dan Pembiayaan Daerah Sebesar Rp.769.145.003.324.00. Jumlah alokasi anggaran Urusan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebesar Rp.3.066.156.384.744.00,- atau sebesar 27,18, Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebesar Rp. 378.878.374.182.00,- atau sebesar 3,36 persen. Urusan Pilihan sebesar Rp.589.757.303.901.00-, atau sebesar 5,23 persen. Urusan Pendukung sebesar Rp. 429.174.318.983.00,- atau sebesar 3,80 persen. Penunjang Urusan Pemerintahan Provinsi sebesar Rp.6.723.792.891.384.00,- atau sebesar 59,60 persen. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Provinsi sebesar Rp.29.879.347.294.00 atau sebesar 0,26 persen dan Unsur Pemerintahan Umum sebesar Rp. 64.718.823.222.00 atau sebesar 0,57 persen. Hal ini secara rinci dapat dilihat pada Gambar berikut.

Tabel 2.69
Realisasi APBD Per Urusan/OPD
Provinsi Sulawesi Tengah TA. 2023

	URAIAN	PAGU	REALISASI	SISA/LEBIH	%
Α	PENDAPATAN DAERAH	4.872.033.718.531,00	5.078.850.918.733,84	206.817.200.202,84	104,24
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	224.586.642.976,00	200.462.672.934,60	24.123.970.041,40	89,26
	PENDIDIKAN	9.012.000,00	221.769.786,00	-212.757.786,00	2460,83
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	9.012.000,00	221.769.786,00	-212.757.786,00	2460,83
	KESEHATAN	222.406.830.976,00	197.038.571.540,60	25.368.259.435,40	88,59
	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah	222.406.830.976,00	197.038.571.540,60	25.368.259.435,40	88,59
	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2.121.360.000,00	3.152.891.608,00	-1.031.531.608,00	148,63
	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah	2.100.000.000,00	3.121.868.608,00	-1.021.868.608,00	148,66
	Dinas Cipta Karya dan Sumberdaya Air	21.360.000,00	31.023.000,00	-9.663.000,00	145,24
	SOSIAL	49.440.000,00	49.440.000,00	0,00	100,00
	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah	49.440.000,00	49.440.000,00	0,00	100,00
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.613.462.018,00	1.377.371.281,00	236.090.737,00	85,37
	TENAGA KERJA Dinas Tenaga Kerja dan	140.000.000,00	116.080.000,00	23.920.000,00	82,91
	Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah	140.000.000,00	116.080.000,00	23.920.000,00	82,91

URAIAN	PAGU	REALISASI	SISA/LEBIH	%
PANGAN	14.200.000,00	14.250.000,00	-50.000,00	100,3
Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah	14.200.000,00	14.250.000,00	-50.000,00	100,3
LINGKUNGAN HIDUP	44.250.000,00	281.346.508,00	-237.096.508,00	635,8
Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah	44.250.000,00	281.346.508,00	-237.096.508,00	635,8
PERHUBUNGAN	635.626.700,00	712.402.455,00	-76.775.755,00	112,0
Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah	635.626.700,00	712.402.455,00	-76.775.755,00	112,0
KOMUNIKASI & INFORMATIKA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,0
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,0
KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	31.500.000,00	14.250.000,00	17.250.000,00	45,2
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah	31.500.000,00	14.250.000,00	17.250.000,00	45,2
PENANAMAN MODAL	36.035.318,00	39.035.318,00	-3.000.000,00	108,3
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah	36.035.318,00	39.035.318,00	-3.000.000,00	108,3
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	705.850.000,00	197.700.000,00	508.150.000,00	28,0
Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sulawesi Tengah	705.850.000,00	197.700.000,00	508.150.000,00	28,0
PERPUSTAKAAN	5.000.000,00	2.307.000,00	2.693.000,00	46,
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah	5.000.000,00	2.307.000,00	2.693.000,00	46,
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	17.669.480.000,00	18.215.154.390,00	-545.674.390,00	103,
KELAUTAN DAN PERIKANAN	14.788.400.000,00	15.160.212.850,00	-371.812.850,00	102,
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah	14.788.400.000,00	15.160.212.850,00	-371.812.850,00	102,
PARIWISATA	75.000.000,00	160.916.019,00	-85.916.019,00	214,
Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah	75.000.000,00	160.916.019,00	-85.916.019,00	214,
PERTANIAN	2.158.500.000,00	2.225.387.691,00	-66.887.691,00	103,
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah	1.208.500.000,00	1.461.205.191,00	-252.705.191,00	120,
Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah	950.000.000,00	764.182.500,00	185.817.500,00	80,
KEHUTANAN	379.580.000,00	265.076.400,00	114.503.600,00	69,
Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah	379.580.000,00	265.076.400,00	114.503.600,00	69,
PERINDUSTRIAN	268.000.000,00	403.561.430,00	-135.561.430,00	150,
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah	268.000.000,00	403.561.430,00	-135.561.430,00	150,
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	83.103.200,00	178.475.380,00	-95.372.180,00	214,
SEKRETARIAT DAERAH	83.103.200,00	178.475.380,00	-95.372.180,00	214,
Sekretariat Daerah Sulawesi Tengah	83.103.200,00	178.475.380,00	-95.372.180,00	214,
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	4.628.081.030.337,00	4.858.617.244.748,24	- 230.536.214.411,24	104,
KEUANGAN	4.622.154.530.337,00	4.854.453.881.558,24	- 232.299.351.221,24	105,
Badan Pendapatan Daerah Provinsi	1.356.411.000.000,00	1.413.280.142.850,10	-56.869.142.850,10	104,
Sulawesi Tengah			_	405
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi	3.265.743.530.337,00	3.441.173.738.708,14	175.430.208.371,14	105,
Badan Pengelolaan Keuangan dan	3.265.743.530.337,00 0,00	3.441.173.738.708,14 2.163.190,00	175.430.208.371,14 -2.163.190,00	105,

	URAIAN	PAGU	REALISASI	SISA/LEBIH	%
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	5.852.000.000,00	4.108.400.000,00	1.743.600.000,00	70,21
	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	5.852.000.000,00	4.108.400.000,00	1.743.600.000,00	70,21
	PENGHÜBUNG	74.500.000,00	52.800.000,00	21.700.000,00	70,87
	Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Tengah	74.500.000,00	52.800.000,00	21.700.000,00	70,87
3	BELANJA DAERAH	5.641.178.721.855,00	5.026.087.794.088,43	615.090.927.766,57	89,10
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.841.569.741.768,00	2.576.361.100.184,82	265.208.641.583,18	90,67
	PENDIDIKAN	1.153.006.417.623,00	1.056.782.642.064,00	96.223.775.559,00	91,65
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	1.153.006.417.623,00	1.056.782.642.064,00	96.223.775.559,00	91,65
	KESEHATAN	659.425.822.446,00	571.800.619.372,32	87.625.203.073,68	86,71
	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah	659.425.822.446,00	571.800.619.372,32	87.625.203.073,68	86,71
	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	761.407.126.203,00	690.666.518.726,90	70.740.607.476,10	90,71
	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah	346.986.480.938,00	330.403.477.977,79	16.583.002.960,21	95,22
	Dinas Cipta Karya dan Sumberdaya Air	414.420.645.265,00	360.263.040.749,11	54.157.604.515,89	86,93
	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	148.875.282.348,00	145.764.950.965,36	3.110.331.382,64	97,91
	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah KETENTERAMAN, KETERTIBAN	148.875.282.348,00	145.764.950.965,36	3.110.331.382,64	97,91
	UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	52.048.018.164,00	47.588.924.795,00	4.459.093.369,00	91,43
	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah	16.689.054.176,00	14.633.873.457,00	2.055.180.719,00	87,69
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Tengah	35.358.963.988,00	32.955.051.338,00	2.403.912.650,00	93,20
	SOSIAL	66.807.074.984,00	63.757.444.261,24	3.049.630.722,76	95,44
	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah	66.807.074.984,00	63.757.444.261,24	3.049.630.722,76	95,44
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	377.264.912.164,00	333.965.511.424,50	43.299.400.739,50	88,52
	TENAGA KERJA	72.011.767.297,00	59.661.928.864,00	12.349.838.433,00	82,85
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah	72.011.767.297,00	59.661.928.864,00	12.349.838.433,00	82,85
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	24.960.768.807,00	23.760.046.465,00	1.200.722.342,00	95,19
	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah	24.960.768.807,00	23.760.046.465,00	1.200.722.342,00	95,19
	PANGAN	39.663.783.466,00	29.028.600.321,50	10.635.183.144,50	73,19
	Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah	39.663.783.466,00	29.028.600.321,50	10.635.183.144,50	73,19
	LINGKUNGAN HIDUP	14.027.450.067,00	12.252.674.836,00	1.774.775.231,00	87,35
	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah	14.027.450.067,00	12.252.674.836,00	1.774.775.231,00	87,35
	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	13.279.729.350,00	12.662.645.857,00	617.083.493,00	95,3
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah	13.279.729.350,00	12.662.645.857,00	617.083.493,00	95,3
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	30.707.729.396,00	27.382.143.191,00	3.325.586.205,00	89,1
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah	30.707.729.396,00	27.382.143.191,00	3.325.586.205,00	89,1
	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	18.720.642.652,00	17.693.374.511,00	1.027.268.141,00	94,5

URAIAN	PAGU	REALISASI	SISA/LEBIH	%
Dinas Pengendalian Penduduk dan				
Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah	18.720.642.652,00	17.693.374.511,00	1.027.268.141,00	94,51
PERHUBUNGAN	26.287.721.689,00	23.661.136.069,00	2.626.585.620,00	90,01
Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah	26.287.721.689,00	23.661.136.069,00	2.626.585.620,00	90,01
KOMUNIKASI & INFORMATIKA	25.061.267.300,00	23.822.688.177,00	1.238.579.123,00	95,06
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah	25.061.267.300,00	23.822.688.177,00	1.238.579.123,00	95,06
KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	18.099.366.791,00	16.506.181.961,00	1.593.184.830,00	91,20
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah	18.099.366.791,00	16.506.181.961,00	1.593.184.830,00	91,20
PENANAMAN MODAL	19.025.363.737,00	17.555.944.388,00	1.469.419.349,00	92,28
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah	19.025.363.737,00	17.555.944.388,00	1.469.419.349,00	92,28
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	41.142.297.010,00	38.269.895.895,00	2.872.401.115,00	93,02
Dinas Pemuda dan Olah Raga	41.142.297.010,00	38.269.895.895,00	2.872.401.115,00	93,02
Provinsi Sulawesi Tengah KEBUDAYAAN	11.741.784.291,00	11.453.407.441,00	288.376.850,00	97,54
Dinas Kebudayaan Daerah Provinsi	11.741.784.291,00	11.453.407.441,00	288.376.850,00	97,54
Sulawesi tengah PERPUSTAKAAN	22.535.240.311,00	20.254.843.448,00	2.280.396.863,00	89,88
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah	22.535.240.311,00	20.254.843.448,00	2.280.396.863,00	89,88
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	572.087.823.901,00	528.961.732.495,68	43.126.091.405,32	92,46
KELAUTAN DAN PERIKANAN	98.408.510.938,00	91.520.867.253,00	6.887.643.685,00	93,00
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah	98.408.510.938,00	91.520.867.253,00	6.887.643.685,00	93,00
PARIWISATA	19.715.394.003,00	17.711.985.833,00	2.003.408.170,00	89,84
Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah	19.715.394.003,00	17.711.985.833,00	2.003.408.170,00	89,84
PERTANIAN	307.163.885.872,00	282.323.751.411,57	24.840.134.460,43	91,91
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah	175.372.661.974,00	161.636.089.619,36	13.736.572.354,64	92,17
Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah	131.791.223.898,00	120.687.661.792,21	11.103.562.105,79	91,57
KEHUTANAN	80.295.543.459,00	74.000.893.195,00	6.294.650.264,00	92,16
Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah	80.295.543.459,00	74.000.893.195,00	6.294.650.264,00	92,16
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	34.385.372.963,00	33.074.793.262,11	1.310.579.700,89	96,19
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah	34.385.372.963,00	33.074.793.262,11	1.310.579.700,89	96,19
PERINDUSTRIAN	32.119.116.666,00	30.329.441.541,00	1.789.675.125,00	94,43
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah	32.119.116.666,00	30.329.441.541,00	1.789.675.125,00	94,43
UNSUR PENDUKUNG URUSAN	429.091.215.783,00	394.123.350.038,55	34.967.865.744,45	91,8
PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH Sekretariat Daerah Sulawesi Tengah	249.348.791.156,00 249.348.791.156,00	229.394.583.249,55 229.394.583.249,55	19.954.207.906,45 19.954.207.906,45	92,0 92,0
SEKRETARIAT DPRD	179.742.424.627,00	164.728.766.789,00	15.013.657.838,00	91,6
Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah	179.742.424.627,00	164.728.766.789,00	15.013.657.838,00	91,6
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1.326.566.857.723,00	1.101.609.869.728,88	224.956.987.994,12	83,0
PERENCANAAN Badan Perencanaan Pembangunan	45.011.034.863,00	42.753.460.902,00	2.257.573.961,00	94,9
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	45.011.034.863,00	42.753.460.902,00	2.257.573.961,00	94,98
KEUANGAN	1.191.547.677.217,00	977.412.702.258,85	214.134.974.958,15	82,03
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	106.045.851.070,00	103.012.130.230,85	3.033.720.839,15	97,14

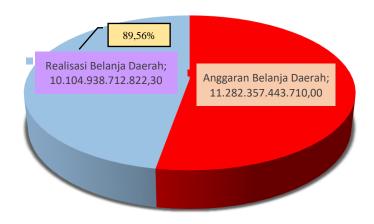


	URAIAN	PAGU	REALISASI	SISA/LEBIH	%
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	1.085.501.826.147,00	874.400.572.028,00	211.101.254.119,00	80,55
	KEPEGAWAIAN	20.912.631.329,00	19.130.029.476,00	1.782.601.853,00	91,48
	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	20.912.631.329,00	19.130.029.476,00	1.782.601.853,00	91,48
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	28.629.825.945,00	26.061.901.137,03	2.567.924.807,97	91,03
	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	28.629.825.945,00	26.061.901.137,03	2.567.924.807,97	91,03
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	18.245.732.380,00	15.948.374.472,00	2.297.357.908,00	87,41
	Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	18.245.732.380,00	15.948.374.472,00	2.297.357.908,00	87,41
	PENGHUBUNG	22.219.955.989,00	20.303.401.483,00	1.916.554.506,00	91,37
	Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Tengah	22.219.955.989,00	20.303.401.483,00	1.916.554.506,00	91,37
	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	29.879.347.294,00	28.181.818.660,00	1.697.528.634,00	94,32
	INSPEKTORAT	29.879.347.294,00	28.181.818.660,00	1.697.528.634,00	94,32
	Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	29.879.347.294,00	28.181.818.660,00	1.697.528.634,00	94,32
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	64.718.823.222,00	62.884.411.556,00	1.834.411.666,00	97,17
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	64.718.823.222,00	62.884.411.556,00	1.834.411.666,00	97,17
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	64.718.823.222,00	62.884.411.556,00	1.834.411.666,00	97,17
С	PEMBIAYAAN DAERAH	769.145.003.324,00	769.144.909.470,92	93.853,08	100,00
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	769.145.003.324,00	769.144.909.470,92	93.853,08	100,00
	KEUANGAN	769.145.003.324,00	769.144.909.470,92	93.853,08	100,00
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	769.145.003.324,00	769.144.909.470,92	93.853,08	100,00

Sumber: Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, 2023

Ditinjau dari kinerja yang dicapai dari hasil pelaksanaan RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023, Tingkat capaian realisasi anggaran program/kegiatan mencapai 89,56 Persen (Tinggi) atau setara dengan *Rp.10.104.938.712.822,30*. Faktor pendorong keberhasilan yang menyebabkan tingginya capaian kinerja anggaran disebabkan terlaksananya pekerjaan yang telah direncanakan.





Gambar 2.37 Anggaran dan Realisasi Keuangan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

2.2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program, Tujuan RKPD sampai Tahun 2023

2.2.1 Evaluasi Ketercapaian Indikator Kinerja Program

Evaluasi terhadap hasil Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang dilakukan, salah satunya terkait indikator kinerja program (outcome). Evaluasi dilakukan untuk mengetahui ketercapaian program sesuai dengan target perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, Perangkat Daerah melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah dan menyampaikan laporan hasil evaluasi tersebut kepada Gubernur melalui Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah.



2.2.3 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2023

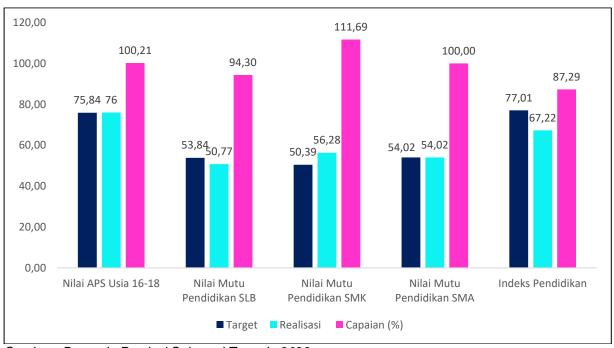
2.2.3.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang terkait dengan pelayanan dasar (basic services) bagi Masyarakat. Perangkat Daerah yang mengampuh ialah Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, RSUD Undata, RSUD Madani, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, Dinas Cipta Karya dan Sumberdaya Air, Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana, dan Dinas Sosial.

2.2.3.1.1 Pendidikan

2.2.3.1.1.1 Dinas Pendidikan

Kinerja pembangunan dalam bidang pendidikan dalam mencapai target indikator kinerja utama mengalami realisasi yang tidak jauh berbeda, hal ini terlihat pada perbandingan target dan capaian berikut ini.



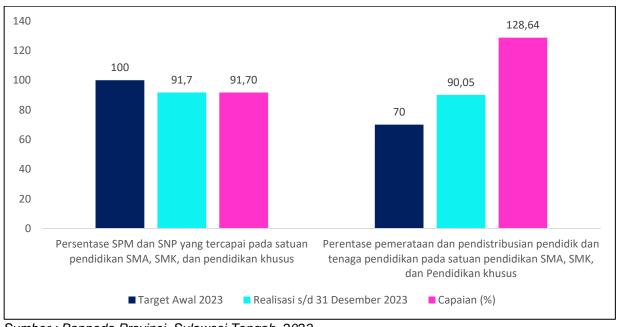
Sumber : Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, 2023

Gambar 2.38
Perbandingan Target terhadap Capaian Indikator Kinerja Utama Bidang
Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023



Kinerja di bidang Pendidikan terdiri dari beberapa indikator kinerja. Pada Indikator Indeks Pendidikan memiliki target sebesar 77,01 Persen dengan realisasi capaian 87,29 Persen. Indikator Nilai Mutu Pendidikan SMA memiliki target 54,02 Persen dengan capaian 100 Persen. Pada indikator Nilai Mutu Pendidikan SMK mempunyai target 50,39 persen dengan capaian melebihi target yakni 111,69 Persen. Indikator Nilai mutu Pendidikan SLB mempunyai target 53,84 Persen dengan capaian 94,30 Persen. Sedangkan nilai APS usia 16-18 mepunyai target 75,84 Persen dengan capian 100,21 Persen. Dengan demikian rata-rata indikator kinerja utama yaitu 98,70 Persen.

Indikator penting lainnya terlihat pada kinerja program yang menjadi outcome dari perangkat daerah. Indikator kinerja bidang Pendidikan yaitu Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dengan target 68 Indeks dengan realisasi 0 Persen. Indikator Persentase SPM dan SNP yang tercapai pada satuan pendidikan SMA, SMK, dan pendidikan khusus mempunyai target 100 Persen dengan capaian 91,70 Persen, dan Perentase pemerataan dan pendistribusian pendidik dan tenaga pendidikan pada satuan pendidikan SMA, SMK, dan Pendidikan khusus mempunyai target 70 Persen dengan capaian melebihi target yaitu 128,64 Persen. Hal ini dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.



Sumber: Bappeda Provinsi. Sulawesi Tengah, 2023 Gambar 2.39

Perbandingan Target RKPD terhadap Indikator Kinerja Program (Outcome) Bidang Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023



Berdasarkan hasil Evaluasi capaian RKPD Provinsi Sulawesi Tengah, diketahui bahwa pada Indikator Presentase SPM dan SNP yang tercapai pada satuan Pendidikan SMA, SMK, dan Pendidikan Khusus mempunyai target 100 persen dengan capaian 91,70 Persen. Indikator Presentase pemerataan dan pendistribusian pendidik dan tenaga pendidik pada satuan Pendidikan SMA, SMK, dan Pendidikan khusus mempunyai target 70 persen dengan capaian 128,64 persen. Sehingga untuk capaian Kinerja Urusan Pendidikan secara umum mempunyai nilai rata-rata 110,17 persen dengan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja masuk dalam kategori 'Sangat Tinggi'.

2.2.3.1.2 Kesehatan

2.2.3.1.2.1 Dinas Kesehatan

Indikator kinerja pembangunan dalam bidang kesehatan dapat dilihat pada beberapa indikator antara lain sebagai berikut:



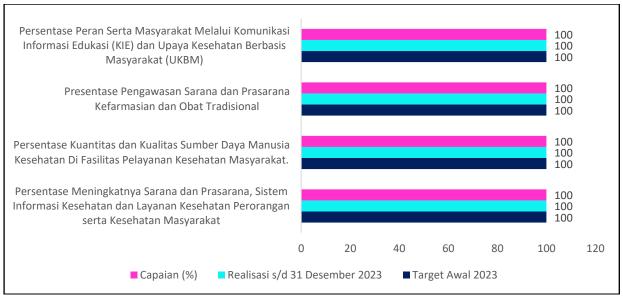
Sumber: Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, 2023 (data diolah kembali)

Gambar 2.40 Perbandingan Target terhadap Capaian Indikator Kinerja Utama Urusan Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

Kinerja urusan Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai beberapa indikator utama yaitu indikator usia harapan hidup dengan target 69,01 Persen dengan capaian 100,23 Persen. Pada indikator

Pelayanan SPM di Kabupaten/Kota dan Provinsi mempuyai target 40 Persen dengan realisasi melebihi yaitu 191,95 persen. Indikator Prevelensi Stunting mempunyai target 14 Persen dengan realisasi 87,14 Persen. Pada indikator Rumah sakit yang terakreditasi paripurna mempunyai target 80 persen dengan realisasi 78,13 persen, dan pada indeks kepuasaan Masyarakat terhadap layanan UPTD mempunyai target 70 persen dengan realisasi 116,19 persen.

Mengenai capaian indikator kinerja lainnya dari Urusan Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan target RKPD Tahun 2023 dapat dilihat pada Gambar berikut.



Sumber: Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, 2023 (data diolah kembali)

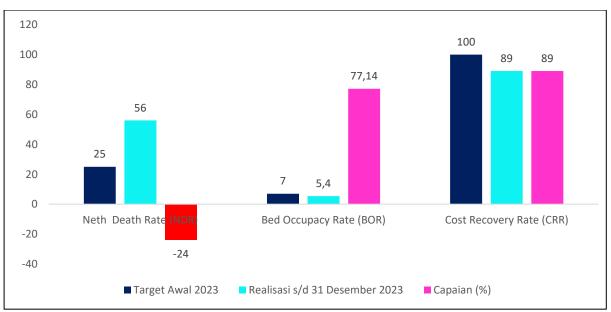
Gambar 2.41 Perbandingan Target RKPD terhadap Indikator Kinerja Program (Outcome) Urusan Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

Indikator kinerja program (outcome) pada urusan Kesehatan mempunyai indikator Persentase Meningkatnya Sarana dan Prasarana, Sistem Informasi Kesehatan dan Layanan Kesehatan Perorangan serta Kesehatan Masyarakat mempunyai target 100 persen dengan capaian 100 persen. Pada indikator Persentase Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat mempunyai target 100 persen dengan capaian 100 persen. Indikator Presentase Pengawasan Sarana dan Prasarana Kefarmasian dan Obat Tradisional mempunyai target 100 persen dengan capaian 100 persen. Pada indikator Persentase Peran Serta Masyarakat Melalui Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) dan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) mempunyai target 100 persen dengan capaian 100 persen.

Berdasarkan hasil evaluasi RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 dapat diketahui untuk capaian Kinerja Dinas Kesehatan sebesar 100 Persen dengan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja masuk dalam kategori 'Sangat Tinggi'.

2.2.3.1.2.2 **Rumah Sakit Undata**

Capaian indikator kinerja pada Rumah Sakit Undata dapat terlihat pada Gambar di bawah ini.



Sumber: Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, 2023 (data diolah kembali)

Gambar 2.42 Perbandingan Target terhadap Capaian Indikator Kinerja Utama Urusan Kesehatan Pada Rumah Sakit Undata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama pada Rumah Sakit Undata terlihat bervariasi. Yang mana pada indikator Neth Death Rate (NDR) atau yang disebut dengan angka kematian setelah dirawat mempunyai target 25 persen dengan capaian -24 persen. Hal ini menunjukan bahwa angka kematian setelah perawatan mempunyai capaian sangat rendah yang berarti Rumah Sakit Undata belum mampu mengurangi angka kematian pasien setelah perawatan. Indikator Bed occupancy Rate (BOR) atau presentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu mempunyai target 7 persen dengan capaian 77,14 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemakaian tempat tidur pada Rumah Sakit Undata belum terpenuhi secara keseluruhan. Pada indikator Cost Recovery Rate



(CRR) atau kemampuan pendapatan Rumah Sakit menutup biaya operasional mempunyai target 100 persen dengan capaian 89 persen. Hal ini menunjukan bahwa Rumah Sakit belum dapat memenuhi secara keseluruhan biaya operasionalnya.

Indikator lainnya terlihat pada Indikator Kinerja Program (outcome) dibawah ini.



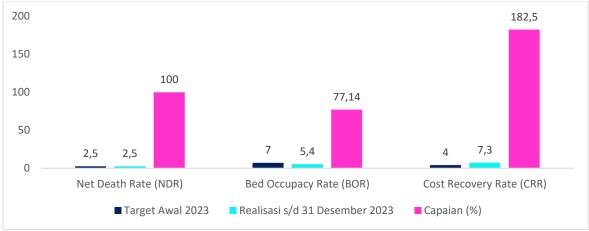
Sumber: Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, 2023 (data diolah kembali)

Gambar 2.43 Perbandingan Target RKPD terhadap Indikator Kinerja Program (Outcome) Pada Rumah Sakit Undata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

Pada Gambar diatas terlihat perbandingan target, realisasi, dan capaian pada Indikator Kinerja Program Rumah Sakit Undata. Indikator Persentase elemen akreditasi yang memenuhi standar mempunyai target 100 persen dengan capaian 45,64 persen. Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mempunyai target 100 persen dengan capaian 80,45 persen. Sehingga rata-rata capaian indikator Rumah Sakit Undata ialah 63,05 persen atau dengan predikat kerja "Rendah".

2.2.3.1.2.3 Rumah Sakit Madani

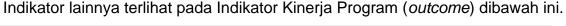
Capaian indikator kinerja pada Rumah Sakit Madani dapat terlihat pada Gambar di bawah ini.



Sumber: Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, 2023 (data diolah kembali)

Gambar 2.44 Perbandingan Target terhadap Capaian Indikator Kinerja Utama Urusan Kesehatan Pada Rumah Sakit Madani Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

Gambar diatas merupakan Indikator Kinerja Utama pada Rumah Sakit Madani. Yang mana pada indikator *Neth Death Rate* (NDR) atau yang disebut dengan angka kematian setelah dirawat mempunyai target 2,5 persen dengan capaian 100 persen. Indikator *Bed occupancy Rate* (BOR) atau presentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu mempunyai target 7 persen dengan capaian 77,14 persen. Pada indikator *Cost Recovery Rate* (CRR) atau kemampuan pendapatan Rumah Sakit menutup biaya operasional mempunyai target 4 persen dengan capaian 182,5 persen. Dengan demikian rata-rata capian Kinerja Indikator Kinerja Utama ialah 119,88 persen.





Sumber: Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, 2023 (data diolah kembali)

Gambar 2.45

Perbandingan Target RKPD terhadap Indikator Kinerja Program (Outcome) Pada Rumah Sakit Madani Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

Pada Gambar diatas terlihat perbandingan target, realisasi, dan capaian pada Indikator Kinerja Program Rumah Sakit Madani. Indikator Cost Recovery Ratio



mempunyai target 40 persen dengan capaian 110,28 persen. Indikator persentase terpenuhinya sarana dan prasarana rumah sakit yang sesuai standar mempunyai target 100 persen dengan capaian 0 persen. Sehingga rata-rata 55,14 persen dengan predikat kerja "Rendah".

2.2.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.2.3.1.3.1 Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang

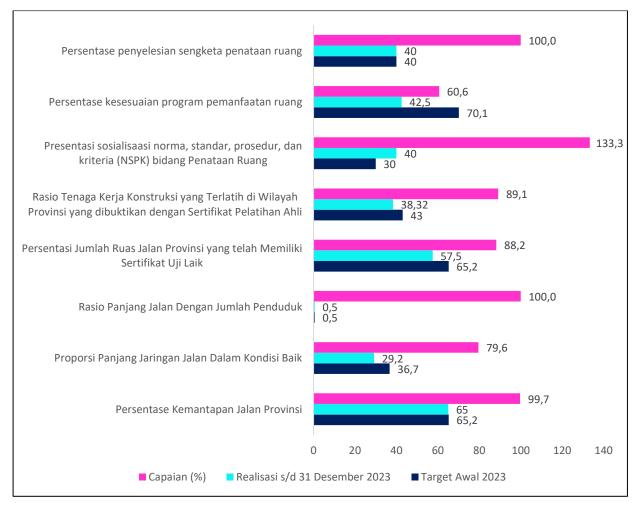
Capaian kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang khususnya bidang Bina Marga dan Penataan Ruang tahun 2023 dapat dilihat dari capaian indikator kinerja utama pada Gambar berikut ini.



Sumber: Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, 2023 (data diolah kembali)

Gambar 2.46 Perbandingan Target terhadap Capaian Indikator Kinerja Utama Urusan Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

Capaian kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang khususnya bidang Bina Marga dan Penataan Ruang tahun 2023 dapat dilihat dari indikator Indeks Kualitas Infrastruktur Jalan yang mempunyai target 0,81 indeks dengan capaian 100 persen. Indikator Indeks Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Daerah mempunyai target 1 indeks dengan capaian 100 persen. Dan indikator Ketaatan terhadap RTRW mempunyai target 65,17 dengan capaian 105,17 persen. Sehingga rata-rata capaian indikator kinerja utama ialah 106,6 persen.



Sumber : Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, 2023 (data diolah kembali)

Gambar 2.47

Perbandingan Target RKPD terhadap Indikator Kinerja Progra

Perbandingan Target RKPD terhadap Indikator Kinerja Program (Outcome)
Urusan Urusan Bina Marga dan Penataan Ruang
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

Gambar diatas menunjukkan Perbandingan Target RKPD terhadap Indikator Kinerja Program (Outcome) Urusan Urusan Bina Marga dan Penataan Ruang, pada indikator Presentase Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang mempunyai target 40 Persen dengan capaian 100 persen. Indikator Presentase Kesesuaian program pemanfaatan ruang mempunyai target 70,1 persen dengan capaian 60,6 persen. Indikator Presentasi Sosialisasi norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) bidang penataan ruang mempunyai target 30 persen dengan capaian 133,3 persen. Indikator Rasio Tenaga Kerja Konstruksi yang Terlatih di wilayah Provinsi yang dibuktikan dengan Sertifikat pelatihan ahli mempunyai target 43 persen dengan capaian 89,1 persen. Indikator Presentase Jumlah ruas jalan Provinsi yang telah memiliki Sertifikat Uji layak mempunyai target 65,2 persen dengan capaian 88,2 persen. Indikator Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk mempunyai target 0,5 persen dengan capaian

100 persen. Indikator Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik mempunyai target 36,7 persen dengan capaian 79,6 persen. Indikator Presentase Kemantapan Jalan Provinsi mempunyai target 65,2 persen dengan capaian 99,7 persen. Sehingga rata-rata capaian indikator kinerja program pada Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang ialah 93,82 persen dengan predikat kerja Sangat Tinggi.

2.2.3.1.3.2 Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air

Capaian indikator kinerja utama pada Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Capaian kinerja bidang Cipta Karya dan sumber daya air yang dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 dapat dilihat pada Gambar berikut ini.

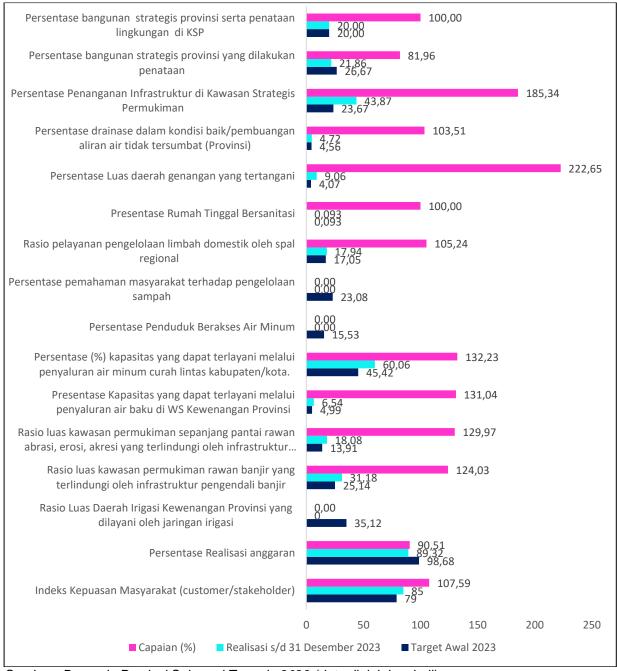


Sumber: Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, 2023 (data diolah kembali)

Gambar 2.48 Perbandingan Target terhadap Capaian Indikator Kinerja Utama Urusan Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

Pada Gambar diatas dapat dilihat bahwa indikator kinerja utama pada urusan Cipta Karya dan Sumber Daya Air mempunyai indikator presentase infrastruktur keciptakaryaan mempunyai indikator 18,01 persen dengan capaian 123,26 persen dan indikator presentase infrastruktur sumber daya air dengan target 19,79 persen dengan capaian 142,60 persen. Sehingga diketahui rata-rata indikator kinerja utama Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air ialah 132,93 Persen.

Indikator lainnya pada Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air terdapat pada Indikator Kinerja Program sebagaimana terlihat pada Gambar di bawah ini.



Sumber: Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, 2023 (data diolah kembali)

Gambar 2.49 Perbandingan Target RKPD terhadap Indikator Kinerja Program (Outcome) Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

Pada Gambar diatas terlihat perbandingan antara target, realisasi, dan capain pada indikator kinerja program (*outcome*) pada Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air. Pada indikator indeks kepuasan masyarakat (customer/stakeholder) dengan target 79 indeks dengan capaian 107,59 persen, indikator persentase realisasi anggaran dengan target 98,68 persen dengan capaian 90,51 persen, indikator rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi dengan target 35,12 rasio

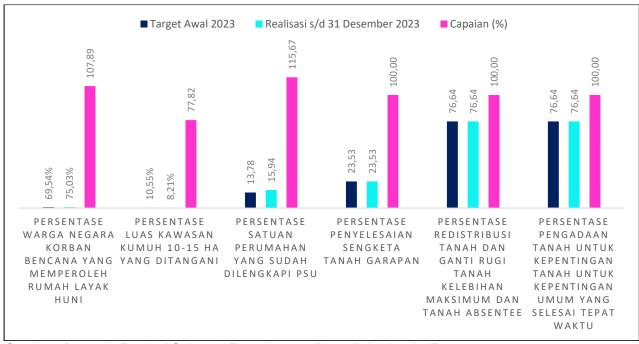
dengan capaian 0 persen, indikator rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendali banjir dengan target 25,14 rasio dengan capaian 124,01 persen, indikator rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Provinsi dengan target 13,91 rasio dengan capaian 129,97 persen,

Selanjutnya untuk indikator persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air baku di WS Kewenangan Provinsi dengan target 4,99 persen dengan capaian 131,04 persen, indikator persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota. dengan target 45,42 persen dengan capaian 132,24 persen, indikator persentase penduduk berakses air minum dengan target 15,53 persen dengan capaian 0 persen, indikator persentase pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan sampahdengan target 23,08 persen dengan capaian 0 persen, indikator rasio pelayanan pengelolaan limbah domestik oleh spal regional dengan target 17,05 persen dengan capaian 105,24 persen, indikator persentase rumah tinggal bersanitasi dengan target 0,093 persen dengan capaian 100 persen, indikator persentase luas daerah genangan yang tertangani dengan target 4,07 persen dengan capaian 222,65 persen, indikator persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat (Provinsi) dengan target 4,56 persen dengan capaian 103,51 persen, indikator persentase penanganan infrastruktur di kawasan strategis permukiman dengan target 23,67 persen dengan capaian 185,34 persen, indikator persentase bangunan strategis provinsi yang dilakukan penataan dengan target 26,67 persen dengan capaian 81,96 persen, dan indikator persentase bangunan strategis provinsi serta penataan lingkungan di KSP dengan target 20 persen dengan capaian 100 persen. Sehingga diketahui rata-rata indikator kinerja program Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air ialah 100,88 persen dengan kategori sangat tinggi.

2.2.3.1.4 Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

2.2.3.1.4.1 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Capaian indikator kinerja utama pada urusan Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan dapat dilihat pada Gambar dibawah ini.



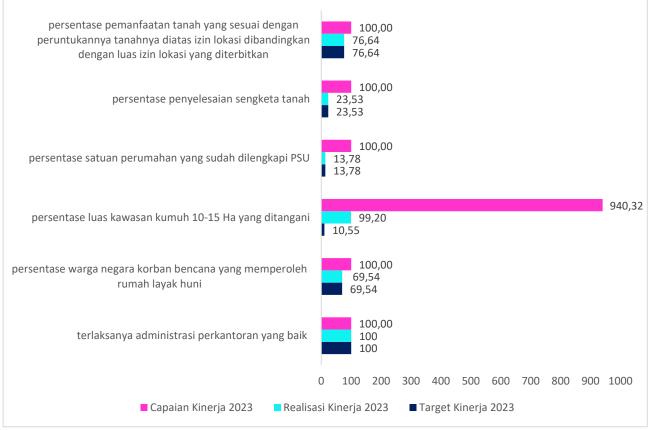
Sumber: Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, 2023 (data diolah kembali)

Gambar 2.50

Perbandingan Target terhadap Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

Berdasarkan hasil evaluasi bahwa indikator presentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni mempunyai target 69,54 Persen dengan capaian 107,89 persen. Indikator presentase luas Kawasan kumuh 10-15 hektar yang ditangani mempunyai target 10,55 persen dengan capaian 77,82 persen. Indikator presentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU mempunyai target 13,78 persen dengan capaian sebesar 115,67 persen. Indikator Presentase penyelesaian sengketa tanah Garapan mempunyai target 23,53 persen dengan capaian 100 persen. Indikator presentase redistribusi tanah dan ganti rugi tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee mempunyai target 76,64 persen dengan capaian 100 persen. Dan indikator presentase pengadaan tanah untuk kepentingan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu mempunyai target 76,64 persen dengan capaian 100 persen. Sehingga dapat dilihat bahwa rata-rata capaian pada indikator kinerja utama yaitu 100,23 persen.

Indikator kinerja program Indikator Kinerja Program pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan sebagaimana terlihat pada Gambar di bawah ini.



Sumber: Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, 2023 (data diolah kembali)

Gambar 2.51
Perbandingan Target RKPD terhadap Indikator Kinerja Program (Outcome)
Urusan Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

Pada Gambar diatas terlihat perbandingan antara target, realisasi, dan capain pada indikator kinerja program (*outcome*) pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan yang mana mempunyai beberapa indikator, yaitu pada indikator presentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukannya tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan mempunyai target 76,64 persen dengan capaian 100 persen. Indikator presentase penyelesaian sengketa tanah mempunyai target 23,53 persen dengan capaian 100 persen. Indikator presentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU mempunyai target 13,78 persen dengan capaian 100 persen. Indikator presentase luas Kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani mepunyai target 10,55 persen dengan capaian 940,32 persen. Indikator presentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni mempunyai target 69,54 persen dengan capaian 100 persen. Dan indikator terlaksananya administrasi perkantoran yang baik mempunyai target 100 persen dengan capaian 100 persen. Sehingga rata-rata pada indikator kinerja program dinas



Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan yaitu 240,05 dengan kategori sangat tinggi.

2.2.3.1.5 Ketenteraman, Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 2.2.3.1.5.1 Satuan Polisi Pamong Praja

Capaian indikator kinerja utama pada urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dapat dilihat pada Gambar dibawah ini.



Sumber: Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, 2023 (data diolah kembali)

Gambar 2.52 Perbandingan Target terhadap Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

Pada Gambar diatas terlihat perbandingan target, realisasi dan capaian indikator kinerja utama pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja yang mana indikator presentase penyelesaian Pelanggaran Ketertiban Ketentraman dan Keindahan (K3) mempunyai targer 100 persen dengan capaian 100 persen dan indikator presentase pendampingan pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran mempunyai target 100 persen dengan capaian 100 persen. Oleh karena itu rata-rata dari indikator kinerja utama pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja ialah 100 persen.

Indikator kinerja program Indikator Kinerja Program pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana terlihat pada Gambar di bawah ini.





Sumber: Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, 2023 (data diolah kembali)

Gambar 2.53 Perbandingan Target RKPD terhadap Indikator Kinerja Program (Outcome) Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

Pada Gambar diatas terlihat perbandingan target, realisasi dan capaian indikator kinerja program pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja yang menunjukan bahwa, Indikator Presentase Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum yang tertangani mempunyai target 100 persen dengan capaian 100 persen. Indikator Presentase Kabupaten/Kota yang diberikan Pendampingan Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran mempunyai target 100 persen dengan realisasi 100 persen. Sehingga rata-rata indikator program pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja ialah 100 Persen. Sehingga nilai rata-rata capaian indikator kinerja program pada Satuan Polisi Pamong Praja ialah 100 persen atau dengan predikat kinerja sangat tinggi.

2.2.3.1.5.2 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Capaian indikator kinerja utama pada urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat dilihat pada Gambar dibawah ini.



Sumber: Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, 2023 (data diolah kembali) Gambar 2.54

Perbandingan Target terhadap Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

Pada Gambar diatas terlihat indikator kinerja utama pada Penanggulangan Bencana Daerah yang menunjukkan capaian dari masing-masing indikator. Indikator Presentase Penanganan Pra Bencana mempunyai target 9,95 persen dengan capaian 126,53 persen. Indikator presentase penanganan saat bencana mempunyai target 100 persen dengan capaian 59,45 persen. Indikator presentase rencana pemulihan pasca bencana yang direalisasikan mempunyai target 100 persen dengan capaian 88,46 persen. Sehingga rata-rata capaian indikator kinerja utama pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah ialah 91,48 persen.

Indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah lainnya terdapat pada indikator kinerja Program sebagaimana terlihat pada Gambar di bawah ini.



Sumber: Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, 2023 (data diolah kembali)

Gambar 2.55

Perbandingan Target RKPD terhadap Indikator Kinerja Program (Outcome) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

Gambar di atas menunjukkan perbandingan target, realisasi, dan capaian pada Indikator Kinerja Program. Pada indikator Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi dan Dukungan Teknis BPBD Prov Sulteng mempunyai target 100 persen dengan capaian 98,75 persen. Pada indikator Tercapainya Penanganan bencana di provinsi Sulawesi Tengah mempunyai target 100 persen dengan capaian 95,77 persen. Sehingga rata-rata capaian pada indikator kinerja program Badan Penanggulangan Bencana Daerah ialah 97,26 persen atau dengan predikat kerja sangat tinggi.

2.2.3.1.6 Sosial

2.2.3.1.6.1 Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah

Capaian indikator kinerja utama pada urusan Sosial pada Dinas Sosial dapat dilihat pada Gambar dibawah ini.



Sumber: Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, 2023 (data diolah kembali)

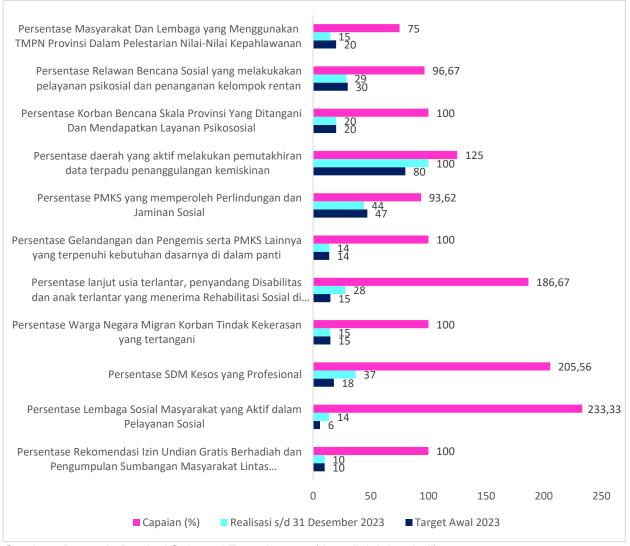
Gambar 2.56
Perbandingan Target terhadap Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

Pada Gambar diatas terlihat indikator kinerja utama pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah yang menunjukkan capaian dari masing-masing indikator. Indikator persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan memiliki target 50 persen dengan capaian 200, indikator Presentase PMKS yang tertangani mempunyai target 2,08 persen dengan capaian 504,33 persen. Indikator presentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar mempunyai target 4,35 persen dengan capaian 240,72 persen. Indikator presentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima rehabilitasi sosial mempunyai target 2 persen dengan capaian 155 persen. Indikator presentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya mempunyai target 4,09 persen dengan capaian 11,25 persen. Indikator presentase



panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan sosial mempunyai target 82,46 persen dengan capaian 64,53 persen. Indikator presentase korban bencana yang menerima layanan psikososial dan bantuan sosial kebutuhan dasar saat dan setelah tanggap darurat bencana mempunyai target 100 persen dengan capaian 100 persen. Sehingga rata-rata capaian indikator kinerja utama pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah ialah 182,22 persen dengan kategori sangat tinggi.

Indikator kinerja Dinas Sosial lainnya dapat dilihat pada indikator kinerja program pada Gambar di bawah ini.



Sumber: Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, 2023 (data diolah kembali)

Gambar 2.57
Perbandingan Target RKPD terhadap Indikator Kinerja Program (Outcome)
Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

Gambar di atas menunjukkan perbandingan target, realisasi, dan capaian pada Indikator Kinerja Program. Pada indikator kinerja program pada urusan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai Indikator presentase rekomendasi izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan sumbangan masyarakat lintas kabupaten/kota yang diterbitkan mempunyai target 10 dengan capaian 100 persen. Indikator presentase lembaga sosial masyarakat yang aktif dalam pelayanan sosial mempunyai target 6 dengan capaian 233,33 persen. Indikator presentase SDM kesos yang profesional mempunyai target 18 dengan capaian 205,56 persen. Indikator presentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang tertangani mempunyai target 15 dengan capaian 100 persen.

Indikator presentase lanjut usia terlantar, penyandang Disabilitas dan anak terlantar yang menerima rehabilitasi sosial di dalam panti dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar mempunyai target 15 dengan capaian 186,67 persen. Indikator presentase gelandangan dan pengemis serta pmks lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti mempunyai target 14 dengan capaian 100 persen. Indikator presentase PMKS yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai target 47 dengan capaian 93,62 persen. Indikator presentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan mempunyai target 80 dengan capaian 125 persen. Indikator presentase korban bencana skala provinsi yang ditangani dan mendapatkan layanan psikososial mempunyai target 20 dengan capaian 100 persen. Indikator presentase relawan bencana sosial yang melakukakan pelayanan psikosial dan penanganan kelompok rentan mempunyai target 30 dengan capaian 96,67 persen. Indikator presentase masyarakat dan lembaga yang menggunakan TMPN provinsi dalam pelestarian nilai-nilai kepahlawanan mempunyai target 20 dengan capaian 75 persen. Sehingga rata-rata capaian pada indikator kinerja program Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah ialah 126,20 persen dengan predikat kinerja "Sangat Tinggi".

2.2.3.2 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

Urusan pemerintahan wajib Non Pelayanan Dasar adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar (*basic services*) bagi Masyarakat. Perangkat Daerah yang mengampuh ialah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pangan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Perhubungan, Dinas

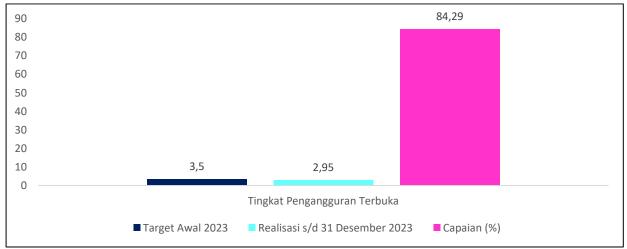


Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Kebudayaan, dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

2.2.3.2.1 Tenaga Kerja

2.2.3.2.1.1 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Capaian indikator kinerja utama pada urusan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat dilihat pada Gambar 2.22. Indikator kinerja utama pada urusan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai indikator tingkat pengangguran terbuka dengan target 3,50 persen dengan capaian 84,29 persen. Sehingga rata-rata capaian indikator kinerja utama pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ialah 84,29 persen dengan kategori sangat rendah sebagaimana terlihat pada Gambar dibawah ini.

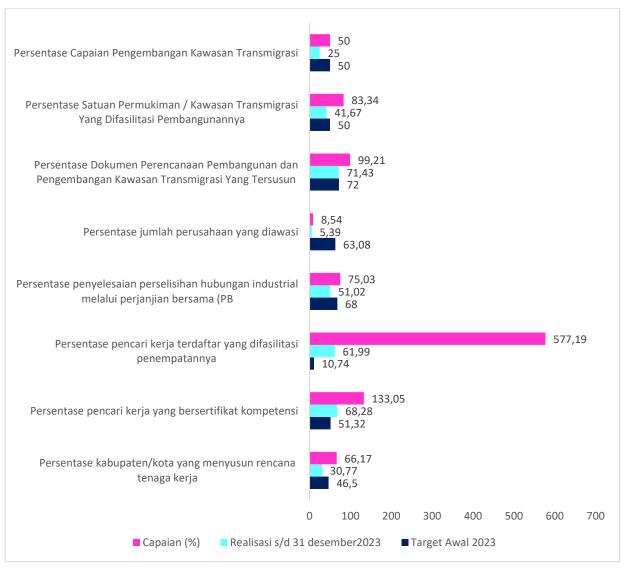


Sumber: Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, 2023 (data diolah kembali)

Gambar 2.58
Perbandingan Target terhadap Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

Indikator kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi lainnya dapat dilihat pada indikator kinerja program diantaranya yaitu Indikator presentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja mempunyai target 46,50 persen dengan capaian 66,17 persen. Indikator presentase pencari kerja yang bersertifikat kompetensi mempunyai target 51,32 persen dengan capaian 133,05 persen. Indikator presentase pencari kerja terdaftar yang difasilitasi penempatannya mempunyai target 10,74 persen dengan capaian 577,19 persen. Indikator presentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui perjanjian bersama (PB) mempunyai target 68 persen dengan capaian 75,03 persen. Indikator presentase jumlah perusahaan yang diawasi mempunyai target 63,08 persen dengan capaian 8,54 persen. Indikator presentase dokumen perencanaan

pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi yang tersusun mempunyai target 72 persen dengan capaian 99,21 persen. Indikator presentase satuan permukiman / kawasan transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya mempunyai target 50 persen dengan capaian 83,34 persen. Indikator presentase capaian pengembangan kawasan transmigrasi mempunyai target 50 persen dengan capaian 50 persen. Hal ini dapat terlihat pada Gambar berikut ini.



Sumber: Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, 2023 (data diolah kembali)

Gambar 2.59

Perbandingan Target RKPD terhadap Indikator Kinerja Program (Outcome) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

Berdasarkan Gambar diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian pada indikator kinerja program Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ialah **136,57 persen** dengan predikat kerja **'Sangat Tinggi'**.



2.2.3.2.2 Permendayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2.2.3.2.2.1 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Capaian indikator kinerja utama pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat pada Gambar dibawah ini.



Sumber : Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, 2023 (data diolah kembali)

Gambar 2.60
Perbandingan Target terhadap Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi
Tengah Tahun 2023

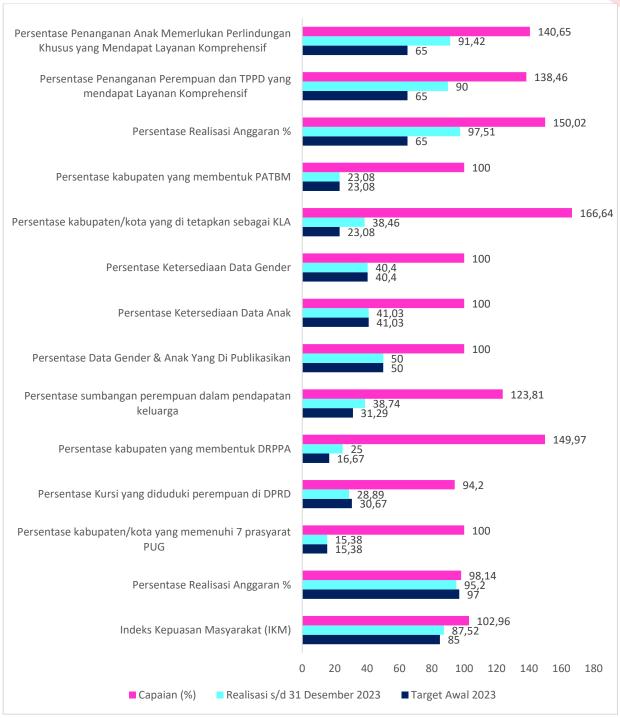
Pada Gambar diatas menunjukan perbandingan target capaian indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mempunyai target 78,95 Indeks dengan capaian 98,19 persen. Indikator Indeks Perlindungan Anak (IPA) mempunyai target 54,05 Indeks dengan capaian 100,87 persen. Indikator Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) mempunyai target 53 Indeks dengan capaian 99,72 persen. Indikator Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) mempunyai target 60,6 persen dengan capaian 97,33 persen. Indikator Persentase ARG mempunyai target 4 persen dengan capaian 177,50 persen. Sehingga capaian rata-rata Indikator Kinerja Utama ialah 114,72 persen.

Pada indikator kinerja lainnya terdapat pada indikator kinerja program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mempunyai target 85 persen dengan capaian 102,96 persen.



Indikator Presentase realisasi anggaran % mempunyai target 97 persen dengan capaian 98,14 persen. Indikator persentase kabupaten/kota yang memenuhi 7 prasyarat PUG mempunyai target 15,38 persen dengan capaian 100 persen. Indikator persentase kursi yang diduduki perempuan di DPRD mempunyai target 30,67 persen dengan capaian 94,20 persen. Indikator persentase kabupaten yang membentuk DRPPA mempunyai target 16,67 persen dengan capaian 149,97 persen. Indikator persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan keluarga mempunyai target 31,29 persen dengan capaian 123,81 persen. Indikator persentase data gender & anak yang di publikasikan mempunyai target 50 persen dengan capaian 100 persen. Indikator persentase ketersediaan data anak mempunyai target 41,03 persen dengan capaian 100 persen. Indikator persentase ketersediaan data gender mempunyai target 40,40 persen dengan capaian 100 persen. Indikator persentase kabupaten/kota yang di tetapkan sebagai KLA mempunyai target 23,08 persen dengan capaian 166,64 persen. Indikator persentase PATBM kabupaten/kota yang aktif mempunyai target 23,08 persen dengan capaian 100 persen. Indikator persentase penanganan perempuan dan TPPD yang mendapat layanan komprehensif mempunyai target 65 persen dengan capaian 150,02 persen. Indikator persentase penanganan anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapat layanan komprehensif mempunyai target 65 persen dengan capaian 138,46 persen. Sehingga capaian rata-rata Indikator Kinerja Program Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan ialah 117,25 persen dengan predikat kinerja 'Sangat Tinggi'. Hal ini dapat dilihat pada Gambar berikut ini.





Sumber: Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, 2023 (data diolah kembali)

Gambar 2.61

Perbandingan Target RKPD terhadap Indikator Kinerja Program (Outcome) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023



2.2.3.2.3 Pangan

2.2.3.2.3.1 Dinas Pangan

Capaian indikator kinerja utama pada urusan Pangan pada Dinas Pangan dapat dilihat pada Gambar dibawah ini.

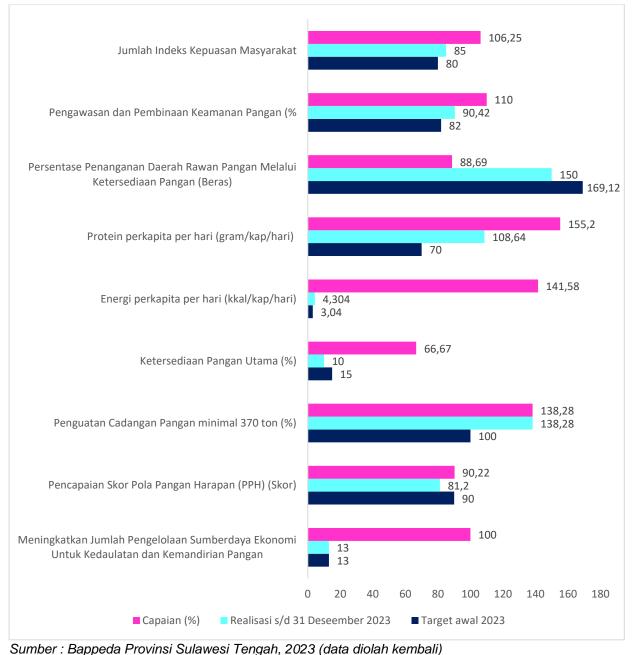


Sumber: Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, 2023 (data diolah kembali) Gambar 2.62

Perbandingan Target terhadap Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

Pada Gambar diatas dapat dilihat bahwa indikator kinerja utama pada urusan Dinas Pangan mempunyai indikator pengawasan dan pembinaan keamanan pangan dengan target 82 persen dengan capaian 110,27 persen. Sehingga rata-rata capaian indikator kinerja utama pada Dinas Pangan ialah 110,27 persen dengan kategori sangat tinggi

Indikator kinerja Dinas Pangan lainnya dapat dilihat pada indikator kinerja program pada Gambar di bawah ini.



Gambar 2.63
Perbandingan Target RKPD terhadap Indikator Kinerja Program (Outcome)
Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

Berdasarkan Gambar diatas dapat dilihat bahwa indikator kinerja program pada Dinas Pangan mempunyai indikator indeks meningkatkan jumlah pengelolaan sumberdaya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan mempunyai target 13 dengan capaian 100 persen. Indikator pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) mempunyai target 90 skor dengan capaian 90,22 persen. Indikator penguatan cadangan pangan minimal 370 ton mempunyai target 15 persen dengan capaian 66,67 persen. Indikator energi perkapita per hari mempunyai target 3,04 kkal/kap/hari dengan

capaian 141,58 persen. Indikator protein perkapita perhari mempunyai target 70 gram/kap/hari dengan capaian 155,20 persen. Indikator presentase jumlah perusahaan yang diawasi mempunyai target 63 persen dengan capaian 79,37 persen. Indikator presentase Penanganan Daerah Rawan Pangan Melalui Ketersediaan Pangan (Beras) mempunyai target 169,12 persen dengan capaian 88,69 persen. Indikator pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan mempunyai target 82 persen dengan capaian 110 persen. Indikator jumlah indeks kepuasan masyarakat mempunyai target 80 indeks dengan capaian 106,25 persen. Sehingga rata-rata capaian pada indikator kinerja program Dinas Pangan ialah 110,80 persen dengan predikat kinerja 'Sangat Tinggi'.

2.2.3.2.3 Lingkungan Hidup

2.2.3.2.3.1 Dinas Lingkungan Hidup

Capaian indikator kinerja utama pada urusan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dapat dilihat pada Gambar dibawah ini.

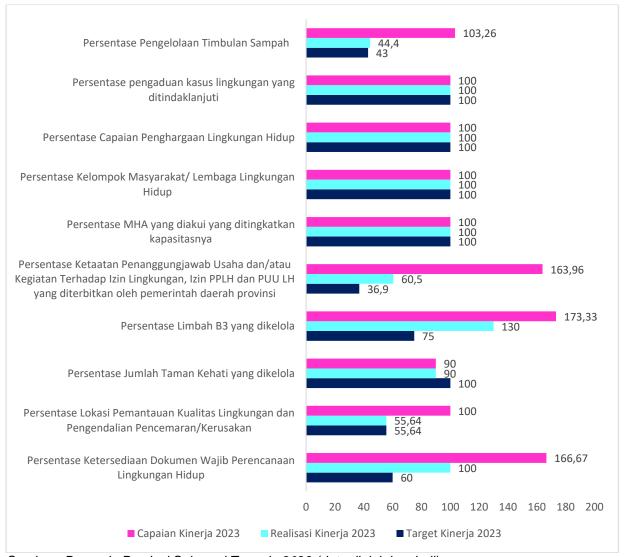


Sumber : Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, 2023 (data diolah kembali)

Gambar 2.64 Perbandingan Target terhadap Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai indikator kualitas air dengan target 65,39 indeks dengan capaian 97,31 persen. Capaian indikator kualitas udara dengan target 90,49 indeks dengan capaian 101,54 persen. Indikator kualitas air laut dengan target 71,21 indeks dengan capaian 112,08 persen. Indikator emisi gas rumah kaca dengan target 193.449,42 GgCO2eg dengan capaian 687,98 persen. Sehingga rata-rata capaian indikator kinerja utama pada Dinas lingkungan Hidup ialah 249,73 persen dengan kategori sangat tinggi

Indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup lainnya dapat dilihat pada indikator kinerja program pada Gambar di bawah ini.



Sumber: Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, 2023 (data diolah kembali)

Gambar 2.65
Perbandingan Target RKPD terhadap Indikator Kinerja Program (Outcome)
Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

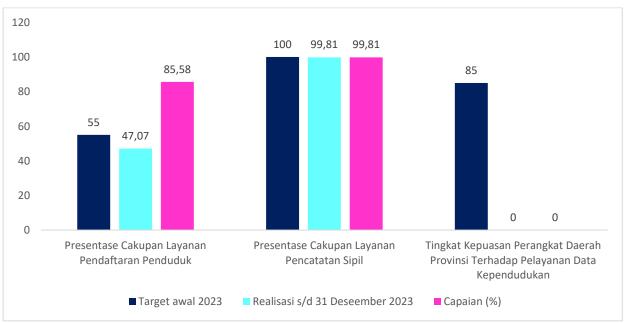
Berdasarkan Gambar diatas dapat dilihat bahwa indikator kinerja program pada Dinas lingkungan Hidup mempunyai Indikator persentase ketersediaan dokumen wajib perencanaan lingkungan hidup mempunyai target 60 persen dengan capaian 166,67 persen. Indikator persentase lokasi pemantauan kualitas lingkungan dan pengendalian pencemaran/kerusakan mempunyai target 55,64 persen dengan capaian 100 persen. Indikator persentase jumlah taman kehati yang dikelola mempunyai target 100 persen dengan capaian 90 persen. Indikator persentase Limbah B3 yang dikelola mempunyai target 75 persen dengan capaian 173,33 persen. Indikator presentase Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi mempunyai target 36,9 persen dengan capaian 163,96 persen. Indikator presentase MHA yang diakui yang

ditingkatkan kapasitasnya mempunyai target 100 persen dengan capaian 100 persen. Indikator presentase kelompok masyarakat/ lembaga lingkungan hidup mempunyai target 100 persen dengan capaian 100 persen. Indikator persentase capaian penghargaan lingkungan hidup mempunyai target 100 persen dengan capaian 100 persen. Indikator persentase pengaduan kasus lingkungan yang ditindaklanjuti mempunyai target 100 persen dengan capaian 100 persen. Indikator persentase pengelolaan timbulan sampah mempunyai target 43 persen dengan capaian 103,26 persen. Sehingga rata-rata capaian pada indikator kinerja program Dinas lingkungan Hidup ialah 119,72 persen dengan predikat kinerja 'Sangat Tinggi'.

2.2.3.2.4 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2.2.3.2.4.1 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Capaian indikator kinerja utama pada urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat pada Gambar dibawah ini.



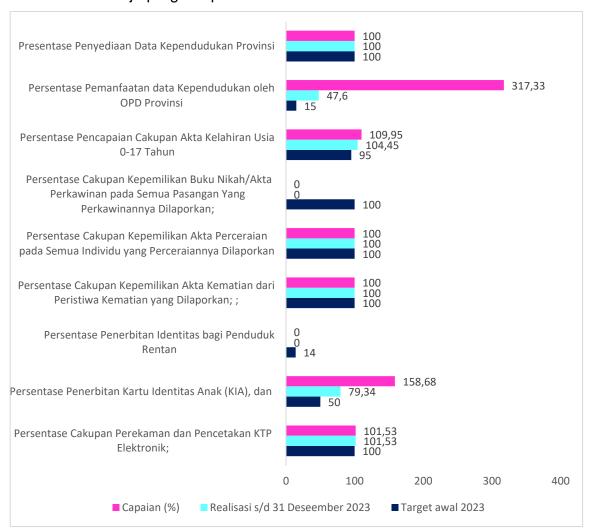
Sumber: Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, 2023 (data diolah kembali)

Gambar 2.66
Perbandingan Target terhadap Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah Tahun
2023

Pada Gambar diatas dapat dilihat bahwa indikator kinerja utama pada urusan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai Indikator persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dengan target 55 persen dengan capaian 85,58 persen.

Indikator persentase cakupan layanan pencatatan sipil dengan target 100 persen dengan capaian 99,81 persen. Sedangkan capaian Indikator Tingkat Kepuasan Perangkat Daerah Provinsi Terhadap Pelayanan Data Kependudukan dengan target 85 persen dengan capaian 0 persen. Sehingga rata-rata capaian indikator kinerja utama pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ialah 61,8 persen dengan kategori rendah.

Indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil lainnya dapat dilihat pada indikator kinerja program pada Gambar di bawah ini.



Sumber: Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, 2023 (data diolah kembali)

Gambar 2.67 Perbandingan Target RKPD terhadap Indikator Kinerja Program (Outcome) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

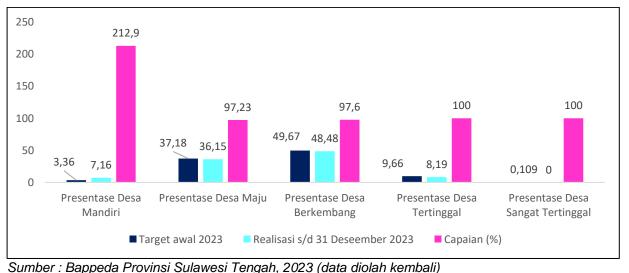
Berdasarkan Gambar diatas dapat dilihat bahwa indikator kinerja program pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai Indikator persentase cakupan perekaman dan pencetakan KTP elektronik mempunyai target 100 persen dengan

capaian 101,53 persen. Indikator persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) mempunyai target 50 persen dengan capaian 158,68 persen. Indikator persentase penerbitan identitas bagi penduduk rentan mempunyai target 14 persen dengan capaian 0 persen. Indikator persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan mempunyai target 100 persen dengan capaian 100 persen. Indikator presentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraiannya dilaporkan mempunyai target 100 persen dengan capaian 100 persen. Indikator presentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan mempunyai target 100 persen dengan capaian 0 persen. Indikator presentase pencapaian cakupan akta kelahiran usia 0-17 tahun mempunyai target 95 persen dengan capaian 109,95 persen. Indikator persentase pemanfaatan data kependudukan oleh OPD Provinsi mempunyai target 15 persen dengan capaian 317,33 persen. Indikator persentase penyediaan data kependudukan provinsi mempunyai target 100 persen dengan capaian 100 persen. Sehingga rata-rata capaian pada indikator kinerja program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ialah 109,72 persen dengan kategori 'Sangat Tinggi'.

2.2.3.2.5 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

2.2.3.2.5.1 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Capaian kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 dapat dilihat dari capaian indikator kinerja utama pada Gambar berikut ini.



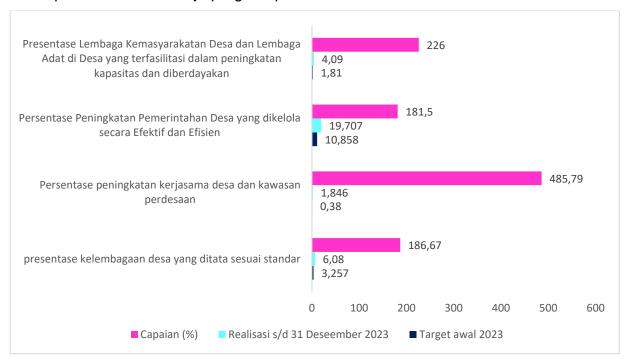
Gambar 2.68
Perbandingan Target terhadap Capaian Indikator Kinerja Utama



Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

Gambar diatas menunjukan perbandingan target terhadap capaian indikator kinerja utama pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Pada indikator Presentase Desa Mandiri mempunyai target 3,36 persen dengan capaian 212,9 persen. Indikator Presentase Desa Maju mempunyai target 37,18 persen dengan capaian 97,23 persen. Indikator Presentase Desa Berkembang mempunyai target 49,67 persen dengan capaian 97,6 persen. Indikator Presentase Desa Tertinggal mempunyai target 9,66 persen dengan capaian 100 persen. Indikator Presentase Desa Sangat Tertinggal mempunyao target 0,109 persen dengan capaian 100 persen. Sehingga rata-rata capaian indikator kinerja utama ialah 101,55 persen.

Indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa lainnya dapat dilihat pada indikator kinerja program pada Gambar di bawah ini.



Sumber: Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, 2023 (data diolah kembali)

Gambar 2.69 Perbandingan Target RKPD terhadap Indikator Kinerja Program (Outcome) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

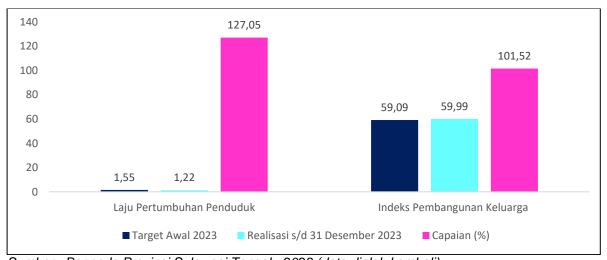
Gambar diatas menunjukan perbandingan target, realisasi dan capaian indikator kinerja program pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Gambar diatas menunjukan bahwa Indikator presentase kelembagaan desa yang ditata sesuai standar mempunyai target 3,257 persen dengan capaian 186,67 persen. Indikator Persentase peningkatan kerjasama desa dan kawasan perdesaan mempunyai target 0,38 persen

dengan capaian 485,79 persen. Indikator Persentase Peningkatan Pemerintahan Desa yang dikelola secara Efektif dan Efisien mempunyai target 10,858 persen dengan capaian 181,5 persen. Indikator Presentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat di Desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan mempunyai target 1,81 persen dengan capaian 226 persen. Sehingga rata-rata capaian indikator program pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ialah 269,98 persen atau dengan predikat kerja 'Sangat Tinggi'.

2.2.3.2.5 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

2.2.3.2.5.1 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Capaian kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023 dapat dilihat dari capaian indikator kinerja utama pada Gambar berikut ini.



Sumber : Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, 2023 (data diolah kembali)

Gambar 2.70 Perbandingan Target terhadap Capaian Indikator Kinerja Utama Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

Gambar diatas menunjukan indikator kinerja utama pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang mempunyai dua indikator. Pada indikator Laju Pertumbuhan Penduduk mempunyai target 1,5 persen dengan capaian 127,05 persen. Pada Indikator Indeks Pembangunan Keluarga mempunyai target 59,09 persen dengan capaian 101,52 persen. Sehingga rata-rata capaian indikator kinerja utama ialah 114,29 persen.

Indikator kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana lainnya dapat dilihat pada indikator kinerja program pada Gambar di bawah ini.





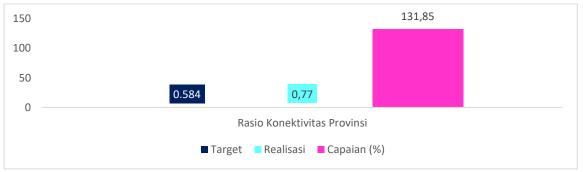
Perbandingan Target RKPD terhadap Indikator Kinerja Program (Outcome) Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

Gambar diatas menunjukan perbandingan target, realisasi dan capaian indikator kinerja program pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Pada Indikator Presentase Capaian Pengendalian Penduduk mempunyai target 100 persen dengan capaian 100 persen. Indikator Presentase Capaian Pembinaan Keluarga Berencana (KB) mempunyai target 100 persen dengan capaian 100 persen. Indikator Presentase Capaian Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera mempunyai target 100 persen dengan capaian 100 persen. Sehingga rata-rata capaian indikator kinerja program pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ialah **100 persen** dengan predikat kinerja 'Sangat Tinggi'.

2.2.3.2.6 Perhubungan

2.2.3.2.6.1 Dinas Perhubungan

Capaian kinerja Urusan Perhubungan pada Dinas Perhubungan Tahun 2023 dapat dilihat dari capaian indikator kinerja utama pada Gambar berikut ini.



Sumber: Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, 2023 (data diolah kembali)

Gambar 2.72



Perbandingan Target terhadap Capaian Indikator Kinerja Utama Urusan Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

Gambar diatas menunjukan indikator kinerja utama pada Dinas Perhubungan yang mempunyai satu indikator yaitu Rasio Konektivitas Provinsi yang memiliki target 0,584 Rasio dengan capaian 131,85 persen.

Indikator kinerja Dinas Perhubungan lainnya dapat dilihat pada indikator kinerja program pada Gambar di bawah ini.



Sumber : Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, 2023 (data diolah kembali)

Gambar 2.73 Perbandingan Target RKPD terhadap Indikator Kinerja Program (Outcome) Urusan Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

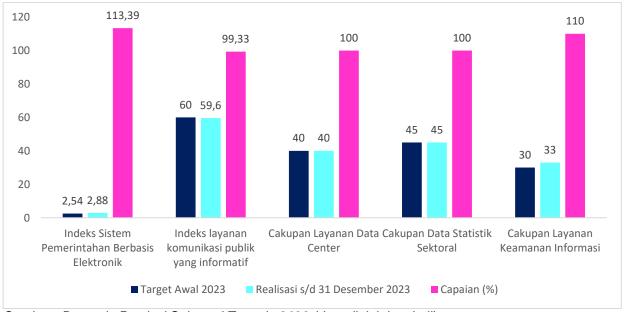
Gambar diatas menunjukan perbandingan target, realisasi dan capaian indikator kinerja program pada Dinas Perhubungan yang memiliki dua indikator. Indikator Presentase Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) mempunyai target 60 persen dengan capaian 158,33 persen. Indikator Presentase Pelabuhan yang dikelola mempunyai target 100 persen dengan capaian 100 persen. Indikator Presentase Pengelolaan Perkeretaapian mempunyai target 100 persen dengan capaian 100 persen. Sehingga rata-rata capaian Indikator Kinerja Program ialah 119,44 Persen atau dengan predikat kerja Tinggi.

2.2.3.2.6 Komunikasi dan Informatika

2.2.3.2.6.1 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik



Capaian kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Tahun 2023 dapat dilihat dari capaian indikator kinerja utama pada Gambar berikut ini.



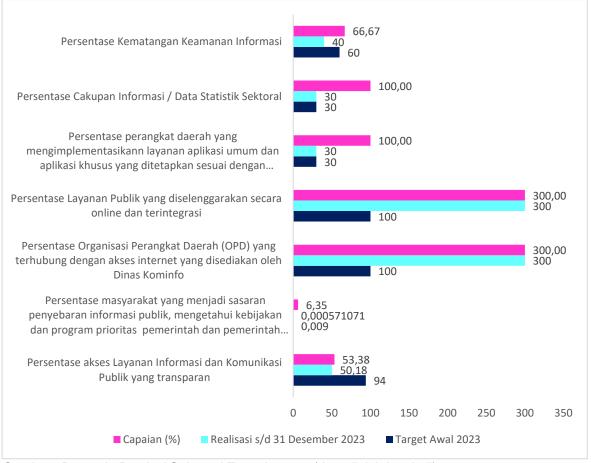
Sumber: Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, 2023 (data diolah kembali)

Gambar 2.82

Perbandingan Target terhadap Capaian Indikator Kinerja Utama Urusan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

Gambar diatas menunjukan indikator kinerja utama pada Dinas Komunikasi dan Informatika yang mempunyai beberapa indikator. Pada Indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik mempunyai target 2,54 indeks dengan capaian 113,39 persen. Indikator Indeks layanan komunikasi publik yang informatif mempunyai target 60 indeks dengan capaian 99,33 persen. Indikator Cakupan Layanan Data Center mempunyai target 40 persen dengan capaian 100 persen. Indikator Cakupan Data Statistik Sektoral mempunyai target 45 persen dengan capaian 100 persen. Indikator Cakupan Layanan Keamanan Informasi mempunyai target 30 persen dengan capaian 110 persen. Sehingga rata-rata capaian indikator kinerja utama ialah 104,54 persen.

Indikator kinerja urusan Komunikasi dan Informatika lainnya dapat dilihat pada indikator kinerja program pada Gambar di bawah ini.



Sumber : Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, 2023 (data diolah kembali)

Gambar 2.75
Perbandingan Target RKPD terhadap Indikator Kinerja Program (Outcome)
Urusan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

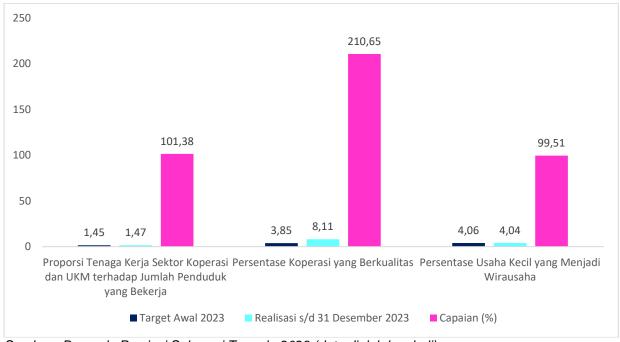
Gambar diatas menunjukkan perbandingan antara target, realisasi dan capaian urusan Komunikasi dan Informatika pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik. Pada Indikator Persentase akses Layanan Informasi dan Komunikasi Publik yang transparan mempunyai target 94 persen dengan capaian 53,38 persen. Indikator Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai indikator 0,009 dengan capaian 6,35 persen. Indikator Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo mempunyai target 100 persen dengan capaian 300 persen. Indikator Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi mempunyai target 100 persen dengan capaian 300 persen. Indikator Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikann layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan mempunyai target 30 persen dengan capaian 100 persen. Indikator Persentase

Cakupan Informasi / Data Statistik Sektoral mempunyai target 30 persen dengan capaian 100 persen. Indikator Persentase Kematangan Keamanan Informasi mempunyai target 60 persen dengan capaian 66,67 persen. Oleh karena itu, rata-rata capaian indikator program ialah 132,34 persen atau dengan predikat kerja "sangat tinggi".

2.2.3.2.7 Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

2.2.3.2.7.1 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Capaian kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah Tahun 2023 dapat dilihat dari capaian indikator kinerja utama pada Gambar berikut ini.



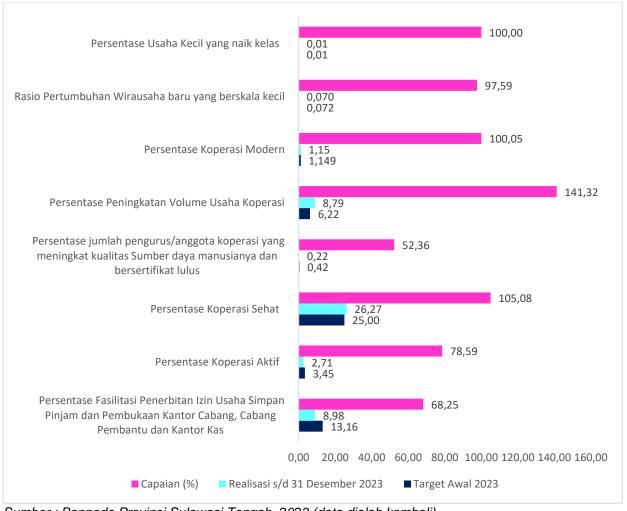
Sumber: Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, 2023 (data diolah kembali)

Gambar 2.76

Perbandingan Target terhadap Capaian Indikator Kinerja Utama Urusan Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

Gambar diatas menunjukan Perbandingan Target terhadap Capaian Indikator Kinerja Utama Urusan Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah yang memiliki empat indikator. Pada Indikator Proporsi Tenaga Kerja Sektor Koperasi dan UKM terhadap Jumlah Penduduk yang Bekerja mempunyai target 1,45 persen dengan capaian 101,38 persen. Indikator Persentase Koperasi yang Berkualitas mempunyai target 3,85 persen dengan capaian 210,65 persen. Indikator Persentase Usaha Kecil yang Menjadi Wirausaha mempunyai target 4,06 persen dengan capaian 99,51 persen. Sehingga rata-rata capaian indikator kinerja utama ialah 137,18 persen.

Indikator kinerja Dinas Urusan Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah lainnya dapat dilihat pada indikator kinerja program pada Gambar di bawah ini.



Sumber : Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, 2023 (data diolah kembali)

Gambar 2.77

Perbandingan Target RKPD terhadap Indikator Kinerja Program (Outcome) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

Gambar diatas menunjukkan perbandingan antara target, realisasi dan capaian pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah. Pada Indikator Persentase Usaha Kecil yang naik kelas mempunyai target 0,01 persen dengan capaian 100 persen. Indikator Rasio Pertumbuhan Wirausaha baru yang berskala kecil mempunyai target 0,072 persen dengan capaian 100 persen. Indikator Persentase Koperasi Modern mempunyai target 1,15 persen dengan capaian 100 persen. Indikator Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi mempunyai target 6,22 persen dengan capain 141,32 persen. Indikator Persentase jumlah pengurus/anggota koperasi yang

meningkat kualitas Sumber daya manusianya dan bersertifikat lulus mempunyai target 0,42 persen dengan capaian 52,36 persen. Indikator Persentase Koperasi Sehat mempunyai target 25 persen dengan capaian 105,08 persen. Indikator Persentase Koperasi Aktif mempunyai target 3,45 persen dengan capaian 78,59 persen. Indikator Persentase Fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas mempunyai target 68,25 persen. Sehingga rata-rata capaian indikator program pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah ialah 92,91 persen atau dengan predikat kerja Sangat Tinggi.

2.2.3.2.8 Penanaman Modal

2.2.3.2.8.1 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Capaian kinerja Urusan Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023 dapat dilihat dari capaian indikator kinerja utama pada Gambar berikut ini.



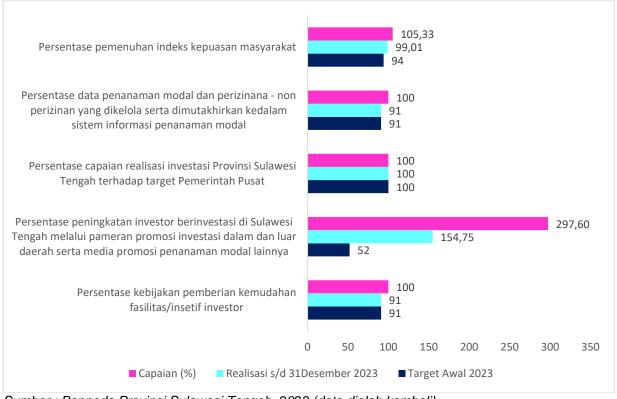
Sumber: Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, 2023 (data diolah kembali)

Gambar 2.78 Perbandingan Target terhadap Capaian Indikator Kinerja Utama Urusan Penanaman Modal Sulawesi Tengah Tahun 2023

Gambar diatas menunjukan perbandingan target terhadap capain indikator kinerja utama urusan penanaman modal yang mempunyai tiga indikator. Pada indikator Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Rp) mempunyai target Rp.35.750.000.000 dengan capaian 312.391 persen. Indikator Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) mempunyai target 461 dengan capain 1.072 PERSEN. Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mempunyai target 94 persen dengan capaian 105,11 persen. Sehingga rata-rata capaian indikator kinerja utama ialah 104,52 atau dengan predikat kerja sangat tinggi. Indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan



Pelayanan Terpadu Satu Pintu lainnya dapat dilihat pada indikator kinerja program pada Gambar di bawah ini.



Sumber: Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, 2023 (data diolah kembali)

Gambar 2.79
Perbandingan Target RKPD terhadap Indikator Kinerja Program (Outcome)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2023

Gambar diatas menunjukkan perbandingan antara target, realisasi dan capaian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mempunyai beberapa indikator. Pada Indikator Persentase kebijakan pemberian kemudahan fasilitas/insetif investor mempunyai target 91 persen dengan capaian 100 persen. Indikator Persentase peningkatan investor berinvestasi di Sulawesi Tengah melalui pameran promosi investasi dalam dan luar daerah serta media promosi penanaman modal lainnya mempunyai target 52 persen dengan capaian 297,60 persen. Indikator Persentase capaian realisasi investasi Provinsi Sulawesi Tengah terhadap target Pemerintah Pusat mempunyai target 100 persen dengan capaian 100 persen. Indikator Persentase data penanaman modal dan perizinana - non perizinan yang dikelola serta dimutakhirkan kedalam sistem informasi penanaman modal mempunyai target 91 persen dengan capaian 100 persen. Indikator Persentase pemenuhan indeks kepuasan Masyarakat mempunyai target 94 persen dengan capaian 105,33 persen. Sehingga



rata-rata capaian kinerja indikator kinerja program ialah **140,59 persen** atau dengan predikat kerja 'sangat tinggi'.

2.2.3.2.9 Kepemudaan Dan Olahraga

2.2.3.2.9. 1 Dinas Pemuda dan Olah Raga

Capaian kinerja Urusan Kepemudaan Dan Olahraga pada Dinas Pemuda dan Olah Raga Tahun 2023 dapat dilihat dari capaian indikator kinerja utama pada Gambar berikut ini.



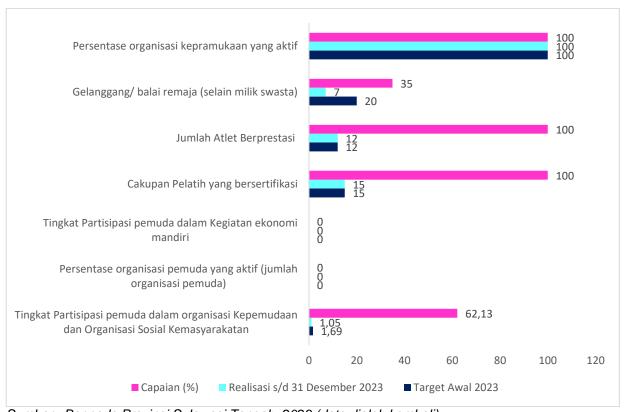
Sumber: Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, 2023 (data diolah kembali)

Gambar 2.80 Perbandingan Target terhadap Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

Pada Gambar diatas dapat dilihat bahwa indikator kinerja utama pada urusan Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai indikator Indeks pembangunan pemuda dengan target 52,35 persen dengan capaian 0 persen. Hal ini dikarenakan data tersebut masih berada dalam proses pusat. Indikator persentase wirausaha muda dengan target 5,28 persen dengan capaian 100 persen. Indikator pertumbuhan organisasi pemuda yang aktif dengan target 2 persen dengan capaian 100 persen. Indikator cakupan pembinaan Olahraga dengan target 0,52 persen dengan capaian 100 persen. Indikator rasio jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk dengan target 0,072 persen dengan capaian 28,47 persen dan Indikator rasio jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk dengan target 0,152 persen dengan capaian 37,57 persen. Sehingga rata-rata capaian



indikator kinerja utama pada Dinas Pemuda dan Olahraga ialah 73,21 persen dengan kategori rendah. Indikator kinerja Dinas Pemuda dan Olah Raga lainnya dapat dilihat pada indikator kinerja program pada Gambar di bawah ini.



Sumber : Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, 2023 (data diolah kembali)

Gambar 2.81 Perbandingan Target RKPD terhadap Indikator Kinerja Program (Outcome) Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

Berdasarkan Gambar diatas dapat dilihat bahwa indikator kinerja program pada Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai indikator indeks reformasi birokrasi perangkat daerah mempunyai target 71 indeks dengan capaian 0 persen. Indikator tingkat dalam organisasi kepemudaan dan partisipasi pemuda organisasi sosial kemasyarakatan mempunyai target 1,69 persen dengan capaian 62,13 persen. Indikator persentase organisasi pemuda yang aktif (jumlah organisasi pemuda) mempunyai target 0 persen dengan capaian 0 persen. Indikator tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri mempunyai target 0 persen dengan capaian 0 persen. Indikator cakupan pelatih yang bersertifikasi mempunyai target 15 orang dengan capaian 100 persen. Indikator jumlah atlet berprestasi mempunyai target 12 orang dengan capaian 100 persen. Indikator gelanggang/ balai remaja (selain milik swasta) mempunyai target 20 gelanggang dengan capaian 35 persen. Indikator presentase organisasi kepramukaan yang aktif mempunyai target 100 persen dengan



capaian 100 persen. Sehingga rata-rata capaian pada indikator kinerja program Dinas Pemuda dan Olahraga ialah 56,73.

2.2.3.2.10 Kebudayaan

2.2.3.2.10.1 Dinas Kebudayaan Daerah

Capaian kinerja Urusan Kebudayaan pada Dinas Kebudayaan Tahun 2023 dapat dilihat dari capaian indikator kinerja utama pada Gambar berikut ini.

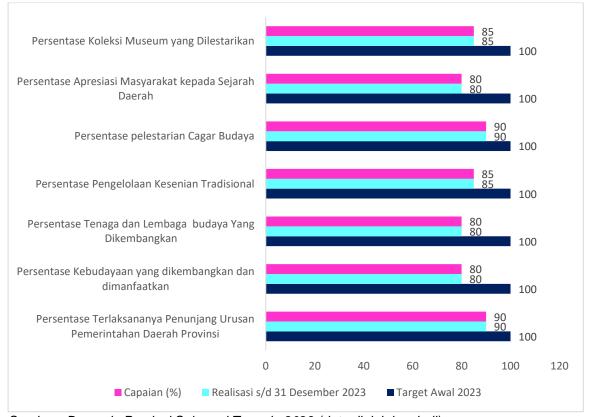


Sumber: Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, 2023 (data diolah kembali)

Perbandingan Target terhadap Capaian Indikator Kinerja Utama Urusan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

Gambar 2.82

Gambar diatas menunjukkan perbandingan target terhdapat capaian indikator utama pada Dinas Kebudayaan. Indikator Indeks Pembangunan Kebudayaan mempunyai target 48,63 persen dengan capaian 102,82 persen. Indikator kinerja Dinas Kebudayaan lainnya dapat dilihat pada indikator kinerja program pada Gambar di bawah ini.



Sumber: Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, 2023 (data diolah kembali) Gambar 2.83

Perbandingan Target RKPD terhadap Indikator Kinerja Program (Outcome) Dinas Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

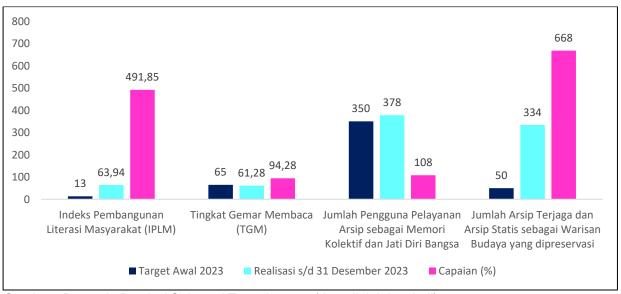
Gambar diatas menunjukkan perbandingan target, realisasi, dan capaian kinerja program pada Dinas Kebudayaan. Pada Indikator Presentase Koleksi Museum yang dilestarikan mempunyai target 100 persen dengan capaian 85 persen. Indikator Presentase Apresiasi Masyarakat kepada Sejarah Daerah mempunyai target 100 persen dengan capaian 80 persen. Indikator Presentase Pelestarian Cagar Budaya mempunyai target 100 persen dengan capaian 90 persen. Indikator Presentase Pengelolaan Kesenian Tradisonal mempunyai target 100 persen dengan capaian 85 persen. Indikator Presentase Tenaga dan Lembaga Budaya yang Dikembangkan mempunyai target 100 persen dengan capaian 80 persen. Indikator Presentase Kebudayaan yang Dikembangkan dan dimanfaatkan mempunyai target 100 persen dengan capai 80 persen. Indikator Presentase Terlaksananya Penunjnag Urusan Pemerintah Daerah Provinsi mempunyai target 100 persen dengan capaian 90 persen. Sehingga rata-rata indikator kinerja program pada Dinas Kebudayaan ialah 84,29 Persen atau dengan predikat kerja 'Tinggi'.



2.2.3.2.11 Perpustakaan

2.2.3.2.11.1 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Capaian kinerja Urusan Perpustakaan pada Dinas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2023 dapat dilihat dari capaian indikator kinerja utama pada Gambar berikut ini.

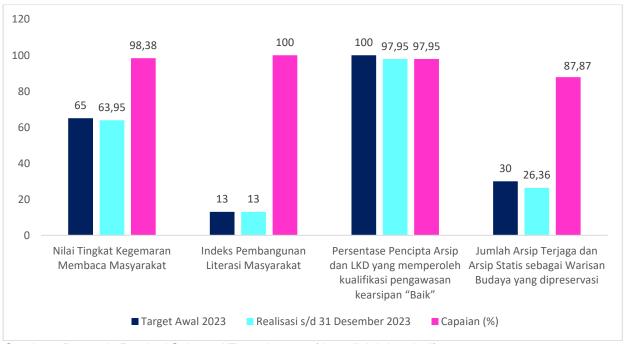


Sumber: Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, 2023 (data diolah kembali)

Gambar 2.84 Perbandingan Target terhadap Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

Pada Gambar diatas dapat dilihat bahwa indikator kinerja utama pada urusan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan mempunyai indikator Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dengan target 13 indeks dengan capaian 491,85 persen. Indikator tingkat gemar baca (TGM) dengan target 65 persen dengan capaian 94,28 persen. Indikator pertumbuhan organisasi pemuda yang aktif dengan target 2 persen dengan capaian 100 persen. Indikator jumlah pengguna pelayanan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa dengan target 350 orang dengan capaian 108,00 persen. Indikator jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi dengan target 50 arsip dengan capaian 668 persen. Sehingga rata-rata capaian indikator kinerja utama pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan ialah 340,53 persen dengan kategori sangat tinggi.

Indikator kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan lainnya dapat dilihat pada indikator kinerja program pada Gambar di bawah ini.



Sumber: Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, 2023 (data diolah kembali) Gambar 2.85

Perbandingan Target RKPD terhadap Indikator Kinerja Program (Outcome) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

Berdasarkan Gambar diatas dapat dilihat bahwa indikator kinerja program pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan mempunyai Indikator nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat mempunyai target 65 persen dengan capaian 98,38 persen. Indikator indeks pembangunan literasi masyarakat mempunyai target 13 indeks dengan capaian 100 persen. Indikator persentase Pencipta Arsip dan LKD yang memperoleh kualifikasi pengawasan kearsipan "Baik" mempunyai target 100 persen dengan capaian 97,95 persen. Indikator jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi mempunyai target 30 dengan capaian 87,87 persen. Sehingga ratarata capaian pada indikator kinerja program Dinas Kearsipan dan Perpustakaan ialah 96,05 persen dengan predikat kinerja "Sangat Tinggi".

2.2.3.3 **Urusan Pilihan**

Urusan pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan pemerintahan yang diprioritaskan oleh pemerintahan daerah untuk diselenggarakan yang terkait dengan upaya mengembangkan potensi unggulan (core competence) yang menjadi kekhasan daerah. Urusan ini diampuh oleh Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Parawisata, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas



Kehutanan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

2.2.3.3.1 Kelautan dan Perikanan

2.2.3.3.1.1 Dinas Kelautan dan Perikanan

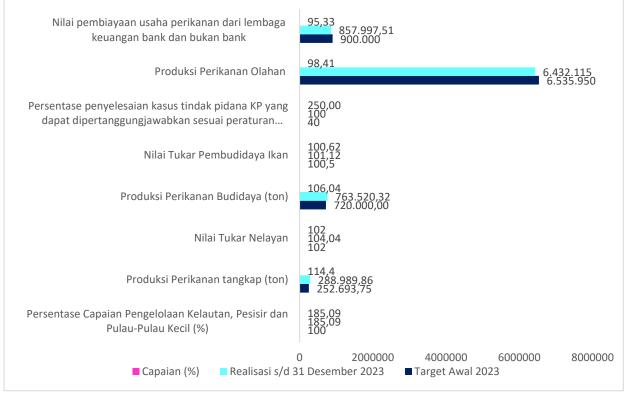
Pada indikator kinerja utama pada urusan Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai indikator Indeks nilai tukar perikanan dengan target 100,8 persen dengan capaian 102,3 persen. Indikator rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial dengan target 19,98 nilai dengan capaian 91,19 persen. Indikator produksi perikanan dengan target 972.693,75 ton dengan capaian 108,21 persen. Indikator angka konsumsi ikan dengan target 57,05 Kg/Kap/Th dengan capaian 118,07 persen. Indikator jumlah hari operasi pengawasan SDK dengan target 250 hari operasi dengan capaian 106 persen. Sehingga rata-rata capaian indikator kinerja utama pada Dinas Kelautan dan Perikanan ialah 112,04 persen dengan kategori sangat tinggi. Capaian kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 dapat dilihat dari capaian indikator kinerja utama pada Gambar berikut ini.



Sumber: Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, 2023 (data diolah kembali)

Gambar 2.86 Perbandingan Target terhadap Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

Indikator kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan lainnya dapat dilihat pada indikator kinerja program pada Gambar di bawah ini.



Sumber: Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, 2023 (data diolah kembali)

Gambar 2.87 Perbandingan Target RKPD terhadap Indikator Kinerja Program (Outcome) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

Berdasarkan Gambar diatas dapat dilihat bahwa indikator kinerja program pada Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai Indikator persentase capaian pengelolaan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil mempunyai target 100 persen dengan capaian 185,09 persen. Indikator produksi perikanan tangkap mempunyai target 252.693,75 ton dengan capaian 114,4 persen. Indikator nilai tukar nelayan mempunyai target 102 nilai dengan capaian 102 persen. Indikator produksi perikanan budidaya mempunyai target 720.000 ton dengan capaian 106,04 persen. Indikator nilai tukar pembudidaya ikan mempunyai target 100,5 nilai nilai dengan capaian 100,62 persen. Indikator presentase penyelesaian kasus tindak pidana KP yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan melalaui penerapan sanksi administasi dan sanksi pidana mempunyai target 40 persen dengan capaian 250 persen. Indikator produksi perikanan olahan mempunyai target 6.535.950 kg dengan capaian 98,41 persen. Indikator nilai pembiayaan usaha perikanan dari lembaga keuangan bank dan bukan bank mempunyai target 900.000 Rp.juta dengan capaian 95,33 persen. Sehingga ratarata capaian pada indikator kinerja program Dinas Kelautan dan Perikanan ialah 131,48 Persen dengan predikat kinerja 'Sangat Tinggi'.

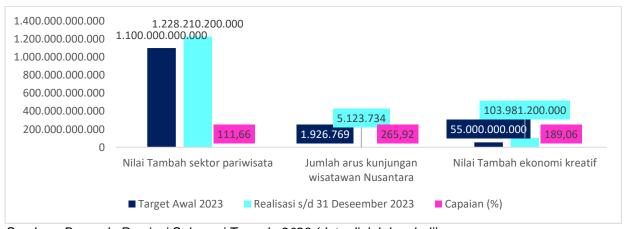


2.2.3.3.2 Pariwisata

2.2.3.3.2.1 Dinas Pariwisata

Perbandingan Target terhadap Capaian Indikator Kinerja Utama pada Dinas Pariwisata terdapat beberapa indikator yaitu indikator Nilai tambah sektor Pariwisata mempunyai target Rp.1.100.000.000.00 dengan capaian 111,66 persen. Indikator Jumlah Arus Kunjungan Wisatawan Nusantara mempunyai target 1.926.769 orang dengan capaian 265,92 persen. Indikator Nilai Tambah Ekonomi Kreatif mempunyai target Rp.55.000.000.000 dengan capaian 189,06 persen. Sehingga rata-rata capaian kinerja utama yaitu 188,88 persen.

Capaian kinerja Urusan Pariwisata pada Dinas Pariwisata Tahun 2023 dapat dilihat dari capaian indikator kinerja utama pada Gambar berikut ini.



Sumber: Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, 2023 (data diolah kembali)

Gambar 2.88 Perbandingan Target terhadap Capaian Indikator Kinerja Utama Urusan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

Indikator kinerja Dinas Pariwisata lainnya dapat dilihat pada indikator kinerja program pada Gambar di bawah ini.



Sumber : Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, 2023 (data diolah kembali)

Gambar 2.89

Perbandingan Target RKPD terhadap Indikator Kinerja Program (Outcome) Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

Gambar diatas menunjukkan perbandingan target, capaian, dan realisasi pada kinerja program Dinas Pariwisata. Pada indikator Daerah Tujuan Wisata Yang Berskala Nasional dan Terstandar Pengelolaannya mempunyai target 95 persen dengan capaian 103,55 persen. Indikator Jumlah Kunjungan dan Lama Tinggal Wisatawan mempunyai target 95 persen dengan capaian 104,48 persen. Indikator Tercapainya Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan Yang Dikembangkan mempunyai target 95 persen dengan capaian 100,38 persen. Indikator Meningkatnya Kualitas Pelayanan Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Terstandarisasi mempunyai target 95 persen dengan capaian 103,60 persen. Sehingga nilai rata-rata capaian indikator kinerja program pada Dinas Pariwisata ialah 103,00 Persen dengan predikat kinerja 'sangat tinggi'.

2.2.3.3.2 Pertanian

2.2.3.3.2.1 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

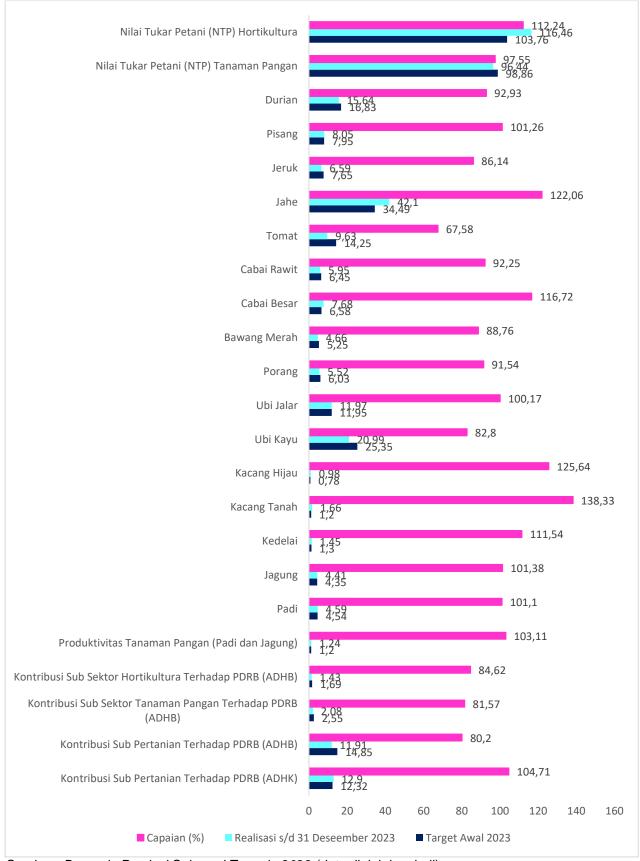
Indikator pada kinerja utama Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura terlihat bahwa Kontribusi Sub Pertanian Terhadap PDRB (ADHK) mempunyai target 12,32 Persen atau sama dengan Rp.24.835,05 Milyar dengan capaian 104,71 persen. Indikator Kontribusi Sub Pertanian Terhadap PDRB (ADHB) dengan target 14,85

persen atau sama dengan Rp.38.188,05 Milyar dengan capaian 80,20 persen. Indikator Kontribusi Sub Sektor Tanaman Pangan Terhadap PDRB (ADHB) mempunyai target 2,55 persen atau sama dengan Rp.6.923,70 Milyar dengan capaian 81,57 persen. Indikator Kontribusi Sub Sektor Hortikultura Terhadap PDRB (ADHB) mempunyai target 1,69 Persen atau sama dengan Rp.4.495,69 Milyar dengan capaian 84,62 persen.

Indikator selanjutnya ialah Produktivitas Tanaman Pangan (Padi dan Jagung mempunyai target 1,20 persen dengan capaian 103,11 persen. Indikator Padi mempunyai target 4,54 Ton/Ha dengan capaian 101,10. Indikator Jagung 4,35 Ton/Ha dengan capaian 101,38 persen. Indikator Kedelai mempunyai target 1,30 Ton/Ha dengan capaian 111,54 persen. Indikator Kacang Tanah mempunyai target 1,20 Ton/Ha dengan capaian 138,33 Persen. Indikator Kacang Hijau mempunyai target 0,78 Ton/Ha dengan capaian 125,64 persen. Indikator Ubi Kayu mempunyai target 25,35 Ton/Ha dengan capaian 82,80 Persen. Indikator Ubi Jalar mempunyai target 11,95 Ton/Ha dengan capaian 100,17 Persen. Indikator Porang mempunyai target 6,03 Ton/Ha dengan capaian 91,54 Persen. Indikator Bawang Merah mempunyai target 5,25 Ton/Ha dengan capaian 88,76 Persen.

Selanjutnya terdapat Indikator Cabai Besar mempunyai target 6,58 Ton/Ha dengan capaian 116,72 Persen. Indikator Cabai Rawit mempunyai target 6,45 Ton/Ha dengan capaian 92,25 Persen. Indikator Tomat mempunyai target 14,25 Ton/Ha dengan capaian 67,58 Persen. Indikator Jahe mempunyai target 34,49 Ton/Ha dengan capaian 122,06 Persen. Indikator Jeruk mempunyai target 7,65 Ton/Ha dengan capaian 86,14 Persen. Indikator Pisang mempunyai target 7,95 Ton/Ha dengan capaian 101,26 Persen. Indikator Durian Indikator mempunyai target 16,83 Ton/Ha dengan capaian 92,93 Persen. Indikator Nilai Tukar Petani (NTP) Tanaman Pangan mempunyai target 98,86 Persen dengan capaian 97,55 Persen. Indikator Nilai Tukar Petani (NTP) Hortikultura mempunyai target 103,76 Persen dengan capaian 112,24 Persen. Sehingga rata-rata capaian ialah 100,27 persen.

Capaian kinerja Urusan Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2023 dapat dilihat dari capaian indikator kinerja utama pada Gambar berikut ini.



Sumber: Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, 2023 (data diolah kembali)

Gambar 2.90

Perbandingan Target terhadap Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023



Indikator kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura lainnya dapat dilihat pada indikator kinerja program pada Gambar di bawah ini.



Sumber: Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, 2023 (data diolah kembali)

Gambar 2.91 Perbandingan Target RKPD terhadap Indikator Kinerja Program (Outcome) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

Berdasarkan Gambar diatas indikator Indeks Reformasi Birokrasi mempunyai target 64 Indeks dengan capaian 0 persen. Indikator Presentase Peningkatan Produktivitas Pertanian mempunyai target 1,20 dengan capain 103,3 persen. Indikator Indeks Pertanaman (IP) Pertanian mempunyai target 20 persen dengan capaian 91,25 persen. Indikator Persentase Capaian Perizinan Usaha Pertanian mempunyai target 25 persen dengan capaian 104 persen. Indikator Persentase Pengendalian dan Penanggulanagn Bencana Pertanian mempunyai target 95 persen dengan capaian 100 persen. Indikator Persentase Peningkatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian mempunyai target 100 persen dengan capaian 100 persen. Sehingga capaian indikator Kinerja Program mempunyai nilai rata-rata 99,72 persen atau dengan predikat kerja 'Sangat Tinggi'.

2.2.3.3.2.2 Dinas Perkebunan dan Peternakan

Capaian kinerja Urusan Pertanian pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2023 dapat dilihat dari capaian indikator kinerja utama pada Gambar-Gambar berikut ini.



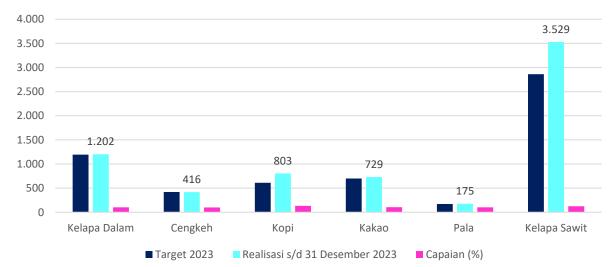
Gambar 2.92
Perbandingan Target terhadap Capaian Indikator Kontribusi Terhadap PDRB (ADHB) (Persen)



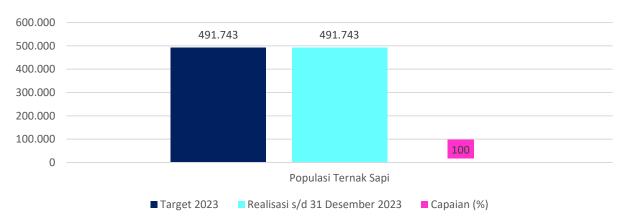
Sumber: Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, 2023 (data diolah kembali)

Gambar 2.93
Perbandingan Target terhadap Capaian Indikator Nilai Tukar Petani (NTP)





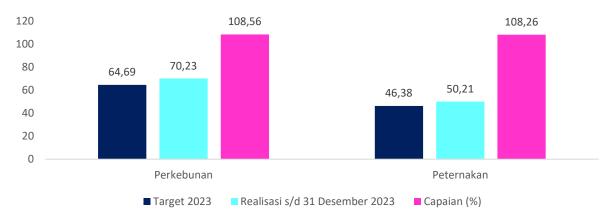
Gambar 2.94
Perbandingan Target terhadap Capaian Indikator Produktivitas Komoditas
Unggulan Perkebunan (Kg/Ha)



Sumber: Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, 2023 (data diolah kembali)

Gambar 2.95

Perbandingan Target terhadap Capaian Indikator Populasi Ternak Sapi



Gambar 2.96
Perbandingan Target terhadap Capaian Indikator Cakupan Bina Kelompok Tani (Persen)

Pada indikator kinerja utama Dinas Perkebunan dan Peternakan mempunyai beberapa indikator seperti yang terlihat pada beberapa Gambar diatas, yang mana diketahui pada Indikator Kontribusi Terhadap PDRB (ADHB) mempunyai dua sub sektor yaitu sub sektor Perkebunan yang mempunyai target 8,25 persen dengan capaian 85,21 persen dan subsector Peternakan yang mempunyai target 1,51 persen dengan capaian 82,78 persen. Pada Indikator Nilai Tukar Petani (NTP) juga mempunyai dua subsector yaitu subsector Perkebunan yang mempunyai target 101,66 persen dengan capaian 109,41 persen dan subsector peternakan mempunyai target 99,75 persen dengan capaian 103,62 persen.

Selanjutnya pada indikator Produktivitas Komoditas Unggulan Perkebunan dengan beberapa komoditi seperti Kelapa Dalam yang mempunyai target 1.195 Kg/Ha dengan capaian 100,59 persen, Komoditi Cengkeh mempunyai target 420 Kg/Ha dengan capaian 99,05 persen, Komoditi Kopi mempunyai target 609 Kg/Ha dengan capaian 131,86 persen, Komoditi Kakao mempunyai target 700 Kg/Ha dengan capaian 104,14 persen, Komoditi Pala mempunyai target 170 Kg/Ha dengan capaian 102,94 persen, dan Komoditi Kelapa Sawit mempunyai target 2.860 Kg/Ha dengan capaian 123,39 persen. Sedangkan pada Indikator Populasi Ternak Sapi mempunyai target 491.743 Ekor dengan capaian 100 persen.

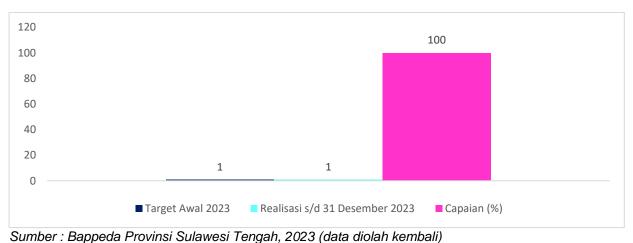
Pada Indikator Cakupan Bina Kelompok Tani mempunyai dua subsector yaitu pada subsector Perkebunan mempunyai target 64,69 persen dengan capaian 108,56 persen dan subsector Peternakan mempunyai target 46,38 persen dengan capaian 108,26 persen. Sehingga pada capaian indikator kinerja utama Dinas Perkebunan dan Peternakan ialah 104,60 Persen dengan predikat kerja Sangat Tinggi.



Indikator kinerja Perkebunan dan Peternakan lainnya dapat dilihat pada indikator kinerja program Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 pada Gambar di bawah ini.



Sumber: Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, 2023 (data diolah kembali) Gambar 2.97 Perbandingan Target RKPD terhadap Indikator Produksi Komoditas Unggulan Perkebunan (Ton)



Gambar 2.98

Perbandingan Target RKPD terhadap Indikator Investasi Perusahaan Perkebunan (Unit Usaha)



Sumber: Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, 2023 (data diolah kembali)

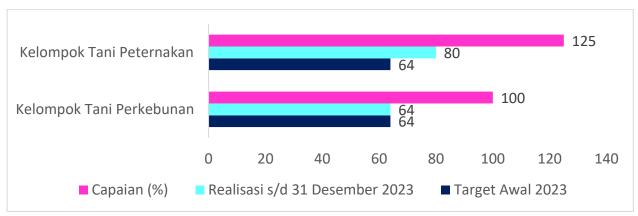
Gambar 2.99
Perbandingan Target RKPD terhadap Indikator Presentase Tingkat Serangan
OPT Perkebunan



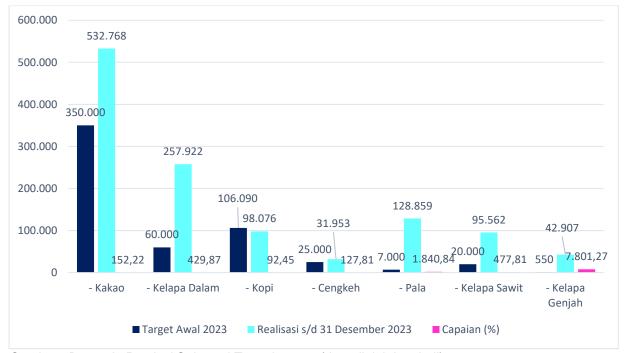
Sumber : Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, 2023 (data diolah kembali)

Gambar 2.100

Perbandingan Target RKPD terhadap Indikator Kinerja Program

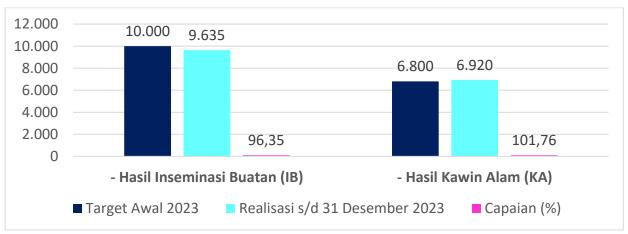


Gambar 2.101
Perbandingan Target RKPD terhadap Indikator Kelompok Tani yang Menerapkan Teknologi (Kelompok)



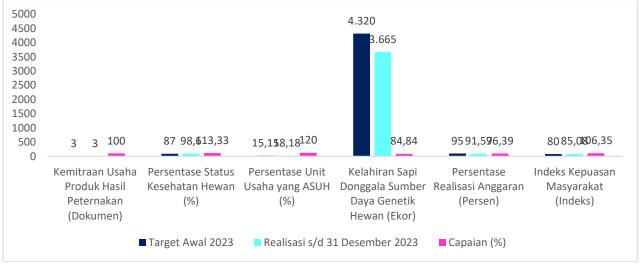
Sumber: Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, 2023 (data diolah kembali)

Gambar 2.102
Perbandingan Target RKPD terhadap Indikator Benih Bermutu dan Bersertifikat (Pohon)



Gambar 2.103

Perbandingan Target RKPD terhadap Indikator Kelahiran Ternak Sapi (Ekor)



Gambar 2.104 Perbandingan Target RKPD terhadap Indikator Kinerja Program

Pada indikator kinerja program Dinas Perkebunan dan Peternakan mempunyai beberapa indikator seperti yang terlihat pada beberapa Gambar diatas, yang mana diketahui pada indikator Produksi Komoditas Unggulan Perkebunan mempunyai beberapa Komoditi yaitu Komoditi Kelapa Dalam mempunyai target 204.976 Ton/Ha dengan capaian 98,38 persen, Komoditi Cengkeh mempunyai target 23.200 Ton/Ha dengan capaian 95,77 persen, Komoditi Kopi mempunyai target 2.874 Ton/Ha dengan capaian 118,94 persen, Komoditi Kakao mempunyai target 50.072 Ton/Ha dengan capaian 261,32 persen, Komoditi Pala mempunyai target 921 Ton/Ha dengan capaian 106,43 persen dan Komoditi Kelapa Sawit mempunyai target 289.719 Ton/Ha dengan capaian 48 persen.

Selanjutnya indikator Investasi Perusahaan Perkebunan (unit usaha) mempunyai target satu unit usaha dengan capaian 100 persen. Indikator Persentase Tingkat Serangan OPT Perkebunan mempunyai beberapa komoditi seperti Kakao yang mempunyai target 41,04 dengan capaian 98,32 persen, komoditi Kelapa mempunyai target 47,17 persen dengan capaian 98,87 persen, komoditi Cengkeh mempunyai target 16,81 persen dengan capaian 101,88 persen, dan komoditi Kopi mempunyai target 14,80 dengan capaian 105,11 persen.

Pada Indikator presentase capaian penyedian dan pengembangan prasarana Perkebunan mempunyai target 26,77 persen dengan capaian 171,16 persen. Indikator kemitraan usaha produk hasil Perkebunan mempunyai target 2 dokumen, namun indikator ini belum mempunyai capaian dikarenakan belum dapat mengumpulkan semua data dalam pembuatan dokumen. Sedangkan pada indikator kelompok tani yang

menerapkan teknologi terbagi menjadi kelompok tani Perkebunan yang mempunyai target 64 kelompok dengan capaian 100 persen dan kelompok tani peternakan yang mempunyai target 64 kelompok dengan capaian 125 persen.

Indikator selanjutnya terlihat pada Gambar 2.65 indikator benih bermutu dan bersertifikasi terbagi dalam beberapa komoditi. Komoditi Kakao mempunyai target 350 pohon dengan capaian 152,22 persen, komoditi Kelapa Dalam mempunyai target 60.000 pohon dengan capaian 429,87 persen, komoditi Kopi mempunyai 106.090 pohon dengan capaian 92,45 persen. Komoditi Cengkeh mempunyai target 25.000 pohon dengan capaian 127,81 persen. Komoditi Pala mempunyai target 7.000 pohon dengan capaian 1.840,84 persen. Komoditi Kelapa Sawit mempunyai target 20.000 pohon dengan capaian 477,81 persen dan komoditi Kelapa Genjah mempunyai target 550 pohon dengan capaian 7.801,27 persen.

Pada Gambar 2.66 terlihat pada indikator Kelahiran Ternak Sapi yang terbagi menjadi dua, yaitu Hasil Inseminasi Buatan mempunyai target 10.000 ekor dengan capaian 96,35 persen dan Hasil Kawin Alam mempunyai target 6.800 ekor dengan capaian 101,76 persen.

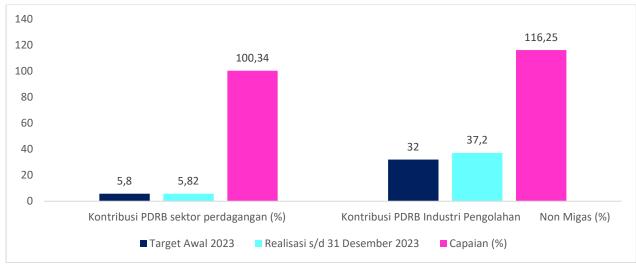
Pada Gambar 2.67 terlihat indikator Kemitraan Usaha Produk Hasil Peternakan yang mempunyai target 3 dokumen dengan capaian 100 persen. Indikator Persentase Status Kesehatan Hewan mempunyai target 87 persen dengan capaian 113,33 persen. Indikator Persentase Unit Usaha yang ASUH mempunyai target 15,15 persen dengan capaian 120 persen. Indikator Kelahiran Sapi Donggala Sumber Daya Genetik Hewan mempunyai target 4.320 ekor dengan capaian 84,84 persen. Indikator Persentase Realisasi Anggaran mempunyai target 95 persen dengan capaian 96,39 persen. Indikator Kepuasan Masyarakat mempunyai target 80 Indeks dengan capaian 106,35 persen. Sehingga capaian indikator Kinerja Program mempunyai nilai rata-rata 443,06 persen atau dengan predikat kinerja 'Sangat Tinggi'.

2.2.3.3.3 Perindustrian dan Perdagangan

2.2.3.3.3.1 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Capaian kinerja Urusan Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2023 dapat dilihat dari capaian indikator kinerja utama pada Gambar berikut ini.

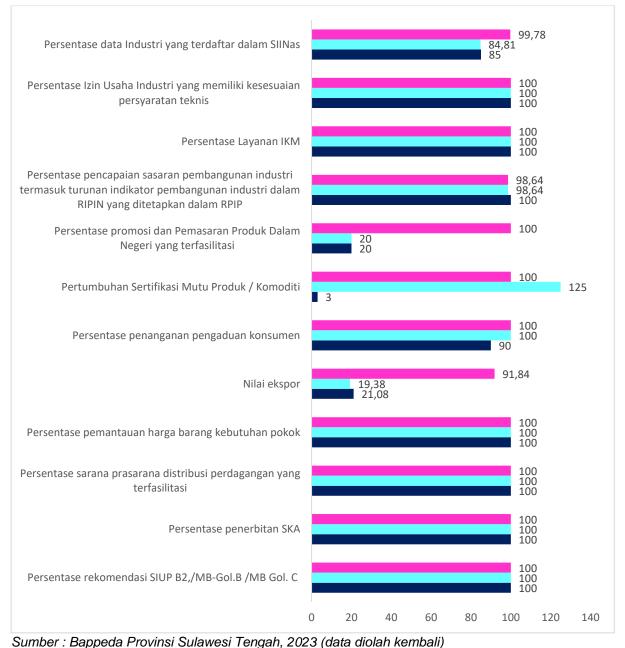




Perbandingan Target terhadap Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

Pada Gambar diatas menunjukkan indikator kontribusi PDRB sektor perdagangan mempunyai target 5,8 persen dengan capaian 100,34 persen dan indikator kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non Migas mempunyai indikator 32 persen dengan capaian 116,25 persen. Sehingga capaian rata-rata indikator kinerja utama ialah 108,30 persen.

Selain itu, untuk mengetahui dampak dari pembangunan daerah yang telah dilaksanakan terdapat juga indikator kinerja program yang menjadi acuan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan seperti yang terlihat pada Gambar di bawah ini.



Gambar 2.106

Perbandingan Target RKPD terhadap Indikator Kinerja Program (Outcome)

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

Berdasarkan Gambar diatas diketahui bahwa Indikator Persentase rekomendasi SIUP B2,/MB-Gol.B /MB Gol. C mempunyai target 100 persen dengan capaian 100 persen. Indikator Persentase penerbitan SKA target 100 persen dengan capaian 100 persen. Indikator Persentase sarana prasarana distribusi perdagangan yang terfasilitasi target 100 persen dengan capaian 100 persen. Indikator Persentase pemantauan harga barang kebutuhan pokok target 100 persen dengan capaian 100 persen. Indikator Nilai ekspor target 21.108,57 Juta USD dengan capaian 91,84 persen. Indikator Persentase penanganan pengaduan konsumen target 90 persen dengan capaian 100 persen.



Indikator Pertumbuhan Sertifikasi Mutu Produk / Komoditi target 3 persen dengan capaian 100 persen. Indikator Persentase promosi dan Pemasaran Produk Dalam Negeri yang terfasilitasi target 20 persen dengan capaian 100 persen. Indikator Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP target 100 persen dengan capaian 98,64 persen. Indikator Persentase Layanan IKM target 100 persen dengan capaian 100 persen. Indikator Persentase Izin Usaha Industri yang memiliki kesesuaian persyaratan teknis target 100 persen dengan capaian 100 persen. Indikator Persentase data Industri yang terdaftar dalam SIINas target 85 persen dengan capaian Sehingga capain rata-rata pada indikator kinerja program Dinas Perindustrian dan Perdagangan ialah 99,18 Persen atau dengan predikat kerja Sangat Tinggi.

2.2.3.3.4 Kehutanan

2.2.3.3.4.1 Dinas Kehutanan

Capaian kinerja Urusan Kehutanan dapat dilihat dari capaian indikator kinerja utama Dinas Kehutanan Tahun 2023. Perbandingan target terhadap capaian indikator kinerja utama Dinas Kehutanan yang mempunyai tiga indikator. Indikator Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) mempunyai target 23,67 persen dengan capaian 111,74 persen. Persentase Luas Tutupan Lahan di Luar Kawasan Hutan Negara dan TAHURA mempunyai target 8,65 persen dengan capaian 105,09 persen. Persentase Luas Fasilitasi Pengusulan Akses Legal kepada Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan melalui Perhutanan Sosial mempunyai target 2,06 persen dengan capain 214,08 persen seperti yang terlihat pada Gambar berikut ini.

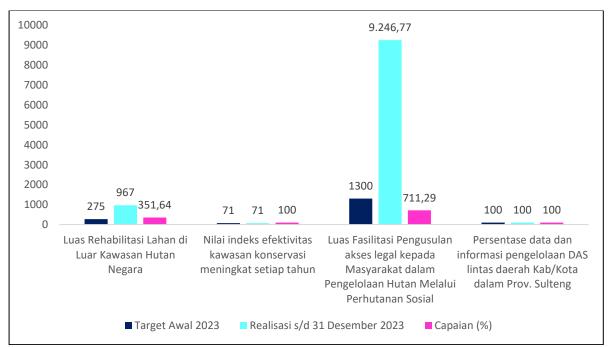


Sumber : Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, 2023 (data diolah kembali)

Gambar 2.107

Perbandingan Target terhadap Capaian Indikator Kinerja Utama Urusan Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

Indikator kinerja Dinas Kehutanan lainnya dapat dilihat pada indikator kinerja program pada Gambar di bawah ini.



Sumber: Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, 2023 (data diolah kembali)

Gambar 2.108

Perbandingan Target RKPD terhadap Indikator Kinerja Program (Outcome)
Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

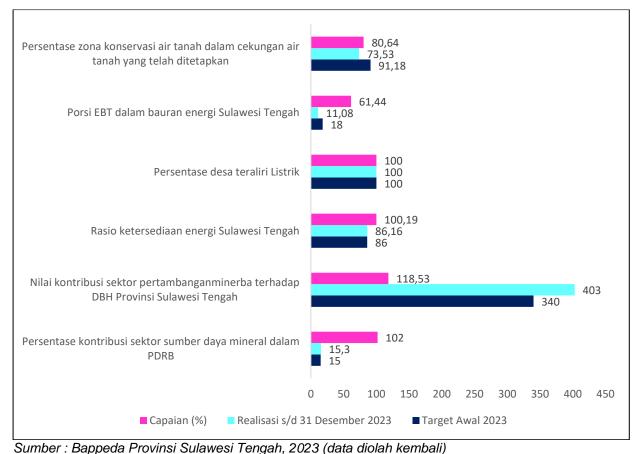


Gambar diatas menunjukkan perbandingan target, realisasi, dan capaian terhadap indikator kinerja program Dinas Kehutanan yang mempunyai beberapa indikator. Indikator Luas Rehabilitasi Lahan di Luar Kawasan Hutan Negara mempunyai target 275 Hektar dengan capain 352,64 persen. Indikator Nilai indeks efektivitas kawasan konservasi meningkat setiap tahun mempunyai target 71 persen dengan capaian 100 persen. Indikator Luas Fasilitasi Pengusulan akses legal kepada Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Melalui Perhutanan Sosial mempunyai target 1300 hektar dengan capaian 711,29 persen. Indikator Persentase data dan informasi pengelolaan DAS lintas daerah Kab/Kota dalam Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai target 100 persen dengan capaian 100 persen. Sehingga rata-rata capaian indikator Kinerja Program pada Dinas Kehutanan ialah 315,73 persen dengan predikat kinerja 'Sangat Tinggi'.

2.2.3.3.5 Energi dan Sumberdaya Mineral

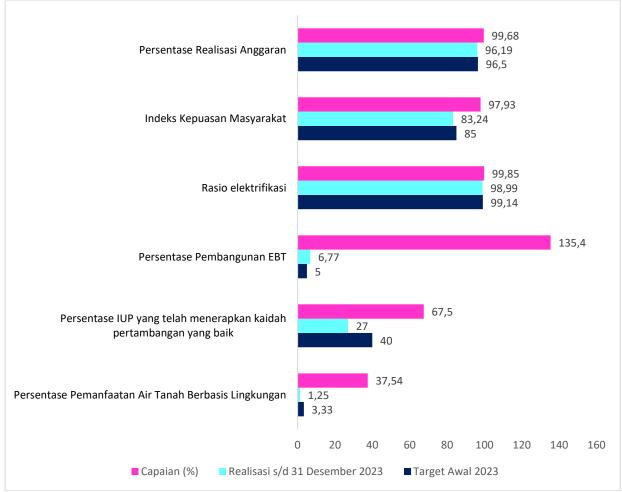
2.2.3.3.5.1 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Capaian kinerja Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral dapat dilihat dari capaian indikator kinerja utama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2023. Capaian Indikator Kinerja Utama pada Dinas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang mana pada indikator Persentase kontribusi sektor sumber daya mineral dalam PDRB mempunyai target 15 persen dengan capaian 102 persen. Indikator Nilai kontribusi sektor pertambanganminerba terhadap DBH Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai target 340 persen dengan capaian 118,52 persen. Indikator Rasio ketersediaan energi Sulawesi Tengah mempunyai target 86 persen dengan capaian 119 persen. Indikator Persentase desa teraliri Listrik mempunyai target 100 persen dengan capaian 100 persen. Indikator Porsi EBT dalam bauran energi Sulawesi Tengah mempunyai target 18 persen dengan capaian 61,44 persen. Indikator Persentase zona konservasi air tanah dalam cekungan air tanah yang telah ditetapkan mempunyai target 91,18 persen dengan capaian 80,64 persen. Sehingga rata-rata capaian kinerja indikator kinerja utama ialah 93,82 persen. Hal ini dapat dilihat pada Gambar berikut ini.



Gambar 2.109 Perbandingan Target terhadap Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

Indikator kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral lainnya dapat dilihat pada indikator kinerja program dengan perbandingan target, realisasi, dan capaian. Pada Indikator Persentase Pemanfaatan Air Tanah Berbasis Lingkungan mempunyai target 3,33 persen dengan capaian 37,54 persen. Indikator Persentase IUP yang telah menerapkan kaidah pertambangan yang baik mempunyai target 40 persen dengan capaian 67,5 persen. Indikator Persentase Pembangunan EBT mempunyai target 5 persen dengan capaian 135,4. Indikator Rasio Elektrifikasi mempunyai target 99,14 persen dengan capaian 99,85 persen. Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat mempunyai target 85 indeks dengan capaian 97,93 persen. Indikator Persentase Realisasi Anggaran mempunyai target 96,5 persen dengan capaian 99,63 persen. Sehingga rata-rata capaian kinerja program ialah 89,65 persen dengan predikat kinerja 'Tinggi'. Hal ini terlihat jelas pada Gambar di bawah ini.



Sumber: Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, 2023 (data diolah kembali)

Gambar 2.110

Perbandingan Target RKPD terhadap Indikator Kinerja Program (Outcome) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

2.2.3.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Unsur pendukung urusan pemerintahan merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Urusan ini diampuh oleh Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.

2.2.3.4.1 Sekretariat Daerah

Penyelenggaraan pembangunan pada tahun 2023 pada sekretariat daerah dilaksanakan oleh Sembilan Biro yakni Biro Organisasi, Biro Umum, Biro Hukum, Biro Administrasi Pimpinan, Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Biro Perekonomian, Biro Kesejahteraan Rakyat, Biro Administrasi Pembangunan, dan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah



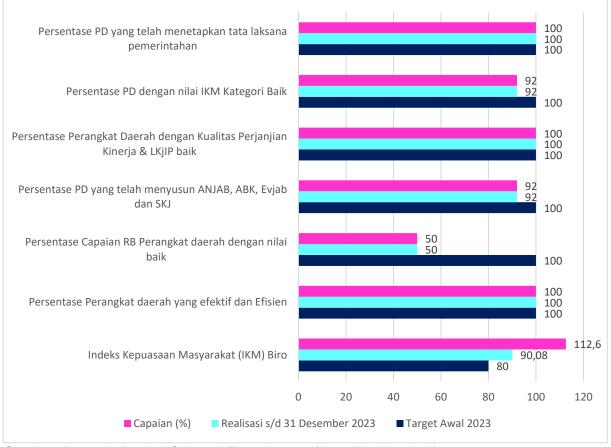
2.2.3.4.1.1 Biro Organisasi

Capaian kinerja Biro Organisasi Tahun 2023 dapat dilihat dari capaian indikator kinerja utama pada Gambar berikut ini.



Gambar 2.111 Perbandingan Target terhadap Capaian Indikator Kinerja Utama Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

Gambar diatas menunjukkan Capaian Indikator Kinerja Utama pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah yang mana pada indikator Indeks Reformasi Birokrasi Pemda mempunyai target 66,5 indeks dengan capaian 93,44 persen. Indikator Indeks Kematangan Organisasi mempunyai target 30 indeks dengan capaian 113,67 persen. Indikator Persentase Penataan Jabatan ASN sesuai Kebutuhan Perangkat Daerah mempunyai target 100 persentase dengan capaian 92 persen. Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mempunyai target 85 indeks dengan capaian 101,18 persen. Sehingga rata-rata capaian indikator Kinerja Utama pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah ialah 102,17 persen. Indikator kinerja lainnya dapat dilihat pada indikator kinerja program seperti pada Gambar dibawah ini.



Sumber: Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, 2023 (data diolah kembali) **Gambar 2.112**

Perbandingan Target RKPD terhadap Indikator Kinerja Program (Outcome) Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

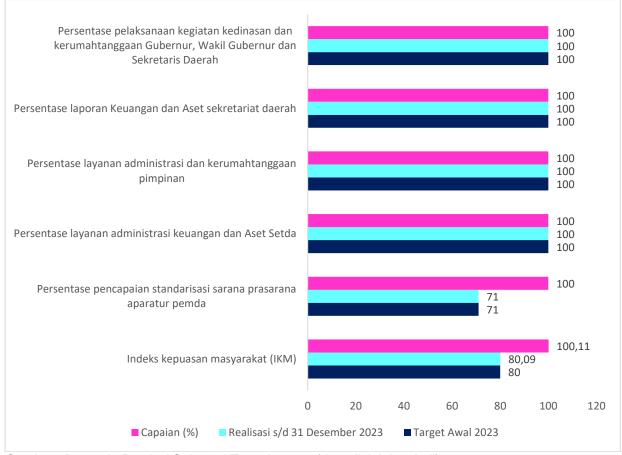
Gambar diatas menunjukkan indikator kinerja program Biro Organisasi Sekretariat Daerah yang mempunyai sembilan indikator. Indikator Nilai SAKIP mempunyai target 80 nilai dengan capaian 0 persen. Indikator Indeks Reformasi Birokrasi Biro mempunyai target 64 indeks dengan capain 0 persen. Indikator Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM) Biro mempunyai target 80 indeks dengan capaian 112.6 persen. Indikator Persentase Perangkat daerah yang efektif dan Efisien mempunyai target 100 persen dengan capaian 100 persen. Indikator Persentase Capaian RB Perangkat daerah dengan nilai baik mempunyai target 100 persen dengan capaian 50 persen. Indikator Persentase PD yang telah menyusun ANJAB, ABK, Evjab dan SKJ mempunyai target 100 persen dengan capaian 92 persen. Indikator Persentase Perangkat Daerah dengan Kualitas Perjanjian Kinerja & LKjIP baikmempunyai target 100 persen dengan capaian 100 persen. Indikator Persentase PD dengan nilai IKM Kategori Baikmempunyai target 100 persen dengan capaian 92 persen. Indikator Persentase PD yang telah menetapkan tata laksana pemerintahan mempunyai target



100 persen dengan capaian 100 persen. Sehingga rata-rata capaian indikator Kinerja Program pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah ialah **92,37 persen** dengan predikat kinerja 'sangat tinggi'.

2.2.3.4.1.2 Biro Umum

Capaian kinerja Biro Umum dapat dilihat dari capaian indikator kinerja utama yang terlihat pada Gambar 2.76. Capaian Indikator Kinerja Utama pada Biro Umum Sekretariat Daerah yang mana pada Indikator Indeks kepuasan masyarakat (IKM) mempunyai target 80 indeks dengan capaian 100,11 persen. Indikator Persentase pencapaian standarisasi sarana prasarana aparatur pemda mempunyai target 71 persen dengan capaian 100 persen. Indikator Persentase layanan administrasi keuangan dan Aset Setda mempunyai target 100 persen dengan capaian 100 persen. Indikator Persentase layanan administrasi dan kerumahtanggaan pimpinan mempunyai target 100 persen dengan capaian 100 persen. Indikator Persentase laporan Keuangan dan Aset sekretariat daerah mempunyai target 100 persen dengan capaian 100 persen. Indikator Persentase pelaksanaan kegiatan kedinasan dan kerumahtanggaan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah mempunyai target 100 persen dengan capaian 100 persen. Sehingga rata-rata capaian indikator Kinerja Utama pada Biro Umum Sekretariat Daerah ialah 100,02 persen seperti yang terlihat pada Gambar berikut ini.



Sumber: Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, 2023 (data diolah kembali)

Gambar 2.113 Perbandingan Target terhadap Capaian Indikator Kinerja Utama Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

Indikator kinerja lainnya dapat dilihat pada indikator kinerja program Biro Umum seperti yang terlihat pada Gambar berikut ini.



Sumber: Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, 2023 (data diolah kembali)

Gambar 2.114

Perbandingan Target RKPD terhadap Indikator Kinerja Program (Outcome) Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023



Gambar diatas menunjukkan indikator kinerja program Biro Umum Sekretariat Daerah. Indikator Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM) mempunyai target 80 indeks dengan capaian 100,11 persen. Sehingga rata-rata capaian indikator Kinerja Program pada Biro Umum Sekretariat Daerah ialah 100,11 persen dengan predikat kinerja 'Sangat Tinggi'.

2.2.3.4.1.3 Biro Hukum

Capaian kinerja Biro Umum dapat dilihat dari capaian indikator kinerja utama yang terlihat pada Gambar 2.78. Capaian Indikator Kinerja Utama pada Biro Hukum Sekretariat Daerah terdapat Indikator Rata-rata Capaian Target Pembangunan Bidang Hukum Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai target 80 persen dengan capaian 125 persen. Indikator Nilai/Skor Rencana Aksi HAM Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai target 80 persen dengan capaian 125 persen. Sehingga rata-rata capaian indikator Kinerja Utama pada Biro Hukum Sekretariat Daerah ialah 125 persen seperti yang terlihat pada Gambar di bawah ini.

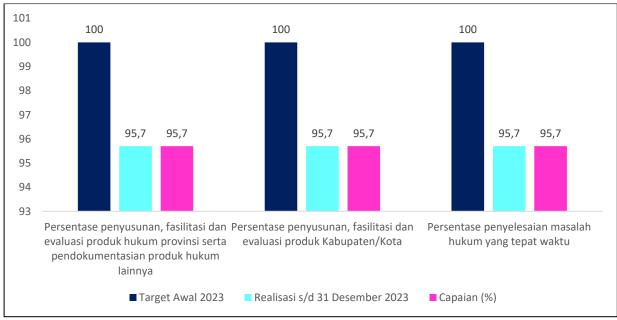


Sumber: Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, 2023 (data diolah kembali)

Gambar 2.115

Perbandingan Target terhadap Capaian Indikator Kinerja Utama Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

Indikator kinerja lainnya dapat dilihat pada indikator kinerja program Biro Hukum seperti yang terlihat pada Gambar berikut ini.



Sumber: Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, 2023 (data diolah kembali) **Gambar 2.116**

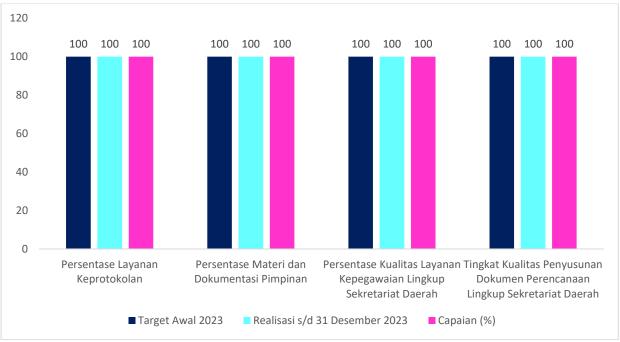
Perbandingan Target RKPD terhadap Indikator Kinerja Program (Outcome) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

Gambar diatas menunjukkan indikator kinerja program Biro Hukum Sekretariat Daerah. Indikator Persentase penyusunan, fasilitasi dan evaluasi produk hukum provinsi serta pendokumentasian produk hukum lainnya mempunyai target 100 persen dengan capain 95,7 persen. Indikator Persentase penyusunan, fasilitasi dan evaluasi produk Kabupaten/Kota mempunyai target 100 persen dengan capaian 95,7 persen. Indikator Persentase penyelesaian masalah hukum yang tepat waktu mempunyai target 100 persen dengan capaian 95,7 persen. Sehingga rata-rata capaian indikator Kinerja Program pada Biro Hukum Sekretariat Daerah ialah 95,7 persen dengan predikat kinerja 'Sangat Tinggi'.

2.2.3.4.1.4 Biro Administrasi Pimpinan

Capaian kinerja Biro Administrasi Pimpinan Tahun 2023 dapat dilihat dari capaian indikator kinerja utama pada Gambar berikut ini.

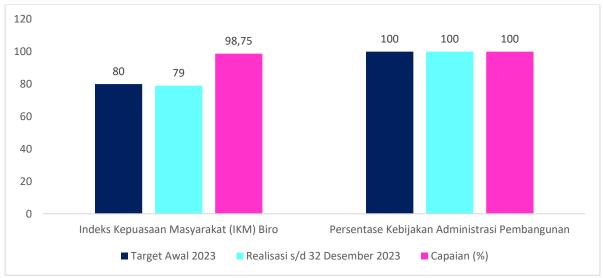




Sumber: Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, 2023 (data diolah kembali) **Gambar 2.117**

Perbandingan Target terhadap Capaian Indikator Kinerja Utama Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

Gambar diatas menunjukkan Capaian Indikator Kinerja Utama pada Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah yang mana pada Indikator Persentase Layanan Keprotokolan mempunyai target 100 persen dengan capaian 100 persen. Persentase Materi dan Dokumentasi Pimpinan mempunyai target 100 persen dengan capaian 100 persen. Indikator Persentase Kualitas Layanan Kepegawaian Lingkup Sekretariat Daerah mempunyai target 100 persen dengan capaian 100 persen. Indikator Tingkat Kualitas Penyusunan Dokumen Perencanaan Lingkup Sekretariat Daerah mempunyai target 100 persen dengan capaian 100 persen. Sehingga rata-rata capaian indikator Kinerja Utama pada Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah ialah 100 persen. Indikator kinerja lainnya dapat dilihat pada indikator kinerja program Biro Administrasi Pimpinan seperti yang terlihat pada Gambar berikut ini.



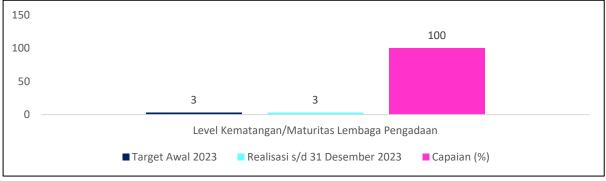
Sumber: Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, 2023 (data diolah kembali)

Gambar 2.118
Perbandingan Target RKPD terhadap Indikator Kinerja Program (Outcome)
Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

Gambar diatas menunjukkan indikator kinerja program Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah. Indikator Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM) Biro mempunyai target 80 indeks dengan capaian 98,75 persen. Indikator Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan mempunyai target 100 persen dengan capaian 100 persen. Sehingga rata-rata capaian indikator Kinerja Program pada Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah ialah 99,38 persen dengan predikat kinerja 'Sangat Tinggi'.

2.2.3.4.1.5 Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Capaian kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2023 dapat dilihat dari capaian indikator kinerja utama pada Gambar berikut ini.



Sumber: Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, 2023 (data diolah kembali)

Gambar 2.119

Perbandingan Target terhadap Capaian Indikator Kinerja Utama Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

Gambar diatas menunjukkan Capaian Indikator Kinerja Utama pada Biro Perdagangan dan Jasa yang mana pada indikator Level Kematangan/Maturitas Lembaga Pengadaan mempunyai target 3 level dengan capaian 100 persen. Sehingga rata-rata capaian indikator Kinerja Utama pada Biro Perdagangan dan Jasa ialah 100 persen. Selain itu, capaian indikator kinerja lainnya terdapat pada indikator kinerja program seperti yang terlihat pada Gambar berikut ini.



Sumber: Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, 2023 (data diolah kembali)

Gambar 2.120 Perbandingan Target RKPD terhadap Indikator Kinerja Program (Outcome) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah **Tahun 2023**

Gambar diatas menunjukkan indikator kinerja program Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Indikator Indeks kepuasan masyarakat mempunyai target 80 indeks dengan capaian 104,9 persen. Persentase realisasi anggaran mempunyai target 90 persen dengan capain 109,27 persen. Indikator Persentase Tingkat Penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa mempunyai target 90 persen dengan capaian 103,93 persen. Sehingga rata-rata capaian indikator Kinerja Program pada Biro Perdagangan dan Jasa ialah 106,03 persen dengan predikat kinerja 'Sangat Tinggi'.

2.2.3.4.1.6 Biro Perekonomian

Capaian kinerja Biro Perekonomian Tahun 2023 dapat dilihat dari capaian indikator kinerja utama pada Gambar berikut ini.



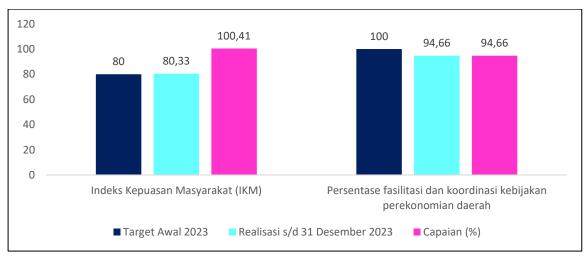


Sumber : Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, 2023 (data diolah kembali)

Gambar 2.121

Perbandingan Target terhadap Capaian Indikator Kinerja Utama Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

Gambar diatas menunjukkan Capaian Indikator Kinerja Utama pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah yang mana pada indikator Persentase fasilitasi dan koordinasi kebijakan perekonomian daerah mempunyai target 100 persen dengan capaian 94,66 persen. Indikator inflasi mempunyai target 3,1 persen dengan capaian 75,81 persen. Indikator pengeluaran perkapita mempunyai target 10,014 Ribu/Org/Thn dengan capaian 101,35 persen. Sehingga rata-rata capaian indikator Kinerja Utama pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah ialah 90,60 persen. Selain itu, capaian indikator kinerja lainnya terdapat pada indikator kinerja program seperti yang terlihat pada Gambar berikut ini.



Sumber: Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, 2023 (data diolah kembali)

Gambar 2.122

Perbandingan Target RKPD terhadap Indikator Kinerja Program (Outcome) Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023



Gambar diatas menunjukkan indikator kinerja program Biro Perekonomian Sekretariat Daerah. Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mempunyai target 80 dengan capaian 100,41 persen. Indikator Persentase fasilitasi dan koordinasi kebijakan perekonomian daerah mempunyai target 100 persen dengan capaian 94,66 persen. Sehingga rata-rata capaian indikator Kinerja Program pada Biro Perekonomian ialah 106,03 persen atau dengan predikat kinerja 'Sangat Tinggi'.

2.2.3.4.1.7 Biro Kesejahteraan Masyarakat

Capaian kinerja Biro Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2023 dapat dilihat dari capaian indikator kinerja utama, yang mana pada indikator Presentase Lembaga dan Yayasan Keagamaan yang terdaftar di Kemenkumham yang diberikan bantuan mempunyai target 3 persen dengan capaian 3 persen. Indikator Presentase Kelembagaan Rumah Ibadah yang diberikan bantuan mempunyai target 8 persen dengan capaian 8 persen. Indikator Persentase kebijakan dan program pelayanan dasar yang terfasilitasi mempunyai target 100 persen dengan capaian 100 persen. Sehingga rata-rata capaian indikator Kinerja Utama pada Biro Kesejahteraan Masyarakat ialah 100 persen. Seperti yang terlihat pada Gambar di bawah ini.



Sumber: Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, 2023 (data diolah kembali)

Gambar 2.123 Perbandingan Target terhadap Capaian Indikator Kinerja Utama Biro Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah

Adapun capaian indikator kinerja lainnya terdapat pada indikator kinerja program seperti yang terlihat pada Gambar berikut ini.

Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023



Sumber: Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, 2023 (data diolah kembali)

Gambar 2.124 Perbandingan Target RKPD terhadap Indikator Kinerja Program (Outcome) Biro Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

Gambar diatas menunjukkan indikator kinerja program Biro Kesejahteraan Masyarakat. Indikator Presentase Lembaga dan Yayasan Keagamaan yang terdaftar di Kemenkumham yang diberikan bantuan mempunyai target 3 persen dengan capaian 100 persen. Indikator Presentase Kelembagaan Rumah Ibadah yang diberikan bantuan mempunyai target 8 persen dengan capaian 87,5 persen. Indikator Persentase kebijakan dan Program Pelayanan dasar dan yang terfasilitasi mempunyai target 100 persen dengan capaian 96 persen. Indikator Persentase kebijakan dan Program Non Pelayanan dasar dan yang terfasilitasi mempunyai target 100 persen dengan capaian Sehingga rata-rata capaian indikator Kinerja Program pada Biro 97 persen. Kesejahteraan Masyarakat ialah 95,12 persen dengan predikat kinerja 'Sangat Tinggi'.

2.2.3.4.1.8 Biro Administrasi Pembangunan

Capaian kinerja Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2023 dapat dilihat dari capaian indikator kinerja utama pada Gambar berikut ini.



Sumber: Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, 2023 (data diolah kembali)

Gambar 2.125

Perbandingan Target terhadap Capaian Indikator Kinerja Utama Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

Gambar diatas menunjukkan Capaian Indikator Kinerja Utama pada Biro Administrasi Pembangunan yang mana pada indikator Persentase Capaian Kinerja dan Capaian Penyerapan Anggaran Perangkat Daerah mempunyai target 100 persen dengan capaian 98,57 persen. Indikator Persentase Pembinaan, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan mempunyai target 100 persen dengan capaian 96,73 persen. Sehingga rata-rata capaian indikator Kinerja Utama pada Biro Administrasi Pembangunan ialah 97,65 persen. Adapun indikator kinerja program dapat dilihat pada Gambar dibawah ini.



Sumber: Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, 2023 (data diolah kembali)

Gambar 2.126

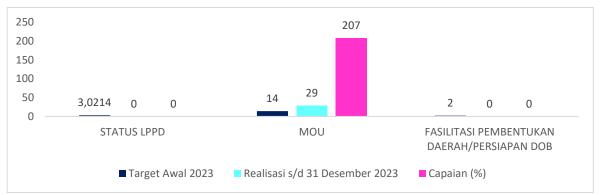
Perbandingan Target RKPD terhadap Indikator Kinerja Program (Outcome) Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023



Gambar diatas menunjukkan indikator kinerja program Biro Administrasi Pembangunan. indikator Terlaksananya administrasi Perkantoran yang mempunyai target 100 persen dengan capaian 96,73 persen. Sehingga rata-rata capaian indikator Kinerja Program pada Biro Administrasi Pembangunan ialah 96,73 persen dengan predikat kinerja 'Sangat Tinggi'.

2.2.3.4.1.9 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Capaian kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Tahun 2023 dapat dilihat dari capaian indikator kinerja utama pada Gambar berikut ini.



Sumber : Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, 2023 (data diolah kembali)

Gambar 2.127 Perbandingan Target terhadap Capaian Indikator Kinerja Utama Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

Gambar diatas menunjukkan Capaian Indikator Kinerja Utama pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang mana pada indikator Status Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) mempunyai target 3,0214 nilai dengan capaian masih menunggu hasil penilaian Kemendagri. Indikator MOU mempunyai target 14 dokumen KSDPK, KSDD dan SINERGI dengan capaian 207 persen. Indikator Fasilitasi Pembentukan Daerah/Persiapan DOB mempunyai target 2 dokumen dengan capaian yang masih menunggu hasil kajian monitorium usulan dokumen. Sehingga rata-rata capaian indikator Kinerja Utama pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah ialah 207,14 persen. Adapun indikator kinerja program dapat dilihat pada Gambar dibawah ini.





Sumber: Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, 2023 (data diolah kembali)

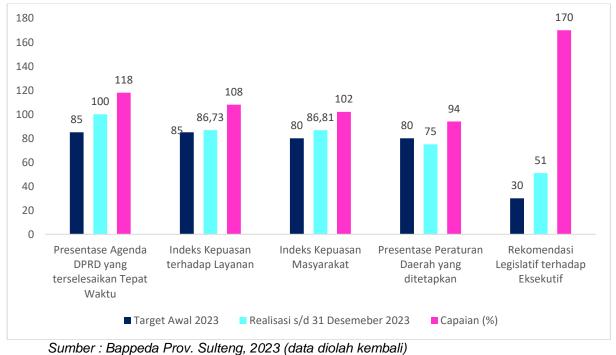
Gambar 2.128 Perbandingan Target RKPD terhadap Indikator Kinerja Program (Outcome) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

Gambar diatas menunjukkan indikator kinerja program Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah. indikator Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah mempunyai target 100 persen dengan capaian 0 persen. Indikator Persentase Capaian Penyelenggraan Pemerintahan Dan Otonomi Daerah mempunyai target 100 persen dengan capaian 100 persen. Sehingga rata-rata capaian indikator Kinerja Program pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah ialah 100 persen dengan predikat kinerja 'Sangat Tinggi'.

2.2.3.4.2 Sekretariat DPRD

Capaian Indikator kinerja Utama dalam Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Sekertariat Dewan dapat dilihat melalui Indikator kinerja Utama yaitu Presentase Agenda DPRD yang terselesaikan Tepat Waktu target awal 85 Persen dengan capaian 1187,64 Persen, Indeks Kepuasan terhadap Layanan target 85 Indeks dengan capain 102,03 Persen, Indeks Kepuasan Masyarakat target 80 Indeks dengan capain 108,51 Persen, Presentase Peraturan Daerah yang ditetapkan Target 80 Persen dengan capain 93,75 Persen, dan Rekomendasi Legislatif terhadap Eksekutif Target 30 Keputusan dengan capain 170 Persen. Sehingga rata-rata capaian kinerja utama ialah 118,38 persen. Hal ini dapat dilihat pada Gambar dibawah ini.



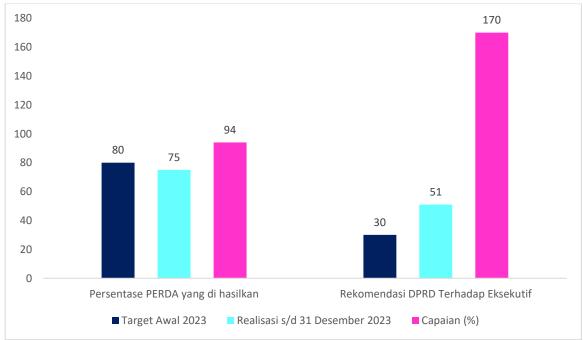


Gambar 2.129 Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Sekertariat Dewan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

Berdasarkan hasil evaluasi RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 dapat diketahui untuk capaian indikator kinerja utama Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Sekertariat Dewan pada Tahun 2023 secara umum 4 (empat) Indikator yang berhasil.

Capaian Indikator kinerja Program dalam Unsur Pendukung Pemerintahan yang dilaksanakan Sekertariat Dewan dapat dilihat melalui Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan beberapa capaian indikator yaitu Presentase perda yang dihasilkan dari target 80 Persen, dengan Realisasi Capaian sebesar 94 Persen, Selanjutnya Indikator rekomendasi DPRD terhadap eksekutif dari Target 30 Keputusan, dan dengan Realisasi Capaian sebesar 170 Persen, yang menunjukkan capaian kinerja telah melebihi target RKPD, Seperti pada Gambar berikut ini:





Sumber : Bappeda Prov. Sulteng, 2023 (data diolah kembali)

Gambar 2.130

Capaian Indikator Kinerja Program Sekertariat Dewan

Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

Berdasarkan hasil evaluasi RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 dapat diketahui untuk capaian kinerja Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Sekertariat Dewan pada Tahun 2023 secara umum telah mencapai 132 persen dengan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja masuk dalam kategori 'Sangat Tinggi'.

2.2.3.5 Penunjang Urusan Pemerintahan Provinsi

Penunjang urusan pemerintahan provinsi merupakan unsur yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (operating core) atau dapat dikatakan sebagai satuan kerja Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan bagi organisasi Perangkat Daerah lain, meliputi pelaksanaan fungsi perencanaan, keuangan, kepegawaian, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



2.2.3.5.1 Perencanaan

2.2.3.5.1.1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Capaian kinerja dalam urusan Perencanaan Pembangunan dapat dilihat melalui beberapa capaian indikator kinerja Utama antara lain yaitu; Indeks Reformasi Birokrasi target 66,5 Indeks dengan capaian 93,44 Persen, Nilai Sakip Target 77 Indeks dengan capaian 93.25 Persen, dan Indeks Perencanaan Pembangunan target 74 Indeks dengan capaian 100,07 Persen. Hal ini terlihat pada Gambar dibawah ini.



Sumber: Bappeda Prov. Sulteng, 2023 (data diolah kembali) **Gambar 2.131** Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

Capaian kinerja dalam urusan Perencanaan Pembangunan dapat dilihat melalui beberapa capaian indikator antara lain yaitu Indikator Presentase Capaian Tujuan RPJMD, Indikator Capaian sasaran Perangkat Daerah, dan Indikator Persentase Capaian Sasaran Program yang mempunyai target 100 Persen dengan capaian 100 persen. Capaian kinerja urusan Perencanaan Pembangunan dapat dilihat pada Gambar berikut:



Sumber: Bappeda Prov. Sulteng, 2023 (data diolah kembali) **Gambar 2.132** Capaian Indikator Kinerja Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

Berdasarkan hasil evaluasi RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 dapat diketahui untuk capaian kinerja urusan Perencanaan Pembangunan pada Tahun 2023 secara umum telah mencapai 100 persen dengan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja masuk dalam kategori 'Sangat Tinggi'.

2.2.3.5.2 Penelitian dan Pengembangan

2.2.3.5.2.1 Badan riset dan inovasi Daerah

Capaian kinerja dalam urusan Penelitian dan Pengembangan dapat dilihat melalui beberapa capaian indikator kinerja Utama adalah Meningkatkan Hasil Penelitian dan Pengembangan yang di Manfaatkan target 10 Kajian dengan capaian 110 Persen, dan Meningkatkan Sistem Inovasi Provinsi Sulawesi Tengah untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah Target 10 inovasi dengan capaian 180 Persen seperti yang terllihat pada Gambar berikut ini.





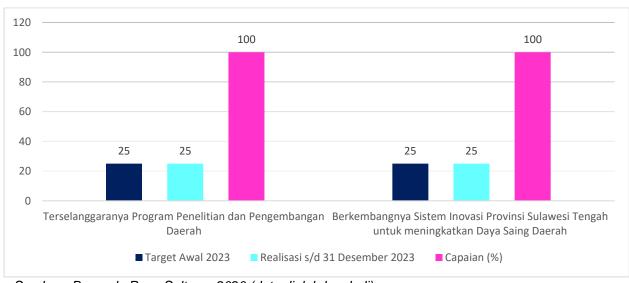
Sumber : Bappeda Prov. Sulteng, 2023 (data diolah kembali)

Gambar 2.133

Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

Berdasarkan hasil evaluasi RKPD Provinsi Sulawesi pada Tahun 2023 dapat diketahui untuk capaian Indikator Kinerja Utama urusan Penelitian dan Inovasi Tahun 2023 secara umum telah mencapai 145 persen dengan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja masuk dalam kategori 'Sangat Tinggi'

Capaian kinerja dalam urusan Penelitian dan Inovasi Daerah dapat dilihat melalui beberapa capaian indikator antara lain yaitu Terselanggaranya Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Target 25 Persen dengan Capaian 100 Persen, dan Berkembangnya Sistem Inovasi Provinsi Sulawesi Tengah untuk meningkatkan Daya Saing Daerah dari Target 25 Persen dengan Capaian 100 Persen. Capaian kinerja urusan Penelitian dan Pengembangan lainnya dapat dilihat pada Grafik berikut:



Sumber: Bappeda Prov. Sulteng, 2020 (data diolah kembali)



Gambar 2.134 Capaian Indikator Kinerja Program Badan Riset dan inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

Berdasarkan hasil evaluasi RKPD Provinsi Sulawesi pada Tahun 2023 dapat diketahui untuk capaian kinerja program urusan Penelitian dan Inovasi Tahun 2023 secara umum telah mencapai **100 persen** dengan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja masuk dalam kategori 'Sangat Tinggi'.

2.2.3.5.2 **Keuangan**

2.2.3.5.2.1 Badan Pendapatan Daerah

Capaian kinerja dalam urusan Keuangan dapat dilihat melalaui indikator kinerja utama Badan Pendapatan Daerah, indikator ini juga merupakan indikator kinerja program Badan Pendapatan yaitu Persentase PAD Terhadap Pendapatan yang mempunyai target 30, 57 Persen dengan capaian 123,65 Persen Oleh karena itu, berdasarkan hasil evaluasi RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 dapat diketahui untuk capaian kinerja urusan Keuangan pada Tahun 2023 secara umum mempunyai capaian 123,65 Persen masuk dalam kategori 'Sangat Tinggi'. Hal ini terlihat pada Gambar dibawah ini.



Sumber: Bappeda Prov. Sulteng, 2020 (data diolah kembali)

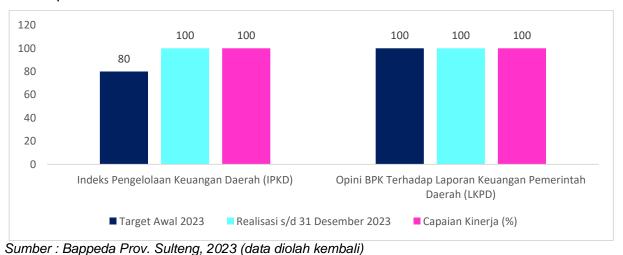
Gambar 2.135 Capaian Indikator Kinerja Utama dan Program Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

2.2.3.5.2.2 Badan Pengelola Keuangan dan aset daerah

Capaian kinerja dalam urusan Keuangan dapat dilihat melalui beberapa capaian indikator kinerja utama yaitu Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) target **Kategori c** dengan capai **Kategori B** (100 Persen), dan Opini BPK terhadap

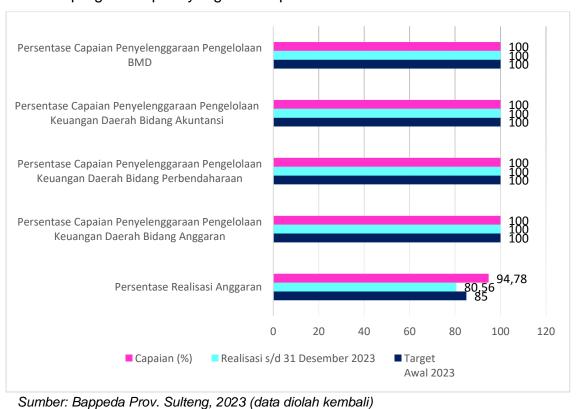


Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang mempunyai target **WTP** dengan capaian **WTP** (100 Persen). Sehingga rata-rata capaian ialah 100 persen seperti yang terlihat pada Gambar dibawah ini.



Gambar 2.136
Capaian Indikator Kinerja Utama
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

Capaian kinerja dalam urusan Keuangan dapat dilihat melalui beberapa capaian indikator program seperti yang terlihat pada Gambar dibawah ini.



Gambar 2.137
Capaian Indikator Kinerja Program
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

Pada Gambar diatas terlihat indikator Persentase Realisasi anggaran Target 85 Persen dengan capaian 94,78 Persen, Persentase Capaian Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Anggaran Target 100 Persen dengan capaian 100 Persen, Persentase Capaian Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Perbendaharaan Target 100 Persen dengan capaian 100 Persen, Persentase Capaian Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Akuntansi Target 100 Persen dengan capaian 100 Persen, dan Persentase Capaian Penyelenggaraan Pengelolaan BMD Target 100 Persen dengan capaian 100 Persen. Sehingga berdasarkan hasil evaluasi RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 dapat diketahui untuk capaian kinerja urusan Keuangan pada Tahun 2023 secara umum masih dibawah target dengan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan nilai 98,96 Persen masuk dalam kategori 'Sangat Tinggi".

2.2.3.5.3 Kepegawaian

2.2.3.5.3.1 Badan Kepegawaian Daerah

Capaian kinerja dalam urusan Kepegawaian dapat dilihat melalui beberapa capaian indikator kinerja Utama yaitu Indeks Profesionalitas ASN Target 45,68 Indeks dengan capaian 130,40 Persen, dan Indeks Sistem Merit target 200 Nilai dengan capaian 115,50 Persen seperti yang terlihat pada Gambar berikut ini.



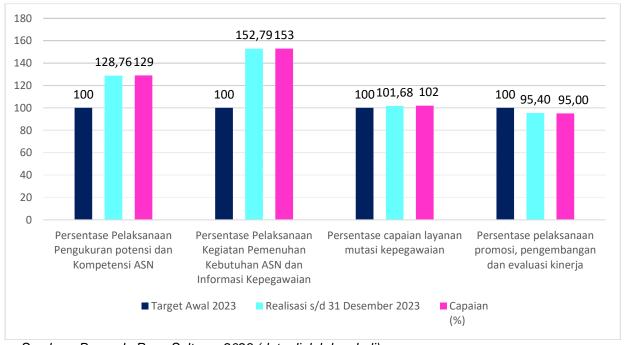
Gambar 2.138
Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Daerah

Capaian kinerja program dalam urusan Kepegawaian dapat dilihat melalui beberapa capaian indikator antara lain yaitu Persentase Pelaksanaan Pengukuran potensi dan Kompetensi ASN mempunyai target 100 Persen dengan capaian 129 Persen, Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan ASN dan Informasi

Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023



Kepegawaian mempunyai Target 100 Persen dengan capaian 152,79 Persen. Persentase capaian layanan mutasi kepegawaian mempunyai target 100 Persen dengan capaian 102 Persen, Persentase pelaksanaan promosi, pengembangan dan evaluasi kinerja target 100 Persen dengan capaian 95 Persen. Capaian kinerja urusan kepegawaian lainnya dapat dilihat pada Gambar berikut:



Sumber: Bappeda Prov. Sulteng, 2023 (data diolah kembali) **Gambar 2.139** Capaian Indikator Kinerja Program Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

Berdasarkan hasil evaluasi RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 dapat diketahui untuk capaian kinerja urusan Kepegawaian Tahun 2023 secara umum telah mencapai 119,75 persen dengan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja masuk dalam kategori 'Sangat Tinggi'.

2.2.3.5.4 Pendidikan dan Pelatihan

2.2.3.5.4.1 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Capaian kinerja dalam urusan Pendidikan dan Pelatihan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah yang belum mencapai target dapat dilihat melalui beberapa capaian indikator kinerja utama yaitu Jumlah Akreditasi Program Pengembangan Kompetensi target 5 Program dengan capai 80 Persen, Grade Akreditasi Lembaga Pengembangan Kompetensi target Grade B dengan capaian Grade B (100 Persen), Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan target Jp 14 dengan Capaian 75 Persen, Jumlah Jenis Sertifikasi Kompetensi target 3 persen dengan capaian 67 Persen, Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal target 25,34 Persen dengan capaian 150 Persen, dan Jumlah Program Pengembangan Kompetensi yang dilaksanakan target 15 Persen dengan capaian 100 Persen seperti yang terlihat pada Gambar dibawah ini.



Sumber : Bappeda Prov. Sulteng, 2023 (data diolah kembali)

Gambar 2.140
Capaian Indikator Kinerja Utama
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

Capaian kinerja dalam urusan Pendidikan dan Pelatihan dapat juga dilihat melalui capaian indikator kinerja program yaitu Persentase Pemenuhan Kompetensi ASN Provinsi Sulawesi Tengah yang mempunyai target 25,3 Persen dengan capaian 150 Persen.



Sumber: Bappeda Prov. Sulteng, 2023 (data diolah kembali)

Gambar 2.141
Capaian Indikator Kinerja Program
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

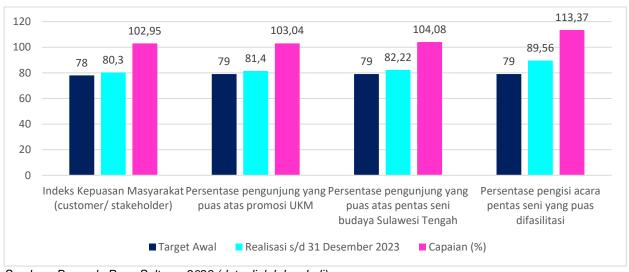


Berdasarkan Gambar diatas, capaian indikator Program Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Darrah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 dapat diketahui mempunyai rata-rata capaian 150 persen dengan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja masuk dalam kategori 'Sangat Tinggi'.

2.2.3.5.5 Penghubung

2.2.3.5.5.1 **Badan Penghubung**

Capaian kinerja dalam urusan Penghubung pada Badan Penghubung dapat dilihat melalui beberapa capaian indikator kinerja Utama yaitu Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (customer/ stakeholder) mempunyai target 78 Persen dengan capaian 102,95 persen. Indikator Persentase pengunjung yang puas atas promosi UKM mempunyai targer 79 Persen dengan capaian 103,04 persen. Indikator Persentase pengunjung yang puas atas pentas seni budaya Sulawesi Tengah mempunyai target 79 Persen dengan capaian 104,08 persen. Indikator Persentase pengisi acara pentas seni yang puas difasilitasi mempunyai target 79 persen dengan capaian 113,86 persen. Sehingga rata-rata capaian indikator kinerja utama ialah 105,86 persen seperti yang terlihat pada Gambar dibawah ini.



Sumber: Bappeda Prov. Sulteng, 2023 (data diolah kembali)

Gambar 2.142 Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

Capaian kinerja dalam urusan Penghubung dapat juga dilihat melalui capaian indikator kinerja program yaitu Indeks kepuasan masyarakat (customer/stakeholder) yang mempunyai target 78 Persen dengan Capaian 102,95 Persen. Sehingga rata-rata capaian kinerja program pada Badan Penghubung ialah 102,95 persen dengan predikat kinerja 'Sangat Tinggi'.

2.2.3.6 **Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan**

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Unsur ini diampuh oleh Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah berperan sebagai Quality Assurance yaitu menjamin bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara efisien, efektif dan sesuai dengan aturannya dalam mencapai tujuan organisasi. Inspektorat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Pengawasan urusan pemerintahan Provinsi dan Kabupaten Kota.

2.2.3.6.1 Inspektorat

Capaian Indikator kinerja Utama dalam Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan yang di laksanakan Inspektorat dapat dilihat melalui beberapa capaian indikator yaitu Indeks Reformasi BiroKrasi target 64 Indeks dengan capaian 108,20 Persen, Persentase Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan kategori A target 33,33 Persen dengan capaian 116,35 Persen, dan Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) target level 3 dengan capaian 100 Persen.



Sumber: Bappeda Prov. Sulteng, 2023 (data diolah kembali)

Gambar 2.143 Capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

Berdasarkan hasil evaluasi RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 dapat diketahui untuk capaian kinerja Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Tahun 2023



secara umum telah mencapai 108,18 persen dengan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja masuk dalam kategori 'Sangat Tinggi'.

Capaian Indikator kinerja Program dalam Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan yang di laksanakan Inspektorat dapat dilihat melalui beberapa capaian indikator yaitu; Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) target 85 Indeks dengan capaian 96,47 Persen, Persentase Realisasi Anggaran target 98 Persen dengan capaian 95,92 Persen, Persentase Capaian Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK target 77 Persen dengan capaian 85,31 persen, Persentase Capaian Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri target 88 persen dengan capaian 103,98 Persen, Persentase Capaian Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat target 80 Persen dengan capaian 87,50 Persen, Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan target 64,1 Persen dengan capaian 196 persen dan Capaian Level kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) target level 3 dengan capaian 100 Persen. Perbandingan Target dan Capaian kinerja Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan dapat dilihat pada Gambar berikut:



Sumber: Bappeda Prov. Sulteng, 2023 (data diolah kembali) Gambar 2.144 Capaian Indikator Kinerja Program Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

Berdasarkan hasil evaluasi RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 dapat diketahui untuk rata-rata capaian kinerja Unsur Pengawasan urusan Pemerintahan



Tahun 2023 secara umum telah mencapai 109,31 persen dengan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja masuk dalam kategori 'Sangat Tinggi'.

2.2.3.7 **Unsur Pemerintahan Umum**

Pemerintahan umum adalah seluruh urusan sisa yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, yang pelaksanaanya di dekonsentrasikan kepada kepala wilayah (sampai tingkat kecamatan). Unsur ini diampuh oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

2.2.3.7.1 Badan Kesatuan Bangsa Politik

Capaian kinerja dalam Unsur Pemerintahan Umum yang di laksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dilihat melalui beberapa capaian indikator kinerja utama yaitu; Persentase Masyarakat yang Paham terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan target 40 Persen dengan capaian 176,43 Persen, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 76,8 Indeks dengan capaian 105,36 Persen, dan Capaian kinerja Unsur Pemerintahan Umum dapat dilihat pada grafik berikut:

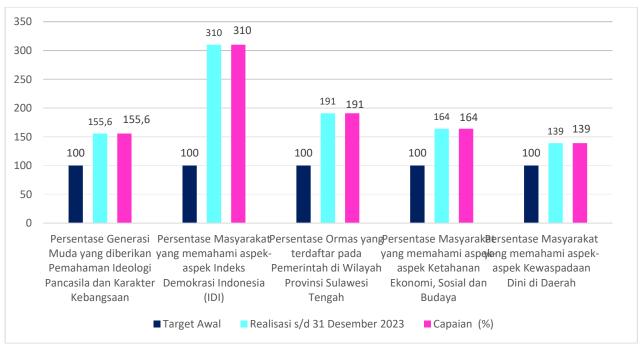


Sumber: Bappeda Prov. Sulteng, 2023 (data diolah kembali)

Gambar 2.145 Capaian Indikator Kinerja Utama Badan kesatuan Bangsa & Politik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

Berdasarkan hasil evaluasi RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 dapat diketahui untuk capaian kinerja Unsur Pemerintahan umumTahun 2023 secara umum telah mencapai 140,89 persen dengan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja masuk dalam kategori 'Sangat Tinggi'.

Capaian kinerja dalam Unsur Pemerintahan Umum yang di laksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dilihat melalui beberapa capaian indikator kinerja program yaitu; Persentase Generasi Muda yang diberikan Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan target 100 Persen dengan capaian 155,6 Persen, Persentase Masyarakat yang memahami aspek-aspek Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) target 100 Persen dengan capaian 310 Persen, Persentase Ormas yang terdaftar pada Pemerintah di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah target 100 Persen dengan capaian 191 Persen, Persentase Masyarakat yang memahami aspek-aspek Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya target 100 Persen dengan capain 164 Persen, Persentase Masyarakat yang memahami aspek-aspek Kewaspadaan Dini di target 100 persen dengan capaian 139 Persen. Capaian kinerja Unsur Pemerintahan Umum dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber: Bappeda Prov. Sulteng, 2023 (data diolah kembali)

Gambar 2.146

Capaian Indikator Kinerja Program Badan kesatuan Bangsa & Politik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

Berdasarkan hasil evaluasi RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 dapat diketahui untuk rata-rata capaian kinerja Unsur Pemerintahan Umum yang di laksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Tahun 2023 secara umum mencapai 191,92 Persen dengan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja masuk dalam kategori 'Sangat Tinggi'.

Pada program penunjang urusan pemerintahan daerah yang melekat pada setiap perangkat daerah dengan indikator Reformasi Perangkat Daerah dan Nilai SAKIP Perangkat Daerah masih menunggu hasil Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Inspektorat Daerah, sehingga untuk kedua indikator tersebut belum diketahui realisasi ataupun capaiannya.

2.2.4 Evaluasi Penerapan Standar SPM

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. SPM juga akan berfungsi sebagai instrumen untuk memperkuat pelaksanaan Performance Based Budgeting. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga mengamanatkan pada Pemda untuk benar-benar memprioritaskan belanja daerah untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan, yaitu Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Ketentraman dan ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dan Sosial. SPM di Provinsi Sulawesi Tengah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal serta Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Pencapaian SPM bidang Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 sebesar 76,06 persen dengan kategori tuntas pratama. Terdapat beberapa indikator layanan dalam rapor pendidikan yang perlu ditingkatkan diantaranya kemampuan literasi dan kemamuan numerasi peserta didik serta indeks distribusi guru. Adapun rincian capaian SPM Bidang Pendidikan tahun 2023 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.71 Canajan Ridang SPM Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

Capalan Bidang SPM Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengan Tanun 2023						
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		Tuntas Pratama			76.06 %
1.	Pendidikan Menengah					73.91 %
	DEDSENTASE	<u> </u>	Jumlah Total		Vana	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA		Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	LAYANAN DASAR (80%)		,			58.95 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		360514	265663	94851	73.69 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					14.95 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	74.77 %
	SMA					

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator	Pencapaian / Outp	out	Total Pencapaian
	Angka partisipasi kasar	%	100	104.71	-4.71	100.00 %
	Angka partisipasi sekolah	%	100	75.84	24.16	75.84 %
	Angka partisipasi murni	%	100	71.68	28.32	71.68 %
	Kemampuan literasi	Nilai	80	44.64	35.36	55.80 %
	5. Kemampuan numerasi	Nilai	80	34.86	45.14	43.58 %
	6. Perbedaan skor literasi	Nilai	80	2.83	77.17	3.54 %
	7. Perbedaan skor numerasi	Nilai	1.67	1.13	0.54	67.66 %
	8. Indeks iklim keamanan	Nilai	100	67.33	32.67	67.33 %
	9. 9 . Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	Nilai	80	67.43	12.57	84.29 %
	10.Kecukupan formasi guru ASN	%	100	100	0	100.00 %
	11.Indeks distribusi guru	%	80	0.36	79.64	0.45 %
	12.Proporsi PTK bersertifikat	%	100	90.2	9.8	90.20 %
	13.Proporsi PTK penggerak	%	80	0.11	79.89	0.14 %
	14.Pengalaman pelatihan guru	%	80	17.1	62.9	21.38 %
	SMK					
	1 . Angka partisipasi kasar	%	100	104.71	-4.71	100.00 %
	2 . Angka partisipasi sekolah	%	100	75.84	24.16	75.84 %
	3 . Angka partisipasi murni	%	100	71.68	28.32	71.68 %
	4 . Kemampuan literasi	%	80	36.85	43.15	46.06 %
	5 . Kemampuan numerasi	Nilai	80	29.16	50.84	36.45 %
	6 . Tingkat penyerapan lulusan SMK	Nilai	90	80.86	9.14	89.84 %
	7 . Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	Nilai	80	65	15	81.25 %
	8 . Perbedaan skor literasi	Nilai	40	1.87	38.13	4.68 %
	9 . Perbedaan skor numerasi	Nilai	20	0.52	19.48	2.60 %
	10 . Indeks iklim keamanan	Nilai	60	65.89	-5.89	100.00 %
	11 . Indeks iklim kebinekaan dan inkusivitas	Nilai	60	65.27	-5.27	100.00 %



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indika	tor Pencapaian / Ou	tput	Total Pencapaian
	12 . Kecukupan formasi guru ASN	%	100	100	0	100.00 %
	13 . Indeks distribusi guru	%	80	0.28	79.72	0.35 %
	14 . Proporsi PTK bersertifikat	%	100	90.45	9.55	90.45 %
	15 . Proporsi PTK penggerak	%	80	0.03	79.97	0.04 %
	16 . Pengalaman pelatihan guru	%	80	9.7	70.3	12.13 %
2.	Pendidikan Khusus					78.22 %
					T	T
	PERSENTASE		Jumlah Total	Jumlah Total	Yang	63.28 %
	PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR		Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Belum Terlayani	
	(80%) A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI:		1579	1249	330	79.10 %
		NCAPAIAN	MUTU MINIMAL	LAYANAN DASAR (20%)		14.94 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	74.68 %
	Angka partisipasi kasar	%	80	1.92	78.08	2.40 %
	Angka partisipasi sekolah	%	80	30.75	49.25	38.44 %
	3 . Angka partisipasi murni	%	80	1.8	78.2	2.25 %
	4 . Kemampuan literasi	Nilai	40	42.11	-2.11	100.00 %
	5 . Kemampuan numerasi	Nilai	80	35.46	44.54	44.33 %
	6 . Perbedaan skor literasi	Nilai	60	15.84	44.16	26.40 %
	7 . Perbedaan skor numerasi	Nilai	33	29.24	3.76	88.61 %
	8 . Indeks iklim keamanan	Nilai	52	71.15	-19.15	100.00 %
	9 . Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	Nilai	100	51.96	48.04	51.96 %
	10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	100	100	0	100.00 %
	11 . Indeks distribusi guru	%	80	0.2	79.8	0.25 %
	12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	100	74.15	25.85	74.15 %
	13 . Proporsi PTK penggerak	%	80	0	80	0.00 %
	14 . Pengalaman pelatihan guru	%	80	12.1	67.9	15.13 %



Capaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2023 sebesar 88,29% dengan kategori tuntas madya. Beberapa hal yang menjadi permasalahan pencapaian SPM Bidang kesehatan adalah:

1. Pengumpulan Data

- a. Belum ada penanganan KLB dalam skala KLB Provinsi berdasarkan kriteria standar tehnis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada SPM bidang kesehatan (PERMENKES RI No. 4 Tahun 2019)
- b. Penanganan KLB masih berdasarkan skala KLB Kab/Kota
- c. Belum terpenuhinya Pelayanan kesehatan secara maksimal terhadap penduduk yang terdampak pada saat akibat bencana

2. Penghitungan Kebutuhan

- a. Terkait penghitungan kebutuhan belum berdasarkan standar SPM
- b. Kebutuhan KLB masih berdasarkan permintaan Kab/Kota
- c. Belum terorganisir Emergency Medical Team yang akan masuk menjadi FCK (Tenaga Cadangan Kesehatan) yang akan di mobilisasi pada saat penanggulangan krisis kesehatan

3. Perencanaan dan Penganggaran

- a. Perencanaan penganggaran masih bersifat global dan masih bersifat perjalanan dinas di 13 Kab/Kota dan sampai ibu kota kab tidak sampai di lokasi kejadian **KLB**
- b. Masih berdasarkan W1 yang dikeluarkan oleh Kab/Kota yang dikeluarkan oleh Kab/Kota
- c. Masih minimnya dukungan alokasi dana dalam penyusunan rencana (Disaster Plan) Bidang kesehatan pada pemenuhan SPM khususnya pelayanan

Tabel 2.72 Capaian SPM Bidang Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output	Total Pencapaian
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS MADYA	88.29 %
1.	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi			76.58 %



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikato	or Pencapaian / C	Output	Total Pencapaian
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	62.58 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		2337	1828	509	78%
Tahar	tanggap darurat PERSENTASE PENCA (20%)	PAIAN MUT	U MINIMAL LA	YANAN DASAR		14.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	70.00 %
	Obat-obatan dan bahan medis habis pakai	Orang	0	0	0	0.00 %
	2 . Makanan tambahan/pendampin g untuk kelompok rentan (MP ASI, MP Ibu Hamil, Pemberian Makanan untuk Bayi dan Anak [PMBA] dll.)	Orang	0	0	0	0.00 %
	3 . Kelengkapan pendukung kesehatan perorangan (Hyegiene Kit dan Family Kit)	Orang	0	0	0	0.00 %
	4 . Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	16.00	16.00	0	100%
	5 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	32.00	32.00	0	100%
	6 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	16.00	16.00	0	100%
	7 . Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat terlatih yang memiliki kemampuan di bidang surveilans, gizi, epidemiologi, kesehatan lingkungan, kesehatan reproduksi, dan lain-lain	Orang	8.00	8.00	0	100%
	8 . Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan terlatih yang memiliki kemampuan dalam penanganan kesehatan jiwa	Orang	8.00	8.00	0	100%
	9 . Tenaga kesehatan : Apoteker dan/atau Asisten Apoteker	Orang	16.00	16.00	0	100%



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	ATUAN Indikator Pencapaian / Output			
	kesehatan : Tenaga penyuluh/promosi kesehatan	Orang	10.00	10.00	0	100%
	JUMLAH	106	106	0	700.00 %	
2.	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		5626	5626	0	100%

Biasa

PERSENTASE PENCA (20%)	APAIAN MU	TU MINIMAL LA	YANAN DASAR		20.00 %
B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %
Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai dengan jenis penyakit	Unit	227.00	227.00	0	100%
2 . Profilaksis/Vitamin/Ob at/Vaksin	Unit	380.00	380.00	0	100%
3 . Wadah pengiriman spesimen (Specimen Carrier)	Unit	26.00	26.00	0	100%
4 . Tempat sampah biologis	Unit	27.00	27.00	0	100%
5 . Formulir penyelidikan epidemiologi, Form/lembar KIE, Alat tulis yang diperlukan	*	370.00	370.00	0	100%
6 . Alat dan bahan pengambilan spesimen (Tabung, Pot, Media Amies, dll) untuk spesimen yang berasal dari manusia	Unit	73.00	73.00	0	100%
7 . Alat pemeriksaan fisik (Stestoskop, Termometer Badan, Tensimeter, Senter, Test Diagnosis Cepat, dll)	Unit	328.00	328.00	0	100%
8 . Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	17.00	17.00	0	100%

No ,	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikato	or Pencapaian / C	Output	Total Pencapaian
: n n k	D. Tenaga kesehatan Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang epidemiologi	Orang	22.00	22.00	0	100%
k k n n k	0 . Tenaga sesehatan : Tenaga sesehatan masyarakat yang mempunyai semampuan di bidang sesehatan lingkungan	Orang	21.00	21.00	0	100%
k k n n k	11. Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang entomologi	Orang	2.00	2.00	0	100%
1 k	2 . Tenaga cesehatan : Tenaga Laboratorium	Orang	6.00	6.00	0	100%
k p	3 . Tenaga kesehatan : Tenaga penyuluh/promosi kesehatan	Orang	16.00	16.00	0	100%
k y p p e d	4 . Tenaga kesehatan : Petugas yang terlibat dalam pelaksanaan penyelidikan epidemiologi disesuaikan dengan enis KLB yang terjadi	Orang	47.00	47.00	0	100%
	JUMLAH	1,562	1,562	0	1,400.00 %	

Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2023 menunjukan peningkatan yang siginifikan dibandingkan tahun sebelumnya, dimana capaian tahun 2023 sebesar 92,50% jauh lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2022 yang sebesar 55,01%. Peningkatan capaian tersebut terutama dipengaruhi oleh meningkatnya capaian indikator penyediaan Kebutuhan pokok Air Minum Regional Lintas Kabupaten/Kota. Adapun rincian capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum tahun 2023 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.73
Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

	•			
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output	Total Pencapaian
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		Tuntas Utama	92.50 %



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indika	tor Pencapaian / C	Dutput	Total Pencapaian
1.	Penyediaan Kebutuhan pokok Air Minum Regional Lintas Kabupaten/Kota					100.00 %
Ada S	SPAM Regional Lintas K	abupaten/Ko	ta		I	l
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	·	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	70000>	70000	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %
	1 . Kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota terhadap demand pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan Air Minum	liter/detik	600	600	0	100.00 %
	2 . Kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota terhadap demand pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan Air Minum Curah terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbusa, tidak berbusa, tidak berbusa)	liter/detik	600	600	0	100.00 %



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indika	tor Pencapaian / C	Output	Total Pencapaian
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota					85.00 %
Tidak	Ada SPALD Regional L	intas Kabupa	aten/Kota (lampii	kan eviden 3 tahap	an terhadap Ka	b/Kota)
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	0>	0	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					5.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	25.00 %
	1 . Pembinaan pengelolaan dan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional / SPALD- Regional Kabupaten/Kota (pendataan, penghitungan kebutuhan dan perencanaan)	jumlah kab/kota	0	0	0	100.00 %

Pemenuhan SPM Bidang Perumahan Rakyat menunjukkan kinerja sangat baik dengan capaian sebesar 100% atau dengan kategori tuntas paripurna. Adapun rincian capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum tahun 2023 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.74
Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output	Total Pencapaian
	KATEGORI INDEKS		TUNTAS PARIPURNA	100.00 %
	PENCAPAIAN SPM			



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indika	Total Pencapaian		
1.	Penyediaan &					100.00 %
	Rehabilitasi Rumah					
	yang Layak Huni					
	Bagi Korban					
	Bencana Provinsi					
Tidak	Terjadi Bencana (Lampi	rkan Form Ta	hapan Penerapa	an)		
	PERSENTASE		Jumlah			
	PENCAPAIAN		Total Yang	Jumlah Total	Yang Belum	
	PENERIMA		Harus	Yang	Terlayani	80.00 %
	LAYANAN DASAR		Dilayani	Terlayani	· onayam	
	(80%)	_	_			
	A. JUMLAH YANG	Orang	110214	106535	3679	100%
	HARUS DILAYANI :					
	PERSENTASE PENCA (20%)	PAIAN MUT	U MINIMAL LAY	ANAN DASAR		20.00 %
	B. Jumlah Mutu		Jumlah	Jumlah Mutu	Mutu Yang	100.00 %
	Barang / Jasa / SDM		Mutu Yang	Yang	Belum	
			Harus	Terlayani /	Terlayani /	
			Dilayani /	Terpenuhi	Terpenuhi	
			Dipenuhi			
	1 . Melakukan	jumlah	4	4	0	100.00 %
	pengumpulan data,	kab/kota				
	perhitungan					
	kebutuhan, dan					
	perencanaan					
	kebutuhan sesuai					
	dengan nomenklatur					
	program/kegiatan/sub					
	kegiatan (dilakukan					
	dengan mengunggah					
	dokumen form					
	dan/atau dokumen					
	pendukung lainnya)					,
2.	Fasilitasi					100.00 %
	Penyediaan Rumah					
	Yang Layak Huni					
	Bagi Masyarakat					
	Yang Terkena					
	Relokasi Program Pemerintah Daerah					
	Provinsi					
Tidak	Ada Relokasi Masyaraka	t Vana Torka	na Relokaci Pro	ogram Domorintoh		
riuak	PERSENTASE	at rang renke	Jumlah	Jumlah Total		80.00 %
	PENCAPAIAN		Jumian Total	Juillian Total	Yang Belum	00.00 %
				Vene	Terlayani	
	DEVIERIMA					
	PENERIMA LAYANAN DASAR		Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terrayani	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indika	Total Pencapaian			
	A. JUMLAH YANG	Orang	0	0	0	100%	
	HARUS DILAYANI :						
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)						
	B. Jumlah Mutu		Jumlah	Jumlah Mutu	Mutu Yang	100.00 %	
	Barang / Jasa / SDM		Mutu Yang	Yang	Belum		
			Harus	Terlayani /	Terlayani /		
			Dilayani /	Terpenuhi	Terpenuhi		
			Dipenuhi				
	1 . Fasilitasi	Rumah	0	0	0	100.00 %	
	penggantian Hak Atas						
	Penguasaan Tanah						
	dan/atau Bangunan						
	2 . Subsidi uang sewa	Rumah	0	0	0	100.00 %	
	3 . Penyediaan rumah layak huni	Rumah	0	0	0	100.00 %	

Pada tahun 2023, capaian SPM Bidang Trantibumlinmas sebesar 93,28% dengan kategori tuntas utama. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam uaya pemenuhan SPM Bidang Trantibumlinmas diantaranya:

- a. Dalam penyusun dokumen rencana perangkat daerah belum memprioritaskan program dan kegiatan pemenuhan kebutuhan Pelayanan Dasar;
- b. Belum tersedianya pelayanan kerugian materi dan pelayanan pengobatan yang dilakukan oleh Satpol PP;
- c. Satpol PP belum menetapkan capaian standar Pelayanan Dasar berdasarkan jumlah warga negara yang terkena dampak dan telah tertangani setiap tahunnya. Adapun rincian capaian SPM Bidang Trantibumlinmas tahun 2023 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.75 Capaian SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output	Total Pencapaian
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		Tuntas Utama	93.28 %
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi			93.28 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	200	200	0	100.00 %
	PERSENTASE PENC DASAR (20%)	APAIAN MU	TU MINIMAL LA	YANAN		13.28 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	66.41 %
	1 . Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)	unit	32	21	11	65.63 %
	2 . Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	dokumen	6	6	0	100.00 %
	3 . Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)	orang	400	429	-29	100.00 %



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indika	Indikator Pencapaian / Output		
	4 . Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)	dokumen	0	0	0	0.00 %
	5 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	orang	0	0	0	0.00 %
	6 . Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cidera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cidera fisik sedang dan/atau berat)	orang	0	0	0	0.00 %

Pada tahun 2023, capaian SPM Bidang Sosial sebesar 92,99% dengan kategori tuntas utama. Adapun rincian capaian SPM Bidang Sosial tahun 2023 disajikan pada tabel berikut ini

Tabel 2.76
Capaian SPM Bidang Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikato	Indikator Pencapaian / Output		
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM					92.99 %
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di dalam Panti					87.27 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikato	Total Pencapaian			
	LAYANAN DASAR (80%)						
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	220	220	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCA				<u> </u>	100.00 /8	
	(20%)	1				7.27 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	36.36 %	
	1 . Penyediaan permakanan	Orang	220	220	0	100.00 %	
	2 . Penyediaan sandang	Orang	0	0	0	0.00 %	
	3 . Penyediaan asrama yang mudah diakses **	Unit	5	5	0	100.00 %	
	4 . Penyediaan alat bantu **	Orang	61	61	0	100.00 %	
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti	Orang	0	0	0	0.00 %	
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	45	45	0	100.00 %	
	7 . Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang	0	0	0	0.00 %	
	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan**/Bukti kepemilikan NIK	Orang	0	0	0	0.00 %	
	9 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	0	0	0	0.00 %	
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga** / Bukti keberadaan keluarga	Orang	0	0	0	0.00 %	
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga**	Orang	0	0	0	0.00 %	
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di dalam Panti					95.00 %	
_	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	310	310	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)						

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	SATUAN Indikator Pencapaian / Output					
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	Pencapaian 75.00 %		
	1 . Pengasuhan	Orang	0	0	0	0.00 %		
	2 . Penyediaan permakanan	Orang	310	310	0	100.00 %		
	3 . Penyediaan sandang	Orang	20	20	0	100.00 %		
	4 . Penyediaan asrama yang mudah diakses**	Unit	194	194	0	100.00 %		
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti	Orang	60	60	0	100.00 %		
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	60	60	0	100.00 %		
	7 . Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang	60	60	0	100.00 %		
	8 . Fasilitasi pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak**	Orang	0	0	0	0.00 %		
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	60	60	0	100.00 %		
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga**	Orang	2	2	0	100.00 %		
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga**	Orang	2	2	0	100.00 %		
	12 . Akses layanan pengasuhan kepada keluarga pengganti**	Orang	0	0	0	0.00 %		
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar di dalam Panti					96.67 %		
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total v	Yang Belum Terlayani	80.00 %		
	A. JÚMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	343	343	0	100.00 %		
	PERSENTASE PENC		ITU MINIMAL LA	YANAN DASAR (20%)		16.67 %		
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus	Jumlah Mutu Yang	Mutu Yang Belum	83.33 %		

No	o Indikator Kinerja / SATUAN Indikator Pencapaian / Output					Total Pencapaian
			Dilayani / Dipenuhi	Terlayani / Terpenuhi	Terlayani / Terpenuhi	
	1 . Penyediaan permakanan	Orang	343	343	0	100.00 %
	2 . Penyediaan sandang	Orang	45	45	0	100.00 %
	3 . Penyediaan asrama yang mudah diakses**	Unit	14	14	0	100.00 %
	4 . Penyediaan alat bantu**	Orang	0	0	0	0.00 %
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti Sosial	Orang	45	45	0	100.00 %
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	1404	1404	0	100.00 %
	7 . Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang	420	420	0	100.00 %
	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan**	Orang	0	0	0	0.00 %
	9 . Akses ke layanan kesehatan dasar	Orang	45	45	0	100.00 %
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga**	Orang	2	2	0	100.00 %
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga**	Orang	2	2	0	100.00 %
	12 . Pemulasaraan**	Orang	4	4	0	100.00 %
	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam	-				
4.	Panti			Г	Г	96.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	21	21	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCA (20%)	PAIAN MUT	U MINIMAL LAYA	NAN DASAR		16.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	80.00 %
	1 . Penyediaan permakanan	Orang	21	21	0	100.00 %

	Indikator Kinaria /					Total
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikato	or Pencapaian / C	Dutput	Pencapaian
	2 . Penyediaan	Orang	21	21	0	100.00 %
	sandang	Unit	1	1	0	400.00.0/
	3 . Penyediaan asrama yang mudah diakses**	Offic	1	'	U	100.00 %
	4 . Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti	Orang	21	21	0	100.00 %
	5 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	0	0	0	0.00 %
	6 . Pemberian bimbingan keterampilan hidup sehari-hari	Orang	16	16	0	100.00 %
	7 . Pemberian bimbingan keterampilan dasar	Orang	16	16	0	100.00 %
	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak**	Orang	0	0	0	0.00 %
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	2	2	0	100.00 %
	10 . Pemulangan ke daerah asal**	Orang	10	10	0	100.00 %
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Provinsi					90.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA		Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	
	LAYANAN DASAR (80%)		Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	1637	1637	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCA (20%)	PAIAN MUT	U MINIMAL LAYA	NAN DASAR	<u> </u>	10.00 %
	B. Jumlah Mutu		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani /	Jumlah Mutu Yang Terlayani /	Mutu Yang Belum Terlayani /	10.00 /0
	Barang / Jasa / SDM		Dilayani / Dipenuhi	Terlayani / Terpenuhi	Terpenuhi	50.00 %
	Penyediaan permakanan	Orang	1637	1637	0	100.00 %
	2 . Penyediaan sandang	Orang	0	0	0	0.00 %



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	3 . Penyediaan tempat penampungan pengungsi**	Unit	0	0	0	0.00 %
	4 . Penanganan khusus bagi kelompok rentan**	Orang	0	0	0	0.00 %
	5 . Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	145	145	0	100.0

2.2.6 Evaluasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)

TBP/SDGs merupakan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (people welfare) secara berkelanjutan. TPB/SGDs adalah pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup, menjamin terlaksananya keadilan bagi masyarakat, memastikan tata kelola untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pembangunan dari generasi ke generasi, serta menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat. TPB/SDGs ini memiliki 17 tujuan dalam upaya mensejahterakan masyarakat yang dievaluasi secara periodik.

Status pencapaian TPB/SDGs dikelompokkan menjadi 4 (empat) pilar. Metode perhitungan dan analisis capaian TPB dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dokumen metadata indikator 4 pilar tujuan pembangunan berkelanjutan dan Permendagri Nomor 7 Tahun 2018.

Hasil kajian dan analisis atas capaian TPB/SDGs yang menjadi kewenangan Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebanyak 117 indikator. Dimana, indikator yang sudah tercapai sebesar 57 persen; indikator yang belum tercapai sebesar 25 persen; dan indikator yang perlu perhatian khusus sebesar 18 persen. Gambaran capaian indikator pada setiap TPB/SDGs di Provinsi Sulawesi Tengah disajikan pada gambar sebagai berikut.





Gambar 2.147 Capaian indikator SDGs/TPB di Sulawesi Tengah Tahun 2023 (Persen)

2.2.6.1 Penelaahan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan

Dalam tujuan 1 yaitu tanpa kemiskinan dimaksudkan dengan mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah harus berupaya keras untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan. Salah satu indikator dalam tujuan ini ialah persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional menurut jenis kelamin dan kelompok umur sebagai berikut:



Sumber: BPS, 2022

Gambar 2.148 Tren Kemiskinan Penduduk Yang Hidup Di Bawah Garis Kemiskinan Nasional Menurut Jenis Kelamin Dan Kelompok Umur

Berdasarkan gambar di atas pencapaian angka Persentase Penduduk Yang Hidup Di Bawah Garis Kemiskinan Nasional Menurut Jenis Kelamin Dan Kelompok Umur terjadi peningkatan angka capaian dari tahun 2018 hingga tahun 2020. Meningkatnya angka capaian ini dalam kurun waktu tiga tahun berarti menandakan bahwa persentase penduduk Sulawesi Tengah masih banyak yang hidup dibawah garis kemiskinan. Kemudian terjadi penurunan angka capaian pada tahun 2021 sebesar 8,69 persen dan turun hingga mencapai angka 8,60 persen pada tahun 2022.



Sumber: BPS, 2022

Gambar 2.149 Persentase Laki-Laki, Perempuan Dan Anak-Anak Dari Semua Usia, Yang Hidup Dalam Kemiskinan Dalam Berbagai Dimensi, Sesuai Dengan Definisi Nasional

Indikator berikutnya yaitu indikator 1.2.2* atau mengenai Persentase Laki-Laki, Perempuan Dan Anak-Anak Dari Semua Usia, Yang Hidup Dalam Kemiskinan Dalam Berbagai Dimensi, Sesuai Dengan Definisi Nasional berdasarkan data BPS ialah mencapai angka 9,66 persen pada tahun 2018. Angka ini kemudian meningkat hingga mencapai 9,16 persen pada tahun 2020. Selanjutnya terjadi penurunan hingga mencapai 9,57 persen pada tahun 2022.

Indikator berikutnya ialah Proporsi peserta Program Jaminan Kesehatan Melalui SJSN Bidang Kesehatan dengan capaian sebagai berikut:



Gambar 2.150 Proporsi peserta Program Jaminan Kesehatan Melalui SJSN Bidang Kesehatan

Berdasarkan gambar di atas diketahui bahwa Proporsi peserta Program Jaminan Kesehatan Melalui SJSN Bidang Kesehatan berdasarkan data BPJS Kesehatan dalam kurun waktu 3 tahun **belum mencapai target** yang ditetapkan. Angka capaian pada tahun 2020 hanya mencapai 81,69 persen dengan angka ini telah mengalami penurunan dari tahun 2019 sebelumnya yaitu sebesar 90,92 persen.

Indikator berikutnya ialah proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar. Adapun akses pelayanan dasar yang dimaksud ialah sebagai berikut:

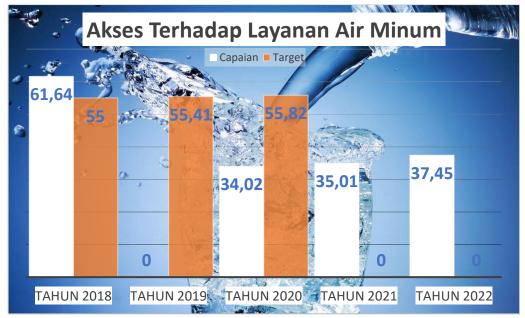


Sumber: BPS, 2022

Gambar 2.151 Akses Pada Layanan Sanitasi Dasar

Dapat dilihat bahwa, sanitasi dasar yang layak bagi masyarakat Sulawesi Tengah **telah mencapai target** pada tahun 2020 ialah sebesar 74,61 persen. Kemudian terjadi peningkatan angka capaian sanitasi dasar pada tahun 2021 ialah sebesar 76,06 persen yang kemudian menurun sebesar 1,05 persen hingga mencapai 75,01 persen pada tahun 2022.

Selanjutnya, indikator 1.4.1* atau data mengenai akses masyarakat Sulawesi Tengah pada Layanan Air Minum. Dalam data tersebut dapat dilihat bahwa capaian akan layanan air minum bagi masyarakat Sulawesi Tengah pada tahun 2020 hingga tahun 2022 mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 capaiannya ialah sebesar 34,02 persen. Yang kemudian meningkat pada tahun 2021 ialah sebesar 35,01 persen. Dan ditingkatkan lagi pada tahun 2022 ialah sebesar 37,45 persen pada tahun 2022. Berikut data akses layanan air minum masyarakat Sulawesi Tengah tahun 2020-2022.



Sumber: BPS, 2022

Gambar 2.152 Akses Pada Layanan Air Minum



Sumber: BPS, 2022

Gambar 2.153 Akses Pada Layanan Fasilitas Kebersihan Dasar

Selanjutnya akan disajikan data mengenai target akses pada fasillitas kebersihan dasar masyarakat Sulawesi Tengah tahun 2020 hingga tahun 2022. Dalam data tersebut, dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 angka akses pada fasillitas kebersihan dasar ialah sebesar 81,93 persen. Yang kemudian pada tahun 2021 tersebut meningkat menjadi 82,23 persen. Hingga tahun 2022 akses fasilitas kebersihan dasar menurun menjadi 81,67 persen. Berikut akan disajikan mengenai akses pada fasilitas kebersihan dasar Sulawesi Tengah tahun 2020-2022.

Berikut ini kendala yang perlu mendapatkan perhatian khusus sebagai berikut:

- 1. Penanggulangan kemiskinan belum ditangani secara komprehensif dan holistik yang merupakan sebuah mata rantai tak terpisahkan dari proses meningkatkan partisipasi para pemangku kepentingan mulai dari penyusunan program, pelaksanaannya sampai kepada pemantauan dan evaluasi;
- 2. Kondisi kemiskinan masih dipandang hanya pada dimensi ekonomi semata, padahal kemiskinan bersifat multidimensional yang mencakup aspek sosial, politik, dan kultural;
- 3. Perluasan kesempatan kerja belum secara optimal menyentuh langsung pada masyarakat miskin. Perlunya, alokasi investasi yang lebih baik oleh pemerintah dan swasta dibutuhkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang bersifat inklusif;
- 4. Ketersediaan pendidikan bagi masyarakat baik pendidikan formal maupun non formal masih perlu untuk ditingkatkan baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya, sehingga kesempatan kerja dapat diisi oleh masyarakat baik yang ada di perkotaan maupun di perdesaan yang tersedia;
- 5. Belum optimalnya layanan kesehatan serta perlindungan sosial bagi masyarakat miskin. Selama ini pemerintah telah melakukan berbagai macam program dan kegiatan berkaitan dengan pengentasan masyarakat miskin, yaitu bantuan langsung tunai, jaminan kesehatan, dan beasiswa pendidikan bagi keluarga miskin. Program-program ini masih perlu ditingkatkan kualitas dan efektifitasnya sehingga benar-benar tepat sasaran;
- 6. Bantuan yang diberikan kepada masyarakat miskin selama ini masih banyak yang bersifat konsumtif dan belum berbentuk kegiatan produktif yang berkelanjutan;
- 7. Penanggulangan masyarakat miskin masih cenderung bersifat sentralistik dan penyeragaman bukan dalam bentuk desentralisasi dan spesifik lokal, sehingga lebih efektif, lebih efisien dan tepat sasaran karena sesuai dengan karakteristik kemiskinan di masing-masing wilayah

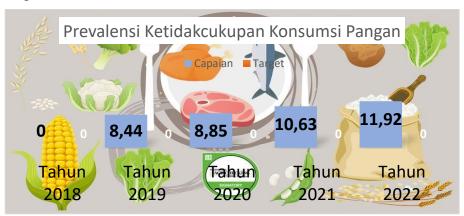
Berdasarkan kendala-kendala tersebut adapun upaya percepatan pencapaian TPB/SDGs yang dapat dilakukan ialah sebagai berikut:

- 1. Memperluas kesempatan kerja, dan menyiapkan infrastruktur yang memadai dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat secara menyeluruh.
- 2. Peningkatkan taraf kesejahteraan penduduk, meningkatkan kinerja perekonomian dan pemerataan hasil-hasil pembangunan.
- 3. Peningkatan kualitas Pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat Sulawesi Tengah.

Tujuan 2 Tanpa Kelaparan

Dalam tujuan 2 yaitu tanpa kelaparan yang dimaksud ialah dengan menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. Tujuan SDGs nomor 2 yaitu untuk mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, memperbaiki nutrisi dan mempromosikan pertanian yang berkelanjutan. Tujuan ini sejalan dengan prioritas pembangunan Indonesia yang termaktub ke dalam prioritas ketahanan pangan dan penciptaan lapangan kerja.

Salah satu indikator dalam tujuan ini ialah Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan atau Prevalence of Undernourishment (PoU) adalah estimasi proporsi dari suatu populasi tertentu, dimana konsumsi energi biasanya sehari-hari dari makanan tidak cukup untuk memenuhi tingkat energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif dan sehat, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. PoU di Sulawesi Tengah ini mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dengan angka prevalensi sebesar 11,92 persen pada tahun 2022. Padahal pada tahun 2021 angka PoU sebesar 10,63 persen. Berikut disajikan data mengenai Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2029-2022.

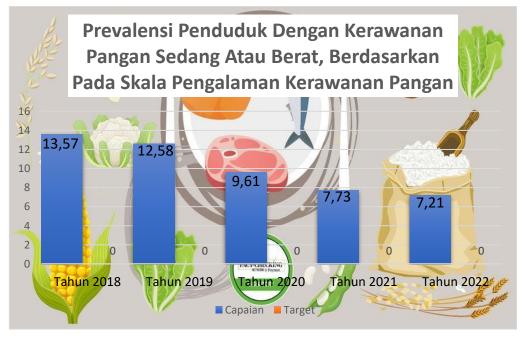


Sumber: BPS, 2022

Gambar 2.154 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Sulawesi Tengah



Indikator 2.1.2* ialah Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan mengalami penurunan dari tahun 2019 hingga tahun 2022. Pada tahun 2019 angka prevalensi ialah sebesar 12,58 persen. Yang kemudian menurun hingga 9,61 persen pada tahun 2020. Penurunan angka sebesar 1,88 persen juga terjadi pada tahun 2021 hingga tahun 2022 angka prevalensi mencapai 7,21 persen. Berikut akan disajikan data mengenai Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan Sulawesi Tengah Tahun 2019-2022.



Sumber: BPS, 2022

Gambar 2.155 Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan

Selanjutnya indikator dalam tujuan 2 SDGs ini ialah Prevalensi Stunting (Pendek Dan Sangat Pendek) Pada Anak Di Bawah Lima Tahun/Balita. Menurut World Health Organization (WHO) Stunting adalah masalah pada anak yang menyebabkan tubuhnya lebih rendah, atau lebih pendek dari standar anak seusianya. Stunting merupakan masalah gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu lama. Berikut Prevalensi Stunting (Pendek Dan Sangat Pendek) Pada Anak Di Bawah Lima Tahun/Balita dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.



Gambar 2.156 Prevalensi Stunting (Pendek Dan Sangat Pendek) Pada Anak Di Bawah Lima Tahun/Balita

Berdasarkan gambar di atas, Prevalensi Stunting (Pendek Dan Sangat Pendek) Pada Anak Di Bawah Lima Tahun/Balita pada tahun 2018 mencapai 20,4 persen. Sebelumnya, angka prevalensi stunting pada tahun 2019 ialah sebesar 13 persen. Angka ini menurun pada tahun 2020 ialah sebesar 12,8 persen. Yang kemudian meningkat menjadi 29,7 persen pada tahun 2021.

Indikator berikutnya ialah Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe di Sulawesi Tengah mencapai angka 9,4 persen pada tahun 2021. Padahal tahun 2019 prevalensi ini hanya sebesar 8,5 persen. Berikut akan disajikan data mengenai Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe Sulawesi Tengah.



Sumber: Dinkes, 2021

Gambar 2.157 Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe di Sulawesi Tengah



Indikator berikutnya ialah Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan AKE 2100 kkal/kap/hari dengan konsumsi pangan Sulawesi Tengah mencapai 77,2 persen pada tahun 2022. Berikut disajikan data mengenai Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan AKE 2100 kkal/kap/hari Sulawesi Tengah Tahun 2018-2022.



Gambar 2.158 Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan AKE 2100 kkal/kap/hari

Adapun kendala yang dialami dalam pencapain tujuan 2 ialah sebagai berikut:

- Belum optimalnya koordinasi lintas sektor dalam menangani kasus kekurangan gizi (underweight) dan stunting. Penanganan gizi masyarakat bukan hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan, namun merupakan tanggung jawab bersama sehingga perlu koordinasi dan sinergitas program dan kegiatan dengan OPD terkait lainnya termasuk Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, dan Dinas Kelautan dan Perikanan;
- Masih rendahnya kesadaran serta pemahaman masyarakat mengenai pola konsumsi pangan yang seimbang;
- Kesenjangan status gizi masyarakat antar kabupaten/kota menjadi tantangan yang harus dihadapi pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Hal ini tentu juga dipengaruhi oleh adanya kesenjangan tingkat ekonomi dan pendidikan antar kabupaten/kota;
- 4. Belum optimalnya peran masyarakat dalam menanggulangi kekurangan gizi.

Berdasarkan kendala-kendala tersebut adapun upaya percepatan pencapaian TPB/SDGs yang dapat dilakukan ialah perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan penerapan 8 aksi integrasi stunting yaitu Analisis Situasi, Rencana Kegiatan, Rembuk



Stunting, Peraturan Bupati/Walikota tentang Peran Desa, Pembinaan Kader Pembangunan Manusia, Sistem Manajemen Data Stunting, Pengukuran dan Publikasi Stunting, Reviu Kinerja Tahunan secara optimal untuk meningkatkan keterpaduan intervensi gizi spesifik dan sensitif bagi keluarga sasaran prioritas nasional.

Gizi buruk dan stunting pada anak dapat dicegah dengan selalu memperhatikan asupan nutrisi anak sejak dini. Terkhususnya ibu hamil dan yang memiliki anak balita diberikan edukasi untuk mengonsumsi makanan sehat dan seimbang yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Penyuluhan dan pendampingan kepada ibu hamil untuk mengontrol kehamilan secara rutin setiap bulannya, serta memastikan bahwa janin memiliki tumbuh kembang yang optimal. Pemberian makanan bergizi, susu khusus ibu hamil, serta suplemen vitamin juga turut mencegah stunting pada anak. Hal ini harus dilakukan secara terus menerus agar tujuan 2 yaitu tanpa kelaparan dapat terwujud.

Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Tujuan 3 ialah kehidupan yang sehat dan sejahtera yang berarti apabila suatu kehidupan yang sehat bagi seluruh masyarakat dapat terwujud maka masyarakat tersebut juga dapat hidup sejahtera. Untuk mencapai tujuan ini terdapat 8 target dengan 26 indikator. Adapun target pertama yaitu mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2030 dengan salah satu indikatornya ialah proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih. Pada indikator ini terjadi peningkatan dari tahun 2018 hingga tahun 2020. Peningkatan angka tersebut dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 2.159 Proporsi Perempuan Pernah Kawin Umur 15-49 Tahun Yang Proses Melahirkan Terakhirnya Ditolong Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih

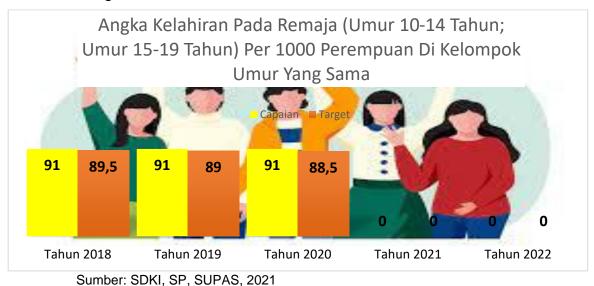
Berdasarkan gambar di atas, angka perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih telah mencapai target pada tahun 2020 ialah sebesar 93,75 persen dengan target 85,99 persen. Adapun angka capaian dalam kurun waktu 5 tahun berturut-turut mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 capaian angka perempuan yang pernah kawin dengan proses melahirkan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih ialah 87,64 persen yang kemudian meningkat pada tahun 2019 ialah sebesar 92,38 persene. Selanjutnya terjadi peningkatan sebesar 1,38 persen pada tahun 2020. Namun pada tahun 2021 terjadi penurunan angka perempuan yang melahirkan ditolong oleh tenaga kesehatan ialah sebesar 92,53 persen. Dan pada tahun 2022 terjadi peningkatan angka proporsi menjadi 93,45 persen.

Indikator 3.1.2*(b) ialah Persentase perempuan pernah kawin umur 15- 49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan di Sulawesi Tengah telah mencapai target pada tahun 2020 ialah sebesar 77,26 persen dengan target capaian ialah sebesar 56,16 persen. Adapun angka capaian ini terus meningkat hingga mencapai angka 86,32 persen pada tahun 2022 yang sebelumnya hanya sebesar 81,29 persen pada tahun 2021. Berikut disajikan data mengenai Persentase perempuan pernah kawin umur 15- 49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan di Sulawesi Tengah Tahun 2018-2022.



Gambar 2.160 Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 15-49 Tahun Yang Proses Melahirkan Terakhirnya Di Fasilitas Kesehatan

Berikutnya indikator 3.7.2* mengenai angka kelahiran pada remaja (umur 10-14 tahun; umur 15-19 tahun) per 1000 perempuan di kelompok umur yang sama di Sulawesi Tengah dalam tiga tahun berturut-turut yaitu tahun 2018 hingga tahun 2020 angkanya tetap sama yaitu senilai 91 persen. Pada Tahun 2020 angka capaiannya ialah sebesar 91 persen, angka ini belum mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 88,5 persen pada tahun 2020. Berikut disajikan data mengenai angka kelahiran pada remaja (umur 10-14 tahun; umur 15-19 tahun) per 1000 perempuan di kelompok umur di Sulawesi Tengah:



Gambar 2.161 Angka Kelahiran Pada Remaja (Umur 10-14 Tahun; Umur 15-19 Tahun) Per 1000 Perempuan Di Kelompok Umur Yang Sama

Selanjutnya indikator 3.8.1(a) yang ada di dalam tujuan 3 yaitu Unmet need pelayanan kesehatan atau persentase penduduk yang memiliki keluhan kesehatan dan terganggu aktifitasnya namun tidak berobat jalan adalah perbandingan antara banyaknya penduduk yang memiliki keluhan kesehatan dan terganggu aktifitasnya namun tidak berobat jalan dan jumlah penduduk, dinyatakan dalam satuan persen (%). Dengan angka capaian pada tahun 2020 ialah sebesar 7,52 persen, angka ini belum mencapai target pada tahun tersebut dengan target sebesar 5,06 persen. Angka capaian pada tahun 2021 ialah sebesar 6,25 persen yang kemudian meningkat hingga 7,93 persen pada tahun 2022. Berikut disajikan data mengenai Unmet need pelayanan kesehatan Sulawesi Tengah Tahun 2018-2022.



Sumber: Dinas Kesehatan

Gambar 2.162 Unmet Need Pelayanan Kesehatan

Indikator berikutnya ialah Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bertujuan untuk memberikan perlindungan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia dari guncangan kesehatan. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mempunyai multi manfaat, secara medis dan maupun non medis, bermanfaat secara komprehensif; yakni pelayanan yang diberikan bersifat paripurna mulai dari preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif. Seluruh pelayanan tersebut tidak dipengaruhi oleh besarnya biaya iuran bagi peserta. Promotif dan preventif yang diberikan bagi upaya kesehatan perorangan (personal care). Angka cakupan JKN di Sulawesi Tengah meningkat pesat pada tahun 2021 yaitu sebesar 92,68 persen padahal sebelumnya angka cakupan JKN tahun 2020 ialah sebesar 81,11 persen. Berikut data mengenai cakupan Jaminan Kesahatan Nasional (JKN) Sulawesi Tengah Tahun 2018-2021.



Sumber: Dinas Kesehatan

Gambar 2. 163 Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Indikator 3.a.1* atau Persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun Sulawesi Tengah mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2020 persentase ini mencapai angka 30,64 persen. Dengan angka capaian tersebut belum mencapai target yang ditetapkan pada tahun tersebut yaitu sebesar 28,17 persen. Angka capaian ini kemudian menurun hingga mencapai 29,04 persen pada tahun 2022. Berikut ini disajikan data mengenai tren penurunan Persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun Sulawesi Tengah tahun 2018-2022.



Gambar 2. 164 Persentase Merokok Pada Penduduk Umur ≥ 15 Tahun



Adapun kendala yang dialami dalam pencapain tujuan 3 ialah sebagai berikut:

- 1. Masih kurangnya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, khususnya mereka yang tinggal di daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan;
- 2. Masyarakat belum sepenuhnya dan belum seluruhnya sadar menerapkan pola hidup bersih dan sehat;
- 3. Masih kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat pencegahan berbagai jenis penyakit baik penyakit menular maupun penyakit yang tidak menular;
- 4. Belum optimalnya mekanisme koordinasi dan sinergi lintas sektor dalam pencegahan penyakit yang diderita oleh masyarakat;
- 5. Tingkat pengetahuan, ketrampilan, dan kualifikasi tenaga kesehatan yang belum merata merupakan salah satu faktor penyebab kematian ibu dan anak.

Berdasarkan kendala-kendala tersebut adapun upaya percepatan pencapaian TPB/SDGs tujuan 3 yang dapat dilakukan ialah sebagai berikut:

- 1. Optimalisasi layanan kesehatan berkualitas dan merata di seluruh kabupaten/kota yang ada di Sulawesi Tengah. Dalam hal pelayanan kesehatan primer diarahkan untuk upaya pelayanan promotif dan preventif melalui pendekatan continuum of care dan intervensi berbasis risiko kesehatan baik dalam tatanan tata kelola klinis, tata kelola manajemen dan tata kelola program;
- 2. Upaya perbaikan gizi masyarakat untuk pengingkatan mutu gizi masyarakat Sulawesi Tengah, dilakukan melalui: perbaikan pola konsumsi makanan yang sesuai dengan gizi seimbang perbaikan perilaku sadar gizi, aktivitas fisik, dan kesehatan peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi yang sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi;
- 3. Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika dilakukan melalui beberapa sebagai berikut ini: Pencegahan Primer pencegahan, Prevention). Upaya ini terutama dilakukan untuk mengenali kelompok yang mempunyai resiko tinggi untuk meyalahgunakan NAPZA, setelah itu melakukan itervensi terhadap mereka agar tidak menggunakan NAPZA;
- 4. Penyediaan air besih dan sanitasi layak di seuruh wilayah yang ada di kabupaten/kota yang ada di Sulawesi Tengah, khususnya bagi penduduk miskin



Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas

Pendidikan berkualitas dalam tujuan 4 TPB/SDGs ini berarti menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua masyarakat Sulawesi Tengah. Salah satu indikator dalam tujuan ini APK Perguruan Tinggi (PT) di Sulawesi Tengah menunjukkan angka capaian sebesar 39,48 persen pada tahun 2022. Dimana sebelumnya APK PT pada tahun 2021 ialah sebesar 40,11 persen. Berikut APK PT di Sulawesi Tengah dari tahun 2018 hingga tahun 2022:



Sumber: BPS, 2022

Gambar 2.165 Angka Partisipasi Kasar PT

Selain APK, salah satu indikator yang dalam mencapai pendidikan berkualitas adalah Angka Partisipasi Murni. APM merupakan perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. APM SD/sederajat di Sulawesi Tengah dari tahun ke tahun menunjukkan adanya peningkatan. Namun peningkatan ini belum mencapai target pada tahun 2020 dengan target sebesar 100,84 persen. Berikut disajikan data mengenai tren peningkatan APM SD/sederajat di Sulawesi Tengah dari Tahun 2018 hingga Tahun 2022 dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS, 2021

Gambar 2.166 Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan/Laki- Laki SD/Sederajat

Indikator berikutnya ialah Proporsi remaja usia 15-24 tahun dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi di Sulawesi Tengah telah mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2020 ialah sebesar 76,52 persen. Tidak hanya itu, proporsi ini juga mengalami tren peningkatan setiap tahunnya. Pada Tahun 2018 proporsi remaja yang memiliki keterampitan TIK ialah sebesar 61,45 persen yang kemudian meningkat hingga 86,96 persen pada tahun 2022. Berikut gambaran Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi dari tahun 2018 hingga tahun 2022.



Gambar 2.167 Proporsi Remaja Usia 15-24 Tahun Dengan Keterampilan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Indikator 4,6,1(a) ialah Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun di Sulawesi Tengah mencapai 98,05 persen pada tahun 2022. Adapun target yang ditetapkan pada tahun 2020 ialah sebesr 97,85 persen. Target ini **telah tercapai** pada tahun tersebut dengan angka capaian sebesar 98,24 persen. Angka ini kemudian meningkat sebesar 98,28 persen pada tahun 2021. Yang kemudian menurun mencapai 98,05 persen pada tahun 2022. Berikut disajikan gambar mengenai Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun Sulawesi Tengah Tahun 2018-2022.



Gambar 2.168 Persentase Angka Melek Aksara Penduduk Umur ≥ 15 Tahun

Adapun kendala yang dialami dalam pencapain tujuan 4 ialah sebagai berikut:

- Kualitas sekolah dari tingkat SD/MI/sederajat, SMP/MTs/sederajat, SMA/MA/SMK/ sederajat belum seluruhnya terakreditasi baik;
- APK dan APM belum mencapai target yang ditetapkan dalam TPB/SDGS/SDGs, tetapi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tetap optimis dapat mencapai target tersebut. Hal ini disebabkan sulitnya aspek keterjangkauan dan aksesibiitas yang belum merata di seluruh wilayah;
- 3. Sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran belum sepenuhnya memadai dan merata di seluruh wilayah;
- 4. Belum mencukupi kondisi ketersediaan tenaga guru di beberapa kabupaten dan belum merata dari segi kuantitas dan kualitas, terutama wilayah-wilayah terpencil dan sulit dijangkau;
- Keberhasilan Provinsi Sulawesi Tengah dalam meningkatkan rata-rata angka melek aksara atau melek huruf penduduk usia di atas 15 tahun menjadi 98,24 persen, telah melampaui target yang ditetapkan yaitu 96,1 persen. Upaya



pencapaian ini dilakukan dengan optimalisasi pendidikan kesetaraan seperti paket A (SD), paket B (SMP), dan paket C (SMA) di seluruh kabupaten/kota yang ada di Sulawesi Tengah.

Berdasarkan kendala-kendala tersebut adapun upaya percepatan pencapaian TPB/SDGs tujuan 4 yang dapat dilakukan ialah sebagai berikut:

- Peningkatan profesionalisme guru. Keberhasilan guru dalam menyelenggarakan proses belajar mengajar menjadi faktor determinan upaya peningkatan kualitas pendidikan di sekolah. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memberikan berbagai jenis beasiswa dan bantuan bagi guru yang melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi;
- 2. Salah satu langkah yang ditempuh dalam mencapai pendidikan berkualitas di Sulawesi Tengah adalah melalui Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). PPK harus menjadi satu kesatuan mendidik dan belajar bagi seluruh pelaku pendidikan dalam satuan pendidikan. Pendidikan karakter merupakan gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerjasama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat;
- 3. Pemerataan akses layanan pendidikan di seluruh kabupaten/kota yang terdapat di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah;
- 4. Peningkatan sarana dan prasarana pembelajaran serta pemerataan kuantitas dan kualitas guru dan tenaga kependidikan.

Tujuan 5 Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender atau *Gender Equality* merupakan suatu keadaan yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Kesetaraan gender merupakan salah satu bagian dari TPB/SDGs sebab diharapkan kesetaraan gender akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan, dan memerintah secara efektif. Dengan demikian mempromosikan kesetaraan gender adalah bagian utama dari strategi pembangunan dalam rangka untuk memberdayakan masyarakat (semua orang)-perempuan dan laki-laki-untuk mengentaskan diri dari kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup mereka. Salah satu indikator yang menjadi ukuran ialah proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah. Saat ini keterlibatan perempuan di Provinsi Sulawesi Tengah

dalam DPRD (Dewan Perwakil Rakyat Daerah) periode 2019-2024 ialah 12 orang atau hanya sekitar 27 persen. Tentu saja hal ini **belum mencapai target** yang seharusnya ialah 30 persen. Apabila diperinci sesuai partai politiknya ialah sebagai berikut:

Tabel 2.77

Jumlah dan Persentase Keterlibatan Perempuan Pada
DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2019-2024

1	Р	II IMI AH	KETERLIBATAN
-		JOINLAIT	PEREMPUAN
7	0	7	0%
1	2	6	33%
4		O	33%
2	2	4	50%
4	2	6	33%
	_	7	4.40/
6	1	/	14%
1	1	2	50%
4	2	4	75%
1	3	4	75%
2	0	2	0%
3	1	4	25%
2	0	2	0%
		_	
1	0	1	0%
33	12	45	27%
	4 2 4 6 1 1 2 3	7 0 4 2 2 2 4 2 6 1 1 1 3 2 0 3 1 2 0 1 0	7 0 7 4 2 6 2 2 4 4 2 6 6 1 7 1 1 2 1 3 4 2 0 2 3 1 4 2 0 2 1 0 1

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah

Lebih jelasnya berikut persentase keterlibatan perempuan Sulawesi Tengah dalam parlemen tingkat pusat, parlemen daerah maupun pemerintah daerah:

Tabel 2.78
Persentase Keterlibatan Perempuan Sulawesi Tengah
Dalam Parlemen Tingkat Pusat, Parlemen Daerah Maupun Pemerintah Daerah

NO	NAMA DAERAH PEMILIHAN	JUMLAH	L	Р	KETERLIBATAN PEREMPUAN
1	DPR RI Dapil Sulawesi Tengah	7	6	1	14%
2	DPD RI Sulawesi Tengah	4	4	0	0%
3	DPRD Provinsi Sulawesi Tengah	45	33	12	27%

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah

Dapat dilihat bahwa jumlah perempuan yang terlibat dalam parlemen tergolong kurang atau masih rendah. Padahal keterlibatan perempuan dalam parlemen sudah ditetapkan sebesar 30 persen. Keterwakilan perempuan dalam politik dinilai penting

untuk memperkuat partisipasi perempuan dan mendorong pengambilan keputusan berperspektif gender. Keterlibatan ini berguna untuk mendorong aturan mengenai peningkatan jumlah perempuan serta menambah jumlah kebijakan pro-perempuan.

Sedangkan salah satu indikator 5.5.2* mengenai keterlibatan perempuan yang berada di posisi managerial Sulawesi Tengah pada tahun 2022 mencapai angka 38,44 persen. Padahal sebelumnya tahun 2021 mencapai angka 39,3 persen. Untuk lebih jelasnya, di bawah ini disajikan data mengenai Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial Sulawesi Tengah Tahun 2018-2022.



Sumber: BPS

Gambar 2.169 Proporsi Perempuan Yang Berada Di Posisi Managerial

Indikator 5.b.1* ialah Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam di Sulawesi Tengah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan ini diawali dengan angka capaian sebesar 56,6 persen pada tahun 2018 hinga 62,39 persen pada tahun 2022. Berikut disajikan data mengenai Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam di Sulawesi Tengah tahun 2018-2022.



Sumber: DKIPS



Gambar 2.170 Proporsi Individu Yang Menguasai/Memiliki Telepon Genggam

Adapun kendala yang ditemukan dalam pencapaian tujuan 5 ialah sebagai berikut:

- Masih kuatnya budaya yang melebihkan laki-laki dalam pekerjaan dan aktifitas kehidupan bermasyarakat;
- 2. Belum tersedianya data pembangunan secara menyeluruh yang terpilah menurut jenis kelamin, sehingga sulit menentukan masalah-masalah gender yang ada;
- 3. Data kekerasan terhadap perempuan dan anak belum menunjukkan kondisi yang sebenarnya. Secara umum data tentang kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak lebih sedikit daripada jumlah yang sesungguhnya terjadi, karena tidak semua kasus kekerasan dilaporkan dan diketahui orang lain;
- 4. Belum maksimalnya anggaran yang disediakan pemerintah pusat dan daerah untuk mengatasi kesenjangan gender dan program-program pemberdayaan perempuan;
- Kuantitas dan kualitas SDM yang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih kurang. Jumlah atau kuantitas SDM khususnya ASN yang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di UPTD masih sangat minim;
- 6. Pelibatan laki-laki dalam tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak

Berdasarkan kendala-kendala tersebut adapun upaya percepatan pencapaian TPB/SDGs tujuan 5 yang dapat dilakukan ialah sebagai berikut:

- Optimalisasi pemberdayaan ekonomi perempuan, peningkatan kualitas SDM perempuan, dan peningkatan kualitas kesehatan perempuan dan anak, khususnya penurunan Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu;
- Pelibatan laki-laki, tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Salah satu program yang berhasil dilakukan oleh DP3A dalam menurunkan jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah dengan membetuk Aliansi Laki-Laki Peduli Perempuan dan Anak (ALAPURA);
- 3. Menambah jumlah SDM yang memiliki kompetensi dibidang penangangan kekerasan perempuan. Pendampingan psikososial bagi korban kasus kekerasan



- terhadap perempuan harus melibatkan tenaga psikolog, penasihat hukum, petugas medis, dan pekerja sosial (Peksos);
- 4. Koordinasi, sinergitas, keterpaduan dan kemitraan penanganan tindak kekerasan perempuan antara lembaga pemerintah, swasta, dan NGO yang peduli terhadap masalah kekerasan perempuan.

Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak

Tujuan 6 yaitu air bersih dan sanitasi Layak dengan salah indikatornya ialah Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman dengan angka capaian sebesar 86,74 persen pada tahun 2022. Angka ini telah mencapai target yang ditetapkan sebelumnya yaitu sebesar 59,46 persen. Angka capaian ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 88,51 persen. Berikut ini data persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman di Sulawesi Tengah Tahun 2018-2022.



Gambar 2.171 Persentase Rumah Tangga Yang Layanan Air Minum Yang Dikelola Secara Aman

Indikator 6,2,1* ialah persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak di Sulawesi Tengah dengan capaian angka sebesar 75,01 persen pada tahun 2022. Angka ini telah mencapai target yang ditetapkan sebelumnya dengan target capaian sebesar 59,46 persen. Adapun capaian angka yang diperoleh pada tahun 2021 ialah sebesar 76,06 persen. Di bawah ini disajikan data mengenai Persentase rumah tangga yang mengggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air sabun di Sulawesi Tengah Tahun 2018-2022.



Sumber: PU Ciptakarya

Gambar 2.172 Persentase Rumah Tangga Yang Mengggunakan Layanan Sanitasi Yang Dikelola Secara Aman, Termasuk Fasilitas Cuci Tangan Dengan Air Sabun

Adapun tantangan yang dihadapi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah adalah ketersediaan air minum layak yang berkaitan erat dengan daya dukung penyediaan air. Penyediaan air bersih memiliki hambatan ialah sebagai berikut:

- 1. Tingginya intensitas penggunaan air tanah secara tidak berkelanjutan oleh rumah tangga maupun dunia usaha.
- 2. Memburuknya kualitas air baku yang menyebabkan pengolahan air menjadi lebih tinggi.

Dengan pesatnya perkembangan daerah dan pertambahan penduduk yang terus-menerus, situasi sumber daya penyedia air menjadi semakin serius untuk ditangani. Untuk mewujudkan pemanfaatan sumber daya penyedia air yang berkelanjutan, masyarakat dan pemerintah sudah harus mampu menerapkan pengelolaan dan penggunaan air secara bijak.

Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk mempercepat pencapaian target di tujuan 6 TPB/SDGs yakni melalui pengesahan regulasi khusus yang mengatur mengenai penyediaan air bersih dan sanitasi yang layak. Di antaranya melalui Peraturan Gubernur tentang rencana induk pengembangan prasarana dan sarana pengelolaan air bersih dan limbah domestik.

Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau

Pembangunan ekonomi yang infklusif adalah cara paling efektif untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Tetapi sebagian besar kegiatan ekonomi mustahil dilakukan tanpa tersedianya energi modern yang cukup, handal, dan memiliki harga yang kompetitif. Energi dan cara menggunakannya harus efisien, berkelanjutan dan sebisa mungkin terbarukan. Apabila semua teknologi efisiensi energi yang tersedia saat ini diterapkan, konsumsi energi secara signifikan bisa dipangkas menjadi sekitar sepertiga.

Salah satu indicatornya ialah rasio elektrifikasi atau untuk mengetahui jumlah rumah tangga yang sudah mendapatkan akses listrik atau Perbandingan jumlah pelanggan rumah tangga berlistrik baik dari listrik PLN maupun listrik non-PLN dengan jumlah rumah tangga total. Rasio tersebut dapat dilihat sebagai berikut:



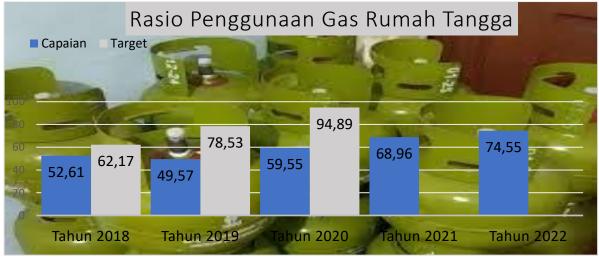
Sumber: DESDM

Gambar 2.173 Rasio elektrifikasi

Dapat dilihat bahwa rasio elektrifikasi Sulawesi Tengah telah mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2018 rasio ini mencapai angka 91,93 persen. Kemudian meningkat pada tahun 2019 menjadi 94,7 persen. Lalu meningkat menjadi 97,65 persen pada tahun 2020.

Indikator berikutnya ialah konsumsi listrik per kapita dengan capaian pada tahun 2018 ialah 364,5 kWh yang selanjutnya meningkat hingga 375,3 kWh. Dan hingga tahun 2020 konsumsi listrik per kapita meningkat menjadi 429 kWh.

Indikator selanjutnya ialah rasio penggunaan gas rumah tangga, berdasarkan data tersedia penggunaan gas rumah tangga meningkat dari tahun ke tahun. Data rasio gas rumah tangga di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018-2022 disajikan pada gambar sebagai berikut.



Sumber: DESDM

Gambar 2.174 Rasio Penggunaan gas Rumah Tangga

Dapat dilihat bahwa, penggunaan gas rumah tangga meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 penggunaan gas rumah tangga mencapai 59,55 persen. Angka ini ternyata **belum mencapai** target yang ditetapkan pada tahun tersebut yaitu sebesar 68,96 persen. Kemudian pada tahun 2022 angka capaian penggunaan gas rumah tangga ialah mencapai 74,55 persen.

Indikator 7.2.1* atau indikator Bauran energi terbarukan. Sebelumnya perlu diketahui mengenai energi final yang merupakan energi yang langsung dapat dikonsumsi oleh pengguna akhir. Sedangkan energi terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber energi terbarukan antara lain berasal dari panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut. Olehnya dapat disimpulkan bahwa bauran energi terbarukan (%) adalah persentase antara total konsumsi final energi terbarukan terhadap total konsumsi energi final. Energi terbarukan yang diukur yaitu *hydropower* (tenaga air), *geothermal* (panas bumi), dan biomassa. Hydropower adalah energi potensial dari air yang mengalir. Energi ini dihitung sebagai input daya untuk menghasilkan listrik dan terdiri dari bendungan, aliran sungai, *mini hydro* dan *micro hydro*. Jumlah energi hidro yang dibutuhkan setara dengan energi fosil yang diperlukan untuk menghasilkan listrik. Geothermal adalah salah satu jenis energi yang dihasilkan dari magma di dalam bumi dalam daerah vulkanik. Tekanan panas dan uap tinggi yang dipancarkan dapat dimanfaatkan untuk menekan turbin uap di Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi, atau dimanfaatkan secara langsung untuk pengeringan produk pertanian. Biomassa adalah jenis bahan bakar berbasis bahan organik terbarukan. Adapun manfaatnya adalah untuk mengetahui seberapa besar proporsi penggunaan energi terbarukan terhadap energi total. Berikut ini disajikan data mengenai baruan energy terbarukan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2018-2020.



Sumber: DESDM

Gambar 2.175 Baruan Energi Terbarukan

Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan baruan energy terbarukan. Pada tahun 2018 baruan energy terbarukan ialah sebesar 5,1 persen. Yang kemudian meningkat sebesar 0,6 persen pada tahun 2019 yaitu senilai 5,7 persen. Kemudian meningkat pesat pada tahun 2020 hingga mencapai 9,97 persen.

Dalam pencapaian tujuan 7 tersebut terdapat kendala atau tantangan sebagai berikut:

- 1. Masih rendahnya rasio Penggunaan Gas Rumah Tangga di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2020, dimana hingga Tahun 2020 masih sebesar 59,55 persen;
- 2. Masih sangat rendahnya bauran energi terbarukan di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2020, dimana hingga Tahun 2020 masih sebesar 9,97 persen;
- 3. Sudah tingginya rasio elektrifikasi di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2020, dimana hingga Tahun 2020, rasio elektrifikasi sudah mencapai sebesar 97,65 persen pada Tahun 2020;
- Tingginya biaya investasi, birokrasi, insentif atau subsidi, dan harga jual produk akhir energi terbarukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan energi fosil, kurangnya pengetahuan dalam mengadaptasi fasilitas energi bersih, serta potensi sumber daya energi baru dan terbarukan pada umunya kecil dan tersebar.



Selanjutnya upaya yang dapat dilakukan mempercepat pencapaian target di tujuan 7 TPB/SDGs yakni mengoptimalkan kebijakan pemerintah untuk mendukung peningkatan proporsi energi terbarukan.

Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbduhan Ekonomi

Memiliki pekerjaan tidaklah menjamin kemampuan untuk keluar dari cengkeraman kemiskinan. Kekurangan peluang kerja yang layak secara terus menerus, investasi yang tidak memadai dan rendahnya konsumsi mengarah pada erosi kontrak sosial mendasar yang menjadi landasan masyarakat demokratis: Semua kemajuan harus dibagi bersama. Menempatkan penciptaan kesempatan kerja sebagai pusat dari pembuatan kebijakan ekonomi dan rencana pembangunan, tidak hanya akan menghasilkan peluang kerja yang layak namun juga pertumbuhan yang lebih kuat, inklusif dan dapat mengurangi kemiskinan. Ini merupakan lingkaran positif yang baik bagi perekonomian maupun bagi masyarakat serta mendorong pembangunan berkelanjutan.

Dalam indikator 8.1.1* dalam tujuan ini ialah laju pertumbuhan PDB Per kapita. PDB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Berikut ini laju pertumbuhan PDB per kapita Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018-2022.



Gambar 2.176 Laju Pertumbuhan PDB Perkapita

Dapat dilihat bahwa, pertumbuhan PDB per kapita Sulawesi Tengah tahun 2020 ialah sebesar 7,13 persen. Angka ini belum mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2020 yaitu sebesar 7,2 persen. Dan PDB per kapita tahun 2019 ialah sebesar 7,7 persen. Kemudian pada tahun 2022 PDB per kapita Sulawesi Tengah mencapai angka 13,51 persen.

Indikator 8.2.1* mengenai laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/ tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun berdasarkan BP memiliki capaian sebesar 11,98 persen pada tahun 2018. Selanjutnya, memperoleh angka sebesar 9,86 persen pada tahun 2019. Dan pada tahun 2020 sebesar 1,38 persen. Angka ini belum mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2020 yaitu sebesaar 13.51 persen. Adapun capaian angka berikutnya pada tahun 2021 ialah sebesar 11,09 persen. Dan angka tersebut menurun sebesar 1,2 persen pada tahun 2022 yaitu mencapai 10,7 persen.

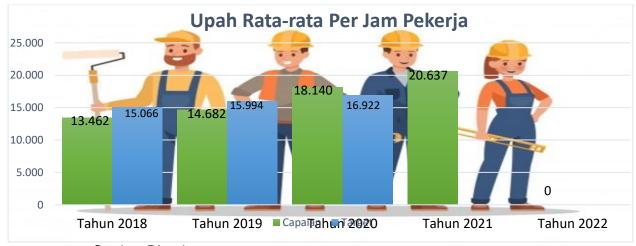
Indikator 8.3.1 ialah Proporsi Lapangan Kerja Informal Berdasarkan Sektor Dan Jenis Kelamin sebagai berikut:



Gambar 2.177 Proporsi Lapangan Kerja Informal Berdasarkan Sektor Dan Jenis Kelamin

Dapat dilihat bahwa, Proporsi Lapangan Kerja Informal Berdasarkan Sektor Dan Jenis Kelamin pada tahun 2020 mencapai angka sebesar 60,47 persen. Namun pada tahun 2021 angka capaiannya menurun menjadi 59,45 persen. Dan pada tahun 2022 angka capaiannya menjadi 59,11 persen. Angka ini telah mencapai target yang ditentukan sebelumnya yaitu sebesar 54,68 persen.

Indikator 8.5.1* mengenai Upah rata-rata per jam pekerja yang merupakan imbalan atau penghasilan rata-rata yang diperoleh per jam baik berupa uang maupun barang. Berikut ini disajikan data Upah rata-rata per jam pekerja di Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2018-2022.



Sumber: DIsnakertrans

Gambar 2.178 Upah Rata-Rata Per Jam Pekerja

Dapat dilihat bahwa upah rata-rata perjam pekerja yang ada di Sulawesi Tengah Pada tahun 2018 capaiannya ialah 13,46 yang kemudian meningkat pada tahun 2019 ialah sebesar 14,68 persen. Peningkatan ini terjadi juga pada tahun 2020 ialah sebesar 18,14 persen. Peningkatan ini juga terjadi pada tahun 2021 ialah sebesar 20,637. Namun, pada tahun 2022 terjadi penurunan upah rata-rata perjam pekerja ialah sebesar 15,89 persen.

Indikator 8.5.2(a) ialah Tingkat setengah pengangguran merupakan mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan (daholu disebut setengah pengangguran terpaksa). Adapun capaian dari indikator ini disajikan sebagai berikut:

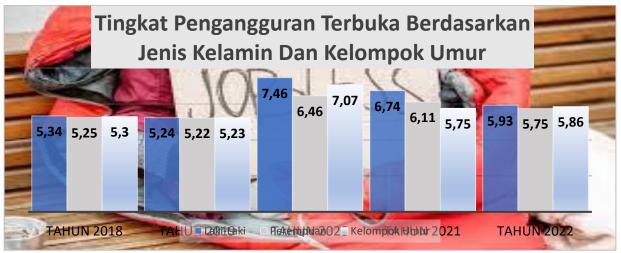


Sumber: Bappeda

Gambar 2.179
Tingkat Setengah Pengangguran

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa, persentase tingkat setengah pengangguran mencapai angka 7,62 persen pada tahun 2022. Adapun angka capaian pada tahun 2021 sebelumnya ialah sebesar 10,38 persen. Terdapat penurunan tingkat setengah pengangguran di Sulawesi Tengah sebesar 2,76 persen.

Indikator berikutnya ialah tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur. Tingkat pengangguran terbuka merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Adapun manfaatnya ialah untuk mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. Berikut ini tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur Sulawesi Tengah tahun 2018-2020.



Sumber: Disnakertrans

Gambar 2.180 Tingkat Pengangguran Terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur

Berdasarkan gambar diatas diketahui bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka berjenis kelamin laki-laki di Sulawesi Tengah pada tahun 2020 sebesar 7,46 persen. Angka ini menurun pada tahun 2021 menjadi 6,74 persen. Yang kemudian menurun kembali pada tahun 2022 menjadi 5,93 persen. Sama halnya dengan tingkat pengangguran terbuka berjenis kelamin laki-laki, penurunan angka capaian tingkat pengangguran terbuka dengan jenis kelamin perempuan mengalami penurunan pada tahun 2021 yaitu sebesar 6,11 persen yang kemudian menurun lagi sebesar 5,75 persen pada tahun 2022. Adapun tingkat pengangguran terbuka berdasarkan kelompok umur di Sulawesi Tengah mencapai angka 5,86 persen pada tahun 2022, padahal sebelumnya capaian angka pada tahun 2021 ialah sebesar 6,49 persen.

Indikator berikutnya ialah persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET). Berikut ini disajikan data persentase usia muda (15-24 tahun) di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018-2022 terdapat pada gambar sebagai berikut.



Sumber: Disnakertrans

Gambar 2.181 Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)

Dapat dilihat bahwa, persentase usia muda yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET) pada tahun 2022 ialah sebesar 22,99 persen. Angka ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2021, persentasenya mencapai 22,31 persen. Kemudian pada tahun 2020 capaian persentasenya sebesar 22,23 persen. Di tahun 2019 capaian angkanya ialah sebesar 21,85 persen.

Adapun tantangan yang dihadapi dalam pencapaian tujuan 8 ini ialah sebagai berikut:

- 1. Rendahnya pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah
- 2. Rendahnya devisa yang berasal dari Sektor Pariwisata
- 3. Rendahnya jumlah pekerja di Sektor Pariwisata
- 4. Rendahnya akses permodalan melalui kredit bagi UMKM di Provinsi Sulawesi Tengah

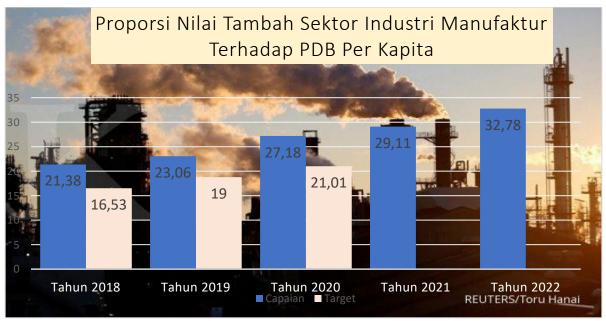
Berdasarkan kendala-kendala tersebut adapun upaya percepatan pencapaian TPB/SDGs tujuan 8 yang dapat dilakukan ialah dengan mengoptimalkan peran kredit UMKM sehingga akses finansial juga akan meningkat yang kemudian akan mendorong kemampuan UMKM melakukan ekspansi usaha. Dalam kaitan ini maka peranan kredit terhadap perekonomian menjadi penting terutama dari aspek makro terhadap pertumbuhan ekonomi maupun aspek mikro pada usaha mikro dan kecil. Berdasarkan indikator pertumbuhan ekonomi regional dan alokasi kredit, terdapat indikasi bahwa kredit berperan sebagai stimulator pertumbuhan ekonomi.

Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur

Tujuan berikutnya ialah industry, inovasi dan infrastruktur yaitu dengan membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi. Investasi berkelanjutan dalam infratruktur dan inovasi adalah penggerak penting pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Kemajuan teknologi juga adalah kunci untuk menemukan solusi jangka panjang bagi tantangan ekonomi dan lingkungan, seperti menyediakan lapangan pekerjaan baru dan mendorong efisiensi energi. Mempromosikan industri berkelanjutan serta berinvestasi dalam penelitian ilmiah dan inovasi adalah cara-cara penting untuk memfasilitasi pembangunan berkelanjutan.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus menerus mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.

Salah satu indikatornya ialah proporsi nilai tambah sektor Industri Manufaktur terhadap PDB Per kapita. Berikut disajikan data proporsi nilai tambah Sektor Industri Manufaktur terhadap PDRB dan Per Kapita terdapat pada gambar sebagai berikut.



Sumber: Bappeda



Gambar 2.182 Proporsi Nilai Tambah Sektor Industri Manufaktur Terhadap PDRB Dan Per Kapita

Dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Pada tahun 2020 angka capaiannya ialah sebesar 27,18 persen, angka tersebut belum mencapai target yang ditetapkan pada tahun tersebut. Selanjutnya, pada tahun 2022 proporsi nilai tambah Sektor Industri Manufaktur terhadap PDRB dan Per Kapita ialah sebesar 32,78 persen. Angka ini meningkat dari capaian tahun 2021 yaitu sebesar 29,11. Sebelumnya juga pada tahun 2020 angka capaiannya ialah sebesar 27,18 persen.

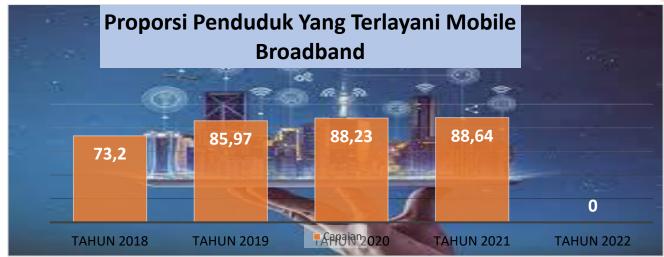
Berikutnya ialah indikator 9.2.1(a) mengenai Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur. Adapun capaian pada tahun 2022 mengenai indikator ini ialah sebesar 29,69 persen. Angka capaian ini meningkat sebesar 10,67 persen dari tahun sebelumnya. Adapun data Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018-2022 terdapat pada gambar sebagai berikut.



Sumber: Bappeda

Gambar 2.183 Laju Pertumbuhan PDB Industri Manufaktur

Indikator berikutnya ialah Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband. Mobile Broadband merupakan istilah marketing untuk jalur koneksi wireless ke internet yang menggunakan perangkat mobile seperti modem, perangkat Wi-Fi atau tethering dari smartphone untuk bisa terkoneksi ke jaringan internet. Berikut ini disajikan data Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018-2022 terdapat pada gambar sebagai berikut.



Sumber: DKIPS

Gambar 2.184 Proporsi Penduduk Yang Terlayani *Mobile Broadband*

Beberapa tantangan yang dihadapi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam pencapaian tujuan 9 yakni sebagai berikut:

- 1. Nilai Tambah Industri Kecil Terhadap Total Nilai Tambah Industri di Provinsi Sulawesi Tengah dan terus mengalami penurunan;
- Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur di Provinsi Sulawesi Tengah 2. berfluktuasi.

Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk mempercepat pencapaian TPB/SDGs tujuan 9 yang dapat dilakukan ialah melakukan program pembinaan dan pengembangan industri, program pengawasan dan pengendalian industri, serta program pembinaan dan penempatan tenaga kerja serta perlu adanya perbaikan secara terus menerus mengenai iklim investasi di daerah agar dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya di Provinsi Sulawesi Tengah.

Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan

Tujuan 10 dalam SDGs ialah Berkurangnya Kesenjangan yang berarti mengurangi ketimpangan di dalam negara dan di antara negara-negara di dunia. Dalam bahasa Inggris, tujuan ini disebut sebagai reduced inequality yaitu reduce inequality within and among countries. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berkomitmen bahwa Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.

Salah satu indikator dalam tujuan 10 ialah Rasio Gini. Indeks atau rasio Gini adalah ukuran statistik yang menunjukkan distribusi pengeluaran per kapita penduduk suatu daerah. Rasio Gini digunakan sebagai tolok ukur ketimpangan. Rasio Gini bernilai 0 (nol) menunjukkan kesetaraan sempurna yang berarti seluruh penduduk memiliki pengeluaran per kapita yang sama. Sedangkan Roefisien Gini bernilai 1 (satu) menunjukkan ketimpangan sempurna yang berarti hanya satu penduduk saja yang memiliki pengeluaran per kapita dan yang lainnya tidak sama sekali. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi Roefisien Gini, semakin tinggi tingkat ketimpangan suatu daerah. Berikut ini disajikan data roefisien gini Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2018-2020



Sumber: Bappeda

Gambar 2.185 Rasio Gini

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa, nilai rasio gini di Sulawesi Tengah pada tahun 2022 ialah sebesar 0,337 persen. Angka ini lebih rendah daripada angka rasio gini penduduk Indonesia yang mencapai 0,381 persen pada tahun 2022. Adapun angka capaian rasio gini pada tahun 2021 ialah sebesar 0,351 persen.

Indikator 10.1.1.(a) mengenai Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur dengan data sebagai berikut:



Sumber: BPS

Gambar 2.186 Persentase Penduduk Yang Hidup Di Bawah Garis Kemiskinan Nasional Menurut Jenis Kelamin Dan Kelompok Umur

Berdasarkan gambar di atas terdapat penurunan, kondisi ini menunjukkan bahwa penurunan penduduk miskin selama kurun beberapa tahun terakhir tidak besar (rendah penurunan setiap tahun). Pada tahun 2018 angka capaiannya ialah sebesar 13,59 persen kemudian menurun hingga 12,18 persen pada tahun 2021. Dan capaian angka pada tahun 2022 ialah sebesar 12,33 persen terdapat peningkatan sebesar 0,15 persen yang tentu saja harus menjadi perhatian pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Indikator 10.1.1.(f) mengenai Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal Sulawesi Tengah mencapai angka capaian sebesar 12,33 persen pada tahun 2022. Angka ini menurun dari tahun 2021 yang bernilai 13 persen. Pada tahun 2020 angka capaian Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal Sulawesi Tengah mencapai 12,92 persen. Angka ini menurun sebesar 0,56 persen dari angka capaian tahun 2019.

Indikator 10.3.1.(a) mengenai Indeks Kebebasan. Indeks Kebebasan merupakan aspek pertama yang membentuk Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Indeks ini mengukur kebebasan setiap individu sebagai warga negara yang dijamin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Indeks Kebebasan Sulawesi Tengah mengalami peningkatan dari tahun 2018 hingga tahun 2020. Adapun capaian indeks ini pada tahun 2020 ialah sebesar 97,33 persen. Angka ini telah mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2020 ialah sebesar 87,5 persen. Berikut ini indeks kebebasa sipil di Sulawesi Tengah tahun 2018-2020.



Sumber: BPS

Gambar 2.187 Indeks Kebebasan

Beberapa tantangan yang dihadapi Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut.

- 1. Masih tingginya persentase penduduk miskin daerah tertinggal di Provinsi Sulawesi Tengah
- 2. Masih tingginya persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah
- 3. Adanya tren angka ketimpangan pendatapan (koefisien Gini) terjadinya kenaikan, baik di daerah perkotaan maupun di perdesaan di Provinsi Sulawesi Tengah

Adapun upaya percepatan pencapaian TPB/SDGs ini ialah dengan mewujudkan percepatan pengentasan kemiskinan dan menjaga tidak terjadinya ketimpangan pendapatan yang semakin melebar dan melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Tujuan 11 Kota dan Pemukiman Yang Berkelanjutan

Tujuan 11 ialah kota dan pemukiman yang berkelanjutan ialah dengan Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan. Lebih dari setengah populasi dunia kini tinggal di wilayah perkotaan. Pembangunan berkelanjutan tidak akan tercapai tanpa perubahan signifikan dalam cara kita membangun dan mengatur wilayah perkotaan. Pertumbuhan kota-kota yang sangat berkembang, ditambah dengan meningkatnya urbanisasi, cepat di negara mengakibatkan terjadinya ledakan jumlah megapolitan. Kemiskinan ekstrem seringkali terpusat di wilayah perkotaan, dan pemerintahan nasional serta kota berjuang keras mengakomodasi pertambahan populasi di wilayah-wilayah ini. Menciptakan kota yang aman dan berkelanjutan berarti memastikan akses pada perumahan yang aman dan terjangkau, serta memperbaiki pemukiman kumuh. Ini juga melibatkan investasi pada transportasi umum, menciptakan ruang hijau bagi publik, dan meningkatkan perencanaan dan pengaturan perkotaan yang inklusif sekaligus melibatkan semua pihak.

Salah satu indikatornya ialah Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau. Adapun angka capaian persentasenya pada tahun 2020 ialah sebesar 58,85 persen. Yang kemudian meningkat pada tahun 2021 senilai 62,7 persen. Dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 58,61 persen. Adapun angka capaian pada tahun 2022 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 13,04 persen. Berikut disajikan data mengenai Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau Sulawesi Tengah Tahun 2018-2022.



Sumber: PU Perkintan

Gambar 2.188 Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Yang Layak Dan Terjangkau

Indikator lainnya ialah pada Tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota. Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), terdapat seberat 119.562,74 ton timbulan sampah di Provinsi Sulawesi Tengah dengan sumber kabaupaten/kota yang terdata yakni Donggala, Banggai Laut, dan Palu. SIPSN adalah Sistem yang mengelola data tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia.

Indikator berikutnya ialah menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkah pada tahun 2030, terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas. Ruang terbuka hijau itu sendiri berfungsi sebagai paru-paru dari sebuah kota atau wilayah. Hal ini dikarenakan seluruh tumbuhan yang ada pada RTH dapat menyerap karbondioksida (CO²), menghasilkan oksigen, menurunkan suhu dan memberikan suasana sejuk serta menajadi area resapan air. Berikut ini disajikan data ruang terbuka hijau (RTH) di Sulawesi Tengah Tahun 2022.

> **Tabel 2.79** Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Sulawesi Tengah Tahun 2022

Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (km²)(A)	Luas RTH (km²)(B)	% RTH(B/A)
Kab. Toli-toli	407.977,00	0,09852	0,00
Kab. Morowali Utara	18.362,39		
Kab. Banggai	9.672,70	0,00336	0,00
Kab. Poso	7.112,25	0,00316	0,00
Kab. Parigi Moutong	5.883,97	2,39844	0,04
Kab. Morowali	5.472,00	0,75375	0,01
Kab. Donggala	5.275,69	0,62411	0,01
Kab. Sigi	5.196,02		
Kab. Banggai Kepulauan	2.488,79	0,041	0,00
Kab. Banggai Laut	725,67		
Kab. Morowali Utara	18.362,39		
Kota Palu	395,06	9,97847	2,53

Sumber: SIPSN

Adapun kendala atau tantangan yang dihadapi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mencapai Tujuan 11 ini ialah:

- 1. Masih rendahnya akses masyarakat terhadap perumahan berkualitas
- 2. Masih rendahnya kesadaran akan pentingnya mempertahankan ruang terbuka hijau (RTH) di wilayah Sulawesi Tengah yang harus menjadi prioritas dalam rangka meningkatkan upaya pelestarian biodiversitas flora yang mempunyai fungsi ekologis dalam menanggulangi permasalahan lingkungan.
- 3. Masih kurangnya kesadaran, partisipasi masyarakat yang masih tergolong rendah terhadap peduli sampah serta kurangnya komunikasi sehingga sinergitas antara pemerintah, masyarakat dan pihak swasta terhadap pengelolaan sampah tidak memperlihatkan titik temu

Olehnya berikut ini upaya yang dapat dilakukan untuk mempercepat pencapaian TPB/SDGs 11 ini ialah:



- 1. Memberikan akses kepada masyarakat terhadap perumahan berkualitas atau layak huni serta mengoptimalkan program bantuan perumahan belum sepenuhnya terfasilitasi.
- 2. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya mempertahankan ruang terbuka hijau (RTH) di wilayah Sulawesi Tengah
- 3. Meningkatkan kesadaran akan partisipasi masyarakat terhadap sampah dengan membangun komunikasi sehingga sinergitas antara pemerintah, masyarakat dan pihak swasta
- 4. Melibatkan semua stake holder untuk mengatasi persoalan sampah sehingga implementasi kebijakan bisa berjalan dengan baik.

Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi Yang Bertanggungjawab

Tujuan 12 ialah untuk menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Meraih pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan berarti kita harus menyadari pentingnya pengurangan jejak ekologi dengan mengubah cara kita memproduksi dan mengkonsumsi makanan dan sumber daya lainnya. Pengelolaan efisien dalam penggunaan sumber daya alam milik bersama, dan cara kita membuang sampah beracun dan polutan adalah target penting untuk meraih tujuan ini. Selain itu mendorong industri, bisnis, dan konsumen untuk mendaur ulang dan mengurangi sampah sama pentingnya, seperti halnya juga mendukung negara-negara berkembang untuk bergerak menuju pola konsumsi yang lebih berkelanjutan pada 2030. Masih banyak penduduk dunia yang bahkan konsumsi kebutuhan dasarnya pun belum bisa dikatakan layak. Mengurangi sisa makanan perkapita global dari pedagang dan konsumen hingga setengahnya juga penting untuk menciptakan produksi dan rantai pasokan yang lebih efisien. Ini bisa membantu menjaga ketahanan pangan dan membawa kita menuju ekonomi dengan sumber daya efisien.

Salah satu indikator dalam tujuan 12 ini ialah jumlah timbulan sampah yang didaur ulang. Timbulan sampah adalah volume sampah atau berat sampah yang di hasilkan dari jenis sumber sampah diwilayah tertentu persatuan waktu. Berikut ini timbulan sampah di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022.



Tabel 2.80 Timbulan Sampah Sulawesi Tengah Tahun 2022

Kabupaten/Kota	Timbulan Sampah Harian(ton)	Timbulan Sampah Tahunan(ton)
Kab. Banggai	188,40	68.767,46
Kab. Donggala	121,19	44.232,89
Kab. Morowali	83,96	30.643,58
Kab. Parigi Moutong	226,25	82.582,53
Kab. Sigi	128,79	47.008,35
Kab. Banggai Laut	37,12	13.549,90
Kab. Morowali Utara	61,12	22.308,80
Kota Palu	202,94	74.073,65
Total	1049,77	383167,16

Sumber: SIPSN

Dapat dilihat bahwa timbulan sampah di SulawesiTengah mencapai 1049,77 per harinya pada tahun 2022. Sedangkan timbulan sampah Sulawesi Tengah pada tahun 2022 mencapai 383167,16 per tahunnya. Secara singkat angka timbulan ini dapat dikurangi dengan cara mengurangi dan mengelola sampah di rumah dengan baik bahkan dapat mengolahnya menjadi barang yang bisa digunakan kembali. Cara lain untuk mengurangi sampah di rumah juga dapat dilakukan dengan alternatif menggunakan produk-produk ramah lingkungan.

Sertifikasi ISO 14001 adalah sebuah proses kelayakan suatu organisasi, bisnis, atau perusahaan dalam menunjukkan tanggung jawabnya terhadap lingkungan. Sertifikasi ini menunjukkan bahwa sebuah organisasi atau bisnis telah mendedikasikan sistem manajemennya berdasarkan kesadaran lingkungan. Upaya ini untuk mendorong perusahaan agar mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan perusahaan juga terus meningkat. Berdasarkan data jumlah perusahaan bersertifikasi ISO 14001 juga terus meningkat. Data jumlah perusahaan bersertifikasi ISO 14001 di Provinsi Sulawesi Tengah kurun waktu selama Tahun 2016-2020 terdapat pada gambar sebagai berikut.



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah

Gambar 2.189 Jumlah Perusahaan Bersertifikasi ISO 14001

Adapun kendala yang dihadapi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terkait sampah ialah mengubah pola perilaku konsumen dan produsen untuk mengurangi timbulan sampah mulai dari sumber. Terutama kesadaran masyarakat yang masih minim akan dampak buruk untuk lingkungan yang ditimbulkan dari sampah juga berperan terhadap masih tingginya timbulan sampah dari sumber.

Kemudian upaya yang dapat dilakukan untuk mempercepat pencapaian TPB/SDGs 12 ialah dengan melaksanakan percepatan melalui kegiatan pengendalian pencemaran lingkungan hidup, pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya beracun, pengendalian kerusakan lingkungan hidup, pengujian kualitas air dan udara. Sementara itu, kegiatan pengembangan teknologi lingkungan ekoefisiensi dan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, perencanaan/penyusunan kebijakan teknis penataan lingkungan hidup, merupakan upaya yang akan dilakukan untuk menjabarkan program penataan, pengkajian dampak dan pengembangan kapasitas SDM lingkungan.

Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim

Tujuan 13 ialah mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Salah satu indikator dalam tujuan 13 ialah jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang di Sulawesi Tengah yang



mencapai angka 237.067 orang pada tahun 2018. Yang kemudian angkanya mencapai 26.666 orang.

Indikator berikutnya yang ada dalam tujuan ini ialah rencana dan implementasi strategi nasional penanggulangan bencana yang selaras dengan the Sendal Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030. Sebelumnya perlu diketahui pengertian dari Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030 yaitu Kerangka Kerja Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana 2015-2030 (Kerangka Kerja Sendai) adalah kesepakatan besar pertama dalam agenda pembangunan pasca-2015 dan memberikan tindakan nyata kepada Negara-negara Anggota untuk melindungi kemajuan pembangunan dari risiko bencana. Adapun capaian dari rencana dan implementasi strategi nasional penanggulangan bencana yang selaras dengan the Sendal Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030 ini tercapai 6 rencana atau implementasi pada 3 tahun berturut-turut yaitu dari tahun 2018 hingga tahun 2020.

Adapun tantangan yang dihadapi ialah belum adanya regulasi yang mengikat dan adanya tumpang tindih birokrasi yang menghambat kinerja dalam menjalankan program terkait lingkungan dan perubahan iklim. Tantangan berikutnya adalah tantangan finansial. Anggaran lingkungan hidup bertujuan untuk membiayai berbagai program yang berorientasi pada lingkungan dan mitigasi perubahan iklim di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) terbilang sangat minim. Dalam menjalankan programnya, pemda juga dihadapkan pada tantangan politis. Tantangan terakhir adalah tantangan teknis pada saat menjalankan program lingkungan dan pengendalian iklim. Isu yang paling sering dihadapi ialah ketidaksetaraan pemahaman mengenai risiko iklim antar pemangku kepentingan daerah. Perbedaan pandangan menyebabkan tidak selarasnya perencanaan programprogram yang berkaitan dengan isu tersebut.

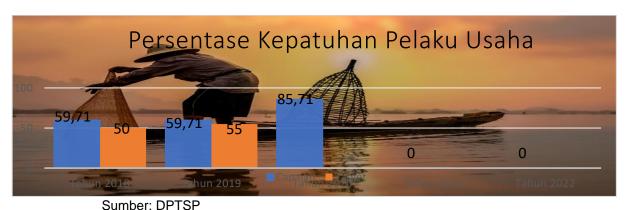
Upaya percepatan pencapaian Tujuan 13 TPB/SDGS ialah dengan memaksimalkan program terkait dengan penguatan kapasitas dan kelembagaan dengan pengurangan risiko akibat perubahan iklim dan bencana alam yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dengan cakupan Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana, Program Pengelolaan Kedaruratan dan Logistik Bencana dan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.



Tujuan 14 Ekosistem Lautan

SDGs menciptakan kerangka kerja berkelanjutan untuk mengatur dan melindungi ekosistem laut dan pantai dari polusi yang berasal dari darat, juga untuk menyadarkan akan dampak pengasaman samudera. Memperkuat pelindungan dan penggunaan sumber daya laut yang berkelanjutan melalui hukum internasional juga akan membantu mengatasi tantangan yang dihadapi samudera kita.

Salah satu indicator dalam tujuan ini ialah persentase kepatuhan pelaku usaha. Dimana Indikator ini mengalami kenaikan atau meningkat setiap tahun. Pada Tahun 2020 mencapai angka sebesar 85,71 persen. Padahal pada tahun 2019 hanyalah 59,71 persen. Berikut ini data persentase kepatuhan pelaku usaha di Provinsi Sulawesi Tengah kurun waktu Tahun 2018-2020 terdapat pada gambar sebagai berikut.



Gambar 2.190 Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha

Indikator 14.b.1* mengenai Tingkat penerapan kerangka hukum/regulasi/ kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil berdasarkan data dari Dinas Kelautan Provinsi Sulawesi Tengah dalam kurun waktu Tahun 2018-2020 terdapat 1 dokumen.

Indikator 14.b.1.(a) mengenai Jumlah provinsi dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan berdasarkan data dari Dinas Keluatan Provinsi Sulawesi Tengah dalam kurun waktu 2018-2020 Provinsi Sulawesi Tengah sudah telaksana di 4 (empat) wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, adapun target yang ditetapkan pada tahun 2022 ialah hanya satu wilayah, namun belum diketahui apakah hal ini sudah tercapai atau belum tercapai.



Adapun indikator 14.b.1(b) mengenai Jumlah nelayan yang terlindungi. Dimana, pada Tahun 2018 sebanyak 5.400 orang, dan pada Tahun 2020 sudah meningkat menjadi sebanyak 7.080 orang. Angka ini belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 15.000 orang pada tahun 2020. Data jumlah nelayan yang terlindungi di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018-2020 terdapat pada gambar sebagai berikut.



Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan **Gambar 2.191** Jumlah Nelayan Yang Terlindungi

Pemeliharaan dan pengelolaan wilayah Teluk Palu dan laut Sulawesi Tengah secara umum menjadi perhatian khueus Pemerintah Sulawesi Tengah terutama dari cemaran limbah dan bahan berbahaya. Selain itu, Teluk Palu secara khusus menghadapi tantangan meningkatnya populasi buaya muara yang telah memasuki kawasan pantai pariwisata hingga ke Tanjung Karang dan kerap menimbulkan korban manusia. Kondisi ini dapat menurunkan tingkat keamanan wisatawan bahkan dapat menurunjan minat kunjungan. Hal lain yang menjadi tantangan pembangunan kelautan, yakni:

- 1. Pemeliharaan wilayah pesisir dan area konservasi laut seperti area mangrove dan sumberdaya hayati perairan dari perubahan fungsi lahan dan kerusakan akibat aktivitas manusia:
- 2. Pengarusutamaan pembangunan ekonomi kelautan berkelanjutan yang belum mendapat perhatian serius;
- 3. Pengelolaan ekosistem karbon biru laut yang belum terpadu;
- 4. Kebijakan pengelolaan penangkapan ikan terukur dan perlindungan serta pemberdayaan nelayan kecil.

Upaya percepatan dapat dilaksanakan melalui upaya-upaya sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan tata kelola sumber daya kelautan, termasuk upaya penataan ruang laut dan harmonisasinya.
- 2. Meningkatkan konservasi, rehabilitasi dan peningkatan ketahanan masyarakat terhadap bencana di pesisir dan laut, termasuk penambahan luasan kawasan konservasi perairan kelembagaan efektivitas dan penguatan serta pengelolaannya;
- 3. Mengendalikan IUU fishing dan kegiatan yang merusak di kondisi laut;
- 4. Menguatkan peran SDM dan iptek kelautan serta budaya maritim;
- Meningkatkan produktivitas, optimalisasi kapasitas dan kontinuitas produksi 5. perikanan, termasuk alokasi yang proporsional antara stok sumber daya ikan, serta penyediaan dan pengembangan teknologi penangkapan ikan yang efisien dan ramah lingkungan.

Tujuan 15 Ekosistem Daratan

Tujuan 15 bertujuan untuk berkelanjutannya ekosistem daratan, pengelolaan hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan berusaha melindungi dan memperbaiki penggunaan ekosistem darat seperti hutan, rawa, lahan dan gunung. Mempromosikan pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan menghentikan penebangan hutan juga sangat penting untuk menghentikan dampak perubahan iklim. Harus segera dilakukan tindakan untuk mengurangi hilangnya habitat alami dan keanekaragaman hayati yang merupakan bagian dari warisan kita bersama.

Salah satu indikator dalam tujuan ini ialah adalah proporsi kawasan hutan terhadap total luas lahan. Indikator ini terus mengalami peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2020 meningkat menjadi sebesar 65,8 persen. Data proporsi kawasan hutan terhadap total luas lahan di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018-2020 terdapat pada gambar sebagai berikut.



Gambar 2.192 Proporsi Kawasan Hutan Terhadap Total Luas Lahan

Indikator 15.3.1* mengenai proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan dengan capaian 106 Ha pada tahun 2018 dan tahun 2019. Sedangkan capaian tertinggi pada tahun 2020 sebesar 500 Ha angka ini **telah mencapai target** yang ditetapkan. Berikut ini gambaran proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan Sulawesi Tengah tahun 2018-2020.



Gambar 2.193
Proporsi Lahan Yang Terdegradasi Terhadap Luas Lahan Keseluruhan

Salah satu tantangan utama pengelolaan ekosistem darat adalah pengelolaan tata ruang. Pengelolaan ekosistem darat dan penataan ruang dihadapkan pada jumlah penduduk yang terus meningkat dan kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah. Untuk mengatasi dua masalah ini telah ditetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang saat ini

disatukan antara ruang darat dan ruang laut. Tantangan lain adalah bencana alam yang tinggi. Krisis pangan, energi, air dan perubahan iklim adalah masalah yang tidak kalah penting. Penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) dalam pengelolaan lingkungan yang nyaman juga masih menjadi kendala utama dalam pencapaian target per satuan wilayah.

Beberapa upaya yang dilakukan untuk mempercepat pencapaian target Tujuan 15 yakni, dengan menetapkan sejumlah Kegiatan Strategis dengan penyediaa ruang terbuka hijau dan menjaga kawasan konservasi ekologi. Selain itu, penegakan hukum untuk praktik pelanggaran terkait keanekaragaman hayati seperti perburuan liar, perdagangan flora dan fauna yang dilindungi, harus diarusutamakan.

Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan Yang Tangguh

Tujuan 16 ialah menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.

Indikator 16..1.1.(a) dalam tujuan ini adalah Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir di Sulawesi Tengah mencapai angka 16 kasus pada tahun 2022. Berikut disajikan data mengenai Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir di Sulawesi Tengah Tahun 2018-2022.



Gambar 2.194 Jumlah Kasus Kejahatan Pembunuhan Pada Satu Tahun Terakhir

Indikator berikutnya 16.1.2.(a) ialah mengenai Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk mengalami penurunan dari tahun 2018 hingga tahun 2020. Angka capaian pada tahun 2018 ialah sebesar 14 penduduk yang kemudian menurun hingga 10 penduduk. Berikut ini disajikan gambar mengenai Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk di Sulawesi Tengah Tahun 2018-2020.





Gambar 2.195 Kematian Disebabkan Konflik Per 100.000 Penduduk

Indikator berikutnya adalah indikator 16.1.3.(a) mengenai proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir. Proporsi Penduduk Yang Menjadi Korban Kejahatan Kekerasan dalam kurun waktu tiga tahun berturut-turut mengalami penurunan. Pada tahun 2018 angka capaiannya ialah 0,3 persen yang kemudian menurun 0,5 persen pada tahun 2019. Dan menurun pada tahun 2020 hingga menjadi 0,2 persen. Berikut ini data mengenai proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir di Sulawesi Tengah Tahun 2018-2022.



Gambar 2.196 Proporsi Penduduk Yang Menjadi Korban Kejahatan Kekerasan Dalam 12 Bulan Terakhir



Indikator berikutnya adalah indikator 16.1.4* mengenai proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya. Data proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2020 terdapat pada gambar sebagai berikut.



Sumber: Polda

Gambar 2.197 Proporsi Penduduk Yang Merasa Aman Berjalan Sendirian Di Area **Tempat Tinggalnya**

Indikator selanjutnya adalah indikator 16.2.1.(a) mengenai Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir. Indikator ini mengalami penurun setiap tahun. Indikator ini mengalami penurunan setiap tahun. Data indikator ini di Provinsi Sulawesi Tengah dalam kurun waktu Tahun 2018-2020 terdapat pada tabel sebagai berikut.



Sumber: DP3a

Gambar 2.198 Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Anak Umur 1-17 Tahun Yang Mengalami Hukuman Fisik Dan/Atau Agresi Psikologis Dari Pengasuh Dalam Setahun Terakhir

Berdasarkan data pada gambar di atas, dimana Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir pada Tahun 2018 sebesar 0,02 dan pada akhir Tahun 2020 sudah turun menjadi 0,01. Persen. Angka ini diketahui telah mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2020 yaitu sebesar 0,01 persen. Hukuman fisik yang diterima oleh anak dapat mengakibatkan banyak dampak salah satunya ialah dapat menimbulkan trauma bagi sang anak.

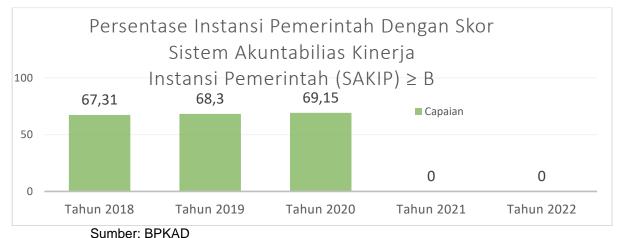
Indikator berikutnya adalah indikator 16.6.1.(a) mengenai Persentase instansi pemerintah yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Indikator ini mengalami peningkatan setiap tahun. Data indikator ini di Provinsi Sulawesi pada Tahun 2018-2020 terdapat pada gambar sebagai berikut.



Gambar 2.199 Persentase Instansi Pemerintah Yang Mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Berdasarkan data pada gambar di atas, Persentase Instansi Pemerintah Yang Mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2018 sebesar 71 persen dan pada Tahun 2020 sudah mencapai 100 persen.

Indikator berikutnya ialah indikator 16.6.1.(b) mengenai Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ≥ B. Indikator ini mengalami kenaikan setiap tahun. Data indikator ini di Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2018-2020 terdapat pada gambar sebagai berikut.



Gambar 2.200
Persentase Instansi Pemerintah Dengan Skor
Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ≥ B

Berdasarkan data pada gambar di atas, Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ≥ B pada tahun 2018 sebesar 67,31 persen, dan pada Tahun 2019 sudah mencapai sebesar 68,3 persen. Dan pada tahun 2020 mencapai angka sebesar 69,15 persen.

Salah satu tantangan atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai tujuan 16 adalah Masih rendahnya persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) di Provinsi Sulawesi.

Oleh sebab itu upaya percepatan pencapaian TPB/SDGs Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah perlunya melakukan pembenahan dan penataan secara menyeluruh terkait dengan tata Kelola pemerintah yang baik (good governance) secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa pemerintah di daerah berjalan dengan reformasi birokrasi dan tata Kelola pemerintahan yang menjadi kebijakan secara nasional.

Tujuan 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan

SDGs hanya bisa terwujud dengan komitmen kuat pada kemitraan dan kerja sama global. Banyak negara yang juga meminta bantuan pembangunan resmi untuk meningkatkan pertumbuhan dan perdagangan. Tidak pernah dunia terhubung lebih baik daripada saat ini. Memperbaiki akses pada teknologi dan pengetahuan adalah cara penting untuk berbagi ide dan mendorong inovasi. Perlu diberlakukan kebijakan yang terkoordinasi untuk membantu negara-negara berkembang mengelola utang mereka, juga mendorong investasi di negara yang tertinggal karena itu semua sangat vital untuk



meraih pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan. Tujuan ini membidik penguatan kerjasama Utara-Selatan dan Selatan-Selatan dengan mendukung rencana nasional untuk meraih target. Mendorong perdagangan internasional dan membantu negaranegara berkembang meningkatkan ekspor mereka, adalah bagian dari upaya meraih sistem perdagangan yang berdasar aturan universal dan tepat yang terbuka, adil dan menguntungkan semua pihak.

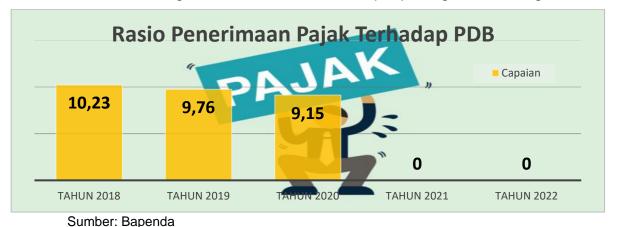
Salah satu indikator dalam tujuan ini adalah Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya. Indikator ini tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017, namun indikator ini dinilai penting dan dilaporkan setiap tahun. Indikator ini dari tahun ke tahun berfluktuasi. Dimana, pada Tahun 2018 sebesar 0,13 persen dan pada Tahun 2020 turun menjadi sebesar 0,11 persen. Data total pendapatan pemerintah sebagai proporisi terhadap PDB menurut sumbernya di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018-2020 terdapat pada gambar sebagai berikut.





Gambar 2.201 Total Pendapatan Pemerintah Sebagai Proporsi Terhadap PDB **Menurut Sumbernya**

Indikator berikutnya adalah indikator 17.1.1.(a) mengenai Rasio penerimaan pajak terhadap PDB. Indikator ini Tercapainya rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB sebesar 9,15 pada Tahun 2020 dan pada Tahun 2018 sebesar 10,23 persen. Indikator ini dari tahun ke tahun menurun. Data rasio penerimaan pajak terhadap PDB di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018-2020 terdapat pada gambar sebagai berikut.



Gambar 2.202 Rasio Penerimaan Pajak Terhadap PDB

Indikator berikutnya adalah Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik. Indikator ini (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017). Indikator ini mencapai 26,22 persen pada tahun 2020 dan sebelumnya mencapai 28,02 persen pada tahun 2018. Berikut ini disajikan data mengenai Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestic Sulawesi Tengah Tahun 2018-2020.



Gambar 2.203

Proporsi Anggaran Domestik Yang Didanai Oleh Pajak Domestik

Indikator selanjutnya adalah indikator 17.18.1.(a) mengenai Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional. Indikator ini (tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017). Pada Tahun 2018 mencapai angka sebesar 100 persen dan pada Tahun 2020 mencapai angka menjadi 98,72 persen. Data Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018-2020 terdapat pada gambar sebagai berikut.



Gambar 2.204 Persentase Konsumen BPS Yang Merasa Puas Dengan Kualitas Data Statistik

Beberapa tantangan yang dihadapi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut.

- 1. Masih rendahnya pendapatan pemerintah terhadap PDB menurut Sumbernya di Provinsi Sulawesi Tengah.
- 2. Masih rendahnya rasio penerimaan pajak terhadap PDB di Provinsi Sulawesi Tengah.

Adapun upaya percepatan pencapaian tpb/sdgs Tujuan 17 Kemitraan Untuk Semua, diantaranya adalah:

- 1. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus melakukan pengembangan dan pemanfataan beragam aplikasi dan layanan digital. Melalui layanan digital ini, warga masyarakat dapat secara cepat dan efisien menyampaikan berbagai masukan dan kontribusi bagi proses pengembangan dan peningkatan penerimaan daerah.
- 2. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah secara berkelanjutan menerapkan strategi dan kebijakan pembangunan yang inovatif, kreatif dan inklusif sebagai modalitas sosial dan ekonomi dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat terlibat aktif dalam pembangunan daerah, termasuk memberikan penguatan dalam peningkatan penerimaan daerah.

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Berdasarkan analisis mendalam terhadap capaian kinerja pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 dan situasi saat ini, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan dan isu strategis dalam pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Permasalahan yang muncul adalah adanya kesenjangan antara ekspektasi hasil pembangunan yang direncanakan dengan capaian yang telah dicapai. Potensi permasalahan pembangunan sering kali berasal dari kekurangan dalam memanfaatkan kekuatan yang ada, tidak menangani dengan efektif kelemahan yang teridentifikasi, tidak memanfaatkan peluang yang tersedia, serta tidak mengantisipasi ancaman yang mungkin timbul. Tujuan dari identifikasi permasalahan ini adalah untuk mengungkap faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan pembangunan daerah, terutama dalam manajemen pemerintahan yang memanfaatkan kewenangan secara optimal. Dengan memetakan permasalahan ini, diharapkan dapat diidentifikasi masalah inti, masalah, dan akar masalah yang perlu diselesaikan dalam upaya meningkatkan kinerja pembangunan di Provinsi Sulawesi Tengah.



2.3.1 Permasalahan Daerah yang dihubungkan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Identifikasi permasalahan pembangunan dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi pembangunan daerah sampai dengan tahun 2023. Hasil evaluasi tersebut menjadi rujukan proses identifikasi permasalahan pembangunan daerah Sulawesi Tengah yang harus menjadi perhatian tahun 2025, diantaranya: 1) Masih rendahnya tingkat kesejahteraan Masyarakat; 2) Masih rendahnya daya saing sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan, Perikanan dan Pariwisata; 3) Infrastruktur dan Konektivitas wilayah masih rendah; 4) Kulitas SDM Belum Berdaya Saing; 5) Masih tingginya angka kemiskinan dan stunting; dan 6) Potensi Sumber Daya Alam Yang Tidak Merata, dan Peran Industri, Kecil dan Menengah Belum Maksimal; 7) Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan; dan 8) Daya tampung dan daya dukung lingkungan menurun.

Berdasarkan hasil analisis gambaran umum kondisi daerah pada subbab aspek demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan aspek daya saing daerah, serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program pembangunan daerah sampai dengan tahun berjalan dan realisasinya terhadap target akhir RPJMD, maka permasalahan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2025 dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Masih rendahnya tingkat kesejahteraan Masyarakat;

Rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sulawesi Tengah masih menjadi permasalahan pembangunan daerah. Rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat tercermin dari indikator distribusi pengeluaran perkapita yakni pada tahun 2023 kelompok penduduk 40 persen perngeluaran terendah hanya menikmati kue pembangunan ekonomi hanya sebesar 22,11 persen, sementara kelompok penduduk 40 persen perngeluaran menengah mengakses kue pembangunan ekonomi sebesar 37,92 persen, sedangkan kelompok penduduk 20 persen perngeluaran tertinggi mengakses kue pembangunan ekonomi sebesar 39,97 persen. Dengan demikian ketimpangan distribusi pengeluaran perkapita yang relatif tinggi ini masih menjadi permasalahan pembangunan daerah di Provinsi Sulawesi Tengah.



2. Masih rendahnya daya saing sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan, Perikanan dan Pariwisata;

Rendahnya daya saing sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan, perikanan dan pariwisata masih menjadi permasalahan pembangunan daerah. Sektor potensial bernilai tambah untuk mendukung arah pengembangan Provinsi Sulawesi Tengah adalah komoditas pertanian, perkebunan, perikanan tangkap, industri logam dasar serta pariwisata, namun pemanfaatan potensi-potensi tersebut belum bisa terwujud secara optimal.

Permasalahan ini lebih disebabkan oleh beberapa faktor antara lain luas lahan yang semakin berkurang, masih rendahnya pendidikan petani, pekebun, peternak dan nelayan, kurangnya penerapan teknologi pertanian, diversifikasi usaha pertanian dan industri pertanian sulit berkembang karena minimnya modal; suksesi pengelolaan usaha tani rendah; belum ada kebijakan insentif khusus untuk petani, nelayan muda/pemula. Sementara permasalahan pariwisata yaitu kualitas SDM, kelembagaan dan pengelola wisata masih rendah, kurangnya publikasi, promosi dan pameran tentang kepariwisataan, infrastruktur wisata yang belum memadai, nilai investasi wisata yang rendah, daya dukung lingkungan rendah sehingga Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) kurang menarik, dan masih rendahnya objek wisata religi, budaya dan kebijakan lokal.

3. Infrastruktur dan Konektivitas wilayah masih rendah;

konektivitas wilayah Infrastruktur dan masih menjadi permasalahan pembangunan daerah. Pembangunan kewilayahan di Provinsi Sulawesi Tengah masih belum merata khususnya dalam aspek infrastruktur, yang tercermin dari indikator Indeks Williamson Provinsi Sulawesi Tengah yang cenderung meningkat yang hingga tahun 2022 Nilai Indeks Williamson mencapai 1,51 poin. Hal ini mengindikasikan semakin timpangnya pembangunan ekonomi antar wilayah di Provinsi Sulawesi Tengah. Indeks Infrastruktur Daerah masih sangat rendah yakni pada tahun 2023 baru mencapai 65,43 persen, serta kondisi jalan mantap Provinsi Sulawesi Tengah juga masih rendah yakni pada tahun 2023 baru mencapai 65,04 persen.

Dengan demikian, Infrastruktur masih menjadi permasalahan aspek pembangunan daerah, keterbatasan kapasitas dan fasilitas pelabuhan di Sulawesi Tengah menyebabkan kapal-kapal konteiner belum beroperasi secara maksimal, Bandara utama Bandara Mutiara sis Aljufri masih memerlukan pengembangan baik dari sisi kapasitas maupun integrasi terhadap wilayah *hinterland* serta dan multimoda untuk menunjang pariwisata dan sebagai simpul logistic angkutan barang. Kualitas dan kuantitas jalan serta ketersediaan dan rehabilitasi listrik masih kurang. Sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi belum terpenuhi secara optimal, jaringan telekomunikasi juga masih relatif rendah serta pasokan listrik untuk sistem terisolir sebagian masih bersumber dari pembangkit berbahan bakar minyak.

Oleh karena itu infrastruktur dan konektivitas wilayah masih menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025.

4. Kulitas SDM Belum Berdaya Saing;

Kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing masih menjadi permasalahan pembangunan di Provinsi Sulawesi Tengah. Rendahnya kualitas sumber daya manusia tercermin dari capaian indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) pada tahun 2023 yang masih berkisar di angka 8,96 tahun. Artinya secara rata-rata penduduk usia sekolah hanya menamatkan jenjang pendidian formal selama 8,96 tahun atau setara SMP kelas 3. Indikator lain menunjukkan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, yakni pada tahun 2023 APM SD/MI sebesar 93,31 persen, APM SMP/MTs sebesar 76,08 persen dan APS SMA/SMK/MA sebesar 66,18 persen.

5. Masih tingginya angka kemiskinan dan stunting;

Tingginya angka kemiskinan dan stunting masih menjadi permasalahan pembangunan di Provinsi Sulawesi Tengah. Kemiskinan merupakan keadaan dimana terjadi ketidakmampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.

Untuk tingkat kemiskinan, Berdasarkan BPS memotret persentase penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Tengah pada Maret 2023 sebesar 12,41 persen atau sekitar 395.660 jiwa, mengalami kenaikan 0,11 persen poin dibanding September 2022 (389.710 jiwa), dan mengalami kenaikan 0,08 persen poin dibandingkan terhadap Maret 2022 (388.350 jiwa). Untuk kemiskinan ekstrem di Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2023 masih sebesar 1,44 persen atau sekitar 45.760 jiwa. Sementara untuk angka stunting, berdasarkan data Survey Kesehatan Indonesia (SKI) angka stunting di Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2023 sebesar 27,2 persen.



6. Potensi Sumber Daya Alam Yang Tidak Merata, dan Peran Industri, Kecil dan Menengah Belum Maksimal;

Potensi sumber daya alam yang tidak merata dan peran industri kecil dan menengah belum maksimal masih menjadi permasalahan pembangunan daerah di Provinsi Sulawesi Tengah, hal ini dapat tercermin dari nilai Indeks Gini Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2023 sebesar 0,304 poin yang masih relatif tinggi.

Tingginya laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2023 sebesar 11,91 persen belum berdampak sepenuhnya terhadap perbaikan kesejateraan masyarakat. Rendahnya daya saing juga menjadi faktor penghambat, Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan (KEK) belum memberikan dampak secara optimal dalam penurunan persentase penduduk miskin. Aspek pembiayaan yaitu share penyaluran kredit perbankan khususnya kredit investasi dan kredit sektor jasa masih cenderung rendah.

7. Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan;

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan tahun 2023 masih belum berjalan secara efektif dan optimal. Hal ini tercermin dari capaian Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2023 yang mencapai 62,14 dengan kategori "B". Capaian ini menunjukkan adanya lambannya pelaksanaan program reformasi birokrasi, dan masih terdapatnya beberapa permasalahan terkait kapasitas aparatur dan kepatuhan terhadap standar pelayanan publik. Masalah tersebut terefleksikan dari capaian komponen ASN profesional dan kepatuhan terhadap standar pelayanan publik.

Permasalahan lain terkait kinerja tata kelola pemerintah dapat dilihat dari capaian SAKIP yang merepresentasikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Nilai SAKIP Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 mendapatkan predikat B. Artinya kinerja tata kelola pemerintahan daerah Provinsi Sulawesi Tengah masih jauh dari perwujudan good governance.



8. Daya tampung dan daya dukung lingkungan menurun.

Data tampung dan daya dukung lingkungan menurun masih menjadi permasalahan pembangunan daerah di Provinsi Sulawesi Tengah. Gambaran mengenai kondisi lingkungan hidup di Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat dari capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Hingga tahun 2022, nilai IKLH mencapai 78,66 meningkat 0,88 poin dibanding tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan secara umum terjadi perbaikan kualitas lingkungan hidup di Provinsi Provinsi Sulawesi Tengah. Namun demikian, indeks kualitas air dan tutupan lahan menunjukkan kualitas yang masih relatif rendah.

Kualitas air yang rendah mengindikasikan tingkat pencemaran yang cukup tinggi. Berdasarkan hasil pemantauan kualitas air, sumber pencemar dapat diperkirakan berasal dari limbah domestik, industri, pertanian, peternakan, perikanan, dan pertambangan. Sementara, rendahnya kualitas tutupan lahan lebih dipengaruhi oleh perubahan tutupan lahan seiring dengan meningkatnya kebutuhan lahan untuk pengembangan kawasan industri dan permukiman.

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Identifikasi permasalahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah berdasarkan hasil evaluasi yang tercantum dalam subbab evaluasi sampai dengan triwulan I Tahun 2023 dan Gambaran umum kondisi daerah. Berikut permasalah Pembangunan yang disusun menurut bidang urusan.

2.3.2.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

2.3.2.1.1 Pendidikan

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah bidang pendidikan yaitu Utilisasi Sumber Daya meliputi:

- Masih belum memadainya kompetensi dan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan yang terlihat dari indikator:
 - a. Rasio Siswa SMA/SMK/SLB per Guru yaitu perbandingan antara jumlah siswa dengan jumlah guru yang berkualifikasi S1/D-IV pada jenjang pendidikan SMA/SMK/SLB. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru disebutkan bahwa "Guru pada SMA/SMK, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)



program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi".

- b. Rasio Siswa SMA/SMK/SLB per Guru Sertifikasi yaitu perbandingan antara jumlah siswa dengan jumlah guru bersertifikasi pada jenjang pendidikan SMA/MA. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 Tentang Guru yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) menyebutkan bahwa "Guru tetap pemegang sertifikat pendidik berhak mendapatkan tunjangan profesi apabila mengajar di satuan pendidikan yang rasio minimal jumlah peserta didik terhadap gurunya untuk jenjang SMA atau yang sederajat adalah 20:1 dan untuk untuk MA atau yang sederajat 15:1". Tunjangan profesi yang ditawarkan pemerintah membuat guruguru yang berpendidikan SMA berlomba mencapai jenjang S1 walaupun jurusan yang diambil di bangku kuliah berbeda dengan yang diajarkan di sekolah.
- c. Rasio Guru SMA/MA Berkualifikasi Akademik per Sekolah yaitu perbandingan antara jumlah guru SMA/SMK/SLB berkualifikasi minimal S1/DIV dengan jumlah sekolah. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru disebutkan "Guru pada SMA/MA, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi".
- d. Persentase Guru SMA/MA Berkualifikasi yaitu perbandingan antara jumlah guru berkualifikasi dengan jumlah guru seluruhnya pada jenjang pendidikan SMA/MA dan dinyatakan dalam persen. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru disebutkan "Guru pada SMA/MA, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi".
- e. Persentase Guru SMA/MA Bersertifikasi yaitu perbandingan antara jumlah guru bersertifikasi dengan jumlah guru seluruhnya pada jenjang pendidikan SMA/MA dan dinyatakan dalam persen. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 Tentang Guru yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) menyebutkan bahwa "Guru tetap pemegang sertifikat pendidik berhak mendapatkan tunjangan profesi apabila mengajar disatuan pendidikan yang rasio



minimal jumlah peserta didik terhadap gurunya untuk jenjang SMA atau yang sederajat adalah 20:1 dan untuk untuk MA atau yang sederajat 15:1".

- 2. Belum optimalnya ketersediaan, distribusi, dan kualitas tenaga pendidik (guru). Terjadi penumpukan guru di wilayah perkotaan. Khusus untuk SMK, jumlah guru SMK yang mengajar mata pelajaran yang dibutuhkan oleh Dunia Industri masih terbatas.
- 3. Minimnya ketersediaan guru produktif yang dihadapkan pada kondisi belum adanya calon pengganti guru produktif yang akan pensiun.
- 4. Masih belum terpenuhinya sebagian sarana prasarana pendidikan khususnya untuk sekolah-sekolah pinggiran termasuk masih ada beberapa kecamatan yang belum terbangun sekolah negeri jenjang SMA/SMK/SLB;
- 5. Belum meratanya ketersediaan sarana prasarana pendidikan (bangunan sekolah dan ruang kelas), serta sarana prasarana penunjang lainnya untuk pendidikan formal dan informal;
- 6. Belum diterapkannya skema BLUD pada SMK dalam mendorong produktivitas kegiatan teaching factory (Tefa) dan Project Based Learning (PBL) upaya untuk mewujudkan *link* and *match* yang komprehensif pada pendidikan vokasi.
- 7. Capaian komponen pembentuk nilai rapor pendidikan yang tidak memenuhi target. Dari 29 komponen pembentuk nilai rapor pendidikan kewenangan provinsi, terdapat 18 indikator yang tidak memenuhi target.

2.3.2.1.2 **Kesehatan**

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah bidang kesehatan yang masih ditemui di Provinsi Jawa Barat meliputi:

- 1. Belum optimalnya upaya kesehatan yang dilakukan baik upaya kesehatan perorangan maupun upaya kesehatan masyarakat, dilihat belum optimalnya pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, tingginya angka kesakitan akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular serta masih tingginya kasus kematian ibu dan kematian bayi. Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) merupakan salah satu faktor utama penyebab tingginya angka kematian neonatal dimana prevalensi BBLR Sulawesi Tengah tahun 2023 sebesar 7,9 persen, tertinggi kedua secara nasional setelah Papua Tengah.
- 2. Belum terpenuhinya kebutuhan SDM kesehatan di fasilitas kesehatan sesuai standar. Hal ini terlihat dari indikator:



- a. rumah sakit lengkap 7 jenis spesialis baru mencapai 36,4 persen;
- b. rumah sakit lengkap 7 jenis spesialis standar ketenagaan minimal baru mencapai 9,1 persen;
- c. puskesmas lengkap 9 jenis standar ketenagaan minimal baru mencapai 10,1 persen;
- d. puskesmas lengkap 9 jenis nakes baru mencapai 51,38 persen;
- 3. masih kurangnya pelatihan untuk tenaga Kesehatan;
- 4. Belum optimalnya pengelolaan manajemen data dan manajemen sistem informasi kesehatan provinsi;
- 5. Tingginya prevalensi balita gizi buruk dan stunting. Pada tahun 2023, prevalensi balita dengan status gizi buruk parah (Severely Underweight) sebesar 5,9 persen, tertinggi kelima secara nasional. Sementara itu kendati mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022, prevalensi stunting Sulawesi Tengah tahun 2023 sebesar 27,2 persen.

2.3.2.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang masih ditemui di Provinsi Sulawesi Tengah meliputi:

- 1. Tingkat konektivitas antar wilayah kabupaten/kota masih rendah;
- 2. Tingkat kemantapan jalan Provinsi masih rendah;
- 3. Pemanfaatan kapasitas jalan yang tidak sesuai dengan kendaraan yang melintas;
- 4. Ketersediaan peralatan untuk melakukan pemeliharaan jalan belum memadai;
- 5. Kerusakan infrastruktur karena bencana alam yang belum diimbangi dengan penanganannya;
- 6. Belum optimalnya pelaksanaan operasi pemeliharaan irigasi kewenangan provinsi yang menyebabkan turunnya Indeks Kinerja Sistim Irigasi (IKSI);
- 7. Keterpaduan pengelolaan irigasi belum optimal;
- 8. System informasi sumber daya air belum yang maksimal;
- 9. Kerusakan tebing sungai dan abrasi pantai;
- 10. Pengelolaan sumber daya air danau belum maksimal;
- 11. Sebagian kabupaten/kota masih melaksanakan penyelesaian perda perubahan RTRW kabupaten/kota;



- 12. Belum terpenuhinya jumlah ketersediaan perangkat pengendalian pemanfaatan ruang sebagai acuan pelaksanaan tertib tata ruang dan pengawasan penatan ruang;
- 13. Belum optimalnya cakupan pelayanan air minum dan akses aman/akses layak/akses jaringan perpipaan;
- 14. Belum optimalnya cakupan pelayanan dan akses air limbah domestik (akses aman/akses layak;
- 15. Belum optimalnya pengelolaan persampahan;
- 16. Belum optimalnya pengelolaan drainase;
- 17. Masih belum optimalnya Ruang Terbuka Hijau; dan
- 18. Masih belum optimal penyelenggaraan bangunan gedung.

2.3.2.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Permasalahan Daerah bidang penyelenggaraan urusan Pemerintahan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman meliputi:

- 1. Masih rendahnya akses Rumah Layak Huni;
- 2. Masih besarnya luasan kawasan permukiman kumuh; dan
- 3. Pembangunan perumahan belum sejalan dengan rencana yang tercantum dalam RTRW/RDTR karena dalam beberapa kasus belum ada dokumennya.

2.3.2.1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

penyelenggaraan Pemerintahan Permasalahan urusan Daerah bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat meliputi:

- 1. Masih terdapat ancaman konflik sosial dan konflik agama yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat:
- 2. Masih rendahnya kesiapsiagaan penanggulangan risiko bencana dan kebakaran;
- 3. Rendahnya ketaatan masyarakat terhadap peraturan daerah yang berlaku;
- Masih tingginya pelangaran hukum oleh masyarakat dan dunia usaha;
- 5. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjadi anggota Satlinmas;
- 6. Luasnya jangkauan sosialisasi dan pengawasan serta penegakan peraturan daerah dan peraturan Gubernur;
- 7. Kualitas dan kuantitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja yang kurang memadai;
- 8. Belum optimalnya pelaksanaan sosialisasi, pengawasan dan penegakan peraturan daerah:

- 9. Belum optimalnya pelaksanaan operasi ketentraman dan ketertiban umum; dan
- 10. Terbatasnya jumlah diklat keterampilan tentang Satuan Polisi Pamong Praja

2.3.2.1.6 Sosial

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah bidang sosial meliputi:

- 1. Jumlah data Lembaga Kesejahteraan Sosial/LKS di kabupaten/kota belum terdata dengan baik sehingga pelayanan terhadap LKS masih belum maksimal;
- 2. Pendataan data DTKS masih belum valid atau akurat, sehingga penyaluran bantuan terhadap masyarakat miskin belum sepenuhnya tepat sasaran;
- 3. Masih tingginya persentase penduduk miskin di Sulawesi Tengah;
- 4. Aksesibilitas pelayanan tenaga kaum disabilitas, terutama dalam akses mencari kerja masih minim;
- 5. Kurangnya Sumber Daya Manusia pekerja sosial di dalam panti, dan belum ketersediaannya SDM, dengan kemampuan Teknis tertentu.

2.3.2.2 Layanan Urusan Wajib Non Dasar

2.3.2.2.1 Tenaga Kerja

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah bidang Tenaga Kerja meliputi:

- 1. Pajak Terhadap Kendaraan Alat Berat Perusahaan Belum Maksimal;
- 2. Pajak Terhadap Pengguna Air Permukaan Belum Maksimal;
- 3. Belum ada penunjukan pejabat baru Pemekaran UPT Banggai Kepulauan dan UPT Morowali;
- 4. Belum adanya Lembaga pengawasan terhadap Wajib Pajak;
- 5. Tingginya tingkat pengangguran;
- Rendahnya perluasan kesempatan kerja;
- 7. Rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja;
- 8. Belum kondusifnya kondisi hubungan industrial; dan
- 9. Belum terkoordinasinya pengendalian dan pengawasan tenaga kerja asing.

2.3.2.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Merupakan strategi untuk meningkatkan kualitas SDM Sulawesi Tengah melalui peningkatan peran perempuan dalam mengembangkan potensi diri agar mampu mandiri dan berkarya, serta upaya pencegahan terhadap kekerasan terhadap anak maupun pencegahan terjadinya pornografi. Kesadaran mengenai peran perempuan diwujudkan dalam program-program pengarusutamaan gender untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender. Adapun permasalahan urusan perempuan dan perlindungan anak antara lain

- 1. Belum semua perangkat daerah di lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota menerapkan Perencanaan dan Penganggaran responsif gender (PPRG);
- 2. Belum dijadikan motode Gender Analisys Pathway (GAP) dan GBS dalam menyusun Program dan Kegiatan serta sub kegiatan dalam perencanaan dan penganggaran;
- 3. Masih terdapat anggapan bahwa gender menjadi urusan Perempuan;
- 4. Tingginya angka kekerasan anak di Provinsi Sulawesi Tengah; dan
- 5. Tingginya angka perkawinan anak di Provinsi Sulawesi Tengah.

2.3.2.2.3 **Pangan**

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah bidang Pangan Sulawesi Tengah meliputi:

- 1. Diversifikasi (penganekaragaman) pangan segar dan pangan olahan masih rendah sehingga mengakibatkan pola pangan harapan (PPH) realatif minim.
- 2. Konsumsi beras masyarakat Sulawesi Tengah cukup tinggi dan belum beralih pada alternatif pangan sumber karbohidrat lainnya seperti: umbi-umbian, jagung, kentang dan sagu.
- 3. Tingginya pangan segar yang terkontaminasi dengan bahan-bahan berbahaya selama proses produksi, pengepakan, pengemasan dan pergudangan.
- 4. Ketersediaan pangan untuk kebutuhan konsumsi perkapita perhari belum memenuhi standar, terutama di daerah-daerah kepulauan, pedalaman dan pegunungan.
- 5. Kemampuan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan masih berkategori rendah terutama pada aspek penyediaan, pemanfaatan dan keterjangkauan.

2.3.2.2.4 Pertanahan

2.3.2.2.5 Lingkungan Hidup

Permasalahan penyelengaraan urusan pemerintahan daerah bidang lingkungan hidup meliputi:



- 1. Degradasi lingkungan yang menyebabkan menurunnya daya dukung lingkungan, termasuk didalamnya pencemaran air, udara, pertambangan illegal serta deforestasi yang disebabkan antara lain oleh penebangan hutan, perkebunan kelapa sawit serta ekspansi pertanian termasuk penggunaan pestisida dan pupuk;
- 2. Ancaman hilangnya keanekaragaman hayati termasuk kerusakan ekosistem pesisir terutama mangrove;
- 3. Pengelolaan sampah dan pengelolaan limbah baik domestik maupun industri yang dapat mencemari lingkungan baik udara, air dan tanah;
- 4. Masih terbatasnya jaringan informasi dan komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat;
- 5. Belum terintegraasinya pengurangan resiko bencana dalam perencanaan pembangunan secara efektif dan komprehensif; dan
- 6. Meningkatnya resiko bencana akibat belum optimlanya mitigasi, kesiapsiagaan dan tanggap darurat bencana.

2.3.2.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi:

- 1. Belum optimalnya satu nama satu data kependudukan;
- 2. Kewenangan Disdukcapil Provinsi yang sangat terbatas;
- 3. Masih minimnya ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dibidang administrasi kependudukan dan teknologi informasi. Hal ini mengingat bahwa tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah banyak bersinggungan dengan kebijakan administrasi kependudukan dan data:
- 4. Kurangnya Sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan administrasi kependudukan di kabupaten/kota, misalnya Alat perekaman KTP elektronik mobile, Printer ktp El dan Internet berbasis satelit;
- 5. Kondisi geografis wilayah Sulawesi Tengah yang menyebabkan masyarakat enggan untuk mengurus dokumen kependudukan, karena biaya tinggi untuk transport dan akomodasi menuju lokasi pelayanan
- 6. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.



Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2.3.2.2.7

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pemberdayaan Masyarakat dan desa mempunyai tujuan untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Pada Tahun 2023 berdasarkan status desa di Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.81 Status Kemajuan Desa Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2023

	Otatao i to.	,					. •							- 9								
NO	Kabupaten	2021	Man 2022	diri 2023	%	2021	Maj 2022	u 2023	%	2021	Berkem 2022		%	2021	Tertir	nggal 2023	2024	Sai 2021	Ė	ertingç 2023		Jumlah Desa
1	Banggai	5	7	21	15,9	89	118	160	24,02	191	163	108	12	6	3	2	1,3	0	0	0	0	291
2	Banggai Kepulauan	0	1	1	0,8	7	9	12	1,80	103	105	113	13	31	26	15	9,9	0	0	0	0	141
3	Banggai Laut	0	0	0	0,0	0	4	12	1,80	38	37	36	4	25	22	15	9,9	0	0	0	0	63
4	Buol	1	2	6	4,5	20	42	39	5,86	78	59	63	7,1	9	5	0	0,0	0	0	0	0	108
5	Donggala	4	7	17	12,9	57	67	83	12,46	74	64	47	5,3	15	12	11	7,3	8	8	0	0	158
6	Morowali	1	3	22	16,7	19	36	31	4,65	55	44	49	5,5	50	43	24	15,9	1	0	0	0	126
7	Morowali Utara	0	2	4	3,0	4	21	44	6,61	77	72	72	8,1	38	27	2	1,3	3	0	0	0	122
8	Parigi Moutong	5	9	21	15,9	81	110	126	18,92	174	151	129	14	17	7	2	1,3	1	1	0	0	278
9	Poso	0	1	20	15,2	21	30	43	6,46	100	103	79	8,8	21	8	0	0,0	0	0	0	0	142
10	Sigi	3	8	15	11,4	24	48	62	9,31	79	66	61	6,8	63	51	38	25,2	7	3	0	0	176
11	Tojo Una Una	0	2	4	3,0	10	14	22	3,30	60	66	75	8,4	59	48	33	21,9	5	4	0	0	134
12	Tolitoli	0	0	1	0,8	14	23	32	4,80	67	65	61	6,8	21	14	9	6,0	1	1	0	0	103
	JUMLAH	19	42	132	7,17	346	522	666	36,16	1096	995	893	48	355	266	151	8,2	26	17	0	0	1842

Sumber: Bappeda (diolah)

Berdasarkan tabel diatas tahun 2023 status desa mengalami peningkatan yang besar untuk desa mandiri dimana pada tahun 2022 jumlah desa mandiri 42 mengalami peningkatan menjadi 132 desa mandiri atau 7,17, begitu juga untuk desa maju tahun 2022 jumlah desa maju berjumlah 522 naik menjadi 666 desa maju atau 36,16%, yang jadi masalah ialah di Provinsi Sulawesi Tengah masih terdapat desa kategori tertinggal walaupun pada tahun 2023 sudah tidak ada lagi desa sangat tertinggal di tahun 2023 masih terdapat 151 desa dengan status desa tertinggal atau 8,2. Adapun permasalahan dalam rangka peningkatan status desa di Provinsi Sulawesi tengah antara lain :

- Belum semua Kabupaten menganggap Indeks Desa membangun (IDM) sebagai acuan dalam merencanakan program lintas OPD;
- 2. Belum semua Kabupaten melakukan kerja sama lintas sektor untuk mendukung percepatan kemandirian desa;

- 3. Belum semua OPD melihat pada indikator IKE, IKS, IKL untuk perencanaan kebijakan yang tepat sasaran;
- 4. Kabupaten belum merumuskan program pengembangan sistem monitoring perkembangan IDM yang terintegrasi sehingga dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dalam memberikan kebijakan memanfaatkan dana desa;
- 5. Belum adanya ketrlibatan pihak swasta dalam mendukung peningkatan status desa; dan
- 6. Belum adanya pemberian penghargaan kepada desa yang berhasil meningkatkan desa.

2.3.2.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan urusan Pemerintahan Daerah Bidang penyelenggaraan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana meliputi:

- 1. Akses pelayanan KB yang berkualitas masih belum merata;
- Pendataan dan penyajian data masih kurang baik dan akurat, sehingga kurang maksimal dalamrangka evaluasi dan perencanaan pembangunan pendudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
- 3. Tingkat pendidikan rendah dari Pasangan Usia Subur;
- 4. Masih banyak pernihakan di bawah batas usia pernikahan; dan
- 5. Proses edukasi atau KIE masih kurang merata, khususnya di kalangan remaja.

2.3.2.2.9 Perhubungan

Permasalahan Pemerintahan Bidang penyelenggaraan urusan Daerah Perhubungan meliputi:

- 1. Transportasi darat: Belum berkembangnya sistem angkutan umum masal dan integrasi antar moda; Kurangnya fasilitas perlengkapan jalan; Belum optimalnya angkutan darat dalam melayani pergerakan orang dan barang antar wilayah; Belum optimalnya pelayanan dan peralatan uji laik jalan pada pengujian kendaraan bermotor; Masih rendahnya kualitas keselamatan angkutan;
- 2. Transportasi laut, antara lain: Belum optimalnya pelabuhan yang ada dalam melayani pergerakan orang dan barang antar pulau; Belum optimalnya infrastruktur pelabuhan penyeberangan;
- 3. Transportasi Perkeretaapian: Belum adanya tindak lanjut dari perencanaan jaringan perkeretaapian di Sulawesi Tengah.



2.3.2.2.10 Komunikasi dan Informatika

Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang komunikasi dan informatika meliputi:

- 1. Belum Maksimalnya Pengelolaan Layanan Infomasi dan Komunikasi Publik;
- 2. Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik belum maksimal;
- 3. Belum termanfaatkannya secara maksimal KIM sebagai media penyampaian informasi;
- 4. Belum terkoordinasikannya informasi program-program pemerintah;
- 5. Masih terbatasnya sarana dan prasarana;
- 6. Penerapan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Belum Maksimal.

2.3.2.2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah meliputi:

- 1. Penerbitan ijin usaha masih perlu pendampingan
- 2. Jumlah koperasi yang berkualitas dan koperasi aktif masih rendah
- 3. Pertumbuhan Wirausaha baru yang berskala kecil masih rendah;
- 4. Belum optimalnya fungsi dan kelembagaan koperasi;
- 5. Minimnya akses permodalan koperasi dan UMKM terhadap Perbankan;
- 6. Belum optimalnya akses pemasaran dan promosi bagi produk Koperasi dan UMKM;
- 7. Belum optimalnya literasi digital bagi para pelaku KUMKM dalam memasarkan produknya; dan
- 8. Belum meratanya penerapan standar produk koperasi, serta usaha mikro dan kecil.

2.3.2.2.12 Penanaman Modal

Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang Penanaman Modal meliputi:

- 1. Potensi dan peluang investasi kabupaten/kota belum terdata dengan baik menyebabkan pengelolaan potensi belum maksimal;
- Banyak pelaku usaha yang belum memiliki pemahaman yang cukup mengenai kewajiban mereka untuk berusaha terutama dalam hal pengisian LKPM sehingga pencatatan nilai realisasi tidak seluruhnya terlaporkan; dan

3. Pembangunan Mall Pelayanan Publik sebaiknya di semua kabupaten/kota tetapi tidak semua daerah memiliki kapasitas fiskal yang cukup memadai dan belum dapat melaksanakan pembangunan MPP ini, sehingga dinilai menghambat pelayanan perizinan.

2.3.2.2.13 Kepemudaan dan Olahraga

Permasalahan penyelengaraan urusan pemerintahan daerah bidang kepemudaan dan olahraga meliputi:

- 1. Partisipasi pengusaha muda masih belum optimal;
- Pertumbuhan organisasi pemuda yang aktif masih terhambat;
- 3. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga tercermin dari sedikitnya jumlah gedung olahraga yang ada;
- 4. Keterbatasan dalam jumlah dan kualitas pelatih serta tenaga keolahragaan;
- 5. Belum terciptanya kolaborasi yang efektif antara industri olahraga, pariwisata, dan sektor lainnya untuk mendukung prestasi olahraga dan perekonomian;
- 6. Jumlah dan standar kualitas Sentra Pembinaan Olahraga di Sulawesi Tengah masih perlu ditingkatkan agar sesuai dengan standar nasional dan internasional; dan
- 7. Kurangnya fasilitas terbuka yang dapat digunakan untuk berolahraga di kota/kabupaten di Sulawesi Tengah.

2.3.2.2.14 Statistik

Permasalahan penyelengaraan urusan pemerintahan daerah bidang statistik meliputi:

- 1. Belum optimalnya pemanfaatan data statistic bagi pembangunan;
- 2. Kurangnya kualitas data statistic sectoral;
- 3. Terbatasnya kemampuan teknis aparatur dalam pengelolaan data.

2.3.2.2.15 Persandian

Permasalahan penyelengaraan urusan pemerintahan daerah bidang persandian meliputi:

- 1. Kompetensi sumber daya manusia yang belum memadai dibidang persandian dan keamanan informasi:
- 2. Sarana dan prasarana infrastruktur persandian belum memadai;

3. Belum maksimalnya penggunaan peralatan persandian.

2.3.2.2.16 Kebudayaan

penyelenggaraan Pemerintahan bidang Permasalahan urusan Daerah Kebudayaan meliputi:

- 1. Kompetensi SDM dalam bidang kebudayaan di Provinsi Sulawesi Tengah masih perlu ditingkatkan.
- 2. Apresiasi terhadap kekayaan budaya lokal Sulawesi Tengah masih rendah.
- 3. Keterbatasan ruang publik sebagai tempat pelestarian dan pengembangan budaya lokal, ekspresi seniman, serta interaksi dalam pemanfaatan seni budaya masih terasa.
- 4. Sulawesi Tengah belum memiliki event/festival seni budaya unggulan yang bisa menjadi ikon daerah.
- 5. Penggunaan bahasa daerah oleh masyarakat Sulawesi Tengah mengalami penurunan yang signifikan.
- 6. Banyak aset tinggalan sejarah yang belum tersentuh, berpotensi mengalami kerusakan atau punah.
- 7. Sarana publik yang mendukung pembinaan dan apresiasi seni budaya daerah masih kurang memadai dan berkelanjutan.

2.3.2.2.17 Perpustakaan

Pemerintahan Permasalahan penyelenggaraan urusan Daerah Bidang Perpustakaan meliputi:

- 1. Peran lembaga dan teknologi dalam pengembangan layanan perpustakaan di Provinsi Sulawesi Tengah masih belum optimal;
- 2. Minat masyarakat terhadap perpustakaan masih kurang;
- 3. Pemanfaatan perpustakaan provinsi masih belum maksimal;
- 4. Diperlukan peningkatan literasi dengan menambah dan memperbarui koleksi buku di sekolah, termasuk dukungan untuk perpustakaan;
- 5. Perlunya memperkuat lembaga perpustakaan di desa-desa melalui peningkatan SDM, sarana prasarana, serta koleksi Pustaka;
- Tingkat pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat masih rendah: dan
- 7. Ketersediaan bahan pustaka belum memenuhi kebutuhan masyarakat secara memadai.



2.3.2.2.18 **Kearsipan**

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Bidang Kearsipan meliputi:

- 1. Pengelolaan arsip di perangkat daerah masih belum optimal;
- 2. Transformasi arsip dari konvensional ke format digital masih menghadapi kendala infrastruktur yang efektif;
- 3. Pengawasan terhadap pengelolaan arsip di daerah masih belum mencapai tingkat optimal; dan
- 4. Identifikasi dan penelusuran arsip bersejarah belum berjalan secara efektif.

2.3.2.3 Layanan Urusan Pilihan

2.3.2.3.1 Pariwisata

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Bidang Pariwisata meliputi:

- Masih Rendahnya Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Sulawesi Tengah
 - a. Masih Rendahnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata
 - Belum optimalnya pengelolaan daya tarik wisata
 - Belum Optimalnya pengelolaan Kawasan strategis pariwisata
 - Belum optimalnya pengelolaan destinasi pariwisata prioritas
 - Belum adanya penetapan tanda daftar usaha pariwisata lintas daerah kabupaten/kota
 - b. Masih Rendahnya Pemasaran Pariwisat
 - Belum berkembangnya dan masih terbatasnya jaringan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri
 - Belum optimalnya promosi daya tarik destinasi dan Kawasan startegi **Pariwisata**
 - c. Masih rendahnya sumber daya manusia pariwisata dan Ekonomi Kreatif
 - Masih rendahnya kapasitas Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
 - Masih rendahnya kapasitas pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif
- 2. Masih Rendahnya Kontribusi Sektor Ekonomi Kreatif terhadap PDRB Sulawesi Tengah
 - a. Belum berkembangnya sumber daya Ekonomi Kreatif
 - Belum tersedianya sarana dan prasarana Kota Kreatif

Belum berkembangnya ekosistem konomi kreatif

2.3.2.3.2 **Pertanian**

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah bidang pertanian Sulawesi Tengah meliputi:

- Meningkatnya alih fungsi lahan, degradasi lahan dan pengembangan lahan pertanian yang tidak ramah lingkungan.
- 2. Jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier berumur tua, rusak dan tidak terpakai.
- 3. Konflik para pemanfaat air yang belum terorganisir dengan baik melalui Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) ataupun Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A).
- Usaha hasil pertanian, perkebunan dan peternakan belum memiiki dukungan modal usaha yang memadai disertai ketidakmampuan para petani, pekebun dan peternak untuk mengakses pembiayaan melalui pola perbankan.
- 5. Terjadinya penurunan produktivitas tanaman (Kelapa, Kakao, Cengkeh, Kopi, Pala dan Lada)
- 6. Pengendalian OPT belum dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan
- 7. Belum maksimalnya penggunaan bibit yang berkualitas melalaui Inseminasi Buatan (IB)
- 8. Tingginya pemotongan dan pengeluaran sapi betina produktif.
- 9. Sarana dan prasarana perbibitan yang terbatas seperti pos Inseminasi Buatan, peralatan IB, Kontainer dan N2 cair.
- 10. Masih adanya kasus penyakit hewan menular strategis dan zoonosis
- 11. Kurang berminatnya generasi minelial terhadap usaha-usaha pertanian.

2.3.2.3.3 Kehutanan

Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang kehutanan meliputi:

- 1. Berkurangnya penutupan lahan yang dapat mengakibatkan konflik lahan di masyrakat;
- 2. Manfaat ekonomi hutan yang bersumber dari hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan belum dikembangkan dengan maksimal;
- 3. Belum tercapainya akses kelola dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan secara optimal;



- 4. Belum optimalnya penengakan supremasi hukum di bidang kehutan karena terbatasnya kewenangan penyelenggaraan perlindungan hutan pada areal diluar kawasan hutan yang tidak dibebani perizinan berusaha;
- 5. Belum optimalnya dukungan terhadap perhutanan sosial.

2.3.2.3.4 Energi dan Sumber Daya Mineral

Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang Energi dan Sumber Daya Mineral meliputi:

- Belum optimalnya dukungan terhadap aksesibilitas infrastruktur energi khususnya terhadap energy baru terbarukan; dimana masih kurangnya rencana detail pelaksanaan pembangunan infrastruktur energy;
- 2. Masih tingginya penggunakaan pembangkit berbahan fosil atau batubara yang masuk untuk memenuhi kebutuhan industry sehingga mempengaruhi porsi energy baru terbarukan dalam bauran energy;
- 3. Belum tercapainya target rasio elektrifikasi secara nasional yaitu 100 persen, dimana masih terdapat rumah tangga khususnya di dusun-dusun atau di pulaupulau terpencil yang belum memiliki akses listrik;
- **4.** Belum optimalnya pemanfaaatan air tanah untuk pemenuhan kebutuhan air bersih.

2.3.2.3.5 Perdagangan

Permasalahan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bidang urusan Perdagangan Sulawesi Tengah meliputi:

- 1. Produk industri lokal kurang berkembang karena kurangnya promosi
- 2. fluktuasi harga barang konsumsi terutama harga bahan pokok sering berubahubah:
- 3. Belum meratanya penerapan standar produk dan teknologi informasi dalam perdagangan;
- 4. Lemahnya daya saing produk lokal.

2.3.2.3.6 Perindustrian

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah bidang Perindustrian Sulawesi Tengah meliputi:

- 1. Infrastruktur pendukung kawasan industry yang belum terintegrasi
- 2. SDM sektor industri belum sesuai dan berkompeten

3. Produk industri unggulan yang belum terstandarisasi dan tersertifikasi.

2.3.2.3.7 Transmigrasi

Permasalahan penyelenggaraan Pemerintahan Bidang urusan Daerah Ketransmigrasian meliputi:

- 1. Adanya kesenjangan pembangunan antar wilayah karena terbatasnya aksesbilitas;
- 2. Rendahnya kualitas SDM, terutama dipedesaan;
- 3. Kurangnya keterkaitan antara kawasan pedesaan sebagai hinterlang dengan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan ekonomi;
- 4. Kurang terciptanya sistem kota-kota;
- 5. Kurang seimbangnya tingkat kepadatan penduduk antara wilayah satu dengan yang lainnya;
- 6. Belum terintegrasinya dan terkoordinasinya program-program antar sektor dalam pembangunan kawasan transmigrasi, baik antar pemerintah pusat dan daerah;
- 7. Rendahnya Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja yang tersedia;
- 8. Rendahnya penempatan pencari kerja pada pasar kerja dan melalui perluasan kesempatan kerja;
- 9. Belum optimalnya perwujudan hubungan industrial yang harmonis dan iklim ketenagakerjaan baik;
- 10. Belum optimalnya peningkatan penerapan norma ketenagakerjaan; dan
- 11. Lokus 12 Kawasan Transmigrasi Prioritas
 - Kawasan Transmigrasi Palolo Kab Sigi 1)
 - 2) Kawasan Transmigrasi Bungku kabupaten morowali
 - Kawasan Transmigrasi air terang kabupaten buol 3)
 - Kawasan Transmigrasi tampalore kabupaten poso 4)
 - Kawasan Transmigrasi padauloyo kabupaten tojo una una 5)
 - 6) Kawasan Transmigrasi bahari tomini raya kabupaten Parigi moutong
 - 7) Kawasan Transmigrasi salakan kabupaten banggai kepulauan
 - 8) Kawasan transmigrasi banggai laut kabupaten banggai selatan
 - 9) Kawasan transmigrasi lalundu dan bambakaenu kabupaten donggala
 - 10) Kawasan transmigrasi bungku utara kabupaten morowali utara
 - 11) Kawasan transmigrasi ulubongka kabupaten tojo una una
 - 12) Kawasan transmigrasi basidondo kabupaten toli toli

Pada program pembangunan Ketransmigrasian, secara umum terdapat beberapa permasalahan terkait dengan Pembangunan Kawasan transmigrasi prioritas yaitu:

- Adanya Tumpang Tindih Lahan Usaha pada Kawasan Transmigrasi antara lain Tumpang Tindih dengan HGU Perusahaan yaitu:
 - 1. Tumpang Tindih dengan HGU PT. Lestari Tani Teladan Lokasi Tinauka SP1 dan SP2 pada Kawasan Transmigrasi Lalundu Bambakaenu Kab. Donggala
 - 2. Tumpang Tindih dengan HGU PT. Sawit Jaya Abadi pada lokasi Kancuu Kab. Poso
 - 3. Proses Relokasi Lahan Usaha II UPT. Wosu dalam Kepengurusan Penerbitan/Pengurusan SK HPL
 - 4. Lokasi masuk dalam Kawasan Hutan dan perlu dilaksanakan kegiatan IPPKH (Izin Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan)
- Sarana Prasarana pendukung dalam menunjang Kegiatan Ketransmigrasian masih sangat rendah terutama dalam Aksesibilitas (Jalan) sehingga Hasil Tani pada lokasi Transmigrasi mengalami kendala yang pada akhirnya mengurangi kualitas hasil produksi/pemasaran.
- Belum terpenuhinya standar pelayanan minimum dalam pemberdayaan masyarakat pada kawasan trasnmigrasi dan terbatasnya penyediaan sarana prasarana penunjang misalnya sarana air bersih dan pendukung lainnya
- Masalah sumber daya manusia yang belum memiliki keterampilan yang sesuai dengan kondisi wilayahnya/lokasi dalam memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia, kondisi lahan yang kurang subur dan keterampilan warga transmigrasi terbatas sehingga memberikan hambatan dalam kemajuan ekonomi
- Adanya tunggakan penerbitan SHM (Sertifikat Hak Milik) transmigran, Sertifikat HPL (Hak Pengelolaan Lahan), lokasi pemukiman transmigrasi masuk dalam kawasan hutan, pemindah tanganan lahan, meninggalkan lokasi lahannya, dan tidak mengelola aset yang dimiliki.

2.3.2.3.8 Kelautan dan Perikanan

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah bidang Kelautan dan Perikanan Sulawesi Tengah meliputi :

1. Peningkatan mutu komoditas pasca panen, pengolahan hasil produk olahan dan peningkatan nilai tambah (add value) dan daya saing produk kelautan dan perikanan.



- 2. Penataan tata niaga dan pola pemasaran hasil-hasil komoditas kelautan dan perikanan belum terpadu, seperti pemasaran rumput laut, ikan karang, cumi dan lobster serta ikan hasil budidaya.
- 3. Peningkatan pengawasan dan pengendalian terhadap pelanggaran pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) melalui tindakan berdasarkan regulasi Illegal, Unreported dan Unregulated (IIU) Fishing
- 4. Tinggi dan maraknya aktivitas illegal dan destructive fishing yang menyebabkan over exploited, tingginya sedimentasi pada hulu sungai dan pelabuhan akibat tingginya degradasi lingkungan seperti abrasi, pencemaran dan kerusakan ekosistem utama pesisir (mangrove, lamun dan terumbu karang).
- 5. Pemanfaatan pelabuhan perikanan dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) belum optimal sesuai dengan fungsinya. Masih banyak nelayan yang mendaratkan hasil tangkapannya di luar area pelabuhan atau Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
- 6. Industri yang bergerak di sektor perikanan masih rendah dan belum berkembang dengan baik dikarenakan memiliki resiko yang tinggi.
- 7. Jumlah armada penangkapan ikan terutama ukuran kapal ikan diatas 30 GT masih rendah sehingga kapasitas daya tangkap relatif rendah.
- 8. Sarana penangkapan ikan yang belum memadai seperti: hand line, pukat cincin (purse seine), jaring angkat (lift nets), jaring insang (gill nets), Karamba Jaring Apung (KJA) dan lainnya.
- 9. Pengembangan kualitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan

Penunjang Urusan 2.3.2.4

2.3.2.4.1 Perencanaan Pembangunan

penyelenggaraan Pemerintahan bidang Permasalahan urusan Daerah Perencanaan Pembangunan meliputi:

- Belum optimalnya kapasitas sumber daya manusia perencana dalam hal sistem perencanaan, sistem penganggaran Pembangunan dan sistem informasi untuk perencanaan dan penganggaran;
- 2. Jumlah sumber daya manusia perencana yang ada saat ini belum memenuhi beban kerja yang cukup tinggi di Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, untuk dapat mengoptimalkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
- 3. Mengoptimalkan sinkronisasi dan sinergitas program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah tingkat pemerintahan;



- 4. Kurang memadai ketersediaan data dan sistem informasi perencanaan Pembangunani;
- 5. Belum optimalnya pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi rencana Pembangunan.

2.3.2.4.2 Keuangan

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Bidang Pariwisata meliputi:

- 1. Perubahan Regulasi pengelolaan keuangan daerah (Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Sisdur, Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi);
- 2. Penguatan Sumber Daya Manusia dibidang Keuangan;
- 3. Sarana dan Prasarana dan rangka meningkatkan mutu pelayanan Publik;
- 4. Penyelesaian Temuan Hasil Pemeriksaan oleh APIP baik internal maupun eksternal;
- 5. Penyajian Laporan Keuangan di Masing-Masing Organisasi Perangkat Daerah;
- 6. Integrasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan daerah dengan berbasis SIPD sesuai Permendagri 70 tahun 2019 mulai dari penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporan;
- 7. Penatausahaan dan pengamanan Aset daerah;
- 8. Pajak Terhadap Kendaraan Alat Berat Perusahaan Belum Maksimal;
- 9. Pajak Terhadap Pengguna Air Permukaan Belum Maksimal;
- 10. Belum adanya Lembaga pengawasan terhadap Wajib Pajak;

2.3.2.4.3 Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan adalah rendahnya jumlah PNS yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar kompetensi jabatan sebagai jaminan profesionalisme PNS dan Persentase Smart ASN yang menurun. Isu terkait dengan sasaran yang akan dicapai pada Rencana Kerja BPSDM adalah masih banyaknya PNS yang belum memenuhi standar kompetensi sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan kompetensi PNS. Untuk mencapai tujuan tersebut beberapa isu permasalahan penting yang dihadapi BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah diidentifikasi sebagai berikut:

1. Aspek Hasil Kerja (Kinerja)

Belum sesuainya antara kompetensi yang dimiliki pegawai dengan Standar Kompetensi Jabatan sebagai jaminan profesionalisme Aparatur Sipil Negara;

- a) Hak Pengembangan Kompetensi bagi PNS, sesuai dengan Pasal 203 ayat (4) PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajeman PNS "Pengembangan Kompetensi bagi setiap PNS paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam setahun), sehingga belum semua PNS memiliki kompetensi sesuai dengan Standard Kompetensi Jabatan sebagai Jaminan Profesionalisme PNS;
- b) Reformasi birokrasi belum terealisasi secara optimal, terutama dari parameter manajemen kepegawaian masih memerlukan peningkatan. Perlu dilakukan secara khusus program-program yang menunjang reformasi birokrasi sehingga amanat undang-undang tentang harus terlaksananya reforasi birokrasi bisa tercapai.

2. Aspek Internal

Kapasitas dan kapabilitas Manajemen Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Aparatur belum memadai untuk mencetak aparatur berkelas dunia.

- a) Aspek kewenangan : Kapasitas dan kapabilitas BPSDM dalam mencetak aparatur yang SMART ASN belum optimal;
- b) Aspek Perencanaan Pengembangan Kompetensi Aparatur : Kapasitas dan Kapabilitas Perencanaan BPSDM dalam merencanakan Pengembangan Kompetensi belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan Perangkat Daerah;
- c) Aspek Pengorganisasian : Kapasitas dan Kapabilitas Pengorganisasian belum mampu meningkatkan kualitas pelayanan pelatihan secara optimal;
- d) Aspek Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi : Pengembangan kompetensi dilakukan secara terpisah dengan kebijakan pola karir ASN; dan
- e) Aspek Evaluasi dan Pengembangan Pelatihan : Kapasitas dan kapabilitas evaluasi BPSDM belum mampu meningkatkan kualitas pelayanan pengembangan kompetensi.

3. Aspek Manajemen Pelatihan

- a. Aspek Sumber Daya Aparatur;
 - 1) Masih terbatasnya pegawai BPSDM yang mampu berbahasa inggris, Bahasa mandarin dan Bahasa arab secara aktif.
 - 2) Terbatasnya tenaga Widyalswara yang memiliki sertifikat kompetensi teknis.
- b. Aspek Kurikulum;



- 1) Belum dimilikinya mata diklat yang berpengantar Bahasa inggris.
- 2) Belum dimilikinya kurikulum diklat unggulan yang diminati internasional dan selaras dengan pembangunan daerah.

2.3.2.4.4 Penelitian dan Pengembangan

Bidang Riset dan Inovasi Daerah 2.3.2.4.4.1

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah bidang riset dan inovasi Sulawesi Tengah meliputi:

- 1. Hasil riset dan inovasi belum sepenuhnya menjadi rekomendasi dalam pengambilan kebijakan (decision maker) untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
- 2. Publikasi hasil riset dan inovasi belum optimal dilaksanakan sehingga pemanfaatan hasil riset dan inovasi oleh dunia usaha, pelaku Pembangunan, LSM dan pemerintah daerah masih minim;
- 3. Kualitas dan kuantitas hasil riset dan inovasi masih tergolong rendah;
- 4. Belum optimalnya pelaksanaan organisasi kelembagaan riset daerah baik di Tingkat provinsi, maupun tingkat kabupaten/kota;
- 5. Jejaring atau kemitraan kelembagaan riset dan inovasi masih rendah, baik pada tingkat daerah maupun tingkat nasional/international;
- 6. Jumlah peneliti dan SDM institusi riset dan inovasi masih kurang sehingga memberikan pengaruh pada kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan proses riset dan inovasi di Sulawesi Tengah;
- 7. Minimnya ketersediaan data base, data penunjang dan infromasi yang mendukung proses riset dan inovasi di Sulawesi Tengah.

2.3.2.4.5 Pengawasan

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Bidang pengawasan meliputi:

- 1. Inspektorat belum bisa sepenuhnya memenuhi peran umum selaku penjamin mutu dan konsultan pada area kebijakan tata kelola, risiko dan pengendalian (governance, risk and control) bagi pimpinan dan pemerintahan provinsi;
- 2. Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang masih belum sesuai harapan;
- 3. Masih lemahnya sistem pengendalian internal (SPI/wasnal) pada PD dan perlunya peningkatan pelayanan pengawasan masyarakat (wasmas);



- 4. Beban kinerja Inspektorat yang semakin banyak dan pengendalian mutu pengawasan yang belum optimal;
- 5. Perlu mempersiapkan SDM pembinaan dan pengawasan yang memahami tentang hukum pidana dan perdata, serta mampu berkoordinasi dengan APH;
- 6. Sarana dan prasarana yang kurang memadai untuk mendukung kegiatan pengawasan dan pembinaan.

2.3.2.4.6 Sekretariat Dewan

Permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Bidang Sekretariat DPRD meliputi:

- 1. Belum optimalnya sumber daya aparatur Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan tugas pelayanan dan dukungan yang baik, profesional dan handal serta mampu mendeteksi dini terhadap perubahan-perubahan yang terjadiBelum optimalnya penyerapan aspirasi masyarakat;
- 2. Belum optimalnya ketersediaan sarana pendukung kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
- 3. Belum tersedianya standar/manual/pedoman/aplikasi pelayanan dan dukungan dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas kedewanan.



BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Pada Bab ini akan menguraikan Kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 meliputi kerangka ekonomi makro dan kerangka pendanaan. Kerangka ekonomi daerah memberikan gambaran tentang arah kebijakan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 berdasarkan proyeksi dengan mempertimbangkan kondisi agregat perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025, sementara Kerangka pendanaan daerah Provinsi Sulawesi Tengah memuat arah kebijakan keuangan daerah meliputi analisis terkait sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan belanja, dan pembiayaan untuk pembangunan tahun 2025. Kerangka pendanaan menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan prinsip perencanaan anggaran berbasis kinerja.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2023, Awal Tahun 2024 dan Prediksi Tahun 2025

Gambaran mengenai kondisi perekonomian daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2023, awal tahun 2024 dan perkiraan tahun 2025 akan membahas mengenai capaian kinerja indikator ekonomi daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 dan awal tahun 2024 yang terdiri atas Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), inflasi, ketenagakerjaan, ketimpangan pendapatan, dan kemiskinan.

3.1.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah

Perekonomian Sulawesi Tengah 2023 yang diukur berdasarkan besaran Produk Domesti Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp.347.139.170.000.000,- dan PDRB atas dasar harga konstan sebesar Rp.193.181.360.000.000,-. Ekonomi Sulawesi Tengah Tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 11,91 persen.

Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah Industri Pengolahan sebesar 25,53 persen. Diikuti Sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 11,46 persen; dan sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 9,59 persen. Sementara itu, lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang juga memiliki peran dominan mengalami pertumbuhan sebesar 1,73 persen.

Selanjutnya, dilihat dari andil aau sumber pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023, sumber pertumbuhan tertinggi berasal dari Sektor Industri Pengolahan yakni sebesar 8,38 persen, menyusul terbesar kedua dan ketiga masingmasing yaitu sektor pertambangan dan penggalian dengan andil pertumbuhan sebesar 1,98 persen, dan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, sementara sektor pertanian, kehutanan dan perikanan memberi andil pertumbuhan sebesar 0,32 persen. Secara rinci mengenai andil/sumber pertumbuhan masing-masing sektor lapangan usaha dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Laju dan Sumber Pertumbuhan Ekonomi
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023

Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan 2023 (Persen)	Sumber Pertumbuhan 2023 (persen)					
A. Pertanian, Kehutanan dan perikanan	1,73	0,32					
B. Pertambangan dan Penggalian	11,46	1,98					
C. Industri Pengolahan	25,53	8,38					
D. Pengadaan Listrik dan Gas	6,65	0,00					
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,84	0,00					
F. Konstruksi	1,02	0,09					
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,76	0,36					
H. Transportasi dan Pergudangan	6,12	0,13					
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,59	0,03					
J. Informasi dan Komunikasi	6,83	0,22					
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1,16	0,02					
L. Real Estate	7,53	0,10					
M,N. Jasa Perusahaan	5,63	0,01					
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,08	0,08					
P. Jasa Pendidikan	4,48	0,10					
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,8	0,06					
R,S,T,U. Jasa Lainnya	5,99	0,03					
PDRB	11,91	11,91					

Sumber: BPS, 2024.

A. Kinerja Ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah Dari Sisi Penawaran

1. Sektor Industri Pengolahan

Kinerja industri pengolahan tetap tumbuh dan menjadi penjaga momentum pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah, seiring dengan kapasitas utilitas industri pengolahan nikel yang masih meningkat dengan pertumbuhan pada tahun 2023 mencapai 25,53 persen. Sektor industri pengolahan pada

tahun 2023 telah memberikan kontribusi signifikan terhadap total PDRB Nominal Provinsi Sulawesi Tengah yakni sebesar 40,37 persen, meningkat dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 40,32 persen. Selanjutnya pada kategori industri pengolahan yang menyumbangkan peranan terbesar adalah industri logam dasar, dikuti oleh industri batubara dan penggilingan migas, menyusul subkategori indutri makanan dan minuman, dan sub kategori industri kimia, farmasi dan obat tradisional.

Dalam rangka mendorong peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi, kinerja sektor industri pengolahan ke depan perlu ditingkatkan melalui kebijakan penguatan rantai pasok industri huluhilir berbasis bahan baku lokal yang lebih efisien, penguatan struktur industri dengan mengembangkan UMKM dalam rangka meningkatkan peran dan kontribusinya terhadap perekonomian daerah, nasional dan global, serta mendorong kebijakan standarisasi produk UMKM/IKM agar dapat bersaing dan mendorong substitusi produk impor guna meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.

2. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap pembentukan PDRB atas dasar harga berlaku Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2023 mencapai sebesar 15,77 persen, berkurang dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 15,82 persen. Sub sektor yang mendorong pertumbuhan sektor pertanian terbesar adalah sub sektor tanaman perkebunan, sub sektor jasa pertanian dan perburuan. Selanjutnya subkategori perkebunan, sub kategori peternakan, subkategori tanaman hortikultura, dan subkategori perikanan.

3. Sektor Pertambangan dan Penggalian

Kontribusi sektor sektor pertambangan dan penggalian terhadap pembentukan PDRB atas dasar harga berlaku Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2023 mencapai sebesar 15,30 persen, berkurang dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 15,34 persen. Sub sektor yang mendorong pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian secara hirarki adalah sub kategori pertambangan bijih logam, subkategori pertambangan dan penggalian lainnya, serta subkategori pertambangan minyak, gas dan panas bumi.



4. Sektor Konstruksi

Sektor Konstruksi pada tahun 2023 memberikan kontribusi terhadap pembentukan PDRB atas dasar harga berlaku Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 8,31 persen, berkurang dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar 8,41 persen. Akselerasi kinerja sektor konstruksi berkorelasi dengan penambahan lini produksi smelter merupakan salah satu komponen utama yang mendorong pertumbuhan sektor kontruksi. Selain itu, masih berlangsungnya proyek-proyek konstruksi multiyears di Sulawesi Tengah menjadi pendorong pertumbuhan sektor konstruksi pada tahun 2023.

5. Sektor Informasi dan Komunikasi

Kategori sektor informasi dan komunikasi memiliki peranan sebagai penunjang aktivitas disetiap bidang pembangunan, dan peranannya juga sangat vital dalam mendorong kemajuan daerah khususnya jasa telekomunikasi. Laju pertumbuhan kinerja Sektor Informasi dan Komunikasi pada tahun 2023 mencapai 6,83 persen, dengan kontribusi terhadap pembentukan PDRB atas dasar harga berlaku Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 2,16 persen, meningkat dibandingkan dengan tahun 2022 yang hanya sebesar 2,07 persen.

6. Sektor Perdagangan Besar, dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Laju pertumbuhan Sektor Perdagangan Besar, dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor pada tahun 2023 mencapai 5,76 persen dengan kontribusi terhadap pembentukan PDRB atas dasar harga berlaku Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 5,82 persen. Kontribusi ini disumbangkan oleh subkategori perdagangan mobil, sepeda motor dan reparasinya, disusul subkategori perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda.

B. Kinerja Ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah Dari Sisi Permintaan/ Komponen Pengeluaran

Ekonomi Sulawesi Tengah tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 11,91 persen. Pertumbuhan terjadi pada semua komponen Pengeluaran. Komponen pengeluaran yang mengalami pertumbuhan terbesar yaitu komponen Ekspor barang dan jasa sebesar 18,92 persen; diikuti komponen Pengeluaran Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 6,22 persen; komponen

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 5,42 persen; komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 3,02 persen; dan terakahir komponen Pembentukan Modal Tetap (PMTB) Bruto sebesar 1,14 persen. Sementara itu, komponen Impor barang dan jasa (yang merupakan faktor pengurang dalam PDRB menurut pengeluaran) tumbuh sebesar 11,64 persen. Struktur PDRB Sulawesi Tengah menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku tahun 2023 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Perekonomian Sulawesi Tengah masih didominasi oleh komponen ekspor barang dan jasa yang mencakup lebih dari PDRB Provinsi Sulawesi Tengah yaitu sebesar 103,28 persen, diikuti oleh Komponen PMTB sebesar 42,10 persen, Komponen PK-RT sebesar 28,49 persen, komponen PK-P sebesar 6,70 persen, komponen PK-LNPRT 1,31 persen, dan komponen Perubahan Inventori sebesar 0,42 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai factor pengurang dalam PDRB memiliki peran sebesar 82,30 persen.

3.1.1.2 Inflasi

Karakteristik inflasi gabungan dua kota di Provinsi Sulawesi Tengah tidak terlepas dari karakteristik inflasi spasial dua kota perhitungan IHK, yaitu Kota Palu dan Kota Luwuk. Karakteristik Kota Palu sebagai kota jasa sehingga pemenuhan kebutuhannya sangat bergantung pada daerah penyangga sekitarnya. Di sisi lain, disparitas harga dengan provinsi sekitar, perkembangan kawasan industri di morowali dan morowali utara serta geliat pembangunan IKN dapat menjadi faktor pendorong perubahan preferensi pedagang untuk menjual produknya ke luar daerah sehingga risiko gangguan supply pasokan ke Kota Palu menjadi sangat tinggi di tengah telah kembali normalnya demand masayarakat. Berbeda dengan Kota Palu, Kota Luwuk yang merupakan ibu kota dari Kabupaten Banggai merupakan kota penyangga bagi beberapa wilayah di sekitar seperti daerah Banggai Laut, Banggai Kepulauan, Kep. Sula, hingga Sulawesi Utara, menyebabkan gangguan pasokan di daerah tersebut (gangguan produksi, lonjakan permintaan, disparitas harga) cenderung memberikan tekanan pada ketersediaan dan tingkat harga komoditas di Kota Luwuk.

Laju inflasi tahunan gabungan (Kota Palu dan Kota Luwuk) Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2023 tercatat sebesar 2,35 persen, menurun dibandingkan dengan laju inflasi tahunan pada tahun 2022 yakni mencapai 5,96 persen.





Sumber: BPS 2024 (data diolah kembali)

Gambar 3.1
Perkembangan Tingkat Inflasi Tahunan Gabungan (Kota Palu dan Kota Luwuk) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 - 2023

3.1.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat pengangguran terbuka yakni menggambarkan ketidakterpakaian persediaan tenaga kerja akibat kurangnya lapangan kerja yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan angkatan kerja. Indikator ini dinyatakan dalam persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka adalah mereka yang: (1) tidak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan; (2) tidak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha; (3) tidak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; dan (4) sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. Semakin rendah indikator tingkat pengangguran terbuka di suatu negara/daerah menunjukkan capaian yang semakin baik.

Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Sulawesi Tengah selama periode Agustus 2017 sampai dengan Agustus 2023 mengalami kecenderungan fluktiatif, namun demikian TPT Provinsi Sulawesi Tengah masih dibawah rata-rata TPT Nasional. Pada Agustus 2017 TPT Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 3,81 persen menurun menjadi 3,43 persen pada Agustus 2018, selanjutnya mengalami penurunan menjadi 3,11 persen pada Agustus 2019, pada Agustus 2020 TPT meningkat menjadi 3,77 persen, dan TPT kembali dapat ditekan menjadi 3,75 persen pada Agustus 2021, selanjutnya TPT mengalami penurunan kembali pada Agustus 2022 menjadi 3,00 persen, dan pada Agustus 2023 menurun menjadi 2,95 persen. Secara detail mengenai perkembangan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sulawesi Tengah sejak Agustus 2017 sampai dengan Agustus 2023 disajikan pada gambar dibawah ini.



Sumber: BPS, 2023 (data diolah kembali). Gambar 3.2 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017-2023

3.1.1.4 **Indeks Gini**

Indikator yang digunakan merepresentasikan ketimpangan masyarakat yakni Indeks Gini atau Koefisien Gini. Indeks Gini bernilai antara 0 sampai dengan 1, bila nilai Indeks Gini bernilai 0 maka terjadi pemerataan distribusi pendapatan masyarakat sempurna dan Indeks Gini bernilai 1 maka terjadi ketidakmerataan distribusi pendapatan secara sempurna. Perkembangan capaian Indeks Gini Provinsi Sulawesi Tengah sepanjang Maret 2017 sampai dengan Maret 2023 secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut ini:



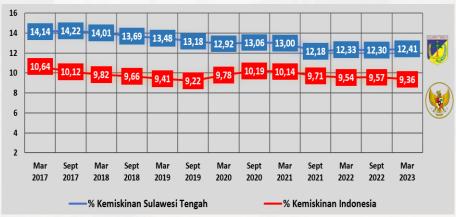
Sumber: BPS, 2023 (data diolah kembali) Gambar 3.3 Perkembangan Indeks Gini Provinsi Sulawesi Tengah Periode Maret 2017-Maret 2023

Capaian Indeks gini Sulawesi Tengah sepanjang tahun 2017 sampai dengan 2023 mengalami fluktuasi dan kecenderungan mengalami penurunan, yakni pada Maret 2017 Indeks Gini Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 0,355 menurun menjadi 0,304 pada Maret 2023. Capaian tersebut lebih baik dibandingkan dengan capaian Indeks Gini Nasional.

3.1.1.5 Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Semakin rendah tingkat kemiskinan di suatu negara/daerah menunjukkan capaian yang semakin baik.

Perkembangan persenstase penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Tengah selama periode Maret 2017 sampai dengan Maret 2023 cenderung mengalami fluktuasi dan masih berada diatas rata-rata persentase kemiskinan nasional. Persentase kemiskinan pada Maret 2017 sebesar 14,14 persen meningkat menjadi 14,22 persen pada September 2017, selanjutnya megalami penurunan hingga menjadi 12,92 persen pada Maret 2020, sebagai dampak adanya pandemi covid-19 pada september 2020 persentase kemiskinan meningkat menjadi 13,06 persen. Pada September 2021 kemiskinan dapat di tekan hingga menjadi 12,18 persen. Selanjutnya pada Maret persentase kemiskinan meningkat menjadi 12,33 persen. Lebih lanjut, Persentase penduduk miskin pada September 2022 sebesar 12,30 persen, menurun sebesar 0,03 persen poin terhadap Maret 2022, dan meningkat sebesar 0,12 persen poin terhadap September 2021. Pada Maret 2023, angka kemiskinan meningkat 0,11 persen menjadi 12,41 persen.



Sumber: BPS, 2023 (data diolah kembali)



Gambar 3.4 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Sulawesi Tengah Tahun 2017-2023

Dalam perspektif kemiskinan ekstrem, Tingkat kemiskinan ekstrem Provinsi Sulawesi Tengah sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 cenderung mengalami penurunan yakni dari 3,15 persen (97,91 Ribu Jiwa) pada tahun 2021 menurun menjadi 1,44 persen (45,76 ribu jiwa) pada tahun 2023. Dilihat dari tingkat kemiskinan kabupaten/kota tahun 2023, tingkat kemiskinan ekstrem tertinggi berada di wilayah Kabupaten Morowali Utara sebesar 3,38 persen, menyusul terbesar kedua dan ketiga masing-masing adalah Kabupaten Parigi Moutong sebesar 2,41 persen, dan Kabupaten Sigi sebesar 2,07 persen.

Tabel 3.2

Tingkat Kemiskinan Ekstrem Kabupaten/Kota di
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 – 2023

No	Nama Daerah	Estimasi Jumlah Kemiskinan Ekstrem (ribu jiwa)			Estimasi Jumlah Kemiskinan Ekstrem (%)		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	Provinsi Sulawesi Tengah	97,91	95,02	45,76	3,15	3,02	1,44
2	Banggai Kepulauan	1,79	1,60	2,25	1,50	1,34	1,87
3	Banggai	6,96	5,61	0,00	1,81	1,44	0,00
4	Morowali	3,55	4,08	0,93	2,86	3,24	0,73
5	Poso	11,01	9,03	4,93	4,17	3,36	1,80
6	Donggala	11,05	11,07	6,02	3,61	3,59	1,94
7	Toli-Toli	3,00	3,64	2,77	1,26	1,51	1,14
8	Buol	4,49	2,11	0,89	2,69	1,24	0,52
9	Parigi Moutong	29,94	32,57	12,47	5,69	6,39	2,41
10	Tojo Una-Una	8,22	5,37	2,08	5,27	3,42	1,31
11	Sigi	4,40	6,19	5,08	1,82	2,54	2,07
12	Banggai Laut	4,16	3,08	1,33	5,40	3,93	1,67
13	Morowali Utara	5,74	4,10	4,64	4,34	3,04	3,38
14	Kota Palu	3,61	6,57	2,38	0,90	1,63	0,58

Sumber: BPS, 2024 (data diolah kembali)

Berbagai kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam rangka penurunan angka kemiskinan melalui program-program prioritas pengentasan kemiskinan terus dilakukan. Upaya program multi sasaran dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem juga terus dilakukan melalui strategi kebijakan yang meliputi:

- 1. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat;
- 2. Peningkatan pendapatan masyarakat; dan
- 3. Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

Selain hal tersebut, sinergitas Pemerintah Daerah bersama instansi terkait yang termasuk dalam Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) telah mengambil langkah yang strategis melalui berbagai intervensi baik melalui program multi sasaran maupun melakukan optimalisasi dan langkah antisipasi untuk pengendalian inflasi daerah antara lain melalui strategi 4K yaitu menjaga **Keterjangkauan Harga**, **Ketersediaan Pasokan**, **Kelancaran Distribusi**, dan **Komunikasi Efektif**.

- 1. **Strategi Keterjangkauan Harga** dilakukan dengan pemanfaatan anggaran belanja pemerintah dalam rangka stabilisasi harga;
- 2. Strategi menjaga Ketersediaan Pasokan dan keterjangkauan harga komoditas bahan makanan (bahan kebutuhan pokok) dengan mendorong program yang fokus pada pemenuhan pasokan pangan yang mudah diakses oleh masyarakat. Implementasi strategi ini dapat dilakukan melalui Gerakan Masyarakat (Germas) menanam komoditas penyumbang inflasi misalnya hortikultura di pekarangan rumah atau di dalam pot;
- Kelancaran Distribusi dilakukan dengan mendorong dilakukannya kerjasama antar daerah (KAD) untuk pemenuhan pasokan komoditas pangan daerah dan digitalisasi pasar tradisional menjadi strategis untuk memperluas akses pasar para petani sekaligus mendorong efisiensi rantai distribusi;
- 4. Strategi komunikasi efektif untuk mengelola ekspektasi inflasi masyarakat. Beberapa program komunikasi antara lain melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk mengantisipasi terjadinya informasi asimetris terhadap perkembangan harga di pasar.

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2024 dan Perkiraan Tahun 2025

1. Tantangan Ekonomi Global

Di perkirakan tahun 2024 dan tahun 2025, ekonomi global menghadapi tantangan yang semakin rumit. Ekonomi global merujuk pada sistem ekonomi yang melibatkan ketergantungan dan interaksi antara berbagai negara di seluruh dunia. Aktivitas ekonomi seperti perdagangan internasional, investasi lintas batas, dan pergerakan modal antar negara menjadi elemen utama yang membentuk dinamika ekonomi global. Lingkupnya mencakup pertukaran barang, jasa, dan sumber daya di antara negara-negara, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti fluktuasi mata uang, kebijakan

perdagangan internasional, dan dinamika pasar keuangan yang berdampak pada kesejahteraan ekonomi secara global. Faktor-faktor seperti ketidakpastian geopolitik, fluktuasi nilai mata uang, dan perubahan harga komoditas global menjadi penyebab utama dari penurunan ekonomi secara global yang di proyeksikan oleh Bank Dunia.

2. Tantangan Ekonomi Nasional

Ketidakpastian dalam relasi geopolitik antar negara-negara utama, yang dapat menjadi pemicu penurunan ekonomi global melalui konflik, perselisihan perdagangan, atau perubahan dalam dinamika politik internasional, berdampak pada kepercayaan pelaku pasar dan investasi. Tahun 2024 dan 2025 diperkirakan ekonomi Nasional semakin bergantung pada faktor-faktor GDP domestik seiring dengan penurunan permintaan global yang diantisipasi. Di sisi lain, peningkatan signifikan dalam pengeluaran fiskal, terutama selama masa pemilihan umum, diharapkan dapat memacu pertumbuhan GDP Nasional sebesar 5 persen pada tahun 2024.

3. Tantangan dan Prospek Ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah

Ketidakpastian akibat masih berlangsungnya konflik geopolitik Russia Ukraina memiliki potensi dampak negatif terhadap ekonomi global dan ekspor Sulawesi Tengah. Perlambatan penambahan kapasitas di industri pengolahan. Perlambatan permintaan produk turunan nikel dari negara mitra dagang juga akan terjadi utama Sulawesi Tengah yaitu Tiongkok.

Adapun yang menjadi tantangan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 dan 2025 yaitu:

- Komitmen Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pengendalian Inflasi baik di daerah maupun nasional.
- Dari sisi moneter, Bank Indonesia tetap konsisten dengan stance kebijakan moneter pre-emptive dan forward looking untuk memastikan terus berlanjutnya penurunan ekspetasi inflasi dan inflasi kedepan serta terus melakukan kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah untuk mengendalikan inflasi barang impor (imported inflation) dan pengelolaan devisa hasil ekspor melalui implementasi operasi moneter valas Devisa Hasil Ekspor (DHE) sesuai dengan mekanisme pasar.

- Apresiasi Nilai Tukar Rupiah berlanjut . Rupiah yang terus menguat ini didorong oleh aliran masuk modal asing ke pasar keuangan domestik sejalan dengan persepsi positif investor terhadap prospek ekonomi domestik yang tetap baik dengan stabilitas yang terjaga, imbal hasil aset keuangan domestik yang tetap menarik, dan ketidakpastian pasar keuangan global yang mereda. Ke depan, Bank Indonesia memprakirakan Rupiah terus menguat sejalan prospek ekonomi yang semakin baik dan fundamental ekonomi yang kuat, sehingga akan mendorong penurunan inflasi lebih lanjut. Kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah untuk mengendalikan inflasi barang impor (imported inflation) diperkuat dengan pengelolaan devisa hasil ekspor melalui implementasi TD valas DHE sesuai dengan mekanisme pasar.
- Penguatan strategi dan pengendalian inflasi serta koordinasi pusat dan daerah dalam kerangka Tim Pengendalian Inflasi Pusat/Daerah.

Namun demikian, Pertumbuhan 2024 diperkirakan masih tumbuh positif pada level yang lebih terbatas dibandingkan prakiraan pertumbuhan 2023 seiring dengan normalisasi laju pertumbuhan industri pengolahan. Optimisme pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 yakni adanya faktor pendorong yaitu:

- Tingkat konsumsi rumah tangga masih akan melanjutkan momentum peningkatan di tahun 2024.
- Masih berlanjutnya rencana investasi di Morowali, Morowali Utara, dan Palu.
- Ekspor masih akan tetap tumbuh terutama didukung oleh peningkatan kapasitas smelter dan ekspor hilirisasi nikel.
- Potensi peningkatan produksi dari sektor pertanian, yang antara lain didukung oleh siklus cuaca yang cukup baik, tingkat harga komoditas yang diprakirakan masih tinggi serta tambahan produksi dari program food estate di Kabupaten Donggala.
- Industri pengolahan diperkirakan masih akan tetap tumbuh positif pada level yang lebih terbatas dibandingkan prakiraan pertumbuhan tahun sebelumnya.
- Perlambatan terjadi seiring dengan pertumbuhan kapasitas produk hilirisasi nikel yang masih dibayangi ketidakpastian.

- Kinerja sektor pertambangan akan didorong oleh masih meningkatnya produksi industri pengolahan, serta meningkatnya permintaan seiring dengan recovery perekonomian global dan juga kebutuhan untuk pembangunan IKN.
- Pertumbuhan sektor konstruksi akan ditopang oleh masih berlanjutnya proyek infrastruktur berskala besar di Sulawesi Tengah, baik infrastruktur konektivitas, utilitas maupun properti.
- Sektor perdagangan diperkirakan masih akan tumbuh membaik, sejalan dengan terus membaiknya kondisi perekonomian pasca pandemi Covid-19 dan optimisme masyarakat yang semakin tinggi untuk bertransaksi.

Selanjutnya tantangan dan prospek perekonomian daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 dan tahun 2025 dapat diurai sebagai berikut:

- Prospek perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah di perkirakan akan membaik seiring dengan stabilnya perekonomian nasional dan dunia yang diperkirakan lebih baik dibandingkan Tahun 2023 dan outlook 2024. Kondisi perpolitikan Indonesia usia pesta demokrasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi bangkit dan diharapkan dapat segera dipulihkan dengan berbagai upaya dan kebijakan sehingga memberikan dampak positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketimpangan pendapatan individu yang ditandai dengan rendahnya nilai indeks gini. Menurunnya indeks gini diharapkan dapat mengurangi timbulnya konflik sosial dalam masyarakat dan memacu peningkatan pendapatan masyarakat yang selanjutnya menciptakan kemandirian ekonomi daerah. Pemerataan pertumbuhan di semua sektor menunjukkan adanya perkembangan mata rantai perekonomian di masyarakat. Sehingga bila kondisi ini terwujud maka output perkapita masyarakat dapat benar-benar meningkat secara riil yang turut mempengaruhi naiknya daya beli masyarakat.
- 2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan perekembangan yang agak stagnan dimana pada tahun 2023 sebesar 67,46 persen sedikit lebih rendah dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 68,81 persen. Hal ini menunjukkan bahwa persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di Sulawesi Tengah masih dikategorikan sedang karena pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk

memproduksi barang dan jasa sebagai aktivitas ekonomi masih perlu ditingkatkan.

- 3. Aktivitas ekspor-impor yang berjalan baik dan mulai naiknya konsumsi rumah tangga berpengaruh positif pada kinerja daerah dan alokasi anggaran Pemerintah di Sulawesi Tengah. Pendapatan daerah tumbuh melampaui target di semua komponen pendapatan yang mengalami tren pertumbuhan tinggi sejak awal tahun 2023. Optimalisasi dana pendapatan daerah melalui belanja daerah dan investasi terus ditingkatkan untuk mendorong pemulihan ekonomi dan menjaga daya beli masyarakat di tengah guncangan kenaikan harga komoditas.
- 4. Inflasi gabungan di Provinsi Sulawesi Tengah memasuki tahun 2024 semakin bisa ditekan pada angka aman dibawah 5 persen. Pada tahun 2025 inflasi perlu dijaga dibawah 5 persen dan perlu perhatian dari TPID Provinsi Sulawesi Tengah untuk Tahun 2025 yang diperkirakan beberapa komoditas pertanian akan mengalami kenaikan yaitu, kelapa sawit dan selanjutnya minyak goreng, beberapa harga pangan seperti ikan, bawang merah dan lombok serta tingginya biaya transportasi udara menyusul mobilitas masyarakat dengan adanya arus mudik lebaran pada Idul Fitri 2024.
- 5. Perkembangan jalan mantap nasional di Provinsi Sulawesi Tengah yang sudah mencapai 95%, terutama akses jalan "kebun kopi" yang dilalui oleh transportasi darat seluruh Provinsi di Pulau Sulawesi yang semakin membaik akan meningkatkan aksesisibilitas dan konektivitas baik antar wilayah di Sulawesi Tengah maupun akses masuk ke wilayah Sulawesi Tengah dari luar wilayah yang selanjutnya akan memicu peningkatan kunjungan wisatawan sehingga berpengaruh positif terhadap meningkatnya tingkat hunian hotel, industri kerajinan tangan dan jasa transportasi.
- 6. Produksi hasil-hasil pertanian akan terus mengalami peningkatan dengan dilaksanakannya upaya perbaikan varietas benih melalui sarana perbenihan mandiri yang tidak tergantung dari benih luar, pengadaan alat mesin pertanian (alsintan) serta distribusi pupuk bersubsidi yang diawasi dengan ketat hingga sampai pada tingkat petani. Selain itu, peningkatan sub sektor perkebunan melalui upaya pengusulan produksi, produktivitas dan mutu kakao di tahun 2024 melalui pengembangan kawasan kakao (extensifikasi) maupun upaya intensifikasi dengan re-planting dan peremajaan. Selain itu, untuk sub sektor

peternakan dilaksanakannya inseminasi buatan, pembiakan anakan unggul dan pembatasan penyembelihan sapi betina serta Program Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan sebagai upaya peningkatan hasil daging ternak dan swasembada pangan asal hewan.

- 7. Peningkatan status daerah rawan pangan yang pada tahun 2025 menjadi tantangan serius. Aspek ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan masih sangat rendah pada daerah-daerah minus atau yang memiliki aksesibilitas rendah (3T-tertinggal, terpencil dan terbelakang). Diperlukan berbagai inovasi terpadu sebagai bentuk intervensi terhadap permasalahan pangan dari setiap pemangku kepentingan.
- Kesepakatan kerjasama regional se-Sulawesi, se-Kawasan Timur Indonesia dan dengan beberapa Provinsi di Pulau Jawa akan menimbulkan konsekuensi terjadinya arus perdagangan untuk sektor barang, jasa, investasi, pekerja terampil serta aliran modal yang lebih bebas. Kondisi ini memberikan peluang masuknya investasi luar provinsi bahkan investasi asing yang dapat menjadi stimulan bagi pertumbuhan ekonomi melalui perkembangan teknologi, penciptaan lapangan kerja, pengembangan sumber daya manusia (human capital) dan akses yang lebih mudah kepada pasar nasional dan dunia. Tantangan yang kemudian muncul adalah kondisi tersebut akan beresiko menimbulkan eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam di Sulawesi Tengah yang melimpah sehingga kemudian juga mengancam kelestarian ekosistem. Kondisi tersebut akan diperburuk apabila regulasi investasi yang ada belum mampu menjamin kelestarian sumber daya alam dan lingkungan sebagai akibat aktivitas investasi tersebut. Dari sisi ketenagakerjaan, implementasi kerjasama regional dan dunia akan menambah jumlah lapangan kerja di dalam negeri sehingga kesempatan kerja yang ada terbuka lebar dengan berbagai kebutuhan keahlian yang beragam. Selain itu pencari kerja dapat dengan mudah mencari pekerjaan di luar negeri, sebaliknya pencari kerja dari luar negeri dapat dengan mudah masuk ke Indonesia. Kondisi tersebut menuntut pencari kerja di Indonesia khususnya di Sulawesi Tengah untuk dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan produktivitasnya. Hal ini dikarenakan daya saing tenaga kerja yang kita miliki dari sisi pendidikan dan produktivitasnya masih kalah dibandingkan

tenaga kerja yang berasal dari Malaysia, Singapura, dan Thailand. Pengoptimalan sekolah-sekolah kejuruan serta Balai Latihan Kerja (BLK) masih harus dilakukan. Selain itu penguasaan bahasa asing oleh para pencari kerja menjadi syarat yang juga harus dipenuhi.

- Kondisi wilayah geografis Sulawesi Tengah yang luas dan tidak meratanya penyebaran penduduk terutama pada daerah-daerah wilayah perdesaan, daerah perdalaman dan terpencil sekaligus sebagian dari penyebab terjadinya kesenjangan pembangunan dan belum memadainya aksesibilitas dan jangkauan pelayanan terhadap sarana dan prasarana infrastruktur antar daerah seperti transportasi, irigasi, perumahan dan permukiman, telekomunikasi serta kelistrikan.
- 10. Pembangunan smelter di Kawasan Industri Morowali Utara dan Morowali dengan kapasitas 300.000 ton dan PLTU kapasitas 300 Mega Watt dan pembangunan industri stainless steel dengan kapasitas 2 juta ton diperkirakan akan terus meningkatkan jumlah ekspor sektor pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, jasa konstruksi dan transportasi di tahun 2025.

Selanjutnya berdasarkan perkembangan capaian ekonomi makro di tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2024 diperkirakan akan mengalami pertumbuhan pada angka 11,0 - 12,5 persen dan diproyeksikan pada tahun 2025 di kisaran 12,72 - 13,28 persen. Proyeksi optimisme pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah dengan asumsi-asumsi, sebagai berikut :

1. Ekonomi akan semakin stabil dengan selesainya pesta demokrasi terbesar, dimana pada tahun 2024 dilaksanakan pemilu serentak dalam dua tahap. Tahap pertama yaitu pemilu serentak untuk memilih Anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan Anggota DPRD. Tahap kedua, pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak secara nasional. Adanya sinkronisasi waktu penyelenggaraan, baik pemungutan suara maupun pelantikan pasangan calon terpilih diharapkan tercipta efektivitas dan efisiensi kebijakan pembangunan antara daerah dan pusat. Kondisi ini, mejadikan kinerja pusat dan daerah berkesinambungan yang dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah.

- 2. Kinerja sektor jasa transportasi, wisata dan perhotelan akan menunjukkan trend positif pada pertengahan dan akhir tahun 2024. Hal ini disebabkan kondisi yang kondusif dari daerah dengan dukungan infrastruktur yang semakin membaik terhadap sektor pariwisata yang ditunjukkan dengan bangkitnya kembali transportasi penumpang dan barang lewat udara, laut dan darat terutama di beberapa daerah padat penduduk seperti Jawa Timur, Sulawesi Selatan, DKI Jakarta, Sulawesi Utara dan Kalimantan Timur. Daerah-daerah tersebut, selama ini merupakan daerah yang menyokong Sulawesi Tengah pada peluang sektor jasa transportasi darat, laut dan udara; sektor Pariwisata dan Tingkat Hunian Hotel sehingga diharapkan akan ikut menggerakkan roda ekonomi di Sulawesi Tengah. Di awal tahun 2024, Sulawesi Tengah akan bangkit dengan melakukan pemulihan cepat dan rekonstruksi untuk sektor perdagangan, hotel dan restoran sebagai persiapan menyambut wisatawan mancanegara dan domestik dengan destinasi berupa edukasi wisata bencana, wisata alam, wisata budaya dan destinasi wisata lainnya di wilayah Sulawesi Tengah.
- 3. Pada sektor ekonomi seperti subsektor pangan, tanaman pangan, hortikultura dan peternakan terus digenjot produktivitasnya melalui program Pengembangan Kawasan Pangan Nusantara (KPN)/Food Estate, Pengembangan Sentra Pertanian, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Inovasi Hilirisasi Pertanian yang dilakukan sebagai upaya penyanggah krisis pangan nasional dan dunia serta sekaligus menjadikan Sulawesi Tengah sebagai salah satu mitra Ibu Kota Nusantara (IKN) penyedia pangan. Untuk mewujudkan keinginan tersebut, akan diperhatikan pembangunan dan pemantapan infrastruktur jalan dan irigasi, pelabuhan perikanan yang merupakan kewenangan dari pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, perlu juga diperhatikan jadwal tanam, benih berkualitas, pupuk, pestisida, lahan penggembalaan, armada penangkapan ikan serta sarana dan prasarananya.
- 4. Sulawesi Tengah mengalami surplus beras selama 5 (lima) tahun terakhir, dimana angka produksi beras selalu lebih tinggi dari konsumsi masyarakat. Adapun di tahun 2023 produksi Gabah Kering Giling (GKG) Sulawesi Tengah mengalami peningkatan dengan capaian sebesar 814.424 ton atau naik 9,41 persen dibanding tahun 2022 sebesar 744.409 ton. Produksi gabah kering itu menghasilkan sebesar 475.600 ton beras atau naik dari tahun sebelumnya sebesar 450.548 ton. Peningkatan produksi gabah dan beras itu juga sebanding

dengan meningkatnya luas panen tahun 2023 yang mencapai 176.624 hektare atau naik sekitar 4,52 persen dibanding tahun 2022 dengan produktivitas 46,11 kuintal per hektar. Peningkatan produksi tersebut, menempatkan Sulawesi Tengah menjadi salah satu dari empat provinsi di Indonesia yang dinilai Kementerian Pertanian berhasil bertahan dari kondisi El Nino atau kemarau panjang. Hasil produksi pertanian sawah tahun 2023 itu bahkan melebihi tingkat konsumsi beras di Sulawesi Tengah yang mencapai 118 kilogram per kapita per tahun. Jika dihitung berdasarkan jumlah penduduk Sulteng 3.115.508 jiwa maka total konsumsi beras mencapai 367.630 ton per tahun yang berarti Sulawesi Tengah mengalami surplus sebesar 107.970 ton. Surplus produksi juga terjadi pada tahun 2022 sebanyak 86.710 ton dari total capaian produksi 450.548 ton. Rata-rata setiap tahunnya surplus beras Sulawesi Tengah mencapai lebih dari 90 ribu ton.

- 5. Subsektor perikanan dan kelautan memasuki tahun 2024 diperkirakan akan mengalami pertumbuhan positif yang ditandai dengan perkembangan budidaya rumput laut, udang dan ikan air tawar menggunakan metode supra intensif yang sudah memulai memasyarakat, pemanfaatan digitalisasi penangkapan ikan atau Smart Fishing untuk meningkatkan produktivitas perikanan tangkap khususnya perikanan tuna yang bernilai ekspor. Selain itu, Sulawesi Tengah telah menerapkan Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) sebagai upaya menjadikan Sulawesi Tengah daerah penyanggah pangan ikani. Sistem Logistik Ikan Nasional yang berbasis di Pelabuhan Perikanan Pantai (P3) Ogotua, Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Donggala dan PPI Pagimana diharapkan dapat menciptakan stabilitas harga di tingkat nelayan maupun konsumen dan sekaligus dapat menekan laju inflasi, membuka peluang pengembangan industri olahan, peningkatan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan, memperkuat ketahanan pangan serta mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi. Potensi pengembangan sektor kelautan dan perikanan di Sulawesi Tengah sangat besar mengingat Sulawesi Tengah sebagai satu-satunya provinsi yang memiliki empat Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yaitu WPP-RI 713 di Selat Makassar, WPP-RI 714 di Teluk Tolo, WPP-RI 715 di teluk Tomini serta WPP 716 di Laut Sulawesi.
- 6. Optimisme daerah Sulawesi Tengah dengan berhasilnya 3 (tiga) kabupaten yaitu Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala dan Kabupaten Tojo Una-Una keluar dari

status kabupaten tertinggal menjadi status kabupaten berkembang. Dengan demikian, pada aspek-aspek kriteria: kondisi perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas; dan karakteristik daerah telah memenuhi untuk keluar dari status daerah tertinggal. Terutama kemampuan keuangan daerah yang berkaitan dengan kemampuan fiskal yang mampu untuk membiayai kebutuhan daerahnya dengan anggaran yang diperoleh dari pendapatan asli daerah, hal ini juga akan mempersempit gap (jurang) pemisah kemampuan ekonomi dan keuangan diantara kabupaten-kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah yang selanjutnya akan menciptakan pemerataan pembangunan di seluruh Sulawesi Tengah.

- 7. Sektor konstruksi akan terus tumbuh terpacu karena Sulawesi Tengah memiliki konsep Kerja Sama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha (KPDBU), Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah lainnya, NGO Asing dan Pihak Perusahaan dalam dan luar negeri untuk proyek-proyek seperti jembatan Palu V, jalan arteri utama, jalan Tambu-Kasimbar yang menghubungkan IKN dengan Indonesia Timur dan rehabilitasi Prasarana Bandara Mutiara Sis Al-Jufri Palu, Pelabuhan Pantoloan, Pembangunan Hunian Tetap (Huntap) dan Tanggul Laut disepanjang pesisir Teluk Palu yang terdampak tsunami. Disamping itu, kelanjutan pembangunan akan terus dilanjutkan seperti pembangunan Bandara di Banggai Laut, Bandara Maleo di Morowali, Bandara Kasiguncu di Poso, Bandara Syukuran Aminuddin Amir Luwuk, Bandara Sultan Bantilan Tolitoli dan beroperasinya kembali Bandara Tanjung Api di Ampana Kabupaten Tojo Una-Una yang sempat tutup pada awal wabah Covid-19 sehingga akan menghidupkan kembali jalur wisata lewat udara ke destinasi Kepulauan Togean selain travel jalur darat dari Kota Palu dan Kota Luwuk menuju Kabupaten Tojouna-una. Pada akhir tahun 2022, pembangunan Bandara di Kabupaten Banggai Laut diharapkan pada tahapan on-progress dan dapat segera memicu pertumbuhan ekonomi di wilayah timur Sulawesi Tengah.
- 8. Investasi diperkirakan meningkat terutama dalam sektor pertambangan untuk komoditas nikel, minyak dan gas bumi serta Industri Pengolahannya yang ditunjukkan dengan berlangsungnya operasi smelter feronikel di Morowali dan Morowali Utara yang telah beroperasi semenjak tahun 2017, beroperasinya PT Dongi-Sinoro LNG yang selain memproduksi gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) juga memproduksi amonia cair yaitu senyawa kimia yang digunakan dalam pembuatan pupuk, bahan peledak, asam dan produk petrokimia lainnya di

Kabupaten Banggai serta industri pengolahan berbasis agro di Palu seperti pengolahan buah kakao, getah damar, arang tempurung kelapa serta membangkitkan kembali Pusat Inovasi Rotan Nasional (Pirnas) dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang pada tahun 2019 dilakukan pembenahan kembali paska bencana. Meningkatnya investasi juga dipengaruhi oleh masuknya listrik yang berasal dari PLTA Sulewana. Momentum peningkatan investasi tersebut harus terus dijaga dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui peningkatan efisiensi perizinan dan pelayanan investasi dengan sistem *on-line* serta penyelesaian *bottleneck* infrastruktur.

3.1.3 Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi

3.1.3.1 Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Nasional

Arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional pada Tahun 2025 diarahkan untuk penguatan fondasi transformasi ekonomi dengan berfokus pada upaya lanjutan proses hilirisasi SDA Unggulan, peningkatan kapasitas riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja, penerapan ekonomi hijau, pemenuhan akses digital di seluruh Wilayah Indonesia, Pembangunan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan utamanya di luar Pulau Jawa. Transisi energi difokuskan pada penerapan *Carbon Capture Storage* (CCS) dan Carbon Capture Utilization and Storage (CCUS) dan pembatasan pembangunan PLTU batu bara. Pertumbuhan ekonomi yang diharapkan adalah bersifat inklusif dan berdampak pada angka kemiskinan yang terus menurun, penanggulangan pengangguran yang disertai peningkatan decent job, mendorong pemulihan dunia usaha, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dalam rangka mendorong produktivitas, perwujudan ekonomi hijau (green economy) dan ekonomi biru (blue economy) dalam mencapai net-zero emission pada tahun 2060.

Selanjutnya Arah kebijakan pengembangan ekonomi syariah dalam Rancangan RKP tahun 2025 dilaksanakan dalam rangka mendorong Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah global, melalui:

- (1) Penguatan industri halal, diantaranya dengan peningkatan halal value chain, penguatan promosi industri halal, dan pengembangan pariwisata ramah muslim;
- (2) Penguatan ekspor halal dan kerja sama ekonomi syariah internasional; (3) penguatan ekosistem usaha mikro kecil menengah halal melalui dukungan fasilitasi sertifikasi halal untuk pelaku usaha mikro kecil menengah dan penguatan infrastruktur pendukung usaha mikro kecil menengah halal;

- (4) Penguatan keuangan syariah, meliputi penguatan lembaga keuangan syariah (perbankan syariah, industri keuangan nonbank syariah termasuk penyempurnaan peran bank wakaf), dan penguatan pasar modal syariah; dan
- (5) Penguatan dana sosial syariah (zakat, infaq, sedekah dan wakaf). Keseluruhan upaya di atas didukung oleh penguatan pendidikan dan penelitian ekonomi syariah, penyediaan insentif yang diperlukan, penguatan regulasi dan kelembagaan terkait ekonomi dan keuangan syariah baik di tingkat pusat dan daerah, serta penguatan dukungan bagi pelaku ekonomi syariah baik dari badan usaha milik negara dan swasta nasional.

Arah kebijakan ekonomi digital dalam Rancangan RKP Tahun 2025 dilaksanakan melalui:

- (1) Melakukan digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai salah satu jalan utama dalam memperkuat perekonomian Indonesia dan menghasilkan manfaat sosio ekonomi yang lebih luas bagi komunitas dan masyarakat,
- (2) Mengembangkan sistem pembiayaan alternatif usaha mikro, kecil, dan menengah melalui digitalisasi keuangan serta program pembiayaan ultra mikro,
- (3) Menciptakan iklim investasi yang kondusif di bidang ekonomi digital. Hal ini dapat dilakukan dengan menyederhanakan regulasi dan memberikan insentif bagi investor asing,
- (4) Mendorong pendidikan yang membantu peningkatan literasi digital untuk mendukung digitalisasi ekonomi.

Arah kebijakan ekonomi hijau dalam RKP Tahun 2025 dilaksanakan melalui strategi:

- (1) Mendorong dan memberikan insentif bagi pelaku ekonomi berputar (circular economy);
- (2) Menerapkan ekonomi sirkular industri;
- (3) Menerapkan efisiensi sumber daya;
- (4) Mengembangkan produk ramah lingkungan;
- (5) Menerapkan guna ulang dan perpanjangan masa pakai produk dan material;
- (6) Menguatkan ekosistem daur ulang;
- (7) Mencegah dan menindak tegas pelaku pencemaran, perusakan lingkungan, dan pembakaran hutan;
- (8) Melindungi keanekaragaman hayati flora dan fauna berdasarkan kearifan lokal sebagai bagian dari aset bangsa;



- (9) Peningkatan pengelolaan sampah di hulu dengan mengurangi dan memilah sampah di sumber;
- (10) Meningkatkan fasilitas pengolahan berbasis reduce, reuse, dan recycle,
- (11) Peningkatan pengelolaan sampah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- (12) Optimalisasi tempat pengolahan sampah terpadu, konservasi tempat pembuangan akhir dan landfill mining;
- (13) Perbaikan tata kelola persampahan;
- (14) Mengampanyekan budaya ramah lingkungan seperti mengganti penggunaan kantong plastik dengan bahan yang ramah lingkungan dan bisa daur ulang; serta
- (15) Meningkatkan pemanfaatan kawasan hutan melalui pengelolaan hutan berkelanjutan dengan melibatkan kelompok masyarakat (skema Perhutanan Sosial) dan badan usaha (skema Multi Usaha Kehutanan).

3.1.3.2 Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah

Arah kebijakan ekonomi Sulawesi Tengah pada tahun 2025 ditujukan untuk mengimplementasikan program dan kegiatan yang berfokus pada penguatan hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA) Unggulan, peningkatan kapasitas riset inovasi dan produktifitas tenaga kerja, mengoptimalkan pengelolaan potensi daerah melalui peningkatan kerjasama antar daerah sebagai wujud dalam upaya transformasi ekonomi. Hilirisasi SDA Unggulan dilakukan untuk memberikan nilai tambah (add value) bagi produk akhir dan memanfaatkan semua output rantai pengolahan dapat bernilai ekonomis dan memberikan manfaat bagi pendapatan daerah dan masyarakat. Hasil riset diperlukan sebagai upaya dukungan (support effort) terhadap peningkatan produksi dan produktivitas komoditas dan tenaga kerja sedangkan inovasi sebagai pelengkap intervensi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Pada tataran implementasi pengelolaan potensi SDA Unggulan dilakukan melalui peningkatan kerjasama antar daerah, menjamin kelancaran pola distribusi dan perluasan pasar bagi komoditas unggulan daerah, meningkatkan perluasan kesempatan kerja, mewujudkan peningkatan pendapatan masyarakat, menciptakan iklim kondusif bagi tumbuhnya usaha kecil menengah dan sektor informal serta mewujudkan peningkatan PAD sebagai sumber penerimaan daerah.

Kebijakan keuangan daerah dilakukan dalam rangka mewujudkan peningkatan pendapatan daerah untuk kemandirian fiskal dan peningkatan pendapatan masyarakat untuk kesejahteraan melalui teknologi dan inovasi hilirisasi komoditas unggulan dan penguatan kerjasama dalam rangka peningkatan nilai investasi daerah. Selain itu, perlu dilakukan penguatan pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan penguatan kelembagaan ekonomi dan sosial, sehingga pendapatan dan daya beli masyarakat meningkat dan terhindar dari kerentanan sosial yang dihadapi masyarakat miskin dan penyintas bencana alam dan sosial, sekaligus merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 2030 di Provinsi Sulawesi Tengah. Bersamaan dengan itu, arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mewujudkan hasil dan manfaat dari program prioritas dan lintas bidang atau wilayah dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis daerah serta berpedoman pada Prioritas dan Agenda Pembangunan Nasional yang termuat pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKP) tahun 2025.

Provinsi Sulawesi Tengah memiliki sumber-sumber pendapatan daerah yang berasal pada potensi sumberdaya alam yang dimiliki, *agrowisata-maritim-forestry* dan kondisi sosial ekonomi yang beranekaragam dan karakter fisik daerah unik yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Pengelolaan sumber-sumber pendapatan tersebut memerlukan strategi arah kebijakan ekonomi daerah yang tepat untuk menciptakan peluang peningkatan investasi, pendapatan daerah dan membuka lapangan kerja baru.

Pelaksanaan program daerah yang didasarkan pada arah kebijakan di tahun 2025, lebih ditekankan pada peningkatan kemampuan fiskal daerah atau mengurangi gap (kesenjangan) antara kabupaten-kabupaten daratan dengan kabupaten-kabupaten yang memiliki ciri kepulauan seperti: Kabupaten Banggai Laut, Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kabupaten Tojo Una-una. Trigger pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tengah diantaranya: peningkatan industri hilirisasi nikel, gas alam dan barang tambang lainnya, pembangunan kawasan sentra pangan dan pertanian (KSPP), peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian melalui kegiatan hulu dan hilir yang terintegrasi, hilirisasi inovasi teknologi pertanian, peningkatan produksi tuna, rumput laut dan udang, peningkatan kunjungan destinasi kepulauan togean, pembangunan pusat kebudayaan dan situs megalith, literasi digitalisasi,

pembangunan ruas jalan dan jembatan prioritas, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), stimulus ekonomi bagi pelaku UMKM dan pelaku usaha, penurunan angka kemiskinan dan stunting, dan pada aspek yang lain secara paralel tetap berupaya mencapai target-target pembangunan ekonomi yang memasuki masa tahun ke-1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulawesi Tengah periode 2025-2029.

Selain itu, kebijakan ekonomi daerah juga mengikuti kebijakan ekonomi nasional yang pada tahun 2025 diperkirakan akan lebih terkonsentrasi pada penyelesaian ketimpangan PDRB per Kapita antar provinsi untuk mendongkrak posisi Indonesia agar tidak terjebak dalam negara-negara *middle income trap* dan upaya peningkatan pendapatan masyarakat serta persiapan berjalannya roda pemerintahan di Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Kondisi perekonomian dan keuangan tahun 2025 diperkirakan akan semakin membaik seiring dengan selesainya pesta demokrasi terbesar karena melaksanakan pemilu serentak untuk memilih pasangan presiden dan wakil presiden, anggota legislatif MPR/DPR RI, DPD, DPRD prov/kab/kota serta kepala Daerah secara demokratis.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 diprediksi tetap terjaga diatas 5 persen yang kemudian dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2024 pertumbuhan ekonomi dipatok sebesar 5,1 – 5,7 persen dan selanjutnya sesuai dengan asumsi makro APBN tahun 2024 dan hasil kesepakatan bersama antara pemerintah dan DPR maka pertumbuhan ekonomi di patok pada level 5,2 persen (Portal Informasi Indonesia, 2024), dan akan terus meningkat hingga 6,1 persen pada tahun 2025 dengan didukung oleh konsumsi swasta, investasi, dan tetap positifnya kinerja ekspor di tengah pertumbuhan ekonomi global yang mulai membaik. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) diprakirakan menurun dan kembali ke dalam sasaran 2,5 ±1% pada 2024 dan 2,0 ±1% pada 2025, dengan inflasi inti akan kembali lebih awal pada paruh pertama 2024, seiring dengan tetap terkendalinya inflasi harga impor (imported inflation) dengan nilai tukar Rupiah yang stabil dan respons kebijakan moneter yang front loaded, pre-emptive, dan forward looking. Koordinasi kebijakan yang erat dengan Pemerintah Pusat dan Daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) berkontribusi kuat pada terkendalinya inflasi. Sinergi dan inovasi merupakan kunci dari prospek kinerja ekonomi Indonesia pada 2024 dan 2025 yang akan melanjutkan ketahanan dan kebangkitan ekonomi.

Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah periodisasi 2025-2029 atau memasuki periodisasi awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2045 yang fokus tema pembangunannya yaitu Penguatan Hilirisasi SDA Unggulan, Peningkatan Kapasitas Riset Inovasi dan Produktifitas tenaga Kerja serta mengoptimalkan pengelolaan potensi Daerah melalui peningkatan kerjasama antar daerah. Untuk mewujudkan tema pembangunan tersebut, diperlukan kerja keras dan saling bersinergi antar perangkat daerah, pemangku kepentingan dan organisasi kemasyarakatan.

Dalam arahan kebijakan ekonomi Sulawesi Tengah, pemerintah daerah tetap menerapkan prinsip optimisme yang didasarkan pada indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi di Provinsi Sulawesi Tengah pada periode sebelumnya. Indikasinya dapat dilihat dari perkembangan makro ekonomi yang meliputi tingkat pertumbuhan ekonomi, andil sektor-sektor ekonomi sebagai pembentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik dari sisi produksi maupun pengeluaran, lapangan kerja, perkembangan nilai investasi dan struktur ekonomi daerah. Disamping itu untuk mengetahui kondisi stabilitas perekonomian daerah dilihat dari indikasi perkembangan laju inflasi.

Untuk mewujudkan visi dan misi pada periodisasi 2025-2029 yang disesuaikan dengan Tema Pembangunan Sulawesi yaitu Penunjang Superhub Ekonomi Nusantara dan Industri Berbasis Sumberdaya Alam dan sekaligus sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Pintu Gerbang Internasional Kawasan Timur Indonesia (KTI), melalui Pengembangan Industri Hilirisasi Mineral dan Lumbung Pangan Nasional. Dimana Sulawesi Tengah sebagai Sentra Tanaman Pangan dan Perkebunan, serta Pusat Pengolahan Hasil Pertambangan, maka Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan arah kebijakan ekonomi yang akan dilakukan pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- Mempersiapkan Sulawesi Tengah sebagai wilayah penyanggah Ibu Kota Baru (IKN) Nusantara yang berlokasi di Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kabupaten Kutai Kartenegara Provinsi Kalimantan Timur. Peran Sulawesi Tengah sebagai penyuplai bahan pangan dan olahan, material bangunan, SDM yang berpendidikan vokasi, air bersih dan hasil kerajinan tangan;
- 2. Perbaikan dan peningkatan pembangunan jaringan infrastruktur seperti : poros jalan Tambu-Kasimbar <u>+</u> 30 km, poros jalan prioritas, jembatan, pelabuhan dan

bandara untuk memberikan stimulasi tumbuhnya investasi dan konektivitas antar wilayah dalam rangka pertumbuhan ekonomi yang berkualitas bersamaan dengan meningkatnya kualitas kehidupan ekonomi masyarakat;

- 3. Pembangunan Kawasan Pangan Nusantara (KPN)/Food Estate dan Kawasan Ekonomi Khusus, membangkitkan UMKM, koperasi dan usaha mikro rakyat lainnya sebagai sumber penggerak utama pertumbuhan dengan menggali potensi unggulan daerah dalam upaya mendorong percepatan pertumbuhan kawasan produksi dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lainnya;
- 4. Peningkatan nilai tambah (add value) sumberdaya alam hasil olahan pada industri hulu dan inovasi teknologi hilirisasi berbasis agro, maritim, hasil hutan, mineral dan migas untuk penguatan struktur industri melalui pembangunan industri hulu yang diintegrasikan dengan industri antara (bahan setengah jadi) dan industri hilirnya.
- Peningkatan distribusi pendapatan melalui peningkatan hasil produksi, nilai jual produk dan peluang pasar yang memicu percepatan pertumbuhan ekonomi di perdesaan dan penciptaan keseimbangan serta pemerataan pembangunan di setiap wilayah;
- 6. Peningkatan investasi daerah untuk memperluas kesempatan kerja dan berusaha dengan penciptaan iklim investasi yang kondusif bagi dunia usaha, baik skala usaha kecil, menengah maupun besar melalui penyediaan informasi potensi daerah, penyederhanaan perijinan dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu, membangun prasarana penunjang, melindungi kepastian hukum dan penyediaan tenaga kerja di daerah;
- 7. Percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim dengan memanfaatkan sumberdaya dan jasa kemaritiman, yaitu peningkatan produksi perikanan dan kelautan, pengembangan energi dan mineral dasar laut, pengembangan kawasan wisata bahari, kemampuan industri maritim dan perkapalan serta membangun transportasi laut antar pulau yang memadai.
- 8. Mengurangi kesenjangan atau disparitas pembangunan antar wilayah melalui peningkatan aksesibilitas dan jalur distribusi barang dan jasa ke berbagai wilayah sehingga dapat menekan laju inflasi serta mengoptimalkan pendapatan asli daerah melalui pemanfaatan sumberdaya yang tersedia dalam rangka peningkatan kapasitas fiskal daerah.

9. Mengalokasikan program dan kegiatan prioritas penurunan kemiskinan dan stunting, pengurangan tingkat pengangguran terbuka, mengurangi disparitas wilayah, peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat melalui penambahan dan pembangunan sarana/prasarana pelayanan rumah sakit.

Arahan kebijakan ekonomi nasional mendukung Prioritas Nasional sesuai dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yaitu memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Adapun arah kebijakan ekonomi Sulawesi Tengah dilaksanakan sesuai arahan kebijakan ekonomi nasional tersebut sebagaimana tercantum pada tabel 3.3, sebagai berikut:

Tabel 3.3
Kesesuaian Arahan Kebijakan Ekonomi Nasional dan Arahan Kebijakan
Ekonomi Sulawesi Tengah Tahun 2025

Ekonomi Sulawesi Tengan Tanun 2025							
Arahan Kebijakan Ekonomi	Nasional	Sulawesi Tengah					
Swasembada Pangan	Menjalankan agenda reformasi agraria untuk memperbaiki kesejahteraan petani dalam arti luas sekaligus mendukung peningkatan produksi di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan dan kehutanan; Memperkuat industri pupuk dalam negeri dan mempercepat	Agraria untuk meningkatkan produktivitas dan produksi komoditas unggulan daerah pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan dan kehutanan Meningkatkan produksi tanaman pangan, hortikultura perkebunan					
	Meningkatkan produktivitas pertanian melalui peningkatan sarana prasarana pendukung pertanian rakyat, teknologi pangan terpadu, mekanisasi pertanian, inovasi digital (digital farming), memperbaiki tata kelola dan rantai nilai hasil pertanian; Memperkuat tata kelola sistem pangan melalui penguatan satu data pangan yang terintegrasi dengan satu	organik, pupuk organik dan pengembangan industri produksi berwawasan ramah lingkungan Meningkatkan produktivitas dan produksi hasil pertanian melalui mekanisasi, pengawasan sarana dan prasarana, smart farming/smart village serta teknologi pangan dan penataan tata niaga hasil-hasil pertanian, pemanfaatan dan pengelolaan limbah hasil pertanian.					
	data Indonesia, stabilisasi rantai pasok dan rantai nilai, serta peningkatan pengelolaan susut dan sisa/limbah pangan. Mengutamakan produksi pangan pokok dalam negeri dan mengendalikan impor untuk menjaga stabilitas dan kepastian harga di	rawan pangan melalui distribusi merata hasil produksi pangan daerah,					

Arahan	Arahan						
Kebijakan Ekonomi	Nasional	Sulawesi Tengah					
<u> </u>	tingkat petani, terutama di saat panen raya;	menjaga harga komoditas di tingkat petani dan mengendalikan inflasi					
	Merevitalisasi lahan rusak menjadi lahan produktif untuk mendukung kemandirian dan ketahanan pangan nasional;	petarii dari mengendalikan iiniasi					
	Memberdayakan dan memperkuat peran dan fungsi Badan Pangan Nasional, Badan Urusan Logistik, bersama Badan Usaha Milik Negara holding pangan ID Food sebagai regulator dan produsen pangan pokok yang strategis, baik untuk peningkatan produksi berkesinambungan, pertumbuhan ekspor, dan upaya stabilisasi harga kebutuhan pokok dan komoditas	berkesinambungan, meningkatkan nilai					
	pertanian strategis lainnya; Menjamin pembiayaan untuk petani, peternak dan nelayan melalui bank, koperasi, dan lembaga pembiayaan non-bank lainnya, termasuk start-up untuk mendukung akses dengan mudah dan cepat dalam memperkuat struktur permodalan, menjamin keberlangsungan usaha, pengembangan usaha, dan memperluas cakupan asuransi untuk	Memberikan penjaminan (asuransi) beresiko iklim terhadap petani, pekebun, peternak dan nelayan dengan bekerja sama kepada off taker, bank, koperasi, bumdes serta pembiayaan non-bank lainnya serta mendukung usaha start-up melalui program petani milenial untuk memperkuat pemodalan dan keberlanjutan usaha					
	petani, peternak dan nelayan; Melanjutkan dan menyempurnakan program kawasan sentra produksi pangan atau food estate secara berkelanjutan, terutama untuk komoditas padi, jagung, singkong, kedelai, dan tebu; Merevitalisasi dan membangun sebagian besar hutan rusak untuk dimanfaatkan menjadi lahan untuk aren untuk bioetanol untuk mendukung pencapaian kedaulatan energi nasional. Diantaranya akan ditanam pula ubi kayu, ubi jalar, sagu, sorgum, dan kelapa dengan sistem tumpang sari untuk tambahan pangan nasional	Nusantara (KPN) sesuai kluster AGROPOLITAN BOLIPAMUSO (Kabupaten Buol, Tolitoli, Parigi Moutong, Poso) dan KPN di Kabupaten Buol, Toli-Toli, Sigi dan Donggala untuk komoditas padi, jagung, kelapa dalam					
	Memastikan kedaulatan pangan berbasis protein ikan (blue food) melalui peningkatan kualitas dan kuantitas input produksi (antara lain benih, bibit, pupuk, pakan, dan bahan bakar minyak), sarana prasarana	Membangun pelabuhan perikanan pantai (PPP), Industri perikanan halal, Mengembangan kluster wisata bahari dan perikanan BALATOJU (Banggai, Banggai Laut, Banggai Kepulauan dan Tojo Una-Una) mendukung					

Arahan	Arahan					
Kebijakan Ekonomi	Nasional	Sulawesi Tengah				
	produksi, sarana prasarana pascapanen, sistem rantai dingin dan pengolahan, serta pengembangan kawasan berbasis komoditas lokal dan/atau unggulan serta penerapan perikanan berkelanjutan (perikanan berbasis kuota dan transformasi akuakultur)	pengembangan kawasan berbasis komoditas lokal, penerapan sistem rantai dingin dan pengelolaan perikanan terukur				
	Meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat melalui penganekaragaman konsumsi pangan, biofortifikasi dan fortifikasi pangan, dan pangan lokal; Menjamin mutu, keamanan dan ketelusuran pangan melalui penguatan infrastruktur pengawasan-pengujian pangan;	i ketersediaan, keterjangkauan da i pemanfaatan pangan B2SA (Beragan i Bergizi, Seimbang, dan Aman) melalu peningkatan diversifikasi pangan loka biofortifikasi dan fortifikasi pangan.				
Swasembada Energi	Mempercepat transisi energi dengan mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil sekaligus menjadikan Indonesia sebagai raja energi hijau dunia (super power) dalam bidang energi baru dan terbarukan (renewables) dan energi berbasis bahan baku nabati (bioenergy)	Melakukan transisi energi dengan mencari sumber-sumber energi baru terbarukan (<i>renewables</i>) dan energi berbasis bahan baku nabati (<i>bioenergy</i>)				
	Mengembalikan tata kelola migas dan pertambangan nasional sesuai amanat konstitusi, terutama Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945; Memperbaiki skema insentif untuk mendorong aktivitas temuan cadangan sumber energi baru untuk meningkatkan ketahanan dan kedaulatan energi nasional; Mendirikan kilang minyak bumi, pabrik etanol, serta infrastruktur terminal penerima gas dan jaringan transmisi/distribusi gas, baik oleh Badan Usaha Milik Negara atau swasta.	Melakukan upaya pemanfaatan sumber-sumber cadangan energi sumber baru dalam rangka ketahanan energi sesuai dengan kewenangan daerah provinsi				
Swasembada Air	Penyediaan tampungan dan pasokan air berkelanjutan untuk kegiatan sosial ekonomi produktif sebagai bagian dari pengelolaan air sehingga tidak menjadi bencana pada saat musim hujan dan kekurangan pada saat musim kemarau. Peningkatan kinerja layanan irigasi multikomoditas untuk mendukung ketahanan pangan lokal, peningkatan	Penyediaan embung, peningkatan fungsionalisasi irigasi dan bendungan serta pompanisasi sebagai langkah mengantisipasi kemarau panjang dan bencana banjir yang dilakukan untuk menjaga stabilitas produksi pertanian, perkebunan dan kehutanan				

Archan	Auchan					
Arahan Kebijakan Ekonomi	Nasional	Sulawesi Tengah				
	produktivitas, dan swasembada pangan yang ditempuh dengan pengembangan dan pengelolaan irigasi serta inisiasi modernisasi irigasi.					
	Penyempurnaan tata kelola infrastruktur sumber daya air yang terintegrasi dari hulu ke hilir; serta Revitalisasi daerah aliran sungai, menjaga kebersihan sungai, dan sekaligus mengamankan kualitas air permukaan dari polusi yang salah satunya bersumber dari air limbah domestik rumah tangga.	Perbaikan tata kelola air dari hulu ke hilir yang terintegrasi, normalisasi aliran sungai, pengelolaan sampah sungai dan laut serta mengendalikan pencemaran air dari limbah industri dan rumah tangga				
Ekonomi Syariah	Penguatan industri halal, diantaranya dengan peningkatan halal value chain, penguatan promosi industri halal, dan pengembangan pariwisata ramah muslim Penguatan ekspor halal dan kerja sama ekonomi syariah internasional Penguatan ekosistem usaha mikro kecil menengah halal melalui dukungan fasilitasi sertifikasi halal untuk pelaku usaha mikro kecil menengah dan penguatan infrastruktur pendukung usaha mikro kecil menengah halal;	Penjaminan produk halal melaui labelisasi halal, industri perikanan halal, promosi produk dan pariwisata halal (hotel, restauran) Peningkatan skala UMKM halal melalui penerbitan sertifikasi bagi pelaku UMKM, peningkatan industri pengolahan yang halal, saniter dan hiegienis dalam rangka proses pengolahan halal				
	Penguatan keuangan syariah, meliputi penguatan lembaga keuangan syariah (perbankan syariah, industri keuangan nonbank syariah termasuk penyempurnaan peran bank wakaf), dan penguatan pasar modal syariah Penguatan dana sosial syariah (zakat, infaq, sedekah dan wakaf). Keseluruhan upaya di atas didukung	Meningkatkan kerjasama dengan Bank Keuangan Syariah dalam pengelolaan modal-modal daerah, meningkatkan peran BAZNAS daerah, penguatan pendidikan dan penelitian ekonomi syariah, penguatan regulasi dan kelembagaan ekonomi dan keuangan syariah daerah dan dukungan pelaku ekonomi syariah.				
	oleh penguatan pendidikan dan penelitian ekonomi syariah, penyediaan insentif yang diperlukan, penguatan regulasi dan kelembagaan terkait ekonomi dan keuangan syariah baik di tingkat pusat dan daerah, serta penguatan dukungan bagi pelaku ekonomi syariah baik dari badan usaha milik negara dan swasta nasional.					
Ekonomi Digital	Melakukan digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai salah					

Avolton						
Arahan Kebijakan Ekonomi	Nasional	Sulawesi Tengah				
	satu jalan utama dalam memperkuat perekonomian Indonesia dan menghasilkan manfaat sosio ekonomi yang lebih luas bagi komunitas dan masyarakat.	untuk pemanfaatan teknologi informasi bagi masyarakat pedesaan untuk memberikan manfaat kemudahan dalam peningkatan usaha ekonomi dan sosial				
	Mengembangkan sistem pembiayaan alternatif usaha mikro, kecil, dan menengah melalui digitalisasi keuangan serta program pembiayaan ultra mikro Menciptakan iklim investasi yang kondusif di bidang ekonomi digital. Hal ini dapat dilakukan dengan menyederhanakan regulasi dan memberikan insentif bagi investor asing,	Melakukan program smart economy yang berbasis teknologi untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan usaha mikro menengah dan kemampuan mencapai pasar yang didukung oleh regulasi pasar (pengaturan off-taker) dan pemberian insentif bagi off-taker/investor yang memiliki kinerja yang baik				
	Mendorong pendidikan yang membantu peningkatan literasi digital untuk mendukung digitalisasi ekonomi.	Meningkatkan sarana dan prasarana sekolah-sekolah vokasional khususnya yang menerapkan literasi digital, pengelolaan keuangan berbasis digital dan IT untuk mendukung digitalisasi ekonomi				
Ekonomi Hijau	Mendorong dan memberikan insentif bagi pelaku ekonomi berputar (<i>circular economy</i>) dan menerapkan ekonomi sirkular industry.	Mendorong dan memberikan insentif bagi pelaku ekonomi yang memanfaatkan SDA dengan mempertimbangkan SDA yang berkelanjutan				
	Menerapkan efisiensi sumber daya, mengembangkan produk ramah lingkungan, menerapkan guna ulang dan perpanjangan masa pakai produk dan material, menguatkan ekosistem daur ulang, mencegah dan menindak tegas pelaku pencemaran, perusakan lingkungan, dan pembakaran hutan; Melindungi keanekaragaman hayati flora dan fauna berdasarkan kearifan lokal sebagai bagian dari aset bangsa, peningkatan pengelolaan sampah di hulu dengan mengurangi dan memilah sampah di sumber, meningkatkan fasilitas pengolahan berbasis reduce, reuse, dan recycle.	dan material; menguatkan ekosistem daur ulang; mencegah dan menindak tegas pelaku pencemaran, perusakan lingkungan, dan pembakaran hutan. Melindungi keanekaragaman hayati flora dan fauna berdasarkan kearifan lokal (local wisdom), peningkatan pengelolaan sampah di sungai dan laut; meningkatkan fasilitas pengolahan berbasis reduce, reuse, dan recycle.				
	Peningkatan pengelolaan sampah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, optimalisasi tempat pengolahan sampah terpadu, konservasi tempat pembuangan akhir dan landfill mining, perbaikan tata kelola persampahan, mengampanyekan budaya ramah lingkungan seperti mengganti	Peningkatan pengelolaan sampah di sungai dan laut, optimalisasi TPST, perbaikan tata kelola persampahan, mengampanyekan budaya ramah lingkungan dan sampah daur ulang.				

Arahan Kebijakan Ekonomi	Nasional	Sulawesi Tengah
	penggunaan kantong plastik dengan bahan yang ramah lingkungan dan bisa daur ulang.	
	Meningkatkan pemanfaatan kawasan hutan melalui pengelolaan hutan berkelanjutan dengan melibatkan kelompok masyarakat (skema Perhutanan Sosial) dan badan usaha (skema Multi Usaha Kehutanan).	Pengelolaan hutan berkelanjutan berbasis masyarakat, pemanfaatan hutan sesuai dengan kearifan lokal masyarakat dan pemanfaatan skema kerjasama pelaku usaha ekonomi yang dapat memanfaatkan produk hasil hutan
Ekonomi Biru	Menguatkan tata kelola ekosistem ekonomi biru dan diplomasi maritim, melalui antara lain penyederhanaan perizinan, fasilitasi akses pendanaan, penguatan kelembagaan pelaku usaha kelautan dan perikanan, pengembangan kawasan strategis dan pusat pertumbuhan ekonomi maritim, blue finance dan good neighbor policy;	Menguatkan tata kelola ekosistem ekonomi biru melalui penyederhanaan perizinan, fasilitasi akses pendanaan, penguatan kelembagaan pelaku usaha kelautan dan perikanan, pengembangan kawasan strategis dan mina bahari sebagai pusat pertumbuhan ekonomi maritim.
	Meningkatkan kesehatan laut yang mencakup pengelolaan ekosistem dan kawasan konservasi perairan, penanganan sampah laut, dan rehabilitasi pesisir, melalui identifikasi dan pencadangan kawasan konservasi perairan baru di daerah, peningkatan kapasitas kompetensi pengelola kawasan konservasi dengan jejaring dan kemitraan, pembangunan sarana prasarana pengolahan dan penanganan sampah laut di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penyadartahuan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil terkait dampak sampah laut, serta rehabilitasi ekosistem mangrove, terumbu karang, dan lamun.	Meningkatkan kesehatan laut yang mencakup pengelolaan ekosistem dan kawasan konservasi perairan dan rehabilitasi pesisir, peningkatan kapasitas kompetensi pengelola kawasan konservasi dengan jejaring dan kemitraan, pembangunan sarana prasarana pengolahan dan penanganan sampah laut di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan rehabilitasi ekosistem mangrove, terumbu karang, dan lamun.
	Mengembangkan industrialisasi perikanan yang modern, terintegrasi, dan berkelanjutan, mencakup antara lain peningkatan produktivitas, nilai tambah, dan hilirisasi potensi sumber daya kelautan dan perikanan termasuk perikanan tangkap, perikanan budidaya, rumput laut, dan garam melalui pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan budidaya yang berdaya saing serta penguatan sistem rantai	Mengembangkan industrialisasi perikanan modern dan terpadu melalui upaya peningkatan produktivitas, nilai tambah, dan hilirisasi potensi sumber daya kelautan dan perikanan termasuk perikanan tangkap, perikanan budidaya dan rumput laut, pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan budidaya yang berdaya saing serta penguatan sistem rantai dingin dan efisiensi rantai pasok produksi.

Arahan					
Kebijakan Ekonomi	Nasional	Sulawesi Tengah			
	dingin dan efisiensi rantai pasok produksi;				
	Menguatkan industri manufaktur berbasis kelautan, terutama industri perkapalan dan garam, antara lain melalui penguatan sarana dan prasarana industri garam, pengembangan industri galangan kapal, dan penguatan rantai pasok bahan baku industri perkapalan;	Menguatkan industri manufaktur berbasis kelautan, industri rumput laut (carageenan), industri ikan beku dan pengelolaan cumi dan gurita yang berkelanjutan			
	Menguatkan sistem transportasi, logistik, dan perdagangan jalur perairan, termasuk untuk peningkatan konektivitas di sentra-sentra produksi kelautan dan perikanan, pulau-pulau kecil dan terluar;	Menguatkan sistem transportasi, logistik, dan perdagangan jalur perairan, melalui peningkatan konektivitas sentra-sentra produksi kelautan dan perikanan terhadap pasar			
	Mengembangkan destinasi pariwisata berbasis bahari dan danau serta pemanfaatan jasa kelautan berkelanjutan melalui peningkatan perkuatan sarana dan prasarana pariwisata bahari, penguatan keterampilan dan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan usaha dan investasi, memperkuat pengelolaan destinasi pariwisata berkelanjutan, mengembangkan pariwisata berkelanjutan, mengembangkan pariwisata bahari berbasis masyarakat berkelanjutan, dan memperkuat keberlanjutan dan ketahanan rantai pasok pariwisata.	Mengembangkan Wisata Bahari dan Danau (Lindu, Poso) serta pemanfaatan jasa kelautan berkelanjutan, peningkatan keterampilan dan kapasitas SDM Wisata, peningkatan usaha dan investasi, mengembangkan pariwisata bahari berbasis masyarakat berkelanjutan, dan memperkuat rantai nilai pariwisata bahari dan danau.			
	Meningkatkan kapasitas dan optimalisasi pemanfaatan iptek dan inovasi untuk peningkatan produktivitas ekonomi biru, serta peningkatan sumber daya manusia maritim, melalui perbaikan sistem pendidikan terutama terkait science, technology, engineering, art, and mathematics, penyusunan rencana terpadu dan fasilitasi pelaksanaan untuk pengembangan, alih teknologi dan adopsi teknologi, meningkatkan investasi untuk pendidikan dan riset berkualitas, serta penguatan faktorfaktor pendukung pembangkitan energi terbarukan dan lepas pantai, perikanan tangkap dan budi daya, rumput laut dan hilirisasinya, konservasi dan kelestarian	Meningkatkan kemampuan pemanfaatan iptek dan inovasi untuk tujuan ekonomi biru, peningkatan SDM maritim, dengan perbaikan sarana dan prasarana sekolah vokasional kemaritiman, adopsi teknologi kemaritiman, investasi pendidikan dan riset berkualitas, peningkatan produksi perikanan tangkap dan budi daya, rumput laut dan hilirisasinya, konservasi dan kelestarian biodiversitas kelautan serta penguatan rantai nilainya.			

Arahan Kebijakan Ekonomi	Nasional	Sulawesi Tengah
	biodiversitas kelautan, serta penguatan konektivitas maritim untuk mendukung rantai pasok nasional dan global.	

Arah kebijakan ekonomi daerah akan tertuang di dalam strategi pengembangan ekonomi yang menjadi keinginan kuat pemerintah daerah dan masyarakat untuk ikut serta membentuk tatanan ekonomi daerah yang diinginkan. Arah kebijakan ekonomi daerah diharapkan dapat menjadi arahan untuk permasalahan menghasilkan penyelesaian selama proses perencanaan pembangunan terhadap isu-isu ekonomi daerah. Selain itu, dapat menjadi bahan perbaikan dari kebijakan-kebijakan yang lalu untuk menghasilkan keputusan yang lebih baik. Adapun target indikator makro ekonomi Sulawesi Tengah khususnya sebagai acuan sasaran Pembangunan ekonomi daerah tercantum di dalam tabel 3.4 dibawah ini.

Tabel 3.4
Target Indikator Makro Ekonomi Sulawesi Tengah Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target Tahun 2025
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	11,72 - 13,28
2	Tingkat Kemiskinan (Persentase penduduk miskin)	%	11,06-11,56
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2,25-2,94
4	Indeks Modal Manusia (IMM)	Indeks	0,51
5	Indeks Gini	Indeks	0,298-0,302
6	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	77,96

Sumber: Bappeda, 2024 (diolah)

Target indikator makro yang disepakati telah relevan dengan pembangunan daerah, termasuk pertumbuhan ekonomi, ketenagakerjaan, kesejahteraan masyarakat, dan lingkungan. Dengan penetapan indikator makro tahun 2025, diharapkan Sulawesi Tengah dapat mencapai tujuan pembangunan secara efisien dan berkelanjutan.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan kebijakan dalam rangka penggalian dan pemanfaatan potensi daerah yang bertujuan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan, mulai dari pembukaan lapangan pekerjaan, penyediaan pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat sampai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah yang berkaitan dengan hak dan kewajiban daerah. Sedangkan pengelolaan keuangan daerag adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahah daerah.

Perencanaan keuangan daerah merupakan suatu sistem pengelolaan keuangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, penyusunan arah kebijakan keuangan daerah secara umum mengacu pada Ketentuan Perundangan, antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk setiap tahun anggaran yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri.

RKPD Tahun 2025 disusun berdasarkan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial, serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan *money follows program* dengan memastikan program yang memiliki manfaat dan bukan hanya merupakan tugas fungsi perangkat daerah yang bersangkutan, namun dapat dikolaborasikan antar perangkat daerah terkait. Berkaitan dengan itu, maka pencapaian prioritas pembangunan memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas daerah, program prioritas dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan, dengan melakukan pemenuhan capaian target prioritas antara pusat dan daerah dengan mempertimbangkan potensi dan kebutuhan masing-masing daerah secara spesifik.

RKPD Tahun 2025 dimaksudkan sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dengan fokus antara lain kepada percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas SDM pendidikan dan kesehatan, penanggulangan pengangguran melalui penyediaan lapangan usaha, mendorong pemulihan dunia usaha, serta persiapan Sulawesi Tengah sebagai salah satu daerah penyangga utama pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, kemandirian keuangan daerah merupakan hal yang sangat penting, Daerah yang mempunyai kemampuan fiskal yang baik, akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam perencanaan dan melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga dapat menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan keberlangsungan pembangunan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Untuk itulah sehingga analisis pengelolaan keuangan daerah menjelaskan tentang aspek kebijakan keuangan daerah yang berkaitan dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah guna mewujudkan visi dan misi daerah serta prioritas pembangunan nasional. Struktur APBD Provinsi Sulawesi Tengah terdiri atas: (1) Penerimaan Daerah yang di dalamnya terdapat Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah; (2) Pengeluaran Daerah yang di dalamnya terdapat Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam RKPD 2025 meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai peraturan perundang-undangan yang dengan ketentuan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran serta pendapatan transfer merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah lainnya.



Dalam upaya peningkatan pendapatan daerah, perumusan kebijakan pendapatan daerah merupakan hal yang sangat penting sehingga apa yang direncanakan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Kebijakan pendapatan Provinsi sulawesi Tengah diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah serta dana perimbangan dalam rangka mendukung pembangunan daerah dengan optimalisasi pemanfaatan sumbersumber pendapatan dan aset-aset pemerintah daerah.

Secara umum penyusunan proyeksi pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2025 tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi makro yang diproyeksikan mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2024, selain itu juga masih banyak potensi yang harus digali dan dioptimalkan sehingga diharapkan pendapatan daerah dapat meningkat. Adapun proyeksi pendapatan daerah tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp. 4,383,335,762,924.53,- Kontribusi pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Tengah perkomponen disajikan dalam Tabel 3.5 berikut ini:

Tabel 3.5
Realisasi Target/Proyeksi Pendapatan Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2023-2025

	1 Tovilisi Sulawesi Tengah Tahun Anggalah 2025-2025						
NO	URAIAN	REALISASI PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2022	REALISASI PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2023	TARGET TAHUN ANGGARAN 2024	PROYEKSI PENDAPATAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2025	PROYEKSI PENDAPATAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2026	
1	PENDAPATAN DAERAH	4.879.934.023.183,07	4.493.561.983.536,00	4.867.602.935.164,55	4,383,335,762,924.53	4.424.925.451.565,00	
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.568.620.257.695,28	1.701.785.047.036,00	2.059.942.177.139,00	2,017,463,660,424.53	2.181.1.4.2.86.843,54	
1.1.1	PENDAPATAN PAJAK DAERAH	1.294.069.674.405,28	1.200.411.000.000,00	1.450.000.000.000,00	1,671,540,000,000.00	1.131.892.200.917,11	
1.1.2	HASIL RETRIBUSI DAERAH	13.092.748.510,00	19.236.950.000,00	25.780.965.000,00	16,500,000,000.00	18.972.081.187,21	
1.1.3	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	36.390.219.835, 19	175.000.000.000,00	230.100.000.000,00	50,100,000,000.00	105.904.268.727,90	
1.1.4	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	261.457.834.780,00	307.137.097.036,00	354.061.212.139,00	279.323.660.424,53	287.052.613.889,24	
1.1.16	Pendapatan BLUD		11 - 1/ - 1 A 1 1 1 1 1 - 1	-		-	
1.1.18	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	176.443.200.717.60	1/1/1/19/19/2			- 11493 t	
1.2.	PENDAPATAN TRANSFER	3.319.202.639.678,00	2.787.802.645.000,00	3.087.538.737.000,00	2.363.294.346.000,00	2.373.294.346.000	
1.2.1	DANA PERIMBANGAN	3.319.202.639.678,00	2.787.802.645.000,00	3.087.538.737.000,00	3.087.538.737.000,00	2.373.294.346.000	
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	572.451.108.014,00	427.626.860.000,00	699.700.000.000,00	724.700.000.000,00	734.700.000.000	
1.2.1.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.488.995.344.513,00	1.547.264.182.000,00	1.638.594.346.000,00	1,638,594,346,000.00	1.638.594.346.000	
1.2.1.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	1.196.798.117.151,00	812.911.603.000,00	749.244.391.000,00	-	75.0	
1.2.1.4	Dana Insentif Daerah (DID)	60.958.070.000,00		M. A.	-		

NO	URAIAN	REALISASI PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2022	REALISASI PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2023	TARGET TAHUN ANGGARAN 2024	PROYEKSI PENDAPATAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2025	PROYEKSI PENDAPATAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2026
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	40.735.540.037,00	3.974.291.500,00	2.577.756.500,00	2.577.756.500,00	2.577.756.500
1.3.1 1.3.3	Pendapatan Hibah Pendapatan Lainnya	40.735.540.037,00	3.974.291.500,00	2.577.756.500,00	2.577.756.500,00	2.577.756.500

Sumber: Badan Pendapatan Daerah, 2024 (diolah).

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa Target PAD Tahun 2024 sebesar Rp.2.059.942.177.139,00,mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp.2,017,463,660,424.53,- pada tahun 2025, walaupun disisi lain dari beberapa komponen terjadi penurunan target salah satunya adalah penurunan target retribusi daerah disebabkan karena 1). Terdapat beberapa obyek retribusi yg kewenangannya ditarik ke pusat yaitu retribusi perizinan tertentu di Dinas Kelautan & Perikanan dan di Dinas Perhubungan; 2). Perubahan tarif semua jenis retribusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) yang telah diatur dalam lampiran Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 7 Tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dan 3). Juga termasuk penghapusan jenis retribusi jasa usaha pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah yaitu pada UPT Pengembangan Produk Industri Pangan dan Kerajinan (P2IPK) tidak dibenarkan lagi untuk dilakukan pemungutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1/2022 ttg HKPD.

Pendapatan Transfer diproyeksikan menurun dari Rp. 3.087.538.737.000,00,-pada target Tahun 2024 menjadi sebesar Rp. 2,363,294,346,000.00,-pada Tahun 2025, sedangkan untuk Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Tahun 2025 sebesar Rp. 2,577,756,500.00,- diproyeksikan sama dengan tahun 2024

Dalam rangka upaya peningkatan pendapatan daerah, diharapkan pada tahun 2025 masyarakat dapat melaksanakan kewajiban untuk membayar pajak kendaraan bermotor, selain itu analisis atau strategi dalam menggali pendapatan daerah masih diperlukan, mengingat masih banyak potensi yang harus digali dan dioptimalkan.

Untuk meningkatkan pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025, dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :

- 1. Memantapkan kelembagaan melalui peningkatan peran dan fungsi Unit Pelayanan Teknis (UPT) Daerah sebagai badab penghasil;
- Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan penyesuaian tarif pajak dan retribusi daerah;
- Meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi daerah;
- 4. Meningkatkan dan mengoptimlkan pengelolaan aset daerah secara profesional;
- 5. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan pendapatan;



- 6. Meningkatkan peran, SDM dan kinerja organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak;
- 7. Menggali potensi sumber-sumber pendapatan baru lainnya.

Beberapa inovasi dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang telah dilaksanakan antara lain Giat Samsat Keliling (Samkel), Surat Pemberitahuan Pajak Kendaraan Bermotor (Super PKB), Aksi Tempel-Tempel (ATT) dan Pengakan Hukum (Gakum). Terdapat beberapa inovasi yang akan dilaksanakan untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- 1. Pendataan dan penelusuran tunggakan PKB secara real time di Provinsi Sulawesi Tengah dengan melibatkan pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal ini Bapenda Kab/Kota. Hal ini dilakukan dengan adanya pemberlakuan opsen PKB dan opsen BBNKB sebagai pengganti mekanisme bagi hasil di tahun 2025, sehingga pemerintah kabupaten perlu dilibatkan dalam penelusuran tunggakan PKB. Terkait hal ini telah ditandatangani kerjasama tentang potensi daerah antara Gubernur dan Bupati/Walikota se-Sulawesi Tengah dan akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama (PKS) tentang optimalisasi opsen PKB dan opsen BBNKB antara Bapenda Provinsi dan Bapenda kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah;
- Optimalisasi pendataan kendaraan luar daerah untuk dimutasi menjadi kendaraan bernomor polisi Sulawesi tengah yang bekerja sama dengan mitra kepolisian termasuk Dinas Perhubungan;
- 3. Optimalisasi pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) dengan pemberlakuan sengle tarif sebesar 7,5% untuk BBM Non Subsidi dan 5% untuk BBM subsidi sebagaimana yang telah diatur dalam Perda Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dari yang sebelumnya multi tarif. Untuk Pajak kendaraan bermotor Bapenda Sulawesi Tengah akan melakukan PKS dengan BPH Migas terkait pengendalian, pembinaan dan pengawasan dalam penyaluran JBT (Jenis bahan bakar minyak tertentu) dan JBKP (Jenis bahan Bakar Minyak khusus penugasan) pada Konsumen Pengguna. Sebelumnya Pemerintah Daerah Sulawesi Tenaga (Bapenda) telah melakukan kerja sama dgn BPH Migas terkait Pertukaran data penyaluran Bahan Bakar minyak badan usaha yg berniaga dan data konsumen pengguna jenis bahan bakar minyak di Sulteng.



3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Rencana penggunaan kapasitas keuangan daerah merupakan suatu rangkaian proses perencanaan pengelolaan keuangan yang dimulai dari penganggaran yang ditandai dengan penyusunan RKPD, yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta efisiensi dan efektifitas belanja kebutuhan pendanaan program prioritas pembangunan daerah.

Secara keseluruhan total jumlah belanja tahun anggaran 2025 diproyeksikan mengalami penurunan sebesar Rp.887.757.563.263,47,- yaitu dari target semula tahun 2024 sebesar Rp. 5.771.093.326.188,00,- menjadi Rp. 4,883,335,762,924.53,-Distribusi target Belanja Daerah Tahun 2025, disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.6 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2023-2025

					Proyeksi Tahun	Proyeksi Tahun
NO	URAIAN	Realisasi Tahun Anggaran 2022	Realisasi Tahun Anggaran 2023	Target Tahun Anggaran 2024	Anggaran 2025	Anggaran 2026
	BELANJA	5.432.996.328.213,00	5.182.880.480.754,00	5.771.093.326.188,00	4.883.335.762.924,53	4.649.330.653.199,69
a.	BELANJA OPERASI	4.046.809.413.010,00	3.666.261.563.172,00	4.026.575.510.640,00	4.047.235.762.924.53	4.649.330.653.199,69
	Belanja Pegawai	1.595.332.147.004,00	1.930.816.996.938,00	2.076.590.534.363,00	2,076,590,534,363.00	2.270.027.317.458
	Belanja Barang dan Jasa	1.769.197.651.376,00	1.366.704.540.073,00	1.660.632.723.644,00	1.970.645.228.561,53	2.379.303.335.742,18
	Belanja Bunga		-	- I	-	
	Belanja Subsidi	1//	-	-	-	
	Belanja Hibah	638.434.091.005,00	274.393.172.326,00	272.349.803.003,00	-	
	Belanja Sosial	43.845.523.625,00	94.346.853.835,00	17.002.449.630,00		
b.	BELANJA MODAL	746.159.330.088,00	835.439.351.035,00	1.007.276.988.358,00	-	
	Belanja Tanah	337.500.000,00	//	-		
	Belanja Peralatan dan Mesin	245.853.489.567,00	230.514.597.699,00	-	-	
	Belanja Gedung dan Bangunan	235.211.270.245,00	352.363.915.175,00	-	-	
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	255.985.531.234,00	251.025.420.602,00	-	-	
	Belanja Aset Tetap Lainnya	8.771.539.042,00	1.455.417.559,00		-	
	Belanja Aset Lainnya		80.000.000,00	- A	-	
C.	BELANJA TAK TERDUGA	11.038.882.178,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10,000,000,000.00	
	Belanja Tak Terduga	11.038.882.178,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10,000,000,000.00	

NO	URAIAN	Realisasi Tahun Anggaran 2022	Realisasi Tahun Anggaran 2023	Target Tahun Anggaran 2024	Proyeksi Tahun Anggaran 2025	Proyeksi Tahun Anggaran 2026
d	BELANJA TRANSFER	628.988.702.937,00	671.179.566.547,00	727.240.827.190,00	826,100,000,000.00	
	TRANSFER ATAU BAGI HASIL PENDAPATAN KE KABUPATEN/KOTA			4/).	1/	
	Bagi Hasil Pajak Ke Kabupaten/Kota	600.326.909.596,00	628.379.565.547,00	708.140.827.190,00	806,500,000,000.00	
	Belanja Bantuan Keuangan Ke Kabupaten/Kota	28.661.793.341,00	42.800.001.000,00	19.100.000.000,00	19,600,000,000.00	
	Surplus/Defisit		-689.318.497.218,00	-		

Sumber: BPKAD, 2024 (diolah)

Dari tabel diatas, Belanja Operasi pada tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp. 4.047.235.762.924.53.naik sebesar 0,51 persen atau sebesar 20.660.252.284,53,-Rp. dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp. 4.026.575.510.640,00.-, sedangkan untuk Belanja Tak Terduga diproyeksikan sama dengan Tahun sebelumnya yakni sebesar Rp. 10.000.000.000,00.-, Belanja Transfer diproyeksikan sebesar Rp. 826,500,000,000.00.-. naik sebesar Rp. 98.859.172.810,00 atau sebesar 13.59 persen dari Tahun 2024 yang sebesar Rp. 725.240.827.193,00.-,.

Kebijakan belanja daerah dilakukan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif. Adapun kebijakan belanja daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- Prioritas pengalokasian belanja daerah untuk membiayai belanja wajib dan mengikat, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Jasa Kantor Listrik, Air, Telepon/Internet, dan Belanja Peralatan kantor.
- 2. Dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan tujuan dan sasaran daerah serta penerapan pelayanan dasar, antara lain :
 - a. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025
 - b. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) kewenangan provinsi
- 3. Pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs);
- 4. Sinkronisasi prioritas pembangunan dalam RPJMN dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025;
- 5. Belanja wajib fungsi pendidikan, fungsi kesehatan dan belanja infrastruktur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Belanja infrastruktur pelayanan publik merupakan belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pelayanan publik dan kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan publik antar daerah.
- 6. Pengalokasian belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya untuk mendanai program-program perangkat daear yang menjadi kewenangan provinsi, serta merupakan program pendukung penyelenggaraan perkantoran;
- 7. Pendanaan untuk Bantuan Keuangan dan Hibah yang menstimulus munculnya karya-karya inovatif yang memberikan efek akseleratif pencapaian target=target



pembangunan strategis pembangunan daerah yang makin dirasakan oleh masyarakat;

8. Penyediaan alokasi Gaji dan Tunjangan Tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian KERJA (P3K) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2029 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Kebijakan pembiayaan harus terkait dengan penyelesaian permasalahan-permasalahan pembangunan daerah maupun pemanfaatan potensi-potensi daerah.

Penerimaan pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya dan dianggarkan secara bruto dalam APBD sedangkan Pengeluaran pembiayaan daerah adalah semua pengeluaran yang perlu diterimakan kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya dan dianggarkan secara bruto dalam APBD. Pembiayaan daerah merupakan salah satu jalan yang dapat ditempuh oleh pemerintah daerah untuk menutupi defisit anggaran belanja daerah.

Dalam hal pelaksanaan APBD defisit, penerimaan pembiayaan dapat bersumber dari sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. Uraian perubahan target pembiayaan daerah tahun 2025, disajikan pada tabel 3.7 berikut ini:

Tabel 3.7
Proyeksi/Target Penerimaan dan Pengeluaran
Pembiayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

No	URAIAN	REALISASI TAHUN ANGGARAN 2022	REALISASI TAHUN ANGGARAN 2023	PROYEKSI TAHUN ANGGARAN 2024	PROYEKSI TAHUN ANGGARAN 2025	PROYEKSI TAHUN ANGGARAN 2026
3	PEMBIAYAAN	733.738.178.050,00	689.318.497.218,00	551.034.655.548,59	500,000,000,000.00	92.354.263.856,15
3.1	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	698.738.178.050,00	689.318.497.218,00	551.034.655.548,59	500,000,000,000.00	92.354.263.856,15
3.1.1	Penggunaan SILPA	698.738.178.050,00	689.318.497.218,00	551.034.655.548,59	500,000,000,000.00	92.354.263.856,15
3.2	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	35.000.000.000,00	-	-	-	
3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4	Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Pembayaran Pokok Utang Pemberian Pinjaman Daerah	35.000.000.000,00				

Sumber: BPKAD, 2024 (diolah)



Jumlah pembiayaan netto pada Tahun 2025 diproyeksikan mengalami penurunan dari Rp. 621.034.655.549,00,- pada tahun 2024 menjadi Rp.500,000,000,000.00,- turun sebesar Rp.121.034.655.549,00,- atau sebesar 19,49 persen. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya nilai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA).



BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Visi Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 yaitu "Gerak Cepat Menuju Sulteng Lebih Sejahtera dan Lebih Maju", dengan serangkaian misi:

- Meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar.
- 2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai kemanusiaan dan HAM.
- 3. Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan.
- 4. Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah.
- 5. Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan.
- 6. Menjaga harmonisasi manusia dan alam, antar sesama manusia sebagai wujud pembangunan berkelanjutan
- 7. Melakukan Sinergitas Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Bertetangga Sekawasan maupun di dalam Provinsi Sulteng dan di luar Provinsi bertetangga
- 8. Meningkatkan Pelayanan Publik bidang pendidikan dan kesehatan berbasis pada Teknologi Informasi yang integrasi dan dijalankan secara sistimatis dan digital
- Mendorong pembentukan daerah otonom baru (DOB) agar terjadi percepatan desentralisasi pelayanan dan peningkatan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 sendiri mengusung Tema pembangunan nasional yaitu "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Sedangkan tema RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025, adalah "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan yang Ditunjang oleh SDM yang Berdaya Saing" atau "Percepatan Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan Berbasis Komoditas Unggulan Yang Didukung Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing".

Sebagai pedoman implementasi RKPD Tahun 2025, maka tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2025 yang akan diwujudkan sebagai berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

Visi : Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju **Indikator Tujuan** Tujuan Target 2025 No. Misi Sasaran Satuan dan Sasaran 7 2 3 5 6 1 4 Meningkatkan Kualitas Mewujudkan **Manusia Provinsi** peningkatan kualitas Sulawesi Tengah melalui manusia Provinsi **Reformasi Sistem** Indeks Sulawesi Tengah Pendidikan dan melalui Reformasi Pembangunan Indeks 72,26 **Kesehatan Dasar**; Manusia (IPM) Sistem Pendidikan berbasis vokasi dan pelayan Kesehatan Dasar yang merata Indeks Modal Indeks 0,51 Manusia Meningkatnya akses serta 0,686444 - 0,699222 Indeks Pendidikan Indeks kuantitas dan kualitas Pendidikan Meningkatnya akses serta kuantitas dan kualitas Kesehatan Indeks Kesehatan 0.794462 Indeks masyarakat Indeks Pengeluaran Meingkatnya konsumsi perkapita Indeks perkapita Pengeluaran Rp. (Ribu) Meingkatnya konsumsi perkapita 1,254 Perkapita Indeks Meningkatnya pelestarian nilaipembangunan Indeks 61,71 nilai budaya lokal kebudayaan (IPK)

	Visi : Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju					
No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target 2025
1	2	3	4	5	6	7
			Meningkatnya peran pemuda dan daya saing keolahragaan	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	66,69
2	Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai Kemanusiaan dan HAM;	Mewujudkan tata Kelola kepemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government)		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	70.00
				Nilai SAKIP	Angka	83,00
				Kategori indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Kategori	baik
			Terwujudnya tata kelola pemerintahan berkualitas	Status Kinerja LPPD	Status	Tinggi
			(akuntabel, inovatif, efisien, dan transparan)	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	Inovatif
				Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,15 "Baik"
				Indeks profesionalitas ASN	Indeks (Interval)	81-90
			Terwujudnya Penegakan Supremasi Hukum dan HAM	Indeks Kualitas Kebijakan	Indeks (Interval)	65

	Visi : Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju						
No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target 2025	
1	2	3	4	5	6	7	
3	Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui produktivitas sektor unggulan daerah		Pertumbuhan Ekonomi	%	11,72 – 13,28	
	Penguatan Kelembagaan;		Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan daerah	Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan daerah	%	19,38	
			Meningkatnya PDRB Sektor Industri Pengolahan	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	%	40,97-41,45	
			Meningkatnya nilai realisasi investasi	Nilai realisasi investasi	Rp (trilun)	39,75	
			Meningkatnya pendapatan dan daya saing daerah	PAD terhadap total pendapatan	%	40,54	
				Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	Indeks	3,43	
		Menurunkan kemiskinan		Persentase penduduk miskin	%	11,06 – 11,56	
			Menurunnya penduduk miskin perkotaan dan perdesaan	Persentase penduduk miskin perkotaan	%	4,46	
				Persentase penduduk miskin perdesaan	%	9,21	

	Visi : Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju					
No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target 2025
1	2	3	4	5	6	7
			Meningkatnya Penataan Administrasi Pemerintahan, Kerjasama Desa dan Pemberdayaan Lembaga Adat Desa;	Indeks Desa Membangun (IDM)	Indeks	0.6986
			Meningkatnya kemandirian PMKS	Presentase PMKS yang mandiri	%	0,25
			Menurunnya daerah rawan pangan	Presentase penanganan daerah rawan pangan	%	41,789
		Menurunkan pengangguran		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2,25-2,94
			Meningkatkan angka partisipasi kerja	Rasio Penduduk Bekerja	%	97,92
4	Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Daerah;		Indeks Infrastruktur Daerah (IID)	Indeks	0,64

	Visi : Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju					
No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target 2025
1	2	3	4	5	6	7
			Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan berkeadilan	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	Indeks	76, 2
				Indeks infrastruktur perumahan dan permukiman	Indeks	52,41
				Persentase Desa Teraliri Listrik	%	100
			Meningkatnya konektivitas jaringan transportasi darat dan laut	Rasio konektivitas provinsi	Rasio	0,7
5	Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan;	Mewujudkan pembangunan masyarakat dan wilayah secara merata dan berkeadilan		Indeks Williamson	Indeks	0,54
				Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	92,54
			Menurunnya tingkat ketimpangan pendapatan	Indeks Gini	Indeks	0,298-0,302

	Visi : Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju							
No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target 2025		
1	2	3	4	5	6	7		
				Inflasi	%	2,35 – 3,8		
			Meningkatnya pemberdayaan perempuan	Indeks Pemberdayaaan Gender (IDG)	Indeks	80		
			unan berwawasan lingkungan ta Tangguh terhadap bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	80,18		
				Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	%	77,96		
			Terwujudnya keseimbangan pembangunan antar manusia dan lingkungan secara berkelanjutan	Indeks kualitas air (IKA)	Indeks	65,59		
	Menjaga Harmonisasi Manusia dan Alam, antar			Indeks kualitas udara (IKU)	Indeks	90.69		
6	sesama manusia sebagai wujud Pembangunan Berkelanjutan;			Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL)	Indeks	87.85		
				Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	Indeks	72,40		
				Emisi gas rumah kaca	Juta ton CO2eq	205.987,71		
			Meningkatnya kapasitas ketangguhan terhadap bencana	Indeks Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana	Indeks	0,77		

	Visi : Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju					
No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target 2025
1	2	3	4	5	6	7
7	Melakukan Sinergitas Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Bertetangga Sekawasan maupun di dalam Provinsi Sulteng dan di luar provinsi bertetangga;	Mewujudkan kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dan pihak lainnya dalam pembangunan secara bersinergi dan terintegrasi		Tingkat efektivitas kerja sama daerah	%	100
			Meningkatnya kerja sama antar daerah	MoU (Perjanjian kerja sama)	Angka (MoU)	18
8	Meningkatkan Pelayanan Publik bidang Pendidikan dan Kesehatan Berbasis pada Teknologi Informasi yang terintegrasi dan dijalankan secara	Meningkatkan kualitas pelayanan publik bidang pendidikan, kesehatan, dan perpustakaan		Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3,54-3,60
	sistematis dan digital;		Terwujudnya pelayanan publik yang prima	Indeks kepatuhan terhadap standar pelayanan publik	Indeks	99,90
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	98,25

	Visi : Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju						
No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target 2025	
1	2	3	4	5	6	7	
9	Mendorong Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) agar terjadi Percepatan Desentralisasi Pelayanan	Mewujudkan persiapan pembentukan Daerah Otonomi Baru		Persentase kajian akademik persiapan DOB yang disampaikan ke Kemendagri RI	%	100	
	dan Peningkatan Lapangan Kerja dan Peningkatan Produktivitas Sektor Unggulan Daerah.		Tersedianya kajian akademik persiapan DOB	Jumlah kajian akademik persiapan DOB	Dokumen	2	

Sumber: Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, diolah Kembali 2024



4.2 Prioritas Pembangunan Daerah

4.2.1 Prioritas Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2025

Tema pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2025 adalah "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" Selanjutnya prioritas nasional tahun 2025 yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2025 meliputi:

Priritas nasional

- 1.Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)
- 2.Memantapkan system pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
- 3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
- 4. Memperkuat Pembangunan Sumber daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, Kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran Perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
- 5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industry berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
- 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan
- 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan
- 8. Memperkuat penyelarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai Masyarakat yang adil dan makmkur.

Adapun Prioritas Nasional memilliki sasaran Pembangunan dengan indicator sasaran sebagai berikut :

PN 1 Memiliki sasaran Pembangunan

Indeks Demokrasi Indonesia



PN 2 Memiliki sasaran Pembangunan:

- 1. Asia Power Index (Military Capability)
- 2. Asia Power Index (Diplomatic Influence)
- Proporsi Penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%)
- 4. Prevelensi ketidakcukupan konsumsi pangan (PoU) (%)
- 5. Indeks ketahan energi
- 6. Kapasitas tampungan air (m3/kapita)
- 7. Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)
- 8. Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)
- 9. Indeks daya saing digital di Tingkat global
- 10. Indeks ekonomi hijau
- 11. Porsi EBT dalam bauran energi primer (%)
- 12. Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)
- 13. Indeks pengelolaan keanekaragaman hayati
- 14. Indeks kualitas lingkungan hidup
- 15. Presentase penurunan emisi GRK
 - Tahunan (%)
 - Kumulatif (%)

PN 3 Memiliki sasaran Pembangunan:

- 1. Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (%)
- 2. Rasio kewirausahaan (%)
- 3. Rasio volume usaha koperasi terhadap PDB (%)
- 4. Rasio PDB pariwisata (%)
- 5. Devisa pariwisata (miliar USD)
- 6. Proporsi PDB ekonomi kreatif (%)
- 7. Aset perbankan/PDB (%)
- 8. Aset dana pension/PDB (%)
- 9. Aset asuransi/PDB (%)
- 10. Kapitalis pasar modal/PDB (%)
- 11. Total kredit/PDB (%)
- 12. Inklusi keuangan (%)



PN 4 Memiliki sasaran Pembangunan

- 1. Hasil Pembelajaran:
 - a. Rata rata nilai PISA
 - i. Membaca
 - ii. Matematika
 - iii. Sains
 - b. Rata rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (tahun)
 - c. Harapan lama sekolah (tahun)
- 2. Angka partisipasi kasar (APK) Pendidikan tinggi (%)
- 3. Presentase pekerja lulusan Pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)
- 4. Tingkat penguasaan iptek:
 - a. Pengeluaraan iptek dan inovasi (% PDB)
 - b. Peringkat indeks inovasi global
- 5. Tingkat pengangguran terbuka (%)
- 6. Tingkat partisipasi Angkatan kerja Perempuan (%)
- 7. Usia harapan hidup (tahun)
- 8. Kesehatan ibu dan anak
 - a. Angka kematian ibu (per 100.000 kelahiran hidup)
 - b. Prevelensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)
- 9. Insidensi tuberculosis (per 100.000 penduduk)
- 10. Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional (%)
- 11. Indeks Pembangunan kualitas keluarga (IPKK)
- 12. Indeks ketimpangan gender (IKG)

PN 5 Memiliki sasaran Pembangunan:

- 1. Rasio PDB industri pengolahan (%)
- 2. Pembentukan modal tetap bruto (% PDB)
- 3. Ekspor barang dan jasa (% PDB)
- 4. Biaya logistic (% PDB)

PN 6 Memiliki sasaran Pembangunan:

- Terbangunnya sistem perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh penduduk
 (%)
- 2. Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (%)
- 3. Persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal (%)



- 4. Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional (%)
- 5. Persentase desa mandiri (%)
- 6. Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan (%)

PN 7 Memiliki sasaran Pembangunan :

- 1. Return On Asset (ROA) BUMN (%)
- 2. Indeks integritas nasional
- 3. Indeks Materi hukum
- 4. Indeks pelayanan public
- 5. Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik
- 6. Indeks persepsi korupsi
- 7. Indeks pembanguna hukum
- 8. Rasio perpajakan terhadap PDB (%)
- 9. Tingkat inflansi (%)

PN 8 Memiliki sasaran Pembangunan:

- 1. Indeks Pembangunan kebudayaan (IPK)
- 2. Indeks kerukunan umat beragama (IKUB)
- 3. Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relative terhadap PDB (%)

4.2.2 Prioritas Pembangunan Daerah 2025

Prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus sangat mempengaruhi pencapaian sasaran pembangunan daerah dan mempunyai daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Dengan demikian, tema pembangunan adalah "Percepatan Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan Berbasis Komoditas Unggulan Yang Didukung Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing" atau "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan Yang Ditunjang Oleh SDM Yang Berdaya Saing" dengan prioritas pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Meningkatkan ketertiban hukum dan demokrasi yang substansial;

Pembangunan Demokrasi diarahkan pada terwujudnya demokrasi substansial yang mengemban amanat rakyat. Demokrasi substansial akan dilaksanakan melalui arah kebijakan berikut:

- a. Peningkatan kualitas kesetaraan dan kebebasan dalam masyarakat;
- b. Pengarusutamaan pengamalan nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;



- c. Penguatan dan pencegahan pemanfaatan politik identifas;
- d. penyederhanaan regulasi dan peningkatan kualitas regulasi melalui penguatan mekanisme pemantauan dan evaluasi regulasi, serta penguatan kajian urgensi regulasi dengan menggunakan metode analisis dalam pembentukan regulasi, dan peningkatan kualitas kelembagaan regulasi dan tata kelola pembentukan regulasi berbasis teknologi informasi melalui pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi, penataan proses bisnis regulasi dan pemanfaatan teknologi informasi secara terpadu dalam setiap proses pembentukan regulasi mulai dari perencanaan hingga evaluasi pelaksanaan regulasi, serta pembentukan basis data tunggal sebagai referensi utama statistik regulasi;
- e. Penguatan komunikasi publik yang merata, adil, berdaulat, dan akuntabel untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat; dan
- f. Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, di antaranya melalui perluasan dan perlindungan ruang sipil untuk memperkuat keberlanjutan peran masyarakat sipil dalam advokasi, pemberdayaan, dan kontrol sosial.

2. Mendorong Peningkatan Produktivitas Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan dan Komoditi Pertanian lainnya;

Penerapan transformasi ekonomi ditujukan agar pertumbuhan ekonomi yang tinggi sejalan dengan meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan agar berkelanjutan. Penerapan ekonomi hijau juga dapat menjadi sumber pertumbuhan baru melalui peningkatan peluang kerja, investasi hijau dan pengembangan produk-produk hijau. Arah kebijakan penerapan ekonomi hijau berlandaskan pada pelaksanaan Pembangunan Rendah Karbon yang meliputi:

- a. Peningkatan efisiensi energi dan percepatan transisi energi menuju pemanfaatan energi baru terbarukan;
- b. Transisi energi secara berkeadilan dengan menyiapkan keahlian dan kesempatan kerja baru, termasuk pengembangan ekosistem dan insentif, khususnya untuk daerah penghasil energi fosil;
- c. Pengembangan smart grid termasuk jaringan interkoneksi dalam dan antar pulau serta sistem terisolasi (*isolated grid*);
- d. Pengembangan eknologi sistem penyimpanan energi (battery/energy storage system);



- e. Pengembangan transportasi ramah lingkungan;
- f. Penerapan ekonomi sirkular;
- g. Pengelolaan hutan lestari dan lahan pertanian serta produk-produk turunannya secara berkelanjutan;
- h. Perkuatan implementasi sistem insentif dan disinsentif fiskal ataupun non fiskal untuk mendorong produk-produk hijau, melalui pengembangan green financing dan penerapan carbon pnctng untuk mendukung investasi hijau, serta
- i. Penerapan prinsip ekonomi hijau di setiap sektor.

3. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Daerah

Dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah untuk mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah, antar kelompok pendapatan, serta kelompok rentan melalui kebijakan:

- a. Mendukung pengembangan transportasi perkotaan termasuk sistem angkutan umum massal perkotaan yang andal serta modern dalam melayani mobilitas penumpang;
- b. Sulawesi Tengah bebagai Penopang IKN;
- c. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah PASIGALA (Kota Palu, Kabupaten Donggala dan Kabupaten Sigi): (i) Pengembangan kawasan pemukiman penyangga disebagian Kabupaten Sigi dan sebagian Kabupaten Donggala, (ii) Peningkatan sistem jaringan pergerakan regional, (iii) Pengembangan sarana dan parasarana pemukiman regional di Kabupaten Donggala, (iv) Pengembangan jaringan sumberdaya air sebagai pengurangan resiko bencana likuifaksi;
- d. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Klaster Agropolitan Bolipamuso dan KPN: (i) Hulu pengembangan pertanian berada di Kabupaten Buol, Kabupaten Tolitoli, sebagian Kabupaten Sigi, sebagian Kabupaten Parigi Moutong, dan sebagian Kabupaten Donggala; (ii) Hilir produksi pertanian berupa pengolahan hasil pertanian, perkebunan dan perikanan serta pemasaran berada di pusat kegiatan yaitu Parigi Moutong sebagai agroindustri; dan Poso sebagai sentra agribisnis dan sentra agrowisata;
- e. Peningkatan aksesibilitas jalur Agropolitan Bolipamuso dan Agropolitan Kawasan Pangan Nusantara;



- f. Pengembangan infrastruktur pendukung agropolitan, agroindustri, agribisnis dan agrowisata;.
- g. Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah;
- h. Kemudahan perizinan dalam proses penyediaan dalam proses penyediaan perumahan;
- i. Pembangunan infrastruktur tanggap bencana berbasis lingkungan;
- j. Pengembangan dan pengelolaan irigasi untuk menunjang sawah beririgasi produktif eksisting.

4. Peningkatan produktifitas UMKM dan koperasi

Peningkatan produktifitas UMKM dan Koperasi sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi yang berdaya, sehingga arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah :

- a. Peningkatan daya saing sektor tradisional untuk pertumbuhan berkelanjutan (sektor pertanian, perkebunan, perikanan budidaya, perikanan tangkap, dan pariwisata).
- b. Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.perkebunan, perikanan, pertanian, dan pariwisata
- c. Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.
- d. Peningkatan pengembangan IPTEKIN menuju komersialisasi oleh industry;
- e. Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan inovasi untuk pengembangan komoditas unggulan.

5. Peningkatan SDM yang berdaya Saing

Peningkatan kualitas manusia menjadi hal yang penting agar masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah mampu bersaing secara Nasional. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 baru mencapai 71,66, sedangkan target pada tahun 2025 yaitu 72,12 - 75,50 sehingga memerlukan upaya peningkatan diantaranya pada aspek kualitas pendidikan dan kualitas kesehatan. Kualitas pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah ditunjukkan oleh Angka Rata- Rata



Lama Sekolah pada tahun 2023 yaitu 8,96 tahun, sedangkan Angka Harapan Lama Sekolah yaitu 13,33 tahun. Permasalahan utama pendidikan ditandai dengan belum optimalnya upaya peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan menengah dan khusus, serta pendidikan informal dan inklusi.

Menguatkan peran Perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas, mencakup (a) penguatan kapasitas dan keterampilan kelyarga dalam melaksanakan fungsinya, termasuk pengasuhan dan perawatan, (b) penyediaan fasilitas pendukung keluarga, (c) penguatan hak sipil, hukum dan ekonomi keluarga, serta afirmasi bagi keluarga rentan, (d) pemenuhan hak anak secara universal, (e) perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan, termasuk perkawinan anak, (f) peningkatan partisipasi anak secara bermakna dan pewujudan lingkungan yang ramah anak; (g) penguatan resiliensi anak dan karakter pemuda untuk mencegah timbulnya perilaku berisiko; (h) penguatan kapasitas, kemandirian, serta kepemimpinan pemuda dan perempuan; (i) peningkatan partisipasi aktif perempuan dan pemuda di ketenagakerjaan, politik, dan ekonomi; (j) penguatan penyelenggaraan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial di proses pembangunan; (k) penghormatan dan perlindungan terhadap penyandang disabilitas dan lansia; (I) mempercepat penerbitan peraturan pemerintah yang belum lengkap, petunjuk pelaksana, dan petunjuk teknis dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas; (m) mengintensifkan dan memperluas program peningkatan kesadaran publik untuk tidak memarjinalkan dan merendahkan serta memberikan kesempatan yang sama untuk dapat maju dan berkembang bagi kelompok penyandang disabilitas; (n) mendorong pembangunan infrastruktur yang ramah bagi warga penyandang disabilitas, terutama untuk fasilitas-fasilitas umum: (o) memperluas program pendidikan formal maupun nonformal yang bersifat inklusif, aplikatif, dan humanis agar segenap potensi diri setiap individu penyandang disabilitas dapat dikembangkan; (p) meningkatkan dan memperluas akses pelayanan pendidikan, pekerjaan, kesehatan, transportasi, mendapatkan informasi, berkomunikasi, dan berpartisipasi politik penyandang disabilitas dalam setiap aspek kehidupan dalam masyarakat; (q) mendorong perusahaan-perusahaan swasta dan Badan Usaha Milik Negara untuk memberikan kuota lowongan pekerjaan bagi penyandang disabilitas; (r) membangun sarana, prasarana, dan infrastruktur yang ramah bagi penyandang disabilitas; serta (s) memperluas program-program perlindungan kelompok difabel dari berbagai macam



bentuk stereotype, pelecehan, kekerasan, dan perlakuan yang tidak semestinya di masyarakat.

6. Pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi

Pengembangan wilayah sebagai pusat pertembuhan ekonomi diperlukan investasi yang tinggi dan berkualitas dimulai dari Kawasan perkotaan dan perdesaan. Peningkatan produktivitas perekonomian yang terintegrasi dan mendukung partisipasi dalam rantai pasok. Kebijakan tersebut ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan berkelanjutan, yang diarahkan pada:

- a. Peningkatan peran perdesaan dalam upaya peningkatan diversifikasi ekonomi yang inklusif;
- b. Pengembangan kawasan perdesaan dan perkotaan yang terintegrasi dan berkelanjutan berbasis karakter wilayah dengan meperhatikan daya dukung dan daya tampung;
- c. investasi berorientasi ekspor yang dapat mengembangkan keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif serta meningkatkan partisipasi dalam rantai produksi.

7. Meningkatkan Tata kelola pemerintahan

Permasalahan utama reformasi birokrasi adalah masih perlunya upaya peningkatan penataan dan penguatan organisasi, deregulasi peraturan perundang-undangan daerah dan kebijakan lainnya serta penegakan hukum, penerapan tata kelola pemerintahan berbasis digital serta budaya birokrasi dengan ASN yang profesional, penataan sistem manajemen SDM aparatur, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Arah kebijakan difokuskan pada:

a. Penyederhanaan regulasi dan peningkatan kualitas regulasi melalui penguatan mekanisme pemantauan dan evaluasi regulasi, serta penguatan kajian urgensi regulasi dengan menggunakan metode analisis dalam pembentukan regulasi, dan peningkatan kualitas kelembagaan regulasi dan tata kelola pembentukan regulasi berbasis teknologi informasi melalui pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi, penataan proses bisnis regulasi dan pemanfaatan teknologi informasi secara terpadu dalam setiap proses pembentukan regulasi mulai dari



perencanaan hingga evaluasi pelaksanaan regulasi, serta pembentukan basis data tunggal sebagai referensi utama statistik regulasi.;

- b. Pemetaan proses bisnis tematik berdasarkan isu prioritas dan pengembangan sistem manajemen kinerja pembangunan yang berdasarkan shared outcomes. Dalam mewujudkan manajemen talenta, arah kebijakan difokuskan pada penguatan manajemen talenta ASN di seluruh perangkat daerah melalui pembangunan talent pool dengan pembangunan sistem informasi manajemen talenta dan satu data manajemen talenta, penuntasan asesmen kompetensi, penguatan manajemen kinerja dan pengembangan kompetensi ASN, serta perbaikan kebijakan penghargaan bagi ASN
- c. Mewujudkan manajemen ASN untuk mendukung sektor/bidang strategis difokuskan pada penataan manajemen ASN sektor pelayanan dasar melalui restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru serta tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk mewujudkan pemerataan kualitas pelayanan;
- d. Mewujudkan layanan publik yang berkualitas dan inklusif difokuskan pada peningkatan aksesibilitas dan inklusivitas pelayanan publik terpadu (fisik dan non fisik) melalui pengembangan portal dan/atau platform pelayanan publik Sulawesi Tengah;
- e. Mewujudkan transformasi digital pemerintahan, arah kebijakan difokuskan pada transformasi layanan pemerintahan berbasis digital melalui akselerasi pemanfaatan aplikasi umum berbagi pakai, percepatan pembangunan pusat data nasional, percepatan penerapan satu data Indonesiadan percepatan kesiapan digital (digital readiness) melalui penguatan talenta digital ASN, peningkatan literasi digital masyarakat, percepatan pembentukan regulasi yang adaptif, dan pembentukan lembaga publik pelaksana percepatan transformasi digital pemerintahan.

8. Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan

Pembangunan rendah karbon dilakukan untuk mencapai penurunan emisi GRK. Penerapan jalur pembangunan yang rendah karbon. Pencemaran dan kerusakan lingkungan masih menjadi tantangan untuk mencapai ekonomi hijau. Pencemaran air, udara dan tanah terus terjadi sebagai dampak aktivitas Pembangunan yang tidak berkelanjutan (brown economy). Tantangan lainnya adalah pemanfaatan

sumber daya alam yang cenderung merusak ekosistem seperti pertambangan eksploitatif serta meningkatnya penggunaaan lahan untuk pertanian dan Perkebunan yang menyebabkan degradasi hutan, deforestasi, dan berkurangnya keanekaragaman hayati.

- a. Penguatan manajemen bencana, mencakup mitigasi struktural dan non struktural, ke siapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan pasca bencana;
- b. Penguatan dan pemanfaatan teknologi untuk mitigasi dan resiko bencana;
- c. Pengurangan risiko abrasi di pesisir dan kepulauan;
- d. Peningkatan kapasitas SDM petani dalam menerapkan pertanian cerdas iklim;
- e. Pembatasan Pengembangan kawasan budidaya di kawasan rawan bencana tinggi dan sangat tinggi.

4.3 Sinkronisasi dan Keterkaitan Antara Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2025

Prioritas Pembangunan Nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 merupakan salah satu acuan dari Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, sehingga ada sinkronisasi dan keterkaitan anatara indikator sasaran pembangunan daerah dalam RKPD Tahun 2025 dengan sasaran Prioritas Nasional (PN) RKP 2025. Tingkat keselarasan prioritas pembangunan daerah dengan PN RKP Tahun 2025, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.2
Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah dalam RKPD Tahun
2025 dengan Prioritas Nasional RKP Tahun 2025

	2025 deligali i liolitas Nasioliai KKi	Tallali Zozo
No	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah
1	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Meningkatkan ketertiban hukum dan demokrasi yang substansial ;
2	Memantapkan system pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mendorong Peningkatan Produktivitas Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan dan Komoditi Pertanian lainnya;
3	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Daerah
4	Memperkuat Pembangunan Sumber daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, Kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran Perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan SDM yang berdaya Saing



No	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah
5	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi
6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	Peningkatan produktifitas UMKM dan koperasi
7	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Meningkatkan Tata kelola pemerintahan
8	Memperkuat penyelarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai Masyarakat yang adil dan makmur	Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan

Sumber: Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, diolah Kembali 2024

Tabel 4.3 Keterkaitan Isu Strategis pada RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

Isu Strategis RPJMD 2021-2026	Permasalahan Pembangunan RKPD 2025 berdasarkan Hasil Evaluasi RKPD 2023	Isu Strategis Pembangunan Sulawesi Tengah Tahun 2025
1. Kemiskinan	 Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan P3KE tidak Update dan Mutakhir, sehingga program - program kesejahteraan sosial tidak tepat sasaran; Data Regsosek belum di manfaatkan untuk program penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan sosial; Masih adanya Egoisme Sektoral atau mentalitas SILO pada Perangkat Daerah, utamanya untuk penanggulangan kemiskinan; Keterlibatan masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan masalah kemiskinan dan kerawanan sosial masih kurang; Program penanggulangan kemiskinan bersifat parsial dan belum menyentuh langsung substansi masalah; Cakupan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan masih rendah; Pemenuhan SPM Sosial Masih rendah. 	Kemiskinan
Akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan serta Daya saing SDM	 Kualitas dan keterjangkauan Layanan Kesehatan belum optimal, responsif dan merata; Pendidikan belum berkualitas dan merata; Perlindungan Sosial Belum Inklusif, adaptif dan berkeadilan 	Kualitas dan daya saing SDM
Degradasi lingkungan, Penataan Ruang dan mitigasi bencana	Koordinasi dan integrasi Pemda dan Masyarakat dalam penanggulangan bencana daerah belum optimal Upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan SDA dan Lingkungan Hidup serta dampak perubahan iklim belum terintegrasi dan terlaksana dengan baik	Ketahanan Bencana, Antisipasi Perubahan Iklim, dan Daya Dukung Lingkungan
Tata Kelola Pemerintahan dan pelayanan publik	 Kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi belum memadai; Indeks Inovasi Daerah Cukup Baik, namun perlu di Tingkatkan; 	Tata kelola Pemerintahan dan Kualitas pelayanan publik

Isu Strategis RPJMD 2021-2026	Permasalahan Pembangunan RKPD 2025 berdasarkan Hasil Evaluasi RKPD 2023	Isu Strategis Pembangunan Sulawesi Tengah Tahun 2025
Kapasitas pembiayaan pembangunan	 Kinerja dan kualitas perencanaan pembangunan daerah belum optimal Kualitas Pengelolaan Keuangan dan asset daerah berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi pemerintah daerah masih perlu ditingkatkan; Belum Maksimalnya Penggalian Potensi Pendapatan asli Daerah; Pengawasan dan akuntabilitas kinerja Pemda masih perlu ditingkatkan; Kualitas Produk Hukum Daerah Belum optimal; Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah belum tepat fungsi dan tepat ukuran dan Tata Laksana yang belum berbasis TIK; Kualitas pelaksanaan Otonomi Daerah belum sesuai yang di harapkan; Manajemen Sumber Daya Aparatur yang belum optimal Pembiayaan inovasi pembangunan daerah masih sangat terbatas. 	Kemandirian Fiskal Daerah
Pengelolaan Sumber pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan, Perikanan dan Pariwisata	 Produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura perlu lebih di tingkatkan untuk mewujudkan swasembada pangan; Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan masih perlu di tingkatkan; Populasi dan produksi hasil peternakan masih perlu ditingkatkan guna mewujudkan swasembada daging; Belum optimalnya produksi perikanan dan hasil olahan perikanan; Kesejahteraan petani, peternak dan nelayan masih rendah dan perlu ditingkatkan serta Kelembagaan petani, peternak dan nelayan yang belum berfungsi optimal; Belum Optimalnya Ketersediaan, keterjangkauan, konsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang, aman serta terjangkau bagi Masyarakat; Belum Optimalnya Pengelolaan Kepariwisataan; 	Produktivitas sektor unggulan daerah
Infrastruktur dan Interkoneksitas antar wilayah	 Kualitas layanan Air bersih, air minum, sanitasi dan perumahan layak di perdesaan maupun perkotaan masih rendah; Kualitas dan konektivitas jaringan jalan, jembatan dan sarana prasarana transportasi masih rendah dan tidak merata; 	Infrastruktur dan konektivitas wilayah

Isu Strategis RPJMD 2021-2026	Permasalahan Pembangunan RKPD 2025 berdasarkan Hasil Evaluasi RKPD 2023	Isu Strategis Pembangunan Sulawesi Tengah Tahun 2025
	 Kualitas Jaringan Irigasi sesuai kewenangan masih perlu ditingkatkan; Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam berbagai bidang untuk mendukung ekonomi digital dan E-Goverment belum optimal; 	
Pengelolaan Industri, Kecil dan Menengah	1. Kualitas koperasi dan usaha mikro masih rendah serta	
	pertumbuhan wirausaha baru yang belum optimal;	Koperasi Terhadap
	2. Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro belum melakukan modernisasi dan mengakomodasi penerapan Inovasi teknologi dan informatika, utamanya untuk distribusi dan pemasaran;	perekonomian
	3. Kemitraan dalam pemberdayaan Koperasi dan usaha mikro masih kurang, utamanya bantuan modal usaha dan Inovasi Produk;	
	4. Iklim usaha UMKM belum sepenuhnya mendukung;	
	5. Pengetahuan dan literasi Digital para pelaku UMKM masih terbatas	
	6. Nilai Ekspor daerah masih rendah	
	7. Peningkatan perlindungan konsumen melalui penerapan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang bertanda tera sah belum optimal;	
	8. Akses Industri Kecil Menengah terhadap modal dan pemasaran terbatas;	
	9. Belum siapnya IKM di era Digitalisasi ekonomi saat ini;	
	10. Ekonomi kreatif di sektor pariwisata belum berkembang dengan baik.	

Sumber: Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, diolah Kembali 2024

Tabel 4.4
Keterkaitan Permasalahan Pembangunan Daerah Dengan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025

						ullali Daerali Talli		
No	Misi	Isu Strategis	Permasalahan	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangun an 2025	Program	Pagu	OPD
1	Meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kualitas dan daya saing Sumberdaya manusia	- Masih Rendahnya Kulitas SDM - Masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat	Pembangunan SDM titik berat pada penuntasan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, Pendidikan menengah dan kejuruan, dan perlindungan sosial, serta peningkatan kualitas SDM untuk membentuk manusia produktif, melalui: A. Kesehatan - Percepatan penanganan stunting serta percepatan eliminasi penyakit menular seperti malaria dan sistosomiasis melalui pendekatan integrasi multisektor dan rekayasa lingkungan habitat vektor Pemenuhan dan pemerataan fasilitas kesehatan yang memadai dan memenuhi standar dan jumah kualitas SDM tenaga kesehatan.	Peningkatan SDM yang berdaya Saing	- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan;		Dinas Keseha tan RSUD Undata

No	Misi	Isu Strategis	Permasalahan	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangun an 2025	Program	Pagu	OPD
				 Peningkatan upaya kesehatan dan penguatan sistem kesehatan daerah B. Pendidikan pemenuhan dan pemerataan sarana dan prasarana Pendidikan serta pemenuhan kuantitas dan kualitas SDM Pendidikan nilai raport Pendidikan melalui peningkatan indeks Pembangunan literasi dan peningkatan Tingkat Kegemaran membaca Percepatan wajib belajar 13 tahun Peningkatan akses dan kualitas Pendidikan vokasi sesuai dengan potensi ekonomi seperti pertambangan, industri pengolahan hasil pertambangan, perkebunan, perikanan, pertanian, dan pariwisata serta keterkaitan dengan DUDI. 		- Program Pengelolaan Pendidikan;		Dinas Pendidi kan

No Misi	Isu Strategis	Permasalahan	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangun an 2025	Program	Pagu	OPD
	Kesenjangan pendapatan masyarakat		C. Perlindungan Sosial Pengurangan kemiskinan dan pemenuhan perlindungan sosial yang berkeadilan dan inklusif serta berkeadilan serta menyeluruh bagi masyarakat (terutama kelompok marginal		 Program Perlindungan & Jaminan Sosial; Program Pemberdayaan Sosial; Program Rehabilitasi Sosial; 		Dinas Sosial
			antara lain melalui peningkatan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja bukan penerima upah dan rentan, dan perlindungan pensiun bagi lansia miskin dan tidak mampu, serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas) • Perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat		 Program Pengelolaan Ketenagalistrikan Program Pengelolaan SDA; Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; 		Dinas ESDM Dinas Cipta Karya dan SDA

No	Misi	Isu Strategis	Permasalahan	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangun an 2025	Program	Pagu	OPD
				Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk program pusat maupun daerah dan desa agar tepat sasaran. Perencanaan, penganggaran melalui APBD dan APBDes, serta komitmen daerah yang lebih berpihak untuk program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, terutama melalui pemenuhan SPM sosial. Pengembangan perlindungan sosial adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok rentan, terutama untuk daerah yang menghadapi risiko bencana dan perubahan iklim, melalui antara lain upaya pro aktif mendukung perluasan cakupan		 Program Pengembangan Perumahan; Program Penyelenggaraan Jalan; Program Pengelolaan DAS; Program Pengelolaan DAS; Pengemberdayaan & Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS); 		Dinas Peruma han, Kawas an Penge mbang an Permuk iman dan Pertana han Dinas Bina Marga dan Penata an Ruang Dinas Penata

No	Misi	Isu Strategis	Permasalahan	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangun an 2025	Program	Pagu	OPD
				jaminan sosial		- Program		Dinas
				ketenagakerjaan bagi		Pengelolaan		Kelauta
				usia pekerja,		Kelautan, Pesisir		n dan
				pengembangan		& Pulau-Pulau		Perikan
				perlindungan sosial		Kecil;		an
				daerah yang responsif,		- Program		
				integrasi program		Pengelolaan		
				perlindungan sosial		Perikanan		
				daerah dengan program		Tangkap;		
				pemberdayaan		- Program		
				ekonomi, program		Pengelolaan		
				ketenagakerjaan,		Perikanan		
				pencegahan dan		Budidaya;		
				penanggulangan		- Program		
				bencana, serta program		Pengelolaan &		
				terkait perubahan iklim.		Pemasaran Hasil		
						Perikanan;		
				D. keberagaman dan				
				kebudayaan		- Program		Dinas
				 Optimalisasi nilai 		Penyediaan &		Tanam
				agama dan budaya,		Pengembangan		an
				peningkatan peran		Sarana Pertanian;		Pangan
				keluarga dalam		- Program		Dan
				pembangunan karakter		Pengendalian &		Holtikul
				manusia dan penggerak		Penanggulangan		tura
				modal sosial;		Bencana		
				peningkatan		Pertanian;		
				ketangguhan				
				menghadapi berbagai				

No	Misi	Isu Strategis	Permasalahan	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangun an 2025	Program	Pagu	OPD
2	Mewujudkan	Tata kelola	Belum optimalnya	kondisi, baik perubahan maupun bencana; penguatan riset dan inovasi untuk peningkatan nilai-nilai sosial dan modal sosial dalam pembangunan • Penerapan system	Meningka	- Program Penyediaan & Pengembangan Prasarana Pertanian; - Program		Semua
	Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan Nilai- Nilai Kemanusiaan dan HAM;	Pemerintahan dan Kualitas pelayanan publik	penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	merit dalam manajemen ASN dan Penguatan manajemen talenta ASN Peningkatan layanan publik terpadu (fisik dan non fisik yang berkualitas dan inklusif berbasis digital. Penerapan pemerintahan yang berbasis digital dan inovatif untuk mendukung pemerintahan yang efektif dan efisien. Penguatan impelementasi	tkan ketertiban hukum dan demokras i yang substansi al; Meningka tkan Tata kelola pemerint ahan	Penunjang Urusan Pemerintahan daerah;		Perang kat Daerah

No	Misi	Isu Strategis	Permasalahan	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangun an 2025	Program	Pagu	OPD
3	Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan;	- Produktivitas sektor unggulan daerah - Kontribusi UMKM dan Koperasi Terhadap perekonomia n - Kemandirian Fiskal Daerah	- Masih rendahnya daya saing sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan, Perikanan dan Pariwisata - Peran Industri, Kecil dan Menengah Belum Maksimal - Rendahnya kemandirian Fiskal	SPIP diseluruh Perangkat Daerah dan Peningkatan Integritas ASN. Penataan kelembagaan daerah menuju organisasi pemerintahan yang modern, adaptif dan profesional - Peningkatan produktivitas nilai tambah, inovasi, penerapan Iptek dan penerapan Iptek di sektor-sektor ekonomi produktif dan penerapan TIK dan inovasi untuk pengembangan komoditas unggulan - Penciptaan lapangan pekerjaan dan SDM yang tangguh, adaptif, inovatif, kompoten, dan mampu mengisi pasar kerja lokal dan global Penguatan ekonomi dan keuangan dalam	• Mendoro ng Peningka tan Produktivi tas Pertanian , Perkebun an, Perikana n, Peternak an dan Komoditi Pertanian lainnya;	- Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja; - Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi; - Program Penyelenggaraan Jalan; - Program Pengelolaan DAS;		Dinas Tenaga Kerja dan Transm igrasi Dinas Bina Marga dan Penata

No	Misi	Isu Strategis	Permasalahan	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangun an 2025	Program	Pagu	OPD
			-	mendukung pembangunan ekonomi lokal melalui penguatan ekosistem industri dan penguatan rantai nilai industri, penguatan kewirausahaan dan UMKM	Peningka tan produktifit as UMKM dan koperasi	 Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir & Pulau-Pulau Kecil; Program Pengelolaan Perikanan Tangkap; Program Pengelolaan Perikanan Budidaya; Program Pengelolaan & Pengelolaan & Pemasaran Hasil Perikanan; 		an Ruang Dinas Kelauta n dan Perikan an
						 Program Penyediaan & Pengembangan Sarana Pertanian; Program Penyediaan & Pengembangan Prasarana Pertanian; Program Pengendalian & 		Dinas Tanam an Pangan Dan Holtikul tura

No	Misi	Isu Strategis	Permasalahan	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangun an 2025	Program	Pagu	OPD
						Penanggulangan Bencana Pertanian; - Program Pengendalian Kesehatan		Dinas perkeb unan dan
						Hewan & Kesehatan Masyarakat Veteriner;		Peterna kan
4	Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	Aksesibilitas dan konektivitas wilayah	- Konektivitas wilayah masih rendah	 Penyediaan air minum melalui jaringan perpipaan dan akses sanitasi melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan. Pengembangan layanan irigas untuk mendukung pengembangan komoditas unggulan pertanian dan perwujudan kemandirian pangan. Peningkatan kapasitas jalan daerah provinsi untuk mendukung 	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Daerah	 Program Penyelenggaraa n Jalan; Program Pengelolaan Sumber daya Air; Program		Dinas Bina Marga dan Penata an Ruang Dinas Cipta Karya dan SDA

No	Misi	Isu Strategis	Permasalahan	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangun an 2025	Program	Pagu	OPD
				integrasi rantai pasok domestik yang menghubungkan pusat- pusat pertumbuhan.		- Program Pengembangan Perumahan;		Dinas Peruma han
				- Pengembangan pelabuhan laut dan pelabuhan penyeberangan yang menjadi kewenangan		- Program Penyelenggaraa n Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);		Dinas Perhub ungan
				provinsi Peningkatan sarana dan prasaranan utilitas rumah layak huni (Kawasan kumuh dan pada Kawasan strategis		ProgramPengelolaanPelayaran;ProgramPengelolaan		Dinas ESDM
				provinsi) yang terjangkau yang sesuai dengan karakteristik wilayah Penanganan		Ketenagalistrika n; - Program Pengelolaan Energi		
				pemukiman kumuh melalui pemugaran, peremajaan secara inklusif.		Terbarukan;		
5	Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang	Aksesibilitas dan konektivitas wilayah	 masih rendahnya partisipasi perempuan di 	Pembangunan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pusat - pusat pertumbuhan.	Pengemb angan wilayah sebagai pusat	- Program Perlindungan Perempuan dan Anak		Dinas DP3A

No	Misi	Isu Strategis	Permasalahan	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangun an 2025	Program	Pagu	OPD
	Merata dan Berkeadilan;	Kualitas dan daya saing Sumberdaya manusia	lembaga swasta masih rendah - masih rendahnya partisipasi perempuan yang duduk di parlemen - masih rendahnya partisipasi angkatan kerja	 Penguatan pengarusutamaan gender dan iklusi sosial dalam pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak Peningkatan partisipasi perempuan di bidang pembangunan. 	pertumbu han ekonomi Peningka tan SDM yang berdaya Saing	 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan; Program Pemberdayaan & Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS); 		Dinas Keseha tan RSUD Undata Dinas P2KB
			perempuan			 Program Perlindungan & Jaminan Sosial; Program Pemberdayaan Sosial; Program Rehabilitasi Sosial; 		Dinas Sosial
						- Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja;		Dinas Tenaga Kerja dan Transm igrasi

No	Misi	Isu Strategis	Permasalahan	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangun an 2025	Program	Pagu	OPD
						- Program Penyelenggaraa n Jalan;		Dinas Bina Marga dan Penata an Ruang
6	Menjaga Harmonisasi Manusia dan Alam, antar sesama manusia sebagai wujud Pembangunan Berkelanjutan;	Pembangunan berkelanjutan	Daya tampung dan daya dukung lingkungan menurun	Pengembangan ekonomi hijau berbasis keunggulan wilayah	Pengemb angan wilayah sebagai pusat pertumbu han ekonomi	 Program Penanggulanga n Bencana Program Pengembangan Perumahan; 		Dinas Peruma han, Kawas an Penge mbang an Permuk iman dan Pertana han

No	Misi	Isu Strategis	Permasalahan	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangun an 2025	Program	Pagu	OPD
					Peningka tan Kualitas dan Kuantitas Infrastruk tur Daerah	 Program Pengelolaan Sumber Daya Air; Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; Program Penyelenggara Penataan Ruang 		Dinas Cipta Karya dan SDA Dinas Bina Marga dan Penata
						- Program Pengendalian Pecemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		an Ruang Dinas Lingkun gan Hidup Daerah

No	Misi	Isu Strategis	Permasalahan	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangun an 2025	Program	Pagu	OPD
						- Program Pengelolaan DAS		Dinas Kehuta nan
7	Melakukan Sinergitas Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Bertetangga Sekawasan maupun di dalam Provinsi Sulteng dan di luar provinsi bertetangga;	Aksesibilitas dan konektivitas wilayah Produktivitas sektor unggulan daerah	 Konektivitas wilayah masih rendah Masih rendahnya daya saing sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan, Perikanan dan Pariwisata 	 peningkatan kolaborasi antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha penguatan kerjasama antar daerah dalam pengelolaan wilayah 	Pengemb angan wilayah sebagai pusat pertumbu han ekonomi Meningka tkan Tata kelola pemerint ahan	 Program Penyelenggaraa n Jalan; Program Pengelolaan Sumber daya Air; Program		Dinas Bina Marga dan Penata an Ruang Dinas Cipta Karya dan SDA
						ProgramPengembanganPerumahan;ProgramPenyelenggaraan Lalu Lintas		Dinas Peruma han

No	Misi	Isu Strategis	Permasalahan	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangun an 2025	Program	Pagu	OPD
						dan Angkutan Jalan (LLAJ); - Program Pengelolaan Pelayaran;		Dinas Perhub ungan
						 Program Pengelolaan Ketenagalistrika n; Program Pengelolaan Energi Terbarukan; 		Dinas ESDM
8	Meningkatkan Pelayanan Publik bidang Pendidikan dan Kesehatan Berbasis pada Teknologi Informasi yang terintegrasi dan dijalankan secara sistematis dan digital;	Tata kelola Pemerintahan dan Kualitas pelayanan publik	- Belum optimalnya penyelenggar aan tata kelola pemerintahan	- meningkatnya indeks kepuasan masyarakat dalam pelayanan Kesehatan dan Pendidikan	Meningkatka n Tata kelola pemerintaha n	 Program Pengelolaan Pendidikan; Program Pelayanan Kesehatan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan; Program Peningkatan Mutu 		Dinas Pendidi kan Dinas Keseha tan RSUD Undata

No	Misi	Isu Strategis	Permasalahan	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangun an 2025	Program	Pagu	OPD
						Pelayanan Rumah Sakit - Program Perlindungan & Jaminan Sosial; - Program Pemberdayaan Sosial; - Program Rehabilitasi		Dinas Sosial
						Sosial; - Program Pengelolaan SDA; - Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;		Dinas Cipta Karya dan SDA
						- Program Pengembangan Perumahan;		Dinas Peruma han, Kawas an Penge

No	Misi	Isu Strategis	Permasalahan	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangun an 2025	Program	Pagu	OPD
								mbang an Permuk iman dan Pertana han
						Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Program		Kantor Satuan Polisi Pamon g Praja
						Penunjang Urusan Pemerintahan daerah;		Perang kat Daerah
9	Mendorong Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) agar terjadi Percepatan Desentralisasi Pelayanan dan Peningkatan Lapangan Kerja dan Peningkatan	Produktivita s sektor unggulan daerah	- Masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat - Masih rendahnya daya saing sektor pertanian,	- Pengkajian/ riset pemekaran wilayah baru sesuai kewenangan	Mendoro ng Peningka tan Produktivi tas Pertanian , Perkebun an,	- Program Penyelenggaraa n Jalan;		Dinas Bina Marga dan Penata an Ruang Dinas Cipta Karya

No	Misi	Isu Strategis	Permasalahan	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangun an 2025	Program	Pagu	OPD
	Produktivitas Sektor Unggulan Daerah		perkebunan, peternakan, kelautan, Perikanan dan Pariwisata		Perikana n, Peternak an dan Komoditi	- Program Pengelolaan Sumber daya Air;		dan SDA
			- Konektivitas wilayah masih rendah		Pertanian lainnya; • Pengemb angan	- Program Pengembangan Perumahan;		Dinas Peruma han
					wilayah sebagai pusat pertumbu han ekonomi	 Program Penyelenggaraa n Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ); Program Pengelolaan Pelayaran; 		Dinas Perhub ungan
						 Program Pengelolaan Ketenagalistrika n; Program Pengelolaan Energi Terbarukan 		Dinas ESDM

Tabel 4.5
Persandingan antara Sasaran Pembangunan Daerah RKPD Tahun 2025 dengan Sasaran Prioritas Nasional RKP Tahun 2025

No	Prioritas Nasional	Sasaran	Target 2025	Prioritas Daerah	Sasaran	Target 2025
1	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	Indeks Demokrasi Indonesia	81,69–85,23	Meningkatkan ketertiban hukum dan demokrasi yang	Indeks demokrasi Indonesia	(> 80) Tinggi
	(HAM)			substansial	Proporsi penduduk merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	53,25
					Indeks reformasi hukum	50,55-62,0
					4. Indeks kerukunan beragama	82,39 – 82,44
2	Memantapkan sistem pertahanan	Asia Power Index (Military Capability)	20	Mendorong Peningkatan	Indeks ekonomi hijau	66,16
	keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Asia Power Index (Diplomatic Influence)	61,54	Produktivitas Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan dan Komoditi Pertanian lainnya;	Prevelensi ketidak cukupan konsumsi pangan (prevalencef undernourishment)	9,05

No	Prioritas Nasional	Sasaran	Target 2025	Prioritas Daerah	Sasaran	Target 2025
		Proporsi Penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%)	67,5			
		Prevelensi ketidakcukupan konsumsi pangan (PoU) (%)	7,21			
		Indeks ketahan energi	6,77			
		Kapasitas tampungan air (m3/kapita)	65,18			
		7. Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)	39,20			
		Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	12,5			
		Indeks daya saing digital di Tingkat global	43			
		10. Indeks ekonomi hijau	70,80			

No	Prioritas Nasional	Sasaran	Target 2025	Prioritas Daerah	Sasaran	Target 2025
		11. Porsi EBT dalam bauran energi primer (%)	20,00			
		12. Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)	24,00 (16,00 terdaur ulang)			
		13. Indeks pengelolaan keanekaragaman hayati	0,44			
		14. Indeks kualitas lingkungan hidup	76,68			
		15. Presentase penurunan emisi GRK				
		• Tahunan (%)	32,65			
		Kumulatif (%)	28,12			
3	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (%)	1,44	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas	Indeks infrastruktur daerah	0,64
	meningkatkan lapangan kerja	2. Rasio kewirausahaan (%)	3,14	Infrastruktur Daerah	Rasio konektivitas simpul transportasi provinsi	0,61
	yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDB (%)	1,26		Rumah tangga dengan akses sanitasi aman	7,50
	mengembangkan industri kreatif	4. Rasio PDB pariwisata (%)	4,60		4. Ketahanan energi	

No	Prioritas Nasional	Sasaran	Target 2025	Prioritas Daerah	Sasaran	Target 2025
	serta mengembangkan	Devisa pariwisata (miliar USD)	22,10		a. Konsumsi kistrik per kapita (kWh)	588 – 2.250
	agromaritim industri di sentra produksi melalui	Proporsi PDB ekonomi kreatif (%)	7,92		b. Intensitas energi primer (SBM/Rp milyar)	189
	peran aktif	7. Aset perbankan/PDB (%)	59,50		5. Ketahanan Air	
	koperasi	8. Aset dana pension/PDB (%)	8,10		a. Kapasitas air baku (m3/detik)	0,55
		9. Aset asuransi/PDB (%)	8,78		b. Akses rumah tangga	28,82
		10.Kapitalis pasar modal/PDB (%)	56,7		perkotaan terhadap air siap minum perpipaan	
		11.Total kredit/PDB (%)	36,1			
		12.Inklusi keuangan (%)	90,6			
4	Memperkuat	Hasil Pembelajaran:		Peningkatan SDM	1. Usia harapan hidup	71,64
	Pembangunan	a. Rata – rata nilai PISA		yang berdaya	2. Angka kematian ibu / 100.000	160
	Sumber daya	i. Membaca	396	Saing	3. Pravelinsi stunting	23,9
	Manusia (SDM),	ii. Matematika	404		4. Penanganan tuberkolosi dan	
	sains, teknologi, pendidikan, Kesehatan,				eliminasi schistosomiasis	
	prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran Perempuan,	iii. Sains	416		a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)	91
	pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang	b. Rata – rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (tahun)	9,46		b. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)	91
	disabilitas.	c. Harapan lama sekolah (tahun)	13,37		c. Prevelensi Schistosomiasis	<1

No	Prioritas Nasional	Sasaran	Target 2025	Prioritas Daerah	Sasaran	Target 2025
		Angka partisipasi kasar (APK) Pendidikan tinggi (%)	33,94		Kecakupan kepesertaan jaminan Kesehatan Provinsi	99,5
		Presentase pekerja lulusan Pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	66,78		6. Hasil pembelajaran:	
		4. Tingkat penguasaan iptek:			a. Literasi	20,13 – 44,64
		a. Pengeluaraan iptek dan inovasi (% PDB	0,30		b. Numerasi	14,45 – 34,86
		b. Peringkat indeks inovasi global	60		7. Rata-rata lama sekolah	9.26 - 9.56
		Tingkat pengangguran terbuka (%)	4,50-5,00		8. Harapan lama sekolah	13.60 – 13.70
		Tingkat partisipasi Angkatan kerja Perempuan (%)	56,30		Angka melek huruf penduduk usia diatas 15 tahun (%)	99.28
		7. Usia harapan hidup (tahun)	74,43		10. Angka partisipasi sekolah	75
		8. Kesehatan ibu dan anak			11. Presentasi pekerjaan lulusan menengah/SMK yang terserap di dunia kerja dan industry	62,25
		a. Angka kematian ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	122		12. Proporsi usia penduduk usia 15 tahun keatas yang berkualitas Pendidikan tinggi	12,57
		b. Prevelensi stunting (pendek dan sangat	18,80		13. Tingkat kemiskinan	9,54-12,20

No	Prioritas Nasional	Sasaran	Target 2025	Prioritas Daerah	Sasaran	Target 2025
		pendek) pada balita (%)				
		Insidensi tuberculosis (per 100.000 penduduk)	272		14. Cakupan kepersertaan jaminan sosial ketenagakerjaan	30,33-33,86
		10.Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional (%)	98		15. Presentase penyandang disabilitas bekerja disektor formal	20
		11.Indeks Pembangunan kualitas keluarga (IPKK)	70,29		16. Indeks ketimpangan gender	0,42-0,44
		12.Indeks ketimpangan gender (IKG)	0,425		17. Tingkat pengangguran terbuka	2,2 – 2,9
					18. Tingkat partisipasi Angkatan kerja Perempuan	58,3
					19. Indeks Daya Saing	3,43
					20. Indeks pembangunan kebudayaan	61,71
					21. Indeks pembangunan kualitas keluarga	60,0 - 66,33
					a. Indeks Pembangunan keluarga (iBangga) (skala 0-100)	60
					b. Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS usia 15-49 tahun (rata-rata anak per wanita)	2,12

No	Prioritas Nasional	Sasaran	Target 2025	Prioritas Daerah	Sasaran	Target 2025
					c. Angka prevelensi kontrasepsi modern (modern contraceptive prevelance rate/mCPR) (%)	65
					d. Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 Tahun (age Spesific Fertility Rate/ASFR) (kelahiran per 1000 WUS 15-19 Tahun	30/1000
					e. Persentase kebutuhan Ber- KB yang tidak terpenuhi (unmet Need)	14
5	Melanjutkan hilirisasi dan	Rasio PDB industri pengolahan (%)	19,9-20,0	Pengembangan wilayah sebagai	Koefisien variasi harga antar wilayah Tingkat provinsi	7,36
	mengembangkan industri berbasis	2. Pembentukan modal tetap bruto (% PDB)	30,1-30,2	pusat pertumbuhan	Pembentukan modal tetap bruto	42,4
	sumber daya alam untuk meningkatkan nilai	3. Ekspor barang dan jasa (% PDB)	21,0-21,6	ekonomi	Ekpor barang dan jasa	26-38,36
	tambah di dalam	4. Biaya logistic (% PDB)	13,50		4. Indeks desa	0,27
	negeri				Proporsi kontribusi PDBR wilayah metropolitan terhadap provinsi	2,26
					Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	66,32

No	Prioritas Nasional	Sasaran	Target 2025	Prioritas Daerah	Sasaran	Target 2025
					Rasio PDRB ADHK sektor industri pengolahan	40,97 - 41,45
					Rasio pajak daerah terhadap PDRB ADHK	0,3 – 0,97
					9. Pengembangan Pariwisata	
					a. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	0,32 – 0,45
					b. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (Ribu orang)*	4,07 – 8,38
					Pendalaman/intermediasi sektor keuangan	
					a. Total dana pihak ketiga/PDRB	12,85
					b. Aset dana pensiunan/PDRB	0,04
					c. Total kredit/PDRB	13,3
					d. Inklusi keuangan	85,05
					e. Tingkat inflasi	2,35-3,8
6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk	Terbangunnya sistem perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh	15	Peningkatan produktifitas UMKM dan	Proporsi PDRB ekonomi kreatif	1,2 T-2,0 T
	pertumbuhan	penduduk (%)		koperasi		

No	Prioritas Nasional	Sasaran	Target 2025	Prioritas Daerah	Sasaran	Target 2025
	ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (%)	43,19		2. Produktifitas umkm, koperasi	
		Persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal (%)	22		a. Proporsi jumlah usaha kecil dan menengan non pertanian	12,33
		Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional (%)	44,34		b. Proporsi jumlah industry kecil dan menengah	2,44
		Persentase desa mandiri (%)	4		c. Rasio kewirausahaan daerah	2,82
		Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan	67,00		d. Rasio volume koperasi terhadap PDRB	1,29
		berkelanjutan (%)			e. Return on Aset (ROA) BUMD (%)	2,26
7	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan	1. Return On Asset (ROA) BUMN (%)	3,45	Meningkatkan Tata kelola pemerintahan	Indeks kualitas kebijakan	65
	birokasi, serta memperkuat pencegahan dan	2. Indeks integritas nasional	74,52		Indeks kepemimpinan kepala daerah	60-79
	pemberantasan korupsi, narkoba,	3. Indeks Materi hukum	0,51		3. Indeks Integritas nasional	70,58

No	Prioritas Nasional	Sasaran	Target 2025	Prioritas Daerah	Sasaran	Target 2025
	judi, dan penyelundupan	4. Indeks pelayanan publik	3,68		4. Indeks pelayanan public	3,54 – 3,60
		Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik	3,00		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,15 "Baik"
		6. Indeks persepsi korupsi	38		6. Indeks Inovasi Daerah	Inovatif
		7. Indeks pembanguna hukum	0,69		7. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	5,7
		8. Rasio perpajakan terhadap PDB (%)	10,70-11,20		8. Indeks Reformasi Birokrasi	70
		9. Tingkat inflansi (%)	1,5-3,5		Survey Penilaian Integritas	70,58
					Nilai maturitas sistem pengendalian interen pemerintah (SPIP)	3,60
					11. Indeks perencanaan Pembangunan nasional/daerah	81 - 90
8	Memperkuat penyelarsan kehidupan yang	Indeks Pembangunan kebudayaan (IPK)	58,39	Meningkatkan Ketahanan Bencana,	Indeks pengelolaan keanekaragaman hayati daerah	0,6

No	Prioritas Nasional	Sasaran	Target 2025	Prioritas Daerah	Sasaran	Target 2025
	harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan	Indeks kerukunan umat beragama (IKUB)	76,77	Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan	2. Indeks resiko bencana	124,60
	toleransi antarumat beragama untuk mencapai Masyarakat yang				Presentase penurunan GRK	
	adil dan makmur				a. Kumulatif	19,76
		Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relative terhadap PDB (%)	0,137		b. Tahunan	28,94
					4. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	30,51
					Persentase luas genangan yang tertangani	13
					Timbulan sampah terolah difasilitasi pengolahan sampah	450,714,44

No	Prioritas Nasional	Sasaran	Target 2025	Prioritas Daerah	Sasaran	Target 2025
					 Proporsi rumah tangga (RT) dengan layanan penuh pengumpulan sampah 	0,138
					8. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	80,18



Berikut ini tabel penyelarasan Indikator sasaran Prioritas Nasional dengan Indikator sasaran Prioritas Daerah

Tabel 4.6
Penyelarasan Indikator Sasaran Prioritas Nasional dan Indikator Sasaran Prioritas Daerah

	Prioritas Daerah					
	Sasaran Prioritas Nasion	nal		Sasaran PrioritasDae	erah	
No	Indikator	Target 2025	No	Indikator	Target 2025	
1	Indeks Demokrasi Indonesia	81,69–85,23	1	Indeks demokrasi Indonesia	(> 80) Tinggi	
2	Asia Power Index (Military Capability)	20				
3	Asia Power Index (Diplomatic Influence)	61,54	2	Indeks kepemimpinan 60-79 kepala daerah		
4	Proporsi Penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%)	67,5	3	Proporsi penduduk merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	53,25	
5	Prevelensi ketidakcukupan konsumsi pangan (PoU) (%)	7,21	4	Prevelensi ketidak cukupan konsumsi pangan (<i>prevalencef</i> <i>undernourishment</i>)	9,05	
6	Indeks ketahan energi	6,77		Ketahanan energi		
7	Kapasitas tampungan air (m3/kapita)	65,18	5	a. Konsumsi kistrik per kapita (kWh)	588 – 2.250	
			6	b. Intensitas energi primer (SBM/Rp milyar)	189	
				Ketahanan Air		
			7	Kapasitas air baku (m3/detik)	0,55	
8	Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)	39,2	8	Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan	28,82	
9	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	12,5	9	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman	7,5	
10	Indeks daya saing digital di Tingkat global	43	10	Indeks Daya Saing	3,43	
11	Indeks ekonomi hijau	70,8	11	Indeks ekonomi hijau	66,16	
12	Porsi EBT dalam bauran energi primer (%)	20	12	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	30,51	
13	Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)	24,00 (16,00 terdaur ulang)	13	Timbulan sampah terolah difasilitasi pengolahan sampah	450,714,44	
			14	Proporsi rumah tangga (RT) dengan layanan penuh pengumpulan sampah	0,138	



	Sasaran Prioritas Nasional			Sasaran PrioritasDaerah			
No	Indikator	Target 2025	No	Indikator	Target 2025		
14	Indeks pengelolaan keanekaragaman hayati	0,44	15	Indeks pengelolaan keanekaragaman hayati daerah	0,6		
15	Indeks kualitas lingkungan hidup	76,68	16	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	80,18		
16	Presentase penurunan emisi GRK		17	Presentase penurunan GRK			
	· Tahunan (%)	32,65		a. Kumulatif	19,76		
	· Kumulatif (%)	28,12		b. Tahunan	28,94		
17	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (%)	1,44	18	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengan non pertanian	12,33		
18	Rasio kewirausahaan (%)	3,14	19	Rasio kewirausahaan daerah	2,82		
19	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDB (%)	1,26	20	Rasio volume koperasi terhadap PDRB	1,29		
20	Rasio PDB pariwisata (%)	4,6		Pengembangan Pariwisata			
21	Devisa pariwisata (miliar USD)	22,1	21	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	0,32 – 0,45		
			22	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (Ribu orang)*	4,07 – 8,38		
22	Proporsi PDB ekonomi kreatif (%)	7,92	23	Proporsi PDRB ekonomi kreatif	1,2 T-2,0 T		
			24	Proporsi jumlah industry kecil dan menengah	2,44		
23	Aset perbankan/PDB (%)	59,5	25	Total dana pihak ketiga/PDRB	12,85		
24	Aset dana pension/PDB (%)	8,1	26	Aset dana pensiunan/PDRB	0,04		
25	Aset asuransi/PDB (%)	8,78					
26	Kapitalis pasar modal/PDB (%)	56,7					
27	Total kredit/PDB (%)	36,1	27	Total kredit/PDRB	13,3		
28	Inklusi keuangan (%)	90,6	28	Inklusi keuangan	85,05		
	Hasil Pembelajaran:			Hasil pembelajaran:			
	a. Rata – rata nilai PISA						
29	i. Membaca	396	29	a. Literasi	20,13 – 44,64		
30	ii. Matematika	404	30	b. Numerasi	14,45 – 34,86		



	Sasaran Prioritas Nasional			Sasaran PrioritasDaerah		
No	Indikator	Target 2025	No	Indikator	Target 2025	
31	iii. Sains	416				
32	b. Rata – rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (tahun)	9,46	31	Rata-rata lama sekolah	9.26 - 9.56	
33	Harapan lama sekolah (tahun)	13,37	32	Harapan lama sekolah	13.60 – 13.70	
			33	Angka melek huruf penduduk usia diatas 15 tahun (%)	99.28	
34	Angka partisipasi kasar (APK) Pendidikan tinggi (%)	33,94	34	Angka partisipasi sekolah	75	
35	Presentase pekerja lulusan Pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	66,78	35	Presentasi pekerjaan lulusan menengah/SMK yang terserap di dunia kerja dan industry	62,25	
			36	Proporsi usia penduduk usia 15 tahun keatas yang berkualitas Pendidikan tinggi	12,57	
	Tingkat penguasaan iptek:					
36	Pengeluaraan iptek dan inovasi (% PDB	0,3				
37	Peringkat indeks inovasi global	60	37	Indeks Inovasi Daerah	Inovatif	
38	Tingkat pengangguran terbuka (%)	4,50-5,00	38	Tingkat pengangguran terbuka	2,2 – 2,9	
39	Tingkat partisipasi Angkatan kerja Perempuan (%)	56,3	39	Tingkat partisipasi Angkatan kerja Perempuan	58,3	
40	Usia harapan hidup (tahun)	74,43	40	Usia harapan hidup	71,64	
	Kesehatan ibu dan anak					
41	Angka kematian ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	122	42	Angka kematian ibu / 100.000	160	
42	Prevelensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	18,8	43	Pravelinsi stunting	23,9	
43	Insidensi tuberculosis (per 100.000 penduduk)	272	44	Penanganan tuberkolosi dan eliminasi schistosomiasis		



	Sasaran Prioritas Nasional			Sasaran PrioritasDaerah				
No	Indikator	Target 2025	No					
			45	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)	91			
			46	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)	91			
			47	Prevelensi Schistosomiasis	<1			
44	Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional (%)	98	48	Kecakupan kepesertaan jaminan Kesehatan Provinsi	99,5			
45	Indeks Pembangunan kualitas keluarga (IPKK)	70,29	49	Indeks pembangunan kualitas keluarga	60-66,00			
			50	a. Indeks Pembangunan keluarga (iBangga) (skala 0-100)	60			
			51	b. Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS usia 15-49 tahun (rata-rata anak per wanita)	2,12			
			52	c. Angka prevelensi kontrasepsi modern (modern contraceptive prevelance rate/mCPR) (%)	65			
			53	d. Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 Tahun (age Spesific Fertility Rate/ASFR) (kelahiran per 1000 WUS 15-19 Tahun	30/1000			
			54	e. Persentase kebutuhan Ber- KB yang tidak terpenuhi (unmet Need)	14			
46	Indeks ketimpangan gender (IKG)	0,425	55	Indeks ketimpangan gender	0,42-0,44			
47	Rasio PDB industri pengolahan (%)	19,9-20,0	56	Rasio PDRB ADHK sektor industri pengolahan	40,97 - 41,45			
48	Pembentukan modal tetap bruto (% PDB)	30,1-30,2	57	Pembentukan modal tetap bruto	42,4			
49	Ekspor barang dan jasa (% PDB)	21,0-21,6	58	Ekspor barang dan jasa Tingkat Provinsi	26 – 38,36			
50	Biaya logistic (% PDB)	13,5						



	Sasaran Prioritas Nasior	nal	Sasaran PrioritasDaerah		
No	Indikator	Target 2025	No	Indikator	Target 2025
51	Terbangunnya sistem perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh penduduk (%)	15	59	Tingkat kemiskinan	9,54-12,20
52	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (%)	43,19	60	jaminan sosial ketenagakerjaan	
53	Persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal (%)	22	61	Presentase penyandang disabilitas bekerja disektor formal	20
54	Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional (%)	44,34	62	Proporsi kontribusi PDBR wilayah metropolitan terhadap provinsi	2,26
55	Persentase desa mandiri (%)	4	63	Indeks desa	0,27
56	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan (%)	67	64	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	66,32
57	Return On Asset (ROA) BUMN (%)	3,45	65	Return on Aset (ROA) BUMD (%)	2,26
58	Indeks integritas nasional	74,52			
59	Indeks Materi hukum	0,51	66	Indeks reformasi hukum	50,55-62,0
60	Indeks pelayanan publik	3,68	67	Indeks pelayanan public	3,54 - 3,60
61	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik	3	68	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,15 "Baik"
62	Indeks persepsi korupsi	38	69	Survey Penilaian Integritas	70,58
63	Indeks pembanguna hukum	0,69	70	Indeks kualitas kebijakan	65
			71	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	5,7
			72	Indeks Reformasi Birokrasi	70
			73	Nilai maturitas sistem pengendalian interen pemerintah (SPIP)	3,6
			74	Indeks perencanaan Pembangunan nasional/daerah	81 - 90
64	Rasio perpajakan terhadap PDB (%)	10,70-11,20	75	Rasio pajak daerah 0,3 – 0,97 terhadap PDRB ADHK	
65	Tingkat inflansi (%)	1,5-3,5	76	Tingkat inflasi	2,35-3,8
66	Indeks Pembangunan kebudayaan (IPK)	58,39	77	Indeks pembangunan kebudayaan	61,71
67	Indeks kerukunan umat beragama (IKUB)	76,77	78	Indeks kerukunan beragama	82,39 – 82,44



Sasaran Prioritas Nasional			Sasaran PrioritasDaerah		
No	Indikator	Target 2025	No	Indikator	Target 2025
68	Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relative terhadap PDB (%)	0,137			

Sumber: Bappeda, 2024

Dukungan Program Prioritas Daerah terhadap Program Prioritas pada PN1 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM), disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.7

Dukungan Program Prioritas Daerah terhadap Prioritas Nasional pada PN

NO.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS DAERAH
NO.	PN I Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	1110 0111 1111
		8. Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum

Sumber: Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, diolah Kembali 2024

Dukungan Program Prioritas Daerah terhadap Program Prioritas pada PN 2 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru, disajikan pada tabel berikut:



Tabel 4.8

Dukungan Program Prioritas Daerah terhadap Prioritas Nasional pada PN
2

	2			
No.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS DAERAH		
1	PN 2 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian		
	pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Program Penyuluhan Pertanian		
		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian		
		4. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner		
		5. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian		
		Program Penyuluhan Pertanian		
		7. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan		
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat		
		Program Penanganan Kerawanan Pangan		
		10. Program Pengawasan Keamanan Pangan		
		11. Program Pengembangan Perumahan		
		12. Program Kawasan Permukiman		
		13. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)		
		14. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan		
		15. Program Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan		
		Tanah Absentee 16. Program Penatagunaan Tanah		

Dukungan Program Prioritas Daerah terhadap Dukungan Program Prioritas pada PN 3 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri



kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.9

Dukungan Program Prioritas Daerah terhadap Prioritas Nasional pada PN
3

	3		DDOCDAM
No.	PRIORITAS NASIONAL		PROGRAM PRIORITAS DAERAH
1	PN 3 Melanjutkan pengembangan	1.	Program Pengelolaan Sumber
-	infrastruktur dan meningkatkan lapangan		Daya Air (SDA)
	kerja yang berkualitas, mendorong	2.	Program Pengelolaan Dan
	kewirausahaan, mengembangkan industri		Pengembangan Sistem
	kreatif serta mengembangkan agromaritim		Penyediaan Air Minum
	industri di sentra produksi melalui peran	3.	Program Pengembangan
	aktif koperasi		Sistem Dan Pengelolaan
			Persampahan Regional
		4.	Program Pengelolaan Dan
			Pengembangan Sistem Air
		E	Limbah
		5.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem
			Drainase
		6.	Program Pengembangan
		0.	Permukiman
		7.	Program Penataan Bangunan
			Gedung
		8.	Program Penataan Bangunan
			Dan Lingkungannya
		9.	Program Penyelenggaraan
		40	Jalan
		10.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi
		11	Program Penyelenggaraan
		11.	Penataan Ruang
		12.	Program Pengembangan
			Perumahan
		13.	Program Kawasan Permukiman
			Program Peningkatan
			Prasarana, Sarana Dan Utilitas
			Umum (PSU)
		15	Program Penyelesaian Sengketa
		13.	Tanah Garapan
		16	Program Redistribusi Tanah Dan
		10.	•
			Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee
		47	
			Program Penatagunaan Tanah
		18.	Program Pengelolaan Aspek
		10	Kegeologian Program Pengelolaan Mineral
		13.	Dan Batubara
		20.	Program Pengelolaan Energi
			Baru Terbarukan
		21.	Program Pengelolaan
			Ketenagalistrikan
		22.	Program Pengelolaan Aspek
			Kegeologian
		23.	Program Pengelolaan Mineral
			Dan Batubara



	AHUN 2025		PROGRAM
No.	PRIORITAS NASIONAL		PRIORITAS DAERAH
		24.	Program Pengelolaan
			Ketenagalistrikan
		25.	3
			Lingkungan Hidup
		26.	3
			Pencemaran Dan/Atau
			Kerusakan Lingkungan Hidup
		27.	
			Keanekaragaman Hayati
		20	(Kehati) Program Pengendalian Bahan
		20.	Berbahaya Dan Beracun (B3)
			Dan Limbah Bahan Berbahaya
			Dan Beracun (Limbah B3)
		29	Program Pembinaan Dan
			Pengawasan Terhadap Izin
			Lingkungan Dan Izin
			Perlindungan Dan
			Pengelolaan Lingkungan
			Hidup (PPLH)
		30.	Program Pengakuan
			Keberadaan Masyarakat
			Hukum Adat (MHA), Kearifan
			Lokal Dan Hak Mha Yang
		21	Terkait Dengan PPLH Program Peningkatan
		31.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan
			Penyuluhan Lingkungan Hidup
			Untuk Masyarakat
		32.	•
			Lingkungan Hidup Untuk
			Masyarakat
		33.	Program Penanganan
			Pengaduan Lingkungan Hidup
		34.	Program Pengelolaan
		25	Persampahan
			Program Pengelolaan Hutan Program Konservasi Sumber
		50.	Daya Alam Hayati Dan
			Ekosistemnya
		37.	Program Pendidikan Dan
			Pelatihan, Penyuluhan Dan
			Pemberdayaan Masyarakat Di
			Bidang Kehutanan
		38.	Program Pengelolaan Daerah
			Aliran Sungai (DAS)
		39.	Program Penyelenggaraan
			Lalu Lintas Dan Angkutan
		40	Jalan (LLAJ)
		40.	Program Pengelolaan
		11	Pelayaran Pengelelaan
		41.	Program Pengelolaan Perkeretaapian
			ι σικεισιααριαιι
		l	



Dukungan Program Prioitas Daerah terhadap Dukungan Program Prioritas pada PN 4 Memperkuat Pembangunan Sumber daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, Kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran Perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas., disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.10

Dukungan Program Prioritas Daerah terhadap Prioritas Nasional pada PN

4

	4		
No.	PRIORITAS NASIONAL	P	ROGRAM PRIORITAS
			DAERAH
1	PN 4 Memperkuat Pembangunan Sumber daya	1.	Program Pemenuhan
	Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan,		Upaya Kesehatan
	Kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,		Perorangan Dan Upaya
	serta penguatan peran Perempuan, pemuda		Kesehatan Masyarakat
	(generasi milenial dan generasi Z), dan	2.	Program Peningkatan
	penyandang disabilitas.		Kapasitas Sumber Daya
		3.	Manusia Kesehatan Program Sediaan
		٥.	Program Sediaan Farmasi, Alat
			Kesehatan Dan
			Makanan Minuman
		4.	Program
		٦.	Pemberdayaan
			Masyarakat Bidang
			Kesehatan
		5.	Program Pengelolaan
		0.	Pendidikan
		6.	Program
			Pengembangan
			Kurikulum
		7.	Program Pendidik Dan
			Tenaga Kependidikan
		8.	Program Pengendalian
			Penduduk
		9.	Program Pembinaan
			Keluarga Berencana
			(KB)
		10.	Program
			Pemberdayaan Dan
			Peningkatan Keluarga
		44	Sejahtera (KS)
		11.	
			Pengarusutamaan Gender Dan
			Pemberdayaan
			Perempuan
		12	Program Perlindungan
		12.	Perempuan
		13.	•
			Kualitas Keluarga
		14.	Program Pengelolaan
			Sistem Data Gender
			Dan Anak
		15.	Program Pemenuhan
			Hak Anak (PHA)
		16.	Program Perlindungan
			Khusus Anak



No.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	
NO.	P KIOKITAS NASIONAL		DAERAH
		17.	Program
			Pemberdayaan Sosial
		18.	Program Penanganan
			Warga Negara Migran
			Korban Tindak
		40	Kekerasan
		19.	Program Rehabilitasi Sosial
		20	Program Perlindungan
		20.	Dan Jaminan Sosial
		21.	Program Penanganan
			Bencana
		22.	Program Perencanaan
			Tenaga Kerja
		23.	Program Pelatihan
			Kerja Dan Produktivitas
			Tenaga Kerja
		24.	Program Penempatan
			Tenaga Kerja
		25.	Program Pengawasan
		00	Ketenagakerjaan
		26.	Program Perencanaan
		27	Kawasan Transmigrasi
		21.	Program Pembangunan
		28	Kawasan Transmigrasi Program
		20.	Pengembangan
			Kawasan Transmigrasi
		29.	Program
		_0.	Pengembangan
			Kapasitas Daya Saing
			Kepemudaan
		30.	Program
			Pengembangan Daya
			Saing Keolahragaan
		31.	Program
			Pengembangan
			Kapasitas
		32.	Kepramukaan
		3Z.	Program Pengembangan
			Kebudayaan
		33.	
		00.	Pengembangan
			Kesenian Tradisional
		34.	Program Pembinaan
			Sejarah
		35.	Program Pelestarian
			Dan Pengelolaan Cagar
			Budaya
		36.	
		c=	Perpustakaan
		37.	Program Pelestarian
			Koleksi Nasional Dan
			Naskah Kuno



Dukungan Program Prioritas Daerah terhadap Dukungan Program Prioritas pada PN 5 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

Tabel 4.11

Dukungan Program Prioritas Daerah terhadap Prioritas Nasional pada PN
5

	5				
No.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM			
		PRIORITAS DAERAH			
1	PN 5 Melanjutkan hilirisasi dan	Program Penataan Desa			
	mengembangkan industri berbasis	Program Peningkatan Kerja Sama Desa			
	sumber daya alam untuk meningkatkan	Program Administrasi Pemerintahan			
	nilai tambah di dalam negeri	Desa			
		4. Program Pemberdayaan Lembaga			
		Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat			
		5. Program Pengembangan Iklim			
		Penanaman Modal			
		6. Program Promosi Penanaman Modal			
		7. Program Pelayanan Penanaman Modal			
		8. Program Pengendalian Pelaksanaan			
		Penanaman Modal			
		Program Pengelolaan Data Dan Sistem			
		Informasi Penanaman Modal			
		10. Program Peningkatan Daya Tarik			
		Destinasi Pariwisata			
		11. Program Pemasaran Pariwisata			
		12. Program Pengembangan Ekonomi			
		Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan			
		Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual			
		13. Program Pengembangan Sumber Daya			
		Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif			
		14. Program Kebijakan Administrasi			
		Pembangunan			
		15. Program Perekonomian Dan			
		Pembangunan			
		16. Program Peningkatan Sarana Distribusi			
		Perdagangan			
1		17. Program Stabilisasi Harga Barang			
		Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting 18. Program Pengembangan Ekspor			
1		Program Penggunaan Dan Pemasaran			
		Produk Dalam Negeri			
		20. Program Perencanaan Dan Pembangunan			
1		Industri			
		21. Program Pengendalian Izin Usaha Industri			
		22. Program Pengelolaan Sistem Informasi			
1		Industri Nasional			
		23. Program Standardisasi Dan Perlindungan			
		Konsumen			

Sumber: Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, diolah Kembali 2024

Dukungan Program Prioritas Daerah terhadap Dukungan Program Prioritas pada PN 6 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan, disajikan pada tabel berikut.



Tabel 4.12

Dukungan Program Prioritas Daerah terhadap Prioritas Nasional pada PN

6

	6			
No.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM		
			ORITAS DAERAH Program Pelayanan Izin Usaha	
	PN 6 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi,	1.	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	
	dan pemberantasan kemiskinan	2.	Program Pengawasan Dan	
	dan pomborantaban kombanian		Pemeriksaan Koperasi	
		3.	Program Penilaian Kesehatan	
			KSP/USP Koperasi	
		4.	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	
		5.	Program Pemberdayaan Usaha	
			Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	
		6.	Program Pengembangan UMKM	
		7.	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	
		8.	Program Peningkatan Sarana	
			Distribusi Perdagangan	
		9.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	
		10.	Program Pengembangan Ekspor	
		11.	Program Penggunaan Dan	
			Pemasaran Produk Dalam Negeri	
		12.	Program Perencanaan Dan	
			Pembangunan Industri	
		13.	Program Pengendalian Izin Usaha	
		14.	Industri Program Pengelolaan Sistem	
		14.	Informasi Industri Nasional	
		15.	Program Standardisasi Dan	
			Perlindungan Konsumen	
		16.	Program Pemberdayaan Sosial	
		17.	Program Penanganan Warga	
			Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	
		18.	Program Rehabilitasi Sosial	
		19.	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	
		20.	Program Penanganan Bencana	
		21.	Program Perencanaan Tenaga Kerja	
		22.	Program Pelatihan Kerja Dan	
			Produktivitas Tenaga Kerja	
		23.	Program Penempatan Tenaga Kerja	
		24.	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	
		25.	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	
		26.	Program Pembangunan	
			Kawasan Transmigrasi	
		27.	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	

Sumber: Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, diolah Kembali 2024



Dukungan Program Prioritas Daerah terhadap Dukungan Program Prioritas pada PN 7 Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.13

Dukungan Program Prioritas Daerah terhadap Prioritas Nasional pada PN
7

	7			
No.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS DAERAH		
1	PN 7 Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	1. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan 2. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik 3. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 4. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya 5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial 6. Program Peryelenggaraan Pengawasan 7. Program Peryelenggaraan Pengawasan 8. Program Peryelenggaraan Pengawasan 9. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Fungsi DPRD 9. Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum 10. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum 11. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran 12. Program Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan 13. Program Peningkatan Komunikasi Publik 14. Program Peningkatan Sistem Pengembangan Informasi Komunikasi Publik 14. Program Peningkatan Sistem Pengendalian Intern dan Integritas 15. Program Peningkatan Sistem Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah 16. Program Pelayanan Rehabilitasi sosial UPTD Panti Sosial Rehabilitasi sosial UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum 17. Program Penbinaan dan Fasilitasi 18. Pengembangan Kompetensi ASN Non Provinsi 19. Program Peningkatan Pelayanan Publik 20. Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi		



No.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS DAERAH
		22. Program Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Kinerja
		23. Program Bina Ketahanan Ekonomi, Seni,
		Budaya, Agama dan Kemasyarakatan
		24. Program Pemeliharaan Ketertiban Umum
		dan Ketentraman Masyarakat
		25. Program penelitian Dan pengembangan
		Daerah
		26. ProgramPengelolaan Pendapatan
		Daerah
		27. Program Pengembangan Sumber Daya
		Manusia
		28. Program Perencanaan Pengendalian,
		Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
		29. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi
		Perencanaan Pembangunan Daerah
		30. Program Kepegawaian Daerah
		31. Program Penataan Organisasi
		32. Program Kebijakan Dan Pelayanan
		Pengadaan Barang Dan Jasa
		33. Program Pengelolaan Informasi Dan
		Komunikasi Publik
		34. Program Pengelolaan Aplikasi
		Informatika
		35. Program Penyelenggaraan Statistik
		Sektoral
		36. Program Penyelenggaraan Persandian
		Untuk Pengamanan Informasi
		37. Program Pengelolaan Arsip

Sumber: Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, diolah Kembali 2024

Dukungan Program Prioritas Daerah terhadap Dukungan Program Prioritas pada PN 8 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai Masyarakat yang adil dan makmur, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.14

Dukungan Program Prioritas Daerah terhadap Prioritas Nasional pada PN

8

No.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS DAERAH
1	PN 8 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai Masyarakat yang adil dan makmur	Hidup 2. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan



No		PROGRAM
No.	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH
		Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 6. Program Pengakuan Keberadaan
		Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang
		Terkait Dengan PPLH 7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan
		Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
		10. Program Pengelolaan Persampahan
		11. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian 12. Program Pengelolaan Mineral Dan
		Batubara 13. Program Pengelolaan Energi Baru
		Terbarukan 14. Program Pengelolaan
		Ketenagalistrikan 15. Program Pengelolaan Aspek
		Kegeologian 16. Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara
		17. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
		18. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
		19. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
		20. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional
		21. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
		22. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
		23. Program Pengelolaan Hutan 24. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya
		25. Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan
		Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan
		26. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)

Sumber: Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, diolah Kembali 2024

Arah kebijakan, prioritas dan fokus pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 merupakan upaya untuk mencapai target kinerja utama daerah tahun 2024.



Table 4.15
Persandingan Indikator Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025 dan Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2025

		mbangunan Daerah Ta	
No	Indikator Makro	Sasaran Awal RKP 2025 Untuk Agregat Nasional	Sasaran Awal RKPD Provinsi Sulteng 2025
1.	PDRB perkapita	81.96-82.08	125,26-154,25
2.	Kontribusi PDB Industri Pengolahan	19.34	40,97-41,45
3.	Tingkat Kemiskinan	6.0-7.0	9,54-12,20
4.	Rasio Gini	0.379-0.382	0,298-0,302
5.	Kontribusi PDRB Provinsi	0	2,09
6.	Indeks Modal Manusia (IMM)	0	0,56
7.	Indonesia Blue Economy Index (IBEI)	0	59,87
8.	Penurunan intensitas emisi GRK	0	77,96
9.	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi	43.19	30,33 – 33,86
10.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5.30 – 5.60	9,11 – 11,11
11.	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	22	20
12.	Tingkat Pengangguran Terbuka	4.50 – 5.00	2,2 – 2,9
13.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	56.30	58,3
14.	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	0	0,32-0,45
15.	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang)	0	4,07-8,38
16.	Proporsi PDB Nilai Tambah Akomodasidan Makan Minum	7.92	1,2T – 2T



No	Indikator Makro	Sasaran Awal RKP 2025 Untuk Agregat Nasional	Sasaran Awal RKPD Provinsi Sulteng 2025
17.	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	6.1	5,7
18.	Ekspor Barang dan Jasa	26.0	26 – 38,36
19.	Koefisien Variasi Harga Antar wilayah Tingkat Provinsi	N/A	7.36
20.	Pembentukan Modal Tetap Bruto	29.8	42.4
21.	Indeks Reformasi Hukum (IRH)	0	50,55-62,0
22.	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	3.68	3,54-3,60
23.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3.12	3,15
24.	Indeks Integritas Nasional	74.52	70,58
25.	Indeks Demokrasi Indonesia	83.05	Tinggi
26.	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	1.5	0,3-0,97
27.	Tingkat Inflasi	1.5-3.5	2,35-3,8
28.	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)	70.29	60,0-66,33
29.	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0.43	0,42 – 0,44
30.	Konsumsi Listrik perKapita	1.356	588 – 2.250
31.	Prevalensi ketidak cukupan konsumsi pangan	7.21	9,05

Sumber: Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, diolah Kembali 2024



4.4 Program Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Dalam rangka mendukung pencapaian kinerja pembangunan daerah Sulawesi Tengah tahun 2025 dikembangkan berbagai inovasi kebijakan pemerintah daerah. Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 serta mendukung pada kebijakan nasional tahun 2025. Inovasi kebijakan tersebut sebagai berikut.

Program Terpadu Percepatan Penurunan Stunting Dan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Perangkat Daerah (Tangguh Bersinar)

Stunting telah menjadi isu prioritas nasional termasuk Provinsi Sulawesi Tengah dan menjadi ancaman nyata terhadap upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Stunting menjadi masalah gizi utama bagi bayi dan anak dibawah usia dua tahun di Indonesia. Hasil Survei Status Gizi Indonesia Tahun 2022, menunjukkan prevalensi stunting di Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 28,2 persen, tertinggi ketujuh se-indonesia dan berada diatas angka nasional yaitu 21,6 persen. RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah menargetkan prevalensi stunting dapat diturunkan pada angka 8 persen pada tahun 2026, yang berarti diperlukan upaya yang sangat keras untuk mewujudkan target tersebut.

Dalam lingkup wilayah yang lebih spesifik, Kabupaten Sigi menjadi wilayah dengan prevalensi stunting tertinggi di Provinsi Sulawesi Tengah. Prevalensi stunting di Kabupaten Sigi pada tahun 2022 berada pada angka 36,8 persen, walaupun mengalami penurunan sebesar 3,9 persen dibandingkan tahun 2021. Sementara itu, prevelansi stunting Kabupaten Sigi ditargetkan menurun menjadi 23,86 persen pada tahun 2024. Dengan demikian terdapat gap sebesar 12,94 persen yang harus dicapai. Pada sisi lain, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sigi juga merupakan salah satu yang tertinggi di Provinsi Sulawesi Tengah. Kondisi tersebut sedikit banyaknya mempengaruhi tingginya prevalensi stunting di kabupaten tersebut. Berangkat dari kondisi tersebut, maka dirancang suatu program bernama Program Terpadu Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Perangkat Daerah (Tangguh Bersinar) yang dilaksanakan dengan prinsip kolaborasi dan sinergitas antar stakeholder.



Program Terpadu Percepatan Penurunan Stunting dan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Kabupaten Sigi bertujuan untuk mencegah dan menurunkan angka stunting di Kabupaten Sigi.

Lingkup kegiatan pelaksanaan program meliputi:

- a. Intervensi spesifik yaitu intervensi yang menyasar penyebab langsung terjadinya stunting oleh sektor kesehatan dan intervensi sensitif yaitu intervensi yang menyasar penyebab tidak langsung terjadinya stunting yang pelaksanaannya sebagian besar ada di luar sektor Kesehatan. Intervensi spesifik dan intervensi sensitif mencakup indikator layanan esensial sesuai Perpres 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
- b. Intervensi untuk meminimalkan wilayah kantong kemiskinan melalui pemenuhan pelayanan dasar, seperti peningkatan akses layanan kesehatan, akses pendidikan, akses sanitasi, akses air minum layak dan akses listrik.

2) Terminal dan Transportasi Pangan Terpadu (Tetra Pandu)

Dalam rangka percepatan penurunan daerah rawan pangan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berinisiasi membuat sebuah program kreatif yang dinamakan Inovasi Terminal dan Transportasi Pangan Terpadu (Tetra Pandu) Sulawesi Tengah Pelaksanaan inovasi ini merupakan bagian dari fungsi pemerintah provinsi Sulawesi Tengah untuk melaksanakan fasilitasi dan pembinaan serta pengawasan kepada kabupaten/kota selaku wakil pemerintah pusat di daerah. Program ini ingin didesain sebagai role model (best practice) bagi desa-desa lainnya di Sulawesi Tengah dalam upaya bersama menurunkan persentase daerah rawan pangan lebih cepat dan efektif. Ide keterpaduan akan dibuat dalam bentuk perlakuan (intervensi) yang akan diberikan pada desa pilot project. Tingkat keberhasilan akan diukur terutama signifikansi pemanfaatan dana yang digunakan berbanding keberhasilan persentase daerah rawan pangan yang berhasil menuju daerah tahan pangan.

Inovasi Terminal dan Transportasi Pangan Terpadu (Tetra Pandu) adalah inovasi pada sektor pangan yang diharapkan dapat memberikan kemajuan pada kemampuan distribusi pangan sampai kepada masyarakat dalam



jumlah yang cukup, aman, bermutu, beragam, bergizi dan terjangkau. Tetra dalam Bahasa Yunani berarti 4 (empat) karena pada inovasi memiliki 4 (empat) kebaruan (novelty) terpadu yaitu :

- Konsep Terminal Pangan yang menjawab permasalahan tingginya harga pangan, rendahnya diversifikasi pangan dan meringkaskan tata niaga serta memotong rantai pasok tengkulak.
- Konsep Transportasi Pangan yang menjawab permasalahan pola distribusi pangan, kecukupan konsumsi pangan sesuai jumlah kalori perkapita, pemenuhan skor pola pangan harapan dan mempercepat akses pangan.
- 3. Konsep Keterpaduan Pangan yang menjawab permasalahan sektoral penanganan pangan, keterpaduan tugas dan fungsi penyediaan, ketersediaan, kecukupan, keterjangkauan & pengawasan pangan.
- 4. Konsep keterpaduan sasaran bahwa lokasi pilot project yang ditentukan adalah prioritas Rawan Pangan yang bersinggungan dengan daerah kemiskinan ekstrim, stunting, desa tertinggal dan lainnya Inovasi dibuat sebagai upaya intervensi terhadap permasalahan yang ditemui, dimana pada tahun 2022 daerah rawan pangan di Sulawesi Tengah meningkat agak signifikan.

Lokasi yang menjadi sasaran Inovasi yaitu desa-desa yang berada di (tiga) kabupaten yang memiliki kecamatan dan desa rawan pangan Prioritas I (sangat rentan) dan Prioritas II (rentan) berdasarkan FSVA, Desa yang ditentukan juga merupakan daerah yang memiliki tingkat kemiskinan ekstrim tinggi atau presentase pada Desil 1 yang tinggi. Penentuan desa pilot project diusulkan oleh kabupaten dengan hasil analisis peta FSVA.

3) PADUNGKU (Padat Karya Untuk Angka Kemiskinan Ekstrem Turun)

Inovasi PADUNGKU (Padat Karya Untuk Angka Kemiskinan Ekstrem Turun) diinisiasi oleh Dinas Cipta Karya dan Sumberdaya Air (CIKASDA) Provinsi Sulawesi Tengah bertujuan untuk menurunkan Angka Kemiskinan Ekstrem di Daerah Irigasi Provinsi Sulawesi Tengah. Inovasi PADUNGKU telah berjalan sejak awal tahun 2021, dengan 3 (tiga) tahapan sebagai berikut.

1. Perolehan dan verifikasi data masyarakat miskin ekstrem



- 2. Kegiatan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dalam bentuk Swakelola Padat Karya yang dilakukan oleh kelompok petani/ Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A)
- 3. Kegiatan Padat Karya melibatkan masyarakat yang masuk kategori miskin ekstrem dengan memberikan upah di atas nilai minimum.

Inovasi PADUNGKU telah dilaksanakan di Kabupaten Poso pada Daerah Irigasi Puna Kiri yang melayani 4 desa yaitu: Kasiguncu, Pantangolemba, Saatu dan Masani. Inovasi ini dilaksanakan dengan memberdayakan masyarakat miskin ekstrem di lokasi tersebut. Dalam kurun waktu 2 tahun (2021-2022) inovasi PADUNGKU telah melibatkan 44 orang kategori masyarakat miskin ekstrem artinya mengurangi jumlah masyarakat miskin ekstrem 34,11% dari jumlah total 129 masyarakat miskin ekstrem yang tersebar di 4 desa tersebut. Target pencapaian inovasi pada tahun 2023-2025 adalah 75 % penurunan masyarakat miskin ekstrem yang diintervensi dan direplikasi ke Daerah Irigasi lainnya di Provinsi Sulawesi Tengah dengan kolaborasi dari seluruh elemen baik internal maupun eksternal.

Latar belakang dan Tujuan

Provinsi Sulawesi Tengah memiliki luas wilayah 61.605 km2 dengan jumlah penduduk 3.066.143 jiwa diantaranya terdapat masyarakat miskin dengan jumlah 389.710 jiwa (BPS, 2022) atau sekitar 12,71%. Dari jumlah tersebut terdapat masyarakat miskin ekstrem sebanyak 95.020 jiwa atau 3,02%. Angka tersebut masih berada diatas rata-rata nasional yaitu 2,04% (Kemenko PMK,2022). Kemiskinan Ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi dan layanan sosial. Menurut BPS, masyarakat dikategorikan miskin ekstrem ketika pengeluaran per bulannya berada di bawah Rp 530.251/bulan (BPS, 2022).

Berangkat dari masalah tersebut Inovator memandang perlu membuat Inovasi PADUNGKU "PADAT KARYA UNTUK ANGKA KEMISKINAN EKSTREM TURUN", yaitu pemberdayaan masyarakat miskin ekstrem pada kegiatan padat karya. Harapannya, dapat meningkatkan pendapatan sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan ekstrem. Istilah PADUNGKU



berasal dari Kabupaten Poso yaitu masyarakat mengadakan perayaan setelah panen padi sebagai rasa syukur dan hasilnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inovasi PADUNGKU mulai diterapkan di Kabupaten Poso khususnya pada Daerah Irigasi Puna Kiri yang melayani 4 desa yaitu Kasiguncu, Pantangolemba, Saatu, dan Masani.

Program swakelola padat karya dilaksanakan pada pemeliharaan jaringan irigasi, dan telah berjalan sejak tahun 2018 dengan melibatkan masyarakat Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) dan berimplikasi pada kondisi jaringan irigasi yang terpelihara dengan baik. Pada tahun 2021, pelibatan masyarakat diutamakan kepada masyarakat miskin ekstrem, sehingga dapat meningkatkan pendapatan mereka. Kegiatan padat karya ini dibiayai oleh APBD Provinsi Sulawesi Tengah yang meliputi kegiatan pembersihan saluran irigasi, galian sedimen, dan perbaikan jaringan irigasi. Inovasi PADUNGKU telah melibatkan 44 orang kategori masyarakat miskin ekstrem atau sebesar 34,11% dari jumlah total 129 orang di 4 desa pada rentang tahun 2021-2022. Penyelenggaraan Inovasi PADUNGKU selanjutnya bertujuan menurunkan angka kemiskinan ekstem hingga 75% pada rentang waktu pelaksanaan 2023-2025 dengan sasaran masyarakat miskin ekstrem di daerah irigasi lainnya di Provinsi Sulawesi Tengah.

4) Petani Milenial

Posisi geografis Sulawesi Tengah yang berada pada garis katulistiwa memiliki keistimewaan tersendiri dalam memberikan kesuburan pada sebagian besar tanahnya. Sulawesi Tengah dikaruniai suhu yang relatif konstan dan curah hujan yang cukup yang cocok untuk pertanian.

Sayangnya, potensi besar ini berada di tengah-tengah ironi karena daerah ini menghadapi krisis talenta pertanian. Sektor pertanian dan perkebunan merupakan kontributor tertinggi dalam penyerapan tenaga kerja, yaitu 40,58% dari 1.547,17 ribu populasi yang bekerja Sulawesi Tengah. Namun, demografi petani saat ini sebagian besar didominasi oleh kelompok usia 40 hingga 60 tahun, dengan jumlah petani yang berusia 20 hingga 30 tahun terus menyusut. Fenomena ini menyoroti menuanya masyarakat agraris di Sulawesi Tengah.



Menyikapi permasalahan tersebut diatas maka di gagasan Program petani milenial yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah ditujukan khusus untuk mendorong regenerasi petani di Sulawesi Tengah dengan memanfaatkan lahan-lahan tidak produktif, menerapkan teknologi tepat guna serta menumbuhkan wirausahawan muda di sektor pertanian yang mandiri dan berkelanjutan. Adapun tujuan dari program petani milenial, diantaranya: 1) Mengurangi permasalahan ketersediaan tenaga kerja pertanian di Sulawesi Tengah; 2) Mengubah usaha pertanian menjadi menantang sehingga akan banyak generasi milenial yang tertarik bergelut di sektor pertanian; 3) Menggunakan pemanfaatan teknologi yang dapat menghasilkan produk pertanian berkualitas dan mampu berdaya saing; 4) Menumbuhkembangkan kewirausahaan muda pertanian di Sulawesi Tengah; 5) Menciptakan pertanian maju, mandiri dan modern.

Program Petani Milenial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2030 bersifat komprehensif dari hulu ke hilir. Adapun sektor sektor yang termasuk dalam lingkup Petani Milenial adalah lingkup perikanan, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan pertanian. Setiap bidang tersebut memiliki peran masing-masing dalam meningkatkan ketahanan pangan di Provinsi Sulawesi Tengah, seperti sektor pertanian dan peternakan yang memproduksi bahan tanaman pangan dan hortikultura serta protein hewani sebagai dasar kebutuhan pangan, bidang perikanan yang memproduksi tambahan sumber protein dan nutrisi selain hewan ternak serta sebagai alternatif untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menanggulangi dampak perubahan iklim, bidang perkebunan yang memproduksi bahan komplementer dan berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta bidang kehutanan yang berperan sebagai sumber tambahan untuk sistem produksi pangan melalui usaha wanatani atau agroforestry. Dalam pelaksanaan program petani milenial di Sulawesi Tengah, terdapat beberapa perangkat daerah dan swasta yang menjadi pelaksana utama yaitu, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pangan, Dinas Kehutanan, dan Dinas Perkebunan dan Peternakan, Bank Pembangunan Sulteng. Selain pelaksana utama program petani milenial juga didukung oleh perangkat daerah lainnya.



5) Desa Cerdas (Smart Village)

Perkembangan teknologi saat ini memberikan kemudahan melaksanakan aktivitas sehari-hari dalam berbagai kegiatan, baik dalam lingkup masyarakat di desa atau di kota, dunia usaha, pendidikan, maupun Pemerintahan. Hadirnya teknologi juga dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang seperti pertanian, perkebunan, hasil tambang, dan lainnya. Melalui pemanfaatan teknologi dalam berbagai pembangunan desa, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah membangun program smart village untuk mewujudkan desa mandiri, maju dan sejahtera di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah yang mendukung Visi "GERAK CEPAT MENUJU SULAWESI TENGAH LEBIH SEJAHTERA DAN LEBIH MAJU" dalam Misi "Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan penguatan kelembagaan dan menjalankan pembangunan masyarakat dan wilayah yang merata serta berkeadilan", sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021–2026. Dalam upaya mewujudkan desa mandiri, maju dan sejahtera dalam program smart village, pemanfaatan teknologi digunakan sebagai tools untuk memonitoring dan mengetahui capaian tingkat kemajuan Desa dan juga dapat mendukung berbagai program kegiatan sebagai langkah pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam melakukan pengawasan, perumusan, dan mengevaluasi berbagai kegiatan dengan tujuan meningkatkan kemandirian, kesejahteraan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Desa.

Pelaksanaan smart village dimaksudkan sebagai perwujudan peran pemerintah Provinsi dan Kabupaten dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan proses pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa yang dilakukan agar lebih baik, partisipatif, terkendali dan akuntabel, dengan dukungan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang meliputi perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia. Selain itu, desa sebagai unit dari bagian pemerintahan dalam struktur pemerintahan juga memerlukan pembaruan dan adopsi terhadap perkembangan teknologi informasi, sehingga dengan menerapkan teknologi informasi akan mendorong percepatan



pembangunan. Adapun tujuan pelaksanaan smart village adalah untuk meningkatkan pelayanan publik bagi masyarkat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum, membentuk pemerintahan desa yang professional, efisien, efektif, terbuka dan bertanggung jawab serta memajukan perekonomian masyarakat desa melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Dampak pelaksanaan program ini diharapkan terjadinya transformasi pemanfaatan teknologi digital dalam upaya mendorong peningkatan kualitas layanan dasar serta pembangunan desa berbasis pemberdayaan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan serta diharapkan sasaran pelaksanaan program ini dapat menjadi desa percontohan dan dilanjutkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten melalui program serupa. Adapun dampak yang diharapkan yaitu :

Peningkatan konektivitas dan akses internet yang lebih inklusif;

Akses layanan dasar yang lebih baik;

Pemberdayaan masyarakat dalam pemecahan masalah lokal desa;

Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa; dan

Peningkatan Pelayanan Publik kepada masyarakat desa.

6) Inovasi Desa Siap Gencar Aman Stunting Provinsi Sulawesi Tengah

Permasalahan stunting telah menjadi prioritas nasional berdasarkan Perpres No. 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 menunjukkan angka stunting di Indonesia sebesar 24,40 persen dan masih masuk dalam kategori Negara dengan angka Stunting tinggi. Secara khusus, Sulawesi Tengah masuk dalam 8 (delapan) besar provinsi di Indonesia yang memiliki prevalensi stunting yang tertinggi. Berdasarkan data SSGI tahun 2021, prevalensi stunting di Sulawesi Tengah berada pada angka 29,70 persen dan kondisi anak kurus berada pada angka 9,4 persen dan masuk pada kategori masalah gizi masyarakat yang akut dan kronis. Berdasarkan data Pendataan Keluarga tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), terdapat 270.623 keluarga di Provinsi Sulawesi Tengah yang beresiko stunting



dimana terdapat 46.120 keluarga dan 106.012 keluarga yang tidak memiliki sumber air minum dan jamban yang layak, secara berturut-turut.

Dalam sudut pandang ekonomi, stunting dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kemiskinan dan memperlebar ketimpangan. Catatan Bank Dunia (2016) menyatakan bahwa dalam jangka panjang stunting dapat menimbulkan kerugian ekonomi sebesar 2-3% dari produk domestik bruto (PDB) per tahun. Jika PDB Indonesia sebesar Rp13.000 triliun, diperkirakan potensi kerugian akibat stunting dapat mencapai Rp260 triliun-390 triliun per tahun.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah melaksanakan berbagai upaya percepatan penurunan stunting, namun belum memberikan hasil maksimal. Permasalahan tersebut diantaranya terkait dengan belum terintegrasinya berbagai program antar perangkat daerah, lembaga kementerian serta pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan terlaksananya konvergensi seluruh program/kegiatan terkait stunting. Penyelenggaraan intervensi gizi spesifik dan sensitif masih belum terpadu, baik dari proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, maupun evaluasi. Berangkat dari latar belakang tersebut, diperlukan upaya yang lebih keras dan inovatif. Upaya-upaya ini juga dilakukan dengan mengingat target yang tertuang dalam RPJMD Sulawesi Tengah tahun 2021-2026 adalah sangat optimis yaitu Sulawesi Tengah menurunkan angka stunting pada tahun 2024 sebesar 13 persen dan pada tahun 2026 sebesar 8,0 persen berbanding lurus dengan angka kemiskinan sebesar 7,90 persen.

Dalam rangka percepatan penurunan stunting, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berinisiasi membuat sebuah program kreatif yang dinamakan Desa Pilot Project Siap Gencar dan Aman Stunting. Pelaksanaan program ini merupakan bagian dari fungsi pemerintah provinsi Sulawesi Tengah untuk melaksanakan fasilitasi dan supervisi serta pembinaan dan pengawasan penerapan 8 (delapan) aksi integrasi baik intervensi gizi spesifik maupun sensitif bagi keluarga sasaran prioritas. Program ini ingin didesain sebagai role model atau best practice bagi desadesa lainnya di Sulawesi Tengah dalam upaya menurunkan stunting lebih cepat dan efektif. Ide konvergensi dengan keterpaduan akan dibuat



dalam bentuk perlakuan (intervensi) yang akan diberikan pada desa pilot project.

Inovasi Siap Gencar dan Aman Stunting ini relevan dalam mendukung pencapaian tema RKP Tahun 2023 yaitu "Penguatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Inovasi ini pada dasarnya juga berupaya untuk mengintegrasikan penurunan stunting

Ruang Lingkup Inovasi

Ruang lingkup inovasi Desa Pilot Project Siap Gencar dan Aman Stunting meliputi intervensi spesifik dan sensitif sesuai dengan 8 Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting dengan melibatkan multi stakeholder. Lokus pelaksanaan inovasi adalah desa yang memiliki prevalensi dan jumlah kasus stunting serta memiliki jumlah rumah tangga miskin ekstrem yang besar berdasarkan DTKS Tahun 2022.

Tujuan dan Sasaran

Inovasi Desa Pilot Project Siap Gencar dan Aman Stunting bertujuan untuk memastikan terjadinya konvergensi program dan penganggaran terkait pencegahan anak kerdil (stunting) terutama untuk meningkatkan cakupan dan kualitas intervensi spesifik dan intervensi sensitif pada kelompok sasaran yang terdiri atas ibu hamil, ibu menyusui, anak berusia 0-59 bulan, calon pengantin dan remaja yang berada dalam rumah tangga 1000 HPK.

4.5 Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pembangunan Menyusun Rencana Kerja dan Daerah dalam implementasinya harus mempertimbangkan aspek politis dan bottom up yang bersifat lebih aspiratif melalui rumusan pokok – pokok pikiran DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan Pasal 78 dan Pasal 178 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa penyusunan **DPRD** Rancangan RKPD, memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD, dan Pokok-pokok pikiran DPRD, dimasukkan kedalam e-planning bagi Daerah yang telah memiliki SIPD.



pokok Pokok pikiran DPRD disampaikan melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan secara tertulis disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Usulan Program yang dituangkan dalam pokok pokok pikiran DPRD disesuaikan dengan Bidang urusan yang menjadi kewenangan Provinsi untuk selanjutnya diintegrasikan dengan program kegiatan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah.



BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN / KOTA

Pembangunan wilayah bertujuan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan. Kebijakan pembangunan kewilayahan didasarkan pada kondisi wilayaah, faktor social dan ekonomi yang ada di Kabupaten/Kota masing-masing. Kebijakan kewilayahan ini merupakan keterpaduan pembangunan antar sector guna menciptakan daya saing daerah, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara umum arah kebijakan pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021-2026 dan peraturan daerah nomor 1 tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023-2042, maka arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah untuk tahun 2025 dilaksanakan dengan berbasis pada klaster perwilayahan sebagai berikut, yaitu:

- a. **Klaster Perkotaan Pasigala** meliputi Kota Palu, Kabupaten Donggala, dan Kabupaten Sigi;
- b. Klaster Agropolitan yaitu Agropolitan Bolipamuso dan Agropolitan Kawasan Pangan Nusantara. Agropolitan Bolipamuso meliputi Kabupaten Buol, Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Parigi Moutong, dan Kabupaten Poso; Agropolitan Kawasan Pangan Nusantara meliputi Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, Kabupaten Parigi Moutong, dan Kabupaten Tolitoli;
- c. **Klaster Industri Morubang** meliputi sebagian Kabupaten Banggai, Kabupaten Morowali, Kabupaten Morowali Utara; dan
- d. **Klaster Wisata Bahari dan Perikanan Balatoju** meliputi sebagian Kabupaten Bangai, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut, dan Kabupaten Tojo Una-Una.

Pembangunan dan peningkatan wilayah Kabupaten/Kota tersebut dapat ditempuh melalui: Peningkatan pembangunan wilayah potensi ekonomi tinggi melalui optimalisasi pemanfaatan infrastruktur yang ada, termasuk pemanfaatan potensi ketersediaan energi, terutama dengan teknologi rendah karbon sesuai karakteristik Sulawesi Tengah. Serta Menjaga ketersediaan infrastruktur dan energi yang terintegrasi, berkualitas dan berkelanjutan di wilayah Sulawesi Tengah dengan tata



Kelola kelembagaan yang andal untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan pelayanan dasar yang berkualitas.

1. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah PASIGALA (Kota Palu, Kabupaten Donggala dan Kabupaten Sigi)

Arahan konsep pengembangan perkotaan Pasigala adalah sebagai berikut:

- Pembatasan Pengembangan kawasan budidaya di kawasan rawan bencana tinggi dan sangat tinggi;
- Pengembangan kawasan pemukiman penyangga disebagian Kabupaten Sigi dan sebagian Kabupaten Donggala;
- Peningkatan sistem jaringan regional pada kawasan rawan bencana rendah dan kawasan bencana sedang;
- Peningkatan sistem jaringan pergerakan regional;
- Pengembangan kota palu sebagai kota taman bumi atau Palu Geoprak city dengan fungasi utama perdagangan, jasa dan industri, pendidikan dan riset kebencanaan, unggulan pariwisata berbasis geowisata dengan mitigasi bencana (Ripparkot Palu);
- Pengembangan sarana dan parasarana pemukiman regional di Kabupaten Donggala;
- Pengembangan jaringan sumberdaya air sebagai pengurangan resiko bencana likuifaksi;





Gambar 5.1 Kota Palu di Klaster Perkotaan Pasigala

KOTA PALU

PENUNJANG EKONOMI IKN DAN INDUSTRI BERBASIS SDA Perdagangan dan Jasa:

 Hulu-hilir hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, hutan produksi, layanan pariwisata.

Klaster Perkotaan
PASIGALA
Kota Palu
Kabupaten Donggala

Kabupaten Sigi

WILAYAH YANG HIJAU, EKOLOGIS, dan PRODUKTIF

- · Penerapan ekonomi hijau, ekonomi biru, dan bioekonomi
- Pengembangan sebagai Kota Tangguh, Kota Pintar, Kota Taman Bumi (Geopark City): konservasi kawasan rawan bencana, edukasi, inovasi ekonomi masyarakat yang terintegrasi dengan Geopark PASIGALA
- Penerapan Mitigasi Bencana berbasis masyarakat dan sekolah
- · Penggunaan energi terbarukan untuk produksi dan rumah tangga.
- Pengembangan transportasi publik ramah lingkungan Kota Palu terintegrasi dengan transportasi publik Klaster Perkotaan PASIGALA.
- Peningkatan rasio RTH, kualitas kawasan lindung, kelestarian hutan.
- · Pengelolaan pekarangan dengan tanaman produktif (hortikultura)
- · Peremajaan Pohon Kelapa di Wilayah Pesisir
- Pengembangan perumahan dan permukiman hijau dan tahan gempa
- · Pengelolaan dan pengolahan sampah berkelanjutan.
- Kontribusi pada pengurangan dampak climate change dan ERK.

KOTA PALU sebagai PUSAT PERDAGANGAN DAN JASA EKONOMI GLOBAL KTI

 Tuntas pelayanan dasar, peningkatan kualitas SDM (sehat-profesional)

Pengembangan:

- · Konektifitas, infrastruktur, sarana prasarana
- Metropolitan PASIGALA
- Produktivitas KEK PALU, Ekraf, dan UMKM Sertifikat ISO
- · Layanan kesehatan, dan RS bertaraf internasional.
- Lavanan jasa pendidikan bertaraf internasional
- Perdagangan dan jasa global
- Kerjasama riset pariwisata, kebumian dan kebencanaan bertaraf internasional
- Sekolah tinggi/vokasi pariwisata dan mitigasi bencana
- · Layanan jasa pariwisata PASIGALA skala global

ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH KOTA PALU DI KLASTER PERKOTAAN PASIGALA UNTUK INDONESIA EMAS 2045

Gambar 5.2 Arah Kebijakan Kota Palu di Klaster Perkotaan Pasigala

PERKOTAAN KAB. DONGGALA

PENUNJANG EKONOMI IKN DAN INDUSTRI BERBASIS SDA

Perdagangan dan Jasa:

 Hulu-hilir hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelauthutan produksi, layanan pariwisata.

WILAYAHYANG HIJAU, EKOLOGIS, dan PRODUKT

- Penerapan ekonomi hijau dan bioekonomi
- Pengembangan sebagai Kota Tangguh, Kota Pintar, Sunset City, Kota Taman Bumi (Geopark City): konservasi kawasan rawan bencana, edukasi, inovasi ekonomi masyarakat terintegrasi dengan geowisata Geopark PASIGALA
- Penerapan Mitigasi Bencana berbasis masyarakat dan sekolah
- · Penggunaan energi terbarukan untuk produksi dan rumah tangga
- Pengembangan transportasi publik ramah lingkungan Kabupaten Donggala terintegrasi transportasi publik Klaster Perkotaan PASIGALA.
- · Peningkatan rasio RTH, kualitas kawasan lindung, kelestarian hutan.
- Pengelolaan pekarangan dengan tanaman produktif
- Peremajaan Pohon Kelapa di Wilayah Pesisir
- · Pengembangan perumahan dan permukiman hijau dan tahan gempa
- · Pengelolaan dan pengolahan sampah berkelanjutan.
- Kontribusi pada pengurangan dampak climate change dan ERK.



PERKOTAAN KAB. DONGGALA sebagai PUSAT PERDAGANGAN-JASA EKONOMI GLOBAL KTI

 Tuntas pelayanan dasar, peningkatan kualitas SDM (sehat-profesional)

Pengembangan:

- Konektifitas, infrastruktur, sarana prasarana
- Metropolitan PASIGALA
- Produktivitas Ekraf, dan UMKM Sertifikat ISO
- · Layanan kesehatan, dan RS bertaraf internasional.
- · Layanan jasa pendidikan bertaraf internasional
- Perdagangan dan jasa global
- Kerjasama riset komoditas kelapa dan kakao, perdagangan internasional, dan jasa lingkungan
- · Sekolah Tinggi/Vokasi perkebunan dan Jasa Lingkungan
- Layanan jasa pariwisata PASIGALA skala global

ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH KABUPATEN DONGGALA DI KLASTER PERKOTAAN PASIGALA UNTUK INDONESIA EMAS 2045

Gambar 5.3 Arah Kebijakan Kabupaten Donggala di Klaster Perkotaan Pasigala



PERDESAAN KAB.DONGGALA

PENUNJANG EKONOMI IKN DAN INDUSTRI BERBASIS SDA

Suplai:

 Hulu-hilir hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan darat hutan produksi, layanan pariwisata.

WILAYAH YANG HIJAU, EKOLOGIS, dan PRODUKTIF

- Penerapan ekonomi hijau dan bioekonom
- Pengembangan Taman Bumi Geopork PASIGALA terintegrasi: konservasi kawasan rawan bencana, edukasi, inovasi ekonomi
- Penerapan Mitigasi Bencana berbasis masyarakat dan sekolah
- Penggunaan energi terbarukan untuk produksi dan rumah tangga.
- Pengembangan transportasi publik ramah lingkungan Kabupaten Donggala terintegrasi dengan transportasi publik Klaster Perkotaan PASIGALA dan Agropolitan KPN.
- · Peningkatan rasio RTH, kualitas kawasan lindung, kelestarian hutan.
- Pengelolaan pekarangan dengan tanaman produktif
- · Peremajaan Pohon Kelapa di Wilayah Pesisir
- Penataan Permukiman Petani & Nelayan yang hijau dan tahan gempa
- Pengelolaan dan pengolahan sampah berkelanjutan.
- Kontribusi pada pengurangan dampak climate change dan ERK.





PERDESAAN KAB. DONGGALA PUSAT AGRIBISNIS-AGROINDUSTRI-PARIWISATA KTI

 Tuntas pelayanan dasar, peningkatan kualitas SDM (sehat-profesional)

Pengembangan:

- Kawasan Agropolitan dengan pengembangan hulu-hilir produk-produk pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan
- Korporasi Petani, UMKM, dan Ekonomi Kreatif
- Peningkatan aksesibilitas jalur Agropolitan KPN
- Infrastruktur dan sarana pendukung agropolitan
- * Pariwisata terintegrasi Agropolitan KPN dan PASIGALA
- · Sekolah tinggi/sekolah vokasi pertanian
- Kerjasama riset dan investasi pengembangan agropolitan

ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH KABUPATEN DONGGALA DI KLASTER AGROPOLITAN KAWASAN PANGAN NUSANTARA UNTUK INDONESIA EMAS 2045

Gambar 5.4
Arah Kebijakan Kabupaten Donggala di Klaster Kawasan Pangan Nusantara

MASTERPLAN KOTA BARU DONGGALA MEMBUAT KONSEP DETAIL

TENTANG SUNSET CITY DALAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN DONGGALA

KONSEP UTAMA: PARIWISATA WILAYAH YANG HIJAU, EKOLOGIS, dan PRODUKTIF

- Pengembangan sebagai Kota Tangguh, Kota Pintar, Sunset City, Kota Taman Bumi (Geopark City): konservasi kawasan rawan bencana, edukasi, inovasi ekonomi masyarakat terintegrasi dengan geowisata Geopark PASIGALA
- · Penerapan Mitigasi Bencana berbasis masyarakat dan sekolah
- · Penggunaan energi terbarukan
- Pengembangan transportasi publik ramah lingkungan Kabupaten Donggala terintegrasi transportasi publik Klaster Perkotaan PASIGALA.
- · Peningkatan rasio RTH, kualitas kawasan lindung, kelestarian hutan.
- Pengelolaan pekarangan dengan tanaman produktif
- Peremajaan Pohon Kelapa di Wilayah Pesisir
- · Pengembangan perumahan dan permukiman hijau dan tahan gempa
- Pengelolaan dan pengolahan sampah berkelanjutan.
- · Kontribusi pada pengurangan dampak climate change dan ERK.

Gambar 5.5 Masterplan Kota Baru Donggala



KABUPATEN SIGI PERKOTAAN KABUPATEN SIGI

PENUNJANG EKONOMI IKN DAN INDUSTRI BERBASIS SDA Perdagangan dan Jasa:

 Hulu-hilir hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan darat hutan produksi, layanan pariwisata.

WILAYAH YANG HIJAU, EKOLOGIS, dan PRODUKTIF

- · Penerapan ekonomi hijau dan bioekonomi
- Pengembangan sebagai Kota Tangguh, Kota Pintar, Kota Taman Bumi (Geopark City): konservasi kawasan rawan bencana, edukasi, inovasi ekonomi masyarakat yang terintegrasi dengan Geopark PASIGALA
- Penerapan Mitigasi Bencana berbasis masyarakat dan sekolah
- · Penggunaan energi terbarukan untuk produksi dan rumah tangga.
- Pengembangan transportasi publik ramah lingkungan Kabupaten Sigi terintegrasi dengan transportasi publik Klaster Perkotaan PASIGALA.
- · Peningkatan rasio RTH, kualitas kawasan lindung, kelestarian hutan.
- · Pengelolaan pekarangan dengan tanaman produktif (hortikultura)
- · Penataan lingkungan perkotaan
- Pengembangan perumahan dan permukiman hijau dan tahan gempa
- · Pengelolaan dan pengolahan sampah berkelanjutan.
- Kontribusi pada pengurangan dampak climate change dan ERK.



PERKOTAAN KAB.SIGI sebagai PUSAT PERDAGANGAN DAN JASA EKONOMI GLOBAL KTI

 Tuntas pelayanan dasar, peningkatan kualitas SDM (sehat-profesional)

Pengembangan:

- · Konektifitas, infrastruktur, sarana prasarana
- · Metropolitan PASIGALA
- Produktivitas Ekraf, dan UMKM Sertifikat ISO
- · Layanan kesehatan, dan RS bertaraf internasional.
- · Layanan jasa pendidikan bertaraf internasional
- Perdagangan dan jasa global
- Kerjasama riset agribisnis, agroindustri, perdagangan internasional, dan jasa lingkungan
- Sekolah Tinggi/Vokasi Pertanian dan Jasa Lingkungan
- · Layanan jasa pariwisata PASIGALA skala global

ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH KABUPATEN SIGI
DI KLASTER PERKOTAAN PASIGALA UNTUK INDONESIA EMAS 2045

Gambar 5.6 Arah Kebijakan Kabupaten Sigi di Klaster Perkotaan Pasigala

KABUPATEN SIGI

PERDESAAN KABUPATEN SIGI

PENUNJANG EKONOMI IKN DAN INDUSTRI BERBASIS SDA Suplai:

 Hulu-hilir hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan darat hutan produksi, layanan pariwisata.



WILAYAH YANG HIJAU, EKOLOGIS, dan PRODUKTIF

- · Penerapan ekonomi hijau dan bioekonomi
- Pengembangan Taman Bumi Geopark PASIGALA terintegrasi: konservasi kawasan rawan bencana, edukasi, inovasi ekonomi
- Penerapan Mitigasi Bencana berbasis masyarakat dan sekolah
- Penggunaan energi terbarukan untuk produksi dan rumah tangga.
- Pengembangan transportasi publik ramah lingkungan Kabupaten Sigi terintegrasi dengan transportasi publik Klaster Perkotaan PASIGALA dan Agropolitan KPN.
- Peningkatan rasio RTH, kualitas kawasan lindung, kelestarian hutan.
- Pengelolaan pekarangan dengan tanaman produktif (hortikultura)
- Pengembangan desa wisata berbasis agribisnis
- Penataan Kawasan Permukiman Petani yang hijau dan tahan gempa
- Pengelolaan dan pengolahan sampah berkelanjutan.
- Kontribusi pada pengurangan dampak climate change dan ERK.

PERDESAAN KAB.SIGI PUSAT AGRIBISNIS -

AGROINDUSTRI-PARIWISATA KTI

 Tuntas pelayanan dasar, peningkatan kualitas SDM (sehat-profesional)

Pengembangan:

- Kawasan Agropolitan dengan pengembangan hulu-hilir produk-produk pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan darat.
- Korporasi Petani, UMKM, dan Ekonomi Kreatif
- Peningkatan aksesibilitas jalur Agropolitan KPN
- Infrastruktur dan sarana pendukung agropolitan
- Pariwisata terintegrasi Agropolitan KPN dan PASIGALA
- Sekolah tinggi/sekolah vokasi pertanian
- Kerjasama riset dan investasi pengembangan agropolitan

ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH KABUPATEN SIGI DI KLASTER
AGROPOLITAN KAWASAN PANGAN NUSANTARA UNTUK INDONESIA EMAS 2045

Gambar 5.7 Arah Kebijakan Kabupaten Sigi di Klaster Argopolitan Kawasan Pangan Nusantara



2. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Klaster Agropolitan Bolipamuso dan KPN

Arahan konsep pengembangan Wilayah Klaster Agropilitas dan KPN adalah sebagai berikut:

- Hulu pengembangan pertanian berada di Kabupaten Buol, Kabupaten Tolitoli, sebagian Kabupaten Sigi, sebagian Kabupaten Parigi Moutong, dan sebagian Kabupaten Donggala;
- Hilir produksi pertanian berupa pengolahan hasil pertanian, perkebunan dan perikanan serta pemasaran berada di pusat kegiatan yaitu: (1) Parigi Moutong sebagai agroindustri; dan Poso sebagai sentra agribisnis dan sentra agrowisata.
- Peningkatan aksesibilitas jalur Agropolitan Bolipamuso dan Agropolitan Kawasan Pangan Nusantara;
- Pengembangan infrastruktur pendukung agropolitan, agroindustri, agribisnis dan agrowisata.
- Percepatan pengembangan Kawasan Pangan Nusantara di Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Tolitoli



Gambar 5.8 Kabupaten Buol di Klaster Argopolitan Bolipamuso



KABUPATEN BUOL

PENUNJANG EKONOMI IKN DAN INDUSTRI BERBASIS SDA Suplai:

 Hulu-hilir hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, hutan produksi, dan layanan pariwisata.

WILAYAH YANG HIJAU, EKOLOGIS, dan PRODUKTIF

- · Penerapan ekonomi hijau, ekonomi biru,dan bioekonomi
- · Penerapan Mitigasi Bencana berbasis masyarakat dan sekolah
- Pengembangan Kota Hijau di Ibukota Kabupaten dan Kecamatan
- · Penggunaan energi terbarukan untuk produksi dan rumah tangga.
- Pengembangan transportasi publik ramah lingkungan Kabupaten Buol terintegrasi dengan transportasi publik Agropolitan BOLIPAMUSO
- Peningkatan rasio RTH, kualitas kawasan lindung, kelestarian hutan, dan mengembangkan hutan produksi.
- Pengelolaan pekarangan dengan tanaman produktif (hortikultura)
- · Peremajaan Pohon Kelapa di Wilayah Pesisir
- · Pengelolaan dan pengolahan sampah berkelanjutan.
- Kontribusi pada pengurangan dampak climate change dan ERK.

Klaster
AGROPOLITAN
BOLIPAMUSO
Kabupaten Buol
Kabupaten Tolitoli
Kabupaten Parigl Moutong

PUSAT AGRIBISNIS-AGROINDUSTRI-PARIWISATA KTI

Peningkatan:

- Pelayanan dasar
- · Peningkatan Kualitas SDM (sehat-professional)

Pengembangan:

- Kawasan Agropolitan dengan pengembangan hulu-hilir produk-produk pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan.
- Korporasi Petani, UMKM dan Ekonomi Kreatif
- Peningkatan aksesibilitas jalur Agropolitan Bolipamuso dan Agropolitan KPN
- Infrastruktur dan sarana pendukung agropolitan
- Pariwisata terintegrasi Agropolitan BOLIPAMUSO
- · Sekolah vokasi pertanian, agribisnis dan peternakan
- Kerjasama riset dan investasi pengembangan agropolitan

ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH **KABUPATEN BUOL SULTENG** <mark>DI KLASTER AGROPOLITAN BOLIPAMUSO</mark> UNTUK INDONESIA EMAS 2045

Gambar 5.9 Arah Kebijakan Kabupaten Buol di Klaster Argopolitan Bolipamuso

5. KABUPATEN TOLITOLI PATEN TOLITOLI TERLETAK DI KLASTER AGROPOLITAN BOLIPAMUSO DAN AGROPOLITAN KPN 4. Klaster Wisata Bahari KLASTER PERWILAYAHAN dan Perikanan BALATOJU PROVINSI SULAWESI TENGAH Klaster Perkotaan PASIGALA Klaster AGROPOLITAN 1. Agropolitan Bolipamuso 2. Klaster AGROPOLITAN (Kab Buol-Kab Tolitoli-Kab Parimo-Kab Pose 1. Agropolitan Bolipamuso 2. Agropolitan Kawasan 2. Agropolitan Pangan Nusantara (KPN) Kawasan Pangan Nusantara (K 3. Klaster Industri MORUBANG PENGEMBANGAN KLASTER PERWILAYAHAN SULAWESI TENGAH

UNTUK INDONESIA EMAS 2045

Gambar 5.10 Kabupaten Tolitoli di Klaster Argopolitan Bolipamuso dan Agropolitan KPN



KARUPATEN TOLITOLI





PENUNJANG EKONOMI IKN DAN INDUSTRI BERBASIS SDA Suplai:

 Hulu-hilir hasil pertanian, perkebunan, Peternakan, perikanan dan kelautan, hutan produksi, dan layanan pariwisata.

WILAYAH YANG HIJAU, EKOLOGIS, dan PRODUKTIF

- Penerapan ekonomi hijau, ekonomi biru,dan bioekonomi
- Penerapan Mitigasi Bencana berbasis masyarakat dan sekolah
- · Pengembangan Kota Hijau di Ibukota Kabupaten dan Kecamatan
- Penggunaan energi terbarukan untuk produksi dan rumah tangga.
- Pengembangan transportasi publik ramah lingkungan Kabupaten Tolitoli terintegrasi dengan transportasi publik Agropolitan BOLIPAMUSO dan Agropolitan KPN
- Peningkatan rasio RTH, kualitas kawasan lindung, kelestarian hutan, dan mengembangkan hutan produksi.
- Pengelolaan pekarangan dengan tanaman produktif (hortikultura)
- · Peremajaan Pohon Kelapa di Wilayah Pesisir
- · Peremajaan Pohon Cengkeh
- · Pengelolaan dan pengolahan sampah berkelanjutan.
- · Kontribusi pada pengurangan dampak climate change dan ERK.

PUSAT AGRIBISNIS - AGROINDUSTRI-PARIWISATA KTI

- Peningkatan:
- · Pelayanan dasar
- · Peningkatan Kualitas SDM (sehat-professional)

Pengembangan:

- Kawasan Agropolitan dengan pengembangan hulu-hilir produk-produk pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan.
- . UMKM dan Ekonomi Kreatif
- · Agroindustri Kelapa dan Cengkeh
- Peningkatan aksesibilitas jalur Agropolitan BOLIPAMUSO dan Agropolitan KPN
- Infrastruktur dan sarana pendukung agropolitan
- Pariwisata terintegrasi Agropolitan BOLIPAMUSO dan KPN
- · Sekolah vokasi pertanian, agribisnis dan agroindustri
- Kerjasama riset dan investasi pengembangan agropolitan

ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH KABUPATEN TOLITOLI SULTENG

DI KLASTER AGROPOLITAN BOLIPAMUSO DAN AGROPOLITAN KPN UNTUK INDONESIA EMAS 2045

Gambar 5.11 Arah Kebijakan Kabupaten Tolitoli di Klaster Agropolitan Bolipamuso dan Agropolitan KPN

6. KABUPATEN PARIGI MOUTONG

KABUPATEN PARIGI MOUTONG TERLETAK DI KLASTER AGROPOLITAN BOLIPAMUSO DAN AGROPOLITAN KPN

Klaster AGROPOLITAN

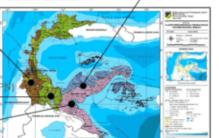
- 1. Agropolitan Bolipamuso (Kab Buol-Kab Tolitoli <u>Kab Parigi Moutong</u>-Kab Poso)
- 2. Agropolitan Kawasan Pangan Nusantara (KPN)

(Kab. Donggala-Kab. Sigi-Kab. **Parigi Moutong** -Kab.Tolitoli)

KLASTER PERWILAYAHAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

4. Klaster Wisata Bahari dan Perikanan BALATOJU

- Klaster Perkotaan PASIGALA
- 2.Klaster AGROPOLITAN
- 1. Agropolitan Bolipamuso
- Agropolitan Kawasan Pangan Nusantara (K
- 3. Klaster Industri MORUBANG



PENGEMBANGAN KLASTER PERWILAYAHAN SULAWESI TENGAH UNTUK INDONESIA EMAS 2045

Gambar 5.12

Kabupaten Parigi Moutong di Klaster Agropolitan Bolipamuso dan Agropolitan KPN





Gambar 5.13 Arah Kebijakan Kabupaten Parigi Moutong di Klaster Agropolitan Bolipamuso dan Agropolitan KPN



Gambar 5.14 Kabupaten Poso di Klaster Agropolitan Bolipamuso



KABUPATEN POSO

PENUNJANG EKONOMI IKN DAN INDUSTRI BERBASIS SDA Suplai:

 Hulu-hilir hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, hutan produksi, dan layanan pariwisata.

Klaster AGROPOLITAN BOLIPAMUSO

Kabupaten Buol Kabupaten Tolitoli Kabupaten Parigl Moutong **Kabupaten Poso**

WILAYAH YANG HIJAU, EKOLOGIS, dan PRODUKTIF

- · Penerapan ekonomi hijau, dan bioekonomi
- Penerapan Mitigasi Bencana berbasis masyarakat dan sekolah
- · Pengembangan Kota Hijau, dan Konservasi Kawasan Rawan Bencana
- Pengembangan Danau Prioritas dan Geopark Danau Poso
- Penggunaan energi terbarukan untuk produksi dan rumah tangga.
- Pengembangan transportasi publik ramah lingkungan Kabupaten Poso terintegrasi dengan transportasi publik Agropolitan BOLIPAMUSO dan Agropolitan KPN
- Peningkatan: rasio RTH, kualitas kawasan lindung, kelestarian hutan, dan pengembangan hutan produksi.
- · Peremajaan Pohon Kelapa di Wilayah Pesisir
- · Pengelolaan pekarangan dengan tanaman produktif (hortikultura)
- Pengembangan Agrowisata Hortikultura Lembah Napu dan sekitarnya
- · Pengelolaan dan pengolahan sampah berkelanjutan.
- Kontribusi pada pengurangan dampak climate change dan ERK.

PUSAT AGRIBISNIS-AGROINDUSTRI-PARIWISATA KTI

Peningkatan:

- · Pelayanan dasar
- Peningkatan Kualitas SDM (sehat-professional)

Pengembangan:

- Kawasan Agropolitan dengan pengembangan hulu-hilir produk-produk pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan.
- · Korporasi Petani, UMKM dan Ekonomi Kreatif
- Agroindustri hasil-hasil pertanian
- Peningkatan aksesibilitas jalur Agropolitan Bolipamuso dan Agropolitan KPN
- · Infrastruktur dan sarana pendukung agropolitan
- Pariwisata terintegrasi Agropolitan BOLIPAMUSO dan KPN
- Sekolah vokasi pertanian, agribisnis dan agroindustri
- Kerjasama riset dan investasi pengembangan agropolitan

ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH KABUPATEN POSO SULTENG

DI KLASTER AGROPOLITAN BOLIPAMUSO UNTUK INDONESIA EMAS f 2045

Gambar 5.15 Arah Kebijakan Kabupaten Poso di Klaster Agropolitan Bolipamuso

3. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Morubang (Morowali, Morowali Utara, dan Banggai)

Arahan konsep pengembangan Wilayah Morubang adalah sebagai berikut:

- Pengembangan kawasan industri memiliki dampak *multiplier efect* terhadap pengembangan permukiman dan pusat kegiatan;
- Hilirisasi perindustrian memerlukan aksesibilitas yang terpadu
- Penggunaan sabuk hijau terhadap pengembangan kawasan budidaya yang berbatasan dengan kawasan lindung
- Pengembangan sempadan pantai; dan
- Pemulihan lahan bekas tambang sebagai kawasan hulu perindustrian tambang.

KABUPATEN MOROWALI

PENUNJANG EKONOMI IKN DAN INDUSTRI BERBASIS SDA

Suplai produk industri berbasis SDA: hasil tambang, hasil hutan produksi, hasil perkebunan; dan layanan pariwisata.

WILAYAH YANG HIJAU, EKOLOGIS, dan PRODUKTIF

- · Penerapan ekonomi hijau dan bioekonomi
- · Penerapan Mitigasi Bencana berbasis masyarakat dan sekolah
- Revitalisasi/Restorasi Eks Kawasan Tambang
- Pengembangan Kota Hijau di Kawasan Industri dan Kawasan Tambang
- · Penggunaan energi terbarukan untuk produksi dan rumah.
- Pengembangan transportasi publik ramah lingkungan Kabupaten Morowali yang terintegrasi dengan transportasi publik MORUBANG dan BALATOJU.
- Peningkatan rasio RTH, kualitas kawasan lindung, kelestarian hutan, dan mengembangkan hutan produksi.
- · Pengelolaan pekarangan dengan tanaman produktif yang anti polusi
- · Peremajaan Pohon Kelapa di Wilayah Pesisir
- Menerapkan pengelolaan dan pengolahan sampah berkelanjutan.
- Kontribusi pada pengurangan dampak climate change dan ERK.

Klaster Industri MORUBANG

- 1. Kabupaten Morowali
- Kabupaten Morowali
 Utara
- Sebagian Kabupaten Banggai

PUSAT PRODUKSI EKONOMI GLOBAL KTI

Peningkatan:

- · Pelayanan dasar
- Peningkatan Kualitas SDM (sehat-professional)
 Pengembangan industri:
- Hilirisasi hasil tambang
- Hilirisasi hasil hutan produksi dan hasil perkebunan Pengembangan:
- · UMKM dan Ekonomi Kreatif
- · Konektifitas, infrastruktur, sarana prasarana
- Layanan kesehatan dan pendidikan taraf internasional
- · Riset pertambangan dan industri berkelanjutan
- · Sekolah vokasi perkebunan dan kehutanan
- · Layanan jasa pariwisata MORUBANG

ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH KABUPATEN MOROWALI DI KLASTER INDUSTRI MORUBANG UNTUK INDONESIA EMAS 2045

Gambar 5.16 Arah Kebijakan Kabupaten Morowali di Klaster Industri Morubang

9. KABUPATEN MOROWALI UTARA

PENGEMBANGAN KLASTER PERWILAYAHAN SULAWESI TENGAH UNTUK INDONESIA EMAS 2045

KLASTER PERWILAYAHAN 4. Klaster Wisata Bahari dan Perikanan BALATOJU PROVINSI SULAWESI TENGAH

- 1. Klaster Perkotaan PASIGALA
- 2. Klaster AGROPOLITAN
 - 1. Agropolitan Bolipamuso
 - Agropolitan Kawasan Pangan Nusantara (K
- 3. Klaster Industri MORUBANG

Klaster Industri MORUBANG

- 1. Kabupaten Morowali
- 2. Kabupaten Morowali Utara
- 3. Sebagian Kabupaten Banggai

The state of the s

KABUPATEN MOROWALI UTARA TERLETAK DI KLASTER INDUSTRI MORUBANG

Gambar 5.17
Kabupaten Morowali Utara di Klaster Industri Morubang



KABUPATEN MOROWALI UTARA

PENUNJANG EKONOMI IKN DAN INDUSTRI BERBASIS SDA

Suplai produk industri berbasis SDA: hasil tambang, hasil hutan produksi, hasil perkebunan; dan layanan pariwisata.

WILAYAH YANG HIJAU, EKOLOGIS, dan PRODUKTIF

- · Penerapan ekonomi hijau, ekonomi biru, dan bioekonomi
- · Penerapan Mitigasi Bencana berbasis masyarakat dan sekolah
- · Revitalisasi/Restorasi Eks Kawasan Tambang
- Pengembangan Kota Hijau di Kawasan Industri dan Kawasan Tambang
- Penggunaan energi terbarukan untuk produksi dan rumah tangga.
- Pengembangan transportasi publik ramah lingkungan Kabupaten Morowali Utara yang terintegrasi dengan transportasi publik MORUBANG dan BALATOJU.
- Peningkatan rasio RTH, kualitas kawasan lindung, kelestarian hutan, dan mengembangkan hutan produksi.
- · Pengelolaan pekarangan dengan tanaman produktif yang anti polusi
- Peremajaan Pohon Kelapa di Wilayah Pesisir
- . Menerapkan pengelolaan dan pengolahan sampah berkelanjutan.
- · Kontribusi pada pengurangan dampak climate change dan ERK.

Klaster Industri MORUBANG

- Kabupaten Morowali
- Kabupaten Morowali Utara
- Sebagian
 Kabupaten Banggai

PUSAT PRODUKSI EKONOMI GLOBAL KTI

Peningkatan:

- · Pelayanan dasar
- Peningkatan Kualitas SDM (sehat-professional)

Pengembangan industri:

- Hilirisasi hasil tambang
- Hilirisasi hasil hutan produksi dan hasil perkebunan Pengembangan:
- · UMKM dan Ekonomi Kreatif
- · Konektifitas, infrastruktur, sarana prasarana
- · Layanan kesehatan dan pendidikan taraf internasional
- Riset tambang dan industri berkelanjutan
- Sekolah vokasi dan pendidikan tinggi pertambangan dan industri
- · Layanan jasa pariwisata MORUBANG

ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH KABUPATEN MOROWALI UTARA DI KLASTER INDUSTRI MORUBANG UNTUK INDONESIA EMAS 2045

Gambar 5.18 Arah Kebijakan Kabupaten Morowali Utara di Klaster Industri Morubang

10. KABUPATEN BANGGAI PENGEMBANGAN KLASTER PERWILAYAHAN SULAWESI TENGAH **UNTUK INDONESIA EMAS 2045** 4. Klaster Wisata Bahari KLASTER PERWILAYAHAN dan Perikanan BALATOJU PROVINSI SULAWESI TENGAH Klaster Wisata Bahari 1. Klaster Perkotaan PASIGALA dan Perikanan BALATOJU 1. Sebagian Kabupaten Banggai 2. Klaster AGROPOLITAN 2. Kabupaten Banggai Kepulauan 1. Agropolitan Bolipamuso 3. Kabupaten Banggai Laut 2. Agropolitan 4. Kabupaten Tojo Una-Una Kawasan Pangan Nusantara (K Klaster Industri MORUBANG Klaster Industri MORUBANG 1. Kabupaten Morowali Kabupaten Morowali Utara **KABUPATEN BANGGAI** TERLETAK DI 2 KLASTER 3. Sebagian Kabupaten Banggai

Gambar 5.19 Kabupaten Banggai di Klaster Industri Morubang dan Klaster Balatoju



KABUPATEN BANGGAI

PENUNJANG EKONOMI IKN DAN INDUSTRI BERBASIS SDA

Suplai produk industri berbasis SDA: hasil tambang, hasil hutan produksi, hasil perkebunan; dan layanan pariwisata.

WILAYAH YANG HIJAU, EKOLOGIS, dan PRODUKTIF

- · Penerapan ekonomi hijau
- · Penerapan Mitigasi Bencana berbasis masyarakat dan sekolah
- Revitalisasi/Restorasi Eks Kawasan Tambang
- · Pengembangan Kota Hijau di Kawasan Industri dan Kawasan Tambang
- Penggunaan energi terbarukan untuk produksi dan rumah.
- Pengembangan transportasi publik ramah lingkungan Kabupaten Banggai yang terintegrasi dengan transportasi publik MORUBANG dan BALATOJU.
- Peningkatan rasio RTH, kualitas kawasan lindung, kelestarian hutan, dan mengembangkan hutan produksi.
- · Pengelolaan pekarangan dengan tanaman produktif yang anti polusi
- · Peremajaan Pohon Kelapa di Wilayah Pesisir
- Menerapkan pengelolaan dan pengolahan sampah berkelanjutan.
- · Kontribusi pada pengurangan dampak climate change dan ERK.



Klaster Industri MORUBANG

- Kabupaten Morowali
- Kabupaten Morowali Utara
- Sebagian
 Kabupaten Banggai

PUSAT PRODUKSI EKONOMI GLOBAL KTI

Peningkatan:

- Pelayanan dasar
- Peningkatan Kualitas SDM (sehat-professional)

Pengembangan industri:

- Hilirisasi hasil tambang
- *Hilirisasi hasil hutan produksi

Pengembangan:

- * UMKM dan Ekonomi Kreatif
- · Konektifitas, infrastruktur, sarana prasarana
- Layanan kesehatan dan pendidikan taraf internasional
- Riset industri, perkebunan dan kehutanan berkelanjutan
 Sekolah vokasi dan pendidikan tinggi pengelolaan
- Sekolah vokasi dan pendidikan tinggi pengelolaan lingkungan, perkebunan, dan kehutanan
- Layanan jasa pariwisata MORUBANG

ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH KABUPATEN BANGGAI DI KLASTER INDUSTRI MORUBANG UNTUK INDONESIA EMAS 2045

Gambar 5.20 Arah Kebijakan Kabupaten Banggai di Klaster Industri Morubang

4. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Klaster Balatoju (sebagian Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, Banggai Laut, dan Tojo Una-Una)

Arahan konsep pengembangan Wilayah Klaster Balatoju adalah sebagai berikut:

- Peningkatan kualitas obyek wisata bahari; pengembangan Kepulauan Togean sebagai Kawasan Destinasi Super Prioritas Nasional dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dan berbasis pengurangan risiko bencana;
- Pembuatan suatu paket terintegrasi antar wilayah melalui peningkatan jalur pelayaran;
- Penetapan kawasan perlindungan setempat;
- Perlindungan dan pengawasan terhadap potensi ekowisata bahari;
- Pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang sebagai upaya pengurangan risiko bencana tsunami; dan
- Peningkatan sarana prasrana pengembangan potensi perikanan dan pengolahannya.



10. KABUPATEN BANGGAI PENGEMBANGAN KLASTER PERWILAYAHAN SULAWESI TENGAH **UNTUK INDONESIA EMAS 2045** 4. Klaster Wisata Bahari KLASTER PERWILAYAHAN dan Perikanan BALATOJU PROVINSI SULAWESI TENGAH Klaster Wisata Bahari 1. Klaster Perkotaan PASIGALA dan Perikanan **BALATOJU** 1. Sebagian Kabupaten Banggai 2. Klaster AGROPOLITAN 2. Kabupaten Banggai Kepulauan 1. Agropolitan Bolipamuso 3. Kabupaten Banggai Laut 2. Agropolitan 4. Kabupaten Tojo Una-Una Kawasan Pangan Nusantara (K 3. Klaster Industri MORUBANG Klaster Industri MORUBANG 1. Kabupaten Morowali Kabupaten Morowali Utara KABUPATEN BANGGAI TERLETAK DI 2 KLASTER 3. Sebagian Kabupaten Banggai

Gambar 5.21 Kabupaten Banggai di Klaster Industri Morubang dan Klaster Balatoju



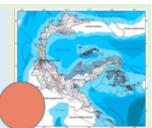
Gambar 5.22 Arah Kebijakan Kabupaten Banggai di Klaster Industri Morubang



Klaster Wisata Bahari dan Perikanan **BALATOJU**

- 1. Sebagian Kabupaten Banggai
- Kabupaten Banggai Kepulauan 3. Kabupaten Banggai Laut
- 4. Kabupaten Tojo Una-Una





PENUNJANG EKONOMI IKN DAN INDUSTRI BERBASIS SDA Suplai:

- · Produk Perikanan dan Kelautan
- Lavanan wisata bahari

WILAYAH YANG HIJAU, EKOLOGIS, dan PRODUKTIF

- · Penerapan ekonomi biru, dan bioekonomi
- Penerapan Mitigasi Bencana berbasis masyarakat dan sekolah
- Pengembangan Kawasan Minapolitan yang produktif dan ekologis
- · Penggunaan energi terbarukan untuk produksi dan rumah.
- Pengembangan transportasi publik ramah lingkungan Kabupaten Banggai yang terintegrasi dengan transportasi publik MORUBANG dan BALATOJU
- · Meningkatkan rasio RTH, kualitas kawasan lindung, kelestarian hutan, dan mengembangkan hutan produksi.
- · Pengelolaan pekarangan dengan tanaman produktif yang anti polusi
- · Peremajaan Pohon Kelapa di Wilayah Pesisir
- · Menerapkan pengelolaan dan pengolahan sampah berkelanjutan.
- Kontribusi pada pengurangan dampak climate change dan ERK.

PUSAT PRODUKSI EKONOMI GLOBAL KTI

Peningkatan:

- · Pelayanan dasar
- · Peningkatan Kualitas SDM (sehat-professional) Pengembangan:
- Hulu dan hilirisasi produk komoditi kelautan dan perikanan
- Agribisnis dan UMKM
- Konektifitas, infrastruktur, sarana prasarana
- · Layanan kesehatan dan pendidikan taraf internasional
- Sekolah vokasi dan pendidikan tinggi kelautan dan
- Riset ekonomi biru, perikanan dan kelautan
- Layanan Pariwisata Bahari dan Perikanan BALATOJU

ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH KABUPATEN BANGGAI DI KLASTER **WISATA BAHARI DAN PERIKANAN BALATOJU UNTUK INDONESIA EMAS 2045**

> Gambar 5.23 Arah Kebijakan Kabupaten Banggai di Klaster Balatoju

11. KAB.BANGGAI KEPULAUAN PENGEMBANGAN KLASTER PERWILAYAHAN SULAWESI TENGAH **UNTUK INDONESIA EMAS 2045** 4. Klaster Wisata Bahari KLASTER PERWILAYAHAN dan Perikanan BALATOJU PROVINSI SULAWESI TENGAH Klaster Wisata Bahari 1. Klaster Perkotaan PASIGALA dan Perikanan BALATOJU 1. Sebagian Kabupaten Banggai 2. Klaster AGROPOLITAN 2. Kabupaten Banggai Kepulauan 1. Agropolitan Bolipamuso Kabupaten Banggai Laut 2. Agropolitan 4. Kabupaten Tojo Una-Una Kawasan Pangan Nusantara (K Klaster Industri MORUBANG KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TERLETAK KLASTER WISATA

Gambar 5.24 Kabupaten Banggai Kepulauan di Klaster Wisata Bahari dan Perikanan Balatoju

BAHARI DAN PERIKANAN BALATOJU



KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

PENUNJANG EKONOMI IKN DAN INDUSTRI BERBASIS SDA Suplai:

- · Produk Perikanan dan Kelautan
- · Layanan wisata bahari

WILAYAH YANG HIJAU, EKOLOGIS, dan PRODUKTIF

- · Penerapan ekonomi biru, dan bioekonomi
- Penerapan Mitigasi Bencana berbasis masyarakat dan sekolah
- Pengembangan Kawasan Minapolitan yang produktif dan ekologis
- · Penggunaan energi terbarukan untuk produksi dan rumah.
- Pengembangan transportasi publik ramah lingkungan Kabupaten Banggai yang terintegrasi dengan transportasi publik dan BALATOJU .
- Meningkatkan rasio RTH, kualitas kawasan lindung, kelestarian hutan, dan mengembangkan hutan produksi.
- · Pengelolaan pekarangan dengan tanaman produktif yang anti polusi
- Peremajaan Pohon Kelapa di Wilayah Pesisir

DAN PERIKANAN BALATOJU

- · Penataan permukiman nelayan yang hijau dan tahan gempa
- Menerapkan pengelolaan dan pengolahan sampah berkelanjutan.
- . Kontribusi pada pengurangan dampak climate change dan ERK.

Klaster Wisata Bahari dan Perikanan BALATOJU



PUSAT PRODUKSI EKONOMI GLOBAL KTI

Peningkatan:

- Pelayanan dasar
- Peningkatan Kualitas SDM (sehat-professional)
 Pengembangan Kawasan Minapolitan:
- Hulu dan hilirisasi produk komoditi kelautan dan perikanan

Pengembangan:

- · Agribisnis, ekonomi kreatif dan UMKM
- · Konektifitas, infrastruktur, sarana prasarana
- · Layanan kesehatan dan pendidikan taraf internasional
- · Sekolah vokasi lingkungan, kelautan dan perikanan
- Riset ekonomi biru, perikanan dan kelautan
- Layanan Pariwisata Bahari dan Perikanan BALATOJU

ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN DI KLASTER WISATA BAHARI DAN PERIKANAN BALATOJU UNTUK INDONESIA EMAS 2045

Gambar 5.25 Arah Kebijakan Kabupaten Banggai Kepulauan di Klaster Wisata Bahari dan Perikanan Balatoju

12. KAB.BANGGAI LAUT PENGEMBANGAN KLASTER PERWILAYAHAN SULAWESI TENGAH UNTUK INDONESIA EMAS 2045 4. Klaster Wisata Bahari KLASTER PERWILAYAHAN dan Perikanan BALATOJU PROVINSI SULAWESI TENGAH Klaster Wisata Bahari 1. Klaster Perkotaan PASIGALA dan Perikanan **BALATOJU** 1. Sebagian Kabupaten Banggai 2. Klaster AGROPOLITAN 2. Kabupaten Banggai Kepulauan 1. Agropolitan Bolipamuso Kabupaten Banggai Laut 2. Agropolitan 4. Kabupaten Tojo Una-Una Kawasan Pangan Nusantara (K Klaster Industri MORUBANG KABUPATEN BANGGAI LAUT TERLETAK DI KLASTER WISATA BAHARI

Gambar 5.26 Kabupaten Banggai Laut di Klaster Wisata Bahari dan Perikanan Balatoju



KABUPATEN BANGGAI LAUT

PENUNJANG EKONOMI IKN DAN INDUSTRI BERBASIS SDA Suplai:

- · Produk Perikanan dan Kelautan
- · Layanan wisata bahari

WILAYAH YANG HIJAU, EKOLOGIS, dan PRODUKTIF

- · Penerapan ekonomi biru, dan bioekonomi
- · Penerapan Mitigasi Bencana berbasis masyarakat dan sekolah
- Pengembangan Kawasan Minapolitan yang produktif dan ekologis
- Penggunaan energi terbarukan untuk produksi dan rumah.
- Pengembangan transportasi publik ramah lingkungan Kabupaten Banggai yang terintegrasi dengan transportasi publik dan BALATOJU .
- Meningkatkan rasio RTH, kualitas kawasan lindung, kelestarian hutan, dan mengembangkan hutan produksi.
- · Pengelolaan pekarangan dengan tanaman produktif yang anti polusi
- · Peremajaan Pohon Kelapa di Wilayah Pesisir
- · Penataan permukiman nelayan yang hijau dan tahan gempa

KLASTER PERWILAYAHAN

PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Menerapkan pengelolaan dan pengolahan sampah berkelanjutan.
- Kontribusi pada pengurangan dampak climate change dan ERK.

Klaster Wisata Bahari dan Perikanan BALATOJU



PUSAT PRODUKSI EKONOMI GLOBAL KTI

Peningkatan:

- · Pelayanan dasar
- Peningkatan Kualitas SDM (sehat-professional)
 Pengembangan Kawasan Minapolitan:
- Hulu dan hilirisasi produk komoditi kelautan dan perikanan

Pengembangan:

- Agribisnis, ekonomi kreatif dan UMKM
- Konektifitas, infrastruktur, sarana prasarana
- Layanan kesehatan dan pendidikan taraf internasional
- Sekolah vokasi lingkungan, kelautan dan perikanan
- · Riset ekonomi biru, perikanan dan kelautan
- Layanan Pariwisata Bahari dan Perikanan BALATOJU

ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH KABUPATEN BANGGAI LAUT DI KLASTER WISATA BAHARI DAN PERIKANAN BALATOJU UNTUK INDONESIA EMAS 2045

Gambar 5.27 Arah Kebijakan Kabupaten Banggai Laut di Klaster Wisata Bahari dan Perikanan Balatoju

13. KAB TOJO UNA-UNA PENGEMBANGAN KLASTER PERWILAYAHAN SULAWESI TENGAH

4. Klaster Wisata Bahari

dan Perikanan BALATOJU

UNTUK INDONESIA EMAS 2045

Klaster Perkotaan PASIGALA
 Klaster AGROPOLITAN
 Agropolitan Bolipamuso
 Agropolitan
 Kawasan Pangan Nusantara (KPN)

Klaster Wisata Bahari dan Perikanan

BALATOJU

- 1. Sebagian Kabupaten Banggai
- 2. Kabupaten Banggai Kepulauan
- Kabupaten Banggai Laut
- 4. Kabupaten Tojo Una-Una

3. Klaster Industri MORUBANG

KABUPATEN TOJO UNA-UNA TERLETAK DI KLASTER WISATA BAHARI DAN PERIKANAN BALATOJU

Gambar 5.28 Kabupaten Tojo Una-Una di Klaster Wisata Bahari dan Perikanan Balatoju



KABUPATEN TOJO UNA-UNA

PENUNJANG EKONOMI IKN DAN INDUSTRI BERBASIS SDA Suplai:

- Produk Perikanan dan Kelautan, produk hutan industri
- · Layanan wisata bahari

WILAYAH YANG HIJAU, EKOLOGIS, dan PRODUKTIF

- · Penerapan ekonomi biru, dan bioekonomi
- · Penerapan Mitigasi Bencana berbasis masyarakat dan sekolah
- Pengembangan Kawasan Minapolitan yang produktif dan ekologis
- Penggunaan energi terbarukan untuk produksi dan rumah.
- Pengembangan transportasi publik ramah lingkungan Kabupaten Banggai yang terintegrasi dengan transportasi publik dan BALATOJU .
- Meningkatkan rasio RTH, kualitas kawasan lindung, kelestarian hutan, dan mengembangkan hutan produksi.
- · Pengelolaan pekarangan dengan tanaman produktif yang anti polusi
- Peremajaan Pohon Kelapa di Wilayah Pesisir
- · Pengembangan Kawasan Wisata Super Prioritas Togean
- · Menerapkan pengelolaan dan pengolahan sampah berkelanjutan.
- Kontribusi pada pengurangan dampak climate change dan ERK.

Klaster Wisata Bahari dan Perikanan BALATOJU



PUSAT PRODUKSI EKONOMI GLOBAL KTI

Peningkatan:

- · Pelayanan dasar
- Peningkatan Kualitas SDM (sehat-professional) Pengembangan Kawasan Minapolitan:
- Hulu dan hilirisasi produk komoditi kelautan dan perikanan

Pengembangan:

- · Agribisnis, ekonomi kreatif dan UMKM
- Konektifitas, infrastruktur, sarana prasarana
- · Desa Wisata Bahari
- · Sekolah vokasi lingkungan dan pariwisata
- Riset ekonomi biru dan pariwisata
- · Layanan Pariwisata Bahari dan Perikanan BALATOJU

ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA DI KLASTER WISATA BAHARI DAN PERIKANAN BALATOJU UNTUK INDONESIA EMAS 2045

Gambar 5.29 Arah Kebijakan Kabupaten Tojo Una-Una di Klaster Wisata Bahari dan Perikanan Balatoju

Target Indikator Makro Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sulawesi Tengah Berdasarkan Hasil Rapat Koordinasi Teknis Pembangunan (Rakortekrenbang) Tahun 2024 sebagai berikut :



Tabel 5.1
Target Indikator Makro Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah

No	Indikator Makro			rarge	indikator	Wakio		abupaten/K		awesi iei	igaii			
INO	IIIUIKAIOI WIAKIO	Kota Palu	Sigi	Donggala	Parigi	Poso	Tojo Una-	Morowali	Morowali	Tolitoli	Buol	Banggai	Banggai	Banggai
		riota i did	O.g.	201199414	Moutong	. 000	Una		Utara			 agga.	Laut	Kepulauan
1	PDRB perkapita (Juta Rp)	89,0-96,12	50,0 - 54,4	35,8	56,47-58,7	57,8	53,7	1.262,78	300-359,9	56,18	55,5- 64,1	148,30	45,00 – 50,69	45,00- 49,13
2	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	6,8-9,36	3,5 - 4,41	36,48	5,55	2,1-3,1	14,89	75,17	39,00- 44,75	3,75 – 5,04	17,5- 22,5	35,0-38,41	4,00 – 5,28	5,41
3	Tingkat Kemiskinan	6,43	11,5	15,18	14,05	14,92	16,53	11,59	11,74	12,73	12,45	6,51	13,56	8,00-11,93
4	Rasio Gini	0,293- 0,330	0,250 - 0,255	0,210	0,284	0,255	0,257	0,265	0,281	0,309	0,233	0,268	0,237	0,256
5	Kontribusi PDRB Provinsi	7,2-7,88	3,30	4,28	5,63	3,26- 3,40	1,91	45,85	8,8-9,62	2,73	2,04	11,66	0,78 – 0,87	1,27
6	Indeks Modal Manusia (IMM)													
7	Indonesia Blue Economy Index (IBEI)	19,66	17,20	44,24	65,86	47,68	54,07	72,78	48,17	46,69	53,88	56,88	48,66	56,88
8	Penurunan intensitas emisi GRK													
9	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi		40,0 – 50,0				50,0			33,00 – 34,00			30,33 – 33,86	
10	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,00-5,12	5,0 - 6,67	5,11	7,10	6,06	7,24	12,99	24,28	6,37 – 6,39	7,73	9,0-12,50	5,00 – 6,18	5,67
11	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal												20	
12	Tingkat Pengangguran Terbuka	56,37	2,04	2,66 – 2,20	1,48	1,27	2,37	2,31	1,82	2,72	2,50	2,88-3,00	3,06 – 3,08	1,07
13	Tingkat Partisipasi	0,94	55,76	47,46	59,36	58,70	63,13	25,22	53,70	53,12	53,26	58,18	37,18 – 44,0	61,40

No	Indikator Makro						K	abupaten/K	ota					
		Kota Palu	Sigi	Donggala	Parigi Moutong	Poso	Tojo Una- Una	Morowali	Morowali Utara	Tolitoli	Buol	Banggai	Banggai Laut	Banggai Kepulauan
	Angkatan Kerja Perempuan													
14	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	3,0-4,0	0,51	0,49	0,73	0,71	0,87	0,05	0,10-0,16	0,60	0,50- 0,58	0,26-0,35	0,59	0,46
15	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (Ribu Orang)	360,1M		100 – 200 Wisman		2500	6,00	1000	200-300	550 - 750 Orang	150-250	150 – 200 Orang	150 – 300 orang	100-200
16	PDRB Nilai Tambah Akomodasi dan Makan Minum (Harga Berlaku)		67,4	100,8 M	180,7 M	105,4 M	0,73	105,4M	45,8 M	79,9 M	49 M	130M – 144M	22,3 M	31,4 M
17	Koefisien Variasi Harga Antar wilayah Tingkat Provinsi	7-10	7-10	7 - 10	7 - 10	7 - 10	7 - 10	7 - 10	7 - 10	7 – 10	7 - 10	7 - 10	7 - 10	7 - 10
18	Pembentukan Modal Tetap Bruto	49,07	48,27	35,72	50,27	46,48	28,14	45,45	67,87	34,99	36,90	25,38	13,75	16,43
19	Indeks Reformasi Hukum (IRH)		65,0											
20	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	3,54	3,54 – 3,60				3,54-3,60		2,75-3,00	2,69	2,1	3,51-40	3,50 – 3,60	3,5-3,6
21	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,15	3,0	35		2,5 – 3,0	2,4	2,5-3,0	3,0	2,68 – 3,15	3,15	3,23-3,50	2,50 – 3,00	2,5-3
22	Indeks Integritas Nasional	70,00	65,70	70,58	70,58	70	70,58- 72,0	70	65,50- 68,00	71 – 72	75,0	68-70	70,00	65,0-70



No	Indikator Makro						K	abupaten/K	ota					
		Kota Palu	Sigi	Donggala	Parigi Moutong	Poso	Tojo Una- Una	Morowali	Morowali Utara	Tolitoli	Buol	Banggai	Banggai Laut	Banggai Kepulauan
23	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	0,84	0,60 – 0,70	0,60	0,63	1,11	0,94	0,34	0,37	0,83	0,85	0,57-0,61	0,63	0,61
24	Tingkat Inflasi	2,35-3,00		-	1,52-2,50			3,25		2,35 – 3,80		3-4	-	
25	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)				56,99							60,00 – 66,33	60,0 – 66,33	
26	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,32	0,44	0,53	0,46	0,42 – 0,44	0,57	0,55	0,43	0,43	0,42	0,43	0,54	0,53
27	Prevalensi ketidak cukupan konsumsi pangan	5.44	13.75	10.85	9.78	7.26	10.38	7.55	7.06	13.47	8.34	9.93	12.97	16.28

Sumber : Kesepakatan Rakortegrenbang 2024 (diolah)





BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Penyusunan dan pelaksanaan RKPD sebagai dokumen perencanaan memperhatikan prinsip-prinsip dalam perencanaan pembangunan daerah yakni RKPD merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, dilakukan oleh pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, terintegrasi dengan rencana tata ruang dan dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masingmasing daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Penyusunan RKPD Tahun 2025 juga akan menjadi arahan dan pedoman dalam perencanaan dan pendanaan pembangunan tahunan yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan untuk merealisasikan setiap program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Selain itu, RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 dijadikan landasan untuk penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025.

Mekanisme penyusunan RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah dalam RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Sesuai amanat regulasi tersebut, Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah dalam RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 di input kedalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) melalui http://sipd.kemendagri.go.id.

Selanjutnya, nilai pagu indikatif rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6.1
Pagu Indikatif Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan
Pendanaan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB	PAGU INDIKATIF
DINAS PENDIDIKAN	Rp709.621.902.454,57
DINAS KEBUDAYAAN	Rp15.138.910.974,20
DINAS KESEHATAN	Rp240.028.683.844,51
RSUD UNDATA	Rp185.158.685.143,00
RS. JIWA MADANI	Rp106.000.000.000,00
DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG	Rp266.515.730.515,99
DINAS CIPTA KARYA DAN SDA	Rp303.528.884.446,00
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PENGEMBANGAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	Rp162.954.030.235,74
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Rp17.098.645.265,36



PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB	PAGU INDIKATIF		
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Rp15.248.775.182,20		
DINAS SOSIAL	Rp73.164.569.235,13		
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Rp39.979.314.225,63		
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Rp19.046.460.628,98		
DINAS PANGAN	Rp16.846.157.986,60		
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	Rp13.027.086.768,23		
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	Rp11.101.305.911,93		
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Rp27.235.358.716,67		
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Rp12.303.087.643,16		
DINAS PERHUBUNGAN	Rp35.602.291.305,50		
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	Rp26.973.835.003,65		
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Rp17.087.470.898,72		
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Rp17.360.329.942,37		
DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	Rp28.350.527.022,07		
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Rp21.602.792.008,11		
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Rp56.386.197.888,97		
DINAS PARIWISATA	Rp15.465.289.304,11		
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	Rp74.285.763.646,03		
DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	Rp83.702.093.622,20		
DINAS KEHUTANAN	Rp77.938.638.111,98		
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Rp27.967.133.536,90		
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Rp28.444.592.238,52		
SEKRETARIAT DAERAH "BIRO UMUM"	Rp70.384.407.338,31		
SEKRETARIAT DAERAH	Rp10.334.793.635,99		
SEKRETARIAT DAERAH	Rp5.000.000.000,00		



PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB	PAGU INDIKATIF
SEKRETARIAT DAERAH	Rp7.000.000.000,00
SEKRETARIAT DAERAH "BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL"	Rp36.556.094.000,00
SEKRETARIAT DAERAH "BIRO ORGANISASI"	Rp3.000.000.000,00
SEKRETARIAT DAERAH "BIRO HUKUM"	Rp3.500.000.000,00
SEKRETARIAT DAERAH "BIRO PEREKONOMIAN"	Rp3.110.000.000,00
SEKRETARIAT DAERAH "BIRO ADM PEMBANGUNAN"	Rp3.000.000.000,00
SEKRETARIAT DAERAH "BIRO ADM. PIMPINAN"	Rp5.000.000.000,00
SEKRETARIAT DAERAH "BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA"	Rp3.000.000.000,00
SEKRETARIAT DAERAH "BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH"	Rp3.800.000.000,00
SEKRETARIAT DPRD	Rp169.464.943.826,69
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rp63.514.554.734,55
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Rp1.479.030.757.746,11
BADAN PENDAPATAN DAERAH	Rp105.272.219.625,48
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Rp18.989.896.738,53
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rp25.864.196.700,83
BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH	Rp17.070.871.290,82
BADAN PENGHUBUNG	Rp10.448.299.526,29
INSPEKTORAT DAERAH	Rp49.456.751.974,98
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH	Rp45.373.432.078,48
TOTAL	Rp4.883.335.762.924,09

Sumber:Pagu Indikatif Tahun 2025 pada RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 (http://sipd.kemendagri.go.id)



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*) untuk pencapaian kinerja tahunan. Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah ditetapkan dibagi menjadi dua yakni Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK).

IKU adalah ukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Indikator Kinerja Daerah (IKD)/Indikator Kinerja Kunci (IKK) terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah terdiri atas 3 (tiga) aspek yakni: (1) aspek kesejahteraan masyarakat, (2) aspek pelayanan umum, dan (3) aspek daya saing daerah.

Penetapan IKU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 disajikan pada Tabel 7.1 dan Penetapan Target Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 disajikan pada Tabel 7.2.

Tabel 7.1
Penetapan Target Indikator Kinerja Utama (IKU)
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target Tahun 2025
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	72,26
	Indeks Modal Manusia (IMM)	Indeks	0,51
2	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	70,00
	Indeks Daya Saing	Indeks	3,43
3	Nilai SAKIP	Angka	83
4	Tingkat Kemiskinan (Persentase penduduk miskin)	%	11,06-11,56
5	Indeks Infrastruktur Daerah	Indeks	0,64
6	Indeks Gini	Indeks	0,298-0,302
7	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,42-0,44
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	80,18
9	Penurunan emisi gas rumah kaca (% BL)	%	77,96
10	Tingkat efektivitas kerja sama daerah	%	100
11	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3,54-3,60
12	Persentase kajian akademik persiapan DOB yang disampaikan ke Kemendagri RI	%	100
13	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2,2-2,9



No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target Tahun 2025
14	Pertumbuhan Ekonomi	%	11,72 – 13,28
15	Tingkat Inflasi	%	2,35-3,8
16	Indeks Ekonomi Biru	Indeks	59,87
17	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	77,96
18	PDRB Perkapita	Juta Rp	125,26-154,25
19	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan		40,97-41,45
20	Kontribusi PDRB Provinsi		2,09
21	Rasio PDRB penyediaan Akomodasi Makan dan minum		0,32
22	PDRB Nilai Tambah Akomodasi dan Makan Minum (Harga berlaku)		1,2T-2T
23	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB		0,3-0,97
24	Indonesia Blue Economy Index (IBEI)	Indeks	59,87
25	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenaga kerjaan		30,33-33,86
26	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal	%	20
27	Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan	%	58,3
28	Jumlah tamu wisatawan mancanegara (Hotel berbintang)	Ribu Orang	4,07-8,38
29	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	indeks	5,7
30	Ekspor barang dan jasa		26-38,36
31	Koefisien variasi harga antar wilayah tingkat provinsi		7-10
32	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	50,55-62,0
33	Indeks Sistem pemerintahan berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,15
34	Indeks Integritas Nasional	Indeks	70,58
35	Indeks Demokrasi Indonesia	Indeks	Tinggi
36	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Indeks	60-66,33
37	Konsusmsi Listrik Perkapita	Kwh	588-2.250
38	Prevalensi ketidak cukupan konsumsi pangan		9,05

Tabel 7.2
Penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) Terhadap Capaian Kinerja
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Pemerintah
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Tahun 2025	Ket
I.	KESEJAHTERAAN MASYARAKAT		
1.1.	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi		
1.1.1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian		
1.1.1.1	Laju Inflasi	2,71	Level 1
1.1.1.2	PDRB Per Kapita (HB Rp Juta)	77,89	Level 1
1.1.1.3	PDRB Per Kapita (HK Rp Juta)	78,59	Level 1
1.1.1.4	Total PDRB (HB Rp Miliar)	259.229,90	Level 1
	Total PDRB (HK Rp Miliar)	175.808,67	Level 1
	Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan daerah (persen)	19,38	Level 1
	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan (persen)	25,10	Level 1
	Kontribusi PDRB ADHK sektor industri pengolahan (persen)	40,97- 41,45	
	Kontribusi PDRB Provinsi	2,09	
	Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Kab/Kota terhadap Provinsi	2,26	
	Total penduduk (jiwa)	3.298.697	Level 1



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Tahun 2025	Ket
	,		
1.1.1.5	Pemerataan Pendapatan versi Bank Dunia (persen)	20,95	Level 1
1.1.1.6	Indeks Ketimpangan Williamson (poin)	0,54	
1.1.1.7	Persentase penduduk di atas garis kemiskinan (persen)	91,31	
1.1.1.8	Jumlah penduduk miskin (jiwa, september)	140.825,20	
1.1.1.0	Indeks Kedalaman Kemiskinan (poin)	2,21	
1.1.1.9	Pengeluaran per kapita (Rupiah)	1,255	
1.2.	Kesejahteraan Sosial		
1.2.1	Pendidikan		Dinas Pendidikan
1.2.1.1 1.2.1.2	Angka Melek Huruf (persen)	99,28 9,26	Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
1.2.1.2	Angka Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	9,20	Dinas Pendidikan
1.2.1.3	Angka Harapan Lama Sekolah	13,70	Dillas i Cildidikan
1.2.1.4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA (persen)	108	Dinas Pendidikan
1.2.1.5	Angka Pendidikan yang Ditamatkan SMA (persen)	21,19	Dinas Pendidikan
1.2.1.6	Angka Partisipasi Murni SMA (persen)	75,00	Dinas Pendidikan
1.2.1.7	Angka Kelulusan (AL) SMA	98.75	Dinas Pendidikan
1.2.1.8 1.2.1.9	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMK (persen) Angka Partisipasi Murni SMK (persen)	108 68.50	Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
1.2.1.10	Angka Kelulusan (AL) SMK	98.75	Dinas Pendidikan
1.2.1.11	Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB/ Paket C (persen)	66.25	Dinas Pendidikan
1.2.1.12	Angka Partisipasi Murni SLB/ Paket C (persen)	75.25	Dinas Pendidikan
	Indeks Literasi Membaca	20,13-44,64	Dinas Pendidikan
	Indeks Numerasi	14,45-34,86	Dinas Pendidikan
100	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/Sederajat	75,0	Dinas Pendidikan
1.2.2 1.2.2.1	Kesehatan Angka Kelangsungan Hidup Bayi (persen)	94,4	Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
1.2.2.1	Angka Usia Harapan Hidup (tahun)	71,26	Dinas Kesehatan
1.2.2.3	Persentase balita gizi buruk (persen)	0,1	Dinas Kesehatan
1.2.2.4	Prevalensi balita gizi kurang (persen)	6,3	Dinas Kesehatan
1.2.2.5	Cakupan Desa Siaga Aktif (persen)	98,0	Dinas Kesehatan
	Prevalensi Stunting (pendek/sangat pendek pada balita)	23,9	Dinas Kesehatan
	Penemuan Kasus TBC	73.36	Dinas Kesehatan
1.2.3	Angka Kematian Ibu (AKI) Sumberdaya	54.10	Dinas Kesehatan Dinas Nakertrans
1.2.3.1	Persentase Penduduk yang Memiliki Lahan (persen)	72,32	Dinas Nakertrans
1.2.3.2	Angka partisipasi angkatan kerja (persen)	70,26	Dinas Nakertrans
1.2.3.3	Tingkat partisipasi angkatan kerja (persen)	76,78	Dinas Nakertrans
	Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (persen)	58,3	Dinas Nakertrans
1.2.3.4	Rasio Penduduk yang Bekerja (persen)	97,92	Dinas Nakertrans
1.2.3.5	Laju pertumbuhan PDB per Tenaga kerja (PDB/jumlah Tenaga kerja, ADHB) (Rupiah/TK)	12.167,1	Dinas Nakertrans
1.2.3.6	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas (persen)	68,56	Dinas Nakertrans
1.2.3.7	Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja (persen)	29,65	Dinas Nakertrans
1.2.3.8	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (persen)	33,99	Dinas Nakertrans
1.2.3.9	Indeks Kepuasan Masyarakat (poin)	98,25	Dinas Nakertrans
1.2.3.10	Persentase PAD terhadap pendapatan (persen)	40,54	Dinas Nakertrans
1.2.3.11	Opini BPK	WTP	Dinas Nakertrans
1.2.3.12	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) (%)	90,20	Dinas Nakertrans
1.2.3.13 1.2.3.14	Penguatan cadangan pangan (persen) Penanganan daerah rawan pangan (%)	228,07 41,789	Dinas Nakertrans Dinas Nakertrans
1.2.3.14	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB (persen)	0,96	Dinas Nakertrans
		<u>*</u>	Dinas Nakertrans
1.2.3.16	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB (persen)	18,49	Dinas Nakertrans
1.2.3.17	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (persen)	0,35	
1.2.3.18	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (persen)	5,72	Dinas Nakertrans
1.2.3.19	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (persen)	28,99	Dinas Nakertrans
1.2.3.20	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri (persen)	6,11	Dinas Nakertrans
1.2.3.21	Pertumbuhan 8 sector Industri non-migas (persen)	22,06	Dinas Nakertrans
	Fokus Sani Budaya dan Olahraga		Dinas Pemuda
1.3.	Fokus Seni Budaya dan Olahraga		dan Olahraga
1.3. 1.3.1	Rasio Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk (angka)	0,637	Dinas Pemuda dan Olahraga



~			
No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Tahun 2025	Ket
1.3.3	Rasio Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk (angka)	0,100	Dinas Pemuda dan Olahraga
1.3.4	Rasio Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk (angka)	0,158	Dinas Pemuda dan Olahraga
II.	ASPEK PELAYANAN UMUM		
2.1.	Layanan Urusan Pemerintahan Wajib		
2.1.1.	Wajib Layanan Dasar		
2.1.1.1	Pendidikan		Dinas Pendidikan
2.1.1.1a	Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minim (persen)	40	Dinas Pendidikan
2.1.1.1b	Jumlah SLTA Negeri terakreditasi (unit)	55	Dinas Pendidikan
2.1.1.1c	Jumlah SMK yang terakreditasi (unit)	55	Dinas Pendidikan
2.1.1.1d	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C (angka)	76,31	Dinas Pendidikan
2.1.1.1e	Angka Putus Sekolah (APUS) SMA/SMK/MA/Paket C (angka)	1,60	Dinas Pendidikan
2.1.1.1f	Angka Kelulusan (AK) SMA/SMK/MA/Paket C (angka)	99,80	Dinas Pendidikan
2.1.1.1g	Rasio Ketersediaan SMA/MA/SMK/Penduduk Usia SMA/MA/SMK (angka)	2,53	Dinas Pendidikan
2.1.1.1h	Rasio Guru/Murid SMA/MA/SMK/Paket C (angka)	78,12	Dinas Pendidikan
2.1.1.1i	Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15-24 Tahun, Perempuan Dan Laki-Laki (angka)	100	Dinas Pendidikan
2.1.1.1j	Penduduk yang berusia >15 Tahun Melek Huruf (tidak buta aksara) (angka)	99,28	Dinas Pendidikan
2.1.1.1k	Angka Putus Sekolah SMA	1,25	Dinas Pendidikan
2.1.1.11	Persentase SMA berakreditasi minimal B	55.00	Dinas Pendidikan
2.1.1.1m	Rasio ketersediaan sekolah pendidikan menengah (SMA) per 10000 penduduk usia sekolah menengah	70.25	Dinas Pendidikan
2.1.1.1n	Angka Putus Sekolah SMK	1,25	Dinas Pendidikan
2.1.1.10	Persentase paket keahlian SMK berakreditasi minimal B	55.00	Dinas Pendidikan
2.1.1.1p	Rasio ketersediaan sekolah pendidikan menengah (SMK/SMLB) per 10000 penduduk usia sekolah menengah	70.20	Dinas Pendidikan
2.1.1.1q	Jumlah fasilitas sarana dan prasarana pendidikan khusus dan layanan khusus	21.00	Dinas Pendidikan
2.1.1.1r	Persentase guru di SMA bersetifikasi	49.50	Dinas Pendidikan
2.1.1.1s	Persentase guru di SMA bersetifikasi S1	49.50	Dinas Pendidikan
2.1.1.1t	Persentase guru di SMA bersetifikasi S2	49.50	Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
2.1.1.1u	Persentase guru di SMK bersetifikasi	49.50	Dinas Pendidikan
2.1.1.1v	Persentase guru di SMK bersetifikasi S1	49.50	Dinas Pendidikan
2.1.1.1w	Persentase guru di SMK bersetifikasi S2	49.50	Dinas Pendidikan
2.1.1.1x	Persentase kepala sekolah di SMA bersertifikasi	49.50	Dinas Pendidikan
2.1.1.1y 2.1.1.1z	Persentase kepala sekolah di SMK bersertifikasi Persentase perizinan SMA swasta	70.00	Dinas Pendidikan
2.1.1.12 2.1.1.1aa	Persentase perizinan SMK swasta	70.00	Dinas Pendidikan
2.1.1.1bb	Persentase perizinan SLB swasta	70.00	Dinas Pendidikan
2.1.1.1cc	Persentase bahasan dan sastra daerah yang dilestarikan	50,50	Dinas Pendidikan
	Persentase pekerja lulusan SMA/SMK yang terserap didunia Kerja dan Dunia	62,25	Dinas Pendidikan
	Industri Proposrsi penduduk berusia 15 tahun keatas yang berkualifikasi pendidikan tinggi (%)	12,57	Dinas Pendidikan
	Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18tahun dalam pendidikan menengah	100	Dinas Pendidikan
	Iklim kebinekaan SMPLB	69.99	Dinas Pendidikan
	Iklim keamanan SMALB	87.1	Dinas Pendidikan
	Jumlah Warga NegaraUsia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah	100	Dinas Pendidikan
	Rata-rata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	67.81	Dinas Pendidikan



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Tahun 2025	Ket
	Iklim inklusivitas SMALB	72.41	Dinas Pendidikan
	Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18tahun penyandang disabilitas dalam	100	Dinas Pendidikan
	pendidikan khusus Rata-rata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional	55.71	Dinas Pendidikan
	Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	53.67	Dinas Pendidikan
	Rata-rata kompetensi NumerasiSMA berdasarkan Asesmen Nasional	55.21	Dinas Pendidikan
	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	84.93	Dinas Pendidikan
	Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	80.12	Dinas Pendidikan
	Rata-rata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	60.4	Dinas Pendidikan
	·		Dinas Pendidikan
	Rata-rata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional	73.02	Dinas Pendidikan
	Rata-rata kompetensi LiterasiSMALB berdasarkan Asesmen Nasional	66.47	Dinas Pendidikan
	Rata-rata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	70.29	
	Rata-rata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	62.44	Dinas Pendidikan
	Rata-rata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional	72.55	Dinas Pendidikan
	Jumlah Warga NegaraUsia4-18 tahun yang termasuk dalam pendudukdisabilitas yang berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus	100	Dinas Pendidikan
	Iklim Inklusivitas SMPLB	75.27	Dinas Pendidikan
	Iklim Keamanan SMA	79.95	Dinas Pendidikan
	Iklim Keamanan SMK	76.52	Dinas Pendidikan
	Iklim Keamanan SDLB	81.02	Dinas Pendidikan
	Iklim Keamanan SMPLB	90.05	Dinas Pendidikan
	Iklim Kebinekaan SMA	76.52	Dinas Pendidikan
	Iklim Kebinekaan SMK	74.16	Dinas Pendidikan
	Iklim Kebinekaan SDLB	76.29	Dinas Pendidikan
	Iklim Kebinekaan SMALB	73.54	Dinas Pendidikan
	Iklim inklusivitas SMA	64.53	Dinas Pendidikan
	Iklim inklusivitas SMK	61.19	Dinas Pendidikan
	Iklim inklusivitas SDLB	66.40	Dinas Pendidikan
2.1.1.2	Kesehatan		Dinas Kesehatan
2.1.1.2.1	Prevalensi Stunting (%) (SKI)	23,9	Dinas Kesehatan
2.1.1.2.2 2.1.1.2.3	Rasio daya 1 lamping rumah sakit rujukan (rasio) Persentase rumah sakit rujukan provinsi yang terakreditasi (persen)	0,12 100	Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
2.1.1.2.0	Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Orang yang Terdampak dan Berisiko Pada Situasi Kejadian Luar Biasa (KLB)	100	Dinas Kesehatan
	Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	100	Dinas Kesehatan
	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan ketersediaan obat esensial dan vaksin rutin	95	Dinas Kesehatan
	Persentase Rumah Sakit Terakreditasi Paripurna	100	Dinas Kesehatan
	Persentase RS Pemerintah dengan jenis tenaga medis sesuai standar.	60	Dinas Kesehatan
2.1.1.2.4	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana (persen) Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko	100	Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
2.1.1.2.5	pada situasi kejadian Luar Biasa (KLB) (persen)	100	
2.1.1.2.6	Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran (angka)	5,65 5	Dinas Kesehatan
0.4.4.6.7		<u> </u>	Dinas Kesehatan
2.1.1.2.7 2.1.1.2.8	Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup (angka) Angka Kematian Ibu per 100,000 Kelahiran Hidup (angka)	54,10	Dinas Kesehatan



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Tahun 2025	Ket
2.1.1.2.10	Rasio Puskesmas Per Satuan Penduduk rasio)	0,08	Dinas Kesehatan
2.1.1.2.11	Rasio Posyandu Per Satuan Penduduk (rasio)	1,59	Dinas Kesehatan
2.1.1.2.12	Rasio Pustu/poskesdes Per Satuan Penduduk (rasio)	0,22	Dinas Kesehatan
2.1.1.2.13	Rasio Rumah sakit Per Satuan Penduduk (rasio)	0,02	Dinas Kesehatan
2.1.1.2.14	Rasio Dokter Per Satuan Penduduk (rasio)	0,29	Dinas Kesehatan
2.1.1.2.15	Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk (rasio)	2,64	Dinas Kesehatan
2.1.1.2.16	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (persen)	84,50	Dinas Kesehatan
2.1.1.2.17	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (persen)	77,50	Dinas Kesehatan
2.1.1.2.18	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (persen)	100,00	Dinas Kesehatan
2.1.1.2.19		•	Dinas Kesehatan
2.1.1.2.19	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (persen)	100,00	
2.1.1.2.20	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari) (persen)	0,28	Dinas Kesehatan
2.1.1.2.21	Persentase anak usia 1 tahun yang Diimunisasi Campak (persen)	90,10	Dinas Kesehatan
2.1.1.2.22	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk (angka)	0,005	Dinas Kesehatan
2.1.1.2.23	Cakupan Penemuan dan Pengobatan kasus tubercolosis (persen)	91,0	Dinas Kesehatan
2.1.1.2.24	Tingkat kematian karena TB (persen)	2,00	Dinas Kesehatan
	-	•	Dinas Kesehatan
2.1.1.2.25	Angka keberhasilan pengobatan kasus tubercolosis (persen) Cakupan penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD (persen)	91,00	Dinas Kesehatan
2.1.1.2.27	Penderita Diare Yang Ditangani (persen)	74,0	Dinas Kesehatan
2.1.1.2.28	Cakupan kunjungan bayi (persen)	87,00	Dinas Kesehatan
2.1.1.2.29	Cakupan Puskesmas (persen)	134,69	Dinas Kesehatan
2.1.1.2.30	Cakupan Pustu (persen)	39,21	Dinas Kesehatan
2.1.1.2.31	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4(persen)	86,20	Dinas Kesehatan
2.1.1.2.32	Cakupan pelayanan nifas (persen)	85,44	Dinas Kesehatan
2.1.1.2.33	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani (persen)	42,47	Dinas Kesehatan
2.1.1.2.34	Cakupan Pelayanan Anak Balita (persen)	71,92	Dinas Kesehatan
2.1.1.2.35	Cakupan penjaringan Kesehatan Siswa SD dan setingkat (persen)	93,25	Dinas Kesehatan
2.1.1.2.36	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) (persen)	100,00	Dinas Kesehatan
2.1.1.2.37	Pelayanan Gawat Darurat Level I (persen)	100,00	Dinas Kesehatan
2.1.1.2.38	Cakupan desa/ kelurahan mengalami klb yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 (persen) jam (persen)	100,00	Dinas Kesehatan
	Prevalensi Schistosomiasis	< 1	Dinas Kesehatan
	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan Provinsi (%)	99,5	Dinas Kesehatan
2.1.1.3			D. D.
2.1.1.3.1	Indeks Infrastruktur kebinamargaan dan Penataan Ruang	0,93	Dinas BMTR
0.4.4.0.0	Persentase kondisi mantap jalan provinsi (%)	69,19	Dinas BMTR Dinas BMTR
2.1.1.3.3	Indeks Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Daerah Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli terlatih dan tersertifikasi	1.00 250	Dinas BMTR
	(Orang)		Dinas BMTR
	Persentase pengawasan tertib pemanfaatan jasa konstruksi (%)	50	Dinas BMTR Dinas BMTR
	Persentase pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi (%)	70	
	Persentase pengawasan tertib usaha jasa konstruksi (%)	60	Dinas BMTR
	Persentase ketersediaan data dan informasi jasa konstruksi (%)	70	Dinas BMTR
2.1.1.3.4	Ketaatan terhadap RT/RW	83,5	Dinas BMTR
2.1.1.3.5	Rasio Jaringan Irigasi kewenang provinsi (angka)	0,84	Dinas Cikasda
2.1.1.3.6	Persentase rumah tangga dengan akses air minum aman (Persen)	19	Dinas Cikasda
2.1.1.3.7	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan (angka)	0,11	Dinas Cikasda
	Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (persen)	28,82	Dinas Cikasda
	Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (%)	27	Dinas Cikasda
2.1.1.3.8	Persentase Areal Kawasan kumuh (persen)	3,04	
04.0-	Rasio Tempat Ibadah/Satuan Penduduk (angka)	2,66	
2.1.1.3.9		^F	Dim O'' '
2.1.1.3.9 2.1.1.3.10	Persentase luas sawah beririgasi (persen) Luas layanan irigasi multi komoditas yang dibangun dan / ditingkatkan padi dan non padi (Ha)	85 1.100	Dinas Cikasda cikasda



Parajang dan jumlah prasarana pengendalian banjir dan pengamanan Pantai yang dibangun (Km) 10.488				
Panjang dan jumlah prasarana pengendalian banjir dan pengamanan Pantai yang dibangun (Km) panjang dan jumlah prasarana pengendalian banjir dan pengamanan Pantai yang dibangun (Km) panjang dengan undan tersepani (persen) 13 Dinas Cikasdi Proporsi unuah tangga dengan keses sanitasi aman (persen) 3 Dinas Cikasdi Persentase BaS distingat terbuk (%) 6,5 Dinas Cikasdi Proporsi unuah tangga dengan keyanan penuh pengumpulan sampah (persen) 11 Dinas Cikasdi Proporsi unuah tangga dengan keyanan penuh pengumpulan sampah (persen RT) 0,138 Dinas Cikasdi Kapasitas isipanan prasarana air baku yang dibangun (m²/detik) 0,6 Dinas Cikasdi Aspasitas layanan prasarana air baku yang dibangun (m²/detik) 0,0 Dinas Cikasdi Kapasitas layanan prasarana air baku yang dibangun (m²/detik) 0,0 Dinas Cikasdi Kapasitas layanan prasarana air baku yang dibangun (m²/detik) 0,0 Dinas Cikasdi Kapasitas layanan prasarana air baku yang dibangun (m²/detik) 0,0 Dinas Cikasdi Kapasitas layanan prasarana air baku yang dibangun (m²/detik) 0,0 Dinas Cikasdi Kapasitas layanan prasarana air baku yang dibangun (m²/detik) 0,0 Dinas Cikasdi Kapasitas layanan prasarana air baku yang dibangun (m²/detik) 0,0 Dinas Perumah 1,0 Dinas Pe	No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Tahun 2025	Ket
Panjang dan jumlah prasarana pengendalian banjir dan pengamanan Pantal yang dibangun (Km) Persentase unan berangan (persen) Persentase unan berangan (persen) Persentase unan hangga dengan akses santasi aman (persen) Persentase Timbulan sampah kerolah difasilitas pengolahan sampah (Persen) Persentase Timbulan sampah kerolah difasilitas pengolahan sampah (Persen) Perpenasa Timbulan sampah kerolah difasilitas pengolahan sampah (Persen) Perpenas rumah tangga dengan ikayan penuh pengumpulan sampah (persen) O,8 Dinas Cikasdi Kapasitas ian laaku (m3 / delah) Kapasitas ian laaku (m3 / delah) Repasitas ian panga dengan ikayang dibangun (m/delah) Persentase warga negara yang terkana ralakasi akibat program Pemda Provinsi 15 Dinas Perumah Persentase warga negara yang terkana ralakasi akibat program Pemda Provinsi 15 Dinas Perumah Persentase unan bungga hunian layah unian dengan akses sanitasi Repasitas iangan bengan bengan panga dibangun (m/delah) Persentase unan bungga hunian layah unian dengan akses sanitasi Repasitase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi Repasitase rumah tangga yang disakukan pembangan (%) 11.1.4.4 Persentase satuan perumahan yang sudah delengkap PSU (%) Persentase kuasa kuwasan kumun 10-15 Ha yang dibangun (%) 11.1.5.1 Persentase pendampan yang didakukan pembanan dan pengawasan bengan penadaman dan pengawasan dan pengawasan bengangan penadaman dan pengawasan dan pengawasan bengangan penadaman dan pengawasan dan pengawasan bengangan penadaman dan pengalahan dan pengalahan dan pengalahan dan pengalahan dan dan pengalahan dan pengalahan dan pengalahan dan dan pengalahan dan pengalahan dan pengalahan dan dan pengalahan dan dan pengalahan dan dan pengalahan dan pengalahan dan pengalahan dan dan pengalahan dan dan pengalah	2.1.1.3.11		27	Dinas Cikasda
Persentase una genangan vang tertangani (persen) Persentase Timbulan samgah tengan akses sanitasi aman (persen) Persentase Timbulan samgah terolah difasilitat pengolahan sampah (Persen) Persentase BAS difempat terbuka (%) Persentase BAS difempat terbuka (%) Proporat rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah (Persen RT) Q,138 Dinas Cikasdi Rapaelisa Isyanan prasarana air batu yang dibangun (m*7detik) Persentase wang negara kordan bencana vang memperojeh rumah isyak huni (%) 2.1.1.4.1 Persentase varga negara kordan bencana vang memperojeh rumah isyak huni (%) Rumah tangga dengan aksea hunian layak, terjangkau dan berkalanjutan (%) Rumah tangga dengan aksea hunian layak, terjangkau dan berkalanjutan (%) Persentase rumah tangga bunian layak, terjangkau dan berkalanjutan (%) Persentase rumah tangga bunian layak, terjangkau dan berkalanjutan (%) Persentase rumah tangga yang memempati hunian dengan akses sanitasi aman (%) Persentase rumah tangga yang memperpelip PSU (%) Persentase rumah tangga yang ayan dibanggan (%) 1.1.1.4.3 Persentase rumah tangga yang ayan dibanggan (%) Persentase rumah tangga yang ayang dibanggan (%) 1.1.1.4.3 Persentase rumah tangga yang memperpelip PSU (%) Persentase rumah tangga yang ayang dibanggan (%) 1.1.1.4.3 Persentase rumah tangga yang ayang dibanggan (%) Persentase kabupaten/kota yang dibangan (%) 1.1.1.4.3 Persentase Persentase pengan pendahan yadah dilengipah (%) Persentase kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan dan pengawasan penyelangan benyelangan penganah p		Panjang dan jumlah prasarana pengendalian banjir dan pengamanan Pantai	10.488	Dinas Cikasda
Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi aman (persen) 8 Dinas Cikasd. Persentase BABS ditempat terbuka (%) 6,5 Dinas Cikasd. Persentase BABS ditempat terbuka (%) 6,5 Dinas Cikasd. Proporsi rumah langga dengan layan penuh pengumpulan sampah (persen RT) 0,5 Dinas Cikasd. Kapastisa si taku (m3 / delik) 0,5 Dinas Cikasd. Kapastisa si rahaku (m3 / delik) 0,0 Dinas Cikasd. Layasatisa kayana prasarana air baku yang dibangun (m7/detik) 0,5 Dinas Cikasd. Layasatisa kayana pengan sang terbuha kababa program Penda Provinsi 5 Dinas Perumah Provinsi 2 Dinas Perumah (%) 2,1,1,4 Dinas Cikasdi 2,1,1,4 Dinas Cikasdi 2,1,1,4 Dinas Perumah (%) 2,1,1,1,1 Dinas			13	Dinas Cikasda
Persentase BASS ditempat terbuka (%) Proporoli umah tangga dengan layaman peruh pengumpulan sampah (persen RT) Proporoli umah tangga dengan dayaman peruh pengumpulan sampah (persen RT) O,6 Dinas Cikasda Kapasitas layaman perakaran air baku yang dibangun (m²/detik) O,01 Dinas Cikasda 2.1.1.4.1 Persentase wanga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%) Persentase wanga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%) Persentase wanga negara yang terkera relokasi akibat program Peruda Provinsi yang memperoleh Fasilikat orunah layak kuni (%) Persentase rumah tangga yang memempati hunian dengan akses sanitasi Persentase rumah tangga yang memempati hunian dengan akses sanitasi Persentase rumah tangga yang memempati hunian dengan akses sanitasi Persentase rumah tangga yang memempati hunian dengan akses sanitasi Persentase rumah tangga yang memempati hunian dengan akses sanitasi Persentase kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani (%) Persentase kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan dan pengawasan Persentase kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan dan pengawasan Persentase kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan dan pengawasan Persentase kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan dan keindahan Persentase kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan dan Keindahan (%) Persentase pendampinan pelayanan Pemadaman dan penyelamatan kebakaran 100 Satpol PP (%) Persentase pendampinan pelayanan Pemadaman dan penyelamatan kebakaran 100 Satpol PP (%) Persentase pendampinan pelayanan Pemadaman dan penyelamatan kebakaran 110 Satpol PP (%) Persentase penkebuhan SPM sub urusan Kebakaran yang sesual standar' 14 Satpol PP Persentase penkebuhan SPM sub urusan Kebakaran yang sesual standar' 14 Satpol PP Persentase penkebuhan SPM sub urusan kebakaran yang sesual standar' 14 Satpol PP Persentase penkebuhan SPM sub urusan kebakaran yang sesual standar' 14 Satpol PP Persentase penkebuhan SPM sub urusan kebakaran yang sesual standar' 14 Satpol PP Persentase penkebuhan SPM sub urusan kebakuhan dasarnya Persentase (%) elakuhan p		Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi aman (persen)		Dinas Cikasda
Proposi rumah tangga dengan iayaran penuh pengumpulan sampah (persen RT) 0,138 Dinas Cikaada (Kapasitas air baku (ma') / delik) 0,6 Dinas Cikaada (Kapasitas layaran prasarana air baku yang dibangun (m'/detik) 0,01 Dinas Cikaada (Z.1.1.4.1 Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%) Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%) 90,26 Dinas Perumah Persentase warga negara yang terkena relokasi akhat program Penda Provinsi yang memperoleh Fasilitasi rumah layak huni (%) 66,32 Dinas Perumah Rumah tangga dengan akase humah layak huni (%) 66,32 Dinas Perumah Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi aman (%) 7				
Kapasitas air baku (m3 / detik) 2.1.1.4 Capasitas air baku (m3 / detik) 2.1.1.4 Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%) 2.1.1.4.2 Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%) 2.1.1.4.2 Persentase warga negara yang terkona relokasi aikbat program Pemda Provinsi yang memperoleh Fasilitasi rumah layak huni (%) 2.1.1.4.2 Persentase warga negara yang terkona relokasi aikbat program Pemda Provinsi yang memperoleh Fasilitasi rumah layak huni (%) 2.1.1.4.3 Persentase rumah tangga yang memempati hunian dengan akses sanitasi aman (%) 2.1.1.4.3 Persentase rumah tangga yang memempati hunian dengan akses sanitasi aman (%) 2.1.1.4.4 Persentase kaluan perumahan yang sudah dilenghapi PSU (%) 2.1.1.4.5 Persentase kabupatenkota yang dilakukan pembinaan dan pengawasan penyelengarana bangunan gedung (%) 2.1.1.5 Persentase kabupatenkota yang dilakukan pembinaan dan pengawasan penyelengarana bangunan gedung (%) 2.1.1.5 Persentase kabupatenkota yang dilakukan pembinaan dan pengawasan penyelengarana bangunan gedung (%) 2.1.1.5 Persentase kabupatenkota yang dilakukan pembinaan dan penyelamatan kebakaran 100 Satpol PP 2.1.1.5 Persentase pendampingan pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran 100 Satpol PP 2.1.1.5 Persentase pendampingan pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran 100 Satpol PP 2.1.1.6 Persentase darah yang aktif melakukan pemulakhiran data terpadu penanggulangan kemisknan 14 Satpol PP 2.1.1.6 Persentase darah yang aktif melakukan pemulakhiran data terpadu penanggulangan kemisknan 14 Satpol PP 2.1.1.6 Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan 4,95% Dinas Sosial disam membangan rehabilitas sosial 2.1.1.6.1 Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan 4,95% Dinas Sosial disam membangan rehabilitas sosial ekonom sejensi kanya 2.1.1.6.2 Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melakui Usaha Ekonom Produki			·	
Kapasitas layanan prasarana air baku yang dibangun (m²/detik) Dinas Cikasdi			,	
2.1.1.4.1 Persentisse warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%) 90,26 Dinas Perumah Persentisse warga negara yang terkena relokasi akibat program Pernda Provinsi yang memperoleh Fasilisasi rumah layak huni (%) 66,32 Dinas Perumah Persentisse warga negara yang terkena relokasi akibat program Pernda Provinsi yang memperoleh Fasilisasi rumah layak huni (%) 66,32 Dinas Perumah Persentisse rumah tangga buniah layak bang dinas perumah persentisse rumah tangga yang memempati hunian dengan akses sanitasi aman (%) 114,93 Dinas Perumah Persentisse rumah tangga yang memempati hunian dengan akses sanitasi aman (%) 114,93 Dinas Perumah Persentisse kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan dan pengawasan penyelengaranan bangunan gedung (%) 114,93 Dinas Perumah Persentisse Sabupaten/kota yang dilakukan pembinaan dan pengawasan penyelengaranan bangunan gedung (%) 116,67 Dinas Perumah Persentisse Sabupaten/kota yang dilakukan pembinaan dan pengawasan penyelengaranan bangunan gedung (%) 1100 Dinas Cikasdi penyelengaranan bangunan gedung (%) 1100 Dinas Cikasdi (•	Dinas Cikasda
2.1.1.4.2 Persentase warga negan yang terkena relokasi akibat program Pemda Provinsi yang memperoleh Fasilitasi runah layak hunir (%) 66,32 Dinas Perumah Persentase rumah tangga kanjan kase hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%) 32,53 Dinas Perumah Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi aman (%) 12,11.4.3 Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU (%) 15,67 Dinas Perumah Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU (%) 15,67 Dinas Perumah Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU (%) 15,67 Dinas Perumah Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU (%) 15,67 Dinas Cikasdi Persentase Satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU (%) 100 Dinas Cikasdi Persentase Penyelesalan Pelanggaran Keteriban, Keteritaman dan keindahan (%) 21,11,52 Persentase Penyelesalan Pelanggaran Keteriban, Keteritaman dan Keindahan (%) 100 Satipi PP Tercapalnya indeka penyelenggaraan penyelamatan kebakaran 100 Satipi PP Tercapalnya indeka penyelenggaraan sub urusan trantibum tatagori 'baik' 14 Satipi PP Tercapalnya indeka penyelenggaraan sub urusan trantibum kategori 'baik' 14 Satipi PP Tercapalnya indeka penyelenggaraan sub urusan trantibum kategori 'baik' 14 Satipi PP Tercapalnya indeka penyelenggaraan sub urusan trantibum kategori 'baik' 14 Satipi PP Persentase PMKS yang terlangari 14 Satipi PP Persentase PMKS yang terlangari 14 Satipi PP Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar yang disembaran yang mengan pengan pengan yang mengan pengan pengan yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 9 Dinas Sosial Persentase (%) penyanda	2.1.1.4	The state of the s	- 1-	
Rumah tangga dengan akses hainia layak, terjangkau dan berkelanjutan (%) 66,32 Dinas Perumah Rumah tangga dengan akses hainia layak, terjangkau dan berkelanjutan (%) 32,53 Dinas Perumah Persentase rumah tangga hunian layak Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi aman (%) 14,33 Dinas Perumah aman (%) 14,34 Persentase tawah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi aman (%) 14,33 Dinas Perumah Persentase kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan dan pengawasan penyelengaraan bangunan gedung (%) Dinas Cikasdi Persentase Penyelesajan Pelanggaran Ketertiban, Ketentiraman dan Keindahan (KS) Satipa PP Persentase pendampingan pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran 100 Satipa PP Terpenuhinya capalan mutu layanan SPM sub urusan trantibum 14 Satipa IPP Tercapaniyan dideks penyelengaraan sub urusan trantibum 14 Satipa IPP Tercapaniyan dideks penyelengaraan sub urusan trantibum 14 Satipa IPP PP Tercapaniyan dideks penyelengaraan sub urusan trantibum 14 Satipa IPP PP	2.1.1.4.1		90,26	Dinas Perumahar
Persentase rumah tangga hunian layak Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi aman (%) 2.1.1.4.3 Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi aman (%) 2.1.1.4.4 Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU (%) 11.5.67 Dinas Perumah Persentase kabupater/kota yang dilakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan bangunan gedung (%) 2.1.1.5 Taratibumilimmas Persentase Penyelesaian Pelanggaran Keteritban, Ketentiraman dan Keindahan (K3) 2.1.1.5.1 Persentase Pendampingan pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran 100 Satpol PP 100 Terpenuhinya capalan mutu layanan SPM sub urusan trantibum 110 Terpenuhinya capalan mutu layanan SPM sub urusan trantibum 111 Satpol PP 111.6.1 Persentase Pendampingan pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran 1100 Satpol PP 111.6.2 Persentase bendampingan pelayanan sPM sub urusan trantibum 111 Satpol PP 111.6.3 Persentase Pendampingan pelayanan sPM sub urusan trantibum 112 Satpol PP 113.6.4 Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhran data terpadu penanggulangan kemiskinan 113.6.2 Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhran data terpadu penanggulangan kemiskinan 114 Satpol PP 115.6.2 Persentase PMKS yang tertangani 115.6.3 Persentase PMKS yang tertangani 116.6.4 Persentase PMKS yang tertangani 117.6.5 Persentase PMKS yang tertangani 118.6.6 Persentase PMKS yang tertangani 118.6.7 Dersentase PMKS yang tertangani 118.6.7 Dersentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan 118.6.7 Dersentase penyandang cacat fisik dan mentai, serta lanjut usia tidak potensial yang 118.6.7 Dersentase penyandang cacat fisik dan mentai, serta lanjut usia tidak potensial yang 118.6.7 Dersentase penyandang cacat fisik dan mentai, serta lanjut usia tidak potensial yang 118.6.7 Dersentase penyandang cacat fisik dan mentai, serta lanjut usia tidak potensial yang 118.6.7 Dersentase penyandang darat tengah pengentik keboruhan dasarnya 118.6.7 Dersentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan d	2.1.1.4.2	yang memperoleh Fasilitasi rumah layak huni (%)		Dinas Perumahar
Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi aman (%) 2.1.1.4.3 Persentasi Luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani (%) 2.1.1.4.4 Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU (%) 15.67 Dinas Perumah Persentase kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan bangunan gedung (%) 2.1.1.5.1 Persentase kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan bangunan gedung (%) 2.1.1.5.2 Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan (K3) 2.1.1.5.2 Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan (K3) 2.1.1.5.2 Persentase pendampingan pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran 100 Satpol PP Terpenuhinya capaian mutu layanan SPM sub urusan trantibum 14 Satpol PP Terpenuhinya kebutuhan SPM sub urusan trantibum kategori 'baik' 14 Satpol PP P P P Terpenuhinya kebutuhan SPM sub urusan trantibum kategori 'baik' 14 Satpol PP P P P P P P P P P P P P P P P P P		Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	66,32	Dinas Perumahar
aman (%) Persentasis Luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani (%) 11,43 Persentase satuan perumahan yang audah dilengkapi PSU (%) 15,67 Dinas Perumah Persentase kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan bangunan gedung (%) 2.1.1.5 Trantibumlimmas 2.1.1.5.1 Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan (K) 2.1.1.5.2 Persentase pendampingan pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran 100 Satpol PP Terpenuhinya capaian mutu layanan SPM sub urusan trantibum 114 Satpol PP Tercepahiya indeks penyelenggaraan sub rusan trantibum 14 Satpol PP Tercepahiya indeks penyelenggaran sub rusan trantibum 14 Satpol PP Tercepahiya indeks penyelenggaran sub rusan trantibum 14 Satpol PP Tercepahiya indeks penyelenggaran sub rusan trantibum 14 Satpol PP Tercepahiya indeks penyelenggaran sub rusan trantibum 14 Satpol PP Terpenuhinya Kebutuhan SPM sub urusan Kebakaran yang sesuai standar* 14 Satpol PP 2.1.1.6.1 Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan 2.1.1.6.2 Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan 4,95% Dinas Sosial 2.1.1.6.3 Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan 4,95% Dinas Sosial dasar 2.1.1.6.4 Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima rehabilitasi sosial 12.1.1.6.1 Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima rehabilitasi sosial 12.1.1.6.1 Dinas Sosial dahar menerima rehabilitasi sosial 12.1.1.6.1 Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang dalah dasarrya 14.1.6.7 Dinas Sosial dahar menerima rehabilitasi sosial 12.1.1.6.1 Dinas Sosial dahar menerima rehabilitasi sosial 12.1.1.6.1 Persentase (%) lanjut usia menerima program pemberdayaan sosial melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) atau kelompok sosial dekonomi sejenis lainnya 9 Persentase (%) korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana pr		Persentase rumah tangga hunian layak	32,53	Dinas Perumahar
2.1.1.4.4 Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU (%) Persentase kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan bangunan gedung (%) 2.1.1.5.1 Trantibumtinmas 2.1.1.5.1 Persentase penyelesalan Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan (K3) 2.1.1.5.2 Persentase pendampingan pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran 100 Satpol PP 1 Tercapainya dakes penyelenggaraan sub urusan trantibum 114 Satpol PP 1 Tercapainya dakes penyelenggaraan bu urusan trantibum 115 Tercapainya dakes penyelenggaraan sub urusan trantibum kategori 'baik' 116 Saspol PP 1 Terpenuhinya Kebutuhan SPM sub urusan trantibum kategori 'baik' 117 Satpol PP 1 Terpenuhinya Kebutuhan SPM sub urusan trantibum kategori 'baik' 118 Satpol PP 2.1.1.6.2 Sosial 2.1.1.6.3 Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan penanggulangan penanggulangan kemiskinan penanggulangan penanggulangan kemiskinan penanggulangan pena			8	Dinas Perumahar
Persentase kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan bangunan gedung (%) Trantibumilnmas 2.1.1.5.1 Persentase Penyelesaian Pelanggaran Keteriban, Ketentraman dan Keindahan (K3) 2.1.1.5.2 Persentase Penyelesaian Pelanggaran Keteriban, Ketentraman dan Keindahan (K3) 2.1.1.5.2 Persentase pendampingan pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran 100 Satpol PP Terepenuhinya capaian mutu layanan SPM sub urusan trantibum 114 Satpol PP Terepenuhinya capaian mutu layanan SPM sub urusan trantibum kategori "baik" 114 Satpol PP Terepenuhinya Kebutuhan SPM sub urusan trantibum kategori "baik" 114 Satpol PP Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan penanggulangan kemiskinan 1,86% Dinas Sosial 2,1.1.6.1 Persentase PMKS yang tertangani 1,86% Dinas Sosial 2,1.1.6.2 Persentase PMKS yang tertangani 1,86% Dinas Sosial 2,1.1.6.3 Persentase PMKS yang tertangani 1,86% Dinas Sosial 2,1.1.6.4 Persentase PMKS yang temperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima rehabilitasi sosial 1,86% Dinas Sosial 2,1.1.6.5 Dersentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima rehabilitasi sosial 1,86% Dinas Sosial 2,1.1.6.6 Dersentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang 1,86% Dinas Sosial 2,1.1.6.6 Dersentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang 1,86% Dinas Sosial 2,1.1.6.6 Dersentase penant sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui 1,86% Dinas Sosial 2,1.1.6.6 Dersentase penant sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui 1,86% Dinas Sosial 1,86% Dinas S	2.1.1.4.3	Persentasi Luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani (%)	14,93	Dinas Perumahar
penyelenggaraan bangunan geduing (%) 1.1.5.1 Persentase Penyelesaian Pelanggaran Keteritban, Ketentraman dan Keindahan (K3) 2.1.1.5.2 Persentase Penyelesaian Pelanggaran Keteritban, Ketentraman dan Keindahan (K3) 2.1.1.5.2 Persentase pendampingan pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran 100 Satpol PP Tercapalinya indeks penyelenggaraan sub urusan trantibum da 14 Satpol PP Tercapalinya indeks penyelenggaraan sub urusan trantibum da 14 Satpol PP Tercapalinya indeks penyelenggaraan sub urusan trantibum kategori "balk" 14 Satpol PP Sosial Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan 1,86% Dinas Sosial Persentase PMKS yang tertangani 1,86% Dinas Sosial Satra Persentase PMKS yang tertangani 1,86% Dinas Sosial dasar Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima rehabilitasi sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya Usaha Ekonomi Produktif (UEP) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya Usaha Ekonomi Produktif (UEP) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya Dersentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana palayana sosial 94,15% Dinas Sosial Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana palayana sosial Persentase (%) lainuh warga masyarakat rawan bencana alam yang mendapatkan kesiapsiagaan dan mitigasi (iwa) Dinas Sosial Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 96 Dinas Sosial Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 97 Dinas Sosial Badan Kesban Indeks Kentunan umat beragama 100% Badan Kesban Badan Kesban Jumlah Daerah yang melaksanakan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanganan 100 Badan Kesban Jumlah	2.1.1.4.4	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU (%)	15,67	Dinas Perumahar
2.1.1.5.1 Persentase Penyelesaian Pelanggaran Keteritban, Ketentraman dan Keindahan (Kai) 2.1.1.5.2 Persentase Penyelesaian Pelanggaran Keteritban, Ketentraman dan Keindahan (Kai) 2.1.1.5.2 Persentase Penyelesaian Pelanggaran keteritban, Ketentraman dan Keindahan (Kai) 2.1.1.5.2 Persentase pendampingan pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran 100 Satpol PP Terpenuhinya capalan mutu layanan SPM sub urusan trantibum 14 Satpol PP Terpenuhinya kebutuhan SPM sub urusan Kebakaran yang sesuai standar* 14 Satpol PP Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan Persentase PMKS yang tetangani 1.86% Dinas Sosial Persentase PMKS yang tetangani 1.86% Dinas Sosial valus Persentase PMKS yang tetangani 1.86% Dinas Sosial dasar 2.1.1.6.3 Persentase PMKS yang tetangani 1.86% Dinas Sosial telah menerima rehabilitasi sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar valus bersentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima rehabilitasi sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar valus bersentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya 5,26% Dinas Sosial 2.1.1.6.6 Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan sosial yang manyediakan sarana prasarana pelayanan sosial panta mutu samagan darurat lengkap Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana pasarana pelayana sosial pasarana tanggap darurat lengkap Persentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 96 Dinas Sosial Persentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 97 Dinas Sosial Persentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 98 Dinas Sosial Restantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 99 Dinas Sosial Restantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 99 Dinas Sosial Restantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 90 Dinas Sosial Indeks Kerusan Bangsa Politik Persentase Masyarakat yang Paham terhadap Ideologi		Persentase kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	100	Dinas Cikasda
2.1.1.5.1 (K3) 2.1.1.5.2 Persentase pendampingan pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran 100 Satpol PP Terpenuhinya capaian mutu layanan SPM sub urusan trantibum 14 Satpol PP Tercapainya indeks penyelenggaraan sub urusan trantibum kategori 'baik' 14 Satpol PP 2.1.1.6 Sosial 2.1.1.6.1 Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan 2.1.1.6.2 Persentase PMKS yang tertangani Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar 2.1.1.6.2 Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar 2.1.1.6.2 Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar 2.1.1.6.4 Persentase pmik sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya 2.1.1.6.5 Persentase parti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya 2.1.1.6.7 Jumlah warga masyarakat rawan bencana alam yang mendapatkan kesiapsiagaan dam mitigasi (jiwa) 2.1.1.6.8 Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana playang ana pengero diekan sarana pengunakan sarana pengunakan serana persentase (%) korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan serana pengunakan serana persentase (%) korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 96 Dinas Sosial Persentase (%) korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 96 Dinas Sosial Persentase (%) korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 97 Dinas Sosial Persentase (%) korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 98 Dinas Sosial Persentase (%) korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 99 Dinas Sosial	2.1.1.5			
Persentase pendampingan pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran 100 Satpol PP	2.1.1.5.1		100	Satpol PP
Terpenuhinya capaian mutu layanan SPM sub urusan trantibum Tercapainya indeks penyelenggaraan sub urusan trantibum kategori "baik" Terpenuhinya Kebutuhan SPM sub urusan Kebakaran yang sesual standar' 14 Satpol PP Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan penanggulangan kemiskinan penanggulangan kemiskinan pensentase PMKS yang tertangani 1,86% Dinas Sosial Persentase PMKS yang tertangani 1,86% Dinas Sosial dasar Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar Persentase Penyendang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang Persentase penyendang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang Persentase panti sosial solal yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial 94,15% Dinas Sosial 2.1.1.6.7 Jumlah warga masyarakat rawan bencana alam yang mendapatkan kesiapsiagaan dan mitigasi (iiwa) Dinas Sosial Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana pelagasi (iiwa) Persentase (%) korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana pelaga darurat lengkap Persentase (%) korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 96 Dinas Sosial Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 97 Dinas Sosial Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 98 Dinas Sosial Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 97 Dinas Sosial Resentase Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 98 Dinas Sosial Indeks Kerkuknan umat beragama 82,39-82,44 Badan Kesban Indeks Kerkuknan umat beragama 82,39-82,44 Badan Kesban Indeks Kerkuknan umat beragama 82,39-82,44 Badan Kesban Umlah Daerah yang melaksanakan Rencana Aksi Daerah (2.1.1.5.2		100	Satpol PP
Tercapainya indeks penyelenggaraan sub urusan trantibum kategori "baik" Terpenuhinya Kebutuhan SPM sub urusan Kebakaran yang sesual standar" 2.1.1.6.1 Sosial Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan penanggulangan kemiskinan 2.1.1.6.2 Persentase PMKS yang tertangani 2.1.1.6.3 Persentase PMKS yang tertangani 2.1.1.6.4 Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima rehabilitasi sosial 2.1.1.6.5 Persentase penti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya 2.1.1.6.6 Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya 2.1.1.6.7 Jumiah warga masyarakat rawan bencana alam yang mendapatkan kesiapsiagaan dan mitigasi (liwa) 2.1.1.6.8 Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana parsarana parpasarana tanggap darurat lengkap 2.1.1.6.8 Persentase (%) korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Persentase (%) korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebu	2.1110.2			•
Terpenuhinya Kebutuhan SPM sub urusan Kebakaran yang sesuai standar* Sosial				•
2.1.1.6.1 Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan 2.1.1.6.2 Persentase PMKS yang tertangani 2.1.1.6.3 Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima rehabilitasi sosial Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya 2.1.1.6.5 Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya 2.1.1.6.7 Jumlah warga masyarakat rawan bencana alam yang mendapatkan kesiapsiagaan dan mitigasi (jiwa) 2.1.1.6.8 Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana pargasarana pelayanan sosial 2.1.1.6.9 Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana pargasarana tanggap darurat lengkap Persentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Persentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Pe			14	Satpol PP
2.1.1.6.2 Persentase PMKS yang tertangani 1,86% Dinas Sosial 2.1.1.6.3 Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar PMKS yang mendepitihan pemeruhan yang mendapatkan kesiapsiagaan dan mitugasi (jiwa) Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan sosial 94,15% Dinas Sosial 2.1.1.6.7 Jumlah barah wang masyarakat rawan bencana alam yang mendapatkan kesiapsiagaan dan mitugasi (jiwa) Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap Persentase (%) korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap Persentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 96 Dinas Sosial Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 95 Dinas Sosial Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 97 Dinas Sosial Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 97 Dinas Sosial Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 98 Dinas Sosial Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 97 Dinas Sosial Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 98 Dinas Sosial Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 99 Dinas Sosial Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 99 Dinas Sosial Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 99 Dinas Sosial Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang	2.1.1.6			
2.1.1.6.3 Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasarr Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima rehabilitasi sosial Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya 2.1.1.6.6 Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan sosial 94,15% Dinas Sosial Jumlah harga masyarakat rawan bencana atam yang mendapatkan kesiapsiagaan dan mitigasi (jiwa) Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana pesaranana pelayanan sosial Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap Persentase (%) korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 90 Dinas Sosial Persentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 96 Dinas Sosial Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 97 Dinas Sosial Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 97 Dinas Sosial Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 97 Dinas Sosial Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 98 Dinas Sosial Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 99 Dinas Sosial Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 90 Dinas Sosial Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 90 Dinas Sosial Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 91 Dinas Sosial Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 90 Dinas Sosial Dinas Sosial Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 90 Dinas Sosial Dinas Dinas Dinas Sosial Dinas Dinas Dinas Sosial Dinas Dinas Dinas D	2.1.1.6.1		64,29%	Dinas Sosial
dasar 2.1.1.6.4 Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima rehabilitasi sosial 2.1.1.6.5 Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya 2.1.1.6.6 Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan sosial 2.1.1.6.7 Jumlah warga masyarakat rawan bencana alam yang mendapatkan kesiapsiagaan dan mitigasi (jiwa) 2.1.1.6.8 Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap 2.1.1.6.8 Persentase (%) korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Persentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Persentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Persentase (%) Badan Kesban Jumlah Daerah yang melaksanakan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanganan Konflik Sosial yang efektif Indeks Kewaspadaan Nasional Jumlah Daerah yang melaksanakan Nilai-nilai Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	2.1.1.6.2		,	
telah menerima rehabilitasi sosial Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya 2.1.1.6.6 Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan sosial 2.1.1.6.7 Jumlah warga masyarakat rawan bencana alam yang mendapatkan kesiapsiagaan dan mitigasi (jiwa) Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap Persentase (%) korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Persentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Persentase Masyarakat yang Paham terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Indeks Kinerja Ormas Jumlah Daerah yang melaksanakan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanganan Konflik Sosial yang efektif Indeks Kewaspadaan Nasional Jumlah Daerah yang melaksanakan Nilai-nilai Ideologi dan Wawasan Kebangsaan 1 Badan Kesban Badan Kesban	2.1.1.6.3	dasar		
Usaha Ekonomi Produktif (UEP) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya 2.1.1.6.6 Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan sosial 2.1.1.6.7 Umlah warga masyarakat rawan bencana alam yang mendapatkan kesiapsiagaan dan mitigasi (jiwa) 2.1.1.6.8 Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap Persentase (%) korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Persentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Persentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Persentase Masyarakat yang Paham terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Badan Kesban Badan Kesban Indeks kinerja Ormas Jumlah Daerah yang melaksanakan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanganan Konflik Sosial yang efektif Indeks Kewaspadaan Nasional Jumlah Daerah yang melaksanakan Nilai-nilai Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	2.1.1.6.4	telah menerima rehabilitasi sosial		
Jumlah warga masyarakat rawan bencana alam yang mendapatkan kesiapsiagaan dan mitigasi (jiwa) 2.1.1.6.8 Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap Persentase (%) korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Persentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 2.1.1.7 Kesatuan Bangsa Politik 2.1.1.7.1 Persentase Masyarakat yang Paham terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Indeks Kinerja Ormas Jumlah Daerah yang melaksanakan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanganan Konflik Sosial yang efektif Indeks Kewaspadaan Nasional Jumlah Daerah yang melaksanakan Nilai-nilai Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Jumlah Daerah yang melaksanakan Nilai-nilai Ideologi dan Wawasan Kebangsaan		Usaha Ekonomi Produktif (UEP) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya		
dan mitigasi (jiwa) Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap Persentase (%) korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Persentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan go Dinas Sosial Persentase Masyarakat yang Paham terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Resatuan Bangsa Politik Persentase Masyarakat yang Paham terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Rebangsaan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Ratio Badan Kesban Badan Kesban Jumlah Daerah yang melaksanakan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanganan Konflik Sosial yang efektif Indeks Kewaspadaan Nasional Jumlah Daerah yang melaksanakan Nilai-nilai Ideologi dan Wawasan Kebangsaan 1 Badan Kesban Badan Kesban	2.1.1.6.6	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan sosial	- ,	
prasarana tanggap darurat lengkap Persentase (%) korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Persentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 2.1.1.7 Kesatuan Bangsa Politik Persentase Masyarakat yang Paham terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Indeks Kinerja Ormas Jumlah Daerah yang melaksanakan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanganan Konflik Sosial yang efektif Indeks Kewaspadaan Nasional Jumlah Daerah yang melaksanakan Nilai-nilai Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Indeks Masarana dasarnya 1 Badan Kesban Kebangsaan	2.1.1.6.7	dan mitigasi (jiwa)		
Persentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 2.1.1.7 Kesatuan Bangsa Politik Persentase Masyarakat yang Paham terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Indeks Kerukunan umat beragama Indeks Kinerja Ormas Jumlah Daerah yang melaksanakan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanganan Konflik Sosial yang efektif Indeks Kewaspadaan Nasional Jumlah Daerah yang melaksanakan Nilai-nilai Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Badan Kesban	2.1.1.6.8		100%	Dinas Sosiai
Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 2.1.1.7 Kesatuan Bangsa Politik 2.1.1.7.1 Persentase Masyarakat yang Paham terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Indeks Kerukunan umat beragama Indeks Kinerja Ormas Jumlah Daerah yang melaksanakan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanganan Konflik Sosial yang efektif Indeks Kewaspadaan Nasional Jumlah Daerah yang melaksanakan Nilai-nilai Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Indeks Kebangsaan Jumlah Daerah yang melaksanakan Nilai-nilai Ideologi dan Wawasan Kebangsaan		Persentase (%) korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	90	
Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 2.1.1.7 Kesatuan Bangsa Politik Persentase Masyarakat yang Paham terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Indeks Kerukunan umat beragama Indeks Kinerja Ormas Jumlah Daerah yang melaksanakan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanganan Konflik Sosial yang efektif Indeks Kewaspadaan Nasional Jumlah Daerah yang melaksanakan Nilai-nilai Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Indeks Kewaspadaan Nasional Jumlah Daerah yang melaksanakan Nilai-nilai Ideologi dan Wawasan Kebangsaan		Persentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	96	
Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 2.1.1.7 Kesatuan Bangsa Politik 2.1.1.7.1 Persentase Masyarakat yang Paham terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Indeks Kerukunan umat beragama Indeks Kinerja Ormas Jumlah Daerah yang melaksanakan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanganan Konflik Sosial yang efektif Indeks Kewaspadaan Nasional Jumlah Daerah yang melaksanakan Nilai-nilai Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Jumlah Daerah yang melaksanakan Nilai-nilai Ideologi dan Wawasan Kebangsaan				
2.1.1.7 Kesatuan Bangsa Politik 2.1.1.7.1 Persentase Masyarakat yang Paham terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Indeks kerukunan umat beragama Indeks Kinerja Ormas Indeks Kinerja Ormas Jumlah Daerah yang melaksanakan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanganan Konflik Sosial yang efektif Indeks Kewaspadaan Nasional Jumlah Daerah yang melaksanakan Nilai-nilai Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Jumlah Daerah yang melaksanakan Nilai-nilai Ideologi dan Wawasan Kebangsaan		, , ,	97	
Persentase Masyarakat yang Paham terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Indeks kerukunan umat beragama Indeks Kinerja Ormas Indeks Kinerja Ormas Jumlah Daerah yang melaksanakan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanganan Konflik Sosial yang efektif Indeks Kewaspadaan Nasional Jumlah Daerah yang melaksanakan Nilai-nilai Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Persentase Masyarakat yang Paham terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter 80 Badan Kesban 82,39-82,44 Badan Kesban 1	0447	dasarnya	90	Dinas Sosial
Kebangsaan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Indeks kerukunan umat beragama Indeks Kinerja Ormas Indeks Kinerja Ormas Jumlah Daerah yang melaksanakan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanganan Konflik Sosial yang efektif Indeks Kewaspadaan Nasional Jumlah Daerah yang melaksanakan Nilai-nilai Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Kebangsaan				Badan Keehang
Indeks kerukunan umat beragama Indeks Kinerja Ormas Jumlah Daerah yang melaksanakan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanganan Konflik Sosial yang efektif Indeks Kewaspadaan Nasional Jumlah Daerah yang melaksanakan Nilai-nilai Ideologi dan Wawasan Kebangsaan 82,39-82,44 Badan Kesban 1 Badan Kesban 1 Badan Kesban	2.1.1.7.1	Kebangsaan		
Indeks Kinerja Ormas Jumlah Daerah yang melaksanakan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanganan Konflik Sosial yang efektif Indeks Kewaspadaan Nasional Jumlah Daerah yang melaksanakan Nilai-nilai Ideologi dan Wawasan Kebangsaan		` '		
Jumlah Daerah yang melaksanakan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanganan Konflik Sosial yang efektif Indeks Kewaspadaan Nasional Jumlah Daerah yang melaksanakan Nilai-nilai Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Badan Kesban Badan Kesban			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Konflik Sosial yang efektif Indeks Kewaspadaan Nasional Jumlah Daerah yang melaksanakan Nilai-nilai Ideologi dan Wawasan Kebangsaan				Badan Kesbang Badan Kesbang
Jumlah Daerah yang melaksanakan Nilai-nilai Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Badan Kesban		Konflik Sosial yang efektif		
Kebangsaan				Badan Kesbang Badan Kesbang
0.4.4.0 Demanusularman Demanus	2.1.1.8		1	



			Ket
No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Tahun 2025	
2.1.1.8.1	Indeks kapasitas bencana/	0,77	BPBD
	Indeks Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana (angka)	,	
	Indeks resiko bencana (IRB)	124,60	BPBD
	Persentase pendampingan penangan pasca bencana (%)	100	BPBD
	Terlaporkannya pelaksanaan SPM Sub urusan bencana kepusat (Dokumen)	1	BPBD
	Terverifikasinya data penduduk yang berhak Menerma SPM, Data agregat penduduk yang telah menerima KIE, dan data penduduk yang mengikuti pelatihan pencegahan/ gladi kesiapsiagaan di daerah rawan bencana tingkat Provinsi (Dokumen)	1	BPBD
	Jumlah Personil TRC dan Pusdalops tingkat provinsi yang dikembangkan teknik dan manajerialnya (%)	30	BPBD
	Persentase pendampingan penanganan tanggap darurat bencana (%)	100	BPBD
	Persentase penyelesaian dan pendampingan dokumen kebencanaan sampai	100	BPBD
	dengan dinyatakan sah/legal (%)		
	Persentase pemenuhan capaian kebutuhan dasar SPM sub urusan bencana (Daerah)	1	BPBD
	Jumlah daerah yang meningkatkan upaya kesiapsiagaan dan melaksanakan pelayanan pemerintah pada saat tanggap darurat dan pasca bencana (Provinsi)	1	BPBD
	Jumlah daerah yang meningkatkan manajemen pengitegrasian dan pengarusutamaan pegurangan resiko bencana (Provinsi)	1	BPBD
2.1.2.	Urusan Wajib Non Layanan Dasar		
2.1.2.1	Tenaga Kerja		Dia Nata-da-
2.1.2.1.1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun (kasus)	170	Dinas Nakertrans
2.1.2.1.2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) (kasus)	79	Dinas Nakertrans
2.1.2.1.3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (persen)	12,90	Dinas Nakertrans
2.1.2.1.4	Keselamatan dan perlindungan (persen)	82	Dinas Nakertrans
2.1.2.1.5	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek (org)	200.000	Dinas Nakertrans
	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenaga kerjaan	30,33-33,86	Dinas Nakertrans
2.1.2.1.6	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah tertangani (kasus)	90	Dinas Nakertrans
2.1.2.1.7	Besaran Pemeriksaan Perusahaan (persen)	2710	Dinas Nakertrans
2.1.2.1.8	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan (persen)	90.00	Dinas Nakertrans
2.1.2.1.9	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (persen)	361	Dinas Nakertrans
2.1.2.1.10	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat (persen)	70	Dinas Nakertrans
2.1.2.1.11	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan (persen)	100	Dinas Nakertrans
2.1.2.1.12	Rasio lulusan S1/S2/S3 (angka)	95,49	Dinas Nakertrans
2.1.2.1.13	Persentase jumlah perusahaan yang mengikuti jamsostek/BPJS TK (persen)	80	Dinas Nakertrans
2.1.2.1.14	Persentase peningkatan kesejahteraan/upah kerja (persen)	94	Dinas Nakertrans
2.1.2.1.15	Tingkat partisipasi angkatan kerja (persen)	76,78	Dinas Nakertrans
	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (persen)	20	Dinas Nakertrans
	Persentase tenaga kerja yang ditingkatkan kompetensinya dan ditempatkan (%)	41,69	Dinas Nakertrans
	Persentase tenaga kerja disektor prioritas yang meningkat produktifitasnya (%)	24,62	Dinas Nakertrans
	Jumlah laporan informasi pasar Kerja (Laporan)	1	Dinas Nakertrans
	Jumlah calon pekerja migran indonesia yang mendapatkan sosialiasi penempatan dan perlindungan calon pekerja migran indonesia/ pekerja migran indonesia (Orang)	2500	Dinas Nakertrans
	Jumlah orang yang mendapatkan layanan informasi pasar kerja (Orang)	23.500	Dinas Nakertrans
	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan didalam negeri (Orang)	10.820	Dinas Nakertrans
	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan dalam negeri hasil pelatihan kerja (%)	100	Dinas Nakertrans
	Jumlah perusahaan terlapor pada WLKP Online (perusahaan)	6.500	Dinas Nakertrans
	Jumlah tenaga kerja yang terlindungi hak-hak dasarnya (Orang)	170.000	Dinas Nakertrans
	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial (Orang)	180.966	Dinas Nakertrans
2.1.2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
2.1.2.2.1	Indeks Pemberdayaaan Gender (IDG) (angka)	80	Dinas P3A
2.1.2.2.2	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (persen)	56,58	Dinas P3A
2.1.2.2.3	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR (persen)	37,78	Dinas P3A
2.1.2.2.4	Partisipasi perempuan di lembaga swasta (persen)	96,92	Dinas P3A
2.1.2.2.5	Rasio KDRT (KDRT/jumlah Rumah tangga) (angka)	0,02	Dinas P3A



~			
No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Tahun 2025	Ket
2.1.2.2.6	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur (persen)	22,33	Dinas P3A
2.1.2.2.7	Partisipasi angkatan kerja perempuan (persen)	98,19	Dinas P3A
2.1.2.2.8	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	87,12	Dinas P3A
2.1.2.2.9	(persen) Rasio APM perempuan/laki-laki di SD (angka)	91,56	Dinas P3A
2.1.2.2.10	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP (angka)	91,39	Dinas P3A
2.1.2.2.11	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA (angka)	117,86	Dinas P3A
	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	95	Dinas P3A
	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	58.74	Dinas P3A
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92.54	Dinas P3A
	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0.44	Dinas P3A
	Persentase Perempuan Korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	98	Dinas P3A
	Provinsi Layak Anak (Provila)	61	Dinas P3A
	Nilai Penganugerahan Parahita Ekapraya	601	Dinas P3A
2.1.2.3	Persentase ARG Pangan	8	Dinas P3A
2.1.2.3.1	Persentase cadangan pangan masyarakat (persen)	100	
2.1.2.3.1	Rasio jumlah cadangan beras pemerintah daerah (CBPD) terhadap target jumlah	200	Dinas Pangan
2.1.2.3.2	CBPD berdasarkan Perbadan 15/2023 (%) Ketersediaan pangan utama (%)	25	Dinas Pangan
2.1.2.3.3	Ketersediaan energi (kkal/kapita/hari):	3040	Dinas Pangan
2.1.2.3.4	Ketersediaan Protein (gram/kapita/hari):	72,20	Dinas Pangan
2.1.2.3.5	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (angka)	84	Dinas Pangan
2.1.2.3.6		13	Dinas Pangan
2.1.2.3.0	Persentase daerah rawan pangan (persen)		
	Prevelensi ketidak cukupan konsumsi pangan (persen)	9,05	Dinas Pangan
2.1.2.4	Pertanahan	40.00	
2.1.2.4.1	Persentase luas lahan bersertifikat (persen) Jumlah kepala keluarga penerima akses reforma agraria (KK)	13,60 7.000	
	Jumlah bidang tanah yang diredistribusi (bidang tanah)	13.500	
2.1.2.5	Lingkungan Hidup	13.300	
2.1.2.5.1	Tersusunnya RPPLH Provinsi (dokumen)	Ada	Dinas Lingkunga Hidup
2.1.2.5.2	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan provinsi (dokumen)	Ada	Dinas Lingkunga Hidup
2.1.2.5.3	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P daerah provinsi (dokumen)	Ada	Dinas Lingkunga Hidup
2.1.2.5.4	Indeks EM (poin)	65,59	Dinas Lingkunga Hidup
2.1.2.5.5	Indeks kualitas udara (poin)	90,69	Dinas Lingkunga Hidup
2.1.2.5.6	Indeks kualitas lahan (poin)	87,85	Dinas Lingkunga Hidup
2.1.2.5.7	Indeks Kualitas Air Laut (poin)	72,40	Dinas Lingkunga Hidup
2.1.2.5.8	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA (jumlah)	9	Dinas Lingkunga Hidup
2.1.2.5.9	Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional (jumlah)	9	Dinas Lingkunga Hidup
2.1.2.5.10	Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional (jumlah)	9	Dinas Lingkunga Hidup
2.1.2.5.11	Penetapan hak MHA (jumlah)	9	Dinas Lingkunga Hidup
2.1.2.5.12	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup (penghargaan)	Ada	Dinas Lingkunga Hidup
2.1.2.5.13	Emisi GRK (Juta Ton CO ² eq)	205.987,71	Dinas Lingkunga Hidup
	Persentase penurunan emisi GRK kumulatif (persen)	19,76	Dinas Lingkunga Hidup
	Persentase penurunan emisi GRK tahunan (persen)	28,94	Dinas Lingkunga Hidup
	Indeks pengelolaan keanekaragaman hayati daerah (poin)	0,6	Dinas Lingkunga Hidup Dinas Lingkunga
2.1.2.6	Indeks kinerja pengelolaan sampah (Poin) Penduduk dan Capil	43	Hidup
2.1.2.6.1	Rasio bayi berakte kelahiran (angka)	0,90	Dinas Dukcapil
	Penyajian data kependudukan skala provinsi dalam 1 tahun (persen)	98	Dinas Dukcapil



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Tahun 2025	Ket
2.1.2.6.3	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi (data)	Ada	Dinas Dukcapil
2.1.2.6.4	Penerapan KTP nasional berbasis NIK	Sudah	Dinas Dukcapil
2.1.2.6.5	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan (persen)	100	Dinas Dukcapil
2.1.2.6.6	Pemanfaatan data kependudukan (persen)	75	Dinas Dukcapil
	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0 s.d. 17 tahun	99.5	Dinas Dukcapil
	Persentase cakupan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	100	Dinas Dukcapil
	Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu pasangan	100	Dinas Dukcapil
	yang perceraiannya dilaporkan		Dinas Dukcapil
	Persentase Kartu Identitas Anak (KIA) yang diterbitkan	62	-
	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	15	Dinas Dukcapil
2.1.2.7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
2.1.2.7.1	Jumlah Aparatur dan Pengurus Kelembagaan Desa yang memiliki Kompetensi dalam Tatakelola Pemerintahan Desa	6,100	Dinas PMD
2.1.2.7.2	Cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan Desa yang baik	90,00	Dinas PMD
2.1.2.7.3	Persentase PKK aktif	98,71	Dinas PMD
2.1.2.7.4	Persentase Posyandu aktif	100,00	Dinas PMD Dinas PMD
2.1.2.7.10	Indeks desa Persentase Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal	0,27 17,430	Dinas PMD Dinas PMD
2.1.2.7.11	Persentase Perkembangan Desa	1,384	Dinas PMD
2.1.2.7.12	Jumlah BUMDes berkembang	800	Dinas PMD
	Jumlah Desa yang Menginisiasi Pengembangan Kerjasama Desa	20	Dinas PMD
	Jumlah Aparatur dan Pengurus Kelembagaan Desa yang Mengikuti Pelatihan Manajemen Pemdes	100	Dinas PMD
	Jumlah Desa yang Memanfaatkan Data Regsosek	75	Dinas PMD
	Jumlah Desa yang Menerapkan Pelayanan Pemerintahan Desa Berbasis Digital	20	Dinas PMD
	Jumlah BPD yang Mengimplemetasikan Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Secara Partisipatif	60	Dinas PMD
	Persentase Desa Mandiri	0.27	Dinas PMD
	Persentase Kemiskinan di Perdesaan Persentase BUM Desa Maju	11.75 1.67	Dinas PMD Dinas PMD
2.1.2.8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.07	Dinas Pivid
2.1.2.8.1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP) (persen)	1,08	Dinas P2KB
2.1.2.8.2	Rasio akseptor KB (angka)	0,78	Dinas P2KB
2.1.2.8.3	Angka prevalensi kontrasepsi modern (Modern contraceptive rate/mCPR) %	60	Dinas P2KB
	Indeks pembangunan kualitas keluarga	60,0-66,33	Dinas P2KB
	Indeks pembangunan keluarga (IBANGGA)	60	Dinas P2KB
	Angka kelahiran total/WUS usia 15-49	2,12	Dinas P2KB
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	14	Dinas P2KB
	Angka kelahiran remaja umur 15-19 (kelahiran per 1000 WUS) 15-19 tahun	30/1000	Dinas P2KB
2.1.2.9	Perhubungan	30/1000	Dillus I ERB
	Y		Dinas
2.1.2.9.1	Rasio konektivitas simpul transportasi Provinsi Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan public sector transportasi	0.7	Perhubungan Dinas
2.1.2.9.2	(Nilai) Jumlah Perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi system manajemen	85	Perhubungan Dinas
0 / 2 2 -	Kesehatan (Jumlah)	4	Perhubungan Dinas
2.1.2.9.3	Rasio kejadian kecelakaan transportasi per 100.000 keberangkatan	0,0091	Perhubungan Dinas
2.1.2.9.4	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara /Terminal Bis	35	Perhubungan Dinas
2.1.2.9.5	Persentase layanan angkutan darat (persen)	8,65	Perhubungan Dinas
2.1.2.9.6	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan (angka)	0,01	Perhubungan Dinas
2.1.2.9.7	Jumlah barang yang terangkut angkatan umum (ton)	97.019 0,18	Perhubungan Dinas
2.1.2.9.8	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 1 Juta Keberangkatan	180	Perhubungan Dinas
2.1.2.9.9	Persangan rambu-rambu Persangan perlangkanan jalan yang telah ternasang terhadan kondisi idaal	20	Perhubungan Dinas
24240	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan provinsi (%)	20	Perhubungan
2.1.2.10	Komunikasi dan Informatika		<u> </u>



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Tahun 2025	Ket
2.1.2.10.1	Indeks Pelayanan Komunikasi Publik yang Informatif	85	Dinas Kominfo
2.1.2.10.2	Persentase Sistem Jaringan dan Aplikasi Informatika	2.84	Dinas Kominfo
	Persentase komunitas informasi masyarakat (KIM) yang difasilitasi untuk peningkatan kapasitas SDM oleh dinas Kominfo Provinsi (%)	30	Dinas Kominfo
	Persentase khalayak yang terpapar informasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah, termasuk konten tematik dan agenda prioritas nasionaldalam RKP sesuai strategi komunikasi (%)	85	Dinas Kominfo
	Persentase ASN Pengelola informasi dan komunikasi publik di pemda yang mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang difasilitasi oleh dinas (%)	100	Dinas Kominfo
	Persentase permohonan informasi publik yang diselesaikan yang sesuai peraturan perundangan (%)	100	Dinas Kominfo
	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitasi informasi publik pemerintah daerah (%)	80	Dinas Kominfo
	Persentase Kab/Kota yang berada pada wilayah provinsi yang mendapatkan sosialisasi program provinsi cerdas (Smart Provence) (%)	100	Dinas Kominfo
	Persentase Perangkat daerah yang berada pada wilayah provinsi yang mendapatkan sosialisasi program provinsi cerdas (Smart Provence) (%)	100	Dinas Kominfo
	Persentase aplikasi umum SPBE yang digunakan oleh Pemda (%)	100	Dinas Kominfo
	Persentase aplikasi yang terhubung dengan sistem penghubung layanan perangkat daerah (%)	25	Dinas Kominfo
	Persentase kab/kota yang terhubung dengan jaringan intrapemerintah daerah (%)	16	Dinas Kominfo
	Persentase Perangkat daerah yang terhubung dengan jaringan intrapemerintah daerah (%)	100	Dinas Kominfo
	Persentase area publik yang memanfaatkan internet yang disediakan oleh dinas (%)	100	Dinas Kominfo
	Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan internet yang disediakan oleh dinas (%)	100	Dinas Kominfo
	Persentase ASN Pengelola SPBE ditingkat pemerintah provinsi yang mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis pengelola SPBE yang difasilitasi oleh dinas (%)	100	Dinas Kominfo
2.1.2.10.3	Cakupan data statistik sectoral	50	Dinas Kominfo
2.1.2.10.4	Indeks keamanan informasi	25	Dinas Kominfo
2.1.2.10.5	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan Pemda termasuk program prioritas nasional yang termasuk isu strategis Pemda (tema protocol kesehatan, vaksin, stunting) yang didiseminasikan sesuai strategi komunikasi (persen)	40	Dinas Kominfo
2.1.2.10.6	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan (persen)	2,86	Dinas Kominfo
2.1.2.10.8	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telpon (persen)	72,73	Dinas Kominfo
2.1.2.10.9	Proporsi rumah tangga dengan akses internet (Jml RT x Persentase) (angka)	0,80	Dinas Kominfo
2.1.2.10.10	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi (angka)	0,85	Dinas Kominfo
2.1.2.10.11	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (poin)	3,15	Dinas Kominfo
	Indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi	5,7	Dinas Kominfo
2.1.2.11	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah		
2.1.2.11.1	Persentase Koperasi aktif	56,61	Dinas Koperasi
2.1.2.11.2	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	60	Dinas Koperasi
2.1.2.11.3	Persentase UMK (Jumlah BPR/LKM) (pesen)	100	Dinas Koperasi
	Persentase Usaha Mikro dan Kecil Proporsi Tenaga Kerja Sektor Koperasi dan UKM terhadap jumlah penduduk yang	99,57	Dinas Koperasi Dinas Koperasi
040444	bekerja	1,64	Dinas Kananasi
2.1.2.11.4	Persentase Koperasi Berkualitas Persentase Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	5,77 5,44	Dinas Koperasi Dinas Koperasi
2.1.2.11.5	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian (persen)	12,33	Dinas Koperasi
	Proporsi jumlah industri kecil dan menengah (persen)	2,44	Dinas Koperasi
	Rasio kewirausahaan daerah (persen)	2,82	Dinas Koperasi
	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (persen)	1,29	Dinas Koperasi
	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (Persen)	8,37	Dinas Koperasi
	Pertumbuhan wirausaha (Persen)	8,24	Dinas Koperasi
	Pertumbuhan wirausaha (Persen) Jumlah Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (Persen)	4	Dinas Koperasi
21212	Pertumbuhan wirausaha (Persen) Jumlah Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (Persen) Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan ekspor (Persen)	•	Dinas Koperasi Dinas Koperasi Dinas Koperasi
2.1.2.12 2.1.2.12.1	Pertumbuhan wirausaha (Persen) Jumlah Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (Persen)	4	Dinas Koperasi



			Ket
No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Tahun 2025	
	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	96.00	Dinas PMPTSP
	Pembentukan modal tetap Bruto (persen PDRB)	42,4	Dinas PMPTSP
	Ekspor barang dan jasa (persen PDRB)	26 – 38,36	Dinas PMPTSP
	Rasio pajak daerah terhadap PDRB ADHK (persen)	0,3-0,97	Dinas Pendapatan
	Total dana pihak ketiga/PDRB (persen)	12,85	Dinas PTSP
		12,03	Dinas Pemuda
2.1.2.13	Kepemudaan dan Olah Raga		dan Olahraga
2.1.2.13.1	Indeks Pembangunan Pemuda	66,69	Dinas Pemuda
2.1.2.13.2	Persentase organisasi pemuda yang aktif (jumlah organisasi)	60	dan Olahraga Dinas Pemuda
-			dan Olahraga Dinas Pemuda
2.1.2.13.3	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi (persen)	30	dan Olahraga
2.1.2.13.4	Jumlah atlet berprestasi	35	Dinas Pemuda dan Olahraga
			Dinas Pemuda
2.1.2.13.5	Gelanggang/balai remaja (selain milik swasta) (jumlah)	26	dan Olahraga
	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	1.31	Dinas Pemuda dan Olahraga
	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi	77.44	Dinas Pemuda
	sosial kemasyarakatan	35.16	dan Olahraga Dinas Pemuda
	Peningkatan Prestasi Olahraga	33.10	dan Olahraga
	Tingkat Partispasi Pemuda dalam Kegiatan Kepemudaan	66.69	Dinas Pemuda
			dan Olahraga
2.1.2.14	Statistik		51 17 17
2.1.2.14.1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada	Dinas Kominfo
2.1.2.14.2	Buku "kabupaten dalam angka"	Ada	Dinas Kominfo
2.1.2.14.3	Buku "PDRB" Indeks pembangunan statistik (Poin)	Ada 2.6	Dinas Kominfo Dinas Kominfo
2.1.2.15	Persandian	2,0	Dinas Kominio
2.1.2.15.1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi (persen)	100	Dinas Kominfo
	Jumlah lulusan pelatihan teknis bidang keamanan siber dan sandi (Orang)	4	Dinas Kominfo
	Jumlah lulusan pelatihan dan sertifikasi sesuai standar kompetensi keamanan		Dinas Kominfo
	siber dan sandi (Orang)	4	
	Jumlah lulusan pelatihan SDM keamanan SPBE (Orang)	4	Dinas Kominfo
	Persentase tingkat kematangan keamanan siber dan sandi pemerintah daerah	25	Dinas Kominfo
0.4.0.40	(%)		
2.1.2.16	Kebudayaan		Dinas
2.15.1	Penyelanggara festival seni dan budaya (event/kegiatan)	19	Kebudayaan
2.15.2	Benda, Situs dan kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (benda/situs)	82,5	Dinas
		,-	Kebudayaan Dinas
2.15.3	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	7	Kebudayaan
2.15.5	Pembinaan dan pengelolaan seni budaya, dan perfileman	85.00	Dinas
		85.00	Kebudayaan Dinas
2.15.6	% RT yang merasa aman dalam pelaksanaan nilai budaya di masyarakat		Kebudayaan
2.15.7	% penduduk berumur 10 th ke atas yang mengikuti gotong royong	85.00	Dinas Kebudayaan
2.15.8	% CB yang telah ditetapkan	45.00	Dinas Kebudayaan
2.15.9	% WB yang telah ditetapkan	45.00	Dinas
2.15.10	% penduduk (10 th) ke atas yang menggunakan bahasa daerah	45.00	Kebudayaan Dinas
		45.00	Kebudayaan Dinas
2.15.13	% RT menyelenggarakan ucapan adat		Kebudayaan Dinas
2.15.14	% penduduk >10 th yang terlibat pelaku pertunjukkan seni	85.00	Kebudayaan
	0/ DT manualanggarakan unagara adat	85.00	Dinas
2.15.15	% RT menyelenggarakan upacara adat	65.00	Kebudayaan



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Tahun 2025	Ket
2.15.17	% penduduk >10 th mengakses internet kegiatan kebudayaan daerah	85.00	Dinas Kebudayaan
2.15.18	% penduduk > 10 th yang mengunjungi perpustakaan/TBM	85.00	Dinas Kebudayaan
2.15.19	Peningkatan dan pengelolaan museum	8.500	Dinas Kebudayaan
	Indeks pembangunan kebudayaan	61,71	Dinas Kebudayaan
	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda Yang dilestarikan	35.65	Dinas Kebudayaan
	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	0.75	Dinas Kebudayaan
	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni	70.96	Dinas Kebudayaan
	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang 40 mengunjungi peninggalan sejarah	6.38	Dinas Kebudayaan
	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	21.44	Dinas Kebudayaan
	Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni	0.062	Dinas Kebudayaan
	Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan pengarusutamaan kebudayaan	72.75	Dinas Kebudayaan
2.1.2.17 2.1.2.17.1	Perpustakaan Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (orang)	15513	Dinas
2.1.2.17.2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (buku)	72352,2	Perpustakaan Dinas
2.1.2.17.3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk (angka)	0,22	Perpustakaan Dinas Perpustakaan
2.1.2.17.4	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun (orang)	1293	Dinas Perpustakaan
2.1.2.17.5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	3116	Dinas Perpustakaan
2.1.2.17.6	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki setrifikat (orang)	31	Dinas Perpustakaan
	Tingkat kegemaran membaca masyarakat	65	Dinas Perpustakaan
	Indeks pembangunan literasi masyarakat	68	Dinas Perpustakaan
2.1.2.18	Kearsipan		
2.1.2.18.1	Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku (pengelolaan arsip secara baku) (OPD)	1	Dinas Perpustakaan
2.1.2.18.2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan (orang)	8	Dinas Perpustakaan
	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah	70	Dinas Perpustakaan
	Indeks hasil pengawasan kearsipan lingkup PEMDA	70	Dinas Perpustakaan
2.2.	Urusan Pemerintahan Pilihan		
2.2.1	Pariwisata		
2.2.1.1	Nilai tambah ekonomi kreatif (Rp milyar)	200	Dinas Pariwisata
2.2.1.2	Capaian Kunjungan Wisata (persen)	81,80	Dinas Pariwisata
2.2.1.3	Rata-rata Lama kunjungan Wisata (hari)	9	Dinas Pariwisata
2.2.1.4	Lama kunjungan Wisata (Wisman) (hari)	6	Dinas Pariwisata
2.2.1.5	Lama kunjungan Wisata (Wisnus) (hari)	12	Dinas Pariwisata
2.2.1.6	Jumlah Teknologi informasi pemasaran pariwisata	6	Dinas Pariwisata
2.2.1.7	Jumlah kegiatan promosi pariwisata (kegiatan)	7	Dinas Pariwisata
2.2.1.8	Jumlah ekonomi kreatif yang dikembangkan (unit)	15	Dinas Pariwisata
2.2.1.9	Jumlah promosi dan pemasaran ekonomi kreatif pariwisata (kali)	7	Dinas Pariwisata
2.2.1.10	Jumlah hasil ekonomi kreatif yang dipromosikan (kali)	15	Dinas Pariwisata
2.2.1.11	Jumlah potensi baru pariwisata (objek)	5	Dinas Pariwisata
	Rasio PDRB penyediaan akomodasi makan dan minum (persen)	0,32 - 0,45	Dinas Pariwisata
	Jumlah tamu wisatawan manca negara hotel berbintang (ribu orang)	4,07-8,38	Dinas Pariwisata
	Proporsi PDRB ekonomi kreatif (Rupiah)	1,2T-2,0T	Dinas Pariwisata
-	Rasio PDB Pariwisata (%)	0,51	Dinas Pariwisata
	Jumlah Perjalanan pariwisata Nusantara (Perjalanan)	2.225.419	Dinas Pariwisata
2.2.3	Pertanian		
2.2.3.1	Kontribusi Sub Pertanian terhadap PDRB (ADHB) (persen)	21,26	Dinas TPH



			Ket
No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Tahun 2025	
	Kontribusi Sub Pertanian terhadap PDRB (ADHK) (persen)	19,03	Dinas TPH
2.2.3.2	Kontribusi sektor Tanaman Pangan terhadap PDRB (ADH-Berlaku) (persen)	2,36	Dinas TPH
2.2.3.3	Kontribusi sektor Tanaman Hortikultura terhadap PDRB (ADH-Berlaku) (persen)	4,57	Dinas TPH
2.2.3.4	Peningkatan produktivitas tanaman pangan (padi dan jagung) (%)(persen)	1,4	Dinas TPH
0.005	Produktivitas padi atau bahan industri pangan utama lokal lainnya per hektar (ton/ha)		
2.2.3.5	Padi	901.958	Dinas TPH
	Jagung	530.689	Dinas TPH
	Kedelai Kacang Tanah	18.154 1.30	Dinas TPH Dinas TPH
	Kacang Hijau	0,54	Dinas TPH
	Ubi Kayu/ Ubi Jalar	29.448	Dinas TPH
	Tomat	14.75	Dinas TPH
	Cabe rawit	366.700	Dinas TPH
	Bawang merah Durian	50.270 16.85	Dinas TPH Dinas TPH
	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan		Dinas TPH Dinas TPH
	keamanan pangan (%)	84	
	NTP Tanaman Pangan	100.15	Dinas TPH
2.2.3.6	NTP Hortikultura	104.17	Dinas TPH
2.2.3. <i>1</i>	Perkebunan, Peternakan dan Keswan Kontribusi terhadap PDRB (persen)		Disbunak
2.2.4.1	Sub Sektor Perkebunan	8,90	Disbunak
	Sub Sektor Peternakan	1,93	Disbunak
	Produktivitas Komoditas Unggulan perkebunan (Kg/Ha)	1,00	Disbunak
2.2.4.2	Kelapa Dalam	215.353	Disbunak
2.2.4.2	Cengkeh	31.954	Disbunak
	·		Disbunak
	Kopi	2.984	Disbunak
	Kakao	174.432	Disbunak
	Pala	1.015	Disbunak
	Kelapa Sawit	2.861	Disbunak
	Populasi Ternah Sapi (Ekor)	590.547	Disbunak
2.2.4.3	Jumlah Produksi (Ton)		Disbunak
	Telur	27.115,48	
	Daging (Sapi,Kerbau,Domba,kambing,ayam,itik,babi)	34.486,61	Disbunak
	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (%)	96,8	Disbunak
	Persentase luas areal pengendalian dan penanggulagan bencana Dampak Perubahan Iklim (DPI) tanaman Perkebunan (%)	990	Disbunak
	Rasio luasan serangan OPT tanaman hortikultura yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT (%) Rasio luasan serangan OPT tanaman pangan yang dapat ditangani terhadap	99,60	Dinas TPH
	luas serangan OPT (%) Rasio luasan serangan OPT tanaman pangan yang dapat ditangani ternadap luas serangan OPT (%) Rasio luasan serangan OPT tanaman perkebunan yang dapat ditangani	98,00	Dinas TPH Disbunak
	terhadap luas serangan OPT (%) Persentase luas areal pengendalian dan penanggulagan bencana Dampak	41,89	Dinas TPH
	Perubahan Iklim (DPI) tanaman hortikultura (%) Persentase luas areal pengendalian dan penanggulagan bencana Dampak	93,10	Dinas TPH
	Perubahan Iklim (DPI) tanaman pangan (%) Cakupan Bina Kelompok Tani (Persen)	71,00	Disbunak
2.2.4.4	Perkebunan	77,18	Disbunak
	Peternakan	59,92	Disbunak
	NTP Perkebunan	102.16	Disbunak
2.2.4.5	NTP Peternakan	101.25	Disbunak
2.2.4.6	Kehutanan		
2.2.5.	Persentase Luas Rehabilitasi Lahan di Luar Kawasan Hutan Negara	2.61	Dinas Kehutan
2.2.5.1	Persentase Luas Fasilitasi Pengusulan Akses Legal kepada Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan melalui Perhutanan Sosial	1.79	Dinas Kehutana
2.2.3.1		E 000 0E4 00C	Dinas Kehutana
2.2.5.2	Nilai transaksi kehutanan sosial (Rp/Kapita)	5.800.951.896	Dillas Nellataria
	Nilai transaksi kehutanan sosial (Rp/Kapita) Nilai transaksi ekonomi KTH (Rp/Kapita) Luas Kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dalam skema HD, HKm, HTR dan Kemitraan Kehutanan (Ha)	1.866.000.000 1.300	Dinas Kehutana Dinas Kehutana Dinas Kehutana



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Tahun 2025	Ket
	Luas rehabilitasi hutan dan lahan dengan pemanfaatan bibit oleh masyarakat dan penanaman oleh stakeholder lainnya (Ha)	1.130	Dinas Kehutanar
	Luas hutan dan lahan yang direhabilitasi (Ha)	1.130	Dinas Kehutanar
	Luas hutan mangrove yang direhabilitasi (Ha)	65	Dinas Kehutanai
	Energi dan Sumber Daya Mineral	400	Dinas ESDM
2.2.6.	Persentase rumah tangga pengguna listrik (persen)	100	Dinas ESDM Dinas ESDM
2.2.6.1	Persentase desa teraliri listrik (persen)	100	
2.2.6.2 2.2.6.3	Porsi EBT dalam bauran energi primer (persen)	30,51 588-2.250	Dinas ESDM Dinas ESDM
2.2.0.3	Konsumsi listri perkapita (kWh) Intensitas energi primer (SBM/Rp.Miliar)	189	Dinas ESDM Dinas ESDM
	Perdagangan	100	Dirius Lobin
2.2.7.	Nilai Ekspor Bersih Perdagangan (Juta USD)	6.903,07	Disperindag
2.2.7.1	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok (%)	4-6	Disperindag
2.2.7.2	Inflasi pangan bergejolak (%)	5	Dinas Pangan
2.2.7.3	Persentase Kepatuhan Berusaha (Persen)	100	Disperindag
	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen (Persen)	100	Disperindag
220	Perindustrian Nilai alanas produksi industru pan migas (USD miliar)	20	Diamerindae
2.2.8. 2.2.8.1	Nilai ekspor produksi industry non-migas (USD miliar) Jumlah tenaga kerja di sektor industry (juta orang	20 0,138	Disperindag Disperindag
2.2.8.2	Cakupan bina pelaku IKM (persen)	<u>0,136</u> 11-14	Disperindag
2.2.8.3	Transmigrasi	11-17	Disperinag
2.2.9.	Indeks pengembangan kawasan transmigrasi (angka)	62	Disnakertrans
2.2.9.1	Persentase transmigran dalam binaan yang berhasil (persen)	33,32	Disnakertrans
2.2.9.2	Jumlah KK transmigran yang di bina (RT)	2251	Disnakertrans
	Nilai rata-rata indeks perkembangan 100 kawasan transmigrasi prioritas kementrian yang di revitalisasi (Indeks)	46	Disnakertrans
	Nilai rata-rata indeks perkembangan 52 kawasan transmigrasi prioritas Nasional yang di revitalisasi (Indeks)	57,33	Disnakertrans
2.2.9.3	Perikanan Produkti Perikanan (tan)	4 750 070 70	Dinas Kalautan
2.2.10. 2.2.10.1	Produksi Perikanan (ton) Persentase produksi (persen)	1.756.076,78 99,00	Dinas Kelautan Dinas Kelautan
2.2.10.1	- Produksi Perikanan Budidaya	1.316.226,79	Dinas Kelautan Dinas Kelautan
	- Produksi Perikanan Tangkap	253.705,54	Dinas Kelautan
	Produksi Perikanan yang diolahan (Kg)	3.380,89	Dinas Kelautan
2.2.10.1	Konsumsi Ikan (Kg / Kap /Thn)	70,43	Dinas Kelautan
2.2.10.2	Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB (ADH Berlaku, %)	5,11	Dinas Kelautan
2.2.10.3	Cakupan Bina Kelompok Nelayan (persen)	87,46	Dinas Kelautan
2.2.10.4	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan (ton)	0,29	Dinas Kelautan
2.2.10.5	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (persen)	< 60%	Dinas Kelautan
2.2.10.6	Nilai Tukar Nelayan	109,63	Dinas Kelautan
0.0.40.7	Nilai Tukar Pembudidaya	101,51	Dinas Kelautan dan Perikanan
2.2.10.7	Penanganan kasus pelanggaran bidang kelautan dan perikanan (kasus)	90	Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan
2.2.10.6	Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan (%)	83	dan Perikanan
	Produksi Garam (Ton)	160	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Jumlah Hari Operasi Pengawasan SDKP (hari Operasi)	350	Dinas Kelautan dan Perikanan
2.2.10.9	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial (angka)	21,85	Dinas Kelautan dan Perikanan
2.2.10.10	Kawasan Konservasi daerah yang operasional (Ha)	1.344.013,32	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir (Provinsi)	1	Dinas Kelautan dan Perikanan
2.3	Urusan Penunjang		
2.3.1	Perencanaan Pembangunan		
2.3.1.1	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional/Daerah Provinsi Sulteng	81-90	Bappeda



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Tahun 2025	Ket
2.3.1.1.1	Persentase keselarasan dan kesesuaian rencana pembanguna daerah sesuai dengan standar IPPN/D	82	Bappeda
2.3.2.	Keuangan		
2.3.2.1	Kategori Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Baik	BPKAD
2.3.2.2	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	BPKAD
2.3.2.3	Kontribusi PAD terhadap total pendapatan (persen)	40,54	BPKAD
	Return on Asset (RoA) BUMD (persen)	2,26	BPKAD
	Asset dana pensiun/PDRB (persen)	0,04	BPKAD
	Total kredit/PDRB	85,05	BPKAD
2.3.3.	Kepegawaian dan Diklat		
2.3.3.1	Indeks profesionalitas ASN (angka)	81-90	Biro Organisas
2.3.3.2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (persen)	37.38	BPSDM
2.3.3.3	Persentase Pejabat ASN yang telah manejerial (persen)	79.00	BPSD
2.3.4.	Penelitian dan pengembangan		
2.3.4.1	Persentase implementasi rencana kelitbangan. (persen)	100	BRIDA
2.3.4.2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan. (persen)	100	BRIDA
2.3.4.3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah. (persen)	100	BRIDA
2.3.4.4	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah. (persen)	100	BRIDA
2.3.5	Pengawasan		
1.3.5.1	Persentase nilai SAKIP perangkat daerah dengan kategori A	100	Inspektorat
1.3.5.1	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP)	3.60	Inspektorat
1.3.3.2	Indeks integritas nasional	70,58	Inspektorat
2.3.6	Kesekretariatan Daerah	70,30	пъректогат
2.3.6.1	Status Kinerja LPPD	Tinggi	Biro
		C.F.	Pemerintahan
2.3.6.2	Indeks Kualitas Kebijakan	65	
2.3.6.3	MoU (Perjanjian kerja sama)	18	
2.3.6.4	Indeks kepatuhan terhadap standar pelayanan publik	99,90	
2.3.6.5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Jumlah kajian akademik persiapan DOB (dokumen)	90,00	
2.3.0.0	Indeks kepemimpinan daerah	60-79	
2.3.7	Sekwan	00-13	
2.3.7.1	Indeks Kepuasan Layanan Dprd	98	SETWAN
2.3.7.2	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Informasi DPRD	980	SETWAN
2.3.1.2	made replaced mady are an are promised 2. The	900	
	10000		
	ASPEK DAYA SAING		
2.4.1	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah		
2.4.1 2.4.1.1.		1.254.736	Level 1
2.4.1 2.4.1.1. 2.4.1.2.	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	1.254.736 47,56	Level 1
2.4.1 2.4.1.1. 2.4.1.2.	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Total pengeluaran rumah tangga (Rp)		
2.4.1. 2.4.1.1. 2.4.1.2.	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Total pengeluaran rumah tangga (Rp) Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita (persen)	47,56	Level 1
2.4.1.1. 2.4.1.2. 2.4.1.2. 2.4.1.3.	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Total pengeluaran rumah tangga (Rp) Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita (persen) Total Pengeluaran RT Non Pangan (Rp) Nilai Tukar Petani Gabungan (persen)	47,56 596.762 107,58	Level 1
2.4.1 2.4.1.1. 2.4.1.2. 2.4.1.2. 2.4.1.3. 2.4.1.4.	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Total pengeluaran rumah tangga (Rp) Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita (persen) Total Pengeluaran RT Non Pangan (Rp) Nilai Tukar Petani Gabungan (persen) Indeks Inovasi Daerah (kategori)	47,56 596.762 107,58 inovatif	Level 1 Brida
2.4.1 2.4.1.1. 2.4.1.2. 2.4.1.2. 2.4.1.3. 2.4.1.4.	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Total pengeluaran rumah tangga (Rp) Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita (persen) Total Pengeluaran RT Non Pangan (Rp) Nilai Tukar Petani Gabungan (persen) Indeks Inovasi Daerah (kategori) Indeks Daya Saing Daerah (angka)	47,56 596.762 107,58 inovatif 3,43	Level 1 Brida Brida
2.4.1. 2.4.1.1. 2.4.1.2. 2.4.1.2. 2.4.1.3. 2.4.1.4.	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Total pengeluaran rumah tangga (Rp) Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita (persen) Total Pengeluaran RT Non Pangan (Rp) Nilai Tukar Petani Gabungan (persen) Indeks Inovasi Daerah (kategori) Indeks Daya Saing Daerah (angka) Indeks ekonomi hijau daerah	47,56 596.762 107,58 inovatif 3,43 66,16	Level 1 Brida Brida Level 1
2.4.1. 2.4.1.1. 2.4.1.2. 2.4.1.2. 2.4.1.3. 2.4.1.4.	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Total pengeluaran rumah tangga (Rp) Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita (persen) Total Pengeluaran RT Non Pangan (Rp) Nilai Tukar Petani Gabungan (persen) Indeks Inovasi Daerah (kategori) Indeks Daya Saing Daerah (angka) Indeks ekonomi hijau daerah koefisien variasi harga antar wilayah tingkat Provinsi	47,56 596.762 107,58 inovatif 3,43	Level 1 Brida Brida Level 1 Level 1
2.4.1 2.4.1.1. 2.4.1.2. 2.4.1.2. 2.4.1.3. 2.4.1.4. 2.4.1.5.	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Total pengeluaran rumah tangga (Rp) Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita (persen) Total Pengeluaran RT Non Pangan (Rp) Nilai Tukar Petani Gabungan (persen) Indeks Inovasi Daerah (kategori) Indeks Daya Saing Daerah (angka) Indeks ekonomi hijau daerah koefisien variasi harga antar wilayah tingkat Provinsi Persentase pembiayaan inovatif	47,56 596.762 107,58 inovatif 3,43 66,16 7,36	Level 1 Brida Brida Level 1
2.4.1 2.4.1.1. 2.4.1.2. 2.4.1.2. 2.4.1.3. 2.4.1.4. 2.4.1.5.	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Total pengeluaran rumah tangga (Rp) Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita (persen) Total Pengeluaran RT Non Pangan (Rp) Nilai Tukar Petani Gabungan (persen) Indeks Inovasi Daerah (kategori) Indeks Daya Saing Daerah (angka) Indeks ekonomi hijau daerah koefisien variasi harga antar wilayah tingkat Provinsi	47,56 596.762 107,58 inovatif 3,43 66,16 7,36	Level 1 Brida Brida Level 1 Level 1
2.4.1 2.4.1.1. 2.4.1.2. 2.4.1.2. 2.4.1.3. 2.4.1.4. 2.4.1.5.	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Total pengeluaran rumah tangga (Rp) Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita (persen) Total Pengeluaran RT Non Pangan (Rp) Nilai Tukar Petani Gabungan (persen) Indeks Inovasi Daerah (kategori) Indeks Daya Saing Daerah (angka) Indeks ekonomi hijau daerah koefisien variasi harga antar wilayah tingkat Provinsi Persentase pembiayaan inovatif Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	47,56 596.762 107,58 inovatif 3,43 66,16 7,36 5	Level 1 Brida Brida Level 1 Level 1 Level 1 Dinas BMTR Dinas
2.4.1 2.4.1.2. 2.4.1.2. 2.4.1.3. 2.4.1.4. 2.4.1.5. 2.4.2.1 2.4.2.1	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Total pengeluaran rumah tangga (Rp) Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita (persen) Total Pengeluaran RT Non Pangan (Rp) Nilai Tukar Petani Gabungan (persen) Indeks Inovasi Daerah (kategori) Indeks Daya Saing Daerah (angka) Indeks ekonomi hijau daerah koefisien variasi harga antar wilayah tingkat Provinsi Persentase pembiayaan inovatif Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan (angka)	47,56 596.762 107,58 inovatif 3,43 66,16 7,36 5	Level 1 Brida Brida Level 1 Level 1 Level 1 Dinas BMTR Dinas Perhubungan Dinas
2.4.1 2.4.1.1. 2.4.1.2. 2.4.1.2. 2.4.1.3. 2.4.1.4. 2.4.1.5. 2.4.2.1 2.4.2.1	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Total pengeluaran rumah tangga (Rp) Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita (persen) Total Pengeluaran RT Non Pangan (Rp) Nilai Tukar Petani Gabungan (persen) Indeks Inovasi Daerah (kategori) Indeks Daya Saing Daerah (angka) Indeks ekonomi hijau daerah koefisien variasi harga antar wilayah tingkat Provinsi Persentase pembiayaan inovatif Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan (angka) Jumlah arus penumpang angkutam umum (kapal laut) (orang) Jumlah orang melalui dermaga/bandara/terminal pertahun (jiwa)	47,56 596.762 107,58 inovatif 3,43 66,16 7,36 5 0,01 104.013 97.019	Level 1 Brida Brida Level 1 Level 1 Level 1 Dinas BMTR Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan
2.4.1 2.4.1.1. 2.4.1.2. 2.4.1.2. 2.4.1.3. 2.4.1.4. 2.4.1.5. 2.4.2 2.4.2.1 2.4.2.2 2.4.2.3	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Total pengeluaran rumah tangga (Rp) Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita (persen) Total Pengeluaran RT Non Pangan (Rp) Nilai Tukar Petani Gabungan (persen) Indeks Inovasi Daerah (kategori) Indeks Daya Saing Daerah (angka) Indeks ekonomi hijau daerah koefisien variasi harga antar wilayah tingkat Provinsi Persentase pembiayaan inovatif Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan (angka) Jumlah arus penumpang angkutam umum (kapal laut) (orang) Jumlah orang melalui dermaga/bandara/terminal pertahun (jiwa) Indeks Wiliamson	47,56 596.762 107,58 inovatif 3,43 66,16 7,36 5 0,01 104.013	Level 1 Brida Brida Level 1 Level 1 Level 1 Dinas BMTR Dinas Perhubungan Dinas
2.4.1 2.4.1.1. 2.4.1.2. 2.4.1.2. 2.4.1.3. 2.4.1.4. 2.4.1.5. 2.4.2 2.4.2.1 2.4.2.2 2.4.2.3	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Total pengeluaran rumah tangga (Rp) Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita (persen) Total Pengeluaran RT Non Pangan (Rp) Nilai Tukar Petani Gabungan (persen) Indeks Inovasi Daerah (kategori) Indeks Daya Saing Daerah (angka) Indeks ekonomi hijau daerah koefisien variasi harga antar wilayah tingkat Provinsi Persentase pembiayaan inovatif Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan (angka) Jumlah arus penumpang angkutam umum (kapal laut) (orang) Jumlah orang melalui dermaga/bandara/terminal pertahun (jiwa) Indeks Wiliamson Fokus Iklim Berinvestasi	47,56 596.762 107,58 inovatif 3,43 66,16 7,36 5 0,01 104.013 97.019 1,45	Level 1 Brida Brida Level 1 Level 1 Level 1 Dinas BMTR Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan
2.4.1 2.4.1.1. 2.4.1.2. 2.4.1.2. 2.4.1.3. 2.4.1.4. 2.4.1.5. 2.4.2 2.4.2.1 2.4.2.2 2.4.2.3 2.4.3.1	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Total pengeluaran rumah tangga (Rp) Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita (persen) Total Pengeluaran RT Non Pangan (Rp) Nilai Tukar Petani Gabungan (persen) Indeks Inovasi Daerah (kategori) Indeks Daya Saing Daerah (angka) Indeks ekonomi hijau daerah koefisien variasi harga antar wilayah tingkat Provinsi Persentase pembiayaan inovatif Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan (angka) Jumlah arus penumpang angkutam umum (kapal laut) (orang) Jumlah orang melalui dermaga/bandara/terminal pertahun (jiwa) Indeks Wiliamson Fokus Iklim Berinvestasi Angka kriminalitas (kasus)	47,56 596.762 107,58 inovatif 3,43 66,16 7,36 5 0,01 104.013 97.019 1,45	Level 1 Brida Brida Level 1 Level 1 Level 1 Dinas BMTR Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan
2.4.1 2.4.1.1. 2.4.1.2. 2.4.1.2. 2.4.1.3. 2.4.1.4. 2.4.1.5. 2.4.2 2.4.2.1 2.4.2.2 2.4.2.3 2.4.3.1	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Total pengeluaran rumah tangga (Rp) Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita (persen) Total Pengeluaran RT Non Pangan (Rp) Nilai Tukar Petani Gabungan (persen) Indeks Inovasi Daerah (kategori) Indeks Daya Saing Daerah (angka) Indeks ekonomi hijau daerah koefisien variasi harga antar wilayah tingkat Provinsi Persentase pembiayaan inovatif Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan (angka) Jumlah arus penumpang angkutam umum (kapal laut) (orang) Jumlah orang melalui dermaga/bandara/terminal pertahun (jiwa) Indeks Wiliamson Fokus Iklim Berinvestasi Angka kriminalitas (kasus) Rasio Ekspor + Impor/ pdrb(indiktor keterbukaan ekonomi) (angka)	47,56 596.762 107,58 inovatif 3,43 66,16 7,36 5 0,01 104.013 97.019 1,45 3.847 1,12	Level 1 Brida Brida Level 1 Level 1 Level 1 Dinas BMTR Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan
2.4.1 2.4.1.1. 2.4.1.2. 2.4.1.2. 2.4.1.3. 2.4.1.4. 2.4.1.5. 2.4.2 2.4.2.1 2.4.2.2 2.4.2.3	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Total pengeluaran rumah tangga (Rp) Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita (persen) Total Pengeluaran RT Non Pangan (Rp) Nilai Tukar Petani Gabungan (persen) Indeks Inovasi Daerah (kategori) Indeks Daya Saing Daerah (angka) Indeks ekonomi hijau daerah koefisien variasi harga antar wilayah tingkat Provinsi Persentase pembiayaan inovatif Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan (angka) Jumlah arus penumpang angkutam umum (kapal laut) (orang) Jumlah orang melalui dermaga/bandara/terminal pertahun (jiwa) Indeks Wiliamson Fokus Iklim Berinvestasi Angka kriminalitas (kasus) Rasio Ekspor + Impor/ pdrb(indiktor keterbukaan ekonomi) (angka) Indeks reformasi hukum Proposi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	47,56 596.762 107,58 inovatif 3,43 66,16 7,36 5 0,01 104.013 97.019 1,45	Level 1 Brida Brida Level 1 Level 1 Level 1 Dinas BMTR Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan
2.4.1 2.4.1.2. 2.4.1.2. 2.4.1.3. 2.4.1.4. 2.4.1.5. 2.4.2 2.4.2.1 2.4.2.3 2.4.3.1 2.4.3.1	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Total pengeluaran rumah tangga (Rp) Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita (persen) Total Pengeluaran RT Non Pangan (Rp) Nilai Tukar Petani Gabungan (persen) Indeks Inovasi Daerah (kategori) Indeks Daya Saing Daerah (angka) Indeks ekonomi hijau daerah koefisien variasi harga antar wilayah tingkat Provinsi Persentase pembiayaan inovatif Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan (angka) Jumlah arus penumpang angkutam umum (kapal laut) (orang) Jumlah orang melalui dermaga/bandara/terminal pertahun (jiwa) Indeks Wiliamson Fokus Iklim Berinvestasi Angka kriminalitas (kasus) Rasio Ekspor + Impor/ pdrb(indiktor keterbukaan ekonomi) (angka) Indeks reformasi hukum Proposi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (persen)	47,56 596.762 107,58 inovatif 3,43 66,16 7,36 5 0,01 104.013 97.019 1,45 3.847 1,12 50,55 - 62,0	Level 1 Brida Brida Level 1 Level 1 Level 1 Dinas BMTR Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan
2.4.1 2.4.1.1. 2.4.1.2. 2.4.1.2. 2.4.1.3. 2.4.1.4. 2.4.1.5. 2.4.2 2.4.2.1 2.4.2.2 2.4.2.3	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Total pengeluaran rumah tangga (Rp) Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita (persen) Total Pengeluaran RT Non Pangan (Rp) Nilai Tukar Petani Gabungan (persen) Indeks Inovasi Daerah (kategori) Indeks Daya Saing Daerah (angka) Indeks ekonomi hijau daerah koefisien variasi harga antar wilayah tingkat Provinsi Persentase pembiayaan inovatif Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan (angka) Jumlah arus penumpang angkutam umum (kapal laut) (orang) Jumlah orang melalui dermaga/bandara/terminal pertahun (jiwa) Indeks Wiliamson Fokus Iklim Berinvestasi Angka kriminalitas (kasus) Rasio Ekspor + Impor/ pdrb(indiktor keterbukaan ekonomi) (angka) Indeks reformasi hukum Proposi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	47,56 596.762 107,58 inovatif 3,43 66,16 7,36 5 0,01 104.013 97.019 1,45 3.847 1,12 50,55 - 62,0	Level 1 Brida Brida Level 1 Level 1 Level 1 Dinas BMTR Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan





BAB VIII PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 merupakan pelaksanaan tahun terakhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026. Tema pembangunan RKPD Tahun 2025 adalah "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi inklusif dan Berkelanjutan yang Ditunjang oleh SDM yang Berdaya Saing".

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Pelaksanaan kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun kerangka investasi pemerintah daerah dan pelayanan umum, mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam instansi dan antar instansi, dan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing perangkat daerah serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, telah dilaksanakan proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang, seperti Musrenbang Daerah Kabupaten/Kota, Rapat Koordinasi Pusat (Rakorpus), Musrenbang Provinsi dan Musrenbang Nasional (Musrenbangnas). RKPD Tahun 2025 merupakan acuan bagi perangkat daerah dan pemerintah Kabupaten/Kota maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga dapat tercapai sinergi dalam peaksanaan program pembangunan.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu ditetapkan beberapa kaidah pelaksanaan RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 sebagai berikut:

 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), serta masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program RKPD Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya;



- 2. RKPD Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi antar pelaku pembangunan untuk menjamin efektivitas dan efesiensi pelaksanaan;.
- Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi, integrasi dan sinergitas pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka koordinasi perencanaan, maka masing-masing Perangkat daerah perlu menyesuaikan Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dengan mempedomani RKPD Tahun 2024;
- 4. RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 merupakan pedoman penyusunan dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-APBD) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025;
- 5. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan atas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan yang tercantum dalam RKPD Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 wajib dilaksanakan oleh seluruh kepala perangkat daerah dan bupati/walikota dengan tujuan untuk: (a) memastikan tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan; (b) memastikan penggunaan sumber daya yang efisien dan efektif, akuntabel dan partisipatif; serta; (c)melakukan pelaporan atas perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang menjadi kewenangan kepada gubernur dan masyarakat umum, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Masyarakat dan dunia usaha wajib berperan serta seluas-luasnya dalam pelaksanaan program-program pembangunan, dengan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025;
- 7. Gubernur melalui Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, mengevaluasi pelaksanaan RKPD berdasarkan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah secara berkala, untuk selanjutnya menjadi bahan Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 (jika dilakukan perubahan);
- 8. Kepala Bappeda melakukan evaluasi hasil di akhir tahun pelaksanaan RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 yang selanjutnya menjadi bahan bagi penyusunan RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025;



9. RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahun 2025.

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

H. RUSDY MASTURA

